



PEMERINTAH  
KOTA MATARAM



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 - 2026



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MATARAM TAHUN 2021- 2026

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);
34. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 8);



36. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Sasaran adalah rumusan secara terukur dalam rangka tercapainya tujuan rencana Pembangunan Daerah.
17. Strategi adalah langkah-langkah yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
19. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa, untuk pencapain hasil (*outcome*) dari suatu program.
20. Indikator adalah alat ukur dari suatu kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (*impact*).
21. Kinerja adalah hasil kerja atau tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan, program, atau sasaran.



22. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan nasional.
23. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
25. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK atau yang lebih dikenal dengan *Key Performance Indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *Key Succes Indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
29. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

#### Pasal 2

- (1) RPJMD sebagai sebuah dokumen perencanaan disusun berdasarkan asas :
  - a. transparan;
  - b. responsif;
  - c. efisien;
  - d. efektif;
  - e. akuntabel;
  - f. partisipatif;



- g. terukur;
  - h. berkeadilan; dan
  - i. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

### Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk :

- a. menjabarkan Visi, Misi Walikota sesuai dengan tujuan, sasaran pembangunan dan program prioritas Daerah;
- b. mengintegritaskan, mensinkronisasikan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, serta mensinergikan dokumen perencanaan antar Perangkat Daerah;
- c. menjadi acuan penyusunan reencana strategis perangkat daerah; dan
- d. menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah dan Perangkat Daerah.

## BAB II

### DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026

### Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan;
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	Gambaran Keuangan Kota Mataram;
BAB IV	Permasalahan dan Isu Strategis Kota Mataram;
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kota Mataram;
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
BAB IX	Penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Mataram tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Daerah, mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.

Bagian Kedua  
Pengendalian dan Evaluasi Rentra Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepada BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.



- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Ketiga  
Pengendalian dan Evaluasi  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penyusunan RPJMD mempedomani Peraturan Daerah tentang RPJPD, Peraturan Daerah tentang RTRW dan Peraturan Daerah tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Mataram 2005-2025 dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yang berlaku.
- (2) Walikota pada tahun terakhir pemerintahan, wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama pemerintahan Walikota berikutnya.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
WALIKOTA MATARAM,



Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 27 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI ERO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI B

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT, NOMOR 32 TAHUN 2021.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Kota Mataram merupakan dokumen perencanaan Kota Mataram untuk periode lima tahun perencanaan yaitu tahun 2021-2026 sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2021-2026. RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Visi Misi Walikota, Hasil Evaluasi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penelaahan terhadap RTRW Kota.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional yang masih berlaku, RPJPD Kota, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi serta penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah pada setiap tahunnya.

Berdasarkan perodesasi RPJPD Kota Mataram tahun 2005-2025, dimana periode RPJMD yang lalu sudah berakhir pada tahun 2021, dan Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum Kepala Daerah sudah dilantik pada bulan Februari 2021. Walikota dan Wakil Walikota periode masa jabatan 2021-2026 belum memiliki dokumen RPJMD yang dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dalam upaya mewujudkan Visi Misi yang telah disampaikan pada sidang Paripurna DPRD.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Transparan" adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rensponsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Efisien” merupakan pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efektif” merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling normal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan dan marginal, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.



- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026. Meskipun proses ini diselesaikan di tengah situasi pandemi Covid-19, namun Perda RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 berhasil diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dengan telah terpilih dan dilantiknnya kami sebagai Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-253 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka melekat kewajiban bagi kami untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Sehingga, untuk itulah RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 disusun melalui serangkaian tahapan dan pendekatan untuk menjaring tanggapan, masukan,

---





dan kritisi dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka sinergitas harmonisasi, keselarasan, transparansi, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Secara umum, RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 merupakan pengejawantahan visi "**Menuju Mataram yang HARUM: Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri**". Melalui Perda RPJMD Tahun 2021-2026 ini, kami telah memiliki pedoman, arah dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan program-program pembangunan di Kota Mataram. *Insy Allah*, kami selalu berikhtiar untuk melanjutkan keberhasilan pembangunan dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas demi kesejahteraan masyarakat Kota Mataram secara merata dan berkesinambungan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas berpartisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan bathin kepada kita untuk melaksanakan pengabdian serta tanggungjawab yang baik kepada Kota Mataram yang kita cintai ini.

Mataram, 22 September 2021

**WALIKOTA MATARAM,**

**H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos, M.H**

---



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR GRAFIK .....	xiii
<b>Bab I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>I – 1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	I – 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	I – 3
1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN .....	I – 6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I – 18
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	I – 18
<b>Bab II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II – 1</b>
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....	II – 1
2.1.1 Aspek Geografi .....	II – 1
2.1.2 Aspek Demografi .....	II – 21
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	II – 26
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II – 26
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II – 37
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II – 41
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM .....	II – 43
2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	II – 43
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	II – 65
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II – 94
2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II – 99
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH .....	II – 116
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II – 116
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II – 117
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .....	II – 122
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .....	II – 125
2.5 HASIL EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN .....	II – 127
2.5.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD .....	II – 127
2.5.2 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mataram .....	II – 141



	2.5.3 Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	II – 160
	2.6 ISU PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG .....	II – 225
	2.7 ISU PENGEMBANGAN SPASIAL WILAYAH .....	II – 227
	2.8 ISU LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS RPJMD 2021-2026) .....	II – 231
<b>Bab III</b>	<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III – 1</b>
	3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU .....	III – 1
	3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III – 2
	3.1.2 Neraca Daerah .....	III – 21
	3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU .....	III – 28
	3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III – 32
	3.2.2 Analisis Pembiayaan .....	III – 36
	3.3 KERANGKA PENDANAAN .....	III – 40
	3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....	III – 41
	3.3.2 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .....	III – 54
	3.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran.....	III – 56
	3.4 SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA .....	III – 56
<b>Bab IV</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>IV – 1</b>
	4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....	IV – 1
	4.1.1 Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	IV – 1
	4.1.2 Fokus Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup .....	IV – 7
	4.1.3 Fokus Pengembangan Ekonomi Wilayah .....	IV – 16
	4.1.4 Fokus Kondusifitas Wilayah .....	IV – 21
	4.1.5 Fokus Tata Kelola Pemerintahan .....	IV – 22
	4.2 ISU STRATEGIS .....	IV – 29
	4.2.1 Isu Internasional/Global .....	IV – 29
	4.2.2 Isu Nasional .....	IV – 34
	4.2.3 Isu Provinsi .....	IV – 41
	4.2.4 Isu Wilayah Perbatasan .....	IV – 46
	4.2.5 Isu Strategis Pembangunan Kota Mataram .....	IV – 47
<b>Bab V</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V – 1</b>
	5.1 VISI .....	V – 1
	5.2 MISI .....	V – 2
	5.3 TUJUAN DAN SASARAN .....	V – 4



Bab VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI – 1
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI – 1
6.2	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI – 3
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI – 4
Bab VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VII – 1
Bab VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....	VIII – 1
Bab IX	PENUTUP .....	IX – 1



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Tujuan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB dan Perumusan Misi KDH Terpilih Kota Mataram Tahun 2021-2024 .....	I – 9
Tabel 1.2	Indikasi Program Utama RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 di PJM III .....	I – 12
Tabel 1.3	Keterkaitan Isu Lingkungan Hidup Strategis/Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan terhadap Misi Pembangunan Kota Mataram .....	I – 15
Tabel 1.4	Penelaahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 .....	I – 17
Tabel 2.1	Jumlah Kelurahan, Lingkungan, dan RT di Kota Mataram Tahun 2020 .....	II – 1
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kota Mataram .....	II – 5
Tabel 2.3	Kemiringan Wilayah Kota Mataram .....	II – 6
Tabel 2.4	Keadaan Iklim di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 9
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 ....	II – 10
Tabel 2.6	Indikator Kependudukan Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 21
Tabel 2.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 22
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 22
Tabel 2.9	Nilai dan Distribusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 .....	II – 28
Tabel 2.10	Nilai dan Distribusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2020 .....	II – 30
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Menurut Komponen Tahun 2016 -2020 .....	II – 38
Tabel 2.12	Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 41
Tabel 2.13	APK untuk SD/Setara dan SMP/Setara di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 45
Tabel 2.14	APM untuk SD/Setara dan SMP/Setara di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 46
Tabel 2.15	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020 .....	II – 46
Tabel 2.16	Persentase Kelulusan Siswa SD dan Siswa SMP di Kota	



	Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 47
Tabel 2.17	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 50
Tabel 2.18	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 54
Tabel 2.19	Persentase Kualitas Jalan Kota Mataram Tahun 2016 – 2020 .....	II – 55
Tabel 2.20	Rasio Panjang Jalan Kota dengan Jumlah Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 55
Tabel 2.21	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 56
Tabel 2.22	Persentase Irigasi Kota di Kota Mataram dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020 .....	II – 57
Tabel 2.23	Persentase Kondisi Jembatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 57
Tabel 2.24	Persentase <i>Backlog</i> Rumah Di Kota Mataram Tahun 2016-2020	II – 60
Tabel 2.25	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram .....	II – 62
Tabel 2.26	Capaian Indikator Layanan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 63
Tabel 2.27	Indikator Kinerja Urusan Wajib Sosial di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 64
Tabel 2.28	Indikator Pendukung Urusan Wajib Sosial di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 65
Tabel 2.29	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 68
Tabel 2.30	Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 69
Tabel 2.31	Rasio KDRT di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 69
Tabel 2.32	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020.....	II – 70
Tabel 2.33	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020.....	II – 71
Tabel 2.34	Persentase Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 72
Tabel 2.35	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 73
Tabel 2.36	Sarana Persampahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 74
Tabel 2.37	Prasarana Persampahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 75
Tabel 2.38	Persentase Volume Sampah Tertangani di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 75
Tabel 2.39	Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 76
Tabel 2.40	Persentase RTH di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 77



Tabel 2.41	Persentase Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 79
Tabel 2.42	Rasio Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2016-2020.....	II – 79
Tabel 2.43	Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 80
Tabel 2.44	Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 80
Tabel 2.45	Persentase Akseptor KB di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 81
Tabel 2.46	Capaian indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 81
Tabel 2.47	Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 82
Tabel 2.48	Kejadian dan Korban Kecelakaan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 83
Tabel 2.49	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 84
Tabel 2.50	Persentase Koperasi Aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 85
Tabel 2.51	Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 86
Tabel 2.52	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 86
Tabel 2.53	Investasi Berdasarkan Sektor di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 87
Tabel 2.54	Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	II – 90
Tabel 2.55	Persentase ketersediaan Data statistik sektoral yang mutakhir Di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 91
Tabel 2.56	Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE) Di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 91
Tabel 2.57	Indikator Urusan Wajib Perpustakaan.....	II – 93
Tabel 2.58	Indikator Urusan Wajib Kearsipan.....	II – 93
Tabel 2.59	Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 95
Tabel 2.60	Produksi Perikanan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 95
Tabel 2.61	Indikator Urusan Kepariwisata di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 96
Tabel 2.62	Indikator Urusan Pertanian di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 96
Tabel 2.63	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 98



Tabel 2.64	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 99
Tabel 2.65	Penilaian Evaluasi SAKIP di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 99
Tabel 2.66	Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 101
Tabel 2.67	Capaian Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mataram Tahun 2016 – 2020.....	II – 102
Tabel 2.68	Daftar Perangkat Daerah yang Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	II – 103
Tabel 2.69	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 104
Tabel 2.70	Nilai Kematangan Organisasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 104
Tabel 2.71	Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 105
Tabel 2.72	Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 106
Tabel 2.73	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai Target Kinerja di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 106
Tabel 2.74	Rekapitulasi eMPBM Hasil Usulan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	II – 108
Tabel 2.75	Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 109
Tabel 2.76	Persentase belanja pendidikan (20%) di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 109
Tabel 2.77	Persentase belanja kesehatan (10%) di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 109
Tabel 2.78	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 110
Tabel 2.79	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 110
Tabel 2.80	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 111
Tabel 2.81	Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 111
Tabel 2.82	Layanan Administrasi Kepegawaian.....	II – 112
Tabel 2.83	Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Mataram Tahun 2017-2020.....	II – 114
Tabel 2.84	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 116

Tabel 2.85	Aksesibilitas di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 117
Tabel 2.86	Penataan Wilayah di Kota Mataram Tahun 2019-2020.....	II – 118
Tabel 2.87	Fasilitas Bank dan Non Bank di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 119
Tabel 2.88	Ketersediaan Air Bersih di Kota Mataram Tahun 2016-2020	II – 120
Tabel 2.89	Jumlah Pelanggan Listrik dan Jumlah Listrik Terjual di Wilayah Usaha NTB Sektor Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 120
Tabel 2.90	Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 121
Tabel 2.91	Ketersediaan Penginapan di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 122
Tabel 2.92	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 122
Tabel 2.93	Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 123
Tabel 2.94	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 125
Tabel 2.95	Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kota Mataram Periode Pelaksanaan tahun 2016-2021.....	II – 128
Tabel 2.96	Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II – 134
Tabel 2.97	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mataram.....	II – 141
Tabel 2.98	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Mataram.....	II – 160
Tabel 2.99	Program Utama RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 di PJM III.....	II – 229
Tabel 2.100	Isu Lingkungan Hidup Strategis / Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram.....	II – 231
Tabel 3.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 3
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 4
Tabel 3.3	Capaian Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 6
Tabel 3.4	Capaian PAD Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 7
Tabel 3.5	Capaian PAD per Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020 .....	III – 8
Tabel 3.6	Capaian Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 10
Tabel 3.7	Capaian Dana Perimbangan per Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020 .....	III – 10
Tabel 3.8	Capaian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III – 12



	Tahun 2016-2020 .....	
Tabel 3.9	Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Per Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020 .....	III – 12
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 14
Tabel 3.11	Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 .....	III – 15
Tabel 3.12	Capaian Belanja Tidak Langsung per Jenis Belanja Tahun 2016-2020 .....	III – 16
Tabel 3.13	Capaian Realisasi Belanja Langsung Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 18
Tabel 3.14	Capaian Belanja Langsung per Jenis Belanja Tahun 2016-2020 .....	III – 18
Tabel 3.15	Capaian Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 20
Tabel 3.16	Capaian Pembiayaan Daerah per Jenis Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 .....	III – 20
Tabel 3.17	Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2016-2020 .....	III – 21
Tabel 3.18	Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 – 2020 .....	III – 22
Tabel 3.19	Rata-rata Pertumbuhan Komponen Aset Lancar Tahun 2016-2020 .....	III – 24
Tabel 3.20	Rata-rata Pertumbuhan Komponen Aset Tetap Tahun 2016-2020 .....	III – 25
Tabel 3.21	Rata-rata Pertumbuhan Komponen Aset Tetap Tahun 2016-2020 .....	III – 25
Tabel 3.22	Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2016-2020 .....	III – 27
Tabel 3.23	Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2016-2020 .....	III – 27
Tabel 3.24	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 32
Tabel 3.25	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 33
Tabel 3.26	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 34
Tabel 3.27	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 35
Tabel 3.28	Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 37
Tabel 3.29	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Mataram ...	III – 38
Tabel 3.30	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 39

Tabel 3.31	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 40
Tabel 3.32	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 .....	III – 40
Tabel 3.33	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 .....	III – 40
Tabel 3.34	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2020 .....	III – 41
Tabel 3.35	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	III – 45
Tabel 3.36	Proyeksi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	III – 49
Tabel 3.37	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	III – 53
Tabel 3.38	Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 54
Tabel 3.39	Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	III – 55
Tabel 3.40	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022-2026 .....	III – 55
Tabel 4.1	Analisis Permasalahan Sumber Daya Manusia Kota Mataram .....	IV – 6
Tabel 4.2	Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Mataram .....	IV – 15
Tabel 4.3	Analisis Permasalahan Perekonomian Kota Mataram .....	IV – 19
Tabel 4.4	Analisis Permasalahan Fokus Kondusifitas Wilayah .....	IV – 22
Tabel 4.5	Analisis Permasalahan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan .....	IV – 27
Tabel 4.6	Peluang dan Ancaman dari Isu Global .....	IV – 33
Tabel 4.7	Peluang dan Ancaman dari Isu Nasional .....	IV – 41
Tabel 4.8	Peluang dan Ancaman dari Isu Wilayah Berbatasan .....	IV – 45
Tabel 4.9	Peluang dan Ancaman dari Isu Pembangunan Jangka Panjang .....	IV – 47
Tabel 4.10	Isu Lingkungan Hidup Strategis / Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram.....	IV – 49
Tabel 4.11	Kelemahan dan Kekuatan dari Isu Pengembangan Spasial Wilayah.....	IV – 51
Tabel 4.12	Isu Lingkungan Hidup Strategis / Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram.....	IV – 52
Tabel 5.1	Keterkaitan dan Keselarasan Misi Pembangunan Nasional,	V – 4



	Provinsi NTB, dan Kota Mataram .....	
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan NTB 2019-2023 .....	V – 9
Tabel 5.3	Keterkaitan dan Keselarasan Tujuan Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram .....	V – 12
Tabel 5.4	Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	V – 13
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	VI – 2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	VI – 4
Tabel 6.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	VI – 4
Tabel 6.4	Program Prioritas Kepala Daerah untuk Mewujudkan 10 Asa .....	VI – 8
Tabel 6.5	Program Prioritas Kepala Daerah dalam Arahan Kebijakan Teknis .....	VI – 13
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah sesuai Rekomendasi KLHS RPJMD .....	VI – 20
Tabel 6.7	Program Pembangunan Daerah untuk Adaptasi Perubahan Iklim .....	VI – 41
Tabel 6.8	Operasionalisasi Indikasi Program Utama RTRW ke dalam Program Pembangunan Daerah .....	VI – 43
Tabel 6.9	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah .....	VI – 55
Tabel 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	VII – 2
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Mataram .....	VIII – 1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram Tahun 2021-2026 .....	VIII – 3

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan Pembangunan .....	I – 7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Mataram .....	II – 2
Gambar 2.2	Peta Kelerengan Wilayah Kota Mataram .....	II – 7
Gambar 2.3	Peta Kondisi Geologi Wilayah Kota Mataram .....	II – 8
Gambar 2.4	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kota Mataram .....	II – 9
Gambar 2.5	Peta kondisi Curah Hujan Wilayah Kota Mataram .....	II – 10
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kota Mataram .....	II – 12
Gambar 2.7	Peta Rencana Indikasi Kerawanan Bencana Banjir Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 .....	II – 14
Gambar 2.8	Peta Rencana Indikasi Kerawanan Bencana Tsunami Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 .....	II – 15
Gambar 2.9	Peta Rencana Indikasi Kerawanan Bencana Gempa Wilayah Kota Mataram tahun 2011-2031 .....	II – 16
Gambar 3.1	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	III – 2
Gambar 3.2	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	III – 42
Gambar 3.3	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah .....	III – 43
Gambar 3.4	Analisis Proyeksi Belanja Daerah .....	III – 47
Gambar 3.5	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah .....	III – 50



# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Piramida Penduduk Kota Mataram Tahun 2020 .....	II – 24
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Menurut Agama di Kota Mataram Tahun 2020 .....	II – 25
Grafik 2.3	Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2016-2020 ....	II – 27
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II – 28
Grafik 2.5	Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 31
Grafik 2.6	Indeks Gini Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 33
Grafik 2.7	Indeks Williamson di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 34
Grafik 2.8	Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 35
Grafik 2.9	Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II – 36
Grafik 2.10	Persentase Penduduk Miskin 45 Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020 .....	II – 36
Grafik 2.11	Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan di Kota Mataram, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karang Asem dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020 .....	II – 37
Grafik 2.12	Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2016 – 2020 .....	II – 38
Grafik 2.13	Angka Melek Huruf di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 40
Grafik 2.14	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 40
Grafik 2.15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 44
Grafik 2.16	Angka Melanjutkan SD di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 46
Grafik 2.17	Rasio Guru/Murid dan Rombongan Belajar SD dan SMP/MTs Di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 48
Grafik 2.18	Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SD dan SMP dan Guru Layak Mengajar di Kota Mataram Tahun 2016-2019..	II – 49
Grafik 2.19	Angka Indikator Utama Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 51
Grafik 2.20	Pelayanan Kesehatan Anak di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 52
Grafik 2.21	Pelayanan Kesehatan Ibu di Kota Mataram Tahun 2016-	

	2020 .....	II – 52
Grafik 2.22	Mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 53
Grafik 2.23	Jumlah Penduduk Miskin yang Tercover PBI JKN di Kota Mataram 2016-2020 .....	II – 53
Grafik 2.24	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak dan Cakupan Layanan Air Minum di Kota Mataram Tahun 2016 – 2020 .....	II – 58
Grafik 2.25	Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 58
Grafik 2.26	Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 59
Grafik 2.27	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 60
Grafik 2.28	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	II – 61
Grafik 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2017-2020 .....	II – 66
Grafik 2.30	Indikator Kinerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja di Kota Mataram Tahun 2016-2020 ....	II – 67
Grafik 2.31	Produksi Pangan Utama dan Kebutuhan Pangan Utama di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 71
Grafik 2.32	Persentase Peningkatan Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 73
Grafik 2.33	Jumlah Investasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020 (dalam Miliaran Rupiah).....	II – 89
Grafik 2.34	Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Mataram Tahun 2015-2020.....	II – 89
Grafik 2.35	Produktivitas Padi Per Hektar di Kota Mataram Tahun 2016-2020.....	II – 97
Grafik 2.36	Jumlah Produk Kelitbangan yang di Tindak Lanjuti di Kota Mataram Tahun 2017-2020.....	II – 115
Grafik 2.37	Capaian Per Dimensi Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2017-2020.....	II – 123
Grafik 2.38	Penduduk Usia Produktif di Kota Mataram tahun 2016-2020	II - 125
Grafik 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 .....	III – 5
Grafik 3.2	Rata-rata Pertumbuhan PAD Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 7
Grafik 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 9
Grafik 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah	



	yang Sah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 11
Grafik 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 14
Grafik 3.6	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 15
Grafik 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Langsung Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 18
Grafik 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 20
Grafik 3.9	Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 22
Grafik 3.10	Rata-rata Pertumbuhan Aset Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 24
Grafik 3.11	Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 26
Grafik 3.12	Pertumbuhan Ekuitas Dana Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2020 .....	III – 28

# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dilaksanakan se-Indonesia. Berdasarkan hasil Pilkada serentak tersebut, terpilih pasangan **H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH** dan **TGH. Mujiburrahman** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52-253 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan terpilihnya Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram maka melekat kewajiban menyusun RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan dokumen RPJPD sebagai pedoman penyusunan RPJMD 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut adalah **"Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025"**, dengan 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika
2. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum



3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ
4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing Daerah dalam menghadapi era globalisasi
5. Mewujudkan penyelenggaraan kepemimpinan yang baik
6. Mewujudkan pengelolaan potensi dan sumber keuangan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
7. Mewujudkan pengelolaan potensi SDA berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Mataram terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu: pembangunan lima tahun pertama (2005-2009), pembangunan lima tahun kedua (2010-2014), pembangunan lima tahun ketiga (2015-2019) dan pembangunan lima tahun keempat (2020-2024).

Ada dua penetapan periode RPJMD mengalami perubahan dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan RPJPD Kota Mataram 2005-2025, yaitu:

- Pembangunan lima tahun ketiga (2015-2019) menjadi RPJMD 2016-2021, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPd Tahun 2017.
- Pembangunan lima tahun keempat (2020-2024) menjadi RPJMD 2021-2026, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 menjadi pembangunan lima tahun keempat atau tahap terakhir dari tahapan pembangunan RPJPD Kota Mataram 2005-2025.

Selain berpedoman pada RPJPD, dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 ayat (2) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pembangunan;
3. Pendekatan Politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan menurut jenjang pemerintahan.

Secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD
3. Penyusunan rancangan RPJMD
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
6. Penetapan RPJMD

Seluruh rangkaian tahapan dilakukan untuk menjadikan dokumen RPJMD Kota Mataram 2021-2026 yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian **VISI KOTA MATARAM 2021-2026**, yaitu:

**“TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”**

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);
34. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);



37. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1).

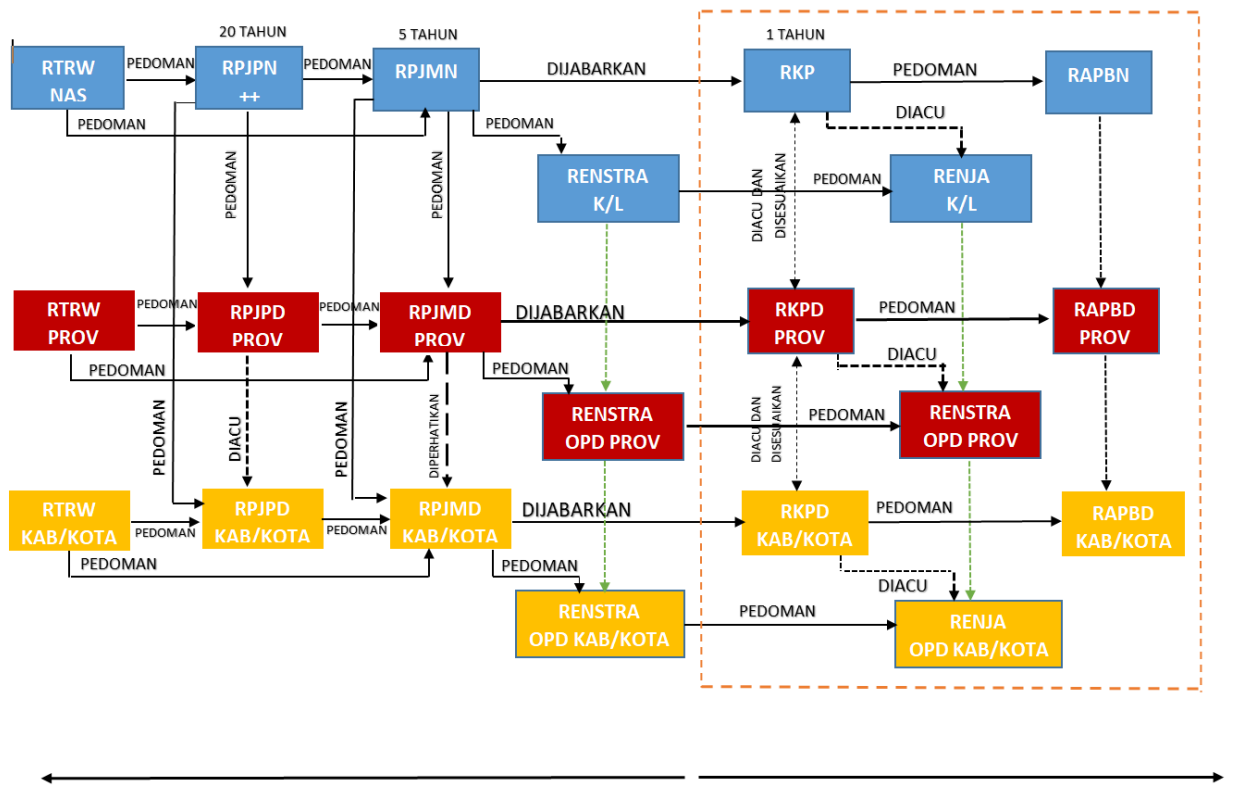
### 1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah lainnya yang berbatasan yaitu RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 dan RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diacu dalam RPJPD Kota Mataram menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram. Selain itu, RPJM Nasional dan RTRW Nasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram.

RPJMD Kota Mataram akan dijabarkan dalam RKPD untuk perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Sementara RPJMD Kota Mataram juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1  
Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan Pembangunan

Secara lebih rinci, hubungan keterkaitan antardokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. **RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN RPJPD KOTA MATARAM TAHUN 2005-2025**

RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, serta program Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu dengan memperhatikan penekanan Pembangunan lima tahun keempat pada RPJPD Kota Mataram yang ditujukan untuk mewujudkan Kota Mataram sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya, Maju dan Religius Tahun 2025 diselaraskan dengan Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, selaras dengan Misi 3: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING serta didukung oleh MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.



- 2) Kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat ditunjukkan dengan makin tinggi dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efektif dan efisiennya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek; meningkatnya derajat kesehatan, (pelayanan kesehatan dan KB) dan status gizi masyarakat; terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, selaras dengan MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
- 3) Sejalan dengan tingkat kemajuan Kota Mataram diiringi dengan menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis serta berorientasi Iptek, selaras dengan MISI 4, MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH serta didukung oleh MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
- 4) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya keberdayaan dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik; terciptanya kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi. Kondisi ini ditunjang dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah lain yang berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen, selaras dengan Misi 3: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING serta didukung oleh MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
- 5) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien yang menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing, selaras dengan Misi 3: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING.
- 6) Pengelolaan potensi sumber daya alam yang dikelola dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan makin berkembang ditandai dengan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan lingkungan hidup serta meningkatnya kesadaran dan kecintaan masyarakat akan arti penting lingkungan hidup, selaras dengan MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.
- 7) Kondisi maju makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan perhubungan, pos dan telematika yang handal, selaras dengan MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.
- 8) Selain itu didukung pula dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan terciptanya sumber daya aparatur serta sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, profesional, bertanggung jawab, (berakhlak dan berbudi luhur) dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel; makin mantapnya pengelolaan potensi dan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel; makin mantapnya peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, selaras dengan MISI 5, MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK.

## 2. RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 DAN RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

Visi dalam RPJMN 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Misi/Nawacita Kedua, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermanfaat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Selanjutnya, substansi 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,

menjadi inti dari rencana pembangunan jangka menengah nasional dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026. Demikian pula dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun RPJMD.

Keterkaitan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu dengan menyelaraskan tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTB dengan Misi Kepala Daerah terpilih Kota Mataram, sebagaimana pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Keterkaitan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Tujuan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB dan Perumusan Misi KDH Terpilih Kota Mataram Tahun 2021-2024

Nasional		Provinsi NTB		Misi Pembangunan Kota Mataram 2021-2026
Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan	MISI 3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING
	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Mengembangkan industri olahan dan permesinan	
			Meningkatnya produksi sektor primer	



Nasional		Provinsi NTB		Misi Pembangunan Kota Mataram 2021-2026
Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	
			Meningkatnya pengembangan <i>Community Based Tourism and Friendly Moslem Tourism</i>	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya pemerataan antarwilayah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur untuk pengembangan sektor unggulan	Meningkatkan konektivitas antarwilayah	MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
	Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah			
	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah			
	Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Terwujudnya Masyarakat NTB yang Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Misi 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
	Terpenuhnya layanan dasar			
	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			
	Terwujudnya pengentasan kemiskinan			
	Meningkatnya produktivitas dan daya saing			
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER
	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			
	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			

Nasional		Provinsi NTB		Misi Pembangunan Kota Mataram 2021-2026	
Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan		
	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa				
	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif				
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Terwujudnya pembangunan infrastruktur untuk pengembangan sektor unggulan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	
	Infrastruktur Ekonomi				
	Infrastruktur untuk mendukung Perkotaan				
	Energi Ketenagalistrikan				
	Transformasi Digital				
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan fungsi ekologi Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Ketahanan Bencana dan Iklim		Meningkatnya pengelolaan Geopark		
	Mewujudkan pembangunan rendah karbon	Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana		
			Pulihnya infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi		
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang Madani	Meningkatnya penegakan produk hukum daerah	MISI 4 MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH	
	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri				
	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap				
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Misi 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional				

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Bappeda Kota Mataram.



### 3. RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN RTRW KOTA MATARAM TAHUN 2011-2031

Integrasi antara dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lebih khusus lagi, dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, menyebutkan bahwa rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas-sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan kebijakan penetapan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Mataram Raya yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kawasan perkotaan ini berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Sejalan dengan penetapan tersebut, dalam RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029, Kota Mataram juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro yang meliputi Kota Mataram dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata. Tujuan penataan ruang Kota Mataram diarahkan untuk:

**“MEWUJUDKAN KOTA PENDIDIKAN, PERDAGANGAN DAN JASA, INDUSTRI SERTA PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN YANG SEIMBANG DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.**

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi NTB. Integrasi rencana tata ruang ke dalam rencana pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan indikasi program utama RTRW Kota Mataram pada periode pembangunan yang sesuai dengan periode RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026, yaitu pembangunan jangka menengah (PJM) III tahun 2021-2024.

Penelaahan terhadap Indikasi Program Utama Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 pada Pembangunan Jangka Menengah (PJM) III bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi program utama yang perlu dioperasionalkan menjadi program pembangunan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 sehingga dapat mewujudkan tujuan penataan ruang. Perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang diharapkan menjadi bagian yang integral dengan perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Mataram.

Adapun hasil penelaahan indikasi program utama RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 pada PJM III diuraikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Indikasi Program Utama RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 di PJM III

NO.	ISU STRATEGIS YANG MENDASARI	INDIKASI PROGRAM RTRW PJM III (2021-2024)
A.	STRUKTUR RUANG	
1.	Menurunnya kualitas fungsi dan peran wilayah Kota Mataram	1.1. Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan Kota <ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalisasi dan/atau penataan kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata</li><li>• Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum (pendidikan dan kesehatan), perkantoran dan pelayanan umum lainnya</li></ul>

NO.	ISU STRATEGIS YANG MENDASARI	INDIKASI PROGRAM RTRW PJM III (2021-2024)
2	Pelayanan angkutan transportasi dalam kota belum optimal	2.1. Pembangunan dan Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>• Implementasi peningkatan/ pelebaran/pemeliharaan jalan dan penyediaan perlengkapan jalan</li> <li>• Pembangunan terminal Tipe C dan penyediaan <i>shelter</i></li> <li>• Pengembangan moda angkutan massal dalam Kota</li> </ul>
3.	Masih kurang optimalnya pelayanan terhadap kebutuhan listrik masyarakat	3.1. Pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Beserta Sarana-Prasarananya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sumber energi baru terbarukan</li> </ul> 3.2. Pengembangan Jaringan Transmisi Beserta Sarana-Prasarananya
4.	Pembangunan sistem telekomunikasi dan informasi belum optimal	4.1. Peningkatan Teknologi Telematika Berbasis Teknologi Modern (Internet, Cloud, dll) 4.2. Pengembangan Area Hotspot pada Fasilitas-Fasilitas Umum
5.	Perlindungan, pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air belum optimal	5.1. Pengaturan pengambilan air tanah dan air permukaan 5.2. Pengembangan jaringan irigasi pada KP2B 5.3. Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air ramah lingkungan 5.4. Penyediaan sarana dan prasaraa pengendalian banjir dan pengamanan pantai
6.	Akses pelayanan air minum belum optimal	6.1. Penambahan jaringan prasarana perpipaan air minum 6.2. pemanfaatan sumur pompa dan sumur bor secara berdaya guna 6.3. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan distribusi 6.4. Penyediaan jaringan distribusi baru 6.5. Penyebaran hidran-hidran umum
7.	Akses sanitasi belum optimal	7.1. Pengelolaan air limbah perpipaan terpusat dan setempat 7.2. Pendayagunaan dan pemeliharaan IPAL Meninting 7.3. Pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan penanganan Limbah B3 7.4. Pengelolaan IPAL komunal berbasis masyarakat dan/atau CSR 7.5. Pengembangan tangki septik dan saluran limbah kolektif dan individu
8.	Pengelolaan sampah belum optimal	8.1. Peningkatan kualitas pelayanan Unit TPST dan Bank Sampah Terpadu Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan 8.2. Pemantapan kerjasama pengelolaan persampahan dengan Kabupaten Lombok Barat
9.	Drainase perkotaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal	9.1. Pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah 9.2. Normalisasi saluran drainase 9.3. Pengembangan drainase sistem polder dalam bentuk kolam-kolam retensi dan lubang resapan biopori
10.	Pelayanan fasilitas pelayanan pejalan kaki dan/ atau pesepeda belum optimal	10.1. Penyediaan dan pemanfaatan pejalan kaki dan/atau pesepeda 10.2. Peningkatan Jaringan Jalan/Trotoar 10.3. Pembangunan Jalur Pejalan Kaki dan/atau pesepeda 10.4. Pembangunan Jalan Inspeksi
<b>B.</b>	<b>POLA RUANG</b>	
1.	Terdesaknya ruang pada kawasan perlindungan setempat	1.1. Pembatasan pembangunan / pengadaan kegiatan baru di sepanjang sungai dan pantai 1.2. Penanaman vegetasi di sepanjang tepi sungai, sempadan pantai, dan daerah sekitar mata air 1.3. Penertiban dan/atau penataan sempadan sungai dan pantai sejauh penetapan garis sempadannya
2.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota serta sulitnya untuk pengadaan lahan bagi RTH	2.1. Pembebasan/akuisisi lahan untuk RTH 2.2. Perancangan dan penanaman vegetasi bernilai estetis dan/atau bernilai ekonomi 2.3. Pengembangan Hutan Kota/Taman Kota, sabuk hijau, taman jalan, dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

NO.	ISU STRATEGIS YANG MENDASARI	INDIKASI PROGRAM RTRW PJM III (2021-2024)
		2.4. Penyediaan RTH privat dan vegetasi pada kawasan perumahan baru, perkantoran, dan sarana pelayanan umum
3.	Adaptasi ruang pada kawasan rawan bencana masih rendah dan dibarengi dengan upaya mitigasi yang belum optimal	3.1. Penyediaan LBR atau ruang resapan pada kawasan bencana 3.2. Penanaman vegetasi pada kawasan rawan banjir dan kawasan pesisir pantai 3.3. Pemantapan/penyediaan ruang terbuka dan bangunan publik sebagai ruang evakuasi bencana
4.	Penurunan kualitas bangunan dan lingkungan atau kurang tertatanya kawasan-kawasan terbangun	4.1. Penataan kawasan permukiman padat kumuh 4.2. Relokasi perkampungan nelayan 4.3. Konsolidasi lahan pengembangan kawasan perumahan 4.4. Penataan kawasan perdagangan dan jasa dengan pola superblock, pasar induk kota, pusat PKL, serta kegiatan sektor informal lainnya 4.5. Penyediaan IPAL Komunal Untuk IRT dan industri menengah 4.6. Penyediaan Prasarana Lingkungan 4.7. Pembebasan dan/atau penyediaan lahan untuk area penyangga ( <i>buffer zone</i> ) 4.8. Konservasi bangunan dan lingkungan binaan di kawasan Kota Tua Ampenan 4.9. Pengembangan Kawasan Wisata dengan Konsep MICE
5.	Penurunan luas / konversi lahan pertanian	5.1. Pemantapan Lahan Pertanian Sebagai Urban-farm Land 5.2. Pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan 5.3. Pengembangan Sistem Pertanian-Perikanan (Mina Padi)

Sumber: Revisi RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, diolah.

#### 4. RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 didasari pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-Perangkat Daerah). Dengan demikian, perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Mataram tahun 2021-2026 didasari pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup strategis bersumber dari hasil analisis isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikaji oleh Tim Penyusun KLHS RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2025 dan tertuang di dalam dokumen KLHS. Isu strategis TPB di Kota Mataram dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.



Tabel 1.3

Keterkaitan Isu Lingkungan Hidup Strategis/Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan terhadap Misi Pembangunan Kota Mataram

NO.	TEMA BESAR ISU	ISU STRATEGIS KLHS	MISI PEMBANGUNAN
<b>A. PILAR SOSIAL</b>			
1	Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER, <i>serta didukung oleh</i> MISI 3, MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING.
		Indeks Pembangunan Manusia	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
2	Pelayanan dasar sanitasi	Fasilitas tempat buang air besar sumber air bersih	MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.
3.	Permukiman kumuh	Permukiman kumuh	MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.
4.	Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER. <i>serta didukung oleh</i> MISI 3, MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING.
5.	Tingkat kesehatan	Fasilitas Kesehatan	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
		Angka Harapan Hidup Pandemi COVID-19	
		Penyakit yang dihadapi masyarakat	
6.	Tingkat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pendidikan</li> <li>• Angka Partisipasi Murni</li> <li>• Angka Partisipasi Kasar</li> </ul>	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
7.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
8.	Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pemberdayaan Gender</li> <li>• Pengembangan Diri Perempuan</li> </ul>	MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
9.	Keamanan dan Ketertiban	Kondusifitas Wilayah	MISI 4, MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH
<b>B. PILAR EKONOMI</b>			
1.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</li> <li>• Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>	MISI 3, MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING.
2.	Pengembangan potensi ekonomi dan daya saing kota	Pengoptimalan pariwisata	MISI 3, MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN BERDAYA SAING.

NO.	TEMA BESAR ISU	ISU STRATEGIS KLHS	MISI PEMBANGUNAN
<b>C. PILAR LINGKUNGAN</b>			
1.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencemaran sungai</li> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>	MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.
2.	Bencana (alam dan non alam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bencana Alam</li> <li>• Bencana non alam pandemi COVID-19</li> </ul>	MISI 4, MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH.
3.	Pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume sampah yang dihasilkan</li> <li>• Volume sampah yang tertangani</li> </ul>	MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.
4.	Tata Ruang Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan pertanian	MISI 2, MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN. serta didukung oleh MISI 1, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER.
<b>E. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN</b>			
2	Tata kelola pemerintah	Reformasi birokrasi SAKIP	MISI 5, MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Mataram, diolah

## 5. RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

## 6. RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Mataram yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota Mataram yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD berpedoman pada RPJMD Kota Mataram, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang turunan dari RPJM Nasional serta memperhatikan RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan penjabaran dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

## 7. RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG BERBATASAN

- **RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024**

Perencanaan pembangunan di Kota Mataram khususnya terkait isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan kondusivitas wilayah tidak dapat berdiri sendiri karena terhubung dengan keberadaan kabupaten yang berbatasan yaitu Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan pembangunan di Kota Mataram terjadi akibat adanya interaksi kegiatan antar wilayah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 memperhatikan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 yaitu dengan menelaah program pembangunan Kabupaten Lombok Barat terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan lingkungan hidup agar menjadi bahan pertimbangan untuk menjalin kerjasama antar daerah dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur dan lingkungan hidup serta menjaga kondusivitas di wilayah perbatasan.

Beberapa program pembangunan Kabupaten Lombok Barat yang berkaitan dengan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan kondusivitas wilayah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Penelaahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024

No	Isu Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026	Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024	Telaahan	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Infrastruktur	Kualitas Infrastruktur perkotaan meningkat	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	Kerjasama dalam penyediaan jaringan jalan yang memadai dan pengembangan transportasi publik.	1. OPD yang mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. OPD yang mengampu Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Perhubungan.
			Program Peningkatan Rumah Layak Huni	Kerjasama dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat mengingat keterbatasan lahan di Kota Mataram untuk pembangunan perumahan baru.	OPD yang mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Permukiman
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kerjasama dalam bidang pengelolaan persampahan, pencegahan pencemaran lingkungan, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau khususnya Tempat	1. OPD yang mengampu Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Lingkungan Hidup. 2. OPD yang mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan



No	Isu Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026	Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024	Telaahan	OPD Penanggung Jawab
				Pemakaman Umum (TPU), dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Umum dan Penataan Ruang.
3	Kondusifitas wilayah	Stabilitas wilayah terkendali	Program Penanggulangan Bencana	Kerjasama dalam penanggulangan bencana alam dan non alam.	OPD yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, Bappeda Kota Mataram, diolah.

- **RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.**

Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan perkotaan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perkotaan Mataram Raya dalam RTRW Nasional yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029, kawasan ini juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro yang meliputi Kota Mataram dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram yaitu Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata.

Penelaahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang bersesuaian terkait pembangunan di wilayah perbatasan pada RTRW masing-masing daerah antara lain pengembangan jaringan jalan penghubung wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, pengembangan transportasi public dan rute/trayek moda angkutan, pengembangan system jaringan transportasi laut, pengembangan system jaringan sumber daya air dan sistem prasarana penyediaan air minum, pengembangan sistem jaringan persampahan, rencana jalur evakuasi bencana, pengembangan RTH Publik, pengembangan Kawasan perumahan, dan pengembangan Kawasan Mataram Metro/Mataram Raya.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Mataram tahun 2021-2026 sebagai acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang serta untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Mataram tahun 2021-2026;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. sebagai panduan dan tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Menyediakan instrumen penyelenggaraan pembangunan, agar menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disajikan dalam 9 (sembilan) bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang dikelompokkan dalam aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Didalam Bab ini juga menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

### BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI KEUANGAN KOTA MATARAM

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.

### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOTA MATARAM

Dalam Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kota Mataram terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan Isu Strategis Kota Mataram Tahun 2021-2026.

### BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi yang kemudian menjadi rumusan Visi dan Misi pembangunan Kota Mataram, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin di akhir tahun RPJMD disertai dengan targetnya.

### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

Menguraikan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai kewenangan pemerintah Kota Mataram. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh Program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, penanggungjawab yang disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan.

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan indikator kinerja pembangunan daerah beserta target capaian indikator kinerja per tahun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## BAB IX PENUTUP



## Bab 2

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. Aspek Geografi

Mataram sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di bagian barat Pulau Lombok, tepatnya diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi yang memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian pada level provinsi.

#### A. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Mataram terdiri dari luas daratan yaitu 61,30 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 1,3 persen dari luas Pulau Lombok dan luas perairan laut sebesar 56,80 km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada posisi 116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

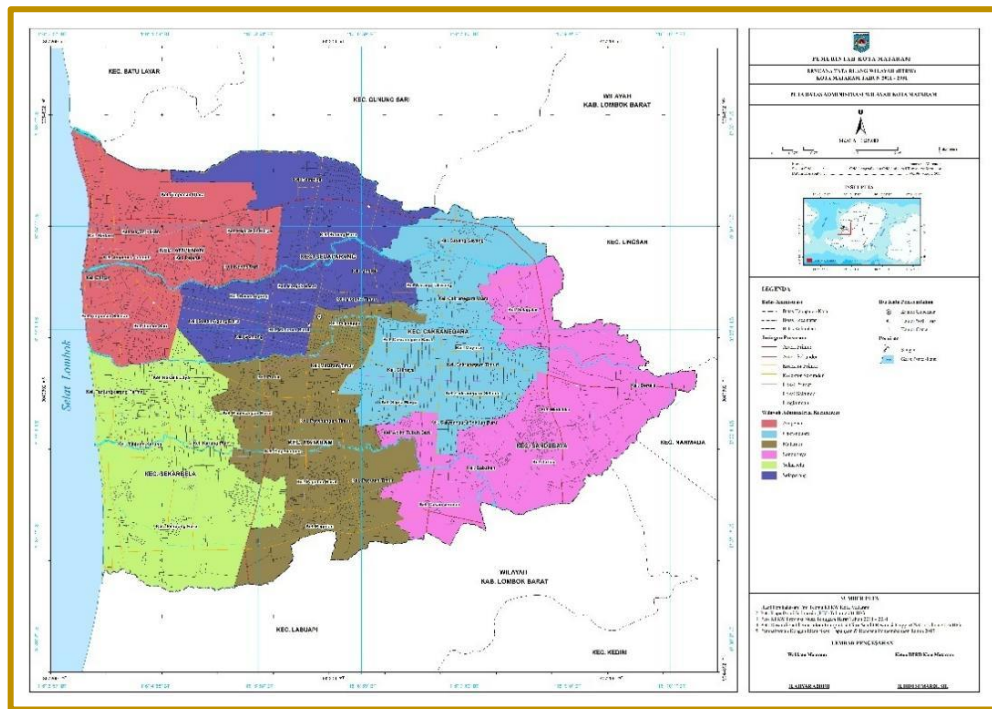
- Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara;
- Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah timur;
- Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat di sebelah selatan; dan
- Selat Lombok di sebelah barat.

Secara administratif, Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan dan 1.673 Rukun Tetangga. Adapun rincian jumlah kelurahan, lingkungan dan jumlah Rukun Tetangga per kecamatan di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Kelurahan, Lingkungan, dan RT di Kota Mataram Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
Ampenan	10	55	302
Sekarbela	5	36	227
Mataram	9	55	295
Selaparang	9	61	286
Cakranegara	10	73	288
Sandubaya	7	45	275
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>325</b>	<b>1.673</b>

Sumber: Statistik Daerah Kota Mataram Tahun 2020



Gambar 2.1.

### Peta Administrasi Wilayah Kota Mataram

Selanjutnya, gambaran umum kondisi kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Mataram dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kecamatan Ampenan



Kecamatan Ampenan yang terletak di bagian barat laut, merupakan kecamatan terkecil dengan luas yang hanya mencapai 9,46 Km<sup>2</sup> atau 15,43 persen dari total luas Kota Mataram dan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan yaitu: Ampenan Selatan (0,84 km<sup>2</sup>), Ampenan Tengah (0,59 km<sup>2</sup>), Ampenan Utara (2,49 km<sup>2</sup>), Banjar (0,41 km<sup>2</sup>), Bintaro (0,82 km<sup>2</sup>), Dayen Peken (0,54 km<sup>2</sup>), Kebon Sari (0,58 km<sup>2</sup>), Pejarakan Karya (0,74 km<sup>2</sup>), Pejeruk (0,85 km<sup>2</sup>), dan Taman

Sari (1,61 km<sup>2</sup>). Kelurahan Ampenan Utara merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas yaitu sekitar 26,32 persen dari luas wilayah kecamatan Ampenan. Ampenan dahulu merupakan pusat kota dan gerbang utama untuk memasuki Pulau Lombok. Sebagai tempat berlabuh para pelaut dari berbagai daerah, Ampenan dikenal sebagai wilayah yang multikultural, terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia di kecamatan tersebut, di antaranya adalah Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, dan Kampung Bali. Pada kecamatan ini terdapat kota tua, sebagai penanda bahwa daerah ini dulunya merupakan kota besar di era kolonial.

## 2) Kecamatan Sekarbela



Kecamatan Sekarbela merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Ampenan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Luas wilayahnya adalah 10,32 km<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Kekalik Jaya (1,35 km<sup>2</sup>), Tanjung Karang Permai (0,68 km<sup>2</sup>), Tanjung Karang (2,57 km<sup>2</sup>), Karang Pule (1,07 km<sup>2</sup>), dan Jempong Baru (4,65 km<sup>2</sup>). Sekarbela dikenal sebagai daerah yang memiliki sentra kerajinan berbahan mutiara nomor satu di Mataram. Sebagian besar warganya bekerja di bidang kerajinan mutiara. Pada kampung mutiara dikawasan Mataram *Craft Centre* Jalan Ahmad Dahlan Pagesangan Kecamatan Sekarbela, terdapat toko-toko yang menampilkan hasil kerajinan mutiara. Mulai dari mutiara air tawar hingga mutiara air laut, mulai dari butiran hingga mutiara yang telah terbalut logam mulia yang berbentuk perhiasan. Selain dapat membeli langsung, para pengunjung juga dapat memesan sesuai keinginan, atau melihat langsung proses pembuatannya.

## 3) Kecamatan Mataram



Mataram merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Mataram, berbatasan dengan Kecamatan Selaparang di sebelah utara, Kecamatan Sekarbela di sebelah selatan dan sebelah barat, dan Kecamatan Sandubaya di sebelah timur. Letaknya antara antara 05°54' dan 08°04' Lintang Selatan dan antara 117°30' - 118°30' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Mataram adalah 10,76 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan yaitu: Pejanggik (1,03 km<sup>2</sup>), Mataram Timur (1,24 km<sup>2</sup>), Pagesangan (1,96 km<sup>2</sup>), Pagesangan Barat (0,75 km<sup>2</sup>), Pagesangan Timur (1,10 km<sup>2</sup>), Pagutan Barat (0,91 km<sup>2</sup>), Pagutan (1,86 km<sup>2</sup>), Pagutan Timur (1,03 km<sup>2</sup>), dan Punia (0,88 km<sup>2</sup>). Kelurahan Pagesangan merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas, yakni sekitar 18,22 persen dari luas wilayah kecamatan. Kota Mataram merupakan Kota Pelajar di Provinsi NTB. Keadaan ini dilihat dari fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Mataram cukup memadai, selain di Kecamatan Selaparang sebagian besar fasilitas pendidikan berada di kecamatan Mataram. Terdapat 8 universitas/akademi, 14 SMA/SMK/ sederajat, 10 SMP/ sederajat, 34 SD/ sederajat dan 19 TK, baik swasta maupun negeri sehingga terdapat banyak pelajar dan mahasiswa yang berasal dari dalam dan luar kota yang tinggal di Mataram untuk melaksanakan pendidikannya.



#### 4) Kecamatan Selaparang



Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Mataram. Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara, Kecamatan Mataram di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ampenan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara. Kecamatan Selaparang memiliki luas wilayah 10,77 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 9 Kelurahan, yaitu: Rembiga (3,15 km<sup>2</sup>), Karang Baru (2,37 km<sup>2</sup>), Monjok Timur (0,37 km<sup>2</sup>), Monjok (1,35 km<sup>2</sup>), Monjok Barat (0,50 km<sup>2</sup>), Mataram Barat (0,69 km<sup>2</sup>), Gomong (0,39 km<sup>2</sup>), Dasan Agung (0,79 km<sup>2</sup>), dan Dasan Agung Baru (1,16 km<sup>2</sup>). Kelurahan Rembiga merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas, yakni sekitar 29,24 persen dari luas wilayah kecamatan. Selaparang diambil dari nama eks Bandar Udara Selaparang, yaitu satu-satunya bandar udara yang ada di Pulau Lombok sebelum Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1995 dan berhenti beroperasi pada tanggal 30 September 2011, dengan panjang landasan pacu 2.100 meter.

#### 5) Kecamatan Cakranegara



Kecamatan Cakranegara berdasarkan RTRW Kota Mataram telah diarahkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya berskala internasional, nasional, regional dan lokal. Kecamatan Cakranegara dengan luas wilayah 9,67 km<sup>2</sup> terletak di antara Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Selaparang. Kecamatan Cakranegara terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu: Cakranegara Barat (0,51 km<sup>2</sup>), Cilinaya (1,29 km<sup>2</sup>), Sapta Marga (0,86 km<sup>2</sup>), Cakranegara Timur (0,67 km<sup>2</sup>), Mayura (1,02 km<sup>2</sup>), Cakranegara Selatan (0,73 km<sup>2</sup>), Cakranegara Utara (1,29 km<sup>2</sup>), Cakranegara Selatan Baru (0,56 km<sup>2</sup>), Karang Taliwang (0,62 km<sup>2</sup>), dan Sayang-sayang (2,12 km<sup>2</sup>). Kelurahan yang terluas dan terkecil di Kecamatan Cakranegara masing-masing adalah Kelurahan Sayang-sayang 21,92 persen dan Kelurahan Cakranegara Barat 5,27 persen. Kawasan Cakranegara merupakan salah satu bagian dari sejarah terbentuknya Kota Mataram. Tahun 1700-an merupakan awal terbentuknya kawasan ini, yang dahulu merupakan kota koloni dari Kerajaan Karangasem di Bali dan dibentuk berdasarkan konsepsi *tri hita karana*. Permukiman penduduk pada kawasan tersebut dibangun dengan pola grid atau kotak-kotak yang memiliki ukuran yang sama dan sering disebut dengan *karang*. Pada awalnya masyarakat yang menempati kawasan tersebut adalah etnis Bali, kemudian perkembangan saat ini mulai banyak ditempati oleh etnis Sasak, Jawa, Tionghoa dan sebagian besar dari akulturasi antaretnis.

## 6) Kecamatan Sandubaya



Kecamatan Sandubaya merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Cakranegara. Terletak antara 117°30'-118°30' Bujur Timur dan 5°54'-8°04' Lintang Selatan. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara di sebelah utara, Kecamatan Labuapi Lombok Barat di sebelah selatan, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram di sebelah barat dan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dan Kecamatan Narmada Lombok Barat di sebelah timur. Kecamatan Sandubaya dengan luas wilayah 10,32 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Selagalas (2,99 km<sup>2</sup>), Bertais (1,04 km<sup>2</sup>), Mandalika (1,00 km<sup>2</sup>), Babakan (1,10 km<sup>2</sup>), Turida (1,97 km<sup>2</sup>), Dasan Cermen (1,58 km<sup>2</sup>), Abian Tubuh Baru (1,29 km<sup>2</sup>). Kelurahan terluas adalah Kelurahan Selagalas, sedangkan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Abian Tubuh Baru. Kecamatan Sandubaya sebagai pendukung kawasan perdagangan di Kecamatan Cakranegara, memiliki kontribusi atas sektor perdagangan hampir mencapai 40 persen dari PDRB kecamatan. Infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan di kecamatan ini pun tersedia mulai dari terminal Tipe A, kompleks pertokoan, pergudangan hingga pasar untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Kota Mataram. Angka yang cukup besar ini menjadikan sektor perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian dan memberikan sumbangsih bagi kinerja perdagangan secara umum di Kota Mataram.

### B. Topografi

Kota Mataram dibedakan menjadi datar-landai yang berada di bagian barat serta bergelombang di bagian timur. Secara umum Kota Mataram berada pada ketinggian rata-rata 0–75 mdpl dengan selang ketinggian 9 km. Ketinggian wilayah yang berada di pesisir pantai, yaitu di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela kurang dari 15 mdpl, sedangkan di bagian timur Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya memiliki ketinggian rata-rata 40-80 mdpl.

Tabel 2.2

Ketinggian Wilayah Kota Mataram Tahun 2020

No	Kecamatan	Ketinggian	
		Meter dpl	Persentase
1	Ampenan	4 – 14	15,43
2	Sekarbela	5 – 9	16,84
3	Mataram	11 – 26	17,56
4	Selaparang	11 – 27	17,56
5	Cakranegara	16 – 50	15,77
6	Sandubaya	50 – 75	16,84
Total		0 – 75	100,00

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2021

Keadaan topografi menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan. Kontur lahan yang semakin kecil berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin kecil. Keadaan topografi seperti ini tepat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta memiliki potensi untuk dapat dikembangkan lagi, namun harus memperhatikan daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup Kota Mataram. Kemiringan wilayah Kota Mataram dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kemiringan lereng 0-2 persen merupakan daerah datar. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas  $\pm$  3.216 Ha atau 52,40 persen dari luas wilayah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Mataram yaitu seluas 794 Ha atau 24,68 persen dari luas daerah dengan kemiringan 0-2 persen;
2. Kemiringan lereng 2-15 persen merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kota Mataram dengan luas  $\pm$  2.909 Ha atau 47,50 persen dari luas daerah, dengan luasan terbesar di Kecamatan Sekarbela yaitu seluas 707 Ha atau 21,98 persen dari luas daerah dengan kemiringan 2-15%. Kemiringan 0-8 persen berada di Kecamatan Ampenan, Sekarbela, dan Mataram. Sedangkan kemiringan 10-15 persen di Kecamatan Cakranegara, Selaparang, dan Sandubaya.

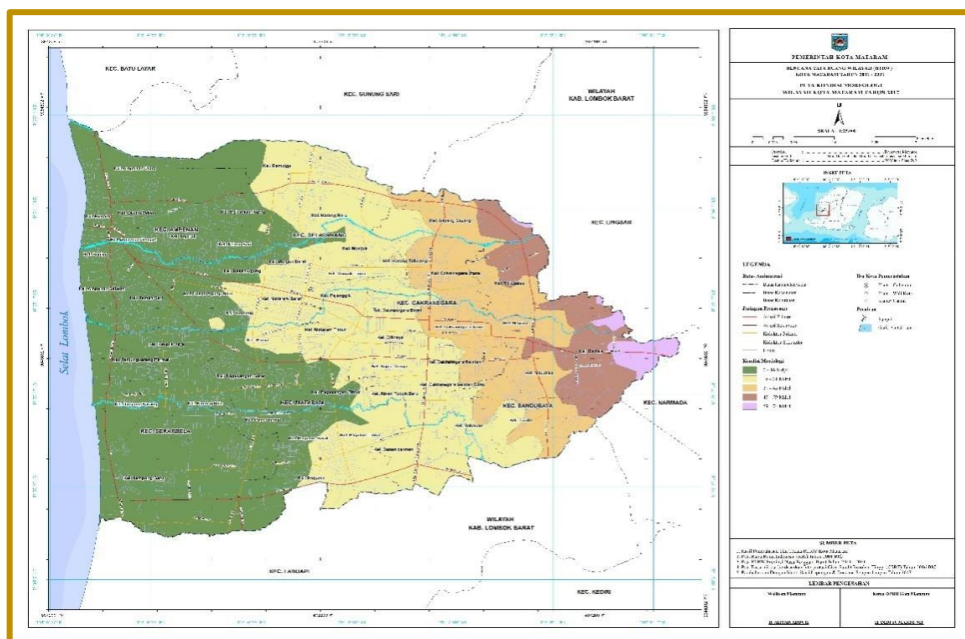
Berikut gambaran variasi kemiringan lereng wilayah Kota Mataram:

Tabel 2.3

**Kemiringan Wilayah Kota Mataram Tahun 2020**

Kecamatan	Kelas Kemiringan (%)			
	Datar (0-2)	Bergelombang (2-15)	Curam (14-40)	Sangat Curam (>40)
Ampenan	730	216	-	-
Sekarbela	325	707	-	-
Mataram	794	282	-	-
Selaparang	488	589	-	-
Cakranegara	508	459	-	-
Sandubaya	371	656	5	-
Total	3.216	2.909	5	0
Persentase (%)	52,40	47,50	0,10	0,00

Sumber: Kota Mataram dalam Angka Tahun 2021





*Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031*

Gambar 2.2

### Peta Kelerengan Wilayah Kota Mataram

#### C. Geologi

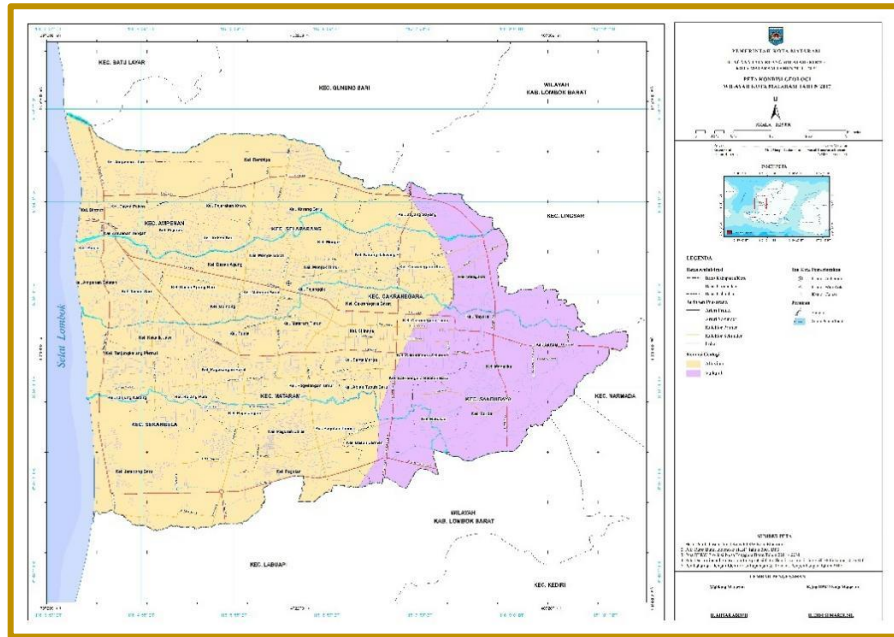
Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung api, batuan sedimen dan batuan terobosan yang umurnya berkisar dari tersier sampai kuartar. Satuan batuan tertentu adalah formasi pengulung (Tomp) yang tersusun oleh endapan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari breksi, lava dan endapan hasil kegiatan gunung api yang mengandung bijih sulfide dan irat kuarsa. Formasi ini berumur oligosen Akhir-Miosen awal dan menjemari dengan formasi kawangan (Tomk), yang terdiri dari atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung dan breksi. Keduanya diterobos oleh batuan yang bersusun dasit dan basal (Tmi), yang umurnya diduga Miosen tengah. Formasi penggulung dan formasi karawang tertindih tak selaras oleh formasi Ekas (Tme) yang berumur Miosen akhir berupa batu gamping (kalkarenit), setempat hablur. Selanjutnya ketiga satuan batuan tua tersebut di atas tertindih tak selaras oleh kelompok Batuan gunung api lombok yang umurnya berkisar antara pliosen akhir sampai pliosen awal. Kelompok ini terdiri dari Formasi kalipalung (TQp), yang mempunyai anggota selayar (TQs), Formasi Kalibalak (TQb), dan formasi lekopiko (Qvi). Formasi kalipalung (TQp) terdiri dari breksi gampingan dan lava. Anggota selayang (TQs) terdiri atas batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon. Formasi kalibabak (TQb) terdiri dari breksi dan lava, sedangkan formasi lekopiko (Qvl) terdiri atas tuff berbatu apung, breksi lahar dan lava. Satuan batuan termuda banyak ditemui di Kota Mataram bagian barat dan pantai utara timur laut Pulau Lombok. Sehingga formasi batuan di Kota Mataram yang terbentuk adalah:

1. Formasi Kalipalung (TQp) dengan anggota Selayar (TQs), menghasilkan jenis batuan breksi gampingan dan lava, batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon.
2. Formasi Kalibabak (TQb) menghasil jenis batuan breksi dan lava.
3. Formasi Lekopiko (Qvl) menghasilkan jenis batuan tuff berbatu apung, breksi lahar, lava.

Jenis batuan memengaruhi struktur tanah, yaitu Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, pecahan koral dan endapan pasir yang tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Adapun jenis tanah di Kota Mataram termasuk jenis tanah entisol.

Kota Mataram secara fisiografi merupakan bagian dari Busur Gunung Api Nusa Tenggara Barat sekaligus merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah Timur dan Busur Banda di sebelah barat. Busur tersebut membentang dari Pulau Jawa hingga mengitari Laut Banda.

Morfologi Pulau Lombok terbagi dalam tiga satuan, yaitu dataran rendah, perbukitan menggelombang dan pegunungan bertimbulan kasar. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar. Dataran rendah sebagian besar terdapat di Kota Mataram yaitu bagian barat dan pantai utara timur laut Pulau Lombok yang ditempati oleh alluvium, batuan gunung api formasi lekopiko dan formasi kalibabak. Daerah ini digunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian.



Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.3

### Peta Kondisi Geologi Wilayah Kota Mataram

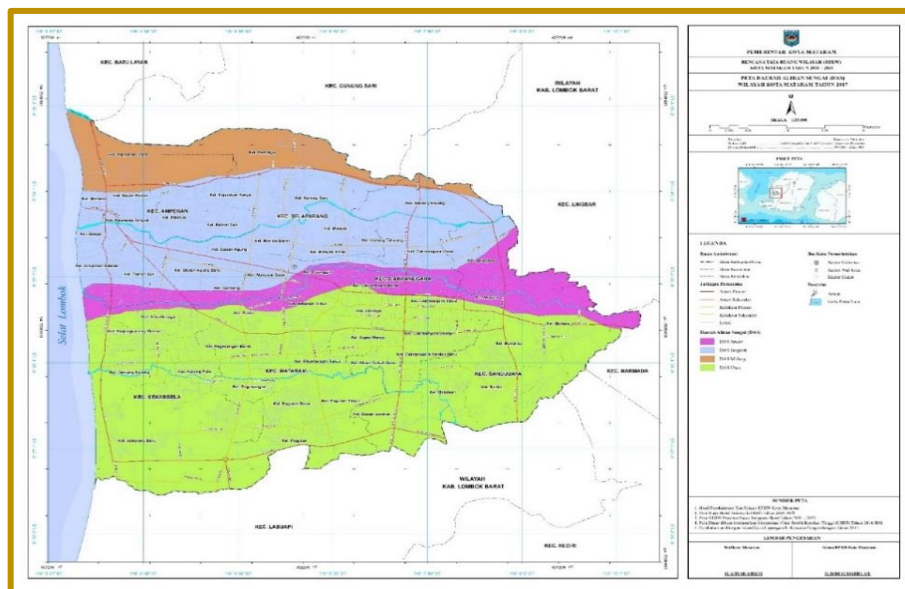
#### D. Hidrologi

Sumber daya air Kota Mataram terdiri dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Potensi air tanah terdapat di seluruh bagian wilayah kota, di antaranya Kelurahan Rembiga, Sayang-sayang dan Mataram dengan kedalaman air tanah antara 5-7 meter (m). Pada lokasi lain bahkan kedalaman air mencapai 15 m, di antaranya di Kelurahan Cakranegara, Monjok, Dasan Agung bagian utara. Selain itu, kebutuhan air minum juga dipenuhi dari sumber air Sarasuta, Renget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Karakteristik hidrologi di Kota Mataram ditandai dengan keberadaan daerah aliran sungai di bagian utara dan tengah yang berpotensi sebagai air tanah (akuifer) yang cukup besar. Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang-sayang, dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7 m. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara memiliki kedalaman air tanah hingga 15 m. Di samping potensi akuifer, Kota Mataram mensuplai kebutuhan air bersih dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswata di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok barat.

Sungai yang mengalir di Kota Mataram di antaranya adalah Sungai Jangkok, Ancar, Brenyok dan Midang. Hulu seluruh sungai tersebut adalah di sekitar Gunung Rinjani dan muaranya berada di Selat Lombok. Secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sungai Jangkok, hulunya berada di lereng sebelah barat Gunung Rinjani dengan panjang aliran sungai 86 km. Kedalaman rata-rata sungai ini 3,30 m dan luas daerah pengaliran sungai (DPS) 226 km<sup>2</sup>.
2. Sungai Ancar, hulunya berada di Gunung Kondo dan bermuara di Selat Lombok. Panjang aliran sungai ini adalah 21 km dengan kedalaman rata-rata 4 m. Luas DPS mencapai 63 km<sup>2</sup>.
3. Sungai Brenyok, hulunya berada di Gunung Manuk dan muaranya di Selat Lombok. Sungai ini memiliki panjang aliran 21 km, kedalaman rata-rata 4,5 m dan luas DPS 56,77 km<sup>2</sup>.

4. Sungai Midang, hulu berada di sebelah barat daya Gunung Tompole dan muaranya di Selat Lombok. Panjang aliran sungai ini 26 km, kedalaman rata-rata 1,7 m, dan luas DPS 62 km<sup>2</sup>.



Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.4

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kota Mataram

## E. Klimatologi

Kondisi iklim merupakan bagian dari keadaan fisik atau keadaan alam suatu wilayah. Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah iklim tropis, dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Agustus hingga Oktober dan musim hujan terjadi pada akhir dan awal tahun. Perbedaan suhu yang relatif kecil terjadi antara musim kemarau dan musim hujan, sehingga berbagai aktivitas dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim. Keadaan iklim di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

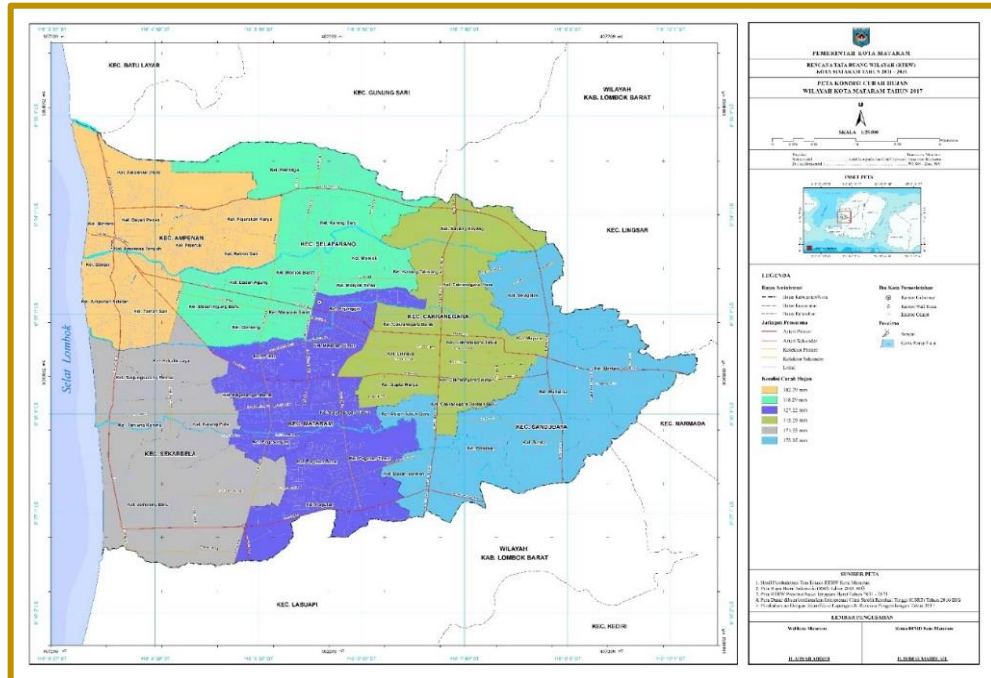
Keadaan Iklim di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Suhu (°C)	26,90	26,60	26,60	26,32	28,84
Rata-rata Kelembaban (%)	84,00	83,42	81,30	81,00	76,29
Rata-rata Kecepatan Angin (m/det)	3,50	3,67	3,00	4,08	1,93
Rata-rata Tekanan Udara (mb)	1.005,50	1.005,53	1.005,90	1.006,65	1.004,07
Rata-rata Curah Hujan (mm)	236,17	218,82	139,40	133,33	155,12
Rata-rata Hari Hujan (hari)	17,75	12,36	12,00	11,89	14,83
Rata-rata Penyinaran Matahari (%)	68,50	66,92	77,00	74,92	89,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021



Rata-rata temperatur atau suhu udara di Kota Mataram pada tahun 2020 adalah sebesar 28,84°C dengan suhu maksimum terjadi pada bulan November yaitu 35,20°C dan suhu minimum 18,40°C pada bulan Agustus. Kemudian untuk jumlah curah hujan pada tahun 2020, tertinggi di bulan November sebesar 281,90 mm dan terendah 13,30 mm di bulan Juli. Adapun peta tematik yang berisikan persebaran curah hujan di Kota Mataram dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.5

Peta kondisi Curah Hujan Wilayah Kota Mataram

## F. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di kota Mataram lebih kompleks dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya, hal ini dikarena struktur dan kondisi masyarakat di perkotaan lebih beragam. Lahan perumahan di Kota Mataram sangat rapat, karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Selain perumahan, lahan digunakan pula untuk membangun sarana perkantoran yang umumnya memiliki lebih dari satu lantai, sarana perekonomian lain dan sarana pemerintahan serta fasilitas publik penduduk kota seperti sarana sekolah, sarana rekreasi, kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan sarana hiburan. Penggunaan lahan di Kota Mataram secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.5

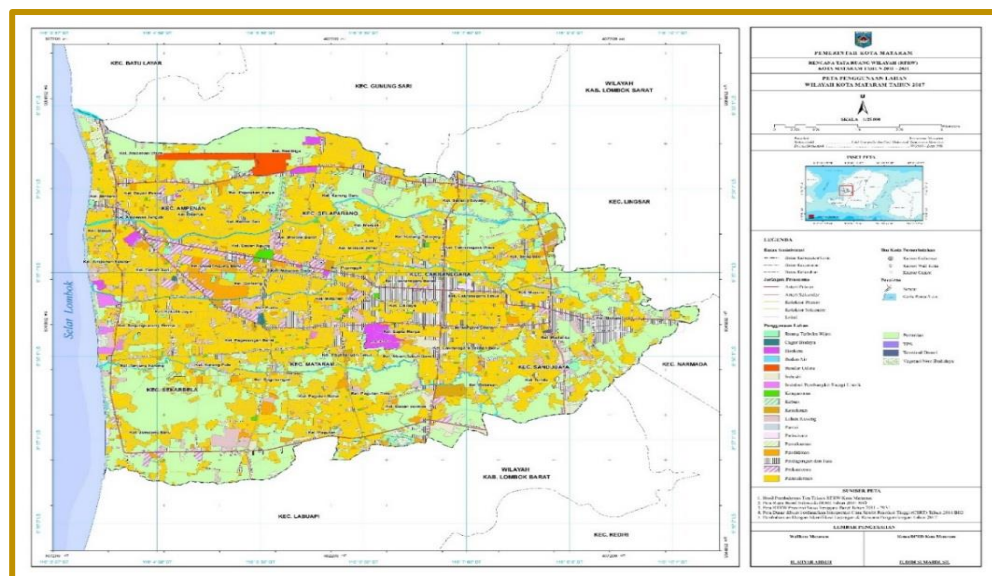
Penggunaan Lahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumahan	2.432,00	2.438,70	2.449,84	2.472,64	2.492,00
2	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10	46,10	46,10
3	Kuburan	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64

No	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Perkantoran	116,13	117,13	116,94	116,94	116,94
5	Pendidikan	152,47	152,47	153,03	153,03	153,03
6	Kesehatan	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
7	Ibadah	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33
8	Jasa	-	-	-	-	-
9	Pasar/Terminal	68,35	68,35	68,35	68,35	68,35
10	Pertokoan/SPBU	106,17	106,69	106,95	107,06	108,70
11	Warung/Rumah Makan	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
12	Hotel/Motel	19,23	19,23	20,47	20,47	20,47
13	Pergudangan	52,40	54,07	54,07	54,07	54,80
14	Industri	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75
15	Taman Kota	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
16	Tanah di Peruntukan	129,88	129,88	129,88	129,88	129,88
17	Tanah Pertanian	2.726,78	2.717,05	2.703,84	2.680,94	2.659,30
18	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89
<b>Total</b>		<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>

Sumber: Mataram Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2016-2020 Kota Mataram mengalami peningkatan penggunaan lahan pada sektor perumahan, pendidikan, pertokoan/SPBU, hotel/motel, dan pergudangan. Namun, dengan luas Kota Mataram yang tetap sebesar 6.130 Ha peningkatan pada beberapa sektor tersebut menyebabkan penurunan pada sektor lainnya, dalam hal ini adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan 2,47 persen sejak tahun 2016.



Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.6

### Peta Penggunaan Lahan Kota Mataram

Pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, disebutkan bahwa pola ruang wilayah di Kota Mataram terdiri dari pengelolaan Kawasan Lindung dan pengembangan Kawasan Budidaya, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kawasan Lindung, terdiri dari:
  - a. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
    - Kawasan sempadan pantai, dengan arahan penyebaran sepanjang  $\pm 9$  km pesisir barat di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter dihitung dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.
    - Kawasan sempadan sungai, dengan arahan penyebaran pada Sungai-sungai besar yaitu: Sungai Midang/Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Unus, dan Sungai Brenyok dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai paling rendah 3 (meter) pada sungai bertanggul dan paling rendah 10 (sepuluh) meter pada sungai tidak bertanggul.
  - b. Kawasan lindung geologi, berupa sempadan mata air/lingkok sebagai perlindungan terhadap air tanah dilakukan di seluruh wilayah Kota dengan ketentuan pengaman mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari tengah mata air.
  - c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:
    - RTH Publik, meliputi hutan kota, taman-taman/lapangan kota hingga taman/lapangan lingkungan, sabuk hijau, taman jalan, pemakaman.
    - RTH Privat, dapat dikontribusi melalui taman pekarangan, taman atap dan/atau taman/hutan vertikal pada kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan
  - d. Kawasan Cagar Budaya, dengan arahan penyebaran kawasan Taman Mayura, kawasan Pura Meru, kawasan Makam Van Ham, kawasan Kota Tua Ampenan, kawasan Makam Loang Baloq dan kawasan Makam Bintaro.
  - e. Kawasan Rawan ancaman bencana, meliputi kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, dan kawasan rawan gempa bumi.
- 2) Pengembangan Kawasan Budidaya, terdiri:
  - a. Kawasan perumahan, diklasifikasikan menjadi perumahan berkepadatan tinggi yang diarahkan di sekitar kawasan pusat kota atau pusat pelayanan kegiatan dengan luas 150m<sup>2</sup> serta perumahan berkepadatan sedang dan rendah diarahkan pada pinggiran dengan luas 200m<sup>2</sup>.
  - b. Kawasan perdagangan dan jasa, dikembangkan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional, dan lokal bagi masyarakat, dengan arahan penyebaran di seluruh wilayah kota.



- c. Kawasan perkantoran, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta.  
Secara khusus, Kota Mataram mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTB, maka fasilitas perkantoran di Kota Mataram tidak hanya fasilitas perkantoran untuk pemerintahan Kota Mataram saja, tetapi juga fasilitas perkantoran untuk Pemerintahan Provinsi NTB. Oleh sebab itu, rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran di Kota Mataram adalah mempertahankan perkantoran pemerintah provinsi dan kota pada lokasi saat ini.
- d. Kawasan peruntukan industri, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri non polutan. Sesuai dengan tujuan Kota Mataram yang akan menuju kota perdagangan dan jasa dan dengan mempertimbangkan kondisi fisik Kota Mataram masih mungkin untuk mengembangkan industri besar, menengah, maupun kecil atau industri rumah tangga khususnya industri-industri yang berbasis pertanian dan perikanan (agro industri).
- e. Kawasan pariwisata, dikembangkan mencakup destinasi pariwisata serta prasarana dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata skala internasional, nasional, regional, dan lokal. Kawasan Pariwisata di Kota Mataram terdiri kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata buatan
- f. Kawasan Ruang evakuasi Bencana, dengan arahan penyebaran pada ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana.
- g. Kawasan Pendidikan, dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mataram
- h. Kawasan Kesehatan, dikembangkan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Mataram dan/atau Provinsi NTB.
- i. Kawasan Peribadatan, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan, dan arahan penyebaran di seluruh wilayah Kota Mataram.
- j. Kawasan Pertahanan Negara, ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota Mataram dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- k. Kawasan Pertanian, dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota Mataram. Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya berada di kawasan perbatasan.

## G. Wilayah Rawan Bencana

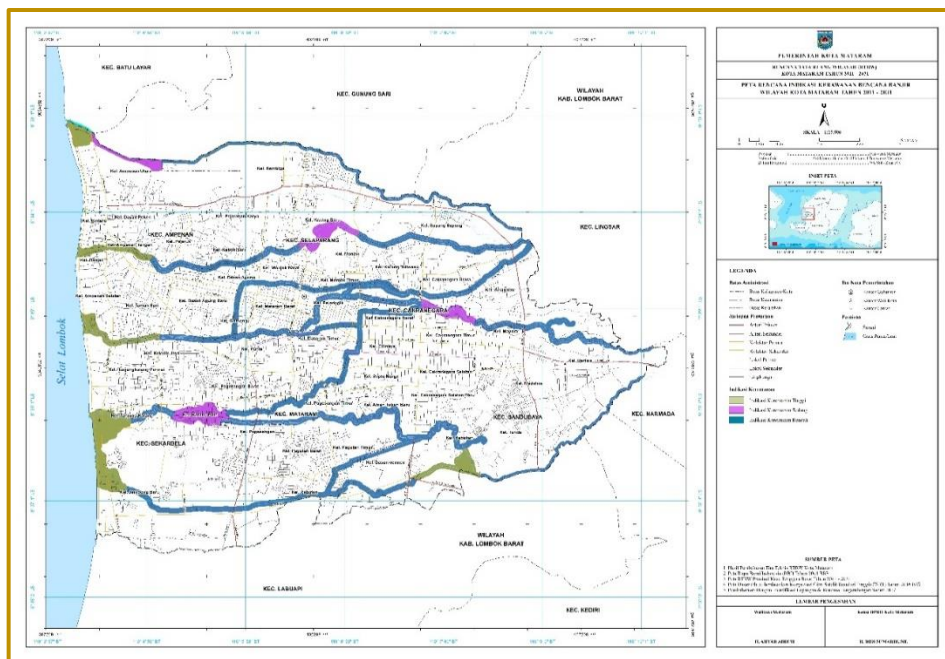
Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, maka dapat diidentifikasi wilayah di Kota Mataram yang berpotensi rawan bencana alam, yaitu:

1) Kawasan Rawan Banjir

Kota Mataram merupakan salah satu daerah hilir dari 4 (empat) sungai besar dari sistem DAS Dodokan dan posisinya berada pada ketinggian yang relatif rendah (0-75meter dpl) dengan kemiringan relatif datar-landai.

Kondisi ini berpotensi untuk terkena bencana banjir dan genangan. Kondisi fisik yang rawan bencana ini ditambah lagi dengan kurangnya area resapan di dalam kota dan kondisi drainase yang belum optimal. Adapun lokasi banjir Kota Mataram adalah Kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.



Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.7.

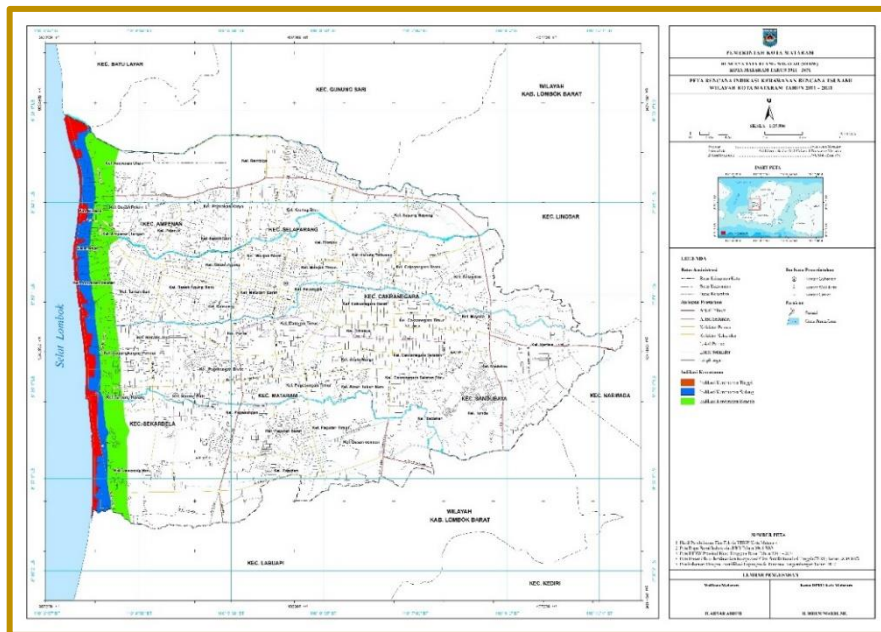
Peta Rencana Indikasi Kerawanan Bencana Banjir Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang/Tsunami dan Abrasi Pantai

Bagian barat pesisir Kota Mataram merupakan wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok. Adapun abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak yang menerus, apalagi pantai tidak dilengkapi dengan penahan gelombang. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut yang dapat memengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram.

Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai di kawasan sepanjang wilayah pesisir Kota yaitu Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan

Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.



Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.8

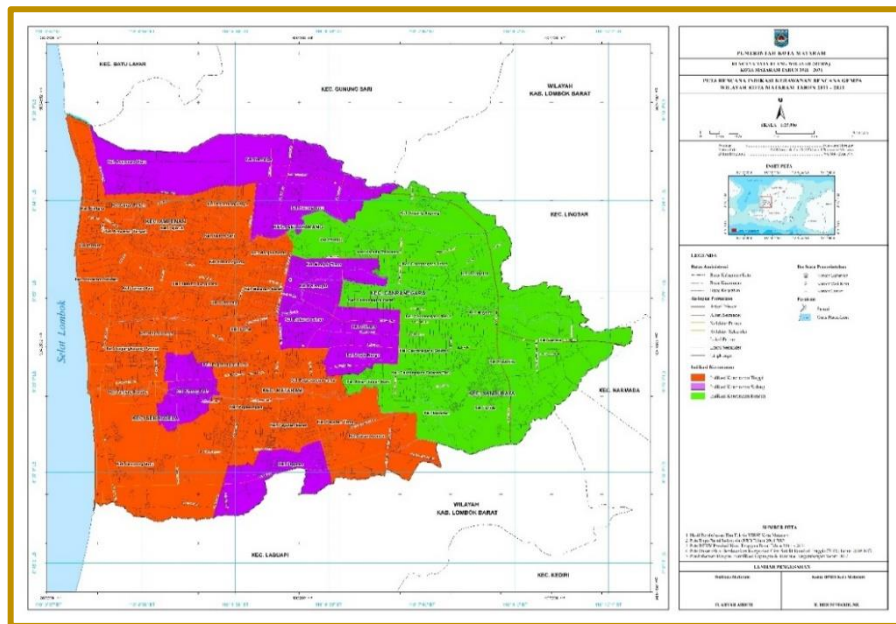
**Peta Rencana Indikasi Kerawanan Bencana Tsunami Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031**

3) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Kota Mataram merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia- Australia dengan lempeng Eurasia menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Kawasan di seluruh wilayah Kota Mataram termasuk dalam kawasan rawan gempa bumi. Selain ini terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya sekitar 50 km. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dilakukan melalui:

- a. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana;
- b. Pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- c. Pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan;
- d. Pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan
- e. Pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.





Sumber: Perubahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031

Gambar 2.9

Peta Rencana Indikasi Kerawanan Bencana Gempa Wilayah Kota Mataram tahun 2011-2031

#### H. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka Kota Mataram memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- Pusat Pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat Pemerintahan Kota Mataram;
- Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
- Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
- Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
- Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar (*hinterland*) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya;
- Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, antara lain sebagai berikut:

##### 1) Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi disebar pada wilayah-wilayah:

- Kecamatan Ampenan: Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Pejeruk, dan Kelurahan Taman Sari;
- Kecamatan Mataram: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pejanggik, dan Kelurahan Punia;

- Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru;
- Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang;
- Kecamatan Selaparang: Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Dasan Agung, dan Kelurahan Dasan Agung Baru; dan
- Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Babakan, Kelurahan Turida, dan Kelurahan Abian Tubuh Baru.

Pengembangan kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang dan perumahan berkepadatan rendah disebar pada wilayah, yaitu:

- Kawasan Perumahan Berkepadatan Sedang, dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi.
- Kawasan Perumahan Berkepadatan Rendah, dengan arahan penyebaran pada kawasan pinggiran Kota dan kawasan pengembangan baru selain di kelurahan yang disebutkan pada pengembangan kawasan perumahan berkepadatan tinggi.

## 2) Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mataram. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan melalui:

- a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya;
- b. Penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;
- d. Pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri di sekitar Kota;
- e. Penataan kawasan bagi kegiatan sektor informal pada areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panji Tilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan Selaparang, Jalan Jayengrana, dan pada areal lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## 3) Pengembangan Kawasan Perkantoran

Wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkantoran pemerintah yaitu:

- Kecamatan Ampenan: Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Banjar, Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Pejeruk dan Kelurahan Taman Sari;
- Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Kekalik Jaya dan Kelurahan Tanjung Karang;

- Kecamatan Mataram: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Punia;
- Kecamatan Selaparang: Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Monjok Timur, dan Kelurahan Rembiga;
- Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang-sayang;
- Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Turida.

Kawasan perkantoran Swasta dikembangkan dengan arahan penyebaran pada kawasan perkantoran pemerintah serta kawasan perdagangan dan jasa.

#### 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pengembangan kawasan industri adalah:

- Kecamatan Ampenan: Kelurahan Ampenan Utara;
- Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai;
- Kecamatan Mataram: Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Pagutan;
- Kecamatan Selaparang: Kelurahan Monjok;
- Kecamatan Cakranegara: Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru dan Kelurahan Sayang-sayang;
- Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais, dan Kelurahan Turida.

Adapun, wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri rumah tangga diarahkan di seluruh wilayah Kota.

#### 5) Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi pariwisata serta prasarana dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata skala internasional, nasional, regional, dan lokal. Pengembangan pariwisata di Kota Mataram dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pariwisata budaya dikembangkan pada kawasan cagar budaya;
- b. Pariwisata buatan dikembangkan dalam beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut:
  - Wisata dengan konsep MICE berbasis lingkungan dikembangkan pada kawasan eks. Bandar Udara Selaparang Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang;
  - Wisata belanja dan pusat kerajinan dikembangkan pada pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan



Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kelurahan Sayang-sayang dan Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara;

- Wisata rekreasi dikembangkan pada taman-taman di seluruh Kota; dan
- Wisata kuliner dikembangkan di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang, Kelurahan Sayang-sayang dan Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

#### 6) Pengembangan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana dikembangkan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampung penduduk sementara dari bencana banjir dan tanah longsor, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran.

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui pemanfaatan ruang-ruang terbuka, bangunan perkantoran dan bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan bangunan peribadatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana serta memungkinkan untuk menampung korban bencana.

#### 7) Pengembangan Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dikembangkan di seluruh wilayah Kota, serta pendidikan tinggi yang dikembangkan di beberapa lokasi yaitu:

- Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Kekalik Jaya;
- Kecamatan Mataram: Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Barat;
- Kecamatan Selaparang: Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Gomong, dan Kelurahan Mataram Barat;
- Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Cilinaya dan Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Turida.

#### 8) Pengembangan Kawasan Kesehatan

Wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pengembangan kawasan kesehatan adalah:

- Kecamatan Sekarbela: Kelurahan Kekalik Jaya;
- Kecamatan Mataram: Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Punia;
- Kecamatan Sandubaya: Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Selagalas.

#### 9) Pengembangan Kawasan Peribadatan

Pengembangan kawasan peribadatan diarahkan penyebarannya di seluruh wilayah Kota Mataram, dengan pusat pengembangan berada pada:

- Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) di Kelurahan Gomong dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara;
- Gereja di Kelurahan Banjar dan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Barat dan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram, dan Kelurahan Mayura dan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara;
- Pura di Kelurahan Punia dan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur dan Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara; dan
- Vihara di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya.

#### 10) Pengembangan Kawasan Pertahanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan negara ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota Mataram dan/atau Provinsi NTB yang dikembangkan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan; Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram; Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara; dan Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya.

Kawasan peruntukan pertahanan negara menyediakan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan negara dengan kawasan budidaya terbangun dan juga menyediakan RTH di dalamnya.

#### 11) Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota Mataram. Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya berada di kawasan perbatasan, terutama di Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang-sayang, Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen dan Kelurahan Turida. Lahan pertanian yang dipertahankan ini lebih diarahkan untuk budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura. Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan diarahkan menyatu dengan kawasan pertanian pangan dan/atau hortikultura.

## 2.1.2. Aspek Demografi

Demografi menjelaskan tentang ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan serta merupakan salah satu modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Jumlah, komposisi dan distribusi penduduk adalah sebagian dari masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Tingginya tingkat migrasi penduduk mengakibatkan jumlah penduduk Kota Mataram terus bertambah setiap tahunnya, dimana kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dalam RTRW Provinsi NTB.

### A. Ukuran Penduduk

Jumlah Penduduk di Kota Mataram mengalami penurunan dari 486.715 jiwa pada tahun 2019 menjadi 429.651 jiwa pada tahun 2020. Hal ini merupakan pembaharuan atas data yang dikeluarkan sebelumnya melalui sensus penduduk tahun 2020. Secara rinci perkembangan penduduk di Kota Mataram selama lima tahun terakhir ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Indikator Kependudukan Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk (jiwa)	459.314	468.509	477.476	486.715	429.651
Jumlah Rumah Tangga (RT)	125.620	128.135	130.587	133.114	116.122
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	7.492	7.642	7.789	7.939	7.009
Rasio Jenis Kelamin	98	98	98	98	99
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,02	2,00	1,91	2,06	0,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pada tabel tersebut terlihat bahwa kepadatan penduduk pada periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi 7.009 jiwa/km<sup>2</sup>. Indikator rasio jenis kelamin selama lima tahun masih di bawah 100 yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Mataram lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, meskipun persentase penduduk pria pada tahun 2020 semakin meningkat. Kemudian untuk indikator laju pertumbuhan penduduk, berdasarkan data sensus penduduk mengalami perlambatan di tahun



2020. Adapun perkembangan penduduk di Kota Mataram berdasarkan kecamatan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Mataram  
Tahun 2016-2020

KECAMATAN	TAHUN									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan
Ampenan	89.421	9.453	91.099	9.630	92.714	9.801	94.363	9.975	88.022	9.305
Sekarbela	67.431	6.534	69.989	6.782	72.571	7.032	75.254	7.292	58.786	5.696
Mataram	85.491	7.945	87.527	8.134	89.522	8.320	91.568	8.510	77.465	7.199
Selaparang	75.027	6.966	75.235	6.986	75.370	6.998	75.509	7.011	68.657	6.375
Cakranegara	67.395	6.969	67.791	7.010	68.119	7.044	68.455	7.079	67.826	7.014
Sandubaya	74.549	7.224	76.868	7.448	79.180	7.672	81.566	7.904	68.895	6.676
KOTA MATARAM	459.314	7.493	468.509	7.643	477.476	7.789	486.715	7.940	429.651	7.009

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Berdasarkan komposisi penduduk per Kecamatan, penyebaran penduduk terpadat di Kota Mataram berada di Kecamatan Ampenan. Selain karena luas wilayah yang tidak begitu besar, kecamatan tersebut merupakan salah satu dari permukiman tertua yang ada di Kota Mataram yang terus mengalami perkembangan jumlah penduduk. Sedangkan, Kecamatan Selaparang dengan luas wilayah terbesar ketiga memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah. Sebagian besar lahan di kecamatan tersebut sebelumnya adalah lahan pertanian, namun saat ini telah di alih fungsikan menjadi perumahan dan hotel untuk penyediaan rumah bagi penduduknya serta untuk mendukung perdagangan dan jasa sebagai sektor pengungkit ekonomi Kota Mataram.

## B. Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk dapat memiliki implikasi pada tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk secara spesifik, seperti penduduk dengan karakteristik laki-laki, perempuan, balita, remaja, dewasa, lansia, produktif dan non produktif. Selain itu, potensi tenaga kerja juga dapat terlihat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Mataram pada periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Mataram Tahun 2016-2020

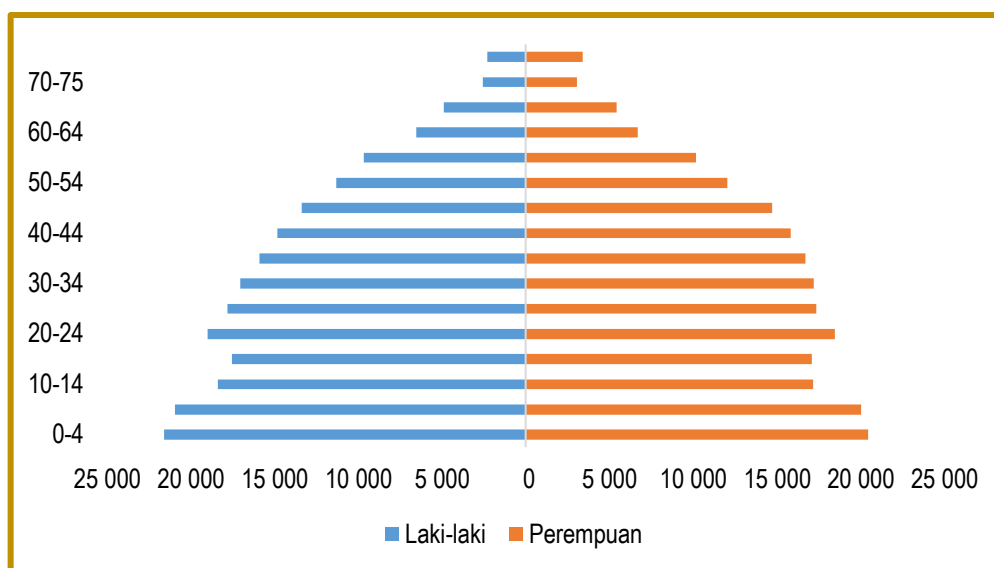
Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	42.074	42.196	42.291	42.407	42.050
5-9	40.422	41.031	41.509	41.887	40.989
10-14	38.098	38.893	39.787	40.742	35.575
15-19	46.399	46.898	47.330	47.887	34.617

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
20-24	57.742	58.669	59.543	60.383	37.510
25-29	38.773	39.379	39.976	40.599	35.177
30-34	37.102	37.456	37.782	38.183	34.264
35-39	33.513	34.108	34.655	35.183	32.633
40-44	31.923	32.734	33.498	34.226	30.679
45-49	25.956	26.955	27.940	28.897	28.090
50-54	20.236	21.003	21.806	22.658	23.357
55-59	16.943	17.641	18.309	19.011	19.870
60-64	11.313	11.980	12.681	13.375	13.234
65-69	8.046	8.373	8.734	9.165	10.316
70-75	5.233	5.466	5.720	6.004	5.599
75+	5.541	5.727	5.915	6.108	5.691
<b>Jumlah</b>	<b>459.314</b>	<b>468.509</b>	<b>477.476</b>	<b>486.715</b>	<b>429.651</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Berdasarkan kelompok umur di atas, penduduk Kota Mataram didominasi oleh kategori usia produktif yaitu penduduk berusia 15-64 tahun. Pada tahun 2020 besarnya mencapai 67,36 persen dari total penduduk Kota Mataram. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar berarti jumlah tenaga kerja yang cukup besar juga. Peningkatan asset oleh penduduk usia produktif dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dengan piramida penduduk. Dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan badan piramida pada bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan. Piramida penduduk Kota Mataram pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1  
Piramida Penduduk Kota Mataram Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk Kota Mataram pada masa lalu dan pada masa yang akan datang. Grafik piramida tersebut menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun merupakan jumlah penduduk terbesar, dengan persentase sebesar 9,79 persen dari total penduduk Kota Mataram pada tahun 2020. Kemudian diikuti oleh penduduk dengan kelompok umur 5-9 tahun yang sebesar 9,54 persen. Artinya bahwa jumlah kelahiran pada akhir dekade ini cukup tinggi dari dekade sebelumnya, sehingga Pemerintah Kota Mataram ke depan harus benar-benar mewujudkan lingkungan yang ramah untuk anak.

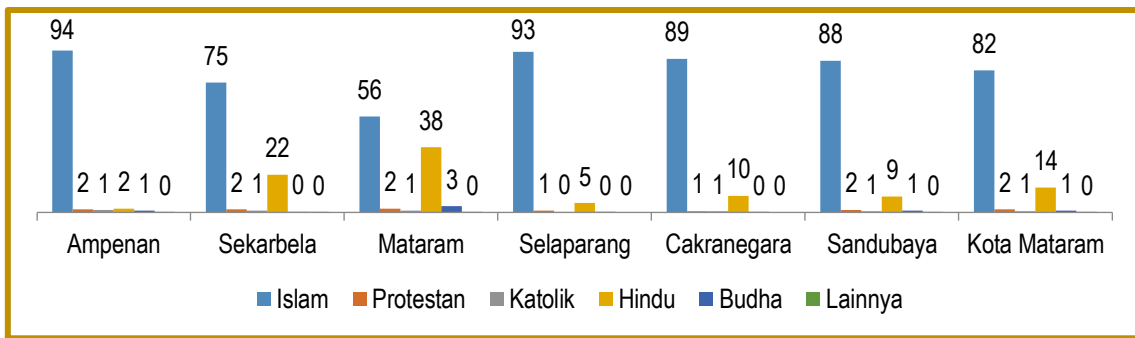
### C. Distribusi Penduduk

Berdasarkan agama, penduduk Kota Mataram didominasi oleh penduduk dengan agama Islam yaitu dengan persentase sebesar 82 persen. Tertinggi terdapat di Kecamatan Ampenan, 94 persen dan terendah di Kecamatan Mataram, 56 persen. Kemudian, rata-rata persentase jumlah penduduk dengan agama Hindu, Nasrani dan Budha/lainnya masing-masing adalah 14 persen, 3 persen dan 1 persen. Secara detail persentase penduduk menurut agama pada tahun 2020 di Kota Mataram adalah sebagai berikut:



Grafik 2.2

Persentase Penduduk Menurut Agama di Kota Mataram Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

#### D. Budaya Masyarakat Kota

##### 1) Sistem Kemasyarakatan

Sebagaimana adat ketimuran, sistem kemasyarakatan di Kota Mataram, nilai kekeluargaan dan gotong royong masih sangat tinggi. Kondisi ini akan banyak kita jumpai pada perkampungan-perkampungan yang memang berkembang dengan sendirinya. Khusus untuk daerah perumahan yang dikembangkan oleh developer sistem kekerabatan ini cenderung memudar, kondisi ini dikarenakan orang yang bermukim pada daerah perumahan lebih bersifat individual dan umumnya memiliki rutinitas yang tinggi, sehingga kehidupan bersosial dengan sekitarnya jadi terhambat. Dalam sistem kemasyarakatan, Berugaq, menjadi salah satu media atau tempat masyarakat Lombok umumnya dan Kota Mataram khususnya sebagai tempat berinteraksi.

##### 2) Tata Budaya Dan Sistem Upacara Masyarakat

Dalam berbagai aktivitasnya, masyarakat masih melakukan berbagai aktivitas dan tata upacara yang dilakukan. Adapun tata upacara yang masih dipertahankan di Kota Mataram pada umumnya adalah :

- a. Upacara Perkawinan, dalam menjalankan perkawinan masyarakat Lombok di Kota Mataram masih memegang dari tradisi yang ada, seperti kawin lari dengan ritual lainnya seperti sorong serah maupun nyongkolan.
- b. Upacara Sunatan, upacara sunatan masyarakat lombok menggunakan tradisi yang umumnya biasa di gunakan didaerah lain, dimana anak yang akan disunat biasanya di arak keliling kampung dan diiringi oleh gendang beleq.
- c. Lebaran Topat, budaya Islam sangat berpengaruh dari kegiatan bermasyarakat di Kota Mataram, mengingat mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Tradisi lebaran topat merupakan kegiatan untuk merayakan puasa syawal yang perayaannya seminggu setelah Hari Idul Fitri.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indikator variabel Aspek Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari: (1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, (2) Fokus Kesejahteraan Sosial, dan (3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja pada masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

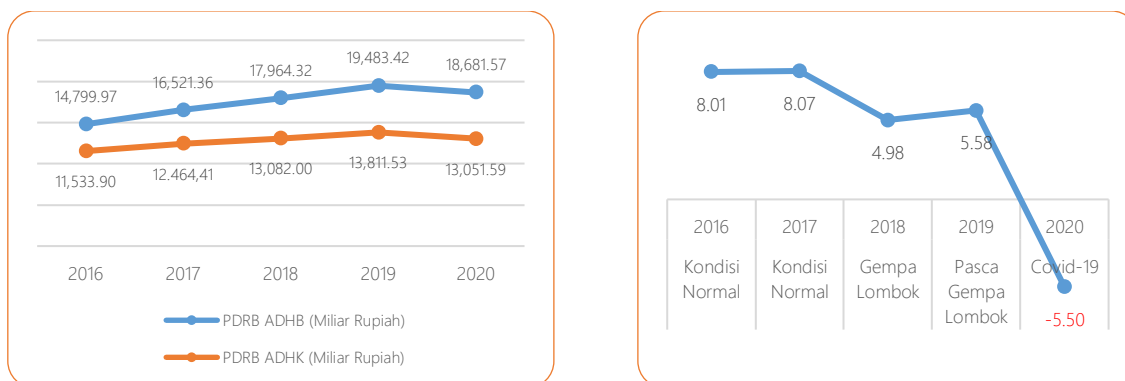
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang memengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi meliputi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, Indeks Gini dan Angka Kemiskinan. Hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi disajikan sebagai berikut:

#### A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah (*value added*) barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Besaran PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Dengan kata lain PDRB merupakan indikator untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki guna menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomiannya.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, serta PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang berguna dalam menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang juga besar. Sedangkan, gambaran peningkatan PDRB Kota Mataram selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 baik ADHB maupun ADHK dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.3  
Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kota Mataram Tahun 2016- 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Kota Mataram pada RTRW Nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pada RTRW Provinsi NTB ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebagai PKN dan KSP, Kota Mataram berfungsi sebagai simpul utama transportasi kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana kategori usaha perdagangan besar dan eceran selalu menjadi *leading business* bagi perekonomian Kota Mataram.

Pada periode tahun 2016-2017, kinerja ekonomi Kota Mataram menunjukkan tren yang positif, tumbuh rata-rata sebesar 8 persen. Namun, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan hanya tumbuh sebesar 4,98 persen sebagai dampak dari gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok. Adapun sektor ekonomi yang paling terdampak dan berkontribusi terhadap melemahnya kinerja perekonomian Kota Mataram pasca gempa Lombok adalah industri pariwisata, yaitu pada sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor konstruksi.

Pada tahun 2019 upaya *recovery* dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Mataram. Langkah-langkah yang diambil adalah melalui percepatan revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, pertokoan dan swalayan serta penguatan sinergitas program lintas sektoral dalam mendorong pulihnya sektor ekonomi terdampak. Kedua langkah tersebut mampu membalikkan kinerja perekonomian Kota Mataram kearah tren yang positif, yaitu ekonomi mulai tumbuh menjadi 5,58 persen.

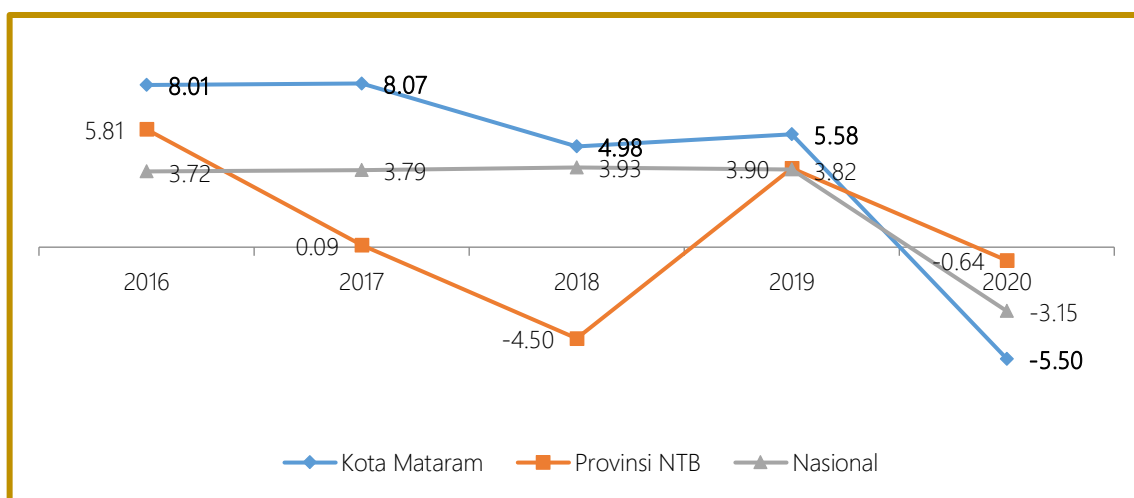
Pada tahun 2020 wabah penyakit karena infeksi virus corona atau *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) juga mulai menyebar di Kota Mataram. Pandemi Covid-19 secara nyata membuat aktivitas ekonomi global, nasional, regional dan lokal terganggu. Perekonomian dapat dikatakan terjun bebas hingga mengalami resesi. Kondisi ini merupakan periode terburuk bagi Kota Mataram, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram turun hingga sebesar minus 5,50 persen. Penurunan yang terjadi bahkan lebih dalam dari pasca gempa Lombok tahun 2018 yang sebesar 4,98 persen dan pemulihan pasca gempa Lombok tahun 2019 sebesar 5,58 persen.

Penurunan tersebut merupakan dampak dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat serta pembatasan operasional pusat-pusat

perbelanjaan dan hiburan di Kota Mataram. Sektor ekonomi yang paling terdampak berdasarkan data dari BPS Kota Mataram adalah Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya. Namun, ada juga sektor-sektor ekonomi yang di masa pandemi Covid-19 ini yang menerima manfaat, seperti Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Grafik 2.4

Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional  
Tahun 2016 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada grafik di atas diketahui kinerja ekonomi Kota Mataram pada periode tahun 2016 hingga 2019 di atas kinerja ekonomi Provinsi NTB dan Nasional. Akan tetapi, ketika dihantam oleh pandemi Covid-19, kinerja ekonomi Kota Mataram adalah yang terparah dibandingkan Provinsi NTB dan Nasional. Daya lenting kinerja ekonomi Kota Mataram ternyata cukup lemah, yaitu kemampuannya dalam menahan tekanan dan kemampuan untuk pulih pada kondisi ini. Secara rinci nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHB Menurut Lapangan Usaha tahun 2016- 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.9

Nilai dan Distribusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHB  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	584,56	3,95	629,40	3,81	674,44	3,75	709,26	3,64	738,55	3,95
B	Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,01	1,00	0,01	1,04	0,01	1,09	0,01	1,02	0,01



Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
C	Industri Pengolahan	1.349,64	9,12	1.487,51	9,00	1.588,90	8,84	1.707,68	8,76	1.699,43	9,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,45	0,09	18,14	0,11	19,71	0,11	20,94	0,11	21,85	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,32	0,21	33,51	0,20	31,97	0,18	33,27	0,17	34,65	0,19
F	Konstruksi	1.503,80	10,16	1.674,55	10,14	1.811,93	10,09	2.088,59	10,72	1.644,60	8,80
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.993,82	20,23	3.393,49	20,54	3.745,61	20,85	4.140,28	21,25	3.829,12	20,50
H	Transportasi dan Pergudangan	911,82	6,16	1.025,38	6,21	1.113,44	6,20	1.230,48	6,32	844,57	4,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	294,41	1,99	334,95	2,03	342,36	1,91	356,53	1,83	241,81	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	877,51	5,93	987,86	5,98	1.055,28	5,87	1.126,85	5,78	1.282,39	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.526,93	10,32	1.763,50	10,67	1.978,37	11,01	2.035,97	10,45	2.260,11	12,10
L	Real Estate	765,14	5,17	848,72	5,14	936,61	5,21	1.011,62	5,19	1.024,10	5,48
M,N	Jasa Perusahaan	66,55	0,45	73,96	0,45	81,80	0,46	89,88	0,46	86,35	0,46
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.282,31	8,66	1.365,17	8,26	1.438,89	8,01	1.469,10	7,54	1.580,03	8,46
P	Jasa Pendidikan	1.249,43	8,44	1.387,23	8,40	1.504,10	8,37	1.661,46	8,53	1.720,40	9,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	662,00	4,47	727,35	4,40	801,34	4,46	882,73	4,53	883,13	4,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	686,32	4,64	769,64	4,66	838,54	4,67	917,70	4,71	839,45	4,49
<b>PDRB</b>		<b>14.799,97</b>	<b>100</b>	<b>16.521,36</b>	<b>100</b>	<b>17.964,32</b>	<b>100</b>	<b>19.483,42</b>	<b>100</b>	<b>18.681,57</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah, Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021 \* Angka Sementara, \*\* Angka Sangat Sementara

Melemahnya kinerja ekonomi juga tercermin dari Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang mengindikasikan adanya penurunan optimisme konsumen sejak pandemi Covid-19 mulai merebak pada bulan Maret 2020. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kota Mataram tercatat berada di bawah level optimis (<100) pada periode Maret hingga Juni tahun 2020. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga berada di bawah level optimis, hal ini mengindikasikan adanya penurunan penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, serta pengeluaran dibandingkan dengan awal tahun 2020. Selain itu, Survei Penjualan Eceran di Kota Mataram untuk sektor perdagangan pada bulan April 2020 menunjukkan penurunan omzet bulanan yang cukup drastis hingga 40 persen dari bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2020, omzet penjualan responden perdagangan eceran secara bertahap mulai meningkat yaitu 73,90 persen dari omzet penjualan pada bulan Maret 2020.

Kategori usaha yang secara konsisten berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah: 1). Kategori usaha perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 2). Kategori Usaha Konstruksi; dan 3). Kategori usaha Industri Pengolahan. Secara lebih rinci, nilai dan distribusi persentase PDRB Kota Mataram ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10  
**Nilai dan Distribusi Persentase PDRB Kota Mataram ADHK  
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,35	3,95	467,70	3,75	478,21	3,66	488,5	3,54	494,53	3,79
B	Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,01	0,80	0,01	0,80	0,01	0,81	0,01	0,74	0,01
C	Industri Pengolahan	1.179,31	10,22	1.265,46	10,15	1.311,50	10,03	1.371,04	9,93	1.349,12	10,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,61	0,12	14,20	0,11	14,45	0,11	15,88	0,11	16,99	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,76	0,19	22,72	0,18	21,67	0,17	22,47	0,16	23,19	0,18
F	Konstruksi	1.282,64	11,12	1.384,88	11,11	1.429,31	10,93	1.569,67	11,36	1.219,63	9,34
G	Perdag. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.249,89	19,51	2.464,16	19,77	2.624,59	20,06	2.804,26	20,30	2.574,66	19,73
H	Transportasi dan Pergudangan	715,96	6,21	778,97	6,25	809,73	6,19	869,63	6,30	572,94	4,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182,69	1,58	199,27	1,60	198,92	1,52	202,31	1,46	137,40	1,05
J	Informasi dan	852,07	7,39	926,03	7,43	974,65	7,45	1.019,68	7,38	1.149,90	8,81

Kategori	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)	Rp (miliar)	(%)
	Komunikasi										
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.107,55	9,60	1.236,54	9,92	1.334,35	10,20	1.350,32	9,78	1.499,28	11,49
L	Real Estate	553,89	4,80	602,02	4,83	640,28	4,89	681,13	4,93	688,08	5,27
M,N	Jasa Perusahaan	50,08	0,43	53,92	0,43	58,23	0,45	61,92	0,45	58,70	0,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	804,35	6,97	831,62	6,67	840,72	6,43	848,71	6,14	873,57	6,69
P	Jasa Pendidikan	906,57	7,86	972,40	7,80	1.026,47	7,85	1.107,47	8,02	1.117,34	8,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	568,36	4,93	611,32	4,90	648,86	4,96	689,87	4,99	635,85	4,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	589,02	5,11	632,38	5,07	669,25	5,12	707,86	5,13	639,69	4,90
<b>PDRB</b>		<b>11.533,90</b>	<b>100,00</b>	<b>12.464,41</b>	<b>100,00</b>	<b>13.082,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.811,53</b>	<b>100,00</b>	<b>13.051,59</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020 \* Angka Sementara, \*\* Angka Sangat Sementara

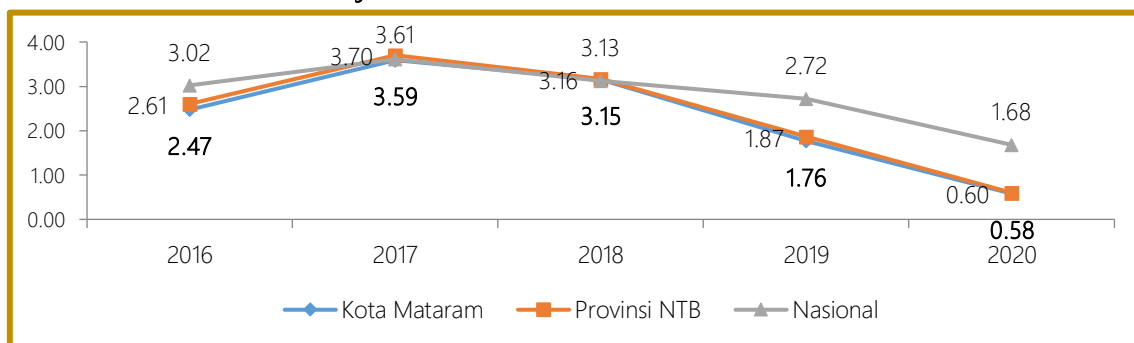
Dari tabel di atas tergambar bahwa struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada struktur ekonomi yang berorientasi pada kategori usaha perdagangan dan jasa (*City-based-trade and services*), dimana Kota Mataram menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat selain mempunyai fungsi utama sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, juga berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial.

## B. Laju Inflasi

Laju Inflasi atau deflasi merupakan perubahan harga barang di tingkat konsumen atau persentase perubahan dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada PDRB, kenaikan harga barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). Secara agregat IHI menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan harga barang akan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam membeli barang-barang kebutuhan hidup. Grafik laju Inflasi Kota Mataram periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.5

Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 laju inflasi di Kota Mataram terus mengalami penurunan, bahkan di bawah laju inflasi Provinsi NTB dan Nasional. Penurunan tersebut disebabkan oleh kelompok komoditas *volatile food* di Kota Mataram seperti bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan rokok yang pada umumnya memiliki bobot inflasi yang cukup besar pada tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 5,15 persen dan 3,93 persen mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu masing-masing menjadi 2,35 persen dan 1,44 persen. Menurunnya harga beberapa kelompok *volatile food* di Kota Mataram secara umum disebabkan oleh melimpahnya stok bahan makanan yang bersumber dari bantuan pangan pasca Gempa Lombok.

Sementara itu, angka inflasi pada tahun 2020 turun cukup dalam yaitu sebesar 0,58 persen. Angka tersebut cukup jauh dari target tahun 2020 (*Inflation Targetting Framework*) yang ditetapkan sebesar  $3,5 \pm 1$  persen. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi Covid-19 sejak bulan April 2020 Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sebesar minus 0,33 persen hingga bulan September 2020 dengan angka minus 0,04 persen. Hal ini mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan turunnya daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi atau deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi minus 5,69 persen; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan minus 1,47 persen; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 5,75 persen; dan Kesehatan sebesar 0,99 persen.

### C. Indeks Gini

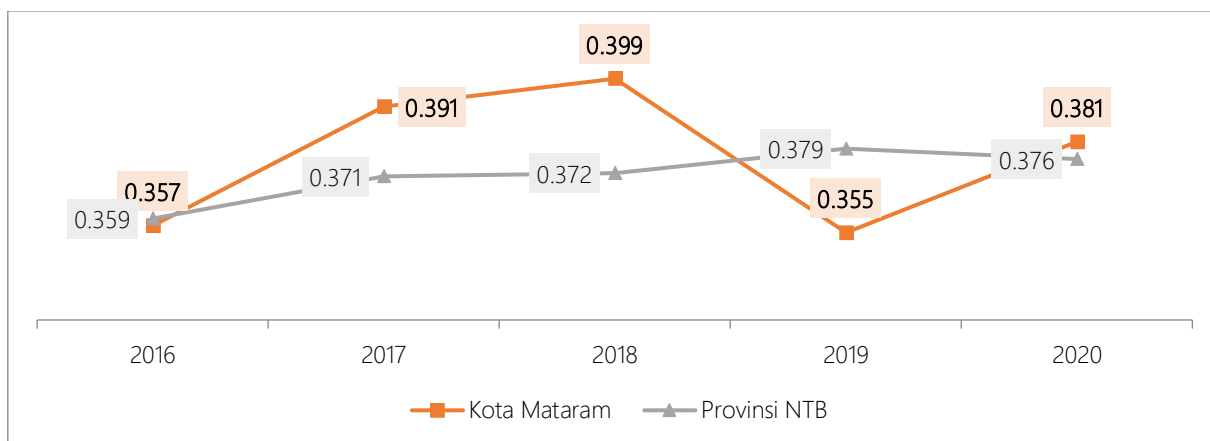
Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan salah satu ukuran umum dan sering digunakan dalam menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan, yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan secara menyeluruh pada suatu daerah. Indeks Gini memiliki angka pada rentang atau nol hingga satu. Nilai nol menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Sedangkan, nilai satu menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang-orang yang lain tidak memiliki apa-apa.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran nol dan satu. Nilai nol pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria, seperti berikut:

- $GR < 0,4$  dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,4 < GR < 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- $GR > 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.



Grafik 2.6  
Indeks Gini Kota Mataram dan Provinsi NTB  
Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah cenderung memiliki ketimpangan karena yang dituju adalah akumulasi kapital bukan distribusi pendapatan. Mengingat entitas bisnis seringkali menimbulkan eksternalitas negatif dalam aktivitas ekonominya, oleh karena itu diperlukan penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak atau padat karya dan menjamin pengupahan yang layak bagi para pekerja agar tercipta redistribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

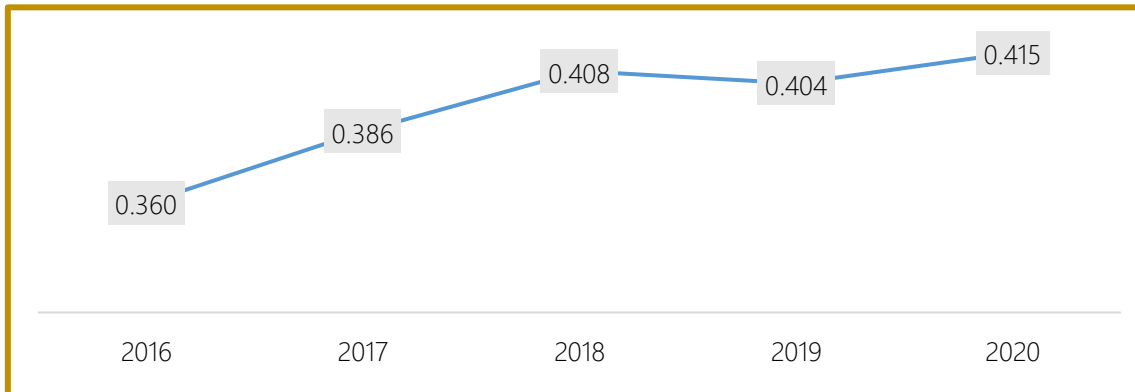
Terlihat dari grafik di atas bahwa nilai indeks gini di Kota Mataram cenderung mengalami tren peningkatan sejak tahun 2016 dari angka 0,357 melonjak menjadi 0,399 di tahun 2018. Kemudian turun cukup rendah di tahun 2019, rendahnya angka Gini Rasio pada tahun 2019 tersebut disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi yang secara konsisten menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami tekanan atau *shock* pasca gempa Lombok tahun 2018, sehingga tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja.

Seiring dengan langkah normalisasi ekonomi yang telah dilakukan pada tahun 2019, nilai Gini Rasio di Kota Mataram mengalami penurunan sebesar 0,355. Akan tetapi, angkanya kembali melonjak pada tahun 2020 menjadi 0,381 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 karena hampir semua sektor ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Meskipun angkanya berada pada kategori sedang, nilai Gini Rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi di Kota Mataram belum inklusif.

#### D. Indeks Williamson

Indeks Williamson atau indeks ketimpangan Williamson atau indeks ketimpangan regional merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antardaerah di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 2.7  
Indeks Williamson di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Data diolah, 2021

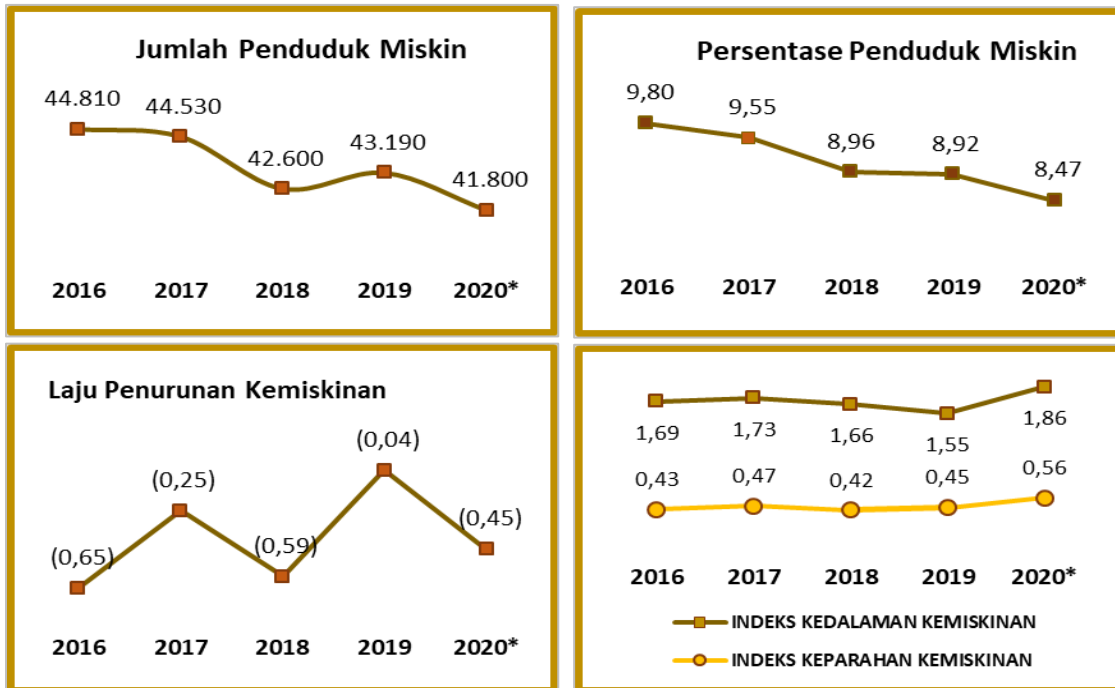
Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh pada grafik di atas terletak antara nol dan satu. Nilai indeks Williamson setiap tahun semakin menjauh dari nol yang menunjukkan ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Mataram yang semakin lebar. Perekonomian Kota Mataram selama ini digerakkan oleh sektor perdagangan dan jasa yang terpusat di Kecamatan Cakranegara, aktifitas tersebut mampu membuat pendapatan perkapita pada daerah tersebut jauh di atas rata-rata dan membuat kecamatan lain seperti Ampenan, Sekarbela dan Mataram memiliki pendapatan perkapita cukup jauh dari rata-rata.

#### E. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penduduk miskin bukan dilihat hanya karena faktor pendapatan yang rendah, tapi juga karena kapabilitas tingkat pendidikan dan kesehatan serta kriteria penduduk miskin yang masih memerlukan bantuan khusus secara intensif bahkan sepanjang hidup, yaitu seperti penyandang disabilitas berat, penduduk lanjut usia, dan penduduk yang buta huruf. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun indikator-indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.8

Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



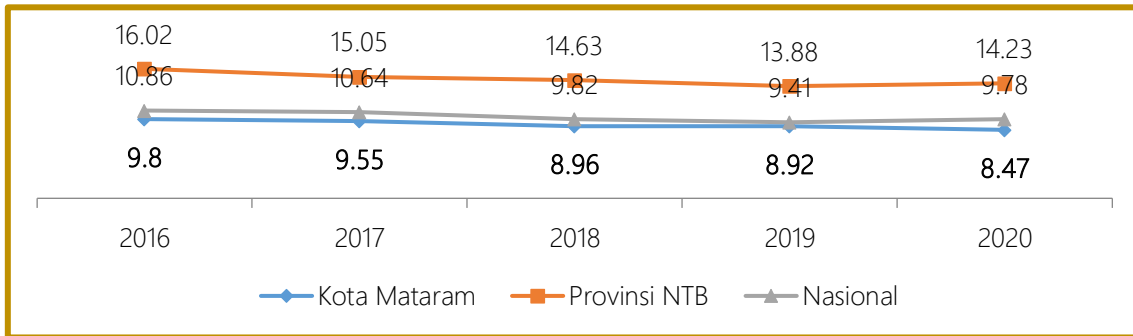
Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Persentase penduduk miskin di Kota Mataram menunjukkan tren penurunan yang cukup progresif dari 9,82 persen pada tahun 2016 turun 0,45 persen menjadi 8,47 persen pada tahun 2020. Apabila diamati pada data tersebut belum terlihat dampak pandemi Covid-19 terhadap angka kemiskinan di Kota Mataram, karena rilis data kemiskinan terutama pada level kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah hasil survei pada Bulan Maret tahun 2020.

Sementara Covid-19 merebak di bulan Maret 2020, angka kemiskinan sebagai dampak pandemi tersebut belum dapat diukur. Data penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2019. Namun penurunan tersebut tidak diiringi oleh penurunan Indeks kedalaman kemiskinan atau *Poverty*1 atau P1 dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Poverty* 2 atau P2. Indeks Kedalaman kemiskinan menunjukkan kenaikan dari 1,55 pada tahun 2019 menjadi 1,86 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan (GK). Pada indeks keparahan kemiskinan, terlihat angka indeks tersebut mengalami peningkatan dari 0,45 pada tahun 2019 menjadi 0,56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar antar penduduk miskin. Peningkatan nilai pada kedua indeks ini menunjukkan

bahwa program-program cluster penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan program induksi kemiskinan belum efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Posisi angka kemiskinan Kota Mataram jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi NTB dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

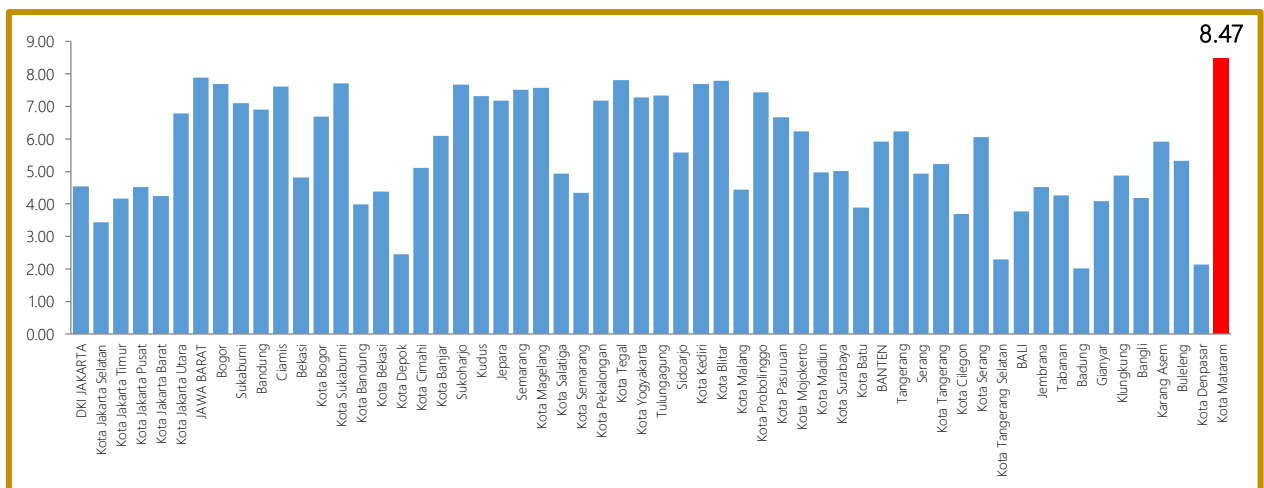
Grafik 2.9  
 Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional  
 Tahun 2016 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan grafik di atas, angka kemiskinan di Kota Mataram berada di bawah angka kemiskinan Provinsi NTB dan Nasional. Namun, jika berdasarkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sebesar 7-8 persen, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kota Mataram masih tinggi dan lebih tinggi dari 57 provinsi/ kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali, seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.10  
 Persentase Penduduk Miskin 45 Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

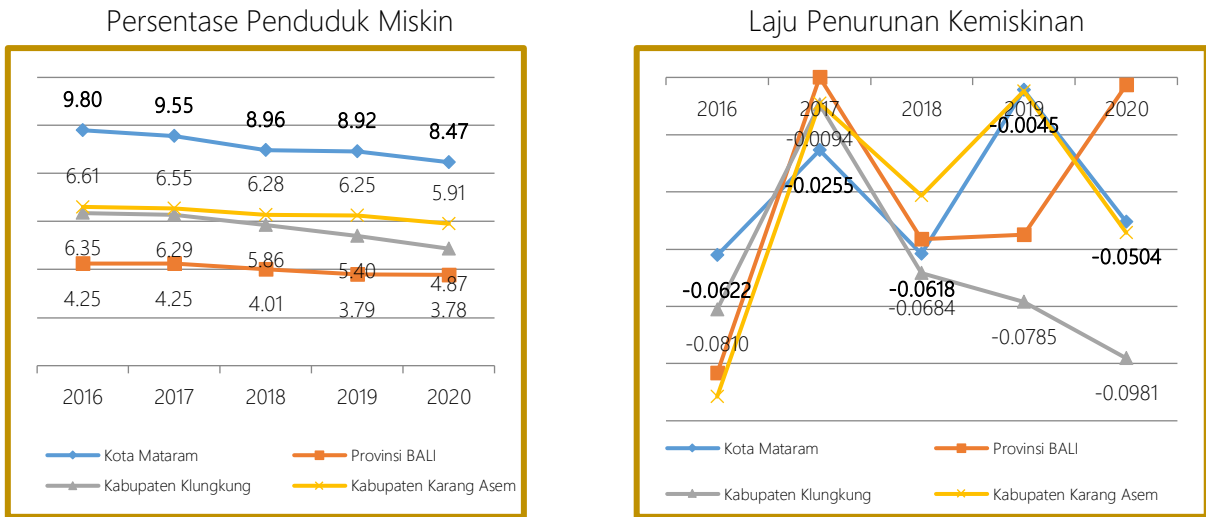
Jika melihat laju penurunan kemiskinan 57 provinsi/kabupaten/kota tersebut, terdapat 1 provinsi dan 2 kabupaten yaitu Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karang Asem



yang selama lima tahun terakhir memiliki angka persentase kemiskinan dengan trend menurun. Persentase penduduk miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan di Kota Mataram terhadap Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karang Asem adalah sebagai berikut:

Grafik 2.11

Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan di Kota Mataram, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karang Asem dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Laju penurunan kemiskinan keempat Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Akan tetapi, Kabupaten Klungkung selama tiga tahun terakhir memiliki angka kemiskinan dengan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Kota Mataram masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan kinerja penurunan kemiskinan yang masih belum baik, dimana program penanganan kemiskinan di Kota Mataram yang ada selama ini belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Mataram.

### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan; Angka Melek Huruf; Angka Kelangsungan Hidup Bayi; dan Rasio Penduduk yang Bekerja, yang diuraikan sebagai berikut:

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan untuk memperbanyak pilihan-pilihan manusia, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk,

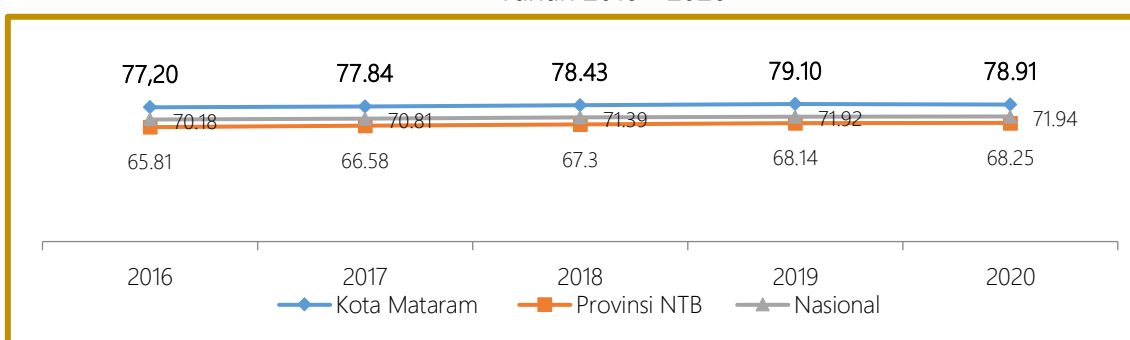
dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang dijadikan tolak ukur untuk mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan aspek kehidupan masyarakat di suatu wilayah, antara lain:

- Kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir atau AHH;
- Pendidikan dengan dimensi pengetahuan dengan indikator Harapan Lama Sekolah atau HLS, dan Rata-rata Lama Sekolah atau RLS;
- Ekonomi dengan dimensi standar hidup layak, melalui indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.

Capaian IPM Kota Mataram dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi NTB dan Nasional pada periode tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12

**Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram, Provinsi NTB dan Nasional  
Tahun 2016 - 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada di atas IPM Provinsi NTB dan IPM Nasional. Selama empat tahun terakhir IPM Kota Mataram terus mengalami peningkatan, meningkat dari 77,20 pada tahun 2016 menjadi 79,10 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 IPM Kota Mataram turun menjadi sebesar 78,91 atau mengalami penurunan sebesar 0,19 poin dibandingkan capaian IPM tahun 2019.

Penurunan nilai IPM Kota Mataram tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari 15,43 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 14,97 juta rupiah atau pertumbuhannya melambat sebesar minus 2,97 persen pada tahun 2020. Menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita juga tercermin dari rendahnya angka inflasi Kota Mataram pada tahun 2020 yang sebesar 0,58 persen. Perkembangan capaian masing-masing komponen IPM di Kota Mataram selama periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram Menurut Komponen  
Tahun 2016 -2020**

No	Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	70,70	70,98	71,24	71,59	71,76
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,50	15,51	15,52	15,58	15,59

No	Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,25	9,32	9,43	9,45	9,46
4	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp./orang/tahun)	13.733	14.316	14.797	15.426	14.968

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

### 1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup sebagai representasi dari umur panjang dan hidup sehat diproyeksikan mencapai 71,76 tahun mengalami penambahan 0,17 tahun dibandingkan dengan AHH Kota Mataram tahun 2019. Peningkatan usia harapan hidup ini sebagian besar disebabkan karena keberhasilan tindakan dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi.

### 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Berbeda dengan dua dimensi pembentuk IPM lainnya, dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah atau HLS, dan Rata-rata Lama Sekolah atau RLS. Indikator HLS atau RLS di Kota Mataram belum mencapai target karena Harapan Lama Sekolah adalah kondisi harapan tertinggi usia sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun atau setara kelas 3 pendidikan menengah atas. Kota Mataram memiliki peluang tertinggi atau positif untuk memberikan harapan penduduk usia sekolah dalam menyelesaikan pendidikannya. Kemudian untuk angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan angka peningkatan yang positif dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 belum tercapainya target angka RLS karena dipengaruhi oleh tingkat partisipasi siswa dalam bersekolah, tingkat atau kelas yang pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

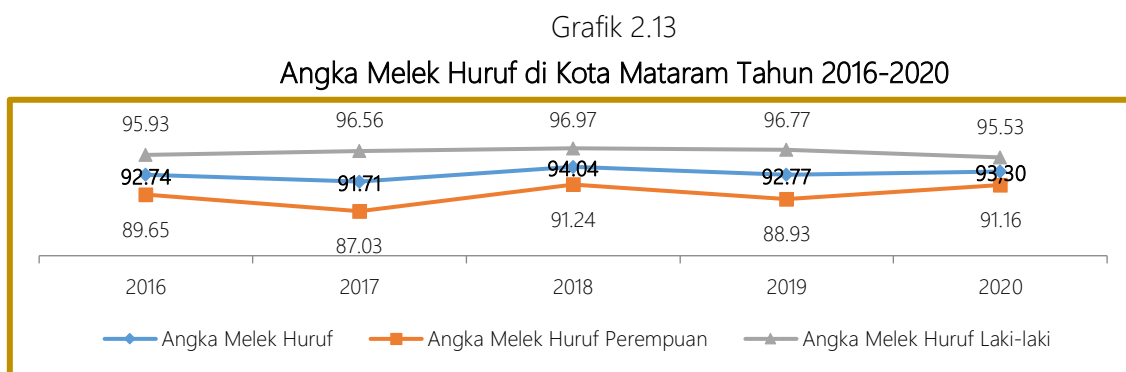
### 3. Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp./orang/tahun)

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pendapatan guna mengukur perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk. Dimensi Standar Hidup Layak menggambarkan kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, standar hidup layak diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita disesuaikan, harga konstan 2012. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Mataram pada tahun 2019 mencapai Rp 15.426.000,- per tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.14.968.000,- per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya penduduk Kota Mataram mengeluarkan sekitar Rp 1.285.500,- per orang pada tahun 2019 dan sekitar Rp. 1.247.300,- per orang pada tahun 2020.

## B. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf, kebalikan dari buta huruf merupakan refleksi dari kemampuan baca dan tulis seseorang. Hanya mengenali huruf, bahkan bisa membaca belum dapat didefinisikan sebagai melek huruf. Seseorang akan dinyatakan sebagai melek huruf apabila dia bisa membaca dan menulis.

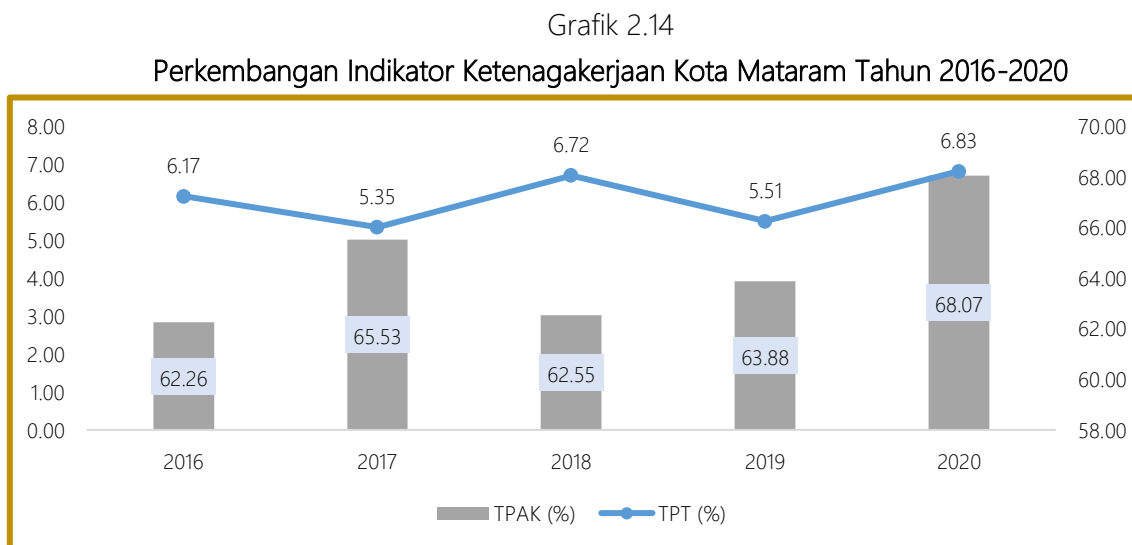
AMH dapat digunakan untuk: 1). Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu dalam menyerap informasi dan berbagai media; dan 3) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan AMH Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

## C. Tingkat Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Bertambahnya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi agar dapat menciptakan kesempatan kerja. Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kota Mataram tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:





Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Gambaran akan kinerja aspek ketenagakerjaan di Kota Mataram salah satunya tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kota Mataram selama lima tahun terakhir ini atau periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2017 TPT mengalami penurunan dari 6,17 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,35 persen pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,72 persen, hal ini disebabkan karena bencana alam gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok pada bulan Agustus 2018. Selain menyebabkan rusaknya infrastruktur juga masih sering terjadinya aktivitas gempa bumi susulan atau *aftershock*, yang berdampak pada berkurangnya wisatawan yang datang ke Kota Mataram. Hal tersebut berpengaruh pada sektor pariwisata serta lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. TPAK pada bulan Agustus 2018 tercatat sebesar 62,55 persen turun 1,98 persen dibanding dengan kondisi bulan Agustus tahun 2017 sebesar 64,53 persen. Penurunan TPAK disebabkan oleh pekerja bebas dan pekerja keluarga kebanyakan tidak bekerja pasca gempa Lombok sehingga penduduk tersebut tergolong sebagai bukan angkatan kerja.

Pada Tahun 2019 TPT di Kota Mataram kembali menurun yaitu sebesar 5,51 persen, seiring dengan perekonomian Kota Mataram yang berangsur membaik. Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menstimulus geliat ekonomi pasca gempa Lombok terutama dengan melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur ekonomi seperti pasar, hotel, toko, dan swalayan.

Berdasarkan data BPS Kota Mataram, yaitu per Agustus 2020. TPT Kota Mataram kembali naik menjadi 6,83 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata TPT Provinsi NTB yang sebesar 4,42 persen. Covid-19 yang mulai menyebar pada bulan Maret 2020 menyebabkan penduduk Kota Mataram yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja, yaitu sebanyak 7.300 orang. Selain berkurangnya penduduk yang bekerja pandemi ini juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan yang sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 ini adalah sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1,7 persen dan 0,22 persen.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

Tabel 2.12

Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian	165	203	203	203	203
	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	0,017	0,020	0,020	0,020	0,020
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
3	Jumlah Klub Olahraga	0	7	8	10	211
	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	0	0,0007	0,0008	0,001	0,0211
4	Jumlah Prasarana Olahraga	9	9	27	80	152
	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,0009	0,0009	0,0027	0,008	0,0152

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram, 2020

Perkembangan seni budaya di Kota Mataram dilihat dari jumlah grup kesenian dan gedung kesenian, dimana jumlah grup kesenian mengalami peningkatan dari 165 grup pada tahun 2016 menjadi 203 grup pada tahun 2017, dan setelah itu hingga tahun 2020 tidak mengalami peningkatan. Kemudian untuk jumlah gedung kesenian tidak mengalami penambahan sejak tahun 2016 sampai sekarang yaitu tetap sebanyak 4 (empat) gedung.

Kemudian, perkembangan olahraga di Kota Mataram terlihat dari jumlah klub olahraga dan prasarana olahraga. Adapun klub olahraga yang terdata di Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah klub bola voli, klub bola basket, klub sepakbola, klub futsal, klub tenis, klub tenis meja, klub bulu tangkis, klub renang, dan klub olahraga lainnya. Jumlah klub olahraga mengalami perkembangan yang signifikan dari nol klub atau tidak terdata dari tahun 2016 menjadi 211 klub pada tahun 2020. Sedangkan prasarana olahraga terdiri dari lapangan olahraga, lapangan bola basket, lapangan teknis, stadion sepak bola, stadion atletik, lapangan bulutangkis, kolam renang, sasana tinju, rumah billiard, lapangan olahraga terbuka. Prasarana olahraga jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari 9 prasarana menjadi 152 prasarana.

Berdasarkan informasi-informasi di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat Kota Mataram pada bidang olahraga lebih tinggi dari bidang kesenian. Hal ini juga didukung oleh rasio jumlah klub olahraga maupun rasio gedung olahraga per 10.000 penduduk yang lebih tinggi dari rasio jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi bidang urusan: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari bidang urusan: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa (catatan: Kota Mataram tidak melaksanakan bidang urusan ini karena hanya dilaksanakan oleh kota/kabupaten yang memiliki desa); pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan yang disesuaikan dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki wilayah Kota Mataram, terdiri dari bidang urusan: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.

Selain Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dalam Aspek Pelayanan Umum Kota Mataram juga melaksanakan Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi:

- Perencanaan;
- Pengawasan;
- Keuangan;
- Kepegawaian;
- Pendidikan dan pelatihan; dan
- Penelitian dan pengembangan.

#### 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. Urusan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu alasan mengapa negara kita masih menjadi negara berkembang. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi suatu negara untuk menuju sebuah kemajuan. Sumber daya manusia adalah faktor penunjang dalam keberhasilan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan yang ditempuh oleh manusia itu sendiri. Untuk itu diperlukan standar-standar yang ditetapkan sehingga kualitas pendidikan dapat tercapai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan

mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

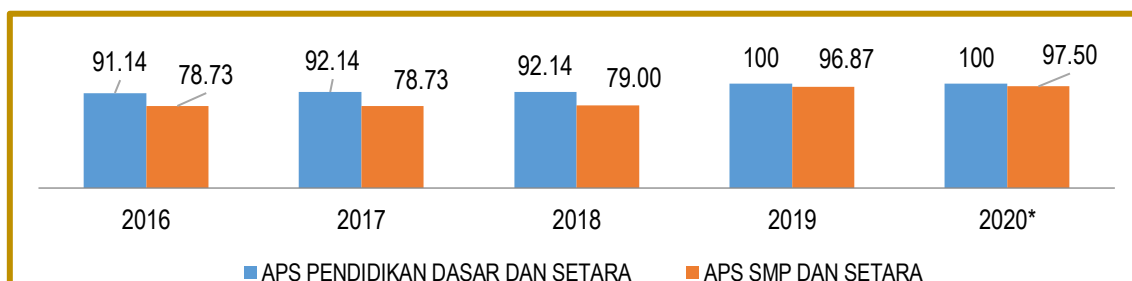
1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Untuk mencapai target SPM bidang pendidikan, Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga bagi masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa serta standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk itu, terdapat beberapa indikator dalam urusan pendidikan yang perlu diperhatikan untuk mencapai kualitas pendidikan yang dicita-citakan, adalah sebagai berikut:

### 1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Grafik 2.15  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram  
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

APS pada kelompok umur 7-12 tahun pada kurun waktu 2016-2020 sudah mencapai di atas 90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk umur sekolah dasar telah



menikmati Pendidikan Dasar. Demikian pula pada kelompok umur 13-15 tahun, APS berfluktuatif dimana pada tahun 2020 diproyeksikan APS kelompok umum 13-15 tahun mencapai 97,50 persen.

## 2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B), tanpa memperhitungkan umur terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. APK digunakan untuk mengetahui daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berikut perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Mataram pada tahun 2016-2020:

Tabel 2.13

APK untuk SD/Setara dan SMP/Setara di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	<b>APK SD/MI/Paket A</b>	<b>111,30</b>	<b>102,03</b>	<b>111,68</b>	<b>102,51</b>	<b>103,40</b>
	- Ampenan	108,89	101,02	109,90	98,20	97,76
	- Mataram	134,95	105,93	125,65	120,55	127,00
	- Cakranegara	145,73	121,37	132,20	117,90	117,44
	- Sekarbela	85,40	80,15	90,35	80,96	80,64
	- Selaparang	110,40	111,97	115,23	104,25	103,01
	- Sandubaya	73,30	86,35	91,72	87,76	88,82
2	<b>APK SMP/MTs/Paket B</b>	<b>121,89</b>	<b>104,60</b>	<b>114,96</b>	<b>107,42</b>	<b>104,03</b>
	- Ampenan	110,62	57,77	61,39	63,39	61,00
	- Mataram	115,68	107,43	117,35	110,81	96,85
	- Cakranegara	59,94	57,89	68,65	65,47	63,04
	- Sekarbela	86,81	82,21	87,63	96,00	101,23
	- Selaparang	266,32	250,13	260,88	211,60	214,85
	- Sandubaya	94,84	85,21	100,81	99,40	95,84

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa APK pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/Mts/Paket B selama lima tahun terakhir telah mencapai 100 persen dan mengalami fluktuasi, sebagai akibat dari fluktuasi jumlah murid sekolah yang berusia di luar usia resmi sekolah yang telah ditetapkan maupun yang berasal dari luar Kota Mataram bersekolah di Mataram.

## 3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C) terhadap jumlah penduduk Kota Mataram pada kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Gambaran perkembangan APM di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Tabel 2.14

APM untuk SD/Setara dan SMP/Setara di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	<b>APM SD/MI/Paket A</b>	<b>91,76</b>	<b>93,15</b>	<b>102,27</b>	<b>95,99</b>	<b>96,17</b>
	- Ampenan	56,74	92,87	101,31	92,26	91,52
	- Mataram	120,17	97,67	114,55	114,39	118,01
	- Cakranegara	131,50	110,51	119,36	107,61	108,63
	- Sekarbela	75,48	72,60	82,29	74,46	74,73
	- Selaparang	102,64	101,68	108,33	98,64	96,54
	- Sandubaya	65,45	78,25	83,11	83,06	82,05
2	<b>APM SMP/MTs/Paket B</b>	<b>100,32</b>	<b>84,08</b>	<b>92,55</b>	<b>93,79</b>	<b>94,56</b>
	- Ampenan	106,22	41,86	48,96	53,63	53,54
	- Mataram	92,94	87,47	93,29	92,71	89,53
	- Cakranegara	46,24	44,84	53,98	58,94	58,86
	- Sekarbela	65,56	64,73	68,98	78,59	87,38
	- Selaparang	221,18	208,25	213,26	192,42	200,20
	- Sandubaya	67,45	68,86	82,37	87,86	85,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

#### 4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan SD/MI (7 – 12 tahun) dan SMP/MTs (13 – 15 tahun) dan dinyatakan dalam persentase. Gambaran perkembangan APts SD/MI dan SMP/ MTs di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.15

Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Angka Putus Sekolah 7-12 tahun	1	8	9	17	5
2	Angka Putus Sekolah 13-15 tahun	52	7	59	13	10

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

#### 5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah lulusan (L) dengan jumlah siswa tingkat tertinggi (ST) pada jenjang tertentu, dinyatakan dalam persentase. Gambaran perkembangan persentase kelulusan siswa SD dan siswa SMP di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.16

Persentase Kelulusan Siswa SD dan Siswa SMP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase Kelulusan Siswa SD	100	100	100	100	100
2	Persentase Kelulusan Siswa SMP	99,33	99,92	94,03	100	100

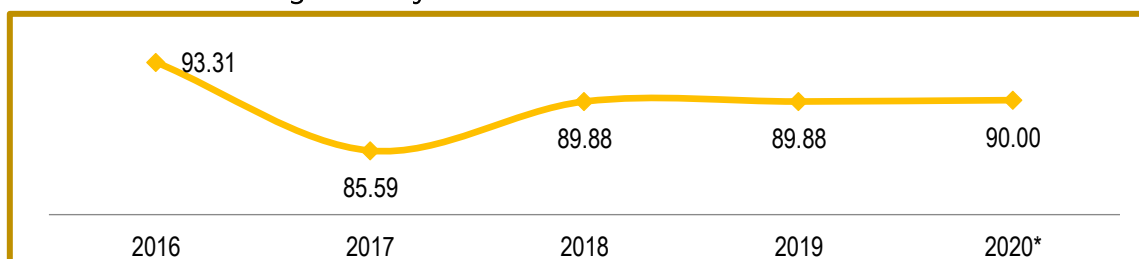
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

## 6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6, dinyatakan dalam persentase. Gambaran perkembangan Angka Melanjutkan SD di Kota Mataram dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 2.16

Angka Melanjutkan SD di Kota Mataram Tahun 2016-2020



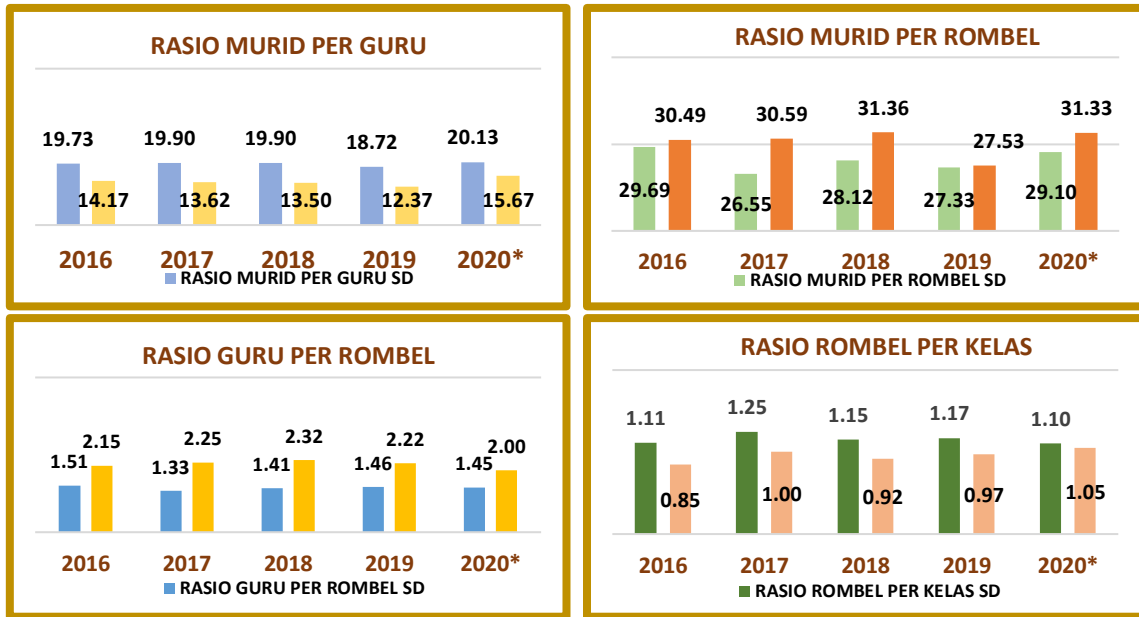
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

## 7) Rasio Guru/Murid dan Rombongan Belajar

Rasio guru/murid mengindikasikan ketersediaan dan mengukur jumlah ideal murid/guru dan rombongan belajar agar tercapai mutu pengajaran yang diharapkan. Gambaran terhadap rasio murid per guru, rasio murid per rombongan belajar, rasio guru per rombel dan rasio rombongan belajar per kelas di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.17

Rasio Guru/Murid dan Rombongan Belajar SD dan SMP/MTs Di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2021

8) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1 / D-IV

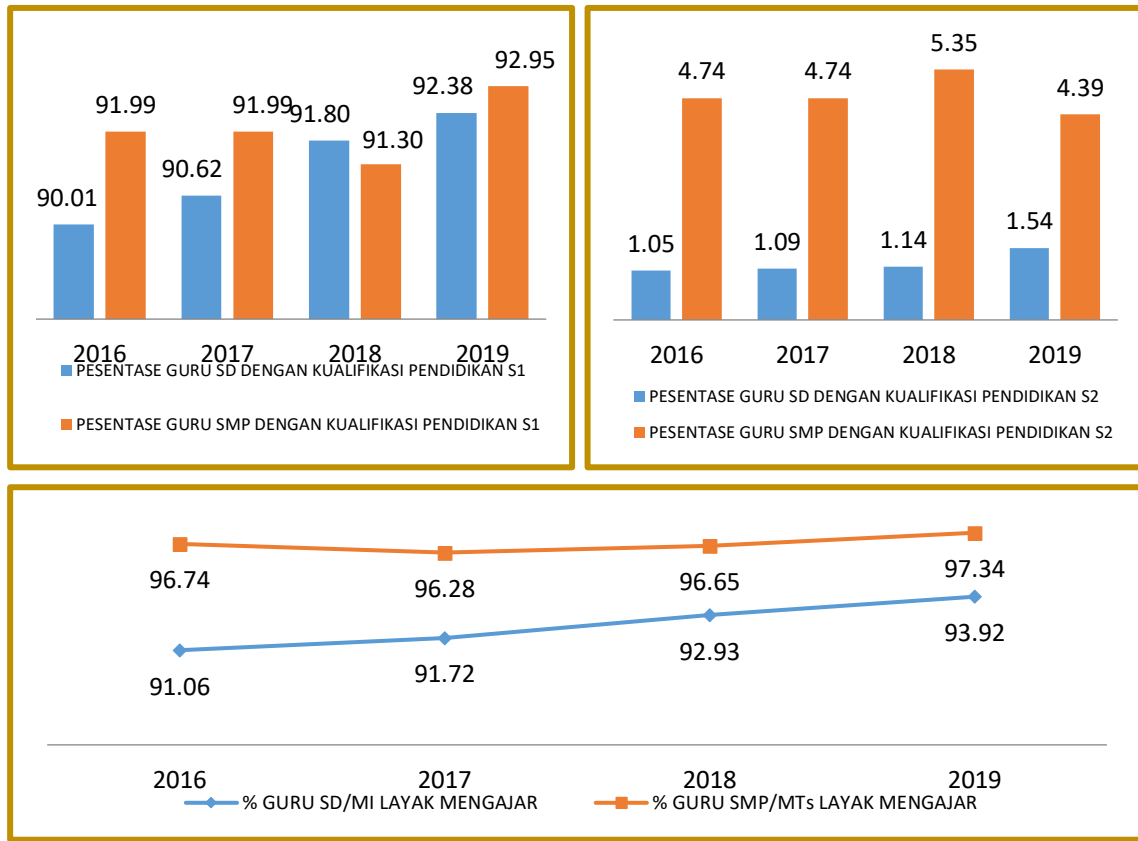
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D-IV. Dari data Dinas Pendidikan Kota Mataram, persentase guru SD/MI yang layak mengajar terus mengalami peningkatan, sedangkan guru SMP/MTs yang layak mengajar berfluktuasi tetapi kecenderungannya mengalami peningkatan.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan guru di Kota Mataram masih didominasi oleh guru dengan kualifikasi S1 dan masih sedikit persentase guru dengan kualifikasi S2, untuk jelasnya digambarkan dalam grafik di bawah ini:



Grafik 2.18

Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SD dan SMP dan Guru Layak Mengajar di Kota Mataram Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram, 2020

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Gambaran pelayanan kesehatan di kota Mataram dijabarkan melalui indikator utama dan indikator pendukung, antara lain sebagai berikut:

1) Indikator Utama Kesehatan

Indikator Utama Kesehatan di Kota Mataram meliputi, antara lain Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran Hidup (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Prevalensi Stunting dan Prevalensi Gizi Buruk, dengan uraian sebagai berikut:

a) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

*World Health Organization* (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan Angka Kematian Ibu (AKI). Istilah pertama adalah *maternal death* (kematian ibu), yang didefinisikan sebagai "kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan

disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan" (WHO, 2004). Konsep *maternal death* ini berbeda dengan konsep *maternal mortality ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *maternal mortality ratio* atau AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).

- b) Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran Hidup (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi atau AKHB merupakan probabilitas bayi hidup sampai berusia satu tahun, dihitung dengan mengurangkan satu dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi atau AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung dari banyaknya kematian bayi usia 0 tahun setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup. Gambaran umum AKB dan AKHB di Kota Mataram tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	2,84	5,33	7,50	0,50	5,00
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	997,16	994,67	992,50	999,50	995,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020

- c) Prevalensi *Stunting* dan Prevelansi Gizi Buruk

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia dua tahun. Balita pendek (*stunting*) dan sangat pendek (*severe stunting*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umumnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) 2006.

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U).

Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- *Stunting* anak balita dengan nilai *z-score* kurang dari -2SD/standar deviasi
- *Stunting* anak balita dengan nilai *z-score* kurang dari -3SD.
- Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.
- Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD s/d -3.0 SD baku WHO

Ada beberapa faktor yang dicurigai berpengaruh terhadap tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia. Faktor itu di antaranya adalah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, ASI eksklusif, kecukupan energi, kecukupan protein dan tingkat kemiskinan.

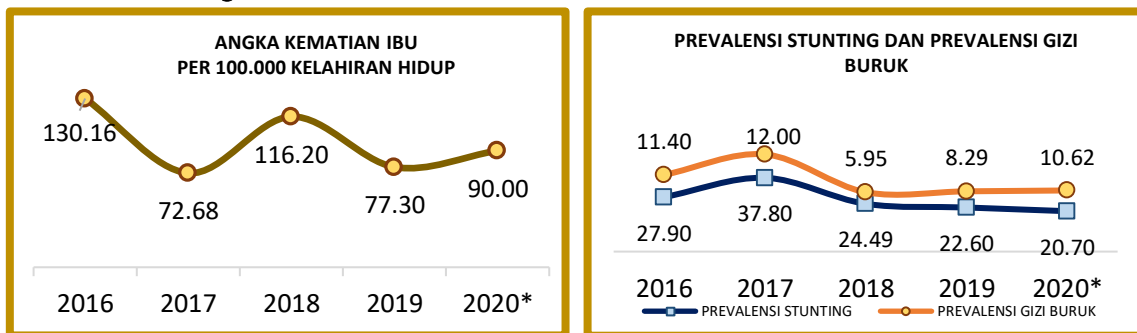
Menurut WHO, kurang tersedianya infrastruktur air dan sanitasi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan *stunting* di masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk akan meningkatkan angka kejadian penyakit menular. Kejadian penyakit menular dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi malnutrisi. *Stunting* adalah salah satu bentuk dari malnutrisi.

Untuk dapat menurunkan prevalensi *stunting*, maka diperlukan penyediaan dan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Selain itu intervensi gizi dimana Kecukupan Zn memiliki pengaruh yang signifikan pada perubahan status gizi, yang diukur dengan z-score (tinggi badan/umur). Dengan pemberian asupan Zn yang cukup, maka akan membantu mengatasi terjadinya *stunting*.

Berikut adalah gambaran indikator utama kesehatan di Kota Mataram tahun 2016-2020.

Grafik 2.19

Angka Indikator Utama Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

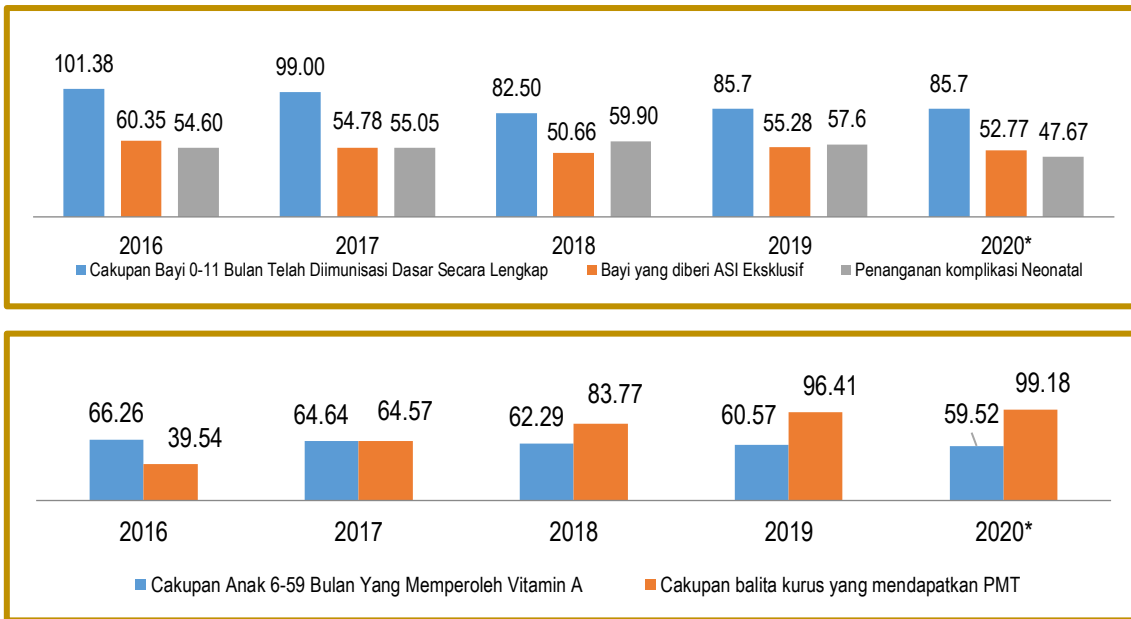
## 2) Indikator Pendukung Kesehatan

### a) Pelayanan Kesehatan Anak

Pelayanan Kesehatan Anak di Kota Mataram dilakukan melalui deteksi atau pemantauan dini terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak, meliputi: cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap; bayi yang diberi ASI Eksklusif; penanganan komplikasi Neonatal; cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vitamin A; dan cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT. Adapun gambaran perkembangan pelayanan kesehatan anak di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Grafik 2.20

Pelayanan Kesehatan Anak di Kota Mataram Tahun 2016-2020



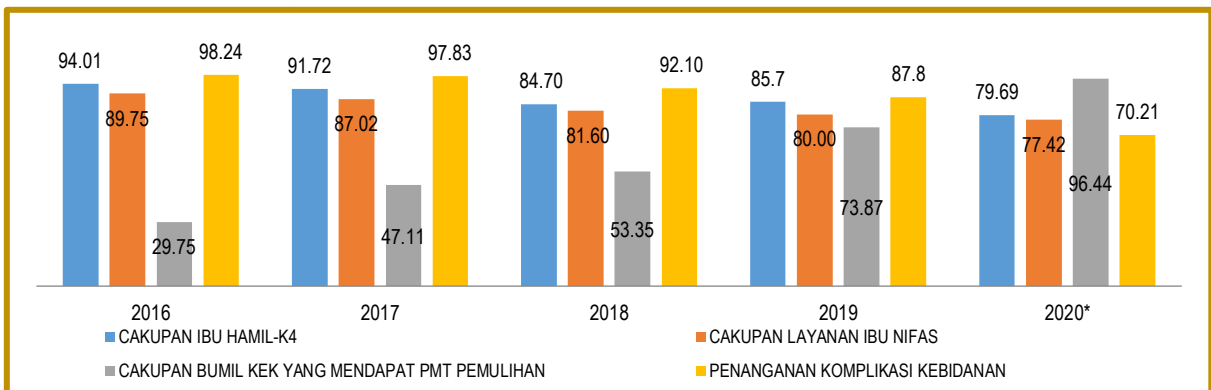
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

b) Pelayanan Kesehatan Ibu

Pelayanan Kesehatan Ibu di Kota Mataram yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui; meliputi: cakupan ibu hamil kunjungan antenatal empat kali (K4); cakupan layanan ibu nifas; cakupan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) yang mendapat PMT pemulihan; dan penanganan komplikasi kebidanan. Adapun gambaran perkembangan pelayanan kesehatan ibu di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Grafik 2.21

Pelayanan Kesehatan Ibu di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

c) Mutu Layanan Kesehatan

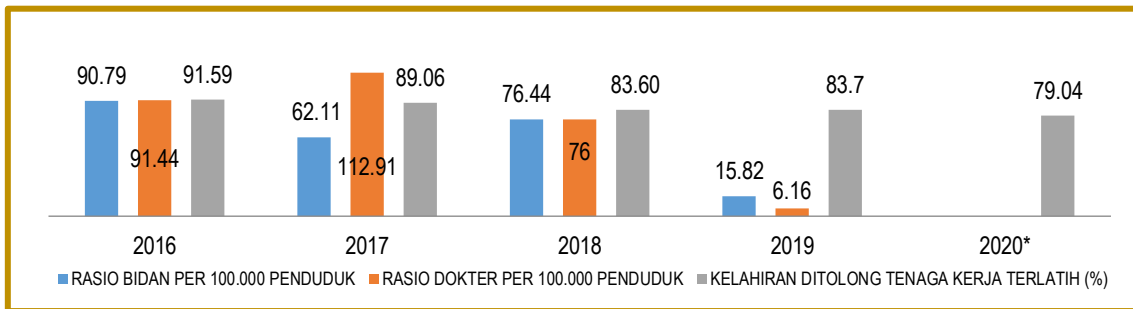
Mutu Layanan Kesehatan di Kota Mataram meliputi, antara lain: rasio bidan per 100.000 penduduk; rasio bidan per 100.000 penduduk; dan persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan



terlatih. Adapun gambaran perkembangan mutu pelayanan kesehatan di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Grafik 2.22

Mutu Pelayanan Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020



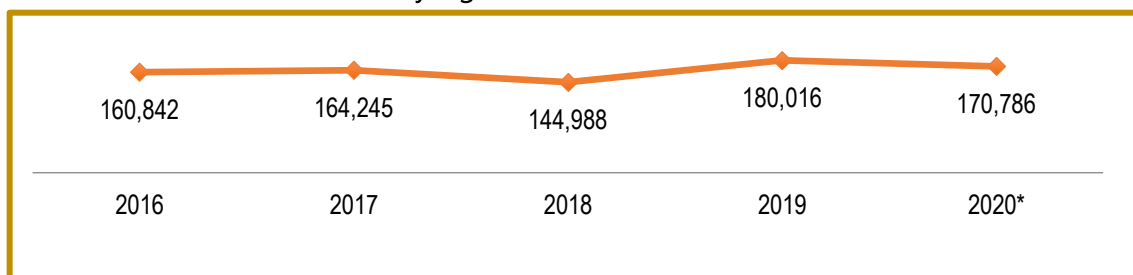
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

d) Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Adapun definisi Fakir Miskin yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian, dan/atau orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Sedangkan orang tidak mampu yaitu orang yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi dari usahanya dia hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa mampu untuk membayar iuran bulanan BPJS. Gambaran jumlah penduduk yang tercover PBI JKN di Kota Mataram tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.23

Jumlah Penduduk Miskin yang Tercover PBI JKN di Kota Mataram 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan

dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Gambaran pelayanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, sedang rusak, rusak, dan rusak berat.

Gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Mataram  
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	286.251	292.803	292.803	335.157	332.605
2	Panjang jalan seluruhnya (km)	400.063	369.850	369.850	369.850	369.850
Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi Baik		0,72	0,79	0,79	0,91	0,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Jalan dalam kondisi baik berarti semua ruas jalan dengan kondisi permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping memiliki tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 6 persen. Kondisi jalan yang baik akan mendukung arus lalu lintas berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Pada periode tahun 2016 hingga 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik terus meningkat. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019, karena jumlah ruas jalan yang diintervensi untuk dipelihara maupun ditingkatkan kondisinya, bertambah cukup banyak dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 menurun 0,01 persen atau 2.552 km dikarenakan adanya jalan yang rusak dan memerlukan pemeliharaan. Akan tetapi, anggaran kegiatan pemeliharaan jalan maupun untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan berkurang akibat *refocussing* dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Adapun penurunan panjang jalan pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya koreksi ruas jalan oleh Kementerian PUPR karena beberapa ruas jalan di Kota Mataram tidak memenuhi kriteria jalan dengan lebar minimal 3 meter. Kondisi jalan berdasarkan kualitas dapat dilihat dari indeks kualitas jalan dan jaringan jalan dalam kondisi yang mantap. Jaringan jalan dalam kondisi mantap berarti semua ruas jalan tersebut dalam kondisi baik dan memiliki kondisi arus dalam keadaan bebas maupun stabil. Adapun persentase kualitas jalan di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19  
**Persentase Kualitas Jalan Kota Mataram Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase kualitas jalan dalam kondisi baik (%)	55,82	71,55	79,17	90,62	89,83
2	Persentase kualitas jalan dalam kondisi sedang (%)	11,25	3,00	2,30	0,93	1,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa persentase kualitas jalan dalam kondisi baik di Kota Mataram dalam kurun waktu 2016-2019 rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 11,60 persen, akan tetapi kualitas jalan dalam kondisi sedang mengalami penurunan rata-rata minus 3,44 persen. Kemudian pada tahun 2020 kualitas jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan minus 0,79 persen dan kualitas jalan dengan kondisi sedang meningkat 0,61 persen. Pada periode tahun 2016-2019 anggaran difokuskan pada perbaikan dengan kualitas jalan baik dan pada tahun 2020 pada perbaikan jalan dengan kualitas sedang.

## 2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah (jiwa). Rasio ini memiliki arti bahwa tiap 1 (satu) km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi juga jumlah penduduk yang dilayani. Rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan Kota Mataram dengan jumlah penduduk Kota Mataram pada periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20  
**Rasio Panjang Jalan Kota dengan Jumlah Penduduk di Kota Mataram  
 Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	459.314	468.509	477.476	486.715	429.651
2	Panjang jalan (km)	400.063	369.850	369.850	369.850	369.850
<b>Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk</b>		1,15	1,27	1,29	1,32	1,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio pada tahun 2016 adalah 1,15 yang berarti bahwa tiap 1 kilometer jalan melayani 1,15 penduduk. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,32 penduduk per kilometer. Angka rasio sebesar itu berarti jumlah pengguna jalan masih dalam keadaan seimbang, namun tren atas rasio tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan rasio jalan tersebut adalah akibat tingginya pertambahan jumlah pengguna kendaraan pribadi, biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan layanan transportasi *online*, serta sulitnya memperoleh

transportasi umum. Hal ini perlu menjadi perhatian jika jumlah penduduk dan pengguna kendaraan pribadi semakin tinggi dan tidak sebanding dengan rasio jalan, karena dengan luas lahan di Kota Mataram yang tetap akan sulit untuk menambah infrastruktur jalan baru.

### 3) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Trotoar dan drainase selain merupakan elemen penting estetika kota juga merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan yang masing-masing berfungsi sebagai areal para pejalan kaki agar merasa aman saat melintas disisi badan jalan dan untuk mengalirkan air agar badan jalan tetap kering. Keberadaan kedua elemen tersebut pada ruas jalan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan maupun menjaga keberlanjutan fungsi jalan raya. Berikut data persentase jalan di Kota Mataram yang memiliki trotoar dan drainase selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.21  
**Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Mataram  
 Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (km)	247.499	247.499	247.499	247.499	247.499
2.	Panjang Seluruh Jalan (km)	400.063	369.850	369.850	369.850	369.850
3.	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (%)	61,87	66,92	66,92	66,92	66,92

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Selama empat tahun terakhir persentase jalan raya yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Mataram baru mencapai 66,92 persen dan belum ada intervensi penambahan panjang trotoar selama empat tahun tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa 33,08 persen ruas jalan di Kota Mataram belum memiliki trotoar dan drainase. Persentase ini cukup tinggi dan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyediakan pelayanan trotoar dan drainase untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

### 4) Persentase Irigasi Kota dalam Kondisi Baik

Pemerintah memprioritaskan penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat berupa air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem jaringan irigasi yang sudah ada. Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi infrastruktur irigasi kota adalah persentase irigasi kota dalam kondisi baik. Berikut perkembangan infrastruktur irigasi di Kota Mataram selama lima tahun:



Tabel 2.22

## Persentase Irigasi Kota di Kota Mataram dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (m)	112.497	120.398	127.863	131.658	135.246
2	Panjang Jaringan Irigasi Kota (m)	169.058	169.058	169.058	169.058	169.058
3	Persentase Panjang Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (%)	66,54	71,22	75,63	77,88	80,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2016-2020 adalah seluas 1.202 Ha. Adapun persentase panjang jaringan irigasi kota dalam kondisi baik mengalami peningkatan sekitar 3,37 persen selama lima tahun terakhir.

### 5) Persentase Kondisi Jembatan

Jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh sungai, danau, saluran air/irigasi, dan lain-lain. Prasarana jembatan di Kota Mataram berjumlah 32 buah dengan total panjang jembatan seluruh jembatan sampai dengan tahun 2020 adalah 307 m. Berikut data persentase jembatan di Kota Mataram dengan kondisi sedang dan rusak ringan selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.23

## Persentase Kondisi Jembatan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jembatan dengan kondisi rusak ringan (m)	300	300	93,9	79,3	16,5
	Persentase jembatan dengan kondisi rusak ringan (%)	97,72	97,72	30,59	25,83	5,37
2.	Panjang jembatan dengan kondisi sedang (m)	7	7	213,7	227,7	290,5
	Persentase jembatan dengan kondisi sedang (%)	2,28	2,28	69,61	74,17	94,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Panjang jembatan dalam kondisi sedang di Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat 283,50 m dari tahun 2016. Persentase jembatan dalam kondisi sedang di Kota Mataram dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,08 persen hingga mencapai 94,63 persen, sementara itu 5,37 persen sisanya masih memerlukan perbaikan dan pemeliharaan dan dalam kondisi rusak ringan.

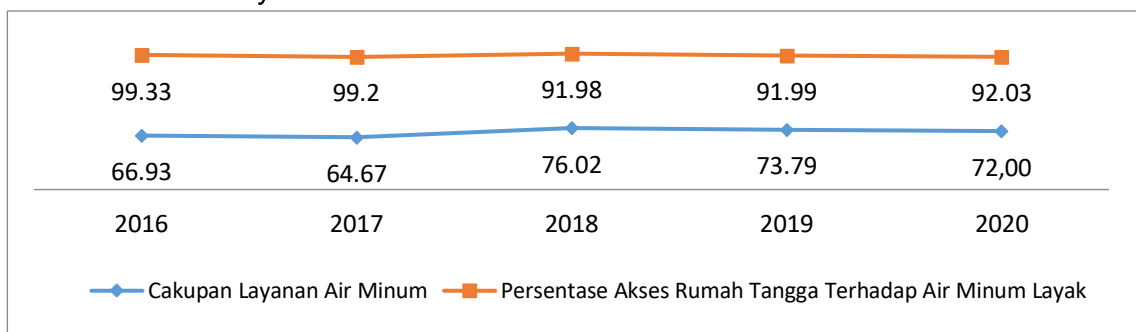
### 6) Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum dan Cakupan Layanan Air Minum

Air minum yang berkualitas atau layak merupakan air minum yang terlindung, meliputi air ledeng atau keran, keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah

perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas atau layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Adapun persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kota Mataram dan cakupan layanan air minum tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Grafik 2.24

**Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak dan Cakupan Layanan Air Minum di Kota Mataram Tahun 2016 – 2020**



Sumber: Dinas PUPR Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

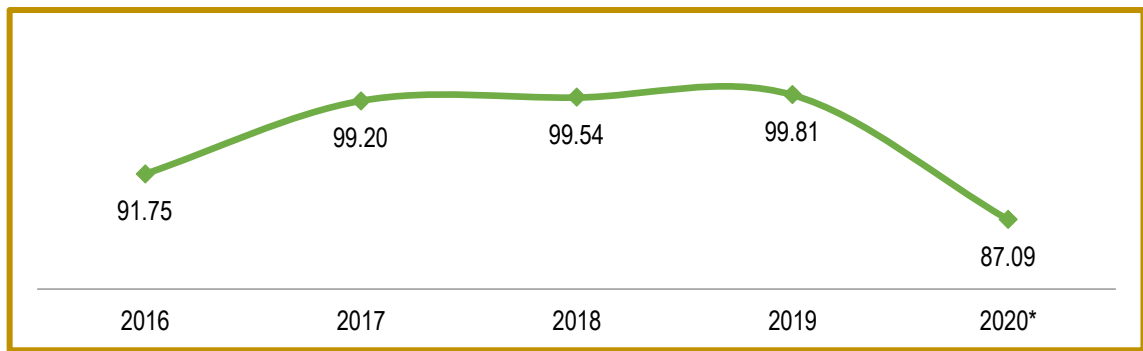
Selama lima tahun, persentase akses rumah tangga terhadap air minum mengalami penurunan dan mengalami penurunan sejak tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi, serta berdampak pada kebutuhan rumah yang meningkat dan kebutuhan layanan air minum yang juga meningkat. Peningkatan ini tidak sebanding dengan intervensi dalam penyediaan air minum yang layak bagi rumah tangga. Hal ini berarti bahwa percepatan peningkatan pelayanan perlu diperhatikan dan dilakukan untuk menyesuaikan penambahan jumlah penduduk di Kota Mataram.

## 7) Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak

Rumah tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi sekurang-kurangnya memiliki fasilitas layanan sanitasi, seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga dan dinyatakan dalam persen (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di suatu wilayah juga untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan, karena penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak dan bayi. Persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kota Mataram pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.25

Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di Kota Mataram  
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas PUPR Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2020

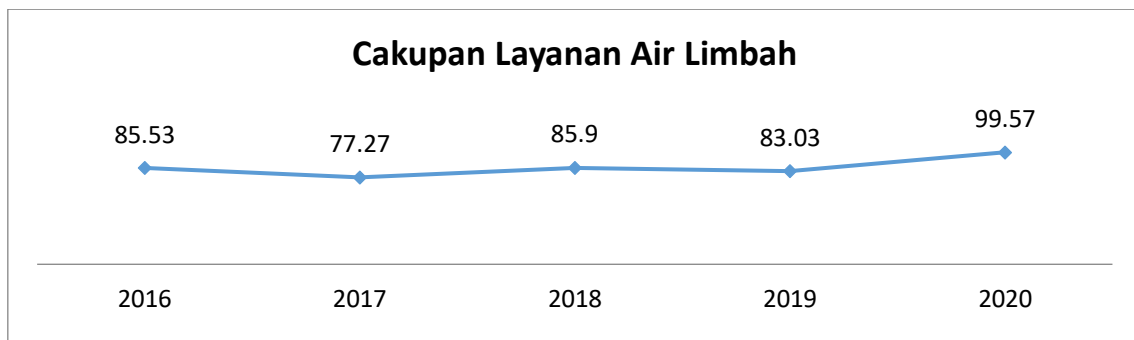
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019 sebagai respon dari peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh pada kebutuhan ruang untuk tempat tinggal serta layanan sanitasi. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan, pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pemerintah dalam melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar sanitasi.

#### 8) Cakupan Pelayanan Air Limbah

Adapun cakupan pelayanan air limbah merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung persentase Rumah Tangga yang memiliki jamban atau MCK, dimana rumah tangga mengelola air limbah domestik secara aman dan layak. Berikut perkembangan cakupan pelayanan air limbah di Kota Mataram selama lima tahun:

Grafik 2.26

Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, 2021

Cakupan pelayanan air limbah di Kota Mataram pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Penurunan yang cukup rendah pada tahun 2017 karena intervensi yang dilakukan tidak sebanding dengan penambahan jumlah rumah tangga di Kota Mataram. Pada tahun 2020 pengembangan sistem penanganan menjadi lebih baik sehingga cakupan pelayanan air limbah mengalami peningkatan yang positif.

#### D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman dan didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

##### 1) Persentase *Backlog* Rumah

Rumah dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi keberlanjutan hidup rakyat. Kondisi perumahan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan rakyat, baik secara kualitas maupun kuantitas perumahan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah. Namun, rendahnya tingkat ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada menyebabkan terjadinya *backlog* atau defisit rumah. Persentase *backlog* rumah selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24

Persentase *Backlog* Rumah di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah	97.156	98.419	99.365	99.867	101.119
2	Jumlah KK	118.243	116.297	121.277	133.114	133.802
	Persentase Kepemilikan Rumah (%)	<b>82,17</b>	<b>84,63</b>	<b>81,93</b>	<b>75,02</b>	<b>75,57</b>
	Persentase <i>Backlog</i> Rumah (%)	<b>17,83</b>	<b>15,37</b>	<b>18,07</b>	<b>24,98</b>	<b>24,43</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

Angka *backlog* di Kota Mataram selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Defisit rumah di tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2016. Hal ini disebabkan Ketersediaan akses perumahan layak huni khususnya bagi masyarakat miskin sangat sulit, karena keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di wilayah perkotaan, sehingga masih tidak memungkinkan bagi kelompok rentan untuk memiliki rumah subsidi yang saat ini menjadi kebijakan pemerintah pusat di Kota Mataram.

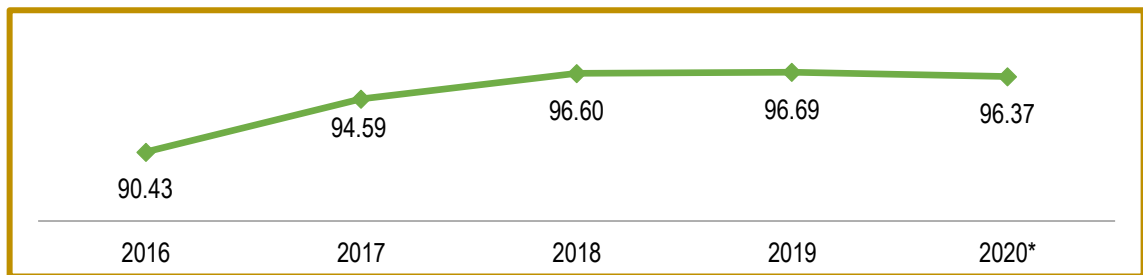
##### 2) Persentase Luas Pemukiman yang Tertata

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Gambaran perkembangan persentase luas permukiman yang tertata di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Grafik 2.27

Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Mataram Tahun 2016-2020





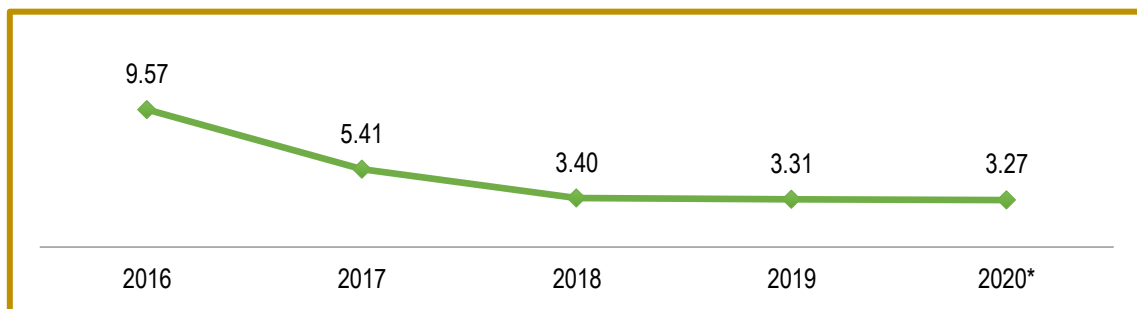
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

### 3) Persentase Luas Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran, juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Capaian persentase luas kawasan kumuh di Kota Mataram mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yang artinya bahwa program penanganan kawasan kumuh menunjukkan keberhasilan. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagai berikut:

Grafik 2.28

Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 1096/VII/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram Periode 2020-2024, data luas kawasan kumuh di Kota Mataram adalah seluas 112,60 Ha atau 1,83 persen dari luas wilayah Kota Mataram dengan rincian pada masing-masing kecamatan, sebagai berikut:

- Kecamatan Ampenan dengan luas kumuh 21,55 Ha;
- Kecamatan Sekarbela dengan luas kumuh 11,95 Ha;
- Kecamatan Mataram dengan luas kumuh 4,39 Ha;
- Kecamatan Selaparang dengan luas kumuh 7,58 Ha;
- Kecamatan Cakranegara dengan luas kumuh 17,07 Ha; dan
- Kecamatan Sandubaya dengan luas kumuh 50,06 Ha.

Secara detail, data lokasi kawasan permukiman kumuh di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25

## Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Mataram

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH (Ha)
1	2	3	4	5
1	AMPENAN	AMPENAN SELATAN	PESISIR	3,52
		BINTARO	PESISIR	4,42
		BANJAR	DAS JANGKOK	6,21
		DAYAN PEKEN	DAYAN PEKEN	7,4
SUB TOTAL				21,55
2	SEKARBELA	JEMPONG BARU	JEMPONG	3,78
		KARANG PULE	KARANG PULE	8,17
SUB TOTAL				11,95
3	MATARAM	PUNIA	KULINER	4,39
SUB TOTAL				4,39
4	SELAPARANG	MONJOK	PASCA BENCANA	4,66
		REMBIGA	KULINER	2,92
SUB TOTAL				7,58
5	CAKRANEGARA	CAKRANEGARA BARAT	PUSAT PERDAGANGAN	2,28
		CILINAYA	PUSAT PERDAGANGAN	3,25
		MAYURA	INDUSTRI RUMAH TANGGA	0,86
		CAKRANEGARA SELATAN BARU	INDUSTRI RUMAH TANGGA	5,06
		SAYANG-SAYANG	KULINER	5,62
SUB TOTAL				17,07
6	SANDUBAYA	ABIAN TUBUH BARU	INDUSTRI TAHU TEMPE	7,73
		BABAKAN	BABAKAN	5,94
		BERTAIS	PASCA BENCANA	8,62
		SELAGALAS	PASCA BENCANA	9,86
		DASAN CERMEN	DASAN CERMEN	5,87
		TURIDA	TURIDA	12,04
SUB TOTAL				50,06
<b>TOTAL KAWASAN KUMUH KOTA MATARAM</b>				<b>112,60</b>

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

Berdasarkan tabel di atas kawasan dengan luas kawasan kumuh terbesar adalah pada wilayah pasca bencana yaitu 23,14 Ha atau 20,55 persen. Kemudian diikuti pada kawasan kuliner 12,93 Ha atau 11,48 persen; kawasan Turida 12,04 Ha atau 10,69 persen; kawasan Karang Pule 8,17 Ha atau 7,26 persen; kawasan pesisir 7,94 Ha atau 7,05 persen; kawasan industri tahu tempe 7,73 Ha atau 6,87 persen; kawasan Dayan Peken 7,4 Ha atau 6,57 persen; kawasan DAS Jangkok 6,21 Ha atau 5,52 persen; kawasan Babakan 5,94 Ha atau 5,28 persen; kawasan industri rumah tangga 5,92 Ha atau 5,26 persen; kawasan Dasan Cermen 5,87 Ha atau 5,21 persen; kawasan pusat perdagangan 5,53 Ha atau 4,91 persen; dan kawasan kumuh terkecil adalah kawasan Jempong dengan 3,78 Ha atau 3,36 persen dari luas kawasan kumuh.

#### E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kota Mataram memiliki karakteristik heterogenitas dari sisi agama, ras, suku dan golongan yang dapat berpeluang untuk terjadinya konflik. Upaya preventif dalam mengantisipasi konflik dan sejenisnya dilakukan melalui komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang intensif dengan unsur Kepolisian, TNI, lembaga adat dan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah. Selain itu, Kota Mataram merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi NTB yang termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis bencana berpotensi terjadi di Kota Mataram, seperti: banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, topografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya. Berikut, gambaran capaian indikator layanan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2016-2020, yaitu:

Tabel 2.26

Capaian Indikator Layanan Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	75	80	85	100	100
2	Indeks Kota Toleran	4,05	3,78	4,41	4,417	4,417
3	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50	50	50	50	50
4	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	101,71	96,68	96,68	88,95	88,95

\* Angka Sementara

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, BPBD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat 2 indikator belum mencapai target yaitu Indeks Kota Toleran dan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI). Terkait Indeks Kota Toleran, capaian tahun 2019 menggunakan data tahun 2018 karena hasil kajian terkait Indeks Kota Toleran yang dilakukan oleh Setara Institute belum tersedia. Realisasi Indeks Kota Toleran Kota Mataram Tahun 2018 sebesar 4,41 dengan predikat capaian kinerja tinggi mencapai 89,96 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,91. Dengan capaian tersebut, Kota Mataram keluar dari peringkat terbawah kota dengan indeks toleransi terendah. Dari 4 variabel pengukuran, variabel Demografi Agama khususnya indikator heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan masih lemah dengan skor masing-masing 0,15 dan 0,2 dibandingkan dengan 3 variabel lainnya yaitu regulasi pemerintah, regulasi sosial dan tindakan pemerintah. Terkait pencapaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Mataram Tahun 2020 adalah sebesar 88,95 menurun 7,73 dari IRBI tahun 2018 sebesar 96,68. Berdasarkan capaian nilai IRBI lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren menurun. Hal ini sesuai

dengan target nasional untuk menurunkan angka IRBI. Tingkat capaian IRBI terhadap target tahun 2019 sebesar 78,78 persen dengan predikat capaian Tinggi. Tingkat Kapasitas Daerah Kota Mataram masih dalam kapasitas sedang sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

## F. Urusan Sosial

Perkembangan Kota Mataram sebagai kota urban dengan karakteristik heterogenitasnya dihadapkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang makin beragam. Daya tarik Kota Mataram yang berdampak pada meningkatnya arus urbanisasi masyarakat menjadikan permasalahan sosial terus meningkat. Selain urbanisasi, dinamika pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 2 persen setiap tahunnya menjadi faktor yang memengaruhi makin beragamnya permasalahan sosial kemasyarakatan, antara lain penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, fakir miskin dan penyakit sosial lainnya. Gambaran umum pelaksanaan urusan wajib sosial di Kota Mataram dapat dilihat dari indikator berikut:

Tabel 2.27

Indikator Kinerja Urusan Wajib Sosial di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)	2,36	2,50	2,79	2,83	2,67
2	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	38,80	40,66	42,22	54,44	58,32

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2021

Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara optimal merupakan salah satu fokus sekaligus upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Fokus yang dilakukan pemerintah bersama PSKS melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri. PSKS yang dimaksudkan adalah institusi yang aktif menangani masalah sosial dalam masyarakat. Di antaranya, para akademisi atau perguruan tinggi, organisasi sosial maupun pekerja sosial yang profesional seperti panti sosial maupun panti asuhan.

Pada tabel di atas terlihat Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peningkatan Persentase PMKS Mandiri tersebut dilakukan melalui pembinaan mental guna mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan. Sehingga tujuan besar dari pembinaan mental dan keterampilan yang dilakukan adalah agar bagaimana orang yang menyandang miskin mental dan ekonomi tersebut mau berusaha, sehingga setelah dilakukan pembinaan mental agar pola pikir hidupnya berubah, langkah selanjutnya adalah PMKS Mandiri akan diberikan modal usaha untuk mendukung usahanya.



Selain indikator utama di atas, terdapat indikator pendukung urusan wajib penanganan masalah sosial di Kota Mataram, yaitu rendahnya kualitas sumberdaya perempuan khususnya pada perempuan rawan sosial ekonomi sebagai faktor determinan dari rendahnya tingkat kesejahteraan sosial keluarga, dan merupakan salah satu dampak dari marginalisasi perempuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya kemampuan dalam memahami, menganalisis dan memanfaatkan setiap bentuk peluang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, dan indikator tersebut tergambarkan melalui indikator jumlah PRSE yang diberdayakan. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah Perempuan berusia 18-59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial No 8 Tahun 2012 bahwa "Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari". Perempuan yang dapat tergolong sebagai Perempuan Rawan Sosial Ekonomi mempunyai kriteria yaitu: (1) Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; (2) Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; (3) Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan (4) Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kehidupan layak.

Kesejahteraan perempuan wajib menjadi agenda penting dalam program pengentasan kemiskinan karena kesejahteraan perempuan pada umumnya bisa mencerminkan kesejahteraan keluarga dan dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan golongan PMKS lainnya. Untuk mengatasi permasalahan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi ini dapat dilakukan upaya pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan, dan penguatan kapasitas. Berikut adalah indikator pendukung urusan wajib sosial dengan indikator jumlah PRSE yang diberdayakan:

Tabel 2.28

Indikator Pendukung Urusan Wajib Sosial di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang diberdayakan	60	90	120	150	180

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2021

### 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

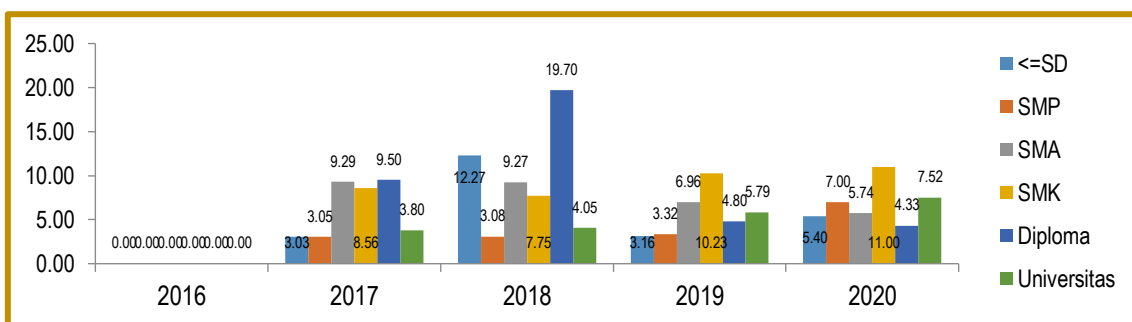
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara peningkatan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat

mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja.

Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja ketenagakerjaan. Beberapa indikator sebagai pembentuk pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja di Kota Mataram, antara lain: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja, Persentase Tenaga Kerja Formal dan Persentase Tenaga Kerja Informal. Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, yang diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Grafik 2.29

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

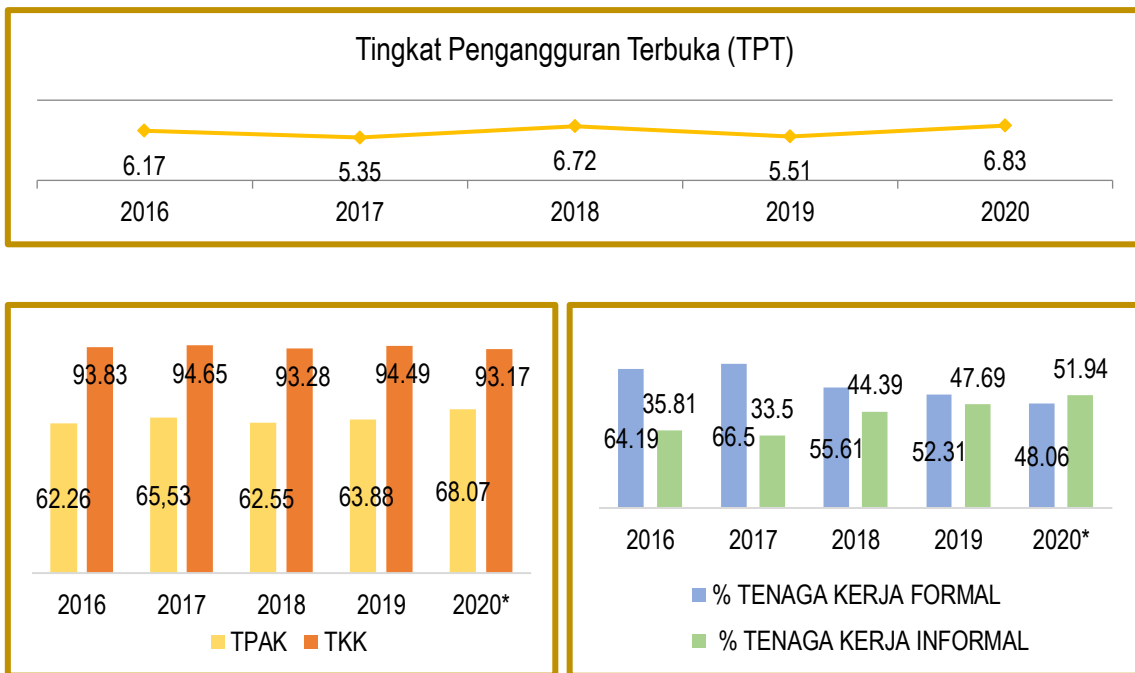
TPT berdasarkan tingkat pendidikan mengalami fluktuasi tinggi di tahun 2018 dikarenakan dampak pasca bencana gempa bumi membuat banyak kegiatan ekonomi mendadak berhenti dan terjadi PHK massal, khususnya bagi pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap yang dimaksud adalah pekerja yang dipekerjakan tergantung volume kegiatan bisnis yang dijalankan oleh badan usaha, yang pada tahun 2018 mengalami pengurangan drastis dari tahun sebelumnya. Banyaknya kehancuran infrastruktur juga menjadi salah satu faktor utama dalam melonjaknya angka pengangguran. Pada tahun 2019, terjadi pemulihan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan di Tahun 2020 angkanya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 serta mulai populernya *Freelance* sebagai salah satu pilihan bagi para lulusan universitas, sambil menunggu meredanya pandemi COVID-19.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Peningkatan TPAC Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kreatif.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat memberikan gambaran peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Komponen penghitungan TKK meliputi jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan semata-mata menunjukkan ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram. Gambaran umum pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang tenaga kerja di Kota Mataram dapat dilihat dari grafik-grafik indikator berikut:

Grafik 2.30

Indikator Kinerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

**B. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan dan anak untuk berperan aktif dalam pembangunan agar dapat mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, memberi akses perempuan dan anak terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Adapun indikator-indikator terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

**1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan dapat berubah menurut perkembangan zaman. Indeks pembangunan gender atau IPG merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas manusia pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pada suatu wilayah dengan

mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)		Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	L	P	L	P	L	P		
2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	68,97	72,88	15,59	15,11	10,36	9,11	12.557	92,66
2018	69,24	73,14	15,60	15,12	10,48	9,12	12.951	92,54
2019	69,86	73,64	15,61	15,23	10,49	9,16	13.515	92,77
2020	68,97	72,88	15,62	15,24	10,50	9,17	13.164	92,79

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, 2021

Perhitungan indeks pembangunan gender di Kota Mataram mulai dilakukan sejak tahun 2017. Pada kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu periode tahun 2017-2020, indeks pembangunan gender mengalami tren positif, sebagai akibat peningkatan nilai komponen pembentuknya. Meskipun pada tahun 2018 sempat turun 0,12 poin dari 92,66 pada tahun 2017 menjadi 92,54 pada tahun 2018. Penurunan tersebut sebagai dampak dari Gempa Lombok yang membuat probabilitas Angka Harapan Hidup Perempuan mengalami penurunan, namun hal ini tidak membuat perubahan yang signifikan untuk nilai Indeks Pembangunan Gender Kota Mataram yang terbilang memuaskan yaitu pada angka 92,54-92,79. Artinya semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar kesenjangan capaian kualitas hidup antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

## 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pembangunan gender difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indeks pemberdayaan gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan pendapatan perempuan; kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen; dan dalam pengambilan keputusan dengan indikator perempuan sebagai tenaga profesional. Berdasarkan komponen-komponen pembentuknya IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang. Indeks pemberdayaan gender di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Tabel 2.30

## Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2016	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	12,50	46,89	32,86	64,57
2018	12,50	50,16	33,54	65,34
2019	25,00	47,62	33,93	76,46
2020	25,00	46,91	34,11	76,23

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, 2021

Perhitungan IDG di Kota Mataram mulai dilakukan sejak tahun 2017. Pada kurun waktu 4 tahun terakhir, IDG mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagai akibat peningkatan nilai komponen pembentuknya. Nilai IDG Kota Mataram didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen diatas. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi yang ada di Kota Mataram.

Tren pemberdayaan gender di Kota Mataram sejak tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Dimana perolehan pada tahun 2017 adalah 64,57 selanjutnya pada tahun 2018 mencapai 65,34, kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 76,46 namun pada tahun 2020 indeks pemberdayaan gender di mengalami penurunan dari tahun lalu, yakni yang berada di angka 76,23. Penurunan tersebut merupakan kontribusi dari indikator sumbangan perempuan sebagai tenaga kerja profesional. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan banyak lapangan pekerjaan yang hilang serta banyak pihak yang mengurangi karyawannya termasuk karyawan dari kaum perempuan.

### 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan atau anak pada sebuah rumah tangga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga sebagaimana ditampilkan tabel berikut:

Tabel 2.31

## Rasio KDRT di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT (kasus)	N/A	7	21	60	41
2	Jumlah RT (RT)	125.620	128.135	130.587	133.114	116.122
3	Rasio KDRT	N/A	0,054	0,160	0,450	0,353

Sumber: Dinas P3A Kota Mataram, 2021

Kasus KDRT di Kota Mataram tertinggi pada tahun 2019, sebagian besar kasus yang terjadi adalah karena penganiayaan, perselingkuhan, ekonomi dan perebutan hak asuh anak. Faktor budaya patriarkhi yang melekat di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat kekerasan pada anggota keluarga terjadi. Pada rentang tahun 2017 hingga 2020 terdapat 27 korban kekerasan yang memerlukan dan telah mendapatkan bantuan layanan kesehatan, serta 1 korban yang memerlukan dan telah mendapatkan bantuan hukum.

### C. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi penduduk, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk. Tingkat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi penduduk dapat diukur dari indeks ketahanan pangan (IKP) dan skor pola pangan harapan (skor PPH) yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu daerah, berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, seperti ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi pada suatu wilayah. Semakin besar nilai IKP menunjukkan wilayah tersebut memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, begitu juga sebaliknya. Perkembangan IKP di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32

#### Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indeks Ketahanan Pangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kota Mataram	N/A	N/A	67,41	62,60	59,50
2.	Provinsi NTB	N/A	N/A	N/A	62,43	75,60
3.	Nasional	50,60	51,30	54,80	62,60	59,50

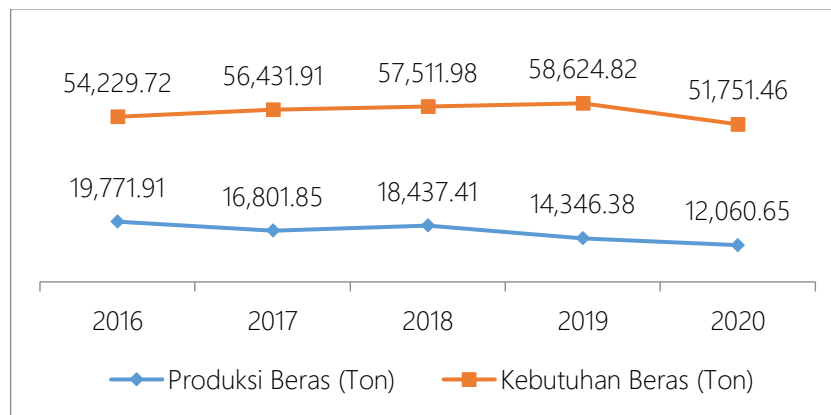
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, 2021

Perhitungan IKP oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Nilai IKP Kota Mataram periode 2018-2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 Kota Mataram masuk ke dalam prioritas 5 atau kota tahan pangan dan gizi dengan peringkat ke 65 dari 98 kota. Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020 kelompok prioritas Kota Mataram

meningkat menjadi kota sangat tahan pangan dan gizi dengan masing-masing peringkat ke 59 dan ke 70 dari 98 kota.

Meskipun angka IKP Kota Mataram diatas provinsi dan nasional serta masuk dalam kategori kota sangat tahan pangan dan gizi, namun peringkat IKP Kota Mataram masih cukup jauh dari kota-kota lain di Indonesia. Pada aspek ketersediaan pangan, yang menunjukkan kemandirian suatu wilayah, Kota Mataram saat ini dalam kondisi rentan. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara produksi pangan utama yang dihasilkan dengan kebutuhan pangan utama di Kota Mataram, adapun grafik yang menunjukkan hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.31  
Produksi Pangan Utama dan Kebutuhan Pangan Utama  
di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pertanian Kota Mataram dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, 2021

Pada grafik diatas, terlihat bahwa kebutuhan pangan Kota Mataram pada tahun 2020 berkisar pada angka 51.751,46 ton. Sementara itu, produksi pangan dalam hal ini beras sebagai bahan pangan utama sebesar 12.060,65 ton. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa adanya defisit yang sangat besar dari produksi terhadap kebutuhan pangan utama bagi Kota Mataram sebesar 39.690,81 ton. Hal ini sangat beresiko bagi kota mataram dalam pemenuhan kebutuhan pangannya secara mandiri. Defisit juga terjadi pada periode tahun 2016 hingga 2019.

## 2) Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, baik mutu gizi maupun keragaman konsumsi. Semakin besar angka PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat. Perkembangan skor PPH di Kota Mataram pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Mataram	82,13	87,90	87,90	96,80	96,40

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Provinsi NTB	94,34	83,30	89,88	91,60	91,30
3	Nasional	86,00	90,40	91,30	90,80	86,30

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2021

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Mataram selama lima tahun terus membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH. Peningkatan skor PPH pada tahun 2019 adalah karena peningkatan konsumsi pangan hewani dari 114,50 gram/kapita/hari menjadi 141,10 gram/kapita/hari, serta peningkatan konsumsi sayur dan buah dari 302,30 gram/kapita/hari menjadi 412,20 gram/kapita/hari. Penurunan skor PPH terjadi pada tahun 2020 sebagai akibat penurunan konsumsi sayur dan buah, dari 412,20 gram/kapita/hari menjadi 292,40 gram/kapita/hari. Pada masyarakat, umumnya konsumsi sayur dan buah masih relatif rendah karena dianggap sebagai kebutuhan pelengkap. Buah lokal walaupun murah kalah bersaing dibandingkan buah impor yang tampilannya sangat menggiurkan dan harganya lebih mahal.

Capaian skor PPH Kota Mataram pada tahun 2020 lebih tinggi dari Provinsi NTB dan Nasional. Meskipun belum mencapai kondisi ideal yaitu skor PPH 100. Konsumsi pangan masyarakat Kota Mataram pada tahun 2020 dari sumber karbohidrat masih didominasi oleh kelompok padi-padian dan konsumsinya masih terlalu tinggi. Sedangkan 7 kelompok pangan lainnya (umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula dan sayur & buah) masih rendah. Pangan potensial yang harus ditingkatkan konsumsinya adalah pangan yang bersumber dari protein hewani, sayuran dan buah, serta masyarakat perlu mengurangi konsumsi beras agar mencapai konsumsi ideal.

#### D. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan perseorangan, masyarakat maupun bernegara. Tanah menjadi kebutuhan pokok dalam pembangunan Negara dan menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu hal yang dapat menjadi kendala dalam pembangunan daerah adalah adanya permasalahan di bidang pertanahan, yaitu tidak tertibnya administrasi pertanahan termasuk bangunan di atasnya, sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah maupun kepemilikan bangunan. Perbaikan dalam kepemilikan tanah akan mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat rentan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pertanahan adalah persentase bidang tanah bersertifikat dan penyelesaian izin lokasi yang dijabarkan sebagai berikut:

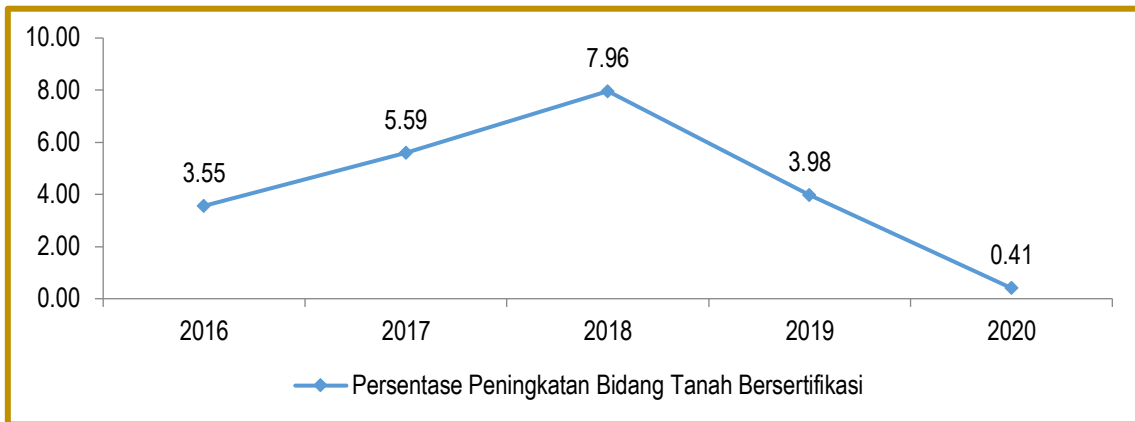
Tabel 2.34

Persentase Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	83.613	90.582	100.501	105.464	105.971
2.	Jumlah bidang tanah keseluruhan	124.578	124.578	124.578	124.578	124.578
3.	Persentase bidang tanah bersertifikat (%)	67,12	72,71	80,67	84,66	85,06

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

Grafik 2.32  
 Persentase Peningkatan Bidang Tanah Bersertifikat di Kota Mataram  
 Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa, dari total 124.578 bidang tanah yang ada di Kota Mataram, baru sebanyak 85,06 persen atau 105.971 bidang yang telah didaftarkan hingga tahun 2020. Pendaftaran bidang tanah ini mengalami peningkatan pada periode tahun 2016 hingga 2018. Namun, pada periode tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh terbatasnya slot sertifikasi tanah atau pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sementara itu, dari total 18.607 bidang tanah yang belum bersertifikat atau 14,94 persen disebabkan oleh kurang lengkapnya administrasi dalam proses sertifikasi tanah serta rendahnya minat warga dalam mengurus sertifikat tanah. Persentase penerbitan sertifikat tanah di Kota Mataram tergolong cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat tertib administrasi kepemilikan tanah di Kota Mataram yang cukup tinggi juga. Adapun tingkat tertib administrasi dalam kepemilikan bangunan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35  
 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah izin lokasi	246	179	66	625	444
Permohonan izin lokasi	321	249	107	688	451
Persentase Penyelesaian izin lokasi (%)	76,64	71,89	61,68	90,84	98,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, 2021

Izin lokasi atau saat ini disebut dengan surat keterangan rencana kota merupakan rencana tata ruang yang menjadi acuan dalam mendirikan bangunan gedung agar tidak bertentangan dengan peruntukan lokasi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pada saat mendirikan, merehabilitasi, merenovasi seluruh atau sebagian dan/atau memperluas



bangunan gedung, pemilik tidak diperbolehkan melanggar melampaui jarak bebas minimal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 hingga 2017, penerbitan izin lokasi berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, selama 3 tahun terakhir, penyelesaian izin lokasi atau surat keterangan rencana kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan, Kriteria dan Persyaratan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram pasal 11 disebutkan "Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga proses penyelesaian izin lokasi atau surat keterangan rencana kota menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Mataram.

Pada tahun 2018 permohonan izin lokasi cukup rendah, sebagai dampak dari bencana alam Gempa Bumi yang terjadi. Namun, pada 2 tahun terakhir meningkat, peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 29,16 persen, yang disebabkan oleh peningkatan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat dalam mengurus izin usaha. Sedangkan, pada tahun 2020 jumlah permohonan dan penerbitan izin lokasi menurun dari tahun sebelumnya, meskipun persentase penyelesaian izin lokasi meningkat. Penurunan jumlah permohonan tersebut sebagai akibat kelesuan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

#### E. Urusan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsinya yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dasar dan prinsip pengelolaannya adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Gambaran umum indikator Urusan Wajib Lingkungan Hidup di Kota Mataram sebagai berikut:

##### 1) Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan

Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Sedangkan prasarana persampahan merupakan fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Perkembangan sarana persampahan di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36

Sarana Persampahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Jenis Peralatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dump Truck	36	38	37	33	33
2.	Armroll Truck	19	19	19	19	18
3.	Open Pick Up Panther	16	14	14	14	11
4.	Open Pick Up Kijang	1	1	1	1	1
5.	Motor Sampah	13	16	16	340	340
6.	Gerobak Sampah	341	235	235	-	-
7.	Truk Tangki Penyiraman dan Tinja	3	2	2	2	2
8.	Lodder	1	2	2	2	2

No	Jenis Peralatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9.	Exavator	2	1	2	1	1
10.	Dozzer	2	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		434	328	328	412	408

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, dan Kecamatan se-Kota Mataram, 2021

Penanganan sampah yang dilakukan saat ini telah berbasis dari sumber sampah. Setiap lingkungan di Kota Mataram telah diberikan sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda tiga sebagai alat angkut pengganti gerobak sampah yang diharapkan dapat mempermudah mobilisasi pelayanan pengangkutan sampah langsung dari sumber sampah atau rumah tangga. Adapun perkembangan prasarana persampahan di Kota Mataram periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37

**Prasarana Persampahan di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	29	29	5	5	5
2	Mini Bin Container	52	52	11	3	3
3	Container	78	78	33	30	27
4	Transfer Depo	11	11	9	9	9
5	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSt)	4	4	3	3	3
<b>Jumlah Prasarana Persampahan</b>		174	174	61	50	47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

2) Persentase Sampah yang Tertangani

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah, jenis dan keberagaman karakteristiknya. Timbulan sampah merupakan jumlah atau volume sampah yang dihasilkan dari sumber sampah yang biasanya dinyatakan dalam volume dan berat. Tabel di bawah merupakan perkembangan persentase volume sampah tertangani di Kota Mataram pada kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.38

**Persentase Volume Sampah Tertangani di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA (Ton/Hari)	264,00	285,90	291,90	297,08	301,34

2.	Jumlah Sampah yang Terkelola di TPS 3R (Ton/Hari)	4,24	7,60	11,10	14,70	18,45
3.	Jumlah Sampah Tidak Terkelola (Ton/Hari)	53,26	34,40	31,50	28,92	27,11
4.	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)	321,50	327,90	334,50	340,70	346,90
5.	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA (%)	82,12	87,19	87,26	87,20	86,87
6.	Persentase Sampah yang Terkelola di TPS 3R (%)	1,32	2,32	3,32	4,31	5,32
7.	Persentase Sampah Tidak Terkelola (%)	16,57	10,49	9,42	8,49	7,81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

Pengelolaan sampah di Kota Mataram masih merupakan permasalahan yang sulit untuk ditangani. Kegiatan pengurangan sampah di masyarakat sebagai sumber penghasil sampah pada tahun 2020 masih berkisar 5,32 persen, sisanya 86,87 persen diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan 7,81 persen tidak terkelola masih tertinggal di masyarakat maupun pada suatu kawasan. Persentase sampah yang terkelola selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan persentase sampah tidak terkelola mengalami penurunan. Namun, jumlah timbulan sampah setiap tahun bertambah, selain karena faktor alam juga karena faktor manusia .

### 3) Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

Kualitas air atau udara merupakan karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu atas sumber-sumber air maupun udara. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas air dan kualitas udara pada wilayah tersebut. Indeks kualitas air dan kualitas udara di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39

Indeks Kualitas Air dan Kualitas Udara di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	80,00	80,00	80,00	60,00	43,33
2.	Indeks Kualitas Udara	84,86	84,86	83,08	88,80	85,22
3.	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP (%)	100	100	100	90,90	100
4.	Tingkat Pencemaran Air	cemar ringan dan cemar sedang				
5.	Tingkat Pencemaran Udara	tidak tercemar karena memenuhi baku mutu				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air di Kota Mataram mengalami tekanan yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya air dibandingkan dengan upaya perbaikan kualitas air. Penurunan IKA yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 selain karena penurunan kualitas air yang terjadi juga sebagai akibat perubahan dalam metode perhitungan IKA. Penurunan kualitas air sebagai dampak dari pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan limbah tinja. Usaha penyedotan tinja di Kota Mataram masih didominasi oleh pihak swasta, dimana masih membuang limbah atau hasil penyedotan ke sungai/badan sungai.

4) Ruang Terbuka Hijau

Standar pelayanan minimal RTH terkait penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan meliputi ruang terbuka hijau, yang terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30 persen, 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus dipertahankan keberadaannya. Secara umum kondisi eksisting RTH di Kota Mataram memiliki fungsi-fungsi seperti:

- a. Fungsi ekologis, sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
- b. Fungsi sosial dan budaya, sebagai gambaran ekspresi budaya lokal, media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat atau disabilitas;
- c. Fungsi ekonomi, kehadiran sentra-sentra ekonomi lokal masyarakat pada area RTH yang dikelola dengan baik; dan
- d. Fungsi estetika, memperindah lingkungan kota dan pembentuk faktor keindahan arsitektural.

Proporsi RTH publik dan RTH privat di Kota Mataram pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40

Persentase RTH di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Kelas RTH	Luas RTH (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>RTH Publik</b>						
1	RTH Hutan Kota	10,45	10,45	10,45	34,47	34,47
2	RTH Jalur Hijau	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
3	RTH Khusus Pemakaman	36,43	36,43	36,43	36,43	36,43
4	RTH Sempadan Jalan	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
5	RTH Sempadan Pantai	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56
6	RTH Sempadan Sungai	23,76	23,76	23,76	23,76	23,76
7	RTH Taman	16,55	16,55	16,55	30,21	30,56
	Luas RTH Publik	113,71	113,71	113,71	151,39	151,74
	Persentase RTH Publik (%)	1,85	1,85	1,85	2,47	2,48
<b>RTH Privat</b>						
1	RTH Fasilitas Umum	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
2	RTH Pekarangan	420,77	420,77	420,77	420,77	420,77
3	RTH Perkebunan	223,15	223,15	223,15	223,15	223,15
4	RTH Semak Belukar	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
5	RTH Tanah Terbuka	73,97	73,97	73,97	73,97	73,97
	Luas RTH Privat	742,22	742,22	742,22	742,22	742,22
	Persentase RTH Privat (%)	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11
	Luas RTH Publik dan Privat	855,93	855,93	855,93	893,61	893,96
	Persentase RTH Publik dan Privat (%)	13,96	13,96	13,96	14,58	14,59

*Sumber: Data diolah, RKP 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, 2021*

Sebagaimana pada tabel di atas, RTH Publik saat ini baru mencapai 2,48 persen dan masih jauh dari standar minimum 20 persen. Jenis RTH di Kota Mataram yang telah ada antara lain RTH Hutan Kota, Jalur Hijau, Taman Kota, Pemakaman, Sempadan jalan, Sempadan sungai, dan Sempadan pantai. Sedangkan untuk RTH Privat, sudah melebihi kapasitas minimum yang sebesar 10 persen yaitu mencapai 12,11 persen yang meliputi RTH Fasilitas Umum, RTH pekarangan, perkebunan, semak belukar, dan tanah terbuka.

RTH Kota Mataram secara umum memiliki keterawatan yang cukup baik, beberapa karakter vegetasi endemik mewarnai jalan-jalan besar di Mataram termasuk jalur atau koridor utama yang melewati pusat kota Mataram dan merupakan jenis-jenis pohon-pohon pusaka. Penggunaan vegetasi endemik sebagai penentu karakter kawasan kota, di antaranya: Pohon Kenari di jalan Langko, Pohon Mahoni di jalan Pendidikan, Pohon Tanjung di jalan Ahmad Yani, Pohon Palem di jalan Ketapang Kencana, Pohon Waru, Bakau dan Kelapa di sepanjang pantai. Beberapa taman kota, sekaligus sebagai ruang publik dan rekreasi masyarakat terlihat selalu ramai dan dipenuhi masyarakat. Hanya cerminan budaya Nusa Tenggara Barat tidak semua terlihat kuat dalam material maupun penataannya. Tanaman lokal seperti asem, kenari, sirih pinang perlu terus untuk dikembangkan dan dibudidayakan. Sehingga taman kota di Mataram secara visual dapat menunjukkan identitas wilayahnya.

Taman dan lapangan baik publik maupun privat terlihat distribusinya di beberapa titik merata di seluruh kecamatan. Jalur hijau dikembangkan di Kecamatan Selaparang. Jalur hijau difungsikan untuk membatasi jalan, sungai dan jaringan utilitas lainnya dari gangguan berbagai aktifitas perkotaan atau meningkatkan keamanan bagi masyarakat terhadap dampak negatif dari jaringan yang dibatasinya, misalnya berfungsi sebagai pengurang polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang lalu lalang di sekitar jalur hijau tersebut. Salah satu contohnya adalah Taman Udayana sebagai salah satu Jalur Hijau di Jalan Udayana yang berfungsi juga sebagai hutan kota karena penanaman vegetasi lindung yang rapat dan sebagai jalur jogging untuk kebutuhan refreshing dan olahraga masyarakat kota.

#### **F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

##### **1) Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk**

Program e-KTP secara nasional telah memberikan kemudahan pendataan kepastian validasi data, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu. Optimalisasi pelayanan kependudukan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung dan peralatan e-KTP. Persentase penduduk ber-KTP di Kota Mataram periode tahun 2016-2020, sebagai berikut:



Tabel 2.41

## Persentase Penduduk ber KTP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	279.230	302.215	303.668	293.594	305.315
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	292.321	304.985	309.723	298.486	301.805
	Persentase (%)	95,52	97,50	98,14	98,00	101,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio penduduk ber KTP di Kota Mataram terus meningkat. Selain adanya peningkatan kesadaran bagi penduduk usia 17 tahun ke atas untuk memiliki dan mengurus KTP, juga karena adanya kemudahan dalam pelayanan pembuatan KTP, serta inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

## 2) Rasio Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran

Rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran adalah perbandingan jumlah anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran terhadap jumlah anak usia 0-18 tahun yang ada di Kota Mataram. Perkembangan rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42

## Rasio Anak Usia 0-18 Tahun Berakta Kelahiran Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran	103.934	116.236	125.934	130.183	136.476
2	Jumlah anak usia 0-18 tahun	128.443	136.548	129.332	138.305	135.304
	Rasio	0,809	0,851	0,973	0,941	1,008

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2021

Pada periode tahun 2016-2020 terjadi peningkatan rasio anak usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran. Angka peningkatan ini terjadi karena beberapa faktor antara lain: tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kelahiran anak-anak mereka semakin tinggi; Dukcapil secara terus menerus melakukan inovasi pelayanan; peningkatan kualitas pelayanan; serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

## 3) Rasio Pasangan Berakta Nikah

Rasio pasangan berakta nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah pasangan yang telah menikah. Berikut rasio pasangan berakta nikah di Kota Mataram tahun 2016-2020:

Tabel 2.43

## Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	45.490	49.512	54.954	61.350	66.716
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	100.150	100.220	101.945	98.922	99.315
	Rasio	0,45	0,49	0,54	0,62	0,67

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, 2021

Selama lima tahun rasio pasangan berakta nikah di Kota Mataram mengalami peningkatan. Angka peningkatan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa perkawinan mereka semakin tinggi. Kemudian faktor lain adalah Dukcapil secara terus menerus melakukan inovasi pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

### G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Mataram diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

#### 1) Jumlah Keluarga Sejahtera

Progres positif dalam peningkatan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Perkembangan jumlah keluarga sejahtera di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44

## Jumlah Keluarga Sejahtera di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga Sejahtera (jiwa)	124.036	124.036	137.399	119.719	91.689

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

#### 2) Persentase Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Adanya pengendalian penduduk ditunjukkan oleh besarnya angka partisipasi KB atau akseptor KB. Pada kurun waktu tahun 2016-2020, persentase akseptor KB di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45

**Persentase Akseptor KB di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase Akseptor KB (%)	76,71	77,13	78,05	79,00	78,31

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB yang semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,69 persen disebabkan karena selama masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan kunjungan akseptor KB dan pelayanan *mobile*.

#### H. Urusan Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah. Transportasi juga sangat menentukan arah pembangunan suatu kota serta mampu mempertahankan daya saing ekonomi dengan kemampuannya menyediakan kehandalan dan kelancaran mobilitas dan konektivitas. Untuk mengukur kehandalan sektor transportasi dalam menopang pembangunan kota, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain:

##### 1) Mobilitas dan Konektivitas

Tabel 2.46

**Capaian indikator pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penggunaan moda angkutan umum (%)	7	7	5	6	3
2	Rasio perjalanan	1,80	1,80	1,80	1,75	1,20
3	Rasio Konektivitas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4	LoS ( <i>level of service</i> ) ruas jalan	Level C	Level B	Level B	Level B	Level B
5	Cakupan wilayah angkutan umum (%)	23	28	23	31	23

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2021

Indikator-indikator pada tabel di atas terbagi dalam dua bagian yaitu aspek mobilitas dan aspek konektivitas/aksesibilitas. Pada aspek mobilitas terdiri dari rasio perjalanan dan LoS (*level of service*) ruas jalan. Sedangkan, aspek konektivitas/aksesibilitas terdiri dari Persentase penggunaan moda angkutan umum dan Rasio perjalanan.

Persentase penggunaan moda angkutan umum diukur dari jumlah total penggunaan moda angkutan dari total perjalanan penduduk. Tren penggunaan moda angkutan dari tahun ke tahun di Kota Mataram mengalami penurunan, dimana bila dihitung dari nilai *baseline* di tahun 2016 ke

tahun 2020 penurunannya mencapai setengahnya dari 7 persen di tahun 2016 menjadi 3 persen di tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan indikasi bahwa angkutan umum belum menjadi pilihan utama warga Kota Mataram dalam bertransportasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi di Tahun 2020 disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan mobilitas warga dan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan kesehatan.

Kemudian untuk indikator cakupan wilayah angkutan umum menunjukkan rasio luas wilayah Kota Mataram yang dilayani oleh angkutan umum. Pada tahun 2020, hanya ada satu trayek yang beroperasi dengan panjang lintasan 13,90 Km, maka *coverage* wilayah Kota Mataram dengan luas 61,30 Km<sup>2</sup> adalah sebesar 23 persen. Peningkatan cakupan wilayah angkutan umum terjadi pada tahun 2017 dan 2019 ketika perekonomian di Kota Mataram mulai menggeliat.

Selanjutnya, untuk indikator rasio perjalanan melihat perbedaan waktu tempuh pada jam sibuk dengan waktu tidak sibuk untuk mengukur kelancaran lalu lintas. Waktu perjalanan yang berbeda menunjukkan kinerja lalu lintas yang menurun saat jam padat. Nilai rasio perjalanan setiap tahun terus mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan rasio perjalanan yang semakin mendekati nilai 1. Penurunan tertinggi terjadi di tahun 2020 yang disebabkan oleh berkurangnya aktivitas dan mobilitas akibat pandemi COVID-19.

Terakhir, indikator *Level of Service* atau level pelayanan jalan merupakan indikator yang menjelaskan tentang seberapa efisien ruas jalan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Indikator tersebut membandingkan volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Mempertahankan level pelayanan jalan membutuhkan usaha yang cukup kompleks dikarenakan pertumbuhan kota yang menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan dimana panjang ruas jalan tidak mengalami penambahan. Dari capaian yang ada Kota Mataram berhasil mempertahankan level pelayanan jalan tetap berada pada Level B yaitu berada dalam kondisi arus stabil.

## 2) Fasilitas Perlengkapan Jalan

Fasilitas perlengkapan jalan merupakan fasilitas pada suatu jalan yang ditempatkan dengan tujuan untuk memberikan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Adanya fasilitas jalan yang memadai, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman saat berkendara. Perkembangan fasilitas perlengkapan jalan di kota mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Rambu Jalan (unit)	934	1.124	1.124	1.204	1.204
Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) (unit)	99	99	99	99	99
Marka Jalan (m <sup>2</sup> )	9.282	10.390	10.390	12.153	12.153
Paku Jalan (unit)	2.718	2.985	2.985	2.985	2.985
Pagar Pengaman (m)	1.181	1.346	1.346	1.346	1.346
<i>Warning Light</i> (unit)	29	34	34	34	34
<i>Deliniator</i> (unit)	740	944	944	944	944
<i>Traffic Light</i> (unit)	38	38	38	38	38

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Cermin Tikungan (unit)	31	31	31	36	36
Papan Nama Jalan (unit)	337	567	771	846	846
Penerangan Jalan Umum (unit)	14.141	14.491	15.011	15.411	15.711

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2021

Fasilitas perlengkapan jalan di Kota Mataram setiap tahun terus meningkat. Pemerintah memantau dan memperbaiki fasilitas perlengkapan jalan yang rusak dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perawatan fasilitas jalan yang ada. Namun, terdapat beberapa kekurangan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang ada, seperti fasilitas perlengkapan jalan yang belum ramah bagi kaum disabilitas. Kemudian, prasarana operasional yang digunakan untuk kegiatan pemantauan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan kurang layak dari segi keamanan dan keselamatan kerja, saat ini Dinas Perhubungan Kota Mataram hanya memiliki satu unit kendaraan roda empat jenis *pick up* tahun 2004 dan satu kendaraan jenis *sky lift* tahun 2001

Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dilakukan dengan memperhatikan tingkat keselamatan pengguna jalan. Tingginya angka kecelakaan mengharuskan Dinas Perhubungan Kota Mataram sebagai pengampu urusan perhubungan untuk dapat berkoordinasi dengan seluruh sektor terkait melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan agar dapat mengantisipasi tingginya angka kecelakaan bermotor dan pemenuhan standar keamanan pengguna jalan di Kota Mataram guna menurunkan tingkat kecelakaan yang terjadi. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan menjadi salah satu indikator dari penurunan angka kecelakaan jalan di Kota Mataram, hal ini terlihat dari angka kejadian dan jumlah korban kecelakaan di Kota Mataram dalam kurun waktu 2016-2020 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.48

Kejadian dan Korban Kecelakaan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Korban Kecelakaan	Kejadian dan Korban Kecelakaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecelakaan (kasus)	339	264	335	339	259
2	Meninggal (kasus)	42	40	75	33	28
3	Luka Berat (kasus)	-	-	-	-	-
4	Luka Ringan (kasus)	297	224	260	306	231

Sumber: BPS, Kepolisian Kota Mataram, 2021

Jumlah kejadian dan korban kecelakaan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan dan ketidaklayakan jalan. Kombinasi faktor-faktor tersebut bisa terjadi juga karena adanya faktor lingkungan dan cuaca, sehingga berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan kondisi jalan yang tidak sesuai dengan perencanaan juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.

#### I. Urusan Komunikasi dan Informasi



Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, integratif, serta pelayanan publik yang terpercaya dan mampu melahirkan inovasi TIK dapat terwujud. Indikator yang digunakan dalam mengukur tujuan tersebut adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Indeks SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE dinilai berdasarkan hasil evaluasi indeks SPBE oleh KemenpanRB, dengan menggunakan metode tingkat kematangan atau *maturity level* dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah. Adapun struktur penilaian terdiri dari: (1) Domain, yang merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; (2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan (3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai. Perkembangan Indeks SPBE di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49  
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  
di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Indeks SPBE	N/A	N/A	2,71	2,51	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, 2021

Pada tahun 2018 Indeks SPBE dihitung dengan 36 indikator dan pada tahun 2019 sebanyak 41 indikator. Pada tahun 2020 tidak dilakukan pelaksanaan Evaluasi SPBE secara Mandiri oleh Kemenpan RB, karena adanya Pandemi COVID-19, akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram tetap melakukan evaluasi internal. Berdasarkan tabel diatas tersebut nilai Indeks SPBE Kota Mataram pada tahun 2018 adalah sebesar 2,71 dari skala 5 dengan predikat baik dan pada tahun 2019 menurun menjadi 2,51 dengan predikat cukup. Penurunan tingkat kematangan atau *maturity level* pelaksanaan SPBE di Kota Mataram disebabkan oleh belum tersedianya payung hukum terkait pelaksanaan SPBE. Meskipun demikian nilai indeks SPBE Kota Mataram masih diatas Nasional yang pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 2,18 dan 2,26.

#### J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan yang penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia dalam kaitannya mendukung usaha kecil dan menengah. Indikator-indikator persentase koperasi aktif, UKM non BPR/LKM aktif dan persentase Usaha Mikro dan Kecil digunakan sebagai alat untuk melihat perkembangan perekonomian Kota Mataram. Melalui koperasi aktif, semakin besar jumlah koperasi aktif yang ada di suatu daerah, maka akan

semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggerakkan perekonomian. Berikut adalah perkembangan persentase koperasi aktif yang ada di Kota Mataram:

Tabel 2.50

**Persentase Koperasi Aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	388	324	268	228	159
2	Jumlah Koperasi	598	394	328	270	229
	Persentase (%)	65	82	82	84	69

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

Data pada tabel di atas merupakan data jumlah Koperasi aktif dan jumlah Koperasi. Jumlah Koperasi merupakan jumlah Koperasi aktif ditambah dengan Koperasi yang masih dalam proses pembubaran dan Koperasi dinonaktifkan/tidak aktif atau tidak melaksanakan RAT 3 tahun berturut turut. Berdasarkan peraturan perundang undangan khususnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut turut mengadakan RAT atau Rapat Anggota Tahunan dan Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

Seluruh data Koperasi di Indonesia termasuk di Kota Mataram didasarkan pada *Online Data System* (ODS), yaitu database Koperasi yang dikelola oleh Kementerian Koperasi UKM RI. Berdasarkan kebijakan Reformasi Koperasi yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM RI sejak tahun 2015, diberlakukan Kebijakan Rehabilitasi yaitu pembaharuan organisasi Koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembubaran Koperasi. Adapun langkah-langkah yang diambil dari kebijakan tersebut adalah mengeluarkan Koperasi tidak aktif dari database Kementerian Koperasi Dan UKM RI. Pembubaran Koperasi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing tertuang dalam SK Menteri Koperasi UKM Nomor 65/Kep.M.KUKM/VII/2017 dengan jumlah 48 Koperasi dan SK Menteri Koperasi UKM nomor 153 Tahun 2018 dengan jumlah 54 Koperasi.

Kemudian, perkembangan perekonomian daerah juga dapat dilihat dengan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah wirausaha baru. Sebagaimana definisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya agar menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah atau bernilai lebih tinggi.

Jumlah wirausaha baru yang diukur dengan jumlah UKM non BPR/LKM aktif selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Secara kuantitatif jumlah wirausaha baru tersebut mudah untuk dihitung, namun capaian kinerja secara kualitas sulit untuk diukur. Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51

## Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	2.792	3.158	4.470	4.180	5.000
Jumlah seluruh UKM	2.792	3.158	4.470	4.180	5.000
Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

UKM non BPR/LKM di Kota Mataram merupakan faktor yang berpengaruh dalam kehidupan industri daerah, serta mencerminkan usaha dan potensi daerah untuk terus mengembangkan kehidupan ekonominya secara riil dengan mengolah sumber daya alam yang ada agar dapat menaikkan nilai dari produk yang dibuat melalui proses pengolahan yang dilakukan. Hal ini mengisyaratkan perlunya dukungan hukum yang lebih berpihak terhadap UKM non BPR/LKM di Kota Mataram. Adapun persentase usaha mikro dan kecil di Kota Mataram periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52

## Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah usaha mikro dan kecil	487	363	465	910	2.795
Jumlah seluruh UKM	2.792	3.158	4.470	4.180	5.000
Persentase (%)	17,44	11,49	10,40	21,77	55,90

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

Apabila diamati pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil dari 21,77 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 55,90 persen pada tahun 2020. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya korban PHK beralih menjadi pelaku UMKM. Hal ini juga ditopang oleh adanya Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang berupa Bantuan Permodalan Bagi UMKM dari pemerintah pusat dan pemberian bantuan stimulus berupa bantuan peralatan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM terdampak COVID-19 dari pemerintah daerah.

#### K. Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal dalam suatu Negara maupun di daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan investasi yang terjadi dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah. Selain itu, besarnya investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Pemerintah harus mengupayakan pembenahan terhadap peningkatan pelayanan secara prima dalam menunjang iklim berinvestasi. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan

penggunaan modal dalam negeri yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar penanaman modal yang dilakukan, semakin meningkat pula pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Investasi berdasarkan sektor di Kota Mataram selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.53  
Investasi Berdasarkan Sektor di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Sektor	PMDN (Rp)	PMA		Jumlah Perusahaan PMDN	Jumlah Perusahaan PMA
			( \$ )	(Rp)		
Tahun 2016						
1	Tanaman Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Industri Makanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Industri Kayu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Industri Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Pertambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Peternakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Konstruksi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Perdagangan dan Reparasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Hotel dan Restourant	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Transportasi, gudang & komunikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Perumahan, kawasan ind. Dan perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	jasa lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	listrik, gas dan air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2017						
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	500.000.000	-	-	1	-
3	Industri Makanan	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	16.500.000.000	-	-	1	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	-	-	-	-	-
8	Konstruksi	110.772.434.150	-	-	30	-
9	Perdagangan dan Reparasi	143.716.139.326	10.102.100	40.500.000.000	106	11
10	Hotel dan Restourant	41.766.000.000	2.200.000	75.000.000.000	11	3
11	Transportasi, gudang & komunikasi	750.000.000	-	-	1	-
12	Perumahan, Kawasan Ind. dan perkantoran	600.000.000	1.250.000	-	1	1
13	jasa lainnya	129.762.240.996	2.600.000	334.738.132.119	36	14

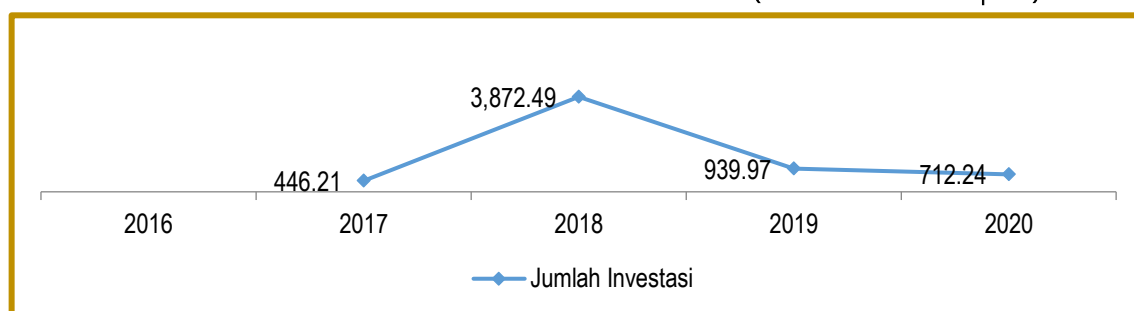
No	Sektor	PMDN (Rp)	PMA		Jumlah Perusahaan PMDN	Jumlah Perusahaan PMA
			( \$ )	(Rp)		
14	listrik, gas dan air	1.844.000.000	1.200.000	-	3	1
	Jumlah	446.210.814.472	17.352.100	450.238.132.119	190	30
Tahun 2018						
1	Tanaman Pangan	142.260.803.478	-	-	11	-
2	Perikanan	10.000.000.000	-	-	1	-
3	Industri Makanan	500.000.000	-	-	1	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	4.485.021.141	-	29.961.019.524	3	1
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	11.398.747.920	-	-	4	-
8	Konstruksi	33.306.693.000	-	-	17	-
9	Perdagangan dan Reparasi	1.438.041.892.395	-	22.900.000.000	141	3
10	Hotel dan Restourant	57.820.279.340	-	43.583.052.060	9	4
11	Transportasi, gudang & komunikasi	9.923.150.000	-	-	4	-
12	Perumahan, kawasan ind. dan perkantoran	33.519.234.000	-	6.051.519.300	21	2
13	jasa lainnya	2.042.176.704.635	-	35.390.746.009	54	4
14	listrik, gas dan air	89.060.850.341	-	-	1	-
	Jumlah	3.872.493.376.250		137.886.336.893	267	14
Tahun 2019						
1	Tanaman Pangan	4.111.000.000	-	-	1	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Industri Makanan	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	5.158.010.000	-	-	4	-
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	11.896.833.297	-	-	2	-
8	Konstruksi	241.379.319.000	-	-	25	-
9	Perdagangan dan Reparasi	199.164.206.233	-	-	58	-
10	Hotel dan Restourant	459.982.863.817	-	-	18	-
11	Transportasi, gudang & komunikasi	-	-	-	-	-
12	Perumahan, kawasan ind. Dan perkantoran	9.705.070.612	-	-	7	-
13	Jasa lainnya	8.573.728.000	-	10.112.500.000	11	1
14	listrik, gas dan air	-	-	-	-	-
	Jumlah	939.971.030.959		10.112.500.000	126	1
Tahun 2020						
1	Tanaman Pangan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Industri Makanan	-	-	-	-	-
4	Industri Kayu	-	-	-	-	-
5	Industri Lainnya	-	-	-	-	-



No	Sektor	PMDN (Rp)	PMA		Jumlah Perusahaan PMDN	Jumlah Perusahaan PMA
			( \$ )	(Rp)		
6	Pertambangan	-	-	-	-	-
7	Peternakan	-	-	-	-	-
8	Konstruksi	31.391.666.258,85		-	19	-
9	Perdagangan dan Reparasi	56.515.447.920,50		297.099.302,65	131	4
10	Hotel dan Restourant	314.388.639.799,62		51.962.500,00	30	6
11	Transportasi, gudang & komunikasi	32.962.280.633,00		35.827.340.362,00	21	6
12	Perumahan, kawasan ind. Dan perkantoran	34.539.249.980,00			8	1
13	jasa lainnya	45.455.231.353,00	5.830,00	3.603.541.118,00	64	27
14	listrik, gas dan air	196.983.071.804,89	-	-	9	-
	Jumlah	712.235.587.749,86	5.830,00	39.779.943.282,65	282	44

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, 2021

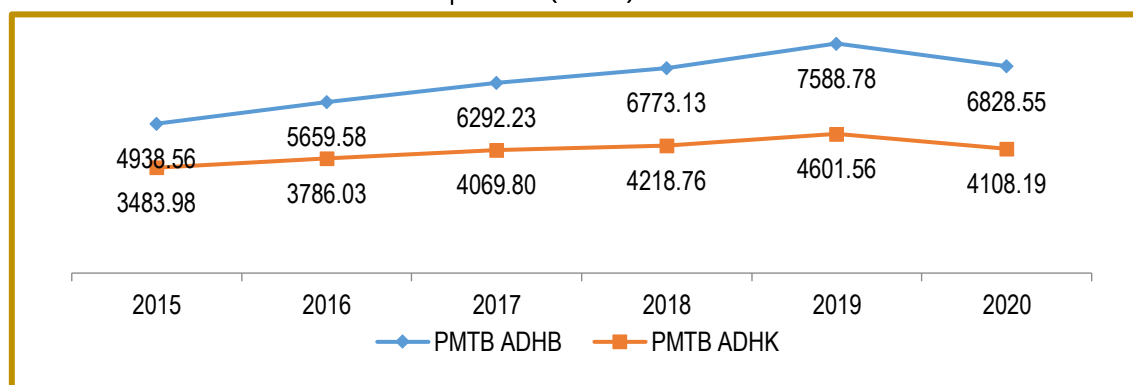
Grafik 2.33  
Jumlah Investasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020 (dalam Miliaran Rupiah)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, 2021

Tahun 2018 Kota Mataram banyak menerima investasi dikarenakan bencana gempa bumi di Lombok pada tahun itu banyak membutuhkan banyak asupan sumber daya agar keadaan dapat pulih kembali. Pada tahun 2020 terjadi pelemahan investasi dikarenakan pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di tahun tersebut. PMTB di Kota Mataram mengalami kenaikan yang stabil, kemudian lajunya terhambat pandemi COVID-19

Grafik 2.34  
Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kota Mataram Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

#### L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara. Peran serta kepemudaan dalam pembangunan ditunjukkan melalui prestasi pemuda dalam olahraga, serta geliat wirausaha muda dalam meningkatkan perekonomian daerah. Perkembangan indikator urusan kepemudaan dan olahraga selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54

Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan Olah Raga	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	61	67	73	80	N/A
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	3	2	35	23	N/A
Jumlah atlet berprestasi	N/A	N/A	N/A	77	N/A
Jumlah prestasi olahraga	Emas : 5 Perak : 6 Perunggu : 1	Emas : 6 Perak : 7 Perunggu : 2	Emas : 7 Perak : 8 Perunggu : 3	Emas : 9 Perak : 10 Perunggu : 5	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Mataram, 2021

Pada bidang kepemudaan yang ditunjukkan oleh peningkatan organisasi pemuda yang aktif, selama lima tahun terakhir perlahan mengalami peningkatan, pada tahun 2019 mencapai 80 persen. Sedangkan, pada bidang olahraga capaian dilihat dari perolehan medali dengan raihan 9 Emas, 10 Perak dan 5 Perunggu. Adapun di tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran atau tidak terdapat kejuaraan, karena adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat sebagai upaya untuk mencegah meluasnya kasus positif COVID-19.

#### M. Urusan Statistik

Kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran memerlukan ketersediaan data dan informasi yang valid dan reliable. Data adalah kebutuhan dasar saat mengeksekusi program, program akan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, jika kendala atas penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral telah diperbaiki. Namun, inkonsistensi dan ketidakjelasan pengelolaan data masih terjadi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diterbitkan untuk mengatasi ego sektoral yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Perangkat Daerah diberi kewenangan atas urusan statistik di daerah masing-masing, meliputi kewenangan dalam pengelolaan dan penyebarluasan data daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur terwujudnya Mataram Satu Data adalah Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang mutakhir. Perhitungannya adalah dengan membagi jumlah data set yang dimutakhirkan dan yang tersaji dengan jumlah keseluruhan data set, indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.55  
**Persentase ketersediaan Data statistik sektoral yang mutakhir  
 Di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Persentase ketersediaan Data statistik sektoral yang mutakhir (%)	N/A	N/A	N/A	84	100

Sumber: Dinas Komunikasi Kota Mataram, 2021

Perhitungan indikator mulai dilakukan pada tahun 2019, karena adanya penyesuaian indikator. Ketersediaan data statistik sektoral yang mutakhir pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Data Sektoral yang dihasilkan oleh OPD merupakan basis data untuk dapat menentukan kebijakan. Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Data yang tidak valid akan menyebabkan lemahnya perencanaan dan implementasi program pembangunan. Perangkat Daerah dituntut untuk dapat menghasilkan data sektoral yang valid dan reliable, tersinkronisasi dengan data dari kab/kota serta dengan data pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah menyajikan data sektoral yang disebarluaskan melalui website: *data.mataramkota.go.id*.

#### N. Urusan Persandian

Persandian memiliki peran pada kerahasiaan dan keamanan informasi. Penyelenggaraan persandian di Daerah selain mengirim berita, melayani Kepala daerah, juga melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan *e-Government*, serta secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi lingkup Pemerintah Daerah.

Urusan Persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram telah melakukan evaluasi terkait dengan kondisi keamanan informasi. Hal ini dikarenakan Diskominfo sebagai *gateway* komunikasi data yang terjadi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Gambaran kondisi kesiapan dan kematangan terhadap keamanan informasi dilakukan melalui evaluasi dan serangkaian rekomendasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE adalah Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56  
**Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE)  
 Di Kota Mataram Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE)	N/A	N/A	N/A	5	3,5

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kota Mataram, 2021

Perhitungan indikator mulai dilakukan pada tahun 2019, karena adanya penyesuaian indikator. Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE) didalam melakukan pengamanan SPBE dilakukan dengan pengukuran dengan menggunakan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dengan lima elemen, antara lain: Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, dan Aspek Teknologi.

#### O. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar dapat lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, yang secara tidak disadari dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya asli daerah. Sehingga, budaya global tersebut perlu disesuaikan dengan identitas nasional yang memiliki nilai luhur agar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB dengan keberagaman budaya tetap peduli pada pelestarian nilai-nilai kebudayaan dan keragaman budaya yang ada, dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya lokal serta menjaga kelestarian situs cagar budaya yang ada di Kota Mataram. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berupa Festival Gendang Beleg, Bale Ganjur, Qasidah, dan Serakalan Barzanji, yang diselenggarakan dalam upaya mempertahankan seni budaya lokal daerah. Sementara sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.

Kemudian, untuk jumlah situs di Kota Mataram saat ini terdapat 4 situs, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang-sayang. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam menentukan dan melindungi warisan budaya untuk generasi mendatang.

#### P. Urusan Perpustakaan

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat atau *reading habit society* menuju masyarakat belajar atau *learning society* yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Selain itu, Perpustakaan juga memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan bukan hanya tempat membaca tetapi perpustakaan merupakan tempat pusat kegiatan pelibatan masyarakat misalnya pelatihan pembuatan konektor masker bagi ibu-ibu rumah tangga, mahasiswi dan para remaja putri, kegiatan juma'at mengaji atau IQRA' bagi anak-anak TK/PAUD

seperti pengenalan huruf Hijaiyah dan lain-lain. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa standar perpustakaan dalam mengukur minat baca masyarakat adalah berdasarkan jumlah koleksi buku dan jumlah pengunjung perpustakaan. Perkembangan capaian layanan perpustakaan di Kota Mataram selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.57

Indikator Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	25.705	13.551	10.336	12.739	6.319
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksemplar)	70.405	53.165	54.051	55.057	56.814
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	2.142	1.129	861	1.061	526
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	30.904	4.779	856	1.138	1.454

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2021

Pada tahun 2015 hingga akhir tahun 2016 diselenggarakan program perpustakaan seru yang merupakan bantuan multipurpose, bertujuan untuk mengembangkan perpustakaan umum daerah kabupaten/kota dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun yang terintegrasi, dimana perpustakaan daerah Provinsi NTB dan Perpustakaan Nasional RI sebagai *leading sector*. Selama program berlangsung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram mendapat bantuan pengadaan koleksi, komputer, pelatihan, workshop dan paket pendampingan lainnya yang juga berasal dari berbagai sumber donasi lainnya. Saat program tersebut berakhir terjadi penurunan yang cukup drastis baik pada jumlah koleksi buku maupun jumlah kunjungan perpustakaan.

#### Q. Urusan Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perkembangan indikator urusan kearsipan pada periode tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58

Indikator Urusan Wajib Kearsipan

Kearsipan	2016	2017	2018	2019	2020
OPD yang menerapkan arsip secara baku (%)	41,03	43,59	46,15	48,72	49,00
Persentase SDM Kearsipan yang berkompetensi (%)	N/A	N/A	38,46	40,00	42,00
Kecepatan mendapatkan arsip (menit)	3	3	3	1	1



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, 2021

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan selama tahun 2019 dan 2020 antara lain program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen atau arsip daerah, selain itu juga untuk menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Adapun dalam meningkatkan kualitas SDM kearsipan dilaksanakan melalui Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan. Sementara pelayanan kepada masyarakat untuk pemeliharaan arsip keluarga dilaksanakan dengan metode enkapsulasi sebagai pengganti laminating. Penghargaan atau prestasi yang pernah diperoleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram selama lima tahun terakhir di antaranya adalah:

1. Dua kali menjadi Juara II Tingkat Nasional Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk Wilayah 1B yaitu tahun 2017 dan 2019;
2. Penghargaan Pengawasan Kearsipan dengan Kategori "MEMUASKAN" diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020.

### 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### A. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Pangan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan, perikanan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman, bahan baku pangan, bahan tambahan pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Perikanan merupakan salah satu potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Kota Mataram baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan dilakukan untuk menyokong ketahanan pangan di Kota Mataram dengan menjamin akses terhadap kualitas produk hasil perikanan yang baik serta mendukung akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan-nelayan kecil. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pilihan kelautan dan perikanan adalah tingkat konsumsi ikan dan produksi perikanan budidaya air tawar, yang dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Tingkat konsumsi ikan

Pergerakan perekonomian di Kota Mataram dalam bidang perikanan ditunjang oleh keberadaan pantai dengan panjang 11 Km dan pasar ikan di wilayah Bintaro. Konsumsi pangan hewani diperlukan agar dapat memenuhi gizi seimbang. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram. Gerakan tersebut menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan di Kota Mataram pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59  
Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/perkapita/tahun)	30,17	32,50	34,35	42,67	42,98

Sumber : Dinas Perikanan Kota Mataram, 2020

2) Produksi perikanan budidaya air tawar

Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat perlu dilakukan untuk mendorong produksi ikan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi ikan tersebut dapat mendukung keberlangsungan usaha perikanan di Kota Mataram, karena ikan yang dihasilkan nelayan dan pembudidaya lokal akan diserap oleh masyarakat. Produksi perikanan di Kota selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60  
Produksi Perikanan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	382,87	433,63	469,01	485,07	430,95
2	Jumlah Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas)	90	113	129	176	208
	Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas) Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Kota	-	39	8	31	34
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.686,40	1.706,40	1.757,59	1.826,29	1.932,41
4	Jumlah Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	53.316,00	59.240,00	59.496,00	74.370,00	53.645,00

Sumber : Dinas Perikanan Kota Mataram, 2020

**B. Urusan Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Kota Mataram. Selain dapat meningkatkan pendapatan daerah, sektor pariwisata mampu menjadi pengungkit bagi sektor-sektor lainnya. Keberadaan Kota Mataram sebagai pusat jasa di Provinsi NTB menjadikannya tempat persinggahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga ketersediaan akomodasi baik utama maupun penunjang cukup banyak ditemukan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan diukur dari jumlah kunjungan wisatawan baik domestik atau mancanegara, lama kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor wisata. Perkembangan indikator tersebut selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.61

## Indikator Urusan Kepariwisataan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisata	623.835	714.291	671.587	154.395	42.213
Lama kunjungan Wisata (Hari)	2,24	2,29	1,99	2,5	2,5
PAD sektor pariwisata	182,69	199,27	198,92	202,31	137,40

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2021

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah angka wisatawan pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuatif, karena pada tahun 2016 dikembangkan sarana pendukung bagi pengunjung tempat wisata agar memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang menyebabkan nilai sektor pariwisata mencapai Rp.182,69 Miliar dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi Rp.199,27 Miliar. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan wisatawan yang disebabkan terjadinya bencana alam gempa Lombok yang mengakibatkan sarana pendukung di tempat wisata dan sarana umum lainnya mengalami kerusakan, serta penurunan kunjungan wisatawan yang menyebabkan sektor pariwisata turun 198,92 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dan 2020 dimana terjadi penurunan drastis, selain adanya bencana alam gempa Lombok juga sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 di awal Maret 2020. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar Hotel tutup sementara sejak Maret 2020 sampai dengan pertengahan tahun. Karyawan banyak yang dirumahkan, jumlah malam kamar terjual menurun, serta sebagian besar masyarakat merasa harus tetap tinggal di rumah selama pandemi berlangsung. Hal ini berimplikasi pada menurunnya nilai tambah sektor pariwisata dari Rp. 202,31 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 137,40 Miliar pada tahun 2020 atau mengalami kontraksi sebesar minus 32,09 persen.

### C. Urusan Pertanian

Pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Karena tantangan besar dalam pembangunan pertanian adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani, sehingga diperlukan peningkatan komoditas pertanian agar mampu mendorong PDRB sektor pertanian agar hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.62

## Indikator Urusan Pertanian di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	3,95	3,81	3,75	3,64	3,95
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Kw/Ha)	65,75	61,54	68,37	63,50	65,00
Cakupan bina kelompok petani (Klp)	268	283	313	314	317

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan Dinas Pertanian Kota Mataram, 2021

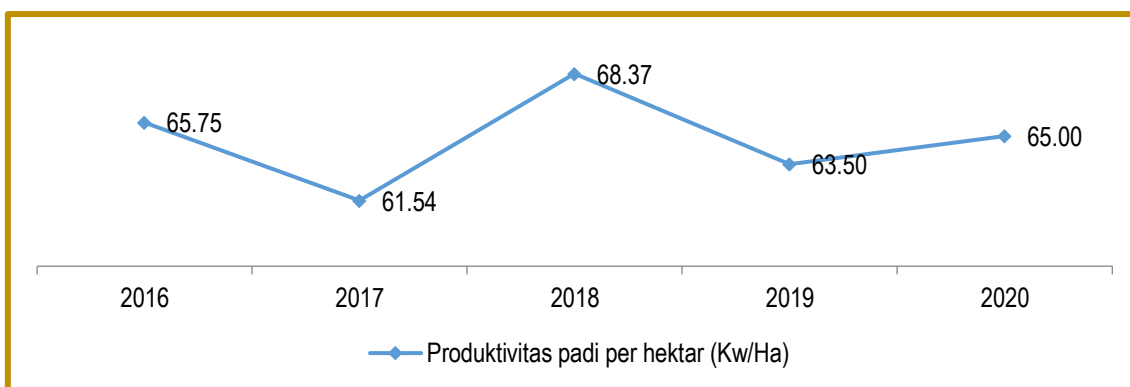
### Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren yang menurun. Penurunan tersebut terjadi karena pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada subkategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian seperti peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura dan lainnya, serta perikanan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan iklim yang menyebabkan perubahan intensitas hujan yang mengakibatkan kekeringan yang berpengaruh terhadap hasil pertanian, serta adanya alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi di daerah perkotaan. Pada tahun 2020 kategori pertanian, kehutanan dan perikanan ini tumbuh sebesar 1,23 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,15 persen. Perlambatan pertumbuhan kategori ini seiring dengan subsektor penyusunnya yang juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 0,74 triliun rupiah atau sebesar 3,95 persen. Secara rata-rata kontribusi yang diberikan oleh kategori ini berada pada kisaran yang relatif stabil yaitu sekitar 3-4 persen pertahun.

### Produktivitas Padi per Hektar

Angka produktivitas padi per hektar merupakan hasil pembagian dari jumlah produksi padi dalam kwintal dengan luas panen per hektar are. Adapun produksi padi di Kota Mataram dipengaruhi oleh: luas lahan pertanian, faktor iklim, perubahan pola tanam, bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan alih komoditi tanaman dari padi ke palawija dan hortikultura. Kemudian, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi di Kota Mataram antara lain: intensifikasi atau perbaikan teknologi, pengendalian OPT, pengendalian dan pengawasan pupuk dan pestisida, pengelolaan lahan dan air, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, dan penyuluhan pada kelompok tani.

Grafik 2.35  
Produktivitas Padi Per Hektar di Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pertanian Kota Mataram, 2021

Adapun produktivitas padi per hektar are di Kota Mataram mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2017, dimana terjadi penurunan produktivitas padi sebesar 4,21 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan

tanaman yang tidak maksimal. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata intensitas mencapai 218,80 mm dan rata-rata-rata penyinaran matahari yang cukup rendah yaitu sebesar 66,92 persen. Selain itu, pada tahun tersebut distribusi aliran air irigasi menjadi tidak lancar, sehingga dilakukan perbaikan pintu air.

#### Cakupan Bina Kelompok Tani

Jumlah kelompok tani di Kota Mataram pada tahun 2020 terdata sebanyak 317 kelompok tani, meningkat 49 kelompok dari tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh tumbuhnya beberapa kelompok baru pada beberapa wilayah kerja penyuluh pertanian atau WKPP, baik kelompok pangan, hortikultura, pekarangan maupun kelompok ternak. Adapun tantangan kelompok tani untuk beberapa tahun kedepan adalah bagaimana mengantisipasi perubahan iklim maupun adanya isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu sumber daya penyuluh yang andal diperlukan agar dapat mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan agar dapat mensejahterakan petani di Kota Mataram.

#### D. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian dan memiliki kontribusi pada tahun 2020 mencapai hampir seperlima dari PDRB Kota Mataram. Dilihat dari segi pertumbuhan, nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,62 persen, namun di tahun 2020 menurun minus 8,18 persen.

Tabel 2.63

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)	11.533,90	12.464,41	13.082,00	13.811,53	13.051,59
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	2.249,89	2.464,16	2.624,59	2.804,26	2.574,66
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	8,68	9,52	6,51	6,85	(8,19)
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	19,51	19,77	20,06	20,30	19,73
Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rp)	(1.725,74)	(1.437,39)	(1.295,51)	(1.314,79)	(1.409,95)
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	N/A	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Mataram, 2021

Pada periode tahun 2016–2020 perdagangan dengan luar wilayah Kota Mataram yang direpresentasi oleh komponen net ekspor barang dan jasa, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”, atau dengan kata lain mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri atau impor. Hal ini



tercermin dari komponen net ekspor yang berkontribusi pada kisaran minus 21,11 persen sampai dengan minus 15,67 persen.

#### E. Urusan Perindustrian

Perindustrian memiliki peran yang cukup besar pada Kota Mataram selain sektor perdagangan. Kinerja pembangunan urusan perindustrian di Kota Mataram tergambar dari capaian beberapa indikator, seperti pertumbuhan PDRB sektor perindustrian, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan peningkatan volume usaha industri seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.64

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)	11.533,90	12.464,41	13.082,00	13.811,53	13.051,59
Nilai PDRB Sektor Perindustrian (Miliar Rp)	1.179,31	1.265,46	1.311,50	1.371,04	1.349,12
Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	6,79	7,31	3,64	4,54	(1,60)
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	10,22	10,15	10,03	9,93	10,34
Persentase peningkatan volume usaha industri (%)	4,22	3,55	2,09	6,36	3,78

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, 2021

Kategori industri pengolahan secara nominal berkembang dari 1,35 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 1,70 triliun rupiah pada tahun 2020. Pertumbuhan pada kategori lapangan usaha ini mengalami fluktuasi dan terendah di tahun 2020 yaitu sebesar minus 1,60 persen. Meskipun pada tahun 2020 sektor perindustrian mengalami penurunan yang signifikan dan berada di titik terendah dalam lima tahun, namun kontribusi sektor tersebut mengalami peningkatan 0,41 persen dibanding tahun 2019 dan secara persentase peningkatan volume industri tetap positif yang berada pada kisaran angka 3,78 persen.

#### 2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### A. Unsur Administrasi Pemerintahan

##### 1) Penilaian Evaluasi SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Nilai evaluasi SAKIP selama periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65

Penilaian Evaluasi SAKIP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi SAKIP	58,88	63,13	64,04	65,05	65,75

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2021

Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Surat Nomor: B/373/AA.05/2021 Tanggal 31 Maret 2021 berada pada kategori B dengan Indeks AKIP 65,76 poin, angka ini naik sebesar 0,71 poin dibandingkan tahun 2019 dengan indeks sebesar 65,05 poin. Adapun target kategori BB yang dituangkan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2019 dan Tahun 2020 yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa hal berikut : (1) Pemerintah Kota Mataram telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun, budaya kinerja yang baik belum sepenuhnya terbangun sampai ke level Perangkat Daerah (PD), karena masih ditemukan beberapa PD yang indikator kerjanya masih belum terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian sasaran strategisnya; (2) Penjabaran kinerja telah dilakukan dari level pemerintah kota hingga ke level organisasi paling rendah, namun penjabaran kinerja yang dilakukan belum berdasarkan kerangka logis kinerja. Hal ini dapat mengakibatkan keterkaitan kinerja antar perangkat daerah belum terlalu jelas dan keterkaitan kinerja antar level organisasi belum dapat tergambar dengan baik; (3) Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai; (4) Aplikasi monitoring kinerja telah dibangun guna mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Namun pemanfaatan aplikasi tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja yang ada belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan kinerja yang diperlukan; (5) Kualitas evaluasi atas program masih belum optimal, masih sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab keberhasilan program, yaitu berupa manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari masing-masing program yang telah dilaksanakan, terutama dengan adanya perubahan karena kondisi pandemi sepanjang tahun 2020. Hal ini menyebabkan masih adanya ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program, serta peran yang diemban oleh PD; (6) Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat masih dapat ditingkatkan lagi kualitas hasil evaluasinya, yaitu dengan memberikan rekomendasi percepatan penerapan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja PD.

## 2) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran dari RB, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, adalah: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Nilai Evaluasi Indeks RB di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.66

## Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	-	B	B
2	Nilai Evaluasi RB	59,99	61,23	-	62,27	64,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2021

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Surat Nomor: B/344/RB.06/2021 Tanggal 31 Maret 2021 berada pada kategori B dengan nilai Indeks RB adalah 64,00 poin, artinya secara indeks naik sebesar 1,73 poin dibandingkan tahun 2019 dengan indeks sebesar 62,27 poin. Pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian Indeks RB oleh Kemenpan, karena bencana alam gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, sehingga melumpuhkan aktifitas ekonomi termasuk di Kota Mataram.

Pada tahun 2019 dan 2020 angka Indeks RB tidak mencapai target yang diharapkan yaitu kategori BB, sebagai akibat: (1) Tim RB belum menjalankan tugasnya secara optimal, karena fokus pelaksanaan RB yang masih pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing pokja. Sehingga, belum disusun rencana aksi pelaksanaan RB yang memuat sasaran perubahan yang akan dilakukan, ukuran keberhasilan dan target yang jelas serta terukur; (2) Kemampuan asesor RB dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Program RB masih rendah, sehingga masih terdapat perbedaan persepsi antara asesor dengan evaluator; (3) Agen perubahan yang sudah dibentuk belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan untuk melakukan perubahan budaya kerja dan perubahan *mindset*, sehingga belum terlihat perubahan nyata dalam pelaksanaan RB di Pemerintahan Kota Mataram; (4) Peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemerintah Kota Mataram, dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun; (5) Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan menyeluruh; (6) Belum disusunnya peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa PD; (7) Penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Mataram belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya *Grand Design* pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi yang belum terintegrasi; (8) Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOM antara lain mengenai, tindak lanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi; (9) Pemerintah Kota Mataram telah membangun aplikasi SAKIP yang terintegrasi mulai dari perencanaan kinerja (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) serta monitoring capaian kinerja (*e-SAKIP*), namun pengintegrasian yang ada belum sempurna, sehingga pemanfaatannya pun belum maksimal; (10) Implementasi atas kebijakan penguatan pengawasan seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan

kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih belum efektif; (11) Peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* masih belum optimal; (12) Pembangunan zona integritas yang dilakukan unit kerja belum maksimal sehingga unit kerja tersebut belum berhasil mendapatkan predikat WBK/ WBBM; dan (13) Belum optimalnya Implementasi pelayanan publik khususnya di PD yang memiliki layanan langsung ke masyarakat dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

### 3) Penilaian Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Saat ini, penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut adalah capaian nilai evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Mataram Periode Tahun 2016 – 2020:

Tabel 2.67  
Capaian Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kota Mataram Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai LPPD	3,15	2,96	3,27	3,00	3,40

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2021

### 4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. Secara keseluruhan, perangkat daerah Kota Mataram yang melakukan pengukuran kepuasan pelayanan hanya berkisar 6 persen dan umumnya didorong oleh kebutuhan permintaan instansi penilai pelayanan publik untuk penilaian tahunan unit-unit pelayanan tertentu. Berikut adalah gambaran beberapa perangkat daerah di Kota Mataram yang melakukan perhitungan IKM beserta nilai IKM yang diperoleh.

Tabel 2.68  
**Daftar Perangkat Daerah yang Melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Tahun 2016-2020**

NO	Perangkat Daerah yang melakukan pengukuran IKM	Nilai IKM (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,00	77,00	78,00	79,00	79,30
2	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	79,94	83,12	84,14	84,40	84,94
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram	N/A	75,83	90,33	90,12	88,37
4	Sekretariat Daerah (Layanan Keprotokolan)	N/A	N/A	N/A	88,12	85,97
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	77,40	77,85	78,39
6	Dinas Perhubungan (Pengujian Kendaraan)	N/A	78,16	71,56	57,57	N/A
7	Badan Keuangan Daerah	N/A	67,87	65,50	66,27	80,10
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	N/A	N/A	N/A	79,72	78,93
9	Puskesmas Selaparang	N/A	N/A	82,00	81,97	N/A
10	Puskesmas Pagesangan	N/A	N/A	95,83	82,64	N/A
11	Puskesmas Cakranegara	N/A	N/A	86,53	81,67	N/A
12	Puskesmas Mataram	N/A	N/A	81,31	81,90	N/A
13	Puskesmas Dasan Agung	73,11	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Puskesmas Pejeruk	74,69	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Puskesmas Karang Pule	73,80	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Puskesmas Babakan	72,71	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Kecamatan Selaparang	N/A	82,01	N/A	N/A	N/A
18	Kecamatan Sandubaya	N/A	N/A	N/A	79,66	75,98

Sumber: SKPD Kota Mataram, 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah perangkat daerah yang melakukan pengukuran kepuasan pelayanan belum separuh dari jumlah perangkat daerah dan unit pelayanan yang ada di Kota Mataram. Bahkan dari perangkat daerah dan unit pelayanan yang melakukan pengukuran kepuasan pelayanan tersebut di atas, tidak semuanya melakukan pengukuran IKM secara rutin. Adapun perangkat daerah yang secara rutin melakukan pengukuran IKM adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Periode Tahun 2016 – 2020:



Tabel 2.69

## Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No.	Triwulan	Nilai IKM Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Triwulan I	78.27	79.85	84.71	83.67	85.66
2	Triwulan II	79.78	83.01	83.19	84.05	85.65
3	Triwulan III	80.78	86.90	83.36	84.69	84.34
4	Triwulan IV	80.94	82.71	85.30	85.19	84.10
<b>Mutu Pelayanan:</b>						
<b>A (Sangat Baik)</b>		: 81,26 - 100,00		<b>C (Kurang Baik)</b>		: 43,76 - 62,50
<b>B (Baik)</b>		: 62,51 - 81,25		<b>D (Tidak Baik)</b>		: 25,00 - 43,75

Sumber: DPMPTSP Kota Mataram, 2021

Berdasarkan hasil dari perhitungan, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Periode Tahun 2016 – 2020 sudah dalam penilaian mutu pelayanan sangat baik. Namun masih perlu untuk meningkatkan mutu pelayanan seperti: (1) Penyederhanaan prosedur pelayanan agar pelayanan menjadi lebih cepat; (2) Memelihara kelancaran sistem pengajuan izin secara *online* untuk memangkas waktu dan berbasis teknologi informasi; (3) Memberikan pembekalan atau pelatihan bagi SDM terkait dengan pelayanan perizinan secara berkelanjutan; dan (4) Mempercepat integrasi sistem dengan sistem lain antara sektor diluar lingkup pemerintahan Kota Mataram terkait dalam rangka percepatan pelayanan pelayanan perizinan di Kota Mataram.

### 5) Nilai Kematangan Organisasi

Nilai kematangan organisasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Kematangan organisasi pada perangkat daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator. Dimana setiap variabel dibagi kedalam 5 level dan setiap level memiliki indikator. Nilai kematangan organisasi cenderung stabil sebab level kematangan organisasi ditentukan oleh sistem staging area. Level kematangan dapat meningkat dari level satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi. Namun, jika ada salah satu variabel masih berada pada level 2, maka organisasi tersebut tetap pada level 2 meskipun ada variabel lain sudah mencapai level yang lebih tinggi. Nilai kematangan organisasi di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.70

## Nilai Kematangan Organisasi di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Kematangan Organisasi	N/A	N/A	N/A	36,79	36,79

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Mataram, 2021

Nilai kematangan organisasi di lingkup Pemerintah Kota Mataram mulai dihitung sejak tahun 2019 sebagai amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018. Capaian nilai kematangan organisasi selama

dua tahun terakhir adalah 36,79 dan berada pada level sedang atau pada taraf rata-rata tiga dari lima tingkat kematangan. Nilai tersebut berarti bahwa penataan organisasi yang terbentuk belum efektif. Pembentukan organisasi perangkat daerah saat ini masih belum berorientasi pada kebutuhan untuk pencapaian kinerja sasaran strategis daerah.

## B. Unsur Pengawasan

Inspektorat memiliki tugas membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan internal dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan dapat menjadi *early warning system* bagi perangkat daerah apabila terdapat penyimpangan. Inspektorat dalam hal ini diwakili oleh auditor menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP yang harus ditindaklanjuti oleh auditi, berdasarkan rekomendasi auditor melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atau TLHP. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja unsur pengawasan adalah jumlah temuan dan persentase tindak lanjut temuan. Indikator jumlah temuan menunjukkan jumlah aturan yang dilanggar oleh perangkat daerah, sedangkan persentase tindak lanjut temuan menunjukkan persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Mataram.

Tabel 2.71

Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram  
Tahun 2016-2020

Pengawasan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Persentase tindak lanjut temuan</b>					
- BPK (%)	95,09	96,29	95,37	94,04	91,93
- Inspektorat (%)	84,26	92,16	93,54	84,47	76,32
<b>Administrasi</b>					
<b>Keuangan (%)</b>	65,67	77,19	78,92	70,32	64,28
<b>Jumlah temuan (temuan)</b>	BPK: 774 Inspektorat: 2.173	BPK: 836 Inspektorat: 2.012	BPK: 886 Inspektorat: 2.221	BPK: 855 Inspektorat: 2.552	BPK: 892 Inspektorat: 3.288

Sumber : Inspektorat Kota Mataram, 2021

Pada periode tahun 2016 hingga 2020, jumlah temuan oleh BPK maupun Inspektorat pada perangkat daerah di Kota Mataram mengalami kecenderungan yang meningkat, namun persentase tindak lanjut temuan selama lima tahun cenderung menurun. Penurunan persentase tindak lanjut temuan oleh Inspektorat sebagian besar disebabkan oleh adanya rekomendasi yang berkaitan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditindaklanjuti agar tindak lanjut memiliki status "Selesai". Sedangkan, penurunan persentase tindak lanjut temuan oleh BPK disebabkan oleh adanya penambahan rekomendasi hasil pemeriksaan dan perubahan regulasi yang ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTB atas rekomendasi yang dapat dinyatakan sesuai rekomendasi.

Tabel 2.72  
Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram  
Tahun 2016-2020

Pengawasan	2016	2017	2018	2019	2020
Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
Target Penilaian Kapabilitas APIP	Persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Level Maturitas SPIP	1	3	3	3	3
Target Penilaian Maturitas SPIP	Persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku (%)	90	90	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kota Mataram, 2021

Capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level 3. Pada tingkat *Integrated* untuk level kapabilitas APIP yang berarti bahwa praktik aparatur APIP telah profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar dan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program atau kegiatan, serta dapat memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kemudian, level maturitas APIP berada pada tingkat "Terdefinisi" yang berarti Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi memadai dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

### C. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan merupakan hal yang esensial. Pada era desentralisasi fiskal, tiap daerah memiliki diskresi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan karena merupakan hal yang saling berkaitan dan harus berjalan secara terintegrasi, sinkron dan konsisten. Perencanaan dan penganggaran perlu terintegrasi dengan baik supaya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan komitmen yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, integrasi perencanaan dan penganggaran juga menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 2.73  
Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai Target Kinerja  
di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Perencanaan Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	17,90	19,71	20,34	20,66	20,79
Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja (%)	N/A	N/A	N/A	96,97	90,90

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2021

Target dengan indikator kinerja Nilai Aspek Perencanaan pada penilaian Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap SAKIP. Pada Indikator Persentase Indikator

Kinerja Daerah Yang Mencapai Target Kinerja dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan capaian kinerja indikator yang sama pada tahun 2019, maka pada tahun 2020 capaian kinerjanya mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 96,97 persen sehingga terjadi penurunan sebesar 6,06 persen. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penyebaran virus corona atau *corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat, dimana hampir semua sektor ekonomi baik formal maupun informal terdampak COVID-19 sebagai implikasi dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan. Tiga indikator dengan kriteria capaian sangat rendah sebagai akibat dari dampak COVID-19 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyebaran virus corona atau *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat. Target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 8,27 persen pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram hanya tumbuh moderat sebesar 2,39 persen lebih lambat dari capaian pertumbuhan ekonomi pasca gempa Lombok tahun 2018 (4,98 persen) dan tahun 2019 sebesar 5,58 persen.
2. Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2019 terhadap Desember 2020) yang cukup rendah, yaitu sebesar 0,58 persen dari target sebesar  $\pm$  3,5 persen pada tahun 2020. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19, Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0,33 persen) s.d. Bulan September 2020 (minus 0,04 persen), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi/deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi (minus 5,69 persen), Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (minus 1,47 persen), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (5,75 persen), dan Kesehatan (0,99 persen). Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 juga telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,353 dari target sebesar 0,334. Meskipun berada pada kategori sedang, nilai Gini Rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif;
3. Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,45 pada tahun 2019 menjadi 0,56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar antarsesama penduduk miskin.
4. Di sektor ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mataram dari target yang ditetapkan sebesar 93,98 persen pada tahun 2020, namun Kesempatan Kerja (KK) yang tersedia hanya sebesar 93,17 persen. Imbasnya, angka pengangguran juga meningkat di Kota Mataram. Berdasarkan data BPS Kota Mataram (per Agustus 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2020 naik menjadi 6,83 persen dari 5,51 persen pada tahun 2019, dan

angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB yaitu sebesar 4,42 persen. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan penduduk yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja sebanyak 7.300 orang, dan juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 yaitu sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1,7 persen dan 0,22 persen.

Dalam rangka menjaga kualitas dokumen perencanaan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, ditetapkan sasaran program: Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD dengan Indikator: Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD.

Tabel 2.74  
Rekapitulasi eMPBM Hasil Usulan Masyarakat Tahun 2016-2020

Tahun	Usulan Disetujui	Usulan Tidak Disetujui	Jumlah Usulan	Persentase Usulan Yang Terakomodir (%)
2016	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	100	17	117	85,00
2018	2.133	1.129	3.262	65,39
2019	2.133	1.129	3.262	65,39
2020	1.098	499	1.597	68,75

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan persentase usulan masyarakat yang diakomodir dimana usulan masyarakat di bidang sarana dan prasarana pada tahun 2019 jumlah usulan yang diakomodir adalah sebesar 60,33 persen naik menjadi 76,21 persen pada tahun 2020. Usulan yang disetujui adalah usulan yang sesuai dengan sasaran prioritas yang telah ditentukan pada masing-masing OPD di Kota Mataram di bidang sarana dan prasarana. Demikian juga usulan masyarakat pada bidang Perekonomian Rakyat yang diakomodir juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 persentase usulan yang diakomodir adalah sebesar 64,89 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 84,92 persen.

#### D. Unsur Keuangan

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. BKD bertugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan daerah khususnya di bidang administrasi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan urusan keuangan dinilai dari beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik, indikator-indikator tersebut antara lain: Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase belanja pendidikan, Persentase belanja kesehatan, Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, bagi hasil kabupaten/kota dan desa, serta rasio kemandirian keuangan daerah.



Tabel 2.75

## Persentase SiLPA terhadap APBD di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Total SiLPA	Total APBD	Persentase
2016	83.961.117.271,00	1.441.768.181.842,00	5,82
2017	136.790.684.861,37	1.561.075.542.994,58	8,76
2018	119.242.637.527,02	1.557.024.679.464,02	7,66
2019	97.599.405.632,05	1.573.665.413.292,05	6,20
2020	106.952.379.326,39	1.467.650.444.563,54	7,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau SiLPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Persentase SiLPA terhadap APBD selama 5 (lima) tahun rata-rata di atas 5 persen, tingginya persentase tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja daerah sehingga SiLPA tersebut merupakan SiLPA riil tahun-tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berkenaan.

Tabel 2.76

## Persentase belanja pendidikan (20%) di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
2016	403.715.281.191,00	1.441.768.181.842,00	28,00
2017	353.012.683.905,00	1.561.075.542.994,58	22,61
2018	340.781.988.376,00	1.557.024.679.464,02	21,89
2019	330.883.063.285,32	1.573.665.413.292,05	21,03
2020	309.178.283.069,00	1.467.650.444.563,54	21,07

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Terhadap belanja pendidikan, pemerintah Kota Mataram telah menganggarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dimana pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 2.77

## Persentase belanja kesehatan (10%) di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
2016	274.631.200.255,80	1.441.768.181.842,00	19,05
2017	324.961.075.298,20	1.561.075.542.994,58	20,82
2018	375.523.870.350,83	1.557.024.679.464,02	24,12
2019	354.457.456.401,59	1.573.665.413.292,05	22,52
2020	312.490.994.891,66	1.467.650.444.563,54	21,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Terhadap belanja kesehatan, pemerintah Kota Mataram telah menganggarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengalokasian belanja kesehatan adalah minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Pada tabel di atas Pemerintah Kota Mataram selama lima tahun telah menganggarkan belanja kesehatan dengan rata-rata sebesar 21,56 persen.

Tabel 2.78  
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung  
di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase
2016	650.165.293.739,79	1.441.768.181.842,00	45,09
2017	607.907.046.576,22	1.561.075.542.994,58	38,94
2018	585.460.664.595,19	1.557.024.679.464,02	37,60
2019	601.146.560.902,89	1.573.665.413.292,05	38,20
2020	629.647.304.056,87	1.467.650.444.563,54	42,90
Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Total APBD	Persentase
2016	771.202.888.102,21	1.441.768.181.842,00	53,49
2017	937.716.496.418,36	1.561.075.542.994,58	60,07
2018	954.370.919.509,83	1.557.024.679.464,02	61,29
2019	960.021.352.389,16	1.573.665.413.292,05	61,01
2020	895.371.618.626,25	1.467.650.444.563,54	61,01

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Penganggaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta belanja tidak terduga. Sedangkan, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selama lima tahun terakhir rata-rata belanja tidak langsung Pemerintah Kota Mataram adalah 40,55 persen dan belanja langsung mencapai 59,37 persen. Struktur belanja daerah Pemerintah Kota Mataram masih di dominasi oleh belanja langsung, yang berarti bahwa pengelolaan keuangan cukup baik, dimana belanja pembangunan masih lebih tinggi dari belanja rutinnya.

Tabel 2.79  
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa	Total APBD	Persentase
2016	68.684.380.672,00	1.441.768.181.842,00	4,76
2017	69.989.050.152,21	1.561.075.542.994,58	4,48
2018	80.000.000.000,00	1.557.024.679.464,02	5,14
2019	92.931.796.660,00	1.573.665.413.292,05	5,91
2020	98.300.294.073,00	1.467.650.444.563,54	6,70

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang penerimaannya disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak provinsi. Persentase bagi hasil pajak terhadap APBD Kota Mataram setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.80

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman	Persentase
2016	279.679.198.140,00	1.357.807.064.571,00	20,60
2017	367.503.589.415,00	1.424.284.858.133,21	25,80
2018	354.697.095.359,00	1.437.782.041.937,00	24,67
2019	372.928.500.000,00	1.476.066.007.660,00	25,27
2020	320.309.008.468,15	1.389.869.482.273,15	23,05

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2021

Rasio kemandirian fiskal daerah dipandang penting karena mengindikasikan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tingkat kemandirian fiskal di Kota Mataram mengalami fluktuasi. Tingkat kemandirian untuk membiayai pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah terbilang masih kecil dan sebagian besar masih bersumber dari dana pemerintah pusat.

#### E. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja bidang kepegawaian dan pengembangan SDM diarahkan untuk peningkatan sumber daya aparatur yang berdaya saing, peningkatan pelayanan aparatur yang berkualitas, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Perkembangan indikator urusan kepegawaian di Kota Mataram selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81

## Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100	100	100
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural (%)	77	76	70	74	67
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (jabatan)	29	37	35	36	37
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (jabatan fungsional)	3.511	2.648	2.532	2.426	2.437
Pelanggaran disiplin ASN (pelanggaran)	30	34	16	26	33
Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	47,77	48,99

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, 2021

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuasi dengan angka menurun pada tahun 2018 dan 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh gempa Lombok yang terjadi di tahun 2018 dan pada tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat struktural karena pandemi COVID-19.

Kemudian, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Mataram selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Karena, jumlah pejabat yang telah memasuki masa pensiun berbeda setiap tahunnya. Pada jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami penurunan sejak tahun 2016. Karena, pada tahun tersebut ASN jabatan fungsional guru SMA dan setara di Kota Mataram berubah status menjadi ASN Provinsi NTB. Untuk pelanggaran disiplin ASN, selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, sebagian besar karena kasus pelanggaran disiplin, cerai dan pelanggaran kode etik. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin telah diselesaikan dengan baik.

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas empat komponen penilaian yaitu Kualifikasi dengan bobot 25 persen, Kompetensi dengan bobot 40 persen, Kinerja dengan bobot 30 persen, dan Disiplin memiliki bobot 5 persen. Indeks ini merupakan penilaian yang wajib dilaksanakan untuk mengukur profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kota Mataram baru melakukan penilaian indeks profesionalitas ASN yang meliputi empat komponen penilaian pada tahun 2019, sementara pada tahun sebelumnya hanya dilakukan penilaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai. Indeks Profesionalitas ASN Kota Mataram pada tahun 2020 berada pada angka 48,99 dari skala 100 atau dengan predikat "sangat rendah". Karena, rendahnya nilai kompetensi ASN di Kota Mataram. Komponen nilai kompetensi memiliki persentase cukup besar dalam perhitungan nilai indeks profesionalitas ASN.

Kinerja peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dilihat dari jenis dan jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani seperti yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.82

Layanan Administrasi Kepegawaian

No	Bidang/Jenis Layanan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Mutasi Kepegawaian:										
	- Kenaikan Pangkat;	731	731	1041	1030	953	931	874	861	665	654
	- Kenaikan Gaji Berkala;	1363	1288	1366	1366	1351	1351	985	985	1077	1077
	- Mutasi antar SKPD;	77	77	140	140	78	78	55	55	43	43
	- Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi										
	• Pindah masuk ke Kota Mataram;	56	56	65	65	18	18	34	34	41	41
	• Pindah keluar	19	19	20	20	33	33	16	16	25	25

No	Bidang/Jenis Layanan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan	Usul	Pene- tapan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dari Kota Mataram;										
2	Bidang Diklat Kepegawaian :										
	- Penerbitan Keputusan Tugas Belajar;	7	7	4	4	16	16	4	4	1	1
	- Penerbitan Ijin Belajar.	158	158	109	109	36	36	72	72	43	43
3	Bidang Kesejahteraan Kepegawaian :										
	- Kartu Pegawai (Karpeg);	198	168	44	44	3	3	14	14	23	23
	- Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);	115	-	31	31	15	15	54	54	27	27
	- Pensiun PNS;	178	144	152	152	208	208	214	214	233	233
	- 4Penghargaan PNS (Satya Lancana Karya Satya);	58	57	106	106	115	115	43	43	53	53
	- Sumpah/Janji PNS;	345	345	-	-	-	-	-	-	262	262
	- Konversi NIP.	7	-	-	-	-	-	5	5	5	5
	Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian :										
	- Pengangkatan CPNS;	-	-	-	-	-	-	262	262	272	272
	- Pengangkatan PNS;	354	354	-	-	13	13	-	-	262	262
	- Pengangkatan Jab. Fungsional :										
	* Pengangkatan pertama jabfung;	32	32	3	3	42	42	89	89	163	163
	* Pengangkatan kembali jabfung;	23	23	25	25	24	24	2	2	4	4
	* Kenaikan jabatan fungsional;	118	118	192	192	157	157	163	163	120	120
	* Perpindahan jabatan lain ke jab. fungsional;	1	1	3	3	7	7	-	-	4	4
	* Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan fungsional	16	16	16	16	19	19	14	14	5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>3.856</b>	<b>3.669</b>	<b>3.317</b>	<b>3.306</b>	<b>3.088</b>	<b>3.066</b>	<b>2.900</b>	<b>2.887</b>	<b>3.328</b>	<b>3.317</b>
	<b>Persentase Penyelesaian (%)</b>	<b>95,15</b>		<b>99,50</b>		<b>99,32</b>		<b>99,56</b>		<b>99,67</b>	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, 2021



## F. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Daerah dalam merespon dinamika dan perkembangan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah itu sendiri, baik yang dapat menyebabkan kemajuan atau kemunduran daerah tersebut. Kemajuan daerah dapat didorong dengan adanya penelitian dan pengembangan, karena hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk model, skenario, konsep maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang timbul di suatu daerah. Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kota Mataram dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, yang terbentuk pada 10 November 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016. Indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan unsur penelitian dan pengembangan adalah persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan indeks inovasi daerah yang diringkas dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.83

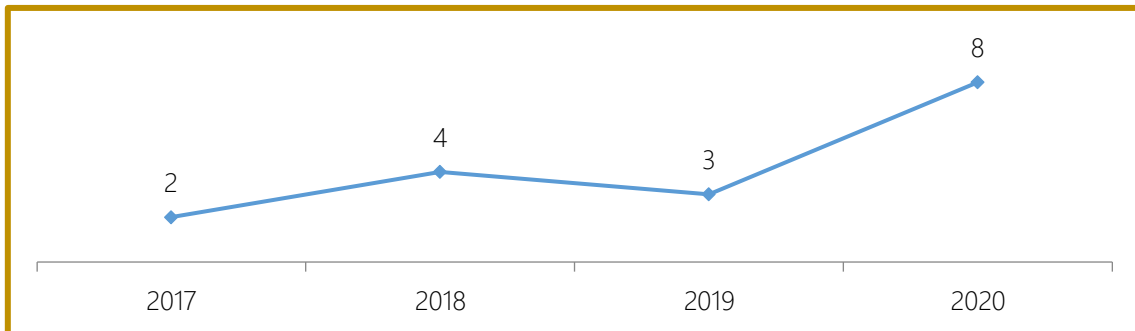
### Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Mataram Tahun 2017-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	N/A	20	40	30	80
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	N/A	0	28	28	36
Indeks Inovasi Daerah	N/A	0	501	0	1.944

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021

Kelitbangan mencakup dua hal, antara lain kajian penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Pendekatan *triple helix* digunakan untuk setiap penyusunan produk kelitbangan agar hasil yang diperoleh aplikatif dan berkelanjutan yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, dan stakeholder. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan tindak lanjut akan produk kelitbangan oleh SKPD. Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa pemanfaatan hasil kelitbangan di Kota Mataram cenderung meningkat, adapun jumlah produk kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh OPD adalah sebagai berikut:

Grafik 2.36  
Jumlah Produk Kelitbang yang di Tindak Lanjuti di Kota Mataram  
Tahun 2017-2020



Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, 2021

Terkait pengembangan inovasi di daerah, Balitbang Kota Mataram memiliki peran dalam pendataan, penjaringan dan pembinaan, sedangkan pelaksanaan inovasi daerah dilakukan oleh perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 inovasi daerah merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Pada penilaian indeks inovasi daerah, Kota Mataram pada tahun 2018 memiliki skor nilai 501, nilai ini cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena penilaian ini adalah penilaian pertama yang dilakukan oleh Balitbang dan masih memerlukan upaya untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Kemudian, pada tahun 2019 skor nilai 0 disebabkan karena adanya masalah administrasi. Skor nilai cukup tinggi diperoleh pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.944 dan masuk dalam kategori sangat inovatif. Peningkatan skor nilai ini di dongkrak dari lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Balitbang pada tahun 2019. Adapun kendala yang dihadapi dari pengembangan inovasi daerah di Kota Mataram adalah rendahnya inovasi daerah oleh tiap perangkat daerah di Kota Mataram, karena belum adanya keharusan bagi tiap perangkat daerah untuk melakukan inovasi di organisasinya. Sedangkan, kebijakan pemerintah pusat mengharuskan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dapat menciptakan minimal 1 inovasi utama setiap tahunnya, yang dikenal dengan gerakan *One Agency, One Innovation*.

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang ada untuk menciptakan nilai tambah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Semakin tinggi dan berkelanjutan daya saing suatu daerah, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi dan akan memiliki keunggulan kompetitif. Daya saing suatu daerah didukung oleh kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi atau investor agar dapat menciptakan *multiplier effect*, sehingga ekonomi daerah dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

#### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berupa makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan dan porsi pengeluaran untuk bukan makanan akan menurun. Pergeseran komposisi pengeluaran mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.84  
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan)  
di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi-padian	64.449	59.390	63.262	64.195	63.007
2	Umbi-umbian	3.436	4.225	3.837	4.514	5.297
3	Ikan/udang/cumi/kerang	35.262	41.911	50.293	53.776	58.944
4	Daging	30.482	30.983	38.590	37.967	44.794
5	Telur dan susu	29.905	32.514	37.075	39.726	46.066
6	Sayur-sayuran	37.011	43.163	40.802	35.343	43.919
7	Kacang-kacangan	14.557	13.936	15.662	16.716	16.647
8	Buah-buahan	44.194	34.233	58.945	43.504	60.016
9	Minyak dan kelapa	10.676	11.049	12.293	11.142	11.322
10	Bahan minuman	12.806	13.998	15.589	14.482	15.042
11	Bumbu-bumbuan	7.600	10.142	10.878	10.122	12.025
12	Konsumsi lainnya	12.339	13.140	12.575	13.857	12.413
13	Makanan dan minuman jadi	190.360	237.207	268.221	324.998	368.365
14	Rokok	61.760	62.532	65.912	70.802	64.938
	<b>Jumlah Makanan</b>	<b>554.837</b>	<b>608.423</b>	<b>693.934</b>	<b>741.144</b>	<b>822.795</b>
	<b>Bukan Makanan</b>					
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	389.038	368.116	382.769	377.008	418.862

No	Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
2	Aneka komoditas dan jasa	178.566	168.107	210.488	226.072	266.228
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	36.016	36.349	40.226	50.186	51.793
4	Komoditas tahan lama	54.859	89.517	54.652	105.346	117.842
5	Pajak, pungutan, dan asuransi	24.333	62.137	50.194	48.056	56.416
6	Keperluan pesta dan upacara	24.083	36.565	30.261	24.139	34.148
	<b>Jumlah Bukan Makanan</b>	<b>706.895</b>	<b>760.791</b>	<b>768.590</b>	<b>830.807</b>	<b>945.289</b>
	Jumlah	<b>1.261.732</b>	<b>1.369.214</b>	<b>1.462.524</b>	<b>1.571.951</b>	<b>1.768.084</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pada tabel di atas, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1.571.951 menjadi 1.768.084, dengan rincian pengeluaran untuk bahan makanan mencapai 822.795 atau 46,53 persen dan pengeluaran bukan bahan makanan mencapai 945.289 atau 53,46 persen di tahun 2020. Secara lebih rinci, konsumsi terhadap padi-padian menurun, namun untuk bahan makanan yang lain meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 ada perubahan gaya hidup sehat oleh sebagian masyarakat dengan mengurangi jumlah asupan karbohidrat.

#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing daerah ditunjang oleh ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur dalam aktivitas ekonominya. Kegiatan ekonomi di Kota Mataram tidak dapat dilepaskan dari kabupaten sekitarnya, mengingat mobilitas penduduk antar daerah di Kota Mataram dalam berbagai sektor yang sangat tinggi. Fasilitas wilayah atau infrastruktur yang tersedia untuk mendukung sektor-sektor di Kota Mataram antara lain aksesibilitas, penataan wilayah, fasilitas bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan ketersediaan penginapan.

##### A. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan pergerakan fisik seseorang untuk mendapatkan pelayanan, mencapai objek atau lingkungan, atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan, tingkat aksesibilitas adalah besar kecilnya usaha dalam mencapai hal-hal tersebut. Tingkat aksesibilitas suatu daerah dapat diukur dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang atau barang yang melalui terminal. Secara detail dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.85  
Aksesibilitas di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio panjang jalan dengan luas wilayah		6.526,31	6.033,44	6.033,44	6.033,44	6.033,44
2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum						
	Masuk	Orang/	192.390	143.463	148.282	159.193	N/A

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Keluar	barang	201.235	166.906	191.949	186.686	N/A
3.	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	Orang	393.625	310.369	340.231	345.879	175.624

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram dan Dinas Perhubungan Kota Mataram, 2021

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagi panjang jalan dengan luas wilayah daerah terkait. Nilai rasio memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km<sup>2</sup> luas wilayah. Rasio ini dapat digunakan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio maka aksesibilitas suatu daerah semakin baik, sehingga konektivitas jalan di daerah semakin baik, karena dilihat dari ketersediaan jaringan jalan yang ada. Pada tabel di atas rasio panjang jalan dengan luas wilayah selama lima tahun terakhir adalah sama, adapun perbedaan data di tahun 2016 dan 2017 adalah karena pada tahun 2017 dilakukan koreksi ruas jalan oleh Kementerian PUPR agar sesuai dengan kriteria jalan yang telah ditetapkan.

## B. Penataan Wilayah

Penataan wilayah atau penataan ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi, serta mewujudkan tata ruang Kota Mataram yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86

### Penataan Wilayah di Kota Mataram Tahun 2019-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketaatan Terhadap RTRW	N/A	N/A	N/A	2 (kesesuaian sedang)	2 (kesesuaian sedang)
2.	Persentase Luas Peruntukan Lahan Eksisting yang sesuai dengan RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	55,91	57,05
2.	Luas wilayah produktif (Ha)	1.600,23	1.600,23	1.600,23	1.600,23	1.600,23
3.	Luas wilayah industri (Ha)	59,42	59,42	59,42	59,42	59,42
4.	Luas wilayah rawan genangan (Ha)	891	891	891	891	891

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui nilai kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Mataram. Indeks ini diperoleh dengan mengklasifikasikan persentase peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW menjadi 4 kategori, yaitu 0, 1 atau 3, 0 jika tidak sesuai dan 3 jika sesuai dengan RTRW. Hal ini sesuai dengan Peraturan



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata ruang Wilayah. Sedangkan, persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara luas peruntukan lahan eksisting dengan luas peruntukan lahan pada RTRW Kota Mataram.

Pada tahun 2019 indeks kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Mataram berada pada angka 2 yang berarti bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada tingkat sedang, demikian juga di tahun 2020. Hal ini terjadi karena pada periode 2019-2020 tidak banyak terjadi perubahan lahan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW.

Kemudian, untuk persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW Kota Mataram selama 2 tahun mengalami peningkatan dari 55,91 persen pada tahun 2019 menjadi 57,05 persen di tahun 2020. Hal ini diketahui dari kenaikan jumlah pemohon Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), yaitu surat keterangan dalam mendirikan bangunan gedung agar tidak bertentangan dengan peruntukan lokasi yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang semakin tinggi di tahun 2020.

### C. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank merupakan *financial institution* yaitu memiliki fungsi intermediasi sebagai pemutar kegiatan ekonomi suatu daerah. Bank menjadi tempat bagi pihak surplus dana untuk menempatkan kelebihan dananya. Jumlah fasilitas bank yang tersedia di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.87  
Fasilitas Bank dan Non Bank di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis dan jumlah bank umum dan cabang						
	Konvensional	Kantor	102	100	92	80	82
	Syariah		15	12	21	21	29
2.	Jenis dan jumlah bank perkreditan dan cabang						
	Pemda	Kantor	2	2	2	2	2
	Swasta		6	6	6	6	6
	Syariah		2	2	2	2	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah bank konvensional setiap tahunnya mengalami penurunan, sebaliknya jumlah bank syariah semakin meningkat, baik untuk bank umum maupun bank perkreditan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih menyimpan kelebihan dananya pada perbankan syariah. Diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Mataram maupun kabupaten sekitarnya adalah beragama islam dan perubahan kehidupan masyarakatnya menjadi potensi besar bagi perbankan syariah untuk lebih berkembang lagi di Kota Mataram.

#### D. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah bertujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Kelengkapan infrastruktur menjadi prasyarat utama bagi upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Salah satunya adalah ketersediaan air bersih yang layak, selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dapat mendorong keberlangsungan sektor-sektor lain yang mampu mengembangkan perekonomian daerah.

Tabel 2.88  
Ketersediaan Air Bersih di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	66,93	64,67	76,02	73,79	73,86
2.	Jumlah Pelanggan Air Bersih (SR)	70.179	74.090	77.285	77.923	79.223
3.	Jumlah Air Bersih yang Disalurkan (M <sup>3</sup> )	18.314.915	17.407.772	17.115.288	18.017.944	17.659.602

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Pelanggan air di Kota Mataram terdiri dari sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, usaha dan kategori khusus. Selama lima tahun terakhir jumlah pelanggan air bersih di Kota Mataram terus mengalami peningkatan. Sedangkan, untuk jumlah air yang disalurkan penggunaan tertinggi pada tahun 2016 sebagai dampak dari penyelenggaraan beberapa event nasional di Kota Mataram, yang menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar Kota Mataram meningkat cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan air bersih meningkat, namun jumlah air bersih yang disalurkan menurun, hal ini disebabkan karena berkurangnya penggunaan air bersih pada sektor usaha, termasuk didalamnya hotel-hotel. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat membatasi aktivitas masyarakat dan menganjurkan untuk tetap di rumah saja, sehingga aktivitas usaha menjadi menurun drastis akibat tidak ada jumlah kunjungan baik ke pusat perbelanjaan maupun wisatawan baik dari dalam maupun luar Kota Mataram.

#### E. Fasilitas Listrik

Pelanggan listrik di Wilayah Usaha NTB Sektor Mataram sebagian besar didominasi oleh rumah tangga. Energi listrik yang terjual sebagian besar dimanfaatkan oleh rumah tangga, kemudian diikuti oleh usaha, sosial, kantor pemerintahan, penerangan jalan, industri dan lainnya. Pelanggan dan energi listrik yang terjual pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.89  
Jumlah Pelanggan Listrik dan Jumlah Listrik Terjual di Wilayah Usaha NTB  
Sektor Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun
----	-----------	-------

		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah RT Pelanggan Listrik (RT)	739.495	817.744	926.350	1.427.162	N/A
2.	Jumlah Pelanggan Listrik (Pelanggan)	784.407	865.849	976.208	1.500.164	N/A
3.	Jumlah Energi Listrik yang Terjual (kWh)	1.152.256.770	9.899.067	1.252.499.073	1.950.254.473	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat akan energi listrik meningkat pesat. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 diterapkan protokol kesehatan yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga memicu perubahan cara dan gaya hidup masyarakat. Sekolah konvensional diganti dengan sekolah dari rumah yang dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau sekolah dalam jaringan atau sekolah daring serta banyak pekerjaan perkantoran yang dialihkan ke rumah yang dikenal dengan istilah *work from home* atau WFH. Kegiatan-kegiatan ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan energi listrik di Kota Mataram.

#### F. Ketersediaan Restoran

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan dasar sehingga perlu dipenuhi setiap hari, yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Berbagai rumah makan dengan olahan makanan atau masakan kuliner dengan berbagai ciri khas tersedia di Kota Mataram. Jumlah rumah makan atau restoran yang ada di Kota Mataram dan pajak restoran yang menyumbangkan PAD bagi Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90  
Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	191	195	218	219	221

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah makan atau restoran di Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun 2016. Demikian pula dengan realisasi pajak restoran yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Adapun pajak restoran sumbangan yang cukup tinggi bagi PAD Kota Mataram, lebih tinggi dari Pajak Hotel dan tertinggi keempat setelah Pajak Penerangan Jalan Umum, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain memenuhi kebutuhan primer, kuliner saat ini telah menjadi gaya hidup. Dilihat dari pajak yang disumbangkan serta dinamika cara hidup saat ini, kuliner memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Sebagai alternatif wisata untuk meningkatkan daya saing daerah, yaitu dengan mengembangkan wisata kuliner maupun wisata halal.

#### G. Ketersediaan Penginapan

Perkembangan daerah akan selaras dengan perkembangan penduduk dan berbagai sektor lapangan usaha sebagai elemen-elemen penunjang perkembangannya. Pengembangan sektor pariwisata yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai. Hotel atau penginapan sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama sangat penting untuk mendukung Kota Mataram sebagai Kota Jasa.

Tabel 2.91  
Ketersediaan Penginapan di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel						
	Hotel berbintang	Unit	27	27	28	28	28
	Hotel non bintang		111	111	111	116	121

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Mataram, 2021

Pada tahun 2020, tercatat jumlah hotel bintang adalah sebanyak 28 unit, atau bertambah sebanyak 1 unit jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan, hotel non bintang tercatat sebanyak 121 unit, jumlah hotel non bintang mulai bertambah sejak tahun 2019 dan 2020. Perkembangan sarana akomodasi tersebut sebagai respon Kota Mataram sebagai Kota Jasa atas semakin tingginya kunjungan wisatawan ke NTB, dimana pada tahun 2017 terdapat 3,5 juta kunjungan wisatawan melampaui target yang sebesar 3 juta wisatawan.

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan suatu daerah merupakan nilai tambah atau peluang bagi daerah untuk masuknya investasi. Aspek keamanan dinilai penting, karena pelaku usaha dan masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan suatu kegiatan usaha didaerah tersebut.

#### A. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas merupakan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu tahun per 10.000 penduduk. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dan daya saing daerah, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat, serta semakin tinggi daya saing daerah. Hal ini terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya yaitu semakin sedikit jumlah pengangguran, karena faktor ekonomi sangat memengaruhi kriminalitas disuatu wilayah. Angka kriminalitas di Kota Mataram selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92  
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembunuhan	1	1	1	1	1
2	Perkosaan	1	4	3	2	4
3	Pencurian dengan kekerasan	89	124	85	65	71

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
4	Pencurian biasa	133	76	130	125	190
5	Pencurian kendaraan bermotor	520	464	367	313	90
6	Pencurian dengan pemberatan	131	87	146	142	129
7	Pengerusakan/Penghancuran barang	11	19	11	16	13
8	Penipuan	14	22	34	41	27
9	Narkoba	29	34	53	73	70
10	Lain-lain	248	351	437	459	430
Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun		1.177	1.182	1.267	1.237	1.025
Jumlah penduduk		459.314	468.509	477.476	486.715	429.651
Angka kriminalitas		26	25	27	25	24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Selama lima tahun terakhir, angka kriminalitas di Kota Mataram mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2018 dan kemudian menurun di angka 24 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kriminalitas di Kota Mataram, yaitu terdapat sebanyak 24 kriminal per 10.000 penduduk di tahun 2020. Angka kriminalitas yang relatif rendah dapat menjadi daya ungkit peningkatan daya saing daerah melalui penarikan investasi.

## B. Indeks Keamanan Manusia

Indeks keamanan manusia merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keamanan manusia, sebagai *early warning system* atas kejadian bencana, kesejahteraan masyarakat, keamanan komunitas serta tindak kriminalitas. Perkembangan indeks keamanan manusia selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.93

Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Keamanan Manusia	N/A	3,18	3,59	3,70	3,70

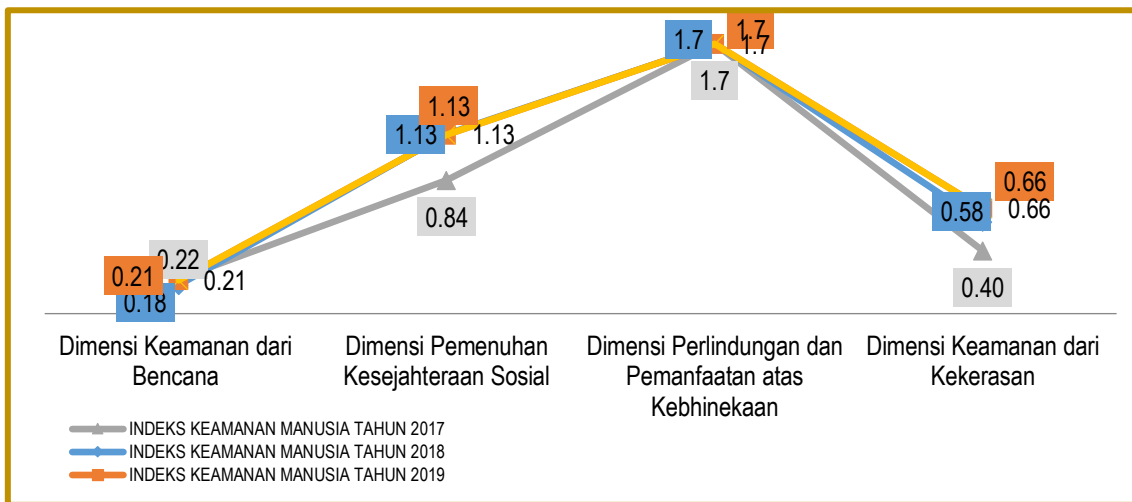
Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017-2020

Perkembangan Indeks Keamanan Manusia (IKM) secara umum membaik dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan IKM dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 capaian IKM Kota Mataram diproyeksikan masih sebesar 3,70 poin sama dengan capaian IKM Tahun 2019 yang masih dalam kategori kinerja sedang.

Grafik 2.37

Capaian Per Dimensi Indeks Keamanan Manusia di Kota Mataram Tahun 2017-2020





Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017-2020

Jika dilihat dari masing-masing empat dimensi IKM yang meliputi Dimensi Keamanan dari Bencana; Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan; dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan Fisik, Dimensi Keamanan dari Bencana mengalami sedikit penurunan skor karena terjadinya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal Tahun 2020. Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi laju penyebaran COVID-19 masih kurang memadai mengingat tingkat penyebaran yang sangat tinggi, kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19 pada masa awal pandemi. Permasalahan serupa dihadapi pula oleh pemerintah daerah lainnya diseluruh Indonesia. Namun demikian, kesiapsiagaan mengalami peningkatan seiring terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan COVID-19 dan diterbitkannya beberapa aturan pencegahan penyebaran COVID-19.

Adapun pada Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial diproyeksi terjadi penurunan skor. Hal ini disebabkan pemenuhan kesejahteraan sosial tidak berjalan seperti biasanya sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Terlihat dari sisi sosial yang dibatasi, lalu terganggunya kesehatan mental individu di atas kecemasan dan stres akan terjangkitnya virus tersebut, terpenuhi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari yang ada, ataupun bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah sesuai sasaran atau tidak. Pada saat pandemi berlangsung tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, jika terpenuhi itu pun tidak ada kemaksimalan dalam pemenuhan tersebut yang mana diketahui jika pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan sektor ekonomi, industri mengalami stagnan dalam memproduksi dan inovasi mengakibatkan kebijakan PHK besar-besaran terjadi, kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan baru pun tidak lantas semudah itu di situasi seperti ini, apalagi dari sisi sosial, di situasi pandemi ini tidak ada kontak fisik, semuanya menjaga jarak, tradisi, adat istiadat yang sudah ratusan tahun terbangun runtuh seketika mengalami perubahan, di sisi spiritual sendiri pemerintah menetapkan untuk menutup semua tempat ibadah tak terkecuali, disini sisi spiritualitas individu terganggu yang mana sudah menjadi kebiasaan melaksanakan ibadah di tempat ibadah tetapi sekarang tidak bisa melakukannya, tidak ada kesejahteraan tercipta disini, tetapi setelah pro kontra atas penutupan tempat ibadah tersebut, pemerintah, tokoh agama

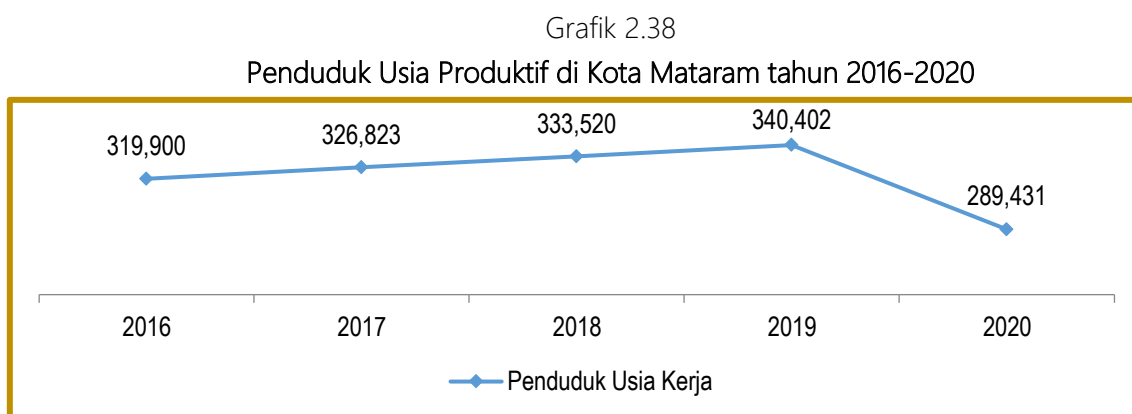
memberikan pengertian untuk lebih melakukan apapun itu yang memang *haq* (baik) untuk dilakukan. Terkait dengan Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan dan Dimensi Keamanan dari Kekerasan Fisik terjadi diproyeksi tidak terjadi penurunan ataupun peningkatan skor.

#### 2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Manusia merupakan aset yang paling berharga bagi bangsa dan Negara. Agenda pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya tidak dapat berkualitas tanpa sumberdaya manusia yang baik. Analisis kinerja atas sumberdaya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan.

##### A. Rasio Ketergantungan (Tingkat Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Indikator ini secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, semakin rendah angka rasio ketergantungan, maka akan semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah, hal ini disebabkan rendahnya penduduk usia non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif. Perkembangan penduduk usia produktif di Kota Mataram selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Berdasarkan struktur umur, penduduk usia kerja pada tahun 2016 adalah sebanyak 319.900 jiwa, menurun menjadi 289.431 jiwa pada tahun 2020. Terlihat bahwa rasio ketergantungan di Kota Mataram pada tahun 2016 sebesar 44 meningkat menjadi 48 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja atau produktif di Kota Mataram, mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 48 orang pada tahun 2020. Rasio ketergantungan yang meningkat menunjukkan beban masyarakat produktif membiayai masyarakat non produktif di Kota Mataram semakin tinggi.

Tabel 2.94

Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
--------	------	------	------	------	------

Penduduk usia<15 th+usia>64	139.414	141.686	143.956	146.313	140.220
Penduduk usia 15-64	319.900	326.823	333.520	340.402	289.431
Rasio	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>48</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2021

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja atau penduduk usia produktif akan menyebabkan peningkatan kebutuhan atas kesempatan kerja. Jika tidak tersedia kesempatan kerja yang memadai, maka kelompok usia tersebut akan menjadi beban pembangunan atau pengangguran yang pada gilirannya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial. Sebaliknya, apabila penduduk usia kerja produktif tersebut dapat terserap atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan menjadi modal pembangunan yang berdampak pada semakin membaiknya kinerja ekonomi daerah, hal tersebut mengindikasikan sumberdaya manusia mampu meningkatkan kegiatan ekonomi.

## 2.5. HASIL EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

### 2.5.1. Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD

Evaluasi terhadap dokumen RPJMD periode sebelumnya memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2020 untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun. Penyajian evaluasi RPJMD mengikuti Tabel T-B.3. pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 yang dapat menggambarkan capaian kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja akhir Jangka Menengah periode sebelumnya. Namun penyajian capaian kinerja yang dapat disajikan adalah kinerja 2018 - 2020 dikarenakan terdapat perubahan indikator kinerja maupun perhitungan kinerja antara RPJMD murni dengan dokumen Perubahan RPJMD Kota Mataram yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD kota Mataram Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil analisis capaian 33 indikator kinerja daerah yang terdiri dari 6 indikator dalam menjawab 5 tujuan dan 27 indikator dalam menjawab 11 sasaran strategis Kota Mataram sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana target dalam RPJMD Kota Mataram, 20 termasuk dalam kriteria sangat tinggi, 5 kriteria tinggi, 4 kriteria sedang, dan 4 capaian indikator kriteria sangat rendah. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa capaian indikator jauh meleset dari target yang diharapkan pada akhir RPJMD terutama kinerja yang berhubungan dengan perekonomian daerah serta dampaknya. Adapun secara rata-rata pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020 sebesar 84 persen, masuk kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Secara detail, hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Mataram periode pelaksanaan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95

## Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kota Mataram Periode Pelaksanaan tahun 2016-2021

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Tahun Ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPDP Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MISI I : MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, RUKUN DAN DAMAI																		
Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Keamanan Manusia	NA	4	3	3	4	4	3,59	3,7	3,7		120%	123%	93%		3,7	93%	Sangat Tinggi
Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	253,87	232	247,00	242,00	237,00	232	265	254	239		151%	114%	130%		167	128%	Sangat Tinggi
	Indeks Toleransi	4,05	4,20	3,80	3,90	4,00	4,20	4,41	4,417	4,417		100%	113%	110%		4,417	95%	Sangat Tinggi
Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	101,70	77,00	96,00	72,00	77,00	77,00	96,68	88,95	88,95		103%	79%	87%		87,28	87%	Tinggi



Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Tahun Ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MISI II : MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMENUHAN PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PENGUASAAN IPTEK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAERAH YANG BERDAYA SAING																		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,37	79,60	78,28	78,72	79,16	79,60	78,43	79,10	78,91		100%	100%	100%		78,91	99%	Sangat Tinggi
Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Harapan Sekolah (HLS) Lama	15,28	15,80	15,58	15,66	15,73	15,80	15,52	15,58	15,59		100%	99%	99%		15,59	99%	Sangat Tinggi
	Rata-rata Sekolah (RLS) Lama	9,05	9,60	9,39	9,46	9,53	9,60	9,43	9,45	9,46		100%	100%	99%		9,46	99%	Sangat Tinggi
Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,43	71,98	71,23	71,48	71,73	71,98	71,24	71,59	71,76		100%	100%	100%		71,76	100%	Sangat Tinggi
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0,627	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,64	0,63	0,653		100%	98%	101%		0,653	100%	Sangat Tinggi

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Tahun Ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	NA	65,00	63,00	64,00	65,00	65,00	59,76	64,46	64,46		95%	101%	99%		64,46	99%	Sangat Tinggi
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	NA	0,33	0,40	0,38	0,35	0,33	0,427	0,384	0,359		94%	98%	100%		0,39	97,3%	Sangat Tinggi
	Kategori penilaian Kota Layak Anak (KLA)	NA	700	700	700	700	700	646	658	672		92%	94%	96%		672	96%	Sangat Tinggi
<b>MISI III : MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA</b>																		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran	Persentase Penduduk Miskin ( <i>Head Count Index</i> )	10,45	7,55	9,05	8,55	8,05	7,55	8,96	8,92	8,47		101%	96%	95%		8,47	88%	Tinggi
	Pertumbuhan Ekonomi	7,99	8,35	8,17	8,20	8,27	8,35	4,98	5,58	-5,50		61%	68%	-67%		-5,50	-66%	Sangat Rendah
Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,53	1,43	1,66	1,58	1,51	1,43	1,66	1,55	1,86		130%	102%	77%		1,86	70%	Sedang
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,38	0,27	0,42	0,37	0,32	0,27	0,42	0,45	0,56		148%	78%	25%		0,56	-7%	Sangat Rendah

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Tahun Ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11,5	9,0	9,73	9,50	9,30	9,00	10,88	9,35	8,80		88%	102%	105%		8,80	102%	Sangat Tinggi
	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	4	4		100%	100%	100%		4	100%	Sangat Tinggi
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PDRB per Kapita	24.635.969	33.947.459	28.267.632	30.004.992	31.898.783	33.947.459	37.623.504	40.030.449	43.480.802		98%	133%	87%		27.870.929	82%	Tinggi
	Laju Inflasi	3,25	3,5	3,50	3,50	3,50	3,50	3,15	1,76	0,58		90%	50%	17%		0,58	29%	Sangat Rendah
	Indeks Gini	0,371	0,314	0,374	0,354	0,334	0,314	0,399	0,355	0,381		98%	94%	94%		0,353	88%	Tinggi
Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,5	95,93	95,35	95,54	95,73	95,93	93,28	94,49	93,17		98%	99%	97%		93,17	97%	Sangat Tinggi
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,50	4,07	4,65	4,46	4,27	4,07	6,72	5,51	6,83		55%	77%	40%		6,83	32%	Sangat Rendah
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>																		
Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	n/a	67	62	63	65	67	61,60	NA	61,60		100%	NA	95%		61,60	92%	Sangat Tinggi

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Tahun Ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni	n/a	67	62	63	65	67	61,60	NA	61,6		100%	NA	95%		61,6	92%	Sangat Tinggi
	Persentase Kesesuaian Pemfaatan Ruang	50	80	50	80	80	80	N/A	55,91	57,05		100%	100%	100%		80,35	100%	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55	65	57	59	62	65	57,00	NA	57,05		100%	NA	92%		58,53	90%	Tinggi
<b>MISI V : MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)</b>																		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	C	BB	B	BB	BB	BB	B	B	B		100%	75%	75%		B	75%	Sedang
Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	C	BB	B	BB	BB	BB	B	B	B		100%	75%	75%		B	75%	Sedang
	Nilai SAKIP	58,72	80,00	65,00	70,00	75,00	80,00	64,04	65,05	65,76		99%	93%	88%		65,76	82%	Tinggi
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100%	100%	100%		WTP	100%	Sangat Tinggi
	Nilai Unit Pelayanan Publik	B	A+	BB	A-	A	A+	B	B	B		102%	100%	100%		B	100%	Sangat Tinggi

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Target RPJMD Tahun Ke				Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- (%)				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Rasio Kemandirian Daerah	17,79	35,00	28,00	29,00	30,00	35,00	24,67	25,27	23,05		88%	87%	85%		25,43	73%	Sedang



Dari hasil evaluasi data kinerja tersebut, kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hal ini memiliki nilai prioritas, karena berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Adapun penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.96

### Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
A	Indeks Keamanan Manusia	Capaian Indeks Keamanan Manusia Tahun 2020 pada angka 3,7. Belum mencapai target yaitu 4	4	3,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi besar gangguan ketertiban sebagai ibu kota/pusat pemerintahan provinsi</li> <li>Angka kriminalitas cukup tinggi</li> <li>Kapasitas daerah dalam upaya mitigasi bencana masih rendah</li> </ul>
	1 Angka Kejahatan per 100,000 penduduk ( <i>crime rate</i> )	Angka kejahatan per 100.000 penduduk dapat ditekan pada angka 167 dari target 237	232	167	Masih ada gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang tidak tertangani
	2 Indeks Kota Toleran	Capaian Indeks Kota Toleran lebih dari target	4,20	4,417	Masih terdapat potensi konflik horizontal/antar warga berbau SARA
	3 Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI)	Risiko bencana menurun dari 149,2 pada baseline data menjadi 88,95 pada tahun 2020. Meskipun belum mencapai target (77), tapi penurunan IRBI ini sudah sangat signifikan	77,00	88,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan mandiri pasca bencana masih lemah</li> <li>Upaya mitigasi belum dilaksanakan secara optimal</li> <li>Kesadaran terhadap bencana masih kurang</li> <li>Belum ada rencana kontinjensi untuk masing-masing jenis bencana</li> </ul>
B	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 78,91 dan belum mencapai target yang ditetapkan. IPM Kota Mataram termasuk kategori tinggi	79,16	78,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pendidikan belum optimal yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk tidak tuntas sampai 12 tahun</li> <li>Peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum optimal</li> <li>Masih terdapat jumlah penduduk buta huruf yang didominasi oleh penduduk usia dewasa dan penduduk usia lanjut yang belum pernah bersekolah di jenjang formal</li> <li>Melemahnya Daya Beli (Purchasing</li> </ul>

No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
					Power) Masyarakat
1	Harapan Lama Sekolah	Belum mencapai target yang diinginkan	15,73	15,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan akses pendidikan belum optimal</li> <li>• Pemerataan mutu pendidikan belum optimal</li> <li>• Kualitas SDM pendidik, sarana dan prasarana pendidikan belum merata.</li> </ul>
2	Rata-rata Lama Sekolah	Belum mencapai target yang diinginkan	9,53	9,46	Pemicuan RLS dipengaruhi oleh Angka Putus Sekolah dari beban ketergantungan siswa yang berasal dari keluarga miskin
3	Angka Harapan Hidup	Telah mencapai target yang diinginkan	71,73	71,76	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyakit infeksius dan/atau kekekurangan gizi pada balita</li> <li>• Kesehatan balita masih rendah yang ditandai dengan adanya kasus kekurangan gizi buruk dan penyakit pneumonia, ISPA, dan diare yang masih tinggi</li> </ul>
4	Indeks Pembangunan kesehatan Masyarakat (IPKM)	IPKM melampaui target yang diinginkan	0,650	0,653	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang memadai, sehingga angka kematian anak dan ibu masih relatif tinggi</li> <li>• Masih banyak perempuan yang bersalin tidak di fasilitas kesehatan (2,28%)</li> </ul>
5	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Belum mencapai target yang diinginkan	65,00	64,46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Disagregasi 5 (lima) domain IPP belum terpenuhi (pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi)</li> </ul>
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Telah mencapai target yang diinginkan	0,350	0,359	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemberdayaan perempuan yang putus sekolah</li> <li>• Kurangnya wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha.</li> <li>• Kurangnya Pemberdayaan perempuan untuk ketahanan keluarga</li> <li>• Pengaruh IT pada Anak usia remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar, sehingga berdampak buruk terjadinya kejahatan seksual, tindak kekerasan dan perdagangan orang, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba dan kasus perkawinan usia muda.</li> <li>• masih ada kasus KDRT</li> </ul>
7	Kategori Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Realisasi penilaian Kota Layak Anak (KLA) belum mencapai target	700	672	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Optimalnya pemenuhan hak-hak anak</li> <li>• Belum optimalnya pemenuhan kreativitas anak</li> <li>• Belum optimalnya sarana dan prasarna Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terstandarisasi</li> </ul>

No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
C	Persentase Penduduk Miskin	Angka kemiskinan masih tinggi dan belum mencapai target yang diharapkan yaitu penurunan angka kemiskinan hingga 8,05%	8,05	8,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bencana Gempa tahun 2018 dan Pandemi Covid-19</li> <li>Belum optimalnya pemutakhiran DTKS</li> <li>Program-program yang belum terintegrasi</li> <li>Penerima Layanan Sosial Dasar dan Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan bagi masyarakat miskin belum tepat sasaran</li> <li>Belum optimalnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar</li> <li>Masih lemahnya penyelenggaraan sistim jaminan sosial</li> <li>Masih belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat miskin</li> </ul>
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Dari baseline 2016 sebesar 1,69 jumlahnya terus meningkat hingga akhir tahun RPJMD sebesar 1,86.	1,51	1,86	
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Dari baseline 2016 sebesar 0,43 jumlahnya terus meningkat hingga akhir tahun RPJMD sebesar 0,56	0,32	0,56	
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persentase keluarga sejahtera masih tinggi, yakni 8,80%. Meskipun terus menurun dan melampaui target yang diharapkan yaitu pada 9,30%	9,30	8,80	
D	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP) telah tercapai dari angka 3 pada baseline data menjadi 4 (2020). Angka ini telah sesuai dengan target yang ingin dicapai pada tahun yaitu 3-4.	3-4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergiziseimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungannya.</li> <li>Kerentanan pada stabilitas harga bahan pangan strategis terutama beras pada saat panen raya. Pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional harga beberapa komoditas pangan strategis mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan.</li> <li>Belum Optimalnya Upaya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>Masih Lemahnya Pemetaan Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat</li> </ul>
D	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi sangat	8,27	-5,50	

No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		jauh dari target			<ul style="list-style-type: none"> <li>bencana gempa dan Pandemi COVID-19</li> <li>Menurunnya Pengeluaran Konsumsi Masyarakat</li> <li>Melambatnya Kinerja Investasi</li> <li>Daya Saing Produk Lokal Masih Belum Kompetitif</li> <li>Ekonomi mataram terlalu bergantung kepada perdagangan/jasa dan wisata yang rentan terhadap kondisi eksternal</li> </ul>
1	PDRB Per Kapita	Telah mencapai target yang diinginkan	31.898.783	43.480.802	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan investasi masih sangat fluktuatif yang dipengaruhi berbagai macam faktor</li> <li>Kontribusi sektor-sektor basis belum optimal</li> <li>Perekonomian belum mampu bangkit secara cepat pasca krisis (termasuk saat ada wabah dan bencana alam)</li> <li>Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Wisata</li> <li>Kurangnya Pengembangan UMKM Dan IKM</li> </ul>
2	Laju Inflasi	Kondisi perekonomian tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pemerintah berusaha menjaga harga bahan pokok demi mempertahankan angka inflasi di level rendah dan stabil, tahun ini angka inflasi dijaga agar tidak terlalu jatuh.	3,50	0,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting masih belum optimal dan daya beli masyarakat yang sangat rendah akibat kegiatan ekonomi terus melambat di tengah pandemi <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i>.</li> <li>Masih Bergantungnya Ekonomi Mataram Kepada Perdagangan/Jasa Dan Wisata Yang Rentan Terhadap Kondisi Eksternal</li> </ul>
3	Indeks Gini	Indeks gini mengalami peningkatan dari 0.357 (2016) menjadi 0.353 (2020). Nilai indeks ini berada di atas target yang ditetapkan (0.334)	0,334	0,381	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi Pendapatan Masih Terkonsentrasi Pada 20% Penduduk Kaya</li> </ul>
4	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Tingkat Kesempatan Kerja belum mencapai target yang	95,73	93,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia</li> <li>Permintaan tenaga kerja terdidik lebih</li> </ul>

No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
		diinginkan			<ul style="list-style-type: none"> <li>cepat daripada permintaan tenaga kerja secara keseluruhan</li> <li>Permintaan tenaga kerja terdidik lebih cepat dibandingkan penawaran tenaga kerja</li> </ul>
	5 Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran masih dikategorikan cukup tinggi dan tidak mencapai target yang diinginkan.	4,27	6,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat partisipasi mencapai 59,63% atau sebanyak 120.709 jiwa usia kerja belum memiliki pekerjaan</li> <li>Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 23.143 jiwa dengan tingkat pengangguran 12,98%</li> <li>Rendahnya serapan tenaga kerja</li> <li>Besarnya penduduk yang bekerja di sektor informal dan pekerja paruh waktu (tidak memenuhi kategori full-time worker) yg tidak terlindungi jamsostek</li> <li>Belum Adanya Konsep/arah Pengembangan PKL, Wirausaha Baru</li> </ul>
E	Indeks Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni di Kota Mataram belum mencapai target	65,00	61,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Mataram termasuk <i>Bottom Tier City</i> berdasarkan <i>Most Livable City Index</i> (MLCI) dengan nilai 61,6.</li> <li>Belum optimalnya pelaksanaan perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam mengusung konsep Kota Hijau/Kota Berkelanjutan</li> <li>Belum tercapainya ketersediaan RTHKetersediaan RTH yang sesuai dengan ketentuan sangat sulit diterapkan dimana RTH Kota Mataram baru mencapai 12.5% dari 30% yang disyaratkan</li> <li>Masih terdapat kawasan kumuh perkotaan</li> </ul>
	1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kinerja penataan ruang belum mencapai yang ditargetkan	80,00	57,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terlaksananya perencanaan spasial yang terintegrasi dengan perencanaan sektoral</li> <li>Belum tersedianya rencana detail tata ruang sebagai acuan dalam perizinan online;</li> <li>Belum selarasnya RTRW sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah.</li> <li>Belum optimalnya perwujudan NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>Belum Terintegrasinya Penataan Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan</li> <li>Belum Semua Rencana Indikasi Program Dalam RT/RW Terlaksana</li> </ul>
	2 Indeks Kualitas Lingkungan	Berdasarkan dokumen IKPLHD	62,00	57,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengelolaan kualitas lingkungan hidup belum optimal.</li> </ul>



No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Hidup (IKLH)	tahun 2020, capaian IKLH di akhir tahun 2020 adalah 57,05 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada angka 62. Nilai IKLH 57,05 sendiri termasuk dalam kategori sedang.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya ancaman pencemaran terhadap udara</li> <li>Adanya ancaman pencemaran terhadap lingkungan air</li> <li>Kualitas tutupan lahan masih rendah</li> <li>Tidak sebanding antara volume sampah dengan volume angkut sampah. Menurut data tahun 2018, volume sampah mencapai 1.345 m/hari atau setara dengan 315 ton/hari dan yang mampu diangkut ke TPA adalah 1.167 m3/hari atau setara dengan 273 ton/hari (86,78%).</li> <li>Mekanisme pengelolaan sampah dengan pola 3R tidak berjalan optimal karena tidak ada informasi akurat terkait aktivitas 3R melalui bank sampah, pengomposan, dll</li> </ul>
F	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum mencapai target yang diinginkan	BB	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SAKIP berjalan lambat, meskipun realisasinya terus meningkat. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai level unit terkecil</li> <li>Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset belum optimal</li> <li>Ketergantungan Daerah terhadap APBN masih tinggi</li> <li>Kualitas Pelayanan Publik belum optimal</li> </ul>
2	Nilai SAKIP	Belum mencapai target yang diinginkan	75,00	65,76	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektifitas kelembagaan OPD belum optimal</li> <li>Manajemen Pengelolaan ASN belum optimal</li> <li>Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian belum optimal</li> <li>Kualitas Perencanaan belum optimal. Program/kegiatan Kota Mataram seringkali tidak sinkron dengan program/kegiatan di provinsi maupun pusat</li> <li>Belum Maksimalnya Pembagian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah.</li> </ul>
3	Opini BPK	Opini BPK sesuai dengan target, yaitu meraih WTP	WTP	WTP	<p>Walaupun Kota Mataram tetap mempertahankan Opini BPK, kondisi pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Dari hasil evaluasi internal kondisi-kondisi yang perlu pembenahan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya mampu mengikuti siklus akuntansi yang seharusnya</li> <li>Penyusunan dan penyampaian laporan</li> </ul>

No	Indikator Kinerja	Intepretasi Kondisi Akhir Tahun Perencanaan	Tahun 2020		Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
					<p>OPD tidak disampaikan tepat waktu/relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria umum opini belum dilaksanakan secara optimal</li> <li>• Peraturan perundang-undangan, sistem dan mekanisme tata kelola keuangan, penganggaran pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD</li> <li>• Kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah</li> <li>• Peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya yang diterbitkan pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi</li> </ul>
4	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan	Nilai Indeks Unit Pelayanan Publik Tahun 2020 berada pada Kategori B/Baik.	A	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua SKPD melakukan pengukuran kepuasan masyarakat</li> <li>• Belum Optimalnya Pelayanan Publik Di Kota Mataram</li> <li>• Belum Optimalnya Tata Kelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik</li> </ul>
5	Rasio Kemandirian Daerah	Belum mencapai target yang diinginkan	30	23,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya upaya intensifikasi dan ektensifikasi potensi PAD</li> </ul>

## 2.5.2. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mataram

Tabel 2.97

### Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Mataram

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI
		2016	2017	2018	2019	2020			
1.	<b>Aspek Geografi dan Demografi</b>								
1.1.	<b>Pemerintahan</b>								
	Jumlah Kecamatan	6	6	6	6	6			
	Jumlah Kelurahan	50	50	50	50	50			
	Jumlah Lingkungan	325	325	325	325	325			
	Jumlah Rumah Tangga	1.673	1.673	1.673	1.717	1.726			
1.2.	<b>Klimatologi</b>								
	Rata-rata Suhu (°C)	26,9	26,6	26,6	26,32	28,84			
	Rata-rata Kelembaban (%)	84	83,42	81,3	81	76,29			
	Rata-rata Kecepatan Angin (m/det)	3,5	3,67	3	4,08	1,93			
	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	1.005,50	1.005,53	1.005,90	1.006,65	1.004,07			
	Rata-rata Curah Hujan (mm)	236,17	218,82	139,4	133,33	155,12			
	Rata-rata Hari Hujan (hari)	17,75	12,36	12	11,89	14,83			
	Rata-rata Penyinaran Matahari (%)	68,5	66,92	77	74,92	89,96			
1.3.	<b>Penggunaan Lahan</b>								
	Perumahan	2.432,00	2.438,70	2.449,84	2.472,64	2.492,00			
	Lapangan Olahraga	46,10	46,10	46,10	46,10	46,10			
	Kuburan	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64			
	Perkantoran	116,13	117,13	116,94	116,94	116,94			
	Pendidikan	152,47	152,47	153,03	153,03	153,03			
	Kesehatan	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90			
	Ibadah	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33			
	Jasa	-	-	-	-	-			
	Pasar/Terminal	68,35	68,35	68,35	68,35	68,35			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Pertokoan/SPBU	106,17	106,69	106,95	107,06	108,70			
	Warung/Rumah Makan	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56			
	Hotel/Motel	19,23	19,23	20,47	20,47	20,47			
	Pergudangan	52,40	54,07	54,07	54,07	54,80			
	Industri	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75			
	Taman Kota	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07			
	Tanah di Peruntukan	129,88	129,88	129,88	129,88	129,88			
	Tanah Pertanian	2.726,78	2.717,05	2.703,84	2.680,94	2.659,30			
	Tanah Tidak Diusahakan	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89			
	Luas Lahan Kota Mataram	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130			
<b>1.4.</b>	<b>Demografi</b>								
	Jumlah penduduk (jiwa)	459.314	468.509	477.476	486.715	429.651			
	Jumlah Rumah Tangga (RT)	125.620	128.135	130.587	133.114	116.122			
	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	7.492	7.642	7.789	7.939	7.009			
	Rasio Jenis Kelamin	98	98	98	98	99			
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,02	2,00	1,91	2,06	0,63			
	<b>Jumlah Penduduk Per Kecamatan</b>								
	Kecamatan Ampenan	89.421	91.099	92.714	94.363	88.022			
	Kecamatan Sekarbela	67.431	69.989	72.571	75.254	58.786			
	Kecamatan Mataram	85.491	87.527	89.522	91.568	77.465			
	Kecamatan Selaparang	75.027	75.235	75.370	75.509	68.657			
	Kecamatan Cakranegara	67.395	67.791	68.119	68.455	67.826			
	Kecamatan Sandubaya	74.549	76.868	79.180	81.566	68.895			
	<b>Kepadatan Penduduk Per Kecamatan</b>								
	Kecamatan Ampenan	9.453	9.630	9.801	9.975	9.305			
	Kecamatan Sekarbela	6.534	6.782	7.032	7.292	5.696			
	Kecamatan Mataram	7.945	8.134	8.320	8.510	7.199			
	Kecamatan Selaparang	6.966	6.986	6.998	7.011	6.375			
	Kecamatan Cakranegara	6.969	7.010	7.044	7.079	7.014			
	Kecamatan Sandubaya	7.224	7.448	7.672	7.904	6.676			
	<b>Penduduk Menurut Kelompok Umur</b>								
	Kelompok Umur 0-4	42.074	42.196	42.291	42.407	42.050			
	Kelompok Umur 5-9	40.422	41.031	41.509	41.887	40.989			
	Kelompok Umur 10-14	38.098	38.893	39.787	40.742	35.575			
	Kelompok Umur 15-19	46.399	46.898	47.330	47.887	34.617			
	Kelompok Umur 20-24	57.742	58.669	59.543	60.383	37.510			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Kelompok Umur 25-29	38.773	39.379	39.976	40.599	35.177			
	Kelompok Umur 30-34	37.102	37.456	37.782	38.183	34.264			
	Kelompok Umur 35-39	33.513	34.108	34.655	35.183	32.633			
	Kelompok Umur 40-44	31.923	32.734	33.498	34.226	30.679			
	Kelompok Umur 45-49	25.956	26.955	27.940	28.897	28.090			
	Kelompok Umur 50-54	20.236	21.003	21.806	22.658	23.357			
	Kelompok Umur 55-59	16.943	17.641	18.309	19.011	19.870			
	Kelompok Umur 60-64	11.313	11.980	12.681	13.375	13.234			
	Kelompok Umur 65-69	8.046	8.373	8.734	9.165	10.316			
	Kelompok Umur 70-75	5.233	5.466	5.720	6.004	5.599			
	Kelompok Umur 75+	5.541	5.727	5.915	6.108	5.691			
2.	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
2.1.	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
	Pertumbuhan PDRB (%)	8,01	8,07	4,98	5,58	-5,50	8,27	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	14.799,97	16.521,36	17.964,32	19.483,42	18.681,57			
	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rp)	11.533,90	12.464,41	13.082,00	13.811,53	13.051,59			
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp.)	32.221.900	35.263.698	37.623.504	40.030.449	43.480.802	31.898.783,00	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
	PDRB Per Kapita ADHK (Rp.)	25.111.144	26.604.420	27.398.236	28.377.038	30.377.190			
	Laju Inflasi (%)	2,47	3,59	3,15	1,76	0,58	3,50	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Indeks/Koefisien/Rasio Gini	0,357	0,391	0,399	0,355	0,381	0,334	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Indeks Williamson	0,360	0,386	0,408	0,404	0,415			
	<b>Kemiskinan</b>								
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	44.810	44.530	42.600	43.190	41.800	34.372	PERPRES 59 TAHUN 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Belum Tercapai
	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,80	9,55	8,96	8,92	8,47	8,05	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai



A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (< SEJAJAI (=))
	Laju Penurunan Kemiskinan (%)	-0,65	-0,25	-0,59	-0,04	-0,45	-0,6%	RPJMN 2020-2024	Belum Tercapai
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,69	1,73	1,66	1,55	1,86	1,51	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,43	0,47	0,42	0,45	0,56	0,32	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
<b>2.2.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>								
	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>77,20</b>	<b>77,84</b>	<b>78,43</b>	<b>79,10</b>	<b>78,91</b>	79,16	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	70,70	70,98	71,24	71,59	71,76	71,73	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Sudah Tercapai
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	15,50	15,51	15,52	15,58	15,59	15,73	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	9,25	9,32	9,43	9,45	9,46	9,53	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Pengeluaran Per Kapita (Rp./Orang/Tahun)	13.733	14.316	14.797	15.426	14.968			
	<b>Angka Melek Huruf (%)</b>	<b>92,74</b>	<b>91,71</b>	<b>94,04</b>	<b>92,77</b>	<b>93,30</b>	100		Belum Tercapai
	Angka Melek Huruf Laki-laki (%)	95,93	96,56	96,97	96,77	95,53	100		Belum Tercapai
	Angka Melek Huruf Perempuan (%)	89,65	87,03	91,24	88,93	91,16	100		Belum Tercapai
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	93,83	94,65	93,28	94,49	93,17	95,73	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	62,26	65,53	62,55	63,88	68,07			
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,17	5,35	6,72	5,51	6,83	4,27	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
<b>2.3.</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>								
	<b>Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga</b>								
	Jumlah Grup Kesenian	165	203	203	203	203			
	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk	0,0170	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200			
	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4			
	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004			
	Jumlah Klub Olahraga	0	7	8	10	211			
	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk	0,0000	0,0007	0,0008	0,0010	0,0211			
	Jumlah Prasarana Olahraga	9	9	27	80	152			
	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,0009	0,0009	0,0027	0,0080	0,0152			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
3.	Aspek Pelayanan Umum								
3.1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
3.1.1.	Urusan Pendidikan								
	Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI) (%)	91,14	92,14	92,14	100	100	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sesuai
	Angka Partisipasi Sekolah (SMP/MTsI) (%)	78,73	78,73	79,00	96,87	97,50	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Belum Tercapai
	<b>Angka Partisipasi Kasar (SD/Setara) (%)</b>	<b>111,3</b>	<b>102,03</b>	<b>111,68</b>	<b>102,51</b>	<b>103,40</b>	104	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Belum Tercapai
	Kecamatan Ampenan	108,89	101,02	109,90	98,2	97,76			
	Kecamatan Mataram	134,95	105,93	125,65	120,55	127,00			
	Kecamatan Cakranegara	145,73	121,37	132,20	117,9	117,44			
	Kecamatan Sekarbela	85,4	80,15	90,35	80,96	80,64			
	Kecamatan Selaparang	110,4	111,97	115,23	104,25	103,01			
	Kecamatan Sandubaya	73,3	86,35	91,72	87,76	88,82			
	<b>Angka Partisipasi Kasar (SMP/Setara) (%)</b>	<b>121,89</b>	<b>104,6</b>	<b>114,96</b>	<b>107,42</b>	<b>104,03</b>	104	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Melampaui
	Kecamatan Ampenan	110,62	57,77	61,39	63,39	61,00			
	Kecamatan Mataram	115,68	107,43	117,35	110,81	96,85			
	Kecamatan Cakranegara	59,94	57,89	68,65	65,47	63,04			
	Kecamatan Sekarbela	86,81	82,21	87,63	96	101,23			
	Kecamatan Selaparang	266,32	250,13	260,88	211,6	214,85			
	Kecamatan Sandubaya	94,84	85,21	100,81	99,4	95,84			
	<b>Angka Partisipasi Murni (SD/Setara) (%)</b>	<b>91,76</b>	<b>93,15</b>	<b>102,27</b>	<b>95,99</b>	<b>96,17</b>	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Belum Tercapai
	Kecamatan Ampenan	56,74	92,87	101,31	92,26	91,52			
	Kecamatan Mataram	120,17	97,67	114,55	114,39	118,01			
	Kecamatan Cakranegara	131,5	110,51	119,36	107,61	108,63			
	Kecamatan Sekarbela	75,48	72,6	82,29	74,46	74,73			
	Kecamatan Selaparang	102,64	101,68	108,33	98,64	96,54			
	Kecamatan Sandubaya	65,45	78,25	83,11	83,06	82,05			
	<b>Angka Partisipasi Murni (SMP/Setara) (%)</b>	<b>100,32</b>	<b>84,08</b>	<b>92,55</b>	<b>93,79</b>	<b>94,56</b>	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Belum Tercapai
	Kecamatan Ampenan	106,22	41,86	48,96	53,63	53,54			
	Kecamatan Mataram	92,94	87,47	93,29	92,71	89,53			
	Kecamatan Cakranegara	46,24	44,84	53,98	58,94	58,86			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Kecamatan Sekarbela	65,56	64,73	68,98	78,59	87,38			
	Kecamatan Selaparang	221,18	208,25	213,26	192,42	200,20			
	Kecamatan Sandubaya	67,45	68,86	82,37	87,86	85,14			
	Angka Putus Sekolah (SD/MI) (%)	1	8	9	17	5			
	Angka Putus Sekolah (SMP/MTs) (%)	52	7	59	13	10			
	Angka Kelulusan (SD) (%)	100	100	100	100	100	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sesuai
	Angka Kelulusan (SMP) (%)	99,33	99,92	94,03	100	100	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sesuai
	Angka Melanjutkan (%)	93,31	85,59	89,88	89,88	90,00	100	UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Belum Tercapai
	Rasio Murid Per Guru (SD)	19,73	19,90	19,90	18,72	20,13		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Rasio Murid Per Guru (SMP)	14,17	13,62	13,50	12,37	15,67		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Rasio Murid Per Rombel (SD)	29,69	26,55	28,12	27,33	29,10		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Rasio Murid Per Rombel (SMP)	30,49	30,59	31,36	27,53	31,33		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Rasio Guru Per Rombel (SD)	1,51	1,33	1,41	1,46	1,45		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Belum Tercapai
	Rasio Guru Per Rombel (SMP)	2,15	2,25	2,32	2,22	2,00		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Belum Tercapai
	Rasio Rombel Per Kelas (SD)	1,11	1,25	1,15	1,17	1,10		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Rasio Rombel Per Kelas (SMP)	0,85	1,00	0,92	0,97	1,05		Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 (SD)	90,01	90,62	91,80	92,38			Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1 (SMP)	91,99	91,99	91,30	92,95			Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S2 (SD)	1,05	1,09	1,14	1,54			Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S2 (SMP)	4,74	4,74	5,35	4,39			Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Guru SD/MI Layak Mengajar	91,06	91,72	92,93	93,92			Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
	Guru SMP/MTs	96,74	96,28	96,65	97,34			Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar	Sesuai
<b>3.1.2.</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>								
	<b>Indikator Utama Kesehatan</b>								
	Angka Kematian Bayi	2,84	5,33	7,50	0,50	5,00	4	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	997,16	994,67	992,50	999,50	995,00	996	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Angka Kematian Ibu	130,16	72,68	116,20	77,30	90,00	<70	PERPRES 59 Tahun 2017	Belum Tercapai
	Prevalensi Stunting	27,90	37,80	24,49	22,60	20,70	20	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Prevalensi Gizi Buruk	11,40	12,00	5,95	8,29	10,62	5	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	<b>Indikator Pendukung Kesehatan</b>								
	<b>Pelayanan Kesehatan Anak</b>								
	Cakupan Bayi 0-11 Bulan Telah Diimunisasi Secara Lengkap	101,38	99,00	82,50	85,70	85,70			
	Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	60,35	54,78	50,66	55,28	52,77			
	Penanganan Komplikasi Neonatal	54,60	55,05	59,90	57,60	47,67			
	Cakupan Anak 6-59 Bulan yang Memperoleh Vitamin A	66,26	64,64	62,29	60,57	59,52			
	Cakupan Balita Kurus yang mendapatkan PMT	39,54	64,57	83,77	96,41	99,18			
	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu</b>								
	Cakupan Ibu Hamil-K4	94,01	91,72	84,70	85,70	79,69			
	Cakupan Layanan Ibu Nifas	89,75	87,02	81,60	80,00	77,42			
	Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT Pemulihan	29,75	47,11	53,35	73,87	96,44			
	Penanganan Komplikasi Kebidanan	98,24	97,83	92,10	87,80	70,21			
	Mutu Layanan Kesehatan								
	Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk	90,79	62,11	76,44	15,82	N/A			
	Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk	91,44	112,91	76,00	6,16	N/A			
	Kelahiran Ditolong Tenaga Kerja Terlatih (%)	91,59	89,06	83,60	83,70	79,04			
	Jaminan Kesehatan (Jiwa)	160.842	164.245	144.988	180.016	170.786			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
3.1.3.	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	0,72	0,79	0,79	0,91	0,90			
	Persentase Kualitas Jalan dalam Kondisi Baik (%)	55,82	71,55	79,17	90,62	89,83			
	Persentase Kualitas Jalan dalam Kondisi Sedang (%)	11,25	3,00	2,30	0,93	1,54			
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	1,15	1,27	1,29	1,32	1,16			
	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (%)	61,87	66,92	66,92	66,92	66,92			
	Persentase Panjang Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (%)	66,54	71,22	75,63	77,88	80,00			
	Persentase Jembatan dengan Kondisi Rusak Ringan (%)	97,72	97,72	30,59	25,83	5,37			
	Persentase Jembatan dengan Kondisi Sedang (%)	2,28	2,28	69,61	74,17	94,63			
	Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak (%)	99,33	99,20	91,98	91,99	92,03	>90	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Sesuai
	Cakupan Layanan Air Minum (%)	66,93	64,67	76,02	73,79	72,00	100	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak (%)	91,75	99,20	99,54	99,81	87,09			
	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	85,53	77,27	85,90	83,03	99,57	100	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
3.1.4.	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>								
	Persentase <i>Backlog</i> Rumah (%)	17,83	15,37	18,07	24,98	24,43	100%	DTKS	
	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata (%)	90,43	94,59	96,60	96,69	96,37	100	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	9,57	5,41	3,40	3,31	3,27	1,58% Per tahun	RENSTRA DINAS PERKIM KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
3.1.5.	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>								
	Persentase Penyelesaian Pelayanan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani (%)	75	80	85	100	100	90	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (< SESUAI (=) MELAMPUI (>))
	Indeks Kota Toleran	4,05	3,78	4,41	4,417	4,417	4,2	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (Kelurahan)	50	50	50	50	50	50	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Sesuai
	Indeks Resiko Bencana Indonesia	101,71	96,68	96,68	88,95	88,95	77	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
<b>3.1.6.</b>	<b>Urusan Sosial</b>								
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)	2,36	2,50	2,79	2,83	2,67	>3,23	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	38,80	40,66	42,22	54,44	58,32	63,23	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Jumlah PRSE yang diberdayakan	60	90	120	150	180			
<b>3.2.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>								
<b>3.2.1.</b>	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>								
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,17	5,35	6,72	5,51	6,83	<4,27	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,26	64,53	62,55	63,88	68,07			
	Tingkat Kesempatan Kerja	93,83	94,65	93,28	94,49	93,17	>93,98	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Tenaga Kerja Formal	64,19	66,50	55,61	52,31	48,06			
	Tenaga Kerja Informal	35,81	33,50	44,39	47,69	51,94			
<b>3.2.2.</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
	Indeks Pembangunan Gender	N/A	92,66	92,54	92,77	92,79	97,80	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Angka Harapan Hidup (AHH) (Laki-laki) (Tahun)	N/A	68,97	69,24	69,86	68,97			
	Angka Harapan Hidup (AHH) (Perempuan) (Tahun)	N/A	72,88	73,14	73,64	72,88			
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Laki-laki) (Tahun)	N/A	15,59	15,60	15,61	15,62			
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Perempuan) (Tahun)	N/A	15,11	15,12	15,23	15,24			
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Laki-laki) (Tahun)	N/A	10,36	10,48	10,49	10,50			
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Perempuan) (Tahun)	N/A	9,11	9,12	9,16	9,17			



A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	(Tahun)								
	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp./orang/tahun)	N/A	12.557	12.951	13.515	13.164			
	<b>Indeks Pemberdayaan Gender</b>	<b>N/A</b>	<b>64,57</b>	<b>65,34</b>	<b>76,46</b>	<b>76,23</b>			
	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	N/A	12,50	12,50	25,00	25,00			
	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	N/A	46,89	50,16	47,62	46,91			
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	N/A	32,86	33,54	33,93	34,11			
	Rasio KDRT (%)	N/A	0,054	0,160	0,450	0,353	100	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Sesuai
<b>3.2.3.</b>	<b>Urusan Pangan</b>								
	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	67,41	62,60	59,50			
	Skor Pola Pangan Harapan	82,13	87,90	87,90	96,80	96,40	100	PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Belum Tercapai
<b>3.2.4.</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>						<b>Pertanahan</b>		
	Persentase bidang tanah bersertifikat (%)	67,12	72,71	80,67	84,66	85,06			
	Persentase peningkatan bidang tanah bersertifikat (%)	3,55	5,59	7,96	3,98	0,41			
	Persentase penyelesaian izin lokasi (%)	76,64	71,89	61,68	90,84	98,45			
<b>3.2.5.</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>								
	<b>Sarana Persampahan</b>	<b>434</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>412</b>	<b>408</b>			
	Dump Truck	36	38	37	33	33			
	Armroll Truck	19	19	19	19	18			
	Open Pick Up Panther	16	14	14	14	11			
	Open Pick Up Kijang	1	1	1	1	1			
	Motor Sampah	13	16	16	340	340			
	Gerobak Sampah	341	235	235	-	-			
	Truk Tangki Penyiraman dan Tinja	3	2	2	2	2			
	Lodder	1	2	2	2	2			
	Exavator	2	1	2	1	1			
	Dozzer	2	-	-	-	-			
	<b>Prasarana Persampahan</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>47</b>			
	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	29	29	5	5	5			
	Mini Bin Container	52	52	11	3	3			
	Container	78	78	33	30	27			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Transfer Depo	11	11	9	9	9			
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSt)	4	4	3	3	3			
	<b>Persentase Volume Sampah Tertangani</b>								
	Jumlah Sampah yang Terangkut ke TPA (Ton/Hari)	264,00	285,90	291,90	297,08	301,34			
	Jumlah Sampah yang Terkelola di TPS 3R (Ton/Hari)	4,24	7,60	11,10	14,70	18,45			
	Jumlah Sampah Tidak Terkelola (Ton/Hari)	53,26	34,40	31,50	28,92	27,11			
	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)	321,50	327,90	334,50	340,70	346,90			
	Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA (%)	82,12	87,19	87,26	87,20	86,87			
	Persentase Sampah yang Terkelola di TPS 3R (%)	1,32	2,32	3,32	4,31	5,32			
	Persentase Sampah Tidak Terkelola (%)	16,57	10,49	9,42	8,49	7,81			
	<b>Indeks Kualitas Air dan Udara</b>								
	Indeks Kualitas Air	80,00	80,00	80,00	60,00	43,33			
	Indeks Kualitas Udara	84,86	84,86	83,08	88,80	85,22			
	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP (%)	100	100	100	90,90	100			
	Tingkat Pencemaran Air	cemar ringan dan cemar sedang							
	Tingkat Pencemaran Udara	tidak tercemar karena memenuhi baku mutu							
	<b>Ruang Terbuka Hijau</b>								
	Persentase Luas RTH Publik (%)	1,85	1,85	1,85	2,47	2,48	20	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
	Persentase Luas RTH Private (%)	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	10	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
	Persentase Luas RTH Publik dan Private (%)	13,96	13,96	13,96	14,58	14,59	30	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
3.2.6.	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>								
	Persentase Penduduk ber KTP (%)	95,52	97,50	98,14	98,00	101,16			
	Rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran (%)	0,809	0,851	0,973	0,941	1,008			
	Rasio pasangan ber akta nikah	0,45	0,49	0,54	0,62	0,67			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
3.2.7.	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
	Jumlah Keluarga Sejahtera (jiwa)	124.036	124.036	137.399	119.719	91.689			
	Persentase Akseptor KB (%)	76,71	77,13	78,05	79,00	78,31	70	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
3.2.8.	<b>Urusan Perhubungan</b>								
	Persentase penggunaan moda angkutan umum (%)	7	7	5	6	3	9	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Rasio perjalanan	1,80	1,80	1,80	1,75	1,20	1,75	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
	Rasio Konektivitas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08			
	LoS (level of service) ruas jalan	Level C	Level B	Level B	Level B	Level B			
	Cakupan wilayah angkutan umum (%)	23	28	23	31	23			
	Fasilitas Perlengkapan Jalan								
	Rambu Jalan	934	1.124	1.124	1.204	1.204			
	RPPJ	99	99	99	99	99			
	Marka Jalan (m <sup>2</sup> )	9.282	10.390	10.390	12.153	12.153			
	Paku Jalan	2.718	2.985	2.985	2.985	2.985			
	Pagar Pengaman (m)	1.181	1.346	1.346	1.346	1.346			
	Warning Light	29	34	34	34	34			
	Deliniator	740	944	944	944	944			
	Traffic Light	38	38	38	38	38			
	Cermin Tikungan	31	31	31	36	36			
	Papan Nama Jalan	337	567	771	846	846			
	Penerangan Jalan Umum	14.141	14.491	15.011	15.411	15.711			
	Kejadian dan Korban Kecelakaan								
	Jumlah Kecelakaan	339	264	335	339	259			
	Meninggal	42	40	75	33	28			
	Luka Berat	-	-	-	-	-			
	Luka Ringan	297	224	260	306	231			
3.2.9.	<b>Urusan Komunikasi dan Informasi</b>								
	Indeks SPBE	N/A	N/A	2,71	2,51	N/A			
3.2.10.	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>								
	Persentase Koperasi Aktif (%)	65	82	82	84	69			
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	17,44	11,49	10,40	21,77	55,90			
3.2.11.	<b>Urusan Penanaman Modal</b>								
	PMDN (Rp)	N/A	446.210.814.472	3.872.493.376.250	939.971.030.959	712.235.587.750			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	PMA (\$)	N/A	17.352.100	0,00	0,00	5.830			
	PMA (Rp)	N/A	450.238.132.119	137.886.336.893	10.112.500.000	39.779.943.283			
	Jumlah Perusahaan PMDN	N/A	190	267	126	282			
	Jumlah Perusahaan PMA	N/A	30	14	1	44			
	Jumlah Investasi (Miliar Rp.)	N/A	446,21	3.872,49	939,97	712,24			
	Penanaman Modal Tetap Bruto ADHB (Miliar Rp.)	5.659,58	6.292,23	6.773,13	7.588,78	6.828,55			
	Penanaman Modal Tetap Bruto ADHK (Miliar Rp.)	3.786,03	4.069,80	4.218,76	4.601,56	4.108,19			
<b>3.2.12.</b>	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>								
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	61	67	73	80	N/A	80	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	3	2	35	23	N/A			
	Jumlah atlet berprestasi	N/A	N/A	N/A	77	N/A			
	Jumlah prestasi olahraga	Emas : 5 Perak : 6 Perunggu : 1	Emas : 6 Perak : 7 Perunggu : 2	Emas : 7 Perak : 8 Perunggu : 3	Emas : 9 Perak : 10 Perunggu : 5	0	Emas : 8 Perak : 9 Perunggu : 4	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
<b>3.2.13.</b>	<b>Urusan Statistik</b>								
	Persentase ketersediaan Data statistik sektoral yang mutakhir	N/A	N/A	N/A	84	100	100	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Melampaui
<b>3.2.14.</b>	<b>Urusan Persandian</b>								
	Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001 sesuai Kategori Sistem Elektronik (SE)	N/A	N/A	N/A	5	3,5			
<b>3.2.15.</b>	<b>Urusan Kebudayaan</b>								
<b>3.2.16.</b>	<b>Urusan Perpustakaan</b>								
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	25.705	13.551	10.336	12.739	6.319			
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksemplar)	70.405	53.165	54.051	55.057	56.814			
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	2.142	1.129	861	1.061	526			
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	30.904	4.779	856	1.138	1.454			
<b>3.2.17.</b>	<b>Urusan Kearsipan</b>								
	OPD yang menerapkan arsip secara baku (%)	41,03	43,59	46,15	48,72	49,00			
	SDM Kearsipan yang berkompentensi	N/A	N/A	38,46	40,00	42,00			
	Kecepatan mendapatkan arsip	3 menit	3 menit	3 menit	1 menit	1 menit			
<b>3.3.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>								

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
<b>3.3.1.</b>	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>								
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	382,87	433,63	469,00	485,07	430,95			
	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/perkapita/tahun)	30,17	32,05	34,35	42,67	42,98			
	Jumlah Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas)	90	113	129	176	208			
	Kelompok Perikanan (Pokdakan, Poklatsar, KUB/Nelayan, Pokamaswas) Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Kota	-	39	8	31	34			
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.686,40	1.706,40	1.757,59	1.826,29	1.932,41			
	Jumlah Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	53.316,00	59.240,00	59.496,00	74.370,00	53.645,00			
<b>3.3.2.</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>								
	Kunjungan wisata	623.835	714.291	671.587	154.395	42.213			
	Lama kunjungan Wisata (Hari)	2,24	2,29	1,99	2,50	2,50			
	PAD sektor pariwisata (Miliar Rp.)	182,69	199,27	198,92	202,31	137,40			
<b>3.3.3.</b>	<b>Urusan Pertanian</b>								
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3,95	3,81	3,75	3,64	3,95			
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Kw/Ha)	65,75	61,54	68,37	63,50	65,00			
	Cakupan bina kelompok petani (Klp)	268	283	313	314	317			
<b>3.3.4.</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>								
	Nilai PDRB (Miliar Rp)	11.533,90	12.464,41	13.082,00	13.811,53	13.051,59			
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	2.249,89	2.464,16	2.624,59	2.804,26	2.574,66			
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	8,68	9,52	6,51	6,85	(8,19)			
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	19,51	19,77	20,06	20,30	19,73			
	Ekspor Bersih Perdagangan (Miliar Rp)	(1.725,74)	(1.437,39)	(1.295,51)	(1.314,79)	(1.409,95)			
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	N/A	100	100	100	100			
<b>3.3.5.</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>								
	Nilai PDRB (Miliar Rp)	11.533,90	12.464,41	13.082,00	13.811,53	13.051,59			
	Nilai PDRB Sektor Perindustrian (Miliar Rp)	1.179,31	1.265,46	1.311,50	1.371,04	1.349,12			
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian (%)	6,79	7,31	3,64	4,54	(1,60)			
	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)	10,22	10,15	10,03	9,93	10,34			
	Persentase peningkatan volume usaha industri	4,22	3,55	2,09	6,36	3,78			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (< SESUAI (=)
3.4.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
3.4.1.	Unsur Administrasi Pemerintahan								
	Tingkat akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B			
	Nilai Evaluasi SAKIP	58,88	63,13	64,04	65,05	65,75	75	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	-	B	B	BB	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
	Nilai Evaluasi RB	59,99	61,23	-	62,27	64,00			
	Nilai LPPD	3,15	2,96	3,27	3,00	3,40			
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>								
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75,00	77,00	78,00	79,00	79,30			
	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	79,94	83,12	84,14	84,40	84,94			
	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram	N/A	75,83	90,33	90,12	88,37			
	Sekretariat Daerah (Layanan Keprotokolan)	N/A	N/A	N/A	88,12	85,97			
	Dinas Komunikasi dan Informatika	N/A	N/A	77,40	77,85	78,39			
	Dinas Perhubungan (Pengujian Kendaraan)	N/A	78,16	71,56	57,57	N/A			
	Badan Keuangan Daerah	N/A	67,87	65,50	66,27	80,10			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	N/A	N/A	N/A	79,72	78,93			
	Puskesmas Selaparang	N/A	N/A	82,00	81,97	N/A			
	Puskesmas Pagesangan	N/A	N/A	95,83	82,64	N/A			
	Puskesmas Cakranegara	N/A	N/A	86,53	81,67	N/A			
	Puskesmas Mataram	N/A	N/A	81,31	81,90	N/A			
	Puskesmas Dasan Agung	73,11	N/A	N/A	N/A	N/A			
	Puskesmas Pejeruk	74,69	N/A	N/A	N/A	N/A			
	Puskesmas Karang Pule	73,80	N/A	N/A	N/A	N/A			
	Puskesmas Babakan	72,71	N/A	N/A	N/A	N/A			
	Kecamatan Selaparang	N/A	82,01	N/A	N/A	N/A			
	Kecamatan Sandubaya	N/A	N/A	N/A	79,66	75,98			
	<b>Nilai Kematangan Organisasi</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>36,79</b>	<b>36,79</b>			
3.4.2.	Unsur Pengawasan								
	Persentase tindak lanjut temuan								
	- BPK (%)	95,09	96,29	95,37	94,04	91,93			
	- Inspektorat (%)	84,26	92,16	93,54	84,47	76,32			
	Administrasi Keuangan	65,67	77,19	78,92	70,32	64,28			
	Jumlah temuan (temuan)	BPK: 774	BPK: 836	BPK: 886	BPK: 855	BPK: 892			
		Inspektorat:	Inspektorat:	Inspektorat:	Inspektorat:	Inspektorat:			



A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
		2.173	2.012	2.221	2.552	3.288			
	Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3			
	Target Penilaian Kapabilitas APIP	Persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			
	Level Maturitas SPIP	1	3	3	3	3			
	Target Penilaian Maturitas SPIP	Persiapan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			
	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir sesuai ketentuan yang berlaku	90	90	100	100	100			
<b>3.4.3.</b>	<b>Unsur Perencanaan</b>								
	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	17,90	19,71	20,34	20,66	20,79			
	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja (%)	N/A	N/A	N/A	96,97	90,90			
	<b>Rekapitulasi eMPBM Hasil Usulan Masyarakat</b>								
	Usulan Disetujui	N/A	100	2.133	2.133	1.098			
	Usulan Tidak Disetujui	N/A	17	1.129	1.129	499			
	Jumlah Usulan	N/A	117	3.262	3.262	1.597			
	Persentase Usulan Yang Terakomodir	N/A	85	65,39	65,39	68,75			
<b>3.4.4.</b>	<b>Unsur Keuangan</b>								
	Total SILPA	83.961.117.271,00	136.790.684.861,37	119.242.637.527,02	97.599.405.632,05	106.952.379.326,39			
	Total APBD	1.441.768.181.842,00	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54			
	<b>Persentase SILPA terhadap APBD</b>	<b>5,82</b>	<b>8,76</b>	<b>7,66</b>	<b>6,20</b>	<b>7,29</b>			
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	403715281191,00	353012683905,00	340781988376,00	330883063285,32	309178283069,00			
	Total APBD	1.441.768.181.842,00	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54			
	<b>Persentase belanja pendidikan (20%)</b>	<b>28,00</b>	<b>22,61</b>	<b>21,89</b>	<b>21,03</b>	<b>21,07</b>	20,00	Sudah Tercapai	
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	274.631.200.255,80	324.961.075.298,20	375.523.870.350,83	354.457.456.401,59	312.490.994.891,66			
	Total APBD	1.441.768.181.842,00	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54			
	<b>Persentase belanja kesehatan (10%)</b>	<b>19,05</b>	<b>20,82</b>	<b>24,12</b>	<b>22,52</b>	<b>21,29</b>	10,00	Sudah Tercapai	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	650.165.293.739,79	607.907.046.576,22	585.460.664.595,19	601.146.560.902,89	629.647.304.056,87			
	Total APBD	1.441.768.181.842,00	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54			
	<b>Persentase Belanja Tidak Langsung</b>	<b>45,09</b>	<b>38,94</b>	<b>37,60</b>	<b>38,20</b>	<b>42,90</b>			
	Jumlah Belanja Langsung	771.202.888.102,21	937.716.496.418,36	954.370.919.509,83	960.021.352.389,16	895.371.618.626,25			
	Total APBD	1.441.768.181.842,00	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54			
	<b>Persentase Belanja Langsung</b>	<b>53,49</b>	<b>60,07</b>	<b>61,29</b>	<b>61,01</b>	<b>61,01</b>			
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa	68.684.380.672,00	69.989.050.152,21	80.000.000.000,00	92.931.796.660,00	98.300.294.073,00			
	Total APBD	1.441.768.181.842,00	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	1.467.650.444.563,54			
	<b>Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa</b>	<b>4,76</b>	<b>4,48</b>	<b>5,14</b>	<b>5,91</b>	<b>6,70</b>			
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	279.679.198.140	367.503.589.415	354.697.095.359	372.928.500.000	320.309.008.468			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman	1.357.807.064.571	1.424.284.858.133	1.437.782.041.937	1.476.066.007.660	1.389.869.482.273			
	<b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</b>	<b>20,60</b>	<b>25,80</b>	<b>24,67</b>	<b>25,27</b>	<b>23,05</b>	30	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	Belum Tercapai
<b>3.4.5.</b>	<b>Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>								
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (%)	100	100	100	100	100			
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural (%)	77	76	70	74	67			
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (jabatan)	29	37	35	36	37			
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (jabatan fungsional)	3.511	2.648	2.532	2.426	2.437			
	Pelanggaran disiplin ASN (pelanggaran)	30	34	16	26	33			
	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	47,77	48,99			
<b>3.4.6.</b>	<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>								
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	N/A	20	40	30	80			
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	N/A	0	28	28	36			
	Indeks Inovasi Daerah	N/A	0	501	0	1.944			
<b>4.</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>								
<b>4.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
	<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita</b>								
	<b>Kelompok Makanan</b>								
	Padi-padian	64.449	59.390	63.262	64.195	63.007			
	Umbi-umbian	3.436	4.225	3.837	4.514	5.297			
	Ikan/udang/cumi/kerang	35.262	41.911	50.293	53.776	58.944			
	Daging	30.482	30.983	38.590	37.967	44.794			
	Telur dan susu	29.905	32.514	37.075	39.726	46.066			
	Sayur-sayuran	37.011	43.163	40.802	35.343	43.919			
	Kacang-kacangan	14.557	13.936	15.662	16.716	16.647			
	Buah-buahan	44.194	34.233	58.945	43.504	60.016			
	Minyak dan kelapa	10.676	11.049	12.293	11.142	11.322			
	Bahan minuman	12.806	13.998	15.589	14.482	15.042			
	Bumbu-bumbuan	7.600	10.142	10.878	10.122	12.025			
	Konsumsi lainnya	12.339	13.140	12.575	13.857	12.413			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Makanan dan minuman jadi	190.360	237.207	268.221	324.998	368.365			
	Rokok	61.760	62.532	65.912	70.802	64.938			
	Jumlah Kelompok Makanan	554.837	608.423	693.934	741.144	822.795			
	<b>Kelompok Bukan Makanan</b>								
	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	389.038	368.116	382.769	377.008	418.862			
	Aneka komoditas dan jasa	178.566	168.107	210.488	226.072	266.228			
	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	36.016	36.349	40.226	50.186	51.793			
	Komoditas tahan lama	54.859	89.517	54.652	105.346	117.842			
	Pajak, pungutan, dan asuransi	24.333	62.137	50.194	48.056	56.416			
	Keperluan pesta dan upacara	24.083	36.565	30.261	24.139	34.148			
	Jumlah Kelompok Bukan Makanan	706.895	760.791	768.590	830.807	945.289			
	Jumlah Kelompok Makanan dan Bukan Makanan	1.261.732	1.369.214	1.462.524	1.571.951	1.768.084			
4.2.	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>								
	<b>Aksesibilitas Daerah</b>								
	Rasio panjang jalan dengan luas wilayah	6.526,31	6.033,44	6.033,44	6.033,44	6.033,44			
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum								
	Masuk	192.390	143.463	148.282	159.193	N/A			
	Keluar	201.235	166.906	191.949	186.686	N/A			
	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	393.625	310.369	340.231	345.879	175.624			
	<b>Penataan Wilayah</b>								
	Ketaatan Terhadap RTRW	N/A	N/A	N/A	2 (kesesuaian sedang)	2 (kesesuaian sedang)			
	Persentase Luas Peruntukan Lahan Eksisting yang sesuai dengan RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	55,91	57,50			
	Luas wilayah produktif (Ha)	1.600,23	1.600,23	1.600,23	1.600,23	1.600,23			
	Luas wilayah industri (Ha)	59,42	59,42	59,42	59,42	59,42			
	Luas wilayah rawan genangan (Ha)	891	891	891	891	891			
	<b>Fasilitas Bank dan Non Bank</b>								
	Jenis dan jumlah bank umum dan cabang								
	Konvensional	102	100	92	80	82			
	Syariah	15	12	21	21	29			
	Jenis dan jumlah bank perkreditan dan cabang								
	Pemda	2	2	2	2	2			

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPI (<) SESUAI (=)
	Swasta	6	6	6	6	6			
	Syariah	2	2	2	2	3			
	<b>Ketersediaan Air Bersih</b>								
	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	66,93	64,67	76,02	73,79	73,86			
	Jumlah Pelanggan Air Bersih	70.179	74.090	77.285	77.923	79.223			
	Jumlah Air Bersih yang Disalurkan	18.314.915	17.407.772	17.115.288	18.017.944	17.659.602			
	<b>Fasilitas Listrik</b>								
	Jumlah RT Pelanggan Listrik	739.495	817.744	926.350	1.427.162	N/A			
	Jumlah Pelanggan Listrik	784.407	865.849	976.208	1.500.164	N/A			
	Jumlah Energi Listrik yang Terjual	1.152.256.770	9.899.067	1.252.499.073	1.950.254.473	N/A			
	<b>Ketersediaan Restoran</b>								
	Jumlah Rumah Makan/Restoran	191	195	218	219	221			
	<b>Ketersediaan Penginapan</b>								
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel								
	Hotel berbintang	27	27	28	28	28			
	Hotel non bintang	111	111	111	116	121			
4.3.	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
	<b>Angka Kriminalitas</b>								
	Pembunuhan	1	1	1	1	1			
	Perkosaan	1	4	3	2	4			
	Pencurian dengan kekerasan	89	124	85	65	71			
	Pencurian biasa	133	76	130	125	190			
	Pencurian kendaraan bermotor	520	464	367	313	90			
	Pencurian dengan pemberatan	131	87	146	142	129			
	Pengerusakan/Penghancuran barang	11	19	11	16	13			
	Penipuan	14	22	34	41	27			
	Narkoba	29	34	53	73	70			
	Lain-lain	248	351	437	459	430			
	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun	1.177	1.182	1.267	1.237	1.025			
	Jumlah penduduk	459.314	468.509	477.476	486.715	429.651			
	Angka kriminalitas Per 10.000 Penduduk	26	25	27	25	24			
	Angka kriminalitas Per 100.000 Penduduk	256	252	265	254	239	237	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	
	<b>Indeks Keamanan Manusia</b>								
	Indeks Keamanan Manusia	N/A	3,18	3,59	3,70	3,70	4	PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021	

A	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					STANDAR/TARGET	SUMBER	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=)
	Dimensi Keamanan dari Bencana	N/A	0,22	0,18	0,21	0,21			
	Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	N/A	0,84	1,13	1,13	1,13			
	Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	N/A	1,70	1,70	1,70	1,70			
	Dimensi Keamanan dari Kekerasan	N/A	0,40	0,58	0,66	0,66			
4.4	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>								
	<b>Rasio Ketergantungan</b>								
	Penduduk Usia Produktif	319.900	326.823	333.520	340.402	289.431			
	Rasio Ketergantungan Penduduk								
	Penduduk usia <15 th + usia >64	139.414	141.686	143.956	146.313	140.220			
	Penduduk usia 15-64	319.900	326.823	333.520	340.402	289.431			
	Rasio Ketergantungan Penduduk	44	43	43	43	48			

### 2.5.3. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tabel 2.98  
Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Mataram

#### 1. KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR SOSIAL

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	9,55	8,96	8,92	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%)	Belum Mencapai Target Nasional	BPS

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.				Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	NA	Dikes
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	NA	Dikes
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	21,33	26,98	32,21	Meningkat menjadi 17,12%	Mencapai Target Nasional	Dinsos
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1.064	18.160	18.160	Menurun menjadi 2,8 juta	Belum Mencapai Target Nasional	Dinsos



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	97,24	97,22		Meningkat menjadi 70%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	99	82,50		Meningkat menjadi 63%	Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	tepat, termasuk keuangan mikro								
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	68,05	73,60		Meningkat menjadi 65%	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	59,54	59,73	60,80	Meningkat menjadi 100%	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Mengakhiri Kemiskinan dalam	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	91,91	90,12	88,81	Meningkat menjadi 100%	Belum Mencapai	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Segala Bentuk Dimanapun	laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro		layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.					Target Nasional	
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	22	532	313	Meningkat menjadi 18,6 juta	Mencapai Target Nasional	Perkim
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	93,15	102,27	95,99	Meningkat menjadi 94,78%	Mencapai Target Nasional	Dinas Pendidikan

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	84,08	92,55	93,79	Meningkat menjadi 82,2%	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	85,12	97,37	94,13	Meningkat menjadi 77,4%	Mencapai Target Nasional	Disdukcapil

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100	100	100	Meningkat menjadi 100%	Mencapai Target Nasional	Perkim
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	14	0	Menurun	Mencapai Target Nasional	BPBD
Mengakhiri Kemiskinan dalam	Pada tahun 2030, membangun ketahanan	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	10	10	70	Meningkat menjadi 39	Mencapai Target	BPBD

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Segala Bentuk Dimanapun	masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		daerah.				daerah	Nasional	
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	77	23	214	Meningkat menjadi 151 ribu	Mencapai Target Nasional	Dinsos
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	77	23	214	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Mencapai Target Nasional	Dinsos
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/				Meningkat menjadi 450	NA	Dinas Pendidikan



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		Madrasah Aman Bencana						
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	50	50	50	Menurun menjadi 118,6	Mencapai Target Nasional	BPBD
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.				Menurun	NA	BPBD
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.				ada	NA	BPBD

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	196.089.480.346	127.891.729.055	164.494.845.517	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BAPPEDA
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	44,27	47,07	45,36	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	BAPPEDA

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi								
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	2.790,30	2.727,66	10.692,42	Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Ketahanan Pangan
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	5	5	5	Menurun menjadi 17%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.			2.655	Menurun	NA	Ketahanan Pangan
Menghilangkan	Pada tahun 2030,	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan	9,55	8,96		Menurun menjadi	Belum	BPS

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun		asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.				8,50 %	Mencapai Target Nasional	
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	37,80	24,49	22,60	Menurun	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	37,80	19,17		Menurun menjadi 28%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menghilangkan Kelaparan,	Pada tahun 2030, menghilangkan segala	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak	12,00	1,37		Menurun	Mencapai Target	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula		pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.					Nasional	
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,00	6,30	3,06	Menurun menjadi 28%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	75,48	69,50		Meningkat menjadi 50%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menghilangkan	Pada tahun 2030,	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan	87,90	87,90	96,80	Meningkat	Mencapai	Dinas

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula		yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.				menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Target Nasional	Pertanian
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	92.367.234	92.673.263		Meningkat	Mencapai Target Nasional	BPS
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	13,00	6,30	3,06	Menurun menjadi 306	Mencapai Target Nasional	Dikes



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	100	97,72		Meningkat menjadi 95%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	97,24	97,72		Meningkat menjadi 85 %	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	5,33	7,50	0,50	Menurun	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4,12	5,30		Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5,33	7,50	0,50	Menurun menjadi 24	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	99,00	82,50		Meningkat menjadi 95%	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		46	11	Menurun menjadi <0,5%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	122,30	121,68	96,98	Menurun menjadi 245	Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,01	0,01		Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				Meningkat menjadi 300	bukan kewenangan	
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1	1	1	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi	5	9	13	Menurun	Belum Mencapai	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).					Target Nasional	
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.				Meningkat menjadi 34 provinsi	NA	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).				Meningkat menjadi 35	NA	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.				Menurun menjadi 5,40%	NA	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		11,88	11,88	Menurun menjadi 24,3%	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		15,27	15,27	Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian ( <i>insidens rate</i> ) akibat bunuh diri.	2	0	0	Menurun	Mencapai Target Nasional	Polres
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan	3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	1	1	1	Meningkat menjadi 280	Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	mental dan kesejahteraan.								
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	36	53	71	Menurun menjadi angka 0,02%	Mencapai Target Nasional	Polres
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq$ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	1,8			Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	SatpolPP
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	76,45	83,12	84,15	Meningkat menjadi 66%	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	77,13	78,05	79,00	Meningkat menjadi 65%	Mencapai Target Nasional	DPPKB



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	55,00	60,00	28,80	Meningkat	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	22,28	25,27	23,84	Menurun menjadi 38	Mencapai Target Nasional	Disdukcapil
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> .	2,16	1,96	2,01	Menurun menjadi 2,28	Mencapai Target Nasional	Disdukcapil
Menjamin	Mencapai cakupan	3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan				Menurun menjadi	NA	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	kehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		kehatan				9,91%		
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	758	769	768	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	75,81	76,97	76,85	Meningkat menjadi minimal 95%	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	Menurun	Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.				Menurun	NA	Dikes
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang the TRIPS <i>Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0,225694444	0,225694444	0,133333333	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	56,06	56,06	56,06	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	93,01	92,02	94,33	Meningkat menjadi 84,20%	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	85,71	88,71	88,02	Meningkat menjadi 81%	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	102,03	111,68	102,51	Meningkat menjadi 114,09%	Belum Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	104,60	114,96	107,42	Meningkat menjadi 106,94%	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9,32	9,43	9,45	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	pembelajaran yang relevan dan efektif.								
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	56,14	56,64	28,23	Meningkat menjadi 77,2%	Belum Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				Meningkat	NA	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	93,15 (SD)	102,27 (SD)	95,99 (SD)	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	anak dalam kondisi rentan.								
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	91,71	94,04	92,82	Meningkat menjadi 96,1%	Belum Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	91,71	94,40	92,77	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	64,42	64,93	66,67	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	47,80	47,80	51,60	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Dinas pendidikan

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	25 kebijakan (2 SE, 21 SK, 1 Instruksi, 1 Perwal)	26 Kebijakan ( 1 Rancangan perda, 25 SK)	38 kebijakan (38 SK)	bertambah sebanyak 16	Mencapai Target Nasional	DP3A
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	4 orang (1 perempuan dewasa (penelantaran), 3 anak perempuan (penelantaran))	8 orang (4 perempuan dewasa ( penelantaran), 4 anak perempuan (penelantaran))	5 orang (1 perempuan dewasa ( penelantaran), 4 anak perempuan (penelantaran))	Menurun	Mencapai Target Nasional	DP3A
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	5 orang	10 orang	13 orang	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Belum Mencapai Target Nasional	DP3A
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	10 orang	3 orang	2 orang	Menurun	Mencapai Target Nasional	DP3A

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100 ( 9/9)	100 ( 20/20)	100 ( 7/7)	Meningkat menjadi 70%	Mencapai Target Nasional	DP3A
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	12,76	13,80	10,89	Menurun	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21	21	21	Meningkat menjadi 21 tahun	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	2,16	1,96	2,01	Menurun menjadi 38 tahun	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	5	5	10	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Setwan
Mencapai	Menjamin partisipasi	5.5.2*	Proporsi perempuan yang	NA	34,22	39,66	Meningkat	Mencapai	DP3A

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		berada di posisi managerial.					Target Nasional	
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.				Meningkat	NA	DPPKB
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	10,92	10,28	9,64	Menurun menjadi 9,90%	Mencapai Target Nasional	DPPKB

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	konferensi tersebut.								
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	77,87	85,12	89,15	Meningkat menjadi 85%	Mencapai Target Nasional	DPPKB
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	40,64			Meningkat	NA	Kominfo

## 2. KETERCAPIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR EKONOMI

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjamin Akses Energi yang	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.				10-16%	Tidak Ada di Kota Mataram	

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	terbarukan dalam bauran energi global.							(Tidak Dilaksanakan)	
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.				Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	8,07	4,98	5,58	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BPS
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	35.623.504	37.623.504	40.030.449	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Belum Mencapai Target Nasional	BPS
Meningkatkan	Mencapai tingkat	8.2.1*	Laju pertumbuhan	0,702			Meningkat	NA	Disnaker



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.						
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	33,50	44,39		Meningkat	Mencapai Target Nasional	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	66,50	55,61	52,31	51%	Mencapai Target Nasional	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2,74	2,49		Meningkat	Belum Mencapai Target	Disnaker

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							Nasional	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	7.787			25%	NA	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	48.978	53.244		Meningkat	Mencapai Target Nasional	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki,	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,35	6,72		Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Disnaker

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki- laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.		14.934	14.510	Menurun	Mencapai Target Nasional	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	10.000			Meningkat	NA	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	2,03	1,90	1,83	Meningkat menjadi 8%	Belum Mencapai Target Nasional	Dispar

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	budaya dan produk lokal.								
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	19.225	18.225	23.918	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Mencapai Target Nasional	Dispar
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	695.006	653.362	810.615	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Dispar
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh,	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp50.129.923.190,00	Rp53.302.460.287,00	Rp53.302.460.287,00	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Dispar

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua									
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.				Meningkat	NA	Disnaker
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		353		Meningkat	NA	BKD
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).				Menurun (mendekat)	NA	BKD

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
untuk Semua									
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	6.523.710			Meningkat	NA	Disperkop
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.				1000 Km (skala nasional)	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.				Bertambah 3.258 km	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Membangun	Mengembangkan	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga				Meningkat	Tidak Ada di	



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		penyeberangan.					Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.				24 pelabuhan (skala nasional)	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	9,00	8,84	8,76	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Disperkop
Membangun Infrastruktur yang Tangguh,	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	7,31	3,94	5,00	Lebih tinggi dari pertumbuhan	Belum Mencapai Target	Disperkop

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						PDB	Nasional	
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	12,57	13,07	9,06	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Disnaker
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.				Meningkat	NA	Disperkop
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.				Meningkat	NA	Disperkop

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
serta Mendorong Inovasi	rantai nilai dan pasar.								
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	0,003	0,002	0,003	Meningkat	Mencapai Target Nasional	bappeda
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara- negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.				Meningkat	NA	Kominfo
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara- negara kurang berkembang pada tahun	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	77,87			Meningkat	NA	Kominfo

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Inovasi	2020.								
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara- negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	43,11			Meningkat	NA	Kominfo
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,391	0,399	0,355	Menurun menjadi 0,360	Mencapai Target Nasional	Bappeda
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	9,55	8,96	8,92	Menurun menjadi 7-8%	Belum Mencapai Target Nasional	Bappeda
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	886	997	1.161	Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Dinsos

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.				Meningkat menjadi 87	NA	Dinsos
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0	ada	Belum Mencapai Target Nasional	kesbangpol
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		207.238	213.983	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Mencapai Target Nasional	Disnaker
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1.424.072.893.722,50	1.418.432.870.483,30	1.462.795.712.980,15	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BKD
Menguatkan Sarana Pelaksanaan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	1,16	1,12	1,16	Di atas 12%	Belum Mencapai Target	BKD

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							Nasional	
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	1.561.075.542.994,58	1.557.024.679.464,02	1.573.665.413.292,05	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BKD
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di Perkotaan dan di Perdesaan.	PM			Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	NA	Kominfo
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	43,11			Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi;	NA	Kominfo



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						Perdesaan 52% populasi.		
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	43,11			Meningkat	NA	Kominfo
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	N/A	7 paket kerjasama antar Daerah; 23 Paket kerjasama dengan Pihak Ketiga	11 Paket Kerjasama Antar Daerah; 18 Paket Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 1 Paket Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia, 2 Paket Kerjasama dengan Pemerintah RRT	ada	Mencapai Target Nasional	Bappeda
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif,	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif,	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek,	NA	Rp196.575.000	Rp286.150.000	ada	Mencapai Target Nasional	BPS

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	NA	13,72	14,69	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BPS
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi,	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	100	100	100	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BPS

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	91,04	97,97	90,63	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	BPS
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	15	10	8	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Bappeda

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	yang relevan dengan konteks nasional.								
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> )				ada	NA	Disdukcapil
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		ada	ada	Meningkat	NA	Kominfo
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Mervitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	98,21	98,48	100	Meningkat	Mencapai Target Nasional	BPS

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								

### 3. KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR LINGKUNGAN

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	59,54	59,73	60,80	Meningkat menjadi 100%	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.				Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	90.047	92.192	93.195	Meningkat menjadi 100%	Belum Mencapai Target Nasional	DPUPR
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.				Meningkat	NA	Dikes
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91,91	90,12	88,81	Meningkat menjadi 100%	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	100	100	100	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	8	8		Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Dikes
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	7	17	7	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Belum Mencapai Target Nasional	DPUPR
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	-	1	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Perkim
Menjamin Ketersediaan	Pada tahun 2030, meningkatkan	6.3.1.(a)	Jumlah pembangunan	1	1	1	Meningkat	Tidak Ada di	



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).				menjadi 409 kabupaten/kota	Kota Mataram (Tidak	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		68,12	47,00	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	Perkim
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.				Meningkat	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	80,00	80,00	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	DLH

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.				ada	Mencapai Target Nasional	Dinas Pertanian
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	1,39	0	3,11	ada	Mencapai Target Nasional	Perkim
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.				8 WS	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.				10 WS (skala nasional)	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0,702	0	15	ada	Mencapai Target Nasional	DPUPR
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	26,74	6,90	35,60	3,7 juta rumah tangga	Mencapai Target Nasional	Perkim
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan	1	1	1	12 kawasan perkotaan	Tidak Ada di Kota Mataram	

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).				metropolitan (skala nasional)	(Tidak Dilaksanakan)	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.				Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	NA	Perkim
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	7	5	6	Meningkat menjadi 32%	Belum Mencapai Target Nasional	Dishub
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.				ada	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.				Minimal 20 kota sedang (skala nasional)	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjadikan Kota dan	Pada tahun 2030, memperkuat	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru				5 metropolitan	Tidak Ada di	

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.		di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).				(skala nasional)	Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	NA	31 SKPD Kota Mataram 6 Kecamatan 50 Kelurahan 3 SKPD Provinsi NTB 6 Instansi vertikal 31 organisasi pemerintah non lembaga dan lembaga non pemerintah	31 SKPD Kota Mataram 6 Kecamatan 50 Kelurahan 3 SKPD Provinsi NTB 6 Instansi vertikal 31 organisasi pemerintah non lembaga dan lembaga non pemerintah	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Bappeda
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.				Ada	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.				ada	Tidak Ada di Kota Mataram (Tidak Dilaksanakan)	

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.				Menurun	NA	BPBD
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	96,68	96,68	88,95	Menurun menjadi 30%	Belum Mencapai Target Nasional	BPBD
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	-	-	-	Meningkat	NA	BPBD
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	1	1	ada	Mencapai Target Nasional	BPBD
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.				Menurun	NA	BPBD

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	89,51	90,58	91,51	Meningkat menjadi 80%	Mencapai Target Nasional	DLH
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	1	1	1	Meningkat/ada	Mencapai Target Nasional	Perkim
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	1	1	1	Meningkat/ada	Mencapai Target Nasional	Perkim
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.				Meningkat/ada	NA	BPBD
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	-	1	1	ada	Mencapai Target Nasional	BPBD



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .								
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	5,12	5,03	6,00	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Mencapai Target Nasional	DLH
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	7,61	11,11	14,68	20 ton per hari (skala nasional)	Mencapai Target Nasional	DLH
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.				Meningkat	NA	DLH
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.				Meningkat	NA	DLH
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				Meningkat	NA	Sekda

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
	alam.								
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.				ada	NA	BPBD
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.				Menurun	NA	BPBD
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	35,54	35,55	39,59	Meningkat	Mencapai Target Nasional	DLH
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.				5,5 juta ha (skala nasional)	NA	DLH
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan				ada	Tidak Ada di Kota Mataram	

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.		kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.					(Tidak Dilaksanakan )	
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.				Meningkat	NA	DLH

#### 4. KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	1	0	2	Menurun	Belum Mencapai Target Nasional	Polres
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	1	0	0	Menurun	Mencapai Target Nasional	Polres
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	1.045	1.152	1.071	Menurun	Mencapai Target Nasional	Polres
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	belum pernah diadakan atau dilaksanakan survei			Meningkat	NA	kesbangpo l
Menguatkan Masyarakat	Menghentikan perlakuan	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang	0	0	0	Menurun	Mencapai	DP3A

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.		memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.					Target Nasional	
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	5 orang	23 orang	13 orang	Menurun	Mencapai Target Nasional	DP3A
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	6 orang	1 orang	Menurun	Mencapai Target Nasional	DP3A
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				Meningkat menjadi 4,0	NA	BPS
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai	Mengembangkan lembaga yang efektif,	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran	91,47	92,80	92,84	Meningkat	Mencapai Target	BKD

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	akuntabel, dan transparan di semua tingkat.		yang disetujui.					Nasional	
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Lembaga dan Pemerintah Daerah	100	100	100	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%	Mencapai Target Nasional	BKD
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100	100	96,97	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%	Mencapai Target Nasional	Bappeda
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	PM	65,00	85,00	Meningkat menjadi 80%	Mencapai Target Nasional	Sekda
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	b	bb	bb	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%,	Belum Mencapai Target	Sekda

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	di semua tingkat.		Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Nasional	
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Lembaga dan Pemerintah Daerah	96,14	-	-	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	Mencapai Target Nasional	Sekda
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12,50	12,50	25,00	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Setwan
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	PM	18	15	Meningkat	Belum Mencapai Target Nasional	DP3A
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	83,76	86,33	91,70	Meningkat	Mencapai Target Nasional	Disdukcapil



TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	kelahiran.								
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	84,39	89,23	91,01	Meningkat menjadi 77,4%	Mencapai Target Nasional	Disdukcapil
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	92,46			Meningkat menjadi 85%	Mencapai Target Nasional	Disdukcapil
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.				Meningkat	NA	Kominfo
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0	ada	Belum Mencapai Target Nasional	kesbangpo

TUJUAN	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	KETERCAPAIAN			TARGET PERPRES 59/2017	KET	OPD
				BASELINE 2017	CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019			
Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	berkelanjutan.								

## 2.6 ISU PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Merujuk pada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005–2025 yang memiliki visi “**TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA PADA TAHUN 2025**”. Periode ke-IV RPJPD (2020–2025) pada dasarnya berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan pembangunan periode ke-III. Pada periode IV, pembangunan di Kota Mataram lebih menekankan pada **pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing guna percepatan dan pematangan pembangunan di segala bidang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh**. Arah kebijakan pembangunan periode IV (2020–2025) tersebut meliputi:

1. Mewujudkan budaya masyarakat kota yang memiliki akhlakul karimah;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan nilai moral masyarakat kota;
3. Membangun budaya masyarakat kota;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi produktif masyarakat;
5. Meningkatkan derajat kesehatan (pelayanan kesehatan dan KB) dan status gizi masyarakat;
6. Pengarusutamaan gender pada pembangunan;
7. Penambahan tenaga pendidik untuk program inklusi disabilitas;
8. Menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
10. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kondusif, inklusif dan berkelanjutan;
11. Mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam wilayah;
12. Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;
13. Penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
14. Meningkatkan upaya penegakan regulasi;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar secara terpadu;
16. Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;
17. Mempertahankan kawasan pertanian dan perikanan dalam Kota Mataram;
18. Pembentukan kota tangguh bencana;
19. Meningkatkan kualitas lingkungan; dan
20. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Arah kebijakan tersebut di atas, pada dasarnya bersumber dari pemetaan isu pembangunan jangka panjang yang ada di Kota Mataram sebagaimana berikut:

1. Perubahan pola perilaku masyarakat dan lemahnya pendidikan karakter dari tingkat keluarga sampai pendidikan formal;
2. Rendahnya ketahanan sosial masyarakat kota;
3. Peran kelembagaan sosial kemasyarakatan yang semakin melemah;
4. Minimnya literasi;
5. Menurunnya fungsi / peran Kota Mataram sebagai PKN;
6. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat belum optimal;
7. Minimnya literasi kesehatan terutama literasi gizi;
8. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
9. Penuntasan wajib belajar baik pendidikan dasar dan menengah;
10. Zonasi sarana pendidikan;
11. Iklim usaha yang melambat;
12. Kemandirian perekonomian belum terwujud;
13. Belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya pendukung ekonomi rakyat;
14. Masuknya tenaga kerja terlatih dan terampil mengikis peluang kerja bagi penduduk lokal dalam pasar kerja;
15. Pelanggaran tata ruang masih tinggi;
16. Pelanggaran regulasi pelayanan public;
17. Pelayanan infrastruktur dasar baik limbah, sanitasi, air bersih/minum, drainase maupun sampah belum optimal;
18. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah;
19. Tingginya investasi dalam Kota;
20. Penetapan KP2B;
21. Rendahnya kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana; dan
22. Kurangnya perencanaan berbasis risiko bencana.

## 2.7 ISU PENGEMBANGAN SPASIAL WILAYAH

Rumusan isu pengembangan spasial wilayah Kota Mataram bersumber dari hasil telaahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2021-2031.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam skala nasional, masuk dalam Koridor Ekonomi Nasional ke-3 atau pada Koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional, serta merupakan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka fungsi dan peran Kota Mataram adalah sebagai:

1. pusat pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat pemerintahan Kota Mataram;
2. simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
3. pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
4. pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
5. daya tarik terhadap kota-kota daerah belakang secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
6. salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Dalam skala nasional dan regional, tidak ada perubahan signifikan terkait dengan kedudukan Kota Mataram, sehingga tujuan penataan Kota Mataram, yaitu:

**“Mewujudkan Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan”.**

Kota Mataram dipandang sangat strategis pada sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi. Perumusan tujuan penataan ruang di wilayah Kota Mataram ini berimplikasi pada kebijakan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan Kota, meliputi:
  - a. pemantapan fungsi dan peran wilayah kota sebagai Ibukota Provinsi, PKN, dan salah satu KSP; dan
  - b. penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya.
2. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana utama, meliputi:
  - a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama kota secara terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah kota, provinsi, dan nasional; dan
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal.
3. Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya berupa pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana

jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana secara terpadu yang berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

4. Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, terdiri atas:
  - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pengelolaan area-area dengan fungsi resapan;
  - c. pengelolaan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat;
  - d. penetapan kawasan RTH sesuai dengan tipologi dan skala wilayahnya;
  - e. pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
  - f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan ancaman bencana.
5. Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya kota, meliputi:
  - a. pengembangan kawasan peruntukan budi daya yang terdiri atas kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan ruang evakuasi bencana; dan kawasan peruntukan lainnya; dan
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
6. Kebijakan penetapan kawasan strategis diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan keterpaduan pengelolaan KSP di wilayah Kota;
  - b. pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - c. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - d. pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan yang tertuang di dalam RTRW Kota Mataram pada dasarnya menjadi *guidelines* dalam perumusan rencana beserta indikasi program perwujudannya. Perwujudan rencana, baik rencana struktur ruang dan pola ruang diharapkan menjadi bagian yang integral dengan perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Mataram. Berdasarkan hasil telaah dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 terhadap RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, terdapat 53 indikasi program atau 63 persen dari total 84 indikasi program utama perwujudan Rencana Struktur Ruang Pembangunan Jangka Menengah II (PJM II) tahun 2017-2021 telah dioperasionalkan ke dalam program pembangunan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021. Sedangkan, 31 indikasi program masih belum terwadahi dalam program pembangunan, dimana 10 indikasi program merupakan kewenangan Kota Mataram dan 21 indikasi program merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi lainnya seperti PT PLN, PT Telkom dan BWS Nusa Tenggara.

Berkaitan dengan indikasi program utama perwujudan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Mataram, terdapat 65 indikasi program yang direncanakan pada PJM II (2017-2021). Sebanyak 33 indikasi program sudah terwadahi dalam program pembangunan RPJMD Kota Mataram, sedangkan 32 indikasi program belum terwadahi. Terhadap indikasi program utama yang belum dioperasionalkan dalam program pembangunan RPJMD, perlu menjadi perhatian dan dipertimbangkan untuk diintegrasikan dalam penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya. Sehingga, program pembangunan dapat sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah direncanakan. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram melalui OPD Teknis perlu memperkuat

koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di luar lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam rangka melaksanakan program-program utama yang telah direncanakan untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Kota Mataram.

Tabel 2.99

Program Utama RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 di PJM III

No.	Isu Strategis yang Mendasari	Indikasi Program RTRW PJM III (2021-2024)
<b>A.</b>	<b>Struktur Ruang</b>	
1.	Menurunnya kualitas fungsi dan peran wilayah Kota Mataram	1.1. Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>● Revitalisasi dan/atau penataan kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata</li> <li>● Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum (pendidikan dan kesehatan), perkantoran dan pelayanan umum lainnya</li> </ul>
2.	Pelayanan angkutan transportasi dalam kota belum optimal	2.1. Pembangunan dan Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang memadai</li> <li>● Implementasi peningkatan/ pelebaran/pemeliharaan jalan dan penyediaan perlengkapan jalan</li> <li>● Pembangunan terminal Tipe C dan penyediaan <i>shelter</i></li> <li>● Pengembangan moda angkutan massal dalam Kota</li> </ul>
3.	Masih kurang optimalnya pelayanan terhadap kebutuhan listrik masyarakat	3.1. Pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Beserta Sarana-Prasarananya <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan sumber energi baru terbarukan</li> </ul> 3.2. Pengembangan Jaringan Transmisi Beserta Sarana-Prasarananya
4.	Pembangunan sistem telekomunikasi dan informasi belum optimal	4.1. Peningkatan Teknologi Telematika Berbasis Teknologi Modern (Internet, Cloud, dll) 4.2. Pengembangan Area Hotspot pada Fasilitas-Fasilitas Umum
5.	Perlindungan, pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air belum optimal	5.1. Pengaturan pengambilan air tanah dan air permukaan 5.2. Pengembangan jaringan irigasi pada KP2B 5.3. Penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air ramah lingkungan 5.4. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai
6.	Akses pelayanan air minum belum optimal	6.1. Penambahan jaringan prasarana perpipaan air minum 6.2. pemanfaatan sumur pompa dan sumur bor secara berdaya guna 6.3. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan distribusi 6.4. Penyediaan jaringan distribusi baru 6.5. Penyebaran hidran-hidran umum
7.	Akses sanitasi belum optimal	7.1. Pengelolaan air limbah perpipaan terpusat dan setempat 7.2. Pendayagunaan dan pemeliharaan IPAL Meninting 7.3. Pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan penanganan Limbah B3 7.4. Pengelolaan IPAL komunal berbasis masyarakat dan/atau CSR 7.5. Pengembangan tangki septik dan saluran limbah kolektif dan individu
8.	Pengelolaan sampah belum optimal	8.1. Peningkatan kualitas pelayanan Unit TPST dan Bank Sampah Terpadu Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan 8.2. Pemanjatan kerjasama pengelolaan persampahan dengan Kabupaten Lombok Barat



No.	Isu Strategis yang Mendasari	Indikasi Program RTRW PJM III (2021-2024)
9.	Drainase perkotaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal	9.1. Pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah 9.2. Normalisasi saluran drainase 9.3. Pengembangan drainase sistem polder dalam bentuk kolam-kolam retensi dan lubang resapan biopori
10.	Pelayanan fasilitas pelayanan pejalan kaki belum optimal	10.1. Penyediaan dan pemanfaatan pejalan kaki dan/atau pesepeda 10.2. Peningkatan Jaringan Jalan/Trotoar 10.3. Pembangunan Jalan Inspeksi
<b>B.</b>	<b>Pola Ruang</b>	
1.	Terdesaknya ruang pada kawasan perlindungan setempat	1.1. Pembatasan pembangunan / pengadaan kegiatan baru di sepanjang sungai dan pantai 1.2. Penanaman vegetasi di sepanjang tepi sungai, sempadan pantai, dan daerah sekitar mata air 1.3. Penertiban dan/atau penataan sempadan sungai dan pantai sejauh penetapan garis semapdannya
2.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota serta sulitnya untuk pengadaan lahan bagi RTH	2.1. Pembebasan/akuisisi lahan untuk RTH 2.2. Perancangan dan penanaman vegetasi bernilai estetis dan/atau bernilai ekonomi 2.3. Pengembangan Hutan Kota/Taman, sabuk hijau, tamaman jalan, dan TPU 2.4. Penyediaan RTH privat dan vegetasi pada kawasan perumahan baru, perkantoran, dan sarana pelayanan umum
3.	Adaptasi ruang pada kawasan rawan bencana masih rendah dan dibarengi dengan upaya mitigasi yang belum optimal	3.1. Penyediaan LBR atau ruang resapan pada kawasan bencana 3.2. Penanaman vegetasi pada kawasan rawan banjir dan kawasan pesisir pantai 3.3. Pemantapan/penyediaan ruang terbuka dan bangunan publik sebagai ruang evakuasi bencana
4.	Penurunan kualitas bangunan dan lingkungan atau kurang tertatanya kawasan-kawasan terbangun	4.1. Penataan kawasan permukiman padat kumuh 4.2. Relokasi perkampungan nelayan 4.3. Konsolidasi lahan pengembangan kawasan perumahan 4.4. Penataan kawasan perdagangan dan jasa dengan pola superblock, pasar induk kota, pusat PKL, serta kegiatan sektor informal lainnya 4.5. Penyediaan IPAL Komunal Untuk IRT dan industri menengah 4.6. Penyediaan Prasarana Lingkungan 4.7. Pembebasan dan/atau penyediaan lahan untuk area penyangga (buffer zone) 4.8. Konservasi bangunan dan lingkungan binaan di kawasan Kota Tua Ampenan 4.9. Pengembangan Kawasan Wisata dengan Konsep MICE
5.	Penurunan luas / konversi lahan pertanian	5.1. Pemantapan Lahan Pertanian Sebagai Urban-farm Land 5.2. Pemberian insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan

Sumber: Revisi RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, diolah.

## 2.8 ISU LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS RPJMD 2021-2026)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya, penelaahan KLHS terhadap RPJMD dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan jangka menengah.

Isu lingkungan hidup strategis bersumber dari hasil analisis isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikaji oleh Tim Penyusun KLHS RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2025 dan tertuang di dalam dokumen KLHS. Isu strategis TPB di Kota Mataram dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100  
Isu Lingkungan Hidup Strategis / Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan  
di Kota Mataram

No.	Tema Besar Isu	Isu Strategis KLHS	Analisis Permasalahan Pembangunan Kota Mataram
A.	<b>Pilar Sosial</b>		
1	Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Tingginya angka kemiskinan terutama dalam kondisi pasca bencana dan masa pandemi
		Indeks Pembangunan Manusia	Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia belum optimal yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan IPM
2	Pelayanan dasar sanitasi	Fasilitas tempat buang air besar sumber air bersih	Pelayanan Infrastruktur Dasar belum optimal yang ditandai salah satunya dengan belum tercapainya target nasional dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak
3.	Permukiman kumuh	permukiman kumuh	Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan terjangkau belum optimal
4.	Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas serta masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungannya.

No.	Tema Besar Isu	Isu Strategis KLHS	Analisis Permasalahan Pembangunan Kota Mataram
5.	Tingkat kesehatan	Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar belum optimal</li> <li>• Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan masih harus ditingkatkan</li> </ul>
		Angka Harapan Hidup Pandemi Covid-19	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan AHH
		Penyakit yang dihadapi masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit belum optimal yang ditandai dengan beban ganda angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>
6.	Tingkat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pendidikan</li> <li>• Angka Partisipasi Murni</li> <li>• Angka Partisipasi Kasar</li> </ul>	Penyelenggaraan Pendidikan belum optimal yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk tidak tuntas sampai 12 tahun
7.	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang ditandai dengan masih tingginya angka ketergantungan dan laju pertumbuhan penduduk
8.	Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pemberdayaan Gender</li> <li>• Pengembangan Diri Perempuan</li> </ul>	Kelayakan hidup masyarakat belum merata, di antaranya peningkatan kualitas perempuan dan anak kurang optimal
9.	Keamanan dan Ketertiban	Kondusifitas Wilayah	Stabilitas Trantibum Linmas belum terkendali secara optimal yang ditandai dengan masih adanya gangguan kamtibmas, pelanggaran perda dan konflik horizontal
<b>B.</b>	<b>Pilar Ekonomi</b>		
1.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</li> <li>• Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>	Kesempatan Kerja Masih Terbatas
2.	Pengembangan potensi ekonomi dan daya saing kota	Pengoptimalan pariwisata	Kinerja Ekonomi Daerah Mengalami Perlambatan dengan melambatnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi termasuk menurunnya kunjungan wisatawan

No.	Tema Besar Isu	Isu Strategis KLHS	Analisis Permasalahan Pembangunan Kota Mataram
C.	<b>Pilar Lingkungan</b>		
1.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencemaran sungai</li> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>	Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal yang salah satunya ditandai dengan Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
2.	Bencana (alam dan non alam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bencana Alam</li> <li>• Bencana non alam pandemi Covid-19</li> </ul>	Risiko bencana di Kota Mataram masih dalam kategori sedang-tinggi.
3.	Pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume sampah yang dihasilkan</li> <li>• Volume sampah yang tertangani</li> </ul>	Pengelolaan Persampahan belum optimal
4.	Tata Ruang Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan pertanian	Ppenyelenggaraan penataan ruang belum Optimal
D.	<b>Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan</b>		
1.	Tata kelola pemerintah	Reformasi birokrasi SAKIP	<p>Kinerja tata kelola pemerintahan belum optimal yang ditandai dengan kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi SAKIP di Kota Mataram berjalan lambat, meskipun realisasinya terus meningkat. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai level unit terkecil</li> <li>• Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset belum optimal</li> <li>• Ketergantungan Daerah terhadap APBN masih tinggi</li> <li>• Penerapan E-Govt belum menunjukkan perkembangan yang signifikan</li> <li>• Kualitas Pelayanan Publik belum optimal</li> </ul>

Sumber: KLHS RPJMD Kota Mataram, diolah

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, penjaringan permasalahan, telaahan isu global hingga tingkat regional serta telaahan dokumen pembangunan daerah permasalahan dan isu terkait pembangunan di Kota Mataram dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) fokus permasalahan pembangunan yakni, fokus pengembangan sumber daya manusia, fokus pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup, fokus pengembangan ekonomi wilayah, fokus kondusifitas wilayah, dan fokus tata kelola pemerintahan.

# Bab 3

## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

### 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

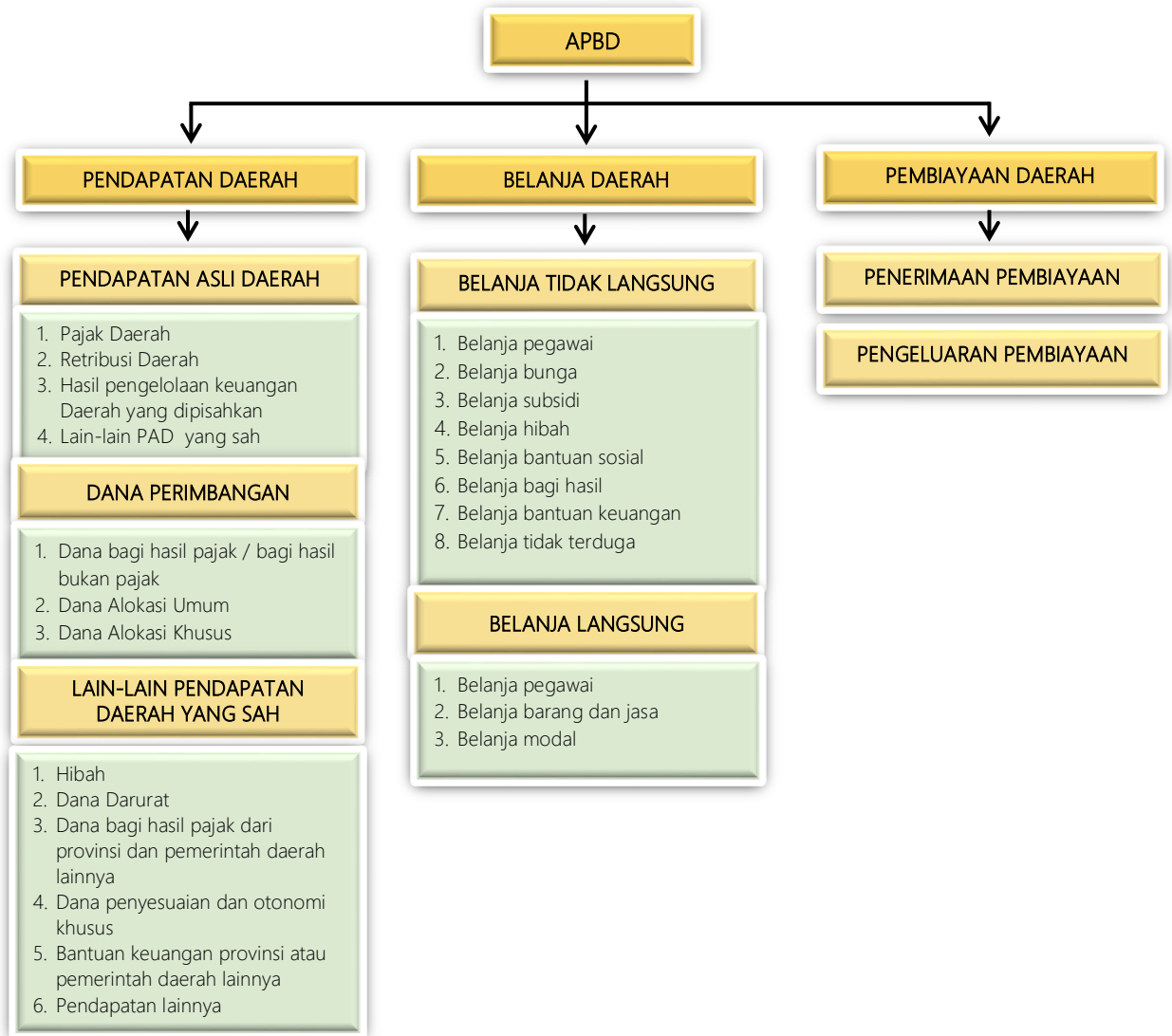
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### 3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Kinerja pelaksanaan APBD di Kota Mataram dikaji dengan memperhatikan perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD pada tahun 2016-2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu:

- Pendapatan Daerah;
- Belanja Daerah; dan
- Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD yang digunakan pada tahun 2016-2020 sebagaimana gambar berikut:



(berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Gambar 3.1  
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kinerja APBD Kota Mataram tahun 2016-2020, diperoleh rata-rata pertumbuhan terhadap realisasi Pendapatan Daerah sebesar 0,04 persen. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata target pendapatan daerah yang hanya mencapai 0,67 persen. Struktur belanja daerah rata-rata realisasinya sebesar 2,33 persen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata target belanja daerah yang mencapai 1,36 persen. Struktur pembiayaan rata-rata realisasinya mencapai 15,64 persen lebih rendah dengan target rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah sebesar 20,14 persen. Untuk data target dan realisasi struktur APBD Kota Mataram 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.357.807.064.571,00</b>	<b>1.424.284.858.133,21</b>	<b>1.437.782.041.937,00</b>	<b>1.476.066.007.660,00</b>	<b>1.389.869.482.273,15</b>	<b>0,67</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>279.679.198.140,00</b>	<b>367.503.589.415,00</b>	<b>354.697.095.359,00</b>	<b>372.928.500.000,00</b>	<b>320.309.008.468,15</b>	<b>4,74</b>
1.1.1	Pajak Daerah	121.485.000.000,00	142.097.000.000,00	144.505.000.000,00	157.905.000.000,00	110.000.000.000,00	- 0,60
1.1.2	Retribusi Daerah	20.172.500.000,00	21.999.600.000,00	22.175.000.000,00	22.458.000.000,00	32.418.901.000,00	13,87
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000,00	7.737.789.415,00	8.193.095.359,00	9.815.500.000,00	9.377.825.419,00	10,53
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	131.621.698.140,00	195.669.200.000,00	179.824.000.000,00	182.750.000.000,00	168.512.282.049,15	8,60
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>948.543.457.384,00</b>	<b>970.292.218.566,00</b>	<b>905.092.215.278,00</b>	<b>924.226.308.000,00</b>	<b>844.436.699.732,00</b>	<b>- 2,74</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	79.916.325.000,00	116.124.581.566,00	101.746.309.278,00	96.020.407.000,00	107.926.697.903,00	9,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.799.806.384,00	598.318.257.000,00	598.318.257.000,00	632.753.729.000,00	582.765.685.000,00	3,18
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	347.827.326.000,00	255.849.380.000,00	205.027.649.000,00	195.452.172.000,00	153.744.316.829,00	- 18,08
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>129.584.409.047,00</b>	<b>86.489.050.152,21</b>	<b>177.992.731.300,00</b>	<b>178.911.199.660,00</b>	<b>225.123.774.073,00</b>	<b>24,72</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.811.000.000,00	9.000.000.000,00	59.454.200.000,00	52.984.200.000,00	63.022.600.000,00	132,36
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68.684.380.672,00	69.989.050.152,21	80.000.000.000,00	92.931.796.660,00	98.300.294.073,00	9,54
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0	32.995.203.000,00	63.730.680.000,00	48,29
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.434.652.375,00	0,00	538.531.300,00	0,00	0,00	- 25,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	42.654.376.000,00	7.500.000.000,00	38.000.000.000,00	0,00	70.200.000,00	81,06
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.421.368.181.842,00</b>	<b>1.545.623.542.994,58</b>	<b>1.539.831.584.105,02</b>	<b>1.561.167.913.292,05</b>	<b>1.493.821.861.599,54</b>	<b>1,36</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>650.165.293.739,79</b>	<b>607.907.046.576,22</b>	<b>585.460.664.595,19</b>	<b>601.146.560.902,89</b>	<b>752.475.917.439,59</b>	<b>4,42</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	604.179.991.659,49	545.118.429.699,18	520.869.100.065,19	538.641.061.238,89	514.985.448.739,59	- 3,80
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	26.364.821.000,00	33.310.186.775,00	41.494.155.750,00	40.286.926.000,00	82.535.908.700,00	38,22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.652.682.300,30	23.010.631.322,04	15.684.610.000,00	15.447.360.000,00	13.603.210.000,00	- 3,73
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	912.798.780,00	912.798.780,00	912.798.780,00	2.303.043.338,00	1.351.350.000,00	27,75



NO	URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.055.000.000,00	5.555.000.000,00	6.500.000.000,00	4.468.170.326,00	140.000.000.000,00	861,39
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>771.202.888.102,21</b>	<b>937.716.496.418,36</b>	<b>954.370.919.509,83</b>	<b>960.021.352.389,16</b>	<b>741.345.944.159,95</b>	<b>0,30</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	93.755.834.600,00	134.334.263.310,00	120.750.500.400,00	95.890.745.517,00	97.757.056.070,00	3,63
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318.213.675.306,00	405.950.691.362,00	481.228.376.382,83	506.383.335.066,51	424.314.414.590,95	8,78
2.2.3	Belanja Modal	359.233.378.196,21	397.431.541.746,36	352.392.042.727,00	357.747.271.805,65	219.274.473.499,00	- 9,47
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	83.961.117.271,00	136.790.684.861,37	119.242.637.527,02	97.599.405.632,05	106.952.379.326,39	10,38
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.400.000.000,00	15.452.000.000,00	17.193.095.359,00	12.497.500.000,00	3.000.000.000,00	-29,07
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>63.561.117.271,00</b>	<b>121.338.684.861,37</b>	<b>102.049.542.168,02</b>	<b>85.101.905.632,05</b>	<b>103.952.379.326,39</b>	<b>20,14</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Tabel 3.2  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.396.393.380.673,64</b>	<b>1.424.072.893.722,50</b>	<b>1.418.432.870.483,30</b>	<b>1.462.795.712.980,15</b>	<b>1.396.009.615.374,56</b>	<b>0,04</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>288.415.925.929,99</b>	<b>386.958.232.873,50</b>	<b>358.825.822.208,30</b>	<b>373.951.422.339,15</b>	<b>363.165.361.010,56</b>	<b>7,06</b>
1.1.1	Pajak Daerah	124.416.352.803,94	144.866.671.599,76	145.974.083.391,56	160.513.708.650,00	117.920.102.070,00	0,16
1.1.2	Retribusi Daerah	18.338.313.673,00	17.409.531.499,00	17.472.124.521,00	19.884.309.481,75	17.897.463.467,00	- 0,22
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.254.546.965,00	8.178.906.950,00	8.535.805.383,20	8.680.588.075,38	9.936.912.771,62	8,32
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	138.406.712.488,05	216.503.122.824,74	186.843.808.912,54	184.872.816.132,02	217.410.882.701,94	14,82
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>981.706.491.599,00</b>	<b>941.446.451.427,00</b>	<b>881.001.320.170,00</b>	<b>895.596.778.015,00</b>	<b>822.946.728.374,00</b>	<b>- 4,24</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	110.973.075.189,00	103.347.515.590,00	84.621.644.710,00	80.306.889.800,00	95.796.358.432,00	- 2,70
1.2.2	Dana Alokasi Umum	609.016.722.000,00	598.318.257.000,00	598.318.257.000,00	634.376.234.000,00	579.228.725.000,00	- 1,11
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.716.694.410,00	239.780.678.837,00	198.061.418.460,00	180.913.654.215,00	147.921.644.942,00	- 13,17
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>126.270.963.144,65</b>	<b>95.668.209.422,00</b>	<b>178.605.728.105,00</b>	<b>193.247.512.626,00</b>	<b>209.897.525.909,00</b>	<b>19,82</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.811.000.000,00	9.000.000.000,00	55.776.870.863,00	52.188.280.000,00	61.637.242.604,00	123,05
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	68.364.134.769,65	79.098.009.422,00	84.220.125.942,00	106.955.529.626,00	84.447.703.386,00	7,03
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	38.000.000.000,00	32.995.203.000,00	63.730.680.000,00	48,29
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	429.652.375,00	0,00	538.531.300,00	1.050.000.000,00	0,00	1,26
1.3.6	Pendapatan Lainnya	42.666.176.000,00	7.570.200.000,00	70.200.000,00	58.500.000,00	81.900.000,00	- 24,50
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.330.717.743.924,42</b>	<b>1.412.407.233.825,26</b>	<b>1.435.553.089.992,39</b>	<b>1.449.112.047.541,41</b>	<b>1.457.702.553.197,18</b>	<b>2,33</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>607.986.508.674,00</b>	<b>553.923.497.789,00</b>	<b>543.268.225.948,10</b>	<b>549.197.776.038,10</b>	<b>710.569.046.835,00</b>	<b>4,91</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	566.359.394.373,00	503.924.917.657,00	492.668.006.347,10	499.915.410.459,10	485.557.736.722,00	- 3,66

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.164.891.400,00	26.617.650.994,00	33.186.855.758,00	34.058.186.511,00	78.108.234.767,00	41,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.774.617.500,00	20.008.020.000,00	13.223.484.329,00	13.033.790.000,00	11.676.200.000,00	- 4,73
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	823.651.340,00	912.798.780,00	912.798.780,00	2.136.185.770,00	1.351.350.000,00	27,03
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	863.954.061,00	2.460.110.358,00	3.277.080.734,00	54.203.298,00	133.875.525.346,00	61.751,85
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>722.731.235.250,42</b>	<b>858.483.736.036,26</b>	<b>892.284.864.044,29</b>	<b>899.914.271.503,31</b>	<b>747.133.506.362,18</b>	<b>1,65</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	84.052.886.026,00	126.167.471.542,00	106.474.981.226,00	90.990.837.423,00	92.401.084.333,00	5,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.241.359.109,42	397.822.750.256,36	468.987.657.631,94	477.362.490.415,57	445.666.010.694,18	10,84
2.2.3	Belanja Modal	333.436.990.115,00	334.493.514.237,90	316.822.225.186,35	331.560.943.664,74	209.066.411.335,00	- 9,31
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	83.920.800.314,01	135.706.914.457,23	131.920.574.354,47	105.088.713.887,65	106.952.379.326,39	10,09
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	14.452.000.000,00	15.452.000.000,00	9.395.595.359,00	11.820.000.000,00	2.997.000.000,00	- 20,28
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>69.468.800.314,01</b>	<b>120.254.914.457,23</b>	<b>122.524.978.995,47</b>	<b>93.268.713.887,65</b>	<b>103.955.379.326,39</b>	<b>15,64</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>135.144.437.063,23</b>	<b>131.920.574.354,47</b>	<b>105.404.759.486,38</b>	<b>106.952.379.326,39</b>	<b>42.262.441.503,77</b>	<b>- 20,38</b>

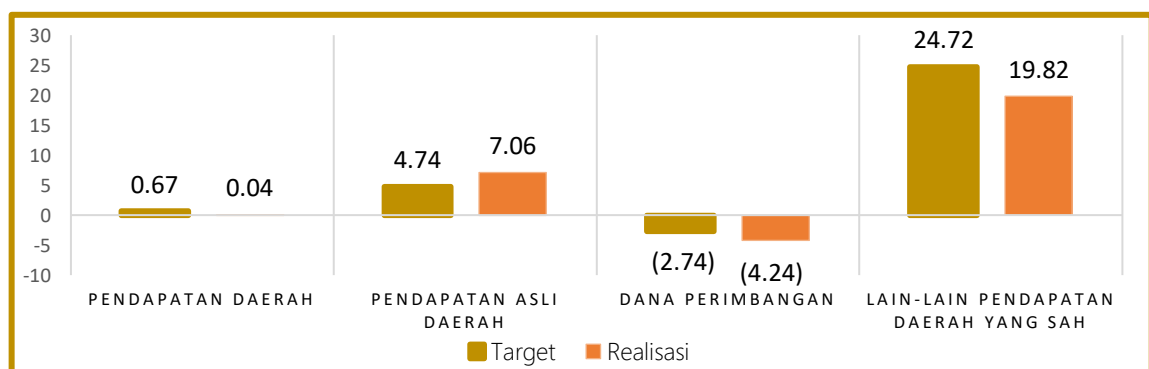
Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

## 1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah di Kota Mataram periode 2016 - 2020 berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan realisasinya mencapai 0,04 persen, sebagaimana Grafik berikut:

Grafik 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Rata-rata capaian pendapatan daerah di Kota Mataram mencapai 100,20 persen, mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah periode 2016-2020 telah sesuai target anggaran yang telah direncanakan. Terdapat pelampauan target pendapatan daerah pada tahun 2016 dengan nilai realisasi mencapai 102,84 persen dan tahun 2020 mencapai 100,44 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	1.357.807.064.571,00	1.396.393.380.673,64	102,84
2017	1.424.284.858.133,21	1.424.072.893.722,50	99,99
2018	1.437.782.041.937,00	1.418.432.870.483,30	98,65
2019	1.476.066.007.660,00	1.462.795.712.980,15	99,10
2020	1.389.869.482.273,15	1.396.009.615.374,56	100,44
<b>RATA-RATA</b>			<b>100,20</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Perkembangan Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Struktur dari PAD di Kota Mataram tahun 2016-2020, meliputi:

##### a. Pajak Daerah

Sumber pajak daerah di Kota Mataram antara lain berasal dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

##### b. Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram berjumlah 15 jenis retribusi, dengan rincian sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum, meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
- Retribusi Jasa Usaha, meliputi: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, dan rumah potong hewan
- Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: retribusi Izin Mendirikan Bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

##### c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Mataram pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang, PT. Bank NTB dan PT. BPR NTB.

##### d. Lain-lain PAD yang Sah

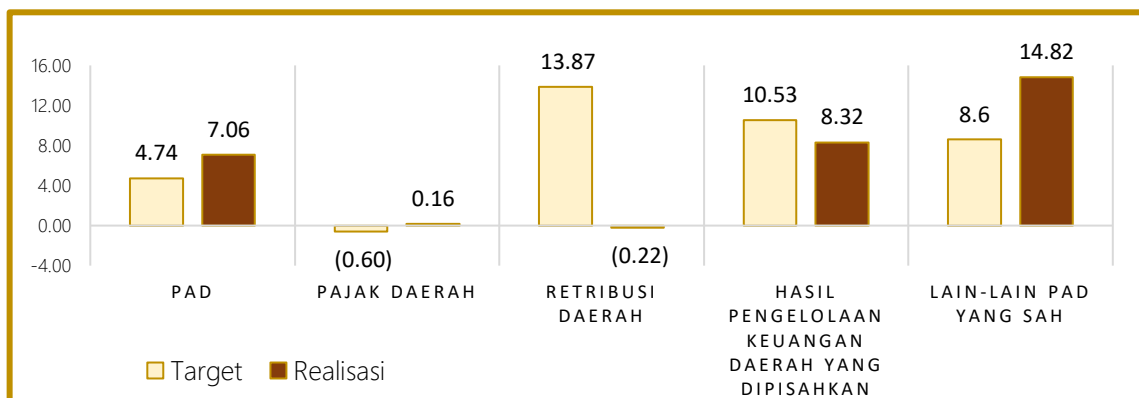
Objek dari lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- jasa giro,
- pendapatan bunga,
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,

- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- pendapatan denda pajak,
- pendapatan denda retribusi,
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- pendapatan dari pengembalian,
- fasilitas sosial dan fasilitas umum
- pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

PAD Kota Mataram selama periode 2016-2020 berfluktuatif, baik dari target anggaran maupun realisasinya. Berdasarkan realisasi anggaran, sumber PAD yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi adalah komponen Lain-lain PAD yang Sah rata-rata pertumbuhannya mencapai 14,82 persen. Sedangkan, Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling rendah sebesar -0,22 persen yang mengindikasikan bahwa Retribusi Daerah belum melampaui target yang telah direncanakan. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota Mataram Tahun 2016-2020, digambarkan dalam Grafik berikut.

Grafik 3.2  
Rata-rata Pertumbuhan PAD Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Capaian PAD Kota Mataram periode 2016-2020 tetap melampaui target yang telah direncanakan dengan rata-rata capaian 104,65 persen. Perkembangan capaian PAD tahun 2016-2020 sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut.

Tabel 3.4  
Capaian PAD Kota Mataram Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	279.679.198.140,00	288.415.925.929,99	103,12
2017	367.503.589.415,00	386.958.232.873,50	105,29
2018	354.697.095.359,00	358.825.822.208,30	101,16
2019	372.928.500.000,00	373.951.422.339,15	100,27
2020	320.309.008.468,15	363.165.361.010,56	113,38
RATA-RATA			104,65

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Rata-rata capaian realisasi komponen PAD, terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah secara umum melampaui target anggaran, sedangkan Retribusi Daerah rata-rata capaian periode 2016-2020 masih belum mencapai target anggaran yang direncanakan, lebih jelasnya capaian PAD per jenis pendapatan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.5  
Capaian PAD per Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>PAJAK DAERAH</b>			
2016	121.485.000.000,00	124.416.352.803,94	102,41
2017	142.097.000.000,00	144.866.671.599,76	101,95
2018	144.505.000.000,00	145.974.083.391,56	101,02
2019	157.905.000.000,00	160.513.708.650,00	101,65
2020	110.000.000.000,00	117.920.102.070,00	107,20
<b>RATA-RATA</b>			<b>102,85</b>
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>			
2016	20.172.500.000,00	18.338.313.673,00	90,91
2017	21.999.600.000,00	17.409.531.499,00	79,14
2018	22.175.000.000,00	17.472.124.521,00	78,79
2019	22.458.000.000,00	19.884.309.481,75	88,54
2020	32.418.901.000,00	17.897.463.467,00	55,21
<b>RATA-RATA</b>			<b>78,52</b>
<b>HASIL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>			
2016	6.400.000.000,00	7.254.546.965,00	113,35
2017	7.737.789.415,00	8.178.906.950,00	105,70
2018	8.193.095.359,00	8.535.805.383,20	104,18
2019	9.815.500.000,00	8.680.588.075,38	88,44
2020	9.377.825.419,00	9.936.912.771,62	105,96
<b>RATA-RATA</b>			<b>103,53</b>
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>			
2016	131.621.698.140,00	138.406.712.488,05	105,15
2017	195.669.200.000,00	216.503.122.824,74	110,65
2018	179.824.000.000,00	186.843.808.912,54	103,90
2019	182.750.000.000,00	184.872.816.132,02	101,16
2020	168.512.282.049,15	217.410.882.701,94	129,02
<b>RATA-RATA</b>			<b>109,98</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3.5, bahwa capaian masing-masing jenis PAD sebagai berikut:

Pajak Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 capaian realisasinya tetap melampaui target anggaran yang telah ditetapkan dengan rata-rata sebesar 102,85 persen. Capaian tertinggi Pajak Daerah terjadi pada tahun 2020 yaitu 107,20 persen. Ketercapaian realisasi Pajak Daerah hingga 107,20 persen tidak lepas dari upaya-upaya Pemerintah Kota Mataram diantaranya adalah (1) Penggalan potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi; (2) Peningkatan partisipasi publik melalui penerapan insentif dan disinsentif (3) peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah, (4) optimalisasi sistem dan tata laksana, (5)

Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah (6) penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.

Retribusi Daerah periode 2016-2020 memiliki capaian realisasi masih berada di bawah target anggaran atau dapat dikatakan belum memenuhi target anggaran dengan rata-rata capaian sebesar 78,52 persen yang disebabkan belum optimalnya manajemen dan sistem operasional pemungutan retribusi daerah. Capaian terendah Retribusi Daerah terjadi pada tahun 2020 yaitu 55,21 persen.

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memiliki rata-rata capaian realisasi sebesar 103,53 persen. Pada tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2020 terjadi pelampauan target dengan capaian tertinggi pada tahun 2016 mencapai 113,35 persen. Sedangkan pada tahun 2019 capaiannya di bawah target anggaran atau belum memenuhi target anggaran dengan capaian yaitu 88,44 persen. Capaian rata-rata Hasil Pengelolaan Keuangan Yang Dipisahkan sebesar 113,35 persen hal ini merupakan peningkatan pelayanan yang diberikan oleh BUMD dan peningkatan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Lain-lain Pendapatan yang Sah selama periode 2016-2020 capaian realisasinya melampaui target anggaran yang telah ditetapkan, rata-rata capaian 109,98 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 129,02 persen.

## 2) Dana Perimbangan

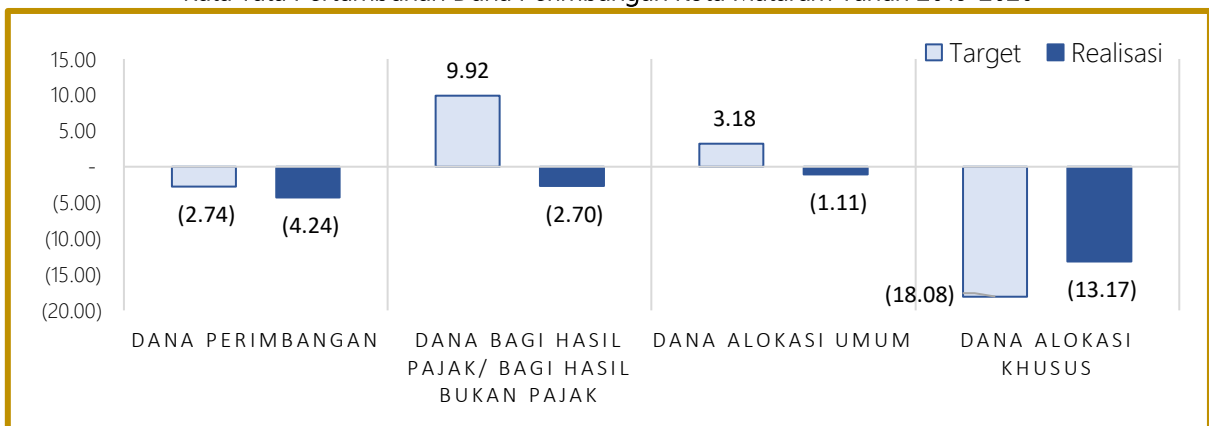
Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil, dirinci menurut objek pendapatan mencakup Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Perimbangan Kota Mataram selama periode 2016-2020 memiliki pertumbuhan minus dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,24 persen. Berdasarkan realisasi anggaran, sumber Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan paling tinggi diantara komponen Dana Perimbangan lainnya adalah Dana Alokasi Umum rata-rata pertumbuhannya sebesar -1,11 persen.

Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2016-2020, digambarkan dalam Grafik berikut.

Grafik 3.3  
Rata-rata Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Secara umum capaian Dana Perimbangan selama periode 2016-2020 belum mencapai 100 persen, kecuali pada tahun 2016 capaiannya melampaui target anggaran yaitu 103,50 persen. Rata-rata capaian Dana Perimbangan adalah 98,44 persen, capaian realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 96,90 persen. Ketercapaian rata-rata 98,44 persen merupakan hasil transfer Pemerintah Pusat yang pada tiap tahunnya yang tertuang dari APBN dan diatur melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. Pemerintah Daerah masih sangat tergantung akan Dana Perimbangan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perkembangan target anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2016-2020, sebagaimana Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6  
Capaian Dana Perimbangan Kota Mataram Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	948.543.457.384,00	981.706.491.599,00	103,50
2017	970.292.218.566,00	941.446.451.427,00	97,03
2018	905.092.215.278,00	881.001.320.170,00	97,34
2019	924.226.308.000,00	895.596.778.015,00	96,90
2020	844.436.699.732,00	822.946.728.374,00	97,46
RATA-RATA			98,44

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Rata-rata capaian realisasi per jenis pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus selama tahun 2016 sampai tahun 2020 belum mencapai 100 persen, hanya capaian realisasi Dana Alokasi Khusus yang telah melampaui target anggaran dengan rata-rata capaian sebesar 103,32 persen. Capaian Dana Perimbangan per jenis pendapatan tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.7  
Capaian Dana Perimbangan per Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>DANA BAGI HASIL</b>			
2016	79.916.325.000,00	110.973.075.189,00	138,86
2017	116.124.581.566,00	103.347.515.590,00	89,00
2018	101.746.309.278,00	84.621.644.710,00	83,17
2019	96.020.407.000,00	80.306.889.800,00	83,64
2020	107.926.697.903,00	95.796.358.432,00	88,76
RATA-RATA			96,68
<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>			
2016	520.799.806.384,00	609.016.722.000,00	116,94
2017	598.318.257.000,00	598.318.257.000,00	100,00
2018	598.318.257.000,00	598.318.257.000,00	100,00
2019	632.753.729.000,00	634.376.234.000,00	100,26
2020	582.765.685.000,00	579.228.725.000,00	99,39
RATA-RATA			103,32
<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>			
2016	347.827.326.000,00	261.716.694.410,00	75,24
2017	255.849.380.000,00	239.780.678.837,00	93,72
2018	205.027.649.000,00	198.061.418.460,00	96,60
2019	195.452.172.000,00	180.913.654.215,00	92,56



TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2020	153.744.316.829,00	147.921.644.942,00	96,21
RATA-RATA			90,87

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3.7 bahwa Capaian Dana Perimbangan per jenis pendapatan sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2017, 2018, 20219 dan tahun 2020 capaian realisasinya berada di bawah target anggaran dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 83,17 persen. Sedangkan capaian realisasi tahun 2016 telah melampaui target anggaran mencapai 138,86 persen.
- Secara umum, capaian realisasi DAU periode 2016-2019 sebesar 100 persen atau sesuai dengan target anggaran yang direncanakan dan terjadi pelampauan target pada tahun 2016 mencapai 116,94 persen. Namun, pada tahun 2020 capaian DAU belum mecapai 100 persen yaitu 99,39 persen
- Capaian realisasi DAK periode 2016-2020 secara umum masih berada di bawah target anggaran atau belum memenuhi target yang direncanakan dengan rata-rata capaian yaitu 90,87 persen. Capaian realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 75,24 persen.

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

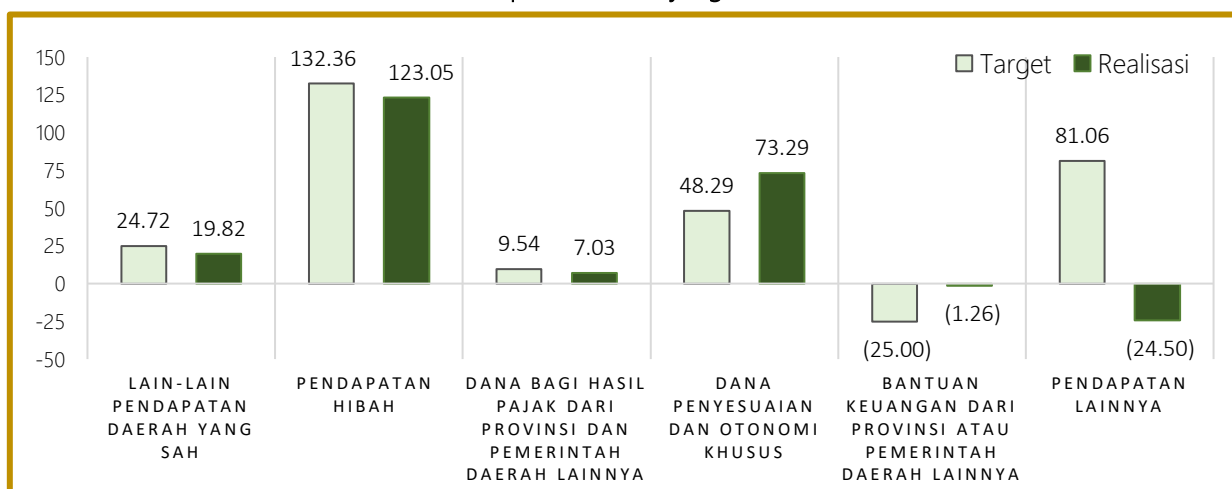
Penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kota Mataram terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mataram selama periode 2016-2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 19,82 persen. Berdasarkan realisasi anggaran, sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Pendapatan Hibah rata-rata pertumbuhannya melebihi 100 persen yaitu mencapai 123,05 persen. Sedangkan Pendapatan Lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan minus yaitu sebesar -24,50 persen.

Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mataram Tahun 2016-2020, digambarkan dalam Grafik 3.4. berikut.

Grafik 3.4

Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 telah melampaui target dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 110,61 persen. Sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 capaiannya belum mencapai target anggaran dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 93,24 persen. Rata-rata capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah periode 2016-2020 sebesar 101,93 persen.

Perkembangan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mataram selama periode 2016-2020, sebagaimana Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8  
Capaian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	129.584.409.047,00	126.270.963.144,65	97,44
2017	86.489.050.152,21	95.668.209.422,00	110,61
2018	177.992.731.300,00	178.605.728.105,00	100,34
2019	178.911.199.660,00	193.247.512.626,00	108,01
2020	225.123.774.073,00	209.897.525.909,00	93,24
RATA-RATA			101,93

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Selama periode 2016-2020, rata-rata capaian realisasi per jenis pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya, belum mencapai 100 persen. Hanya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang telah melampaui target anggaran dengan rata-rata capaian sebesar 103,76 persen, Lebih jelasnya capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per jenis pendapatan tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.9  
Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Per Jenis Pendapatan Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>PENDAPATAN HIBAH</b>			
2016	14.811.000.000,00	14.811.000.000,00	100,00
2017	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00
2018	59.454.200.000,00	55.776.870.863,00	93,81
2019	52.984.200.000,00	52.188.280.000,00	98,50
2020	63.022.600.000,00	61.637.242.604,00	97,80
RATA-RATA			98,02
<b>DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>			
2016	68.684.380.672,00	68.364.134.769,65	99,53
2017	69.989.050.152,21	79.098.009.422,00	113,01
2018	80.000.000.000,00	84.220.125.942,00	105,28
2019	92.931.796.660,00	106.955.529.626,00	115,09
2020	98.300.294.073,00	84.447.703.386,00	85,91
RATA-RATA			103,76
<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>			
2016	0	0,00	0,00

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2017	0	0,00	0,00
2018	0	38.000.000.000,00	100,00
2019	32.995.203.000,00	32.995.203.000,00	100,00
2020	63.730.680.000,00	63.730.680.000,00	100,00
<b>RATA-RATA</b>			<b>60,00</b>
<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>			
2016	3.434.652.375,00	429.652.375,00	12,51
2017	0,00	0,00	0,00
2018	538.531.300,00	538.531.300,00	100,00
2019	0,00	1.050.000.000,00	100,00
2020	0,00	0,00	0,00
<b>RATA-RATA</b>			<b>42,50</b>
<b>PENDAPATAN LAINNYA</b>			
2016	42.654.376.000,00	42.666.176.000,00	100,03
2017	7.500.000.000,00	7.570.200.000,00	100,94
2018	38.000.000.000,00	70.200.000,00	0,18
2019	0,00	58.500.000,00	100,00
2020	70.200.000,00	81.900.000,00	116,67
<b>RATA-RATA</b>			<b>83,56</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3.9 diatas, bahwa capaian masing-masing jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah selama periode 2016 sampai tahun 2020 capaian realisasinya mendekati 100 persen atau hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata sebesar 98,02 persen. Namun, pada tahun 2016 dan tahun 2017 Pendapatan Hibah capaian realisasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan atau sebesar 100 persen.
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya memiliki rata-rata capaian realisasi sebesar 103,76 persen. Pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 capaian realisasi telah melampaui target atau realisasinya diatas 100 persen. Sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 capaian realisasinya dibawah 100 persen. Capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 85,91 persen.
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus selama periode 2016-2020 realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata 60,00 persen karena pada tahun 2016 dan 2017 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak dianggarkan. Adapun, pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 realisasinya telah sesuai target yang ditetapkan atau mencapai 100 persen
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya selama periode 2016-2020 belum mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata 42,50 persen karena pada tahun 2017 dan 2020 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya tidak dianggarkan. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100 persen.
- Pendapatan Lainnya pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020 telah melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2018 realisasi tidak mencapai target dengan capaian sebesar 0,18 persen. Rata-rata capaian pendapatan lainnya selama periode 2016-2020 sebesar 83,56 persen.

## 2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- Urusan Pemerintahan Wajib tidak terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- Urusan Pemerintahan Pilihan, dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

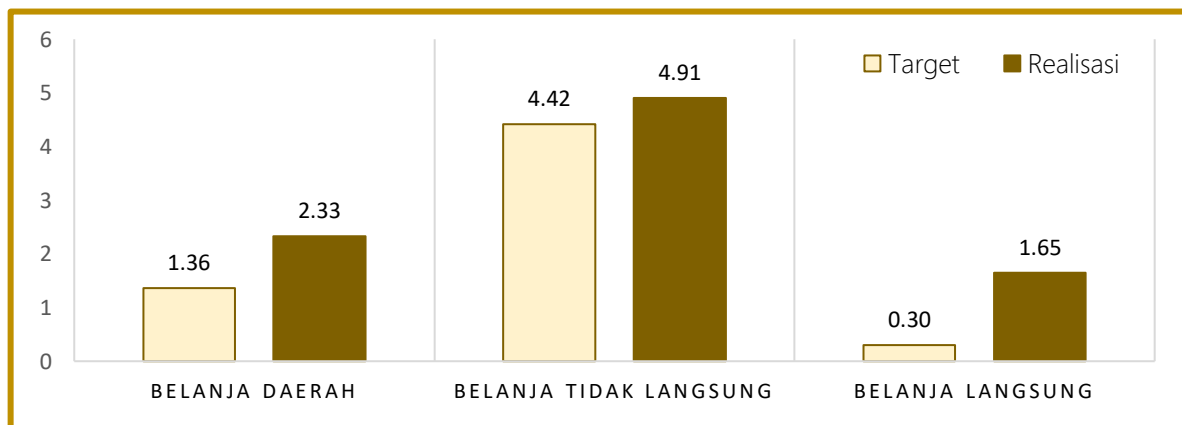
Kelompok Belanja Daerah pada tahun 2016-2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; dikelompokkan menurut jenis belanja meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; dikelompokkan menurut jenis belanja meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pada tahun 2016-2020, alokasi target anggaran dan realisasi Belanja Daerah di Kota Mataram berfluktuatif. Rata-rata pertumbuhan target anggaran Belanja Daerah selama periode 2016-2020 sebesar 1,36 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah mencapai 2,33 persen.

Rata-rata Pertumbuhan target anggaran dan realisasi Belanja Daerah, digambarkan dalam Grafik berikut:

Grafik 3.5  
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Capaian realisasi Belanja Daerah selama tahun 2016-2020 telah mendekati target anggaran yang direncanakan dengan rata-rata capaian sebesar 93,73 persen. Capaian yang tertinggi penyerapan anggarannya terjadi pada tahun 2020 mencapai 97,58 persen, sedangkan penyerapan yang terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 91,38. Untuk lebih jelasnya perkembangan target anggaran dan capaian realisasi Belanja Daerah di Kota Mataram Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10  
Capaian Realisasi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAAN (%)
2016	1.421.368.181.842,00	1.330.717.743.924,42	93,62

2017	1.545.623.542.994,58	1.412.407.233.825,26	91,38
2018	1.539.831.584.105,02	1.435.553.089.992,39	93,23
2019	1.561.167.913.292,05	1.449.112.047.541,41	92,82
2020	1.493.821.861.599,54	1.457.702.553.197,18	97,58
<b>RATA-RATA</b>			<b>93,73</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

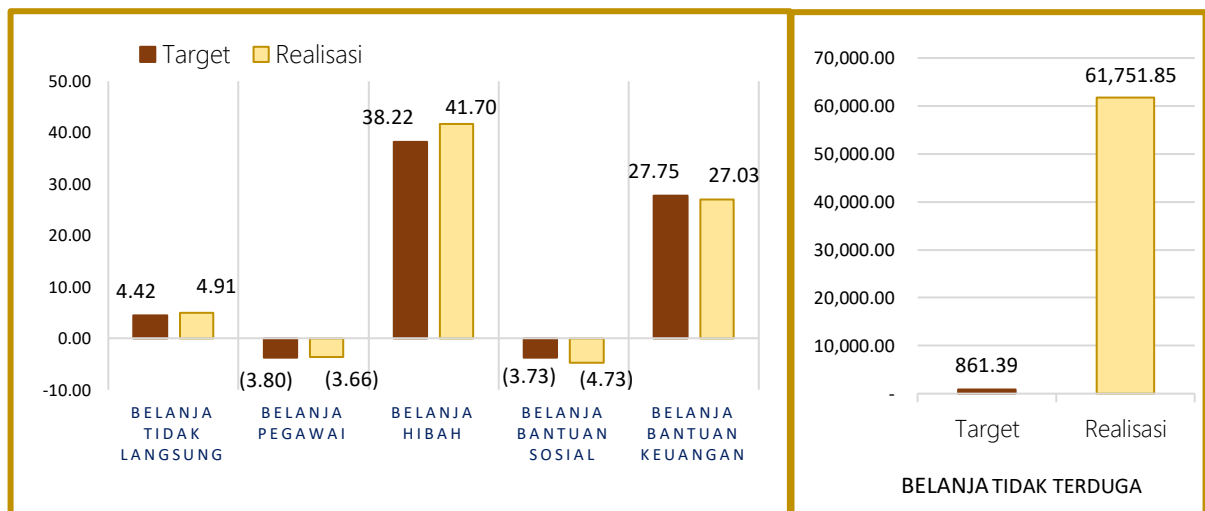
### 1) Belanja Tidak Langsung

Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung di Kota Mataram selama tahun 2016-2020 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Pada tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan target anggaran Belanja Tidak Langsung mencapai 4,42 persen berada dibawah rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 4,91 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Belanja Tidak Terduga baik rata-rata pertumbuhan target anggaran maupun realisasinya. Rata-rata pertumbuhan target anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar 861,39 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 61.751,85 persen. Hal ini sebagai dampak mewabahnya COVID-19 dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa yang menjadi prioritas untuk segera ditangani. Pada tahun 2020, pembebanan anggaran pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan pada komponen Belanja Tidak Terduga, sebagaimana Grafik 3.6 berikut.

Grafik 3.6

Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Rata-rata capaian realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 92,64 berada di bawah rata-rata capaian realisasi Belanja Daerah sebesar 93,73. Capaian tertinggi Belanja Tidak Langsung terjadi pada tahun 2020 mencapai 94,43 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 91,12 persen. Target anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung di Kota Mataram Tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11

Capaian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	650.165.293.739,79	607.986.508.674,00	93,51
2017	607.907.046.576,22	553.923.497.789,00	91,12

2018	585.460.664.595,19	543.268.225.948,10	92,79
2019	601.146.560.902,89	549.197.776.038,10	91,36
2020	752.475.917.439,59	710.569.046.835,00	94,43
<b>RATA-RATA</b>			<b>92,64</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Secara umum rata-rata capaian realisasi per jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga selama periode 2016-2020 belum mencapai 100 persen. Rata-rata capaian tertinggi jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Bantuan Keuangan dengan capaian sebesar 96,60 persen, sedangkan capaian terendah pada Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Terduga sebesar 54,69 persen.

Perkembangan capaian Belanja Tidak Langsung dirinci per jenis belanja sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.12

**Capaian Belanja Tidak Langsung per Jenis Belanja Tahun 2016-2020**

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
2016	604.179.991.659,49	566.359.394.373,00	93,74
2017	545.118.429.699,18	503.924.917.657,00	92,44
2018	520.869.100.065,19	492.668.006.347,10	94,59
2019	538.641.061.238,89	499.915.410.459,10	92,81
2020	514.985.448.739,59	485.557.736.722,00	94,29
<b>RATA-RATA</b>			<b>93,57</b>
<b>BELANJA HIBAH</b>			
2016	26.364.821.000,00	24.164.891.400,00	91,66
2017	33.310.186.775,00	26.617.650.994,00	79,91
2018	41.494.155.750,00	33.186.855.758,00	79,98
2019	40.286.926.000,00	34.058.186.511,00	84,54
2020	82.535.908.700,00	78.108.234.767,00	94,64
<b>RATA-RATA</b>			<b>86,14</b>
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>			
2016	17.652.682.300,30	15.774.617.500,00	89,36
2017	23.010.631.322,04	20.008.020.000,00	86,95
2018	15.684.610.000,00	13.223.484.329,00	84,31
2019	15.447.360.000,00	13.033.790.000,00	84,38
2020	13.603.210.000,00	11.676.200.000,00	85,83
<b>RATA-RATA</b>			<b>86,17</b>
<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>			
2016	912.798.780,00	823.651.340,00	90,23
2017	912.798.780,00	912.798.780,00	100,00
2018	912.798.780,00	912.798.780,00	100,00
2019	2.303.043.338,00	2.136.185.770,00	92,75
2020	1.351.350.000,00	1.351.350.000,00	100,00
<b>RATA-RATA</b>			<b>96,60</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
2016	1.055.000.000,00	863.954.061,00	81,89
2017	5.555.000.000,00	2.460.110.358,00	44,29

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	6.500.000.000,00	3.277.080.734,00	50,42
2019	4.468.170.326,00	54.203.298,00	1,21
2020	140.000.000.000,00	133.875.525.346,00	95,63
		<b>RATA-RATA</b>	<b>54,69</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan data Tabel 3.12 di atas, bahwa capaian masing-masing jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:

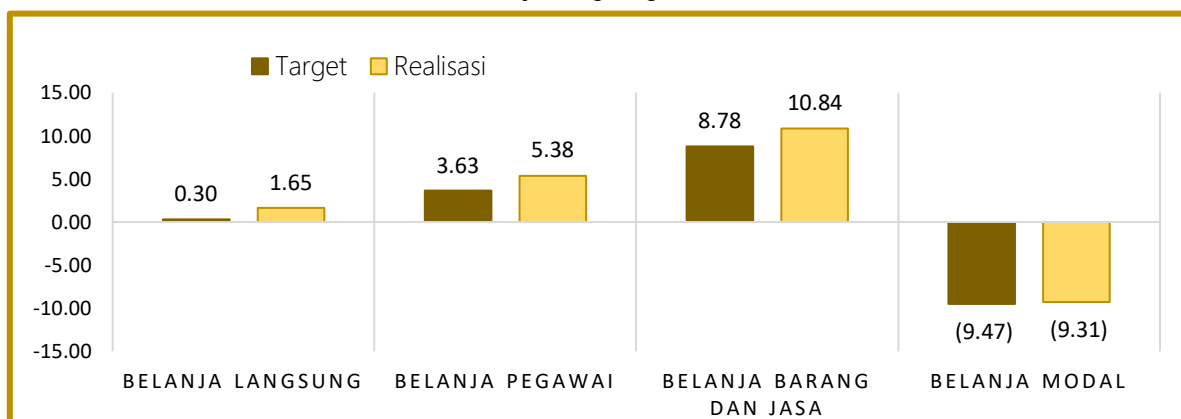
- Belanja Pegawai selama periode 2016-2020 capaian realisasinya secara umum mendekati target anggaran yang ditetapkan, rata-rata capaiannya sebesar 93,57 persen. Capaian tertinggi Belanja Pegawai terjadi pada tahun 2018 sebesar 94,59 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 92,44 persen.
- Belanja Hibah tahun 2016-2020 memiliki rata-rata capaian realisasi sebesar 86,14 persen berada dibawah rata-rata capaian realisasi Belanja Tidak Langsung. Capaian tertinggi Belanja Hibah terjadi pada tahun 2020 sebesar 94,64 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 79,91 persen.
- Belanja Bantuan Sosial memiliki rata-rata capaian realisasi sebesar 86,17 persen dan merata capaian realisasinya selama tahun 2016-2020. Capaian tertinggi belanja bantuan sosial terjadi pada tahun 2016 sebesar 89,36 persen, sedangkan pada tahun 2018 capaian realisasinya paling rendah yaitu 84,31 persen.
- Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2020 capaian realisasinya sesuai target anggaran sebesar 100 persen. Pada tahun 2016 capaian realisasinya sebesar 90,23 persen merupakan capaian terendah Belanja Bantuan Keuangan.
- Belanja Tidak Terduga tahun 2016-2020 memiliki rata-rata capaian realisasi sebesar 54,69 persen menjadi rata-rata capaian terendah pada komponen Belanja Tidak Langsung. Capaian tertinggi Belanja Tidak Terduga terjadi pada tahun 2020 sebesar 95,63 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,21 persen dari target anggaran yang ditetapkan.

## 2) Belanja Langsung

Pada tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan target anggaran Belanja Langsung sebesar 0,30 persen berada dibawah rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Langsung sebesar 1,65 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Belanja Barang dan Jasa untuk rata-rata pertumbuhan target anggaran sebesar 8,78 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 10,84 persen. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung di Kota Mataram tahun 2016-2020, sebagaimana digambarkan Grafik berikut.



Grafik 3.7  
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Langsung Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Capaian Belanja Langsung di Kota Mataram secara umum sudah mendekati target yang telah direncanakan, rata-rata pencapaian selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 94,66 persen. Terjadi pelampauan target Belanja Langsung pada tahun 2020 mencapai 100,78 persen. Untuk jelasnya target anggaran dan realisasi Belanja Langsung di Kota Mataram Tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.13  
Capaian Realisasi Belanja Langsung Kota Mataram Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	771.202.888.102,21	722.731.235.250,42	93,71
2017	937.716.496.418,36	858.483.736.036,26	91,55
2018	954.370.919.509,83	892.284.864.044,29	93,49
2019	960.021.352.389,16	899.914.271.503,31	93,74
2020	741.345.944.159,95	747.133.506.362,18	100,78
		<b>RATA-RATA</b>	<b>94,66</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Secara umum rata-rata capaian realisasi per jenis belanja pada Belanja Langsung selama periode 2016-2020 berada pada kisaran 90 persen. Rata-rata capaian tertinggi adalah Belanja Barang dan Jasa mencapai 98,14 persen, sedangkan capaian terendah adalah Belanja Modal mencapai 90,98 persen.

Perkembangan capaian Belanja Langsung dirinci per jenis belanja sebagaimana Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14  
Capaian Belanja Langsung per jenis Belanja Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
2016	93.755.834.600,00	84.052.886.026,00	89,65
2017	134.334.263.310,00	126.167.471.542,00	93,92
2018	120.750.500.400,00	106.474.981.226,00	88,18
2019	95.890.745.517,00	90.990.837.423,00	94,89
2020	97.757.056.070,00	92.401.084.333,00	94,52
		<b>RATA-RATA</b>	<b>92,23</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			

TAHUN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	318.213.675.306,00	305.241.359.109,42	95,92
2017	405.950.691.362,00	397.822.750.256,36	98,00
2018	481.228.376.382,83	468.987.657.631,94	97,46
2019	506.383.335.066,51	477.362.490.415,57	94,27
2020	424.314.414.590,95	445.666.010.694,18	105,03
		<b>RATA-RATA</b>	<b>98,14</b>
BELANJA MODAL			
2016	359.233.378.196,21	333.436.990.115,00	92,82
2017	397.431.541.746,36	334.493.514.237,90	84,16
2018	352.392.042.727,00	316.822.225.186,35	89,91
2019	357.747.271.805,65	331.560.943.664,74	92,68
2020	219.274.473.499,00	209.066.411.335,00	95,34
		<b>RATA-RATA</b>	<b>90,98</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Berdasarkan data diatas, bahwa capaian masing-masing jenis belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut:

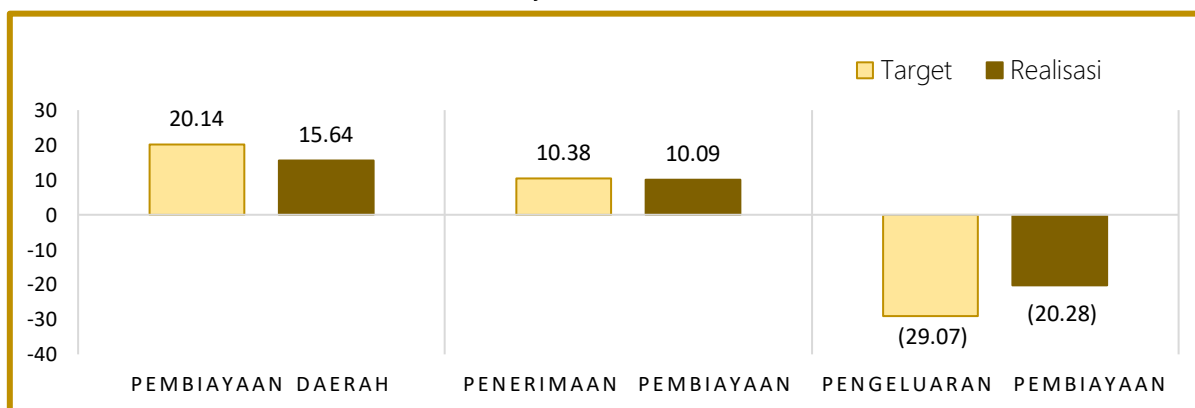
- Belanja Pegawai capaian realisasinya berfluktuatif selama periode 2016-2020, rata-rata capaiannya sebesar 92,23 persen. Capaian tertinggi Belanja Pegawai terjadi pada tahun 2019 sebesar 94,89 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 88,18 persen.
- Belanja Barang dan Jasa selama periode 2016-2020 capaian realisasinya mendekati target anggaran yang telah direncanakan, rata-rata capaiannya sebesar 98,14 persen. Terdapat pelampauan target pada tahun 2020 rata-rata capaiannya 105,03 persen. Rata-rata capaian terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 94,27 persen.
- Belanja Modal memiliki rata-rata capaian sebesar 90,98 persen pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Capaian tertinggi Belanja Modal terjadi pada tahun 2020 sebesar 95,34 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 84,16 persen.

### 3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2016-2021, rata-rata pertumbuhan target anggaran Pembiayaan Daerah sebesar 20,14 persen berada diatas rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah sebesar 15,64 persen. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah tahun 2016-2020 sebagaimana digambarkan Grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.8  
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Rata-rata capaian realisasi pembiayaan daerah selama 5 tahun terakhir melampaui target mencapai 107,61 persen, kecuali pada tahun 2017 capaian realisasinya sebesar 99,11 persen. Capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 120,06 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.15  
Capaian Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2016	63.561.117.271,00	69.468.800.314,01	109,29
2017	121.338.684.861,37	120.254.914.457,23	99,11
2018	102.049.542.168,02	122.524.978.995,47	120,06
2019	85.101.905.632,05	93.268.713.887,65	109,60
2020	103.952.379.326,39	103.955.379.326,39	100,00
		<b>RATA-RATA</b>	<b>107,61</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Secara umum rata-rata capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan selama periode 2016-2020 berada di atas 100 persen kecuali realisasi pada tahun 2016 dan tahun 2017 dibawah 100 persen. Secara umum capaian Pengeluaran Pembiayaan berada dibawah 100 persen yaitu sebesar 83,99 persen, hanya capaian pada tahun 2017 yang sesuai target mencapai 100 persen. Perkembangan capaian Pembiayaan Daerah dirinci per jenis pembiayaan sebagaimana Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16  
Capaian Pembiayaan Daerah per Jenis Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
2016	83.961.117.271,00	83.920.800.314,01	99,95
2017	136.790.684.861,37	135.706.914.457,23	99,21
2018	119.242.637.527,02	131.920.574.354,47	110,63
2019	97.599.405.632,05	105.088.713.887,65	107,67
2020	106.952.379.326,39	106.952.379.326,39	100,00
		<b>RATA-RATA</b>	<b>103,49</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
2016	20.400.000.000,00	14.452.000.000,00	70,84
2017	15.452.000.000,00	15.452.000.000,00	100,00

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	17.193.095.359,00	9.395.595.359,00	54,65
2019	12.497.500.000,00	11.820.000.000,00	94,58
2020	3.000.000.000,00	2.997.000.000,00	99,90
		<b>RATA-RATA</b>	<b>83,99</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Realisasi pembiayaan netto di Kota Mataram selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17  
Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2016-2020

URAIAN	PEMBIAYAAN NETTO (Rp.)				
	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.920.800.314,01	135.706.914.457,23	131.920.574.354,47	105.088.713.887,65	106.952.379.326,39
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.452.000.000,00	15.452.000.000,00	9.395.595.359,00	11.820.000.000,00	2.997.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>69.468.800.314,01</b>	<b>120.254.914.457,23</b>	<b>122.524.978.995,47</b>	<b>93.268.713.887,65</b>	<b>103.955.379.326,39</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

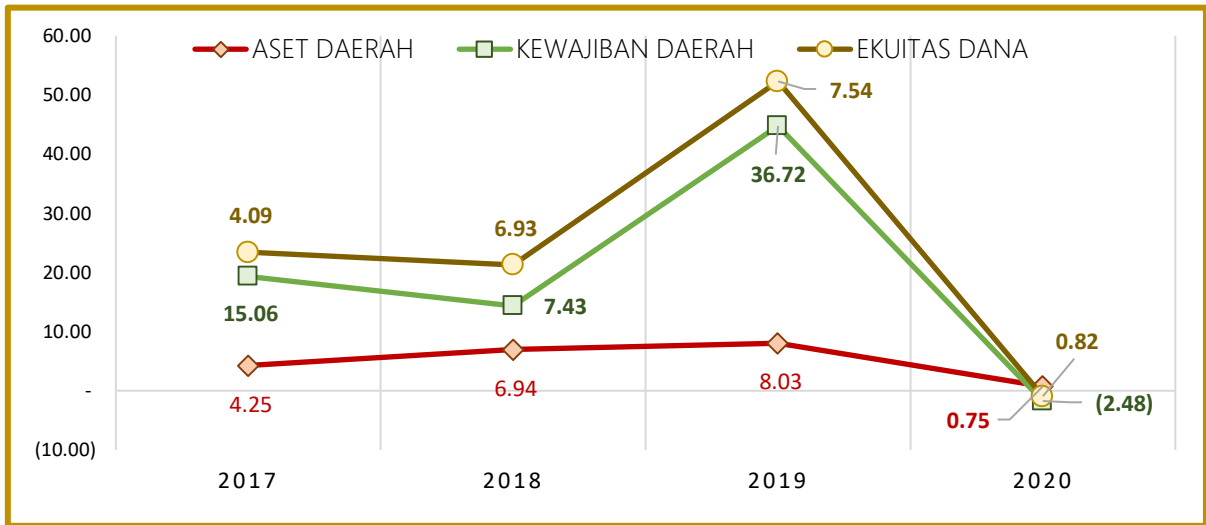
### 3.1.2. NERACA DAERAH

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah berfungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Perkembangan rata-rata aset Kota Mataram Tahun 2016-2020 mencapai 4,99 persen, rata-rata pertumbuhan kewajiban mencapai 14,18 persen dan ekuitas mengalami rata-rata pertumbuhan mencapai 4,85 persen. Untuk jelasnya pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Mataram 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.9 dan rincian per uraian neraca pada Tabel 3.18

Grafik 3.9  
Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Tabel 3.18  
Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	NERACA PEMERINTAH KOTA MATARAM (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>192.083.976.890,25</b>	<b>204.810.586.289,44</b>	<b>200.685.548.323,87</b>	<b>192.012.094.145,82</b>	<b>153.120.545.994,01</b>	<b>-4,99</b>
1.1.1	Kas di Kas Daerah	99.354.881.558,23	16.337.485.698,52	19.391.129.850,64	25.307.797.005,19	11.210.681.409,99	-22,51
1.1.2	Deposito Berjangka Kurang dari 3 Bulan	30.000.000.000,00	110.000.000.000,00	90.000.000.000,00	75.000.000.000,00	25.000.000.000,00	41,29
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	211.425.480,00	246.521.965,00	49.436,00	542.480,00	256.853.732,00	12.040,50
1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	70.910.529,00	11.347.000,00	4,00
1.1.5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	1.446.391.685,14	1.688.263.202,76	1.535.403.189,59	3.337.417.302,31	4.153.706.908,69	37,37
1.1.6	Kas di Bendahara FKTP	5.625.853.547,00	4.594.508.511,33	2.835.792.473,00	2.161.068.283,47	2.407.171.199,67	-17,25
1.1.7	Kas di Bendahara BOS	562.477.394,00	683.212.998,00	720.861.105,32	2.725.804.894,07	785.058.404,92	58,48
1.1.8	Kas Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.1.9	Piutang Pajak	40.925.400.103,25	44.454.824.143,25	50.193.949.010,94	53.812.292.258,33	61.084.407.003,21	10,56
1.1.10	Penyisihan Piutang Pajak	(31.835.911.217,23)	(33.994.566.018,16)	(35.671.789.489,20)	(37.308.555.886,66)	(39.660.675.218,28)	5,65
1.1.11	Piutang Retribusi	399.620.256,00	466.209.608,00	1.032.683.379,00	1.243.951.178,00	1.832.226.049,00	51,48
1.1.12	Penyisihan Piutang Retribusi	(210.641.519,20)	(190.735.240,20)	(183.881.724,80)	(284.714.574,40)	(433.710.311,40)	23,53
1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	18.575.695.220,00	20.637.174.190,00	23.460.861.600,00	11.369.383.407,00	8.147.207.854,00	-13,77
1.1.14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	23.037.274,00	12.241.776,00	17.134.467,05	6.965.940,00	11.279.328,00	-1,08
1.1.15	Piutang Lainnya	14.518.454.917,97	34.964.241.058,67	36.904.498.924,30	54.808.593.155,57	81.483.776.387,41	60,89
1.1.16	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.548.783.416,75)	(8.685.393.598,00)	(9.077.716.397,75)	(13.518.968.892,69)	(20.368.239.486,94)	62,21
1.1.17	Persediaan	16.036.075.607,84	13.596.597.994,27	19.526.572.499,78	13.279.607.066,63	17.094.555.733,74	6,28
<b>1.2</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>2.194.623.595.579,69</b>	<b>2.254.526.844.531,39</b>	<b>2.439.390.164.031,26</b>	<b>2.630.834.557.838,97</b>	<b>2.679.771.989.929,06</b>	<b>5,16</b>
1.2.1	Tanah	829.700.139.638,00	874.505.341.907,00	939.191.847.549,00	1.014.125.897.815,00	1.050.034.844.291,00	6,08
1.2.2	Peralatan dan Mesin	395.322.024.658,51	493.769.399.433,54	573.090.052.404,42	636.078.126.251,36	731.955.305.403,79	16,76

NO	URAIAN	NERACA PEMERINTAH KOTA MATARAM (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
1.2.3	Gedung dan Bangunan	804.599.259.498,37	868.508.299.329,12	922.126.377.369,41	1.009.699.628.042,41	1.034.447.614.625,00	6,52
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	669.619.156.322,94	777.477.325.594,94	868.030.004.026,94	967.167.718.024,94	1.015.430.292.534,97	11,04
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	34.905.050.868,39	35.672.202.278,09	36.229.421.456,09	36.989.791.459,09	9.468.616.543,75	-17,14
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.306.089.980,00	12.965.394.761,00	25.409.073.622,84	16.706.457.470,16	21.819.547.086,69	17,96
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(555.828.125.386,52)	(808.371.118.772,30)	(924.686.612.397,44)	(1.049.933.061.223,99)	(1.183.384.230.556,14)	21,52
<b>1.3</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>267.265.859.889,40</b>	<b>272.088.023.532,84</b>	<b>279.355.531.061,55</b>	<b>298.547.862.119,94</b>	<b>304.084.916.831,14</b>	<b>3,30</b>
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	73.350.999,60	61.444.391,00	46.130.735,35	25.964.773,00	7.932.570,00	-38,58
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00	0,00
1.3.4	Aset Tak Berwujud	1.579.194.800,00	1.987.997.700,00	1.922.232.700,00	4.105.428.900,00	4.429.305.300,00	36,01
1.3.5	Aset Lain-Lain	34.696.693.026,80	39.282.076.134,84	46.816.533.479,20	64.087.513.953,94	70.664.304.997,14	19,89
1.3.6	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(212.108.937,00)	(372.224.693,00)	(558.095.853,00)	(799.775.507,00)	(2.145.356.036,00)	84,24
<b>1.4</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>136.931.095.151,63</b>	<b>178.204.847.012,79</b>	<b>192.216.209.124,65</b>	<b>240.147.997.676,43</b>	<b>249.626.397.325,91</b>	<b>16,72</b>
	<b>JUMLAH ASET DAERAH</b>	<b>2.790.904.527.510,97</b>	<b>2.909.630.301.366,46</b>	<b>3.111.647.452.541,33</b>	<b>3.361.542.511.781,16</b>	<b>3.386.603.850.080,12</b>	<b>4,99</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>42.101.330.640,14</b>	<b>48.415.758.011,14</b>	<b>52.032.969.560,50</b>	<b>71.085.655.345,50</b>	<b>69.383.839.722,50</b>	<b>14,17</b>
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.494.115.207,14	1.629.418.021,14	9.312.751.522,50	1.562.139.825,50	1.551.030.151,50	99,16
2.1.2	Uang Muka dari Kas Daerah	-	-	-	-	-	0,00
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	40.607.215.433,00	46.786.339.990,00	42.720.218.038,00	69.523.515.520,00	67.832.809.571,00	16,71
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>28.055.557,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>106.666.666,67</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>44,97</b>
2.2.1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	0,00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	28.055.557,00	58.000.000,00	40.000.000,00	106.666.666,67	40.000.000,00	44,97
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>42.129.386.197,14</b>	<b>48.473.758.011,14</b>	<b>52.072.969.560,50</b>	<b>71.192.322.012,17</b>	<b>69.423.839.722,50</b>	<b>14,18</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>2.748.775.141.367,83</b>	<b>2.861.156.543.355,32</b>	<b>3.059.574.482.980,83</b>	<b>3.290.350.189.768,99</b>	<b>3.317.180.010.357,62</b>	<b>4,85</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.790.904.527.564,97</b>	<b>2.909.630.301.366,46</b>	<b>3.111.647.452.541,33</b>	<b>3.361.542.511.781,16</b>	<b>3.386.603.850.080,12</b>	<b>4,99</b>

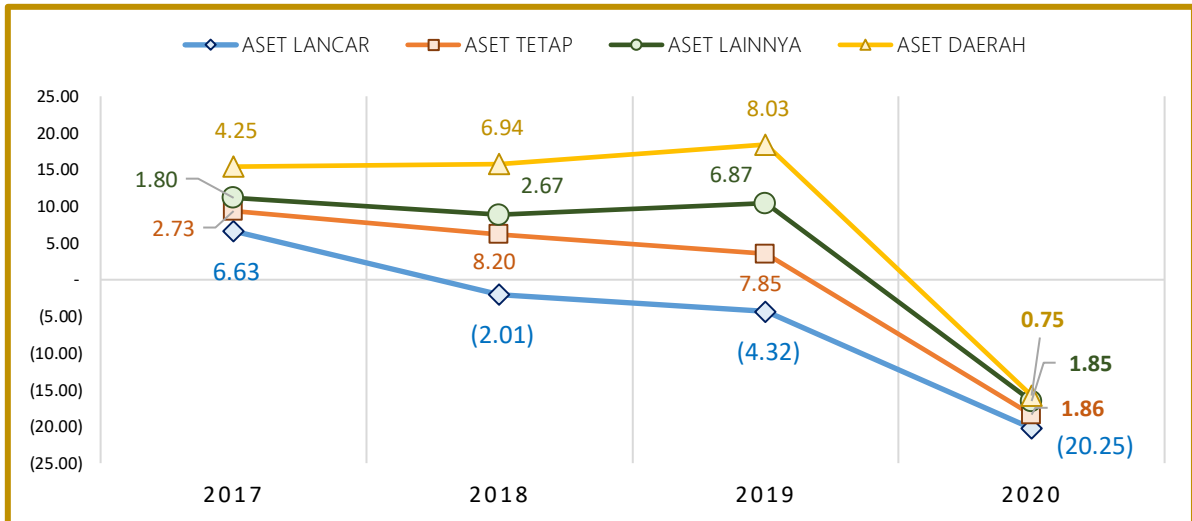
Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

## 1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan Tabel 3.18, secara umum aset Pemerintah Kota Mataram selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4,99 persen. Rata-rata pertumbuhan berdasarkan jenis aset yaitu aset lancar memiliki rata-rata pertumbuhannya minus yaitu -4,99 persen, aset tetap rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,16 persen, dan aset tetap lainnya rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,30 persen. Berikut, pertumbuhan Aset Pemerintah Kota Mataram kurun waktu 2016-2020 sebagaimana digambarkan Grafik 3.10 dibawah ini.

Grafik 3.10  
Rata-rata Pertumbuhan Aset Pemerintah Kota Mataram tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Aset diklasifikasikan ke dalam **aset lancar, aset tetap dan aset lainnya**. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

#### 1) Aset Lancar

Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan minus sebesar -4,99 persen. Kontribusi terbesar dari aset lancar pada tahun 2020 berasal dari piutang lainnya sebesar Rp. 81.483.776.387,41. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan tertinggi di dalam item aset lancar adalah komponen Kas di Bendahara Pengeluaran mencapai 12.040,50 persen. Pertumbuhan komponen dalam Aset Lancar di Kota Mataram Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19  
Rata-rata Pertumbuhan Komponen Aset Lancar Tahun 2016-2020

Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
<b>ASET LANCAR</b>	<b>6,63</b>	<b>(2,01)</b>	<b>(4,32)</b>	<b>(20,25)</b>	<b>(4,99)</b>
Kas di Kas Daerah	(83,56)	18,69	30,51	(55,70)	(22,51)
Deposito Berjangka Kurang dari 3 Bulan	266,67	(18,18)	(16,67)	(66,67)	41,29
Kas di Bendahara Pengeluaran	16,60	(99,98)	997,34	47.248,06	12.040,50
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	100,00	(84,00)	4,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	16,72	(9,05)	117,36	24,46	37,37
Kas di Bendahara FKTP	(18,33)	(38,28)	(23,79)	11,39	(17,25)
Kas di Bendahara BOS	21,46	5,51	278,13	(71,20)	58,48
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
Piutang Pajak	8,62	12,91	7,21	13,51	10,56
Penyisihan Piutang Pajak	6,78	4,93	4,59	6,30	5,65
Piutang Retribusi	16,66	121,51	20,46	47,29	51,48
Penyisihan Piutang Retribusi	(9,45)	(3,59)	54,84	52,33	23,53
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	11,10	13,68	(51,54)	(28,34)	(13,77)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(46,86)	39,97	(59,35)	61,92	(1,08)
Piutang Lainnya	140,83	5,55	48,51	48,67	60,89
Penyisihan Piutang Lainnya	144,74	4,52	48,92	50,66	62,21
Persediaan	(15,21)	43,61	(31,99)	28,73	6,28

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 2) Aset Tetap

Aset tetap Kota Mataram periode 2016-2020 memiliki rata-rata pertumbuhan positif mencapai 5,16 persen. Kontribusi terbesar dari Aset Tetap di Kota Mataram pada tahun 2020 adalah Aset tetap Tanah mencapai Rp.1.050.034.844.291,00. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada komponen Aset Tetap pada periode 2016-2020 adalah Akumulasi Penyusutan memiliki rata-rata sebesar 21,52 persen. Pertumbuhan komponen pada Aset Tetap di Kota Mataram selama kurun waktu 2016-2020, sebagaimana Tabel 3.20

Tabel 3.20  
Rata-rata Pertumbuhan Komponen Aset Tetap Tahun 2016-2020

Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
<b>ASET TETAP</b>	<b>2,73</b>	<b>8,20</b>	<b>7,85</b>	<b>1,86</b>	<b>5,16</b>
Tanah	5,40	7,40	7,98	3,54	6,08
Peralatan dan Mesin	24,90	16,06	10,99	15,07	16,76
Gedung dan Bangunan	7,94	6,17	9,50	2,45	6,52
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16,11	11,65	11,42	4,99	11,04
Aset Tetap Lainnya	2,20	1,56	2,10	(74,40)	(17,14)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(20,49)	95,98	(34,25)	30,61	17,96
Akumulasi Penyusutan	45,44	14,39	13,54	12,71	21,52

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 3) Aset Lainnya

Aset Lainnya di Kota Mataram selama periode 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,30 persen. Kontribusi terbesar pada Aset lainnya tahun 2020 bersumber dari komponen Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp.231.129.730.000,00. Rata-rata pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016-2020 pada komponen Amortisasi Aset Tidak Berwujud mencapai 84,24 persen. Lebih jelasnya perkembangan komponen Aset Lainnya di Kota Mataram sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.21  
Rata-rata Pertumbuhan Komponen Aset Tetap Tahun 2016-2020 (persen)

Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>1,80</b>	<b>2,67</b>	<b>6,87</b>	<b>1,85</b>	<b>3,30</b>
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(16,23)	(24,92)	(43,71)	(69,45)	(38,58)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
Aset Tak Berwujud	25,89	(3,31)	113,58	7,89	36,01
Aset Lain-Lain	13,22	19,18	36,89	10,26	19,89
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	75,49	49,94	43,30	168,24	84,24

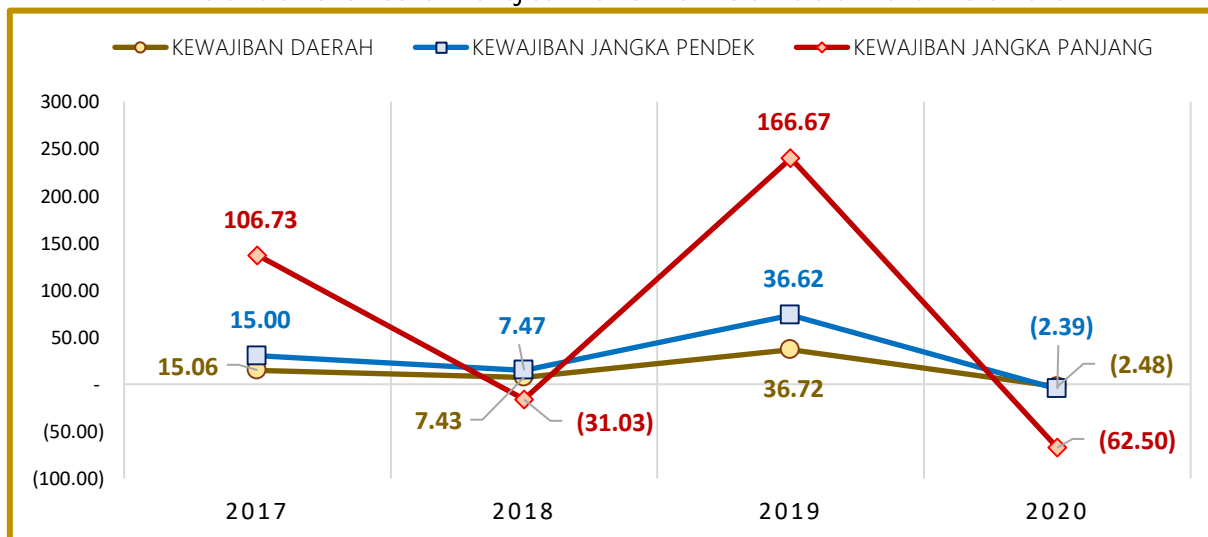
Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 2. KEWAJIBAN

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kota Mataram dibagi menjadi 2 (dua) jenisnya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban Kota Mataram pada neraca keuangan daerah secara umum mengalami peningkatan sebesar 4,99 persen. Pada tahun 2020, Kewajiban Daerah mengalami pertumbuhan negatif mencapai -2,49 persen dari tahun sebelumnya. Perkembangan Kewajiban Pemerintah Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagaimana Grafik berikut.

Grafik 3.11  
Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Pemerintah Kota Mataram tahun 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2020

### 1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Uang Muka dari Kas daerah, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Namun, untuk kewajiban jangka pendek yang ada di Kota Mataram hanya Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kontribusi terbesar pada tahun 2020 bersumber dari Utang Jangka Pendek Lainnya mencapai Rp. 67.932.909.571,00. Pertumbuhan rata-rata Kewajiban Jangka Pendek periode 2016-2020 mencapai 14,17 persen yang rinciannya dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.22  
Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2016-2020 (persen)

Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan
	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>15,00</b>	<b>7,47</b>	<b>36,62</b>	<b>(2,39)</b>	<b>14,17</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	9,06	471,54	(83,23)	(0,71)	99,16
Uang Muka dari Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	15,22	(8,69)	62,74	(2,43)	16,71

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan, terdiri dari Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang yang ada di Kota Mataram hanya Utang Jangka Panjang Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 mencapai 44,97 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 mencapai 166,67 persen. Berikut, perkembangan komponen Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Mataram tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23  
Rata-rata Pertumbuhan Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2016-2020 (persen)

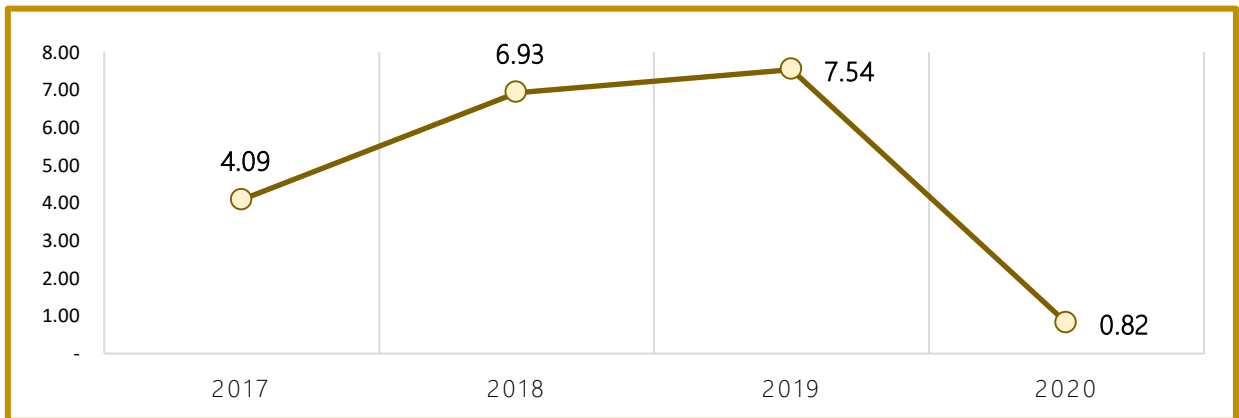
Uraian	Pertumbuhan (persen)				Rata-rata Pertumbuhan
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>106,73</b>	<b>(31,03)</b>	<b>166,67</b>	<b>(62,50)</b>	<b>44,97</b>
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	106,73	(31,03)	166,67	(62,50)	44,97

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 3. EKUITAS DANA

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh ekuitas dana pada neraca keuangan Pemerintah Kota Mataram mengalami rata-rata pertumbuhan mencapai 4,85 persen. Perkembangan Ekuitas Dana Periode 2016-2020 sebagaimana Grafik 3.12 berikut.

Grafik 3.12  
Pertumbuhan Ekuitas Dana Pemerintah Kota Mataram Periode 2016-2020



Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

### 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi otorisasi**, memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi perencanaan**, memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. **Fungsi pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Fungsi alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi distribusi**, mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Fungsi stabilisasi**, mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2020 terkait dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu ini dapat digunakan untuk melihat trend proporsi pengelolaan keuangan di masa lalu sehingga akan memudahkan dalam memprediksi model pengelolaan keuangan di masa mendatang. Selain itu kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu perlu dievaluasi pengelolaannya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Evaluasi kebijakan pengelolaan keuangan Kota Mataram dengan melihat kondisi pengelolaan keuangan beberapa tahun sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi keuangan dan kinerja Kota Mataram saat ini.

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

## 1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Fokus utama pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Mataram adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang timbul karena adanya selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah melalui penggalian sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat miskin dan dunia usaha.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram dalam kurun waktu 2016 sampai tahun 2020 disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah, diarahkan pada:

### 1) Arah Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, melalui:

- Melakukan pemutakhiran data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara kontinu.
- Memantapkan regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya;
- Meningkatkan layanan pemungutan Pajak Daerah melalui Smart Tax bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah, pembayaran pajak daerah non tunai melalui EDC, ATM/ Mobile Banking, Transfer dan e-money, pemasangan alat rekam pajak (tapping box) pada wajib pajak hotel, restoran dan parkir.
- Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan daerah;
- Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- Menyediakan layanan keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah serta Gebyar PBB;
- Melakukan insentif atau rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- Menyediakan sarana informasi dan publikasi yang mudah diakses melalui berbagai media dan melalui <https://www.bkd.mataramkota.go.id> serta sarana pelayanan pengaduan melalui kotak kepuasan pelayanan

### 2) Arah Kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan

- Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variabel atau komponen yang mempengaruhi perhitungan alokasi DAU dan DAK.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
- Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan Dana Perimbangan dengan instansi/lembaga.

### 3) Arah Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Meningkatkan kinerja pemerintah untuk memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana insentif Daerah
- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian Hibah dari pemerintah, swasta maupun perorangan.

## 2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Belanja Daerah Kota Mataram merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka percepatan pencapaian pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung periode tahun 2016-2020, meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1) Belanja Pegawai

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### 2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

### 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

### 5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran rencana.
- b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

## 6) Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

## 7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Langsung periode tahun 2016-2020, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta percepatan pencapaian prioritas pembangunan;
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 3) Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran, dan jumlah personilnya.

## 3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

**Pembiayaan Daerah** adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.



- Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah secara teknis sebagai berikut:

1) **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja.

2) **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

### 3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam proporsi penggunaan anggaran dibahas mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan keuangan daerah, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Mataram selama periode 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan 5 (lima) tahun berikutnya dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisisnya sebagai berikut.

#### 1. ANALISIS PROPORSI REALISASI BELANJA DAERAH DIBANDING ANGGARAN

Dalam analisis proporsi realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran belanja meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Proporsi realisasi Belanja antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang paling idela terjadi pada tahun 2020, yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar 47,57 persen dan proporsi Belanja Langsung sebesar 50,01 persen. Proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Mataram selama tahun 2016-2020 dijelaskan Tabel 3.24 berikut.

Tabel 3.24  
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Mataram Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proporsi Realisasi Belanja (persen)				
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>42,77</b>	<b>35,84</b>	<b>35,28</b>	<b>35,18</b>	<b>47,57</b>
1.1	Belanja Pegawai	39,85	32,60	31,99	32,02	32,50
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah	1,70	1,72	2,16	2,18	5,23
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,11	1,29	0,86	0,83	0,78
1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,06	0,06	0,06	0,14	0,09
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,06	0,16	0,21	0,003	8,96
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>50,85</b>	<b>55,54</b>	<b>57,95</b>	<b>57,64</b>	<b>50,01</b>
2.1	Belanja Pegawai	5,91	8,16	6,91	5,83	6,19
2.2	Belanja Barang Dan Jasa	21,48	25,74	30,46	30,58	29,83

No.	Uraian	Proporsi Realisasi Belanja (persen)				
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
2.3	Belanja Modal	23,46	21,64	20,58	21,24	14,00

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Pada Belanja Tidak Langsung, porsi terbesar dianggarkan untuk belanja pegawai yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan porsi yang besar terhadap Belanja Langsung dalam APBD maka diharapkan dapat mempercepat tersedianya sarana dan prasarana layanan publik yang baik, yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Penyediaan SPM daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui pengaturan pola alokasi belanja daerah dalam APBD yang diharapkan dapat mendorong peningkatan *public services* sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah.

## 2. ANALISIS PROPORSI BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR

Proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama lima tahun terakhir, dirinci sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.25  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mataram Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rp.)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>566,359</b>	<b>503,924</b>	<b>492,668</b>	<b>499,915</b>	<b>485,557</b>
1.1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	404,025	377,069	419,643	423,664	409,092
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan	151,603	114,990	60,084	62,159	62,543
1.3	Belanja Penerimaan Anggota Dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH	4,131	4,464	5,619	5,734	7,953
1.4	Belanja Pemungutan Daerah	6,599	7,400	7,321	8,356	5,968
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>159,372</b>	<b>226,730</b>	<b>225,431</b>	<b>221,345</b>	<b>195,753</b>
2.1	Belanja Honorarium PNS/Non PNS	93,589	129,155	142,265	143,945	142,730
2.2	Belanja Uang Lembur	0,077	0,122	0,00	0,006	0,00
2.3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,481	0,792	0,344	0,243	0,02
2.4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1,782	3,721	1,941	1,837	0,503
2.5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,638	0,581	0,677	0,067	0,347
2.6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	0,683	0,837	1,146	0,844	0,718
2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,907	3,162	1,791	1,951	0,571
2.8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1,502	1,798	1,142	1,328	1,008
2.9	Belanja Perjalanan Dinas	24,844	36,674	35,120	35,430	15,644
2.10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan dll)	32,864	49,884	41,001	35,692	34,208
	<b>TOTAL</b>	<b>725,732</b>	<b>730,655</b>	<b>718,099</b>	<b>721,261</b>	<b>681,311</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung selama tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi belanja pemenuhan aparatur sebesar Rp. 725.732.139.087,00,00 selanjutnya menurun menjadi sebesar Rp. 681.311.356.040,36 pada tahun 2020. Penurunan pemenuhan kebutuhan Aparatur seiring dengan efisiensi dan keberpihakan kebijakan untuk memenuhi belanja pembangunan/belanja publik.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2016-2020 sebagaimana dirincikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.26  
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2016	725.732.139.087,00	1.345.169.743.924,42	53,95
2	Tahun Anggaran 2017	730.655.591.640,00	1.427.859.233.825,26	51,17
3	Tahun Anggaran 2018	718.099.718.648,74	1.444.948.685.351,39	49,70
4	Tahun Anggaran 2019	721.261.083.294,60	1.460.932.047.541,41	49,37
5	Tahun Anggaran 2020	691.311.356.040,36	1.460.699.553.197,18	46,69

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah 2021

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Mataram mengalami penurunan setiap tahunnya terhadap total pengeluaran (total belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah), yaitu dari 53,95 persen pada tahun 2016 menjadi 46,69 persen pada tahun 2020. Penurunan jumlah proporsi kebutuhan aparatur ini menjelaskan cukup berperannya kinerja Pemerintah Daerah dalam mengatur porsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Mataram dan lebih diarahkan untuk belanja pembangunan.

### 3. ANALISIS BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- 1) Analisis belanja daerah mencakup analisis terhadap:
  - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
    - Gaji dan tunjangan PNS dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah access yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
    - Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
    - Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
    - Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak III.
    - Belanja bantuan partai politik atau Belanja Hibah kepada Partai Politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja Langsung, meliputi:
- Belanja honorarium PNS, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi.
  - Belanja beasiswa pendidikan PNS.
  - Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).
  - Belanja Premi Asuransi
  - Belanja perawatan kendaraan bermotor (belanja pajak kendaraan bermotor, belanja KIR, STNK dll)
  - Belanja sewa gedung kantor, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya).

2) Analisis pengeluaran pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- c. Pembayaran pokok hutang:
- Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;
  - Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
  - Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
  - Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
  - Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;
  - Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
  - Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
  - Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
  - Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo; dan
  - Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.
- d. Pemberian pinjaman daerah:
- Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah; dan
  - Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.

Rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kota Mataram tahun 2016-2020 sebesar – 0,94 persen. Struktur Belanja Tidak Langsung dalam pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH, Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, maka nilai rata-rata pertumbuhan dari Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH lebih tinggi dibandingkan Belanja Gaji dan Tunjangan, yaitu sebesar 18,67 persen dan 0,53 persen. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 3.27).

Tabel 3.27  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
	<b>BELANJA</b>	<b>725.890.667.663,00</b>	<b>707.790.322.437,00</b>	<b>711.869.818.824,10,10</b>	<b>722.153.116.936,10</b>	<b>686.441.441.525,00</b>	<b>- 0,56</b>
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>560.584.005.880,00</b>	<b>497.436.931.437,00</b>	<b>486.259.680.127,10</b>	<b>492.471.861.639,10</b>	<b>480.561.354.817,00</b>	<b>- 3,66</b>
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	404.025.494.603,00	377.069.825.280,00	419.643.401.447,10	423.664.602.571,10	409.092.057.986,00	0,53
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan	151.603.079.937,00	114.990.307.377,00	60.084.479.900,00	62.159.960.288,00	62.543.307.611,00	- 16,96

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
1.3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH	4.131.780.000,00	4.464.000.000,00	5.619.000.000,00	5.734.500.000,00	7.953.780.000,00	18,67
1.4	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Belanja Bantuan Partai Politik/ Belanja Hibah kepada Partai Politik	823.651.340,00	912.798.780,00	912.798.780,00	912.798.780,00	972.209.220,00	4,33
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>165.306.661.783,00</b>	<b>210.353.391.000,00</b>	<b>225.610.138.697,00</b>	<b>229.681.255.297,00</b>	<b>228.852.141.812,00</b>	<b>8,99</b>
2.1	Belanja Honorarium PNS/ Non PNS	93.589.853.675,00	129.155.425.489,00	142.265.387.460,00	143.945.852.488,00	142.730.752.678,00	12,12
2.2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	481.900.000,00	792.500.000,00	344.100.000,00	243.000.000,00	20.000.000,00	- 28,32
2.3	Belanja Jasa Kantor	58.058.035.222,00	66.621.945.203,00	67.083.669.878,00	69.316.115.902,00	73.430.011.491,00	6,18
2.4	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	638.355.387,00	581.242.913,00	677.459.917,00	67.199.191,00	347.942.743,00	83,83
2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.770.320.749,00	9.143.342.495,00	11.307.241.547,00	11.356.728.016,00	11.247.896.900,00	10,20
2.6	Belanja Sewa Gedung, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.578.940.000,00	1.227.150.000,00	1.571.162.000,00	2.899.183.000,00	341.775.000,00	- 7,02
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN PENGELUARAN</b>	<b>14.452.000.000,00</b>	<b>15.452.000.000,00</b>	<b>9.395.595.359,00</b>	<b>11.820.000.000,00</b>	<b>2.997.000.000,00</b>	<b>- 20,28</b>
3.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.452.000.000,00	15.452.000.000,00	9.395.595.359,00	11.820.000.000,00	2.997.000.000,00	- 20,28
3.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (1 + 2)</b>		<b>740.342.667.663,00</b>	<b>723.242.322.437,00</b>	<b>721.265.414.183,10</b>	<b>733.973.116.936,10</b>	<b>712.410.496.629,00</b>	<b>- 0,94</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data diolah, 2021

### 3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

**Analisis Pembiayaan** bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui:

#### 1) ANALISIS DEFISIT RIIL ANGGARAN

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Penerimaan pendapatan dipergunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah serta kepada orang-orang atau badan-badan tertentu tanpa mengharapkan adanya balas jasa langsung. Pendapatan setelah diperhitungkan penerimaan transfer dari pemerintah dan pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah inilah sebagai pendapatan yang sudah siap dipakai untuk konsumsi dan saving.

Berdasarkan kebijakan pembiayaan Kota Mataram apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berdasarkan data kondisi SiLPA setiap tahunnya di Kota Mataram dalam kondisi yang fluktuatif. Kota Mataram mengalami defisit anggaran pada tahun 2017, 2018 dan 2020, defisit riil tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. (64.689.937.822,62). Pada tahun 2016 dan 2019 kondisi keuangan Kota Mataram mengalami surplus mencapai masing-masing Rp. 51.223.636.749,22 dan Rp. 1.863.665.438,74. Nilai SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan data tahun 2016-2020 tercatat tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar Rp.135.144.437.063,23. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28  
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Mataram Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)				
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
1	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	1.396.393.380.673,64	1.424.072.893.722,50	1.418.432.870.483,30	1.462.795.712.980,15	1.396.009.615.374,56
	Dikurangi Realisasi :					
2	BELANJA DAERAH	1.330.717.743.924,42	1.412.407.233.825,26	1.435.553.089.992,39	1.449.112.047.541,41	1.457.702.553.197,18
3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.452.000.000,00	15.452.000.000,00	9.395.595.359,00	11.820.000.000,00	2.997.000.000,00
<b>A</b>	<b>DEFISIT RIIL</b>	<b>51.223.636.749,22</b>	<b>(3.786.340.102,76)</b>	<b>(26.515.814.868,09)</b>	<b>1.863.665.438,74</b>	<b>(64.689.937.822,62)</b>
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	83.920.800.314,01	135.706.914.457,23	131.920.574.354,47	105.088.713.887,65	106.952.379.326,39
5	PENCAIRAN DANA CANDANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	PENERIMAAN PIUTANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0

No	Uraian	Anggaran (Rp)				
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
	DAERAH					
B	TOTAL REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	83.920.800.314,01	135.706.914.457,23	131.920.574.354,47	105.088.713.887,65	106.952.379.326,39
A - B	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	135.144.437.063,23	131.920.574.354,47	105.404.759.486,38	106.952.379.326,39	42.262.441.503,77

Sumber: BKD Kota Mataram, 2021

Terdapat perubahan Saldo Anggaran Lebih (PSAL) akibat adanya transaksi lain-lain berupa Saldo Akhir Dana BOS Tahun 2016 yang dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Mataram TA. 2017 sebesar Rp.562.477.394,00.

Berdasarkan data diatas, defisit riil anggaran Pemerintah Kota Mataram tahun 2017, 2018 dan 2020 tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah melalui Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.29  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Mataram

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL (%)				
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	163,83	(3.584,12)	(497,52)	5.638,82	(165,33)
2	PENCAIRAN DANA CANDANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	263,83	(3.484,12)	(397,52)	5.738,82	(65,33)

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 2) ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Perolehan SiLPA selama tahun 2016-2020 didominasi oleh sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, SiLPA tertinggi diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp.133.216.309.169,32, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 3.30  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Mataram Tahun 2016-2020**  
 (dalam Miliar Rp.)

No	URAIAN	TA. 2016		TA. 2017		TA. 2018		TA. 2019		TA. 2020	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
	<b>JUMLAH SILPA</b>										
1	PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD	8,736	10,41	19,454	14,34	4,128	3,13	1,022	0,97	42,856	40,07
2	PELAMPAUAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN	33,163	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PELAMPAUAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(3,313)	(3,95)	9,179	6,76	0,612	0,46	14,336	13,64	0,00	0,00
4	SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA	90,650	108,02	133,216	98,16	104,278	79,05	112,055	106,63	36,119	33,77
5	KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BELUM TERSELESAIKAN	42,129	50,20	48,473	35,72	52,072	39,47	71,192	67,74	69,423	64,91
6	KEGIATAN LANJUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2020

### 3) ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Jika angka SILPA positif maknanya bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran yang masih tersisa atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sedangkan, SILPA negative berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi sehingga perlu dicari solusi untuk menutup defisit yang ada.

Saldo kas neraca Kota Mataram pada tahun 2016 mencapai Rp.135.144.437.063,23 dan mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp.42.262.441.503,77, sehingga perhitungan Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.93.015.050.866,09 menjadi sebesar minus pada tahun 2020 yaitu Rp. (27.161.398.218,73). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.31  
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kota Mataram Tahun 2016-2020  
(dalam Miliar Rp.)

NO	URAIAN	SISA LEBIH (RIIL) PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (Rp.)				
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
1	SALDO KAS NERACA DAERAH	135,144	131,920	105,404	106,952	42,262
	DIKURANGI :					
2	KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BELUM TERSELESAIKAN	42,129	48,473	52,072	71,192	69,423
3	KEGIATAN LANJUTAN					
<b>SISA LEBIH (RIIL) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>93,015</b>	<b>83,446</b>	<b>53,331</b>	<b>35,760</b>	<b>(27,161)</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, maka segala biaya pegawai dan biaya operasional SKPD menjadi pengeluaran wajib yang perlu dipenuhi. Dalam pemahaman umum pengeluaran periodik tersebut merupakan biaya tetap (*fixcost*) dalam pelaksanaan pemerintahan. Biaya tetap tersebut antara lain berupa belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, belanja bunga utang, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja BLUD, belanja yang bersumber dana dari pemerintah dan pemerintah provinsi (*earmark*), dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.32  
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN
1.	Belanja Pegawai	0,53
2.	Belanja Utang	0,00
3.	Bantuan Keuangan	27,75
4.	Belanja Tidak Terduga	861,39

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Tabel 3.33  
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN
1.	Belanja Sumber Dana <i>earmark</i> (DAK, Hibah, Bantuan Keuangan)	5,5

2.	Belanja BLUD	17,58
----	--------------	-------

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Tabel 3.34

Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN
1	Pembayaran Utang Pokok	0,00
2.	Penyertaan Modal	5,66
3.	Pengembalian Pihak Ketiga	0,00

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

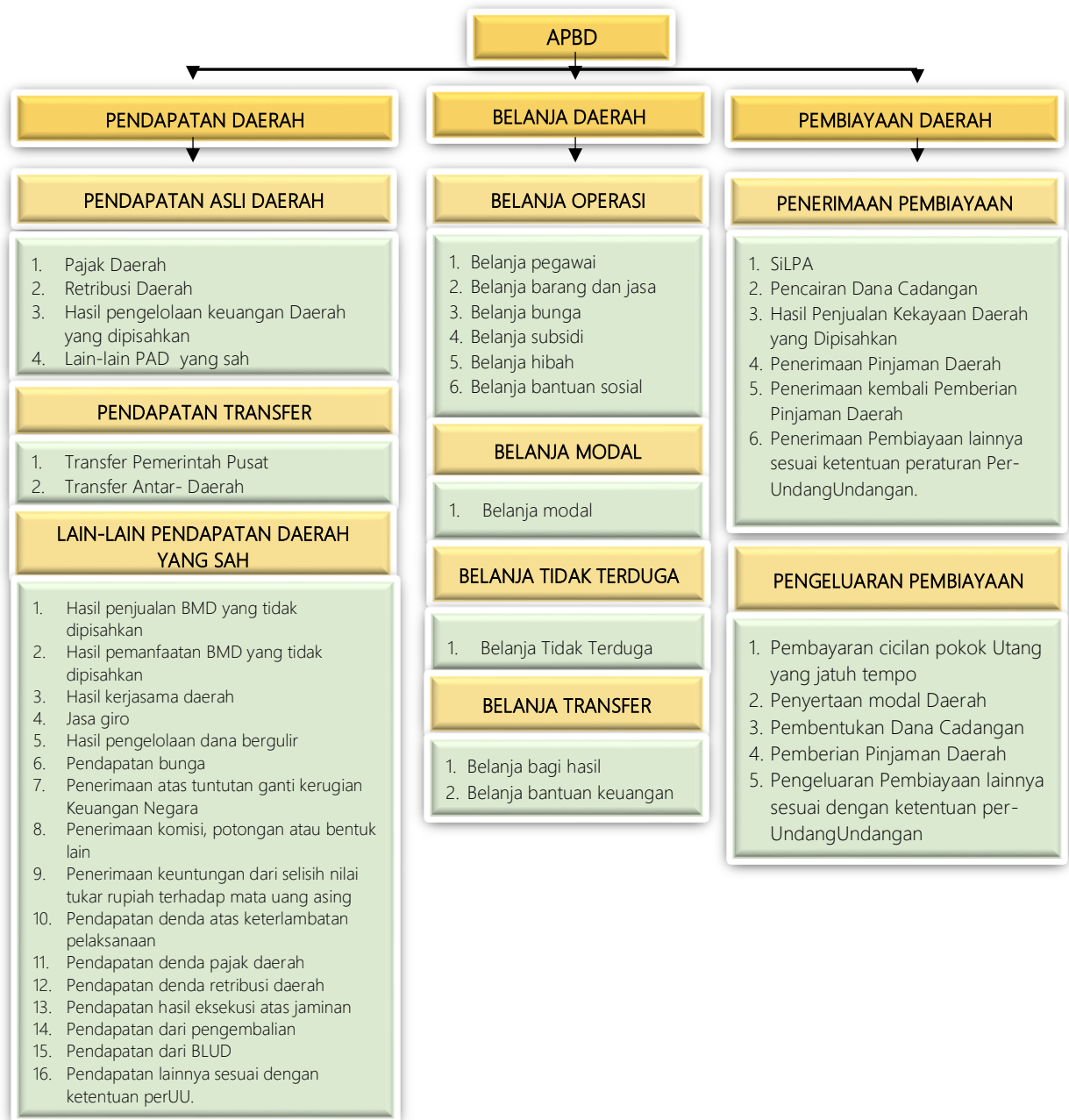
### 3.3.1. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan dengan proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi APBD dihitung dengan melihat trend rata-rata pertumbuhan APDB selama 5 (lima) tahun terakhir.

Struktur APBD yang digunakan pada tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, meliputi:

- Pendapatan Daerah; terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Belanja Daerah; meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
- Pembiayaan Daerah; terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Struktur APBD untuk periode 2021-2026 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2  
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 1. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021-2026

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 3.3  
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Mengacu pada trend Pendapatan Daerah tahun 2016-2020, diharapkan Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun mendatang dapat meningkat. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan peningkatan Dana Transfer dengan kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 3) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;
- 5) Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak dilakukan penghapusan piutang pajak, dan piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 8) Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
- 9) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari Dana Transfer.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 disusun dengan berbasis pada asumsi:

- 1) PAD dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2016-2021 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak daerah dan objek retribusi daerah, kinerja dan rencana bisnis BLUD serta trend pendapatan PAD lainnya;
- 2) Menyesuaikan kebijakan Dana Transfer dari pemerintah berdasarkan pada pencapaian Nawa Cita dan Nawa Cita Kedua sampai dengan Tahun 2020;
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah periode 2021-2026 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dengan perhitungan pertumbuhan mengacu pada analisis proyeksi pendapatan daerah (Gambar 3.3) yaitu memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan tahun 2016-2020 dengan memperhatikan data pencilan (*outlier*), dan kebijakan-kebijakan terkait dengan pendapatan daerah. Proyeksi Pendapatan Daerah diakhir periode RPJMD Kota Mataram 2021-2026 diproyeksikan menjadi **Rp. 2.400.863.588.770,90**; dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, pada akhir periode RPJMD Kota Mataram atau pada TA. 2026 diproyeksikan mencapai sebesar Rp.740.274.786.957,72 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,19 persen.
- 2) Pendapatan Transfer, diproyeksikan mengalami peningkatan dan pada akhir periode RPJMD Kota Mataram sebesar Rp.1.595.125.396.924,15; rata-rata pertumbuhan sebesar 9,39 persen.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diproyeksikan meningkat menjadi Rp.65.463.404.558,03 pada akhir periode RPJMD Kota Mataram dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Rincian Proyeksi Pendapatan Daerah untuk periode 2021-2026, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35  
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026

Kode Rek	Uraian	PERTUMBUHAN %	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>351.788.032.419,00</b>	<b>406.196.646.541,44</b>	<b>470.175.847.213,23</b>	<b>545.593.297.917,21</b>	<b>634.711.193.853,87</b>	<b>740.274.786.957,72</b>
1	Pajak Daerah	9,31	139.500.000.000,00	152.487.450.000,00	166.684.031.595,00	182.202.314.936,50	199.165.350.457,08	217.707.644.584,64
2	Retribusi Daerah	26,71	42.256.300.000,00	53.541.023.308,64	67.839.379.617,63	85.956.172.342,37	108.911.131.048,02	137.996.308.385,08
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,35	8.831.732.419,00	10.629.213.232,80	12.792.526.832,60	15.396.129.438,61	18.529.630.994,12	22.300.879.331,21
4	Lain-lain PAD yang Sah	17,58	161.200.000.000,00	189.538.960.000,00	222.859.909.168,00	262.038.681.199,73	308.105.081.354,65	362.269.954.656,80
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>1.019.201.406.918,00</b>	<b>1.113.824.241.650,98</b>	<b>1.217.732.459.194,60</b>	<b>1.331.871.322.751,52</b>	<b>1.457.284.675.927,01</b>	<b>1.595.125.396.924,15</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>923.090.081.000,00</b>	<b>1.008.543.895.240,40</b>	<b>1.102.408.367.736,46</b>	<b>1.205.545.312.968,26</b>	<b>1.318.907.164.810,43</b>	<b>1.443.546.671.247,05</b>
1	Dana Perimbangan		892.845.947.000,00	976.636.333.870,40	1.068.745.890.491,11	1.170.031.399.474,42	1.281.439.986.074,42	1.404.018.797.680,56
	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	12,40	91.502.329.000,00	102.848.617.796,00	115.601.846.402,70	129.936.475.356,64	146.048.598.300,86	164.158.624.490,17
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	10,32	588.593.342.000,00	649.336.174.894,40	716.347.668.143,50	790.274.747.495,91	871.831.101.437,49	961.804.071.105,84
	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	5,5	116.817.440.000,00	123.242.399.200,00	130.020.731.156,00	137.171.871.369,58	144.716.324.294,91	152.675.722.131,13
	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	5,5	95.932.836.000,00	101.209.141.980,00	106.775.644.788,90	112.648.305.252,29	118.843.962.041,17	125.380.379.953,43
2	Dana Insentif Daerah	5,5	30.244.134.000,00	31.907.561.370,00	33.662.477.245,35	35.513.913.493,84	37.467.178.736,01	39.527.873.566,49
3	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	-	-
4	Dana Keistewaan		-	-	-	-	-	-
5	Dana Desa		-	-	-	-	-	-
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>9,54</b>	<b>96.111.325.918,00</b>	<b>105.280.346.410,58</b>	<b>115.324.091.458,15</b>	<b>126.326.009.783,25</b>	<b>138.377.511.116,58</b>	<b>151.578.725.677,10</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil	9,54	96.111.325.918,00	105.280.346.410,58	115.324.091.458,15	126.326.009.783,25	138.377.511.116,58	151.578.725.677,10
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9,54	33.043.479.205,00	36.195.827.121,16	39.648.909.028,52	43.431.414.949,84	47.574.771.936,05	52.113.405.178,75
	Bagi Hasil Bea Balik Nama	9,54	20.706.319.619,00	22.681.702.510,65	24.845.536.930,17	27.215.801.153,31	29.812.188.583,33	32.656.271.374,18



Kode Rek	Uraian	PERTUMBUHAN %	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
1	2		3	4	5	6	7	8
	Kendaraan Bermotor							
	Bagi Hasil Dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9,54	20.065.288.802,00	21.979.517.353,71	24.076.363.309,25	26.373.248.368,96	28.889.256.263,36	31.645.291.310,88
	Bagi Hasil Dari Pajak Pengembalian Pemanfaatan Air Permukaan	9,54	33.231.000,00	36.401.237,40	39.873.915,45	43.677.886,98	47.844.757,40	52.409.147,26
	Bagi Hasil Pajak Rokok	9,54	22.263.007.292,00	24.386.898.187,66	26.713.408.274,76	29.261.867.424,17	32.053.449.576,44	35.111.348.666,03
2	Bantuan Keuangan		-	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>50.088.300.000,00</b>	<b>52.843.156.500,00</b>	<b>55.749.530.107,50</b>	<b>58.815.754.263,41</b>	<b>62.050.620.747,90</b>	<b>65.463.404.889,03</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5,5	50.088.300.000,00	52.843.156.500,00	55.749.530.107,50	58.815.754.263,41	62.050.620.747,90	65.463.404.889,03
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.421.077.739.337,00</b>	<b>1.572.864.044.692,42</b>	<b>1.743.657.836.515,33</b>	<b>1.936.280.374.932,14</b>	<b>2.154.046.490.528,77</b>	<b>2.400.863.588.770,90</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

## 2. PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2021-2026

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH), Belanja Bunga dan Belanja Bagi Hasil) dan Belanja Pendidikan, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 3.4  
Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata yang digunakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi daerah, dan menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual dengan berprinsip pada asas efisien, efektif, dan akuntabel;
- Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi sesuai kewenangan daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi;

- d. Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, mempunyai tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur;
- f. Belanja operasional SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
- g. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan tunjangan pegawai diarahkan pada kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
- h. Pendanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan pada prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
- i. Melakukan efisiensi pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;
- j. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat

Belanja Daerah periode 2021-2026 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dan diakhir periode RPJMD Kota Mataram 2021-2026 diproyeksikan sebesar **Rp. 2.389.882.859.603,90**; rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan belanja modal periode 2016-2020 dengan memperhatikan data *outlier* yang ada dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi, pada akhir periode RPJMD Kota Mataram atau pada TA. 2026 diproyeksikan mencapai sebesar Rp.1.913.338.995.320,76 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,09 persen.
- 2) Belanja Modal, diproyeksikan mengalami peningkatan dan pada akhir periode RPJMD Kota Mataram sebesar Rp.440.812.707.752,73; rata-rata pertumbuhan sebesar 6,08 persen.
- 3) Belanja Tidak Terduga, diproyeksikan meningkat menjadi Rp.33.741.502.872,10 pada akhir periode RPJMD Kota Mataram dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,01 persen.
- 4) Belanja Transfer, diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1.989.653.658,31 pada akhir periode RPJMD Kota Mataram dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,66 persen

Proyeksi Belanja Daerah untuk periode 2021-2026, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut:

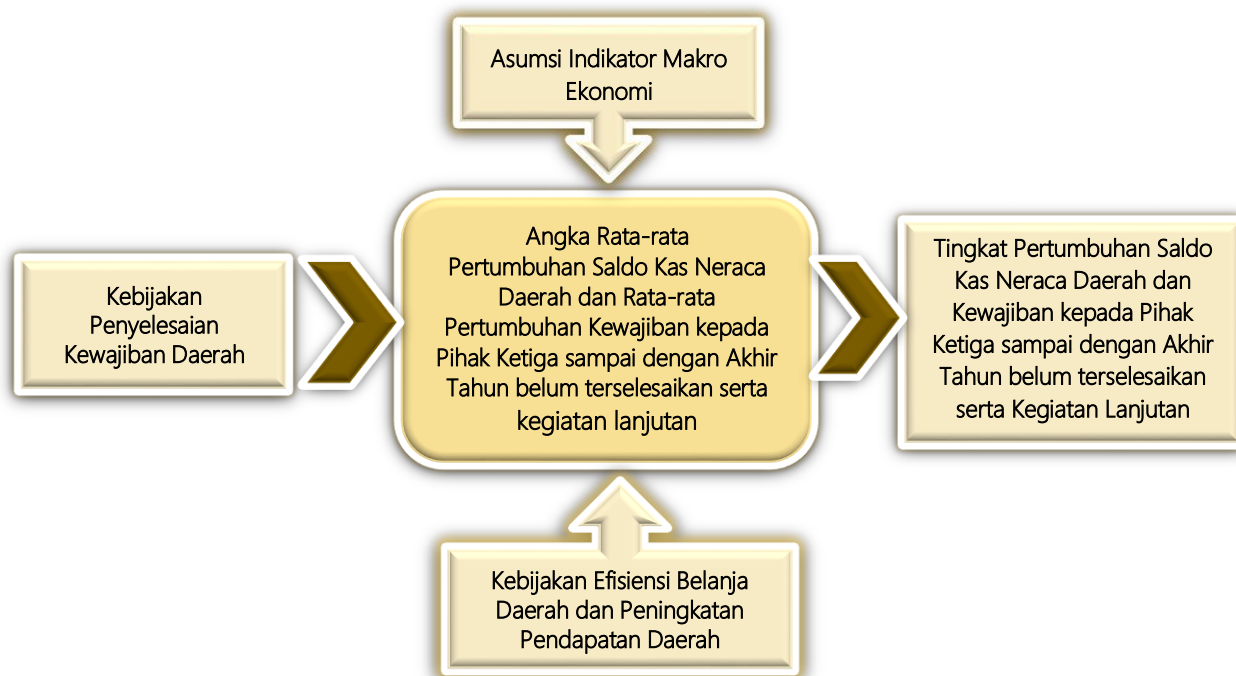
Tabel 3.36  
Proyeksi Belanja Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026

KODE REK	URAIAN	PERTUMBUHAN %	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>							
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>1.190.411.956.750,00</b>	<b>1.303.340.753.197,58</b>	<b>1.414.526.701.866,98</b>	<b>1.592.914.047.839,54</b>	<b>1.722.773.909.099,12</b>	<b>1.913.338.995.320,76</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3,52	572.132.524.186,00	592.282.720.877,47	613.142.596.549,85	634.737.145.711,30	657.092.243.163,00	680.234.675.002,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,89	510.675.471.862,00	598.073.362.950,83	677.727.046.989,45	793.714.436.054,31	929.552.109.214,87	1.088.637.278.718,59
5.1.05	Belanja Hibah	5,50	96.186.300.702,00	101.476.547.240,61	112.057.757.338,84	152.771.263.814,73	124.345.725.057,85	132.589.846.629,18
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,79	11.417.660.000,00	11.508.122.128,67	11.599.300.988,85	11.691.202.259,20	11.783.831.663,39	11.877.194.970,42
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>237.874.432.587,00</b>	<b>354.980.634.988,85</b>	<b>268.963.457.596,17</b>	<b>320.884.435.818,02</b>	<b>366.840.529.628,10</b>	<b>440.812.707.752,73</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6,08	22.843.002.547,00	24.231.857.101,86	25.705.154.013,65	27.268.027.377,68	28.925.923.442,24	54.341.086.203,22
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,08	93.955.450.182,00	77.311.378.453,63	67.011.910.263,61	71.086.234.407,63	75.408.277.459,62	79.993.100.729,16
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,08	65.419.293.609,00	194.396.786.660,43	113.616.111.289,38	156.091.970.855,78	165.582.362.683,81	175.649.770.334,98
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6,08	55.028.789.071,00	58.374.539.446,52	61.923.711.444,87	65.688.673.100,71	96.128.864.537,59	138.533.333.754,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,08	627.897.178,00	666.073.326,42	706.570.584,67	749.530.076,22	795.101.504,85	(7.704.583.269,50)
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>11.350.000.000,00</b>	<b>18.000.000.000,00</b>	<b>21.061.800.000,00</b>	<b>24.644.412.180,00</b>	<b>28.836.426.691,82</b>	<b>33.741.502.872,10</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17,01	11.350.000.000,00	18.000.000.000,00	21.061.800.000,00	24.644.412.180,00	28.836.426.691,82	33.741.502.872,10
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>1.441.350.000,00</b>	<b>1.537.344.005,99</b>	<b>1.639.731.219,18</b>	<b>1.748.937.427,58</b>	<b>1.865.416.776,74</b>	<b>1.989.653.658,31</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,10	1.441.350.000,00	1.537.344.005,99	1.639.731.219,18	1.748.937.427,58	1.865.416.776,74	1.989.653.658,31
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.441.077.739.337,00</b>	<b>1.677.858.732.192,43</b>	<b>1.706.191.690.682,34</b>	<b>1.940.191.833.265,14</b>	<b>2.120.316.282.195,78</b>	<b>2.389.882.859.603,90</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

### 3. PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021-2026

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, sebagaimana yang tergambar dalam gambar berikut.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 3.5  
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sama halnya dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, maka kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2021-2026 mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
- Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

- a. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)*, bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

- b. *Pencairan Dana Cadangan,*
- Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
  - Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- c. *Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,*  
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. *Penerimaan Pinjaman Daerah;*
- Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
  - Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
  - Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain; Lembaga keuangan bank; Lembaga keuangan bukan bank; dan/atau masyarakat.
  - Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Penerimaan pinjaman Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan, direncanakan untuk mempercepat target RPJMD 2021-2026 dalam bidang kesehatan dan bidang infrastruktur.
- e. *Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;*  
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. *Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*  
Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. *pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;*
- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *penyertaan modal daerah;*
- Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
  - Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. *pembentukan Dana Cadangan;*

- Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
  - 1) Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - 2) pinjaman daerah; dan
  - 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. *Pemberian Pinjaman Daerah;*

- Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. *pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai hasil analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Pembiayaan yaitu Kebijakan Penyelesaian Kewajiban Daerah, Kebijakan Efisiensi Belanja Daerah dan Peningkatan Pendapatan Daerah; maka Pembiayaan Daerah periode 2021-2026, yaitu: pada komponen Penerimaan Pembiayaan direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Komponen Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal dan Pembentukan Dana Cadangan.

Pembiayaan Daerah untuk periode 2021-2026 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.37 berikut:



Tabel 3.37  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026

KODE REK	URAIAN	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	5.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	125.000.000.000,00	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>30.000.000.000,00</b>	<b>145.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>60.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>						
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	10.005.312.500,00	27.466.145.833,00	46.088.541.667,00	43.730.208.333,00	20.980.729.167,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>10.000.000.000,00</b>	<b>40.005.312.500,00</b>	<b>62.466.145.833,00</b>	<b>56.088.541.667,00</b>	<b>53.730.208.333,00</b>	<b>30.980.729.167,00</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

### 3.3.2. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Mataram, meliputi:

#### 1) Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- a. Belanja Pegawai, terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
- b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet, belanja iuran jaminan/asuransi dan belanja jasa pegawai tidak tetap (PTT), .
- c. Belanja Hibah terdiri dari hibah Pilkada dan bantuan keuangan partai Politik.
- d. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

#### 2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### 3) Belanja Bagi Hasil

#### 4) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan modal BUMD dan Pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Mataram Tahun 2016-2020 ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.38  
Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Mataram Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Miliar Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>955,653</b>	<b>1.027,915</b>	<b>1.068,130</b>	<b>1.068,268</b>	<b>1.023,624</b>	<b>1,83</b>
1	Belanja Pegawai	650,412	630,092	599,142	590,906	577,958	-2,90
2	Belanja Barang dan Jasa	305,241	397,822	468,987	477,362	445,666	10,84
<b>B</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>0,863</b>	<b>2,460</b>	<b>3,277</b>	<b>0,54</b>	<b>133,875</b>	
1	Belanja Tidak Terduga	0,863	2,460	3,277	0,54	133,875	61.751,85
<b>C</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14,452</b>	<b>15,452</b>	<b>9,395</b>	<b>11,820</b>	<b>2,997</b>	
1	Penyertaan Modal Daerah	14,452	15,452	9,395	11,820	2,997	-20,28
	<b>JUMLAH</b>	<b>970,969</b>	<b>131,920</b>	<b>105,404</b>	<b>106,952</b>	<b>42,262</b>	<b>-20,38</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Berdasarkan data diatas dan memperhatikan target tahun 2021, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Mataram tahun 2021-2026 sebagaimana ditunjukkan Tabel berikut.

Tabel 3.39  
 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
 Kota Mataram Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	Rata-rata Pertumbuhan 2016-2020	TARGET TA. 2021	REALISASI ANGGARAN (Miliar Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
				TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026	
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,83</b>	<b>769,941</b>	<b>811,425</b>	<b>860,931</b>	<b>948,735</b>	<b>955,140</b>	<b>1.010,482</b>	<b>5,69</b>
1	Belanja Pegawai	-2,90	572,132	592,282	613,142	634,737	657,092	680,234	3,52
2	Belanja Barang dan Jasa	10,84	196,803	305,241	218,136	267,991	297,042	329,241	10,84
3	Belanja Hibah		1,006	1,006	6,006	40,006	1,006	1,006	241,36
<b>B</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>11,350</b>	<b>18,000</b>	<b>21,061</b>	<b>24,644</b>	<b>28,836</b>	<b>33,741</b>	<b>17,01</b>
1	Belanja tidak terduga	61.751,85	11,350	18,000	21,061	24,644	28,836	33,741	17,01
<b>C</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-20,28</b>	<b>12,930</b>	<b>17,075</b>	<b>37,466</b>	<b>56,088</b>	<b>53,730</b>	<b>30,980</b>	<b>0,00</b>
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		2,930	7,075	27,466	46,088	43,730	20,980	74,72
2	Penyertaan Modal Daerah	-20,28	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,00
3	Pembentukan Dana Cadangan		0	20,000	25,000	0	0	0	
	<b>JUMLAH</b>		<b>794,22</b>	<b>866,500</b>	<b>944,459</b>	<b>1.029,468</b>	<b>1.037,707</b>	<b>1.075,204</b>	<b>5,60</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

Tabel 3.40  
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan  
 Kota Mataram Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TA. 2021	PROYEKSI (Miliar Rp.)				
			TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
A	PENDAPATAN DAERAH	1.421.077.739.337,00	1.531.280.771.466,66	1.651.959.828.015,32	1.720.253.302.501,19	1.922.833.870.105,25	2.037.493.234.842,91
B	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>1.576.077.739.337,00</b>	<b>1.561.280.771.466,66</b>	<b>1.681.959.828.015,32</b>	<b>1.750.253.302.501,19</b>	<b>1.952.833.870.105,25</b>	<b>2.067.493.234.842,91</b>
A	Dikurangi: BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT	794.222.233.648,00	866.500.590.274,11	944.459.432.626,03	1.029.468.239.307,79	1.037.707.350.090,11	1.075.204.767.102,12
	<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN</b>	<b>656.855.505.689,00</b>	<b>851.363.454.418,32</b>	<b>824.198.403.889,31</b>	<b>966.812.135.624,35</b>	<b>1.136.339.140.438,67</b>	<b>1.345.658.821.668,79</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, Data Diolah, 2021

### 3.3.3. KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas; dan
- **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat.

Tabel 3.41  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
Kota Mataram Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TA. 2021	PROYEKSI (Miliar Rp.)				
			TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	656.855.505.689,00	851.363.454.418,32	824.198.403.889,31	966.812.135.624,35	1.136.339.140.438,67	1.345.658.821.668,79
1	Prioritas I	794.222.233.648,00	866.500.590.274,11	944.459.432.626,03	1.029.468.239.307,79	1.037.707.350.090,11	1.075.204.767.102,12
2	Prioritas II	551.746.653.207,00	734.917.274.263,05	704.907.760.062,44	846.606.877.842,83	999.350.312.660,69	1.200.208.272.130,87
3	Prioritas III	95.108.852.482,00	76.440.867.655,27	56.824.497.993,87	64.116.716.114,52	83.258.619.444,98	114.469.820.370,92

Sumber: Hasil Analisis, 2021

### 3.4. SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Mataram membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Mataram akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

#### 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kota Mataram selain bersumber dari APBD Kota Mataram, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kota Mataram. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mataram harus melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dengan menyiapkan data-data pendukung teknis.

#### 2) Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Mataram dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota.

Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penunasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

### 3) Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- b. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
- d. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- e. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
- f. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- g. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangkai mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

KPBU merupakan kerjasama antarpemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (unsolicited), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta. Dengan skema KPBU ini, Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan umum dengan tepat waktu (on schedule), tepat anggaran (on budget), dan tepat layanan (on service). Untuk mengembalikan investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan KPBU, terdapat beberapa skema pengembalian investasi yaitu: (i) pembayaran oleh pengguna layanan (User Pay) yang dapat didukung pemerintah melalui fasilitas Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund - VGF) atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset; (ii) pengembalian melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah berdasarkan prinsip ketersediaan layanan (Availability Payment); (iii) bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
- 2) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
- 3) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
- 4) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;

- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial,
- 5) pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 6) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerjasama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*).
- 2) Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- 3) KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

#### 5) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR)

CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan CSR lebih banyak berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

#### 6) Filantropi

Filantropi, adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.

#### 7) Dana Keagamaan

Merupakan dana yang dikumpulkan dari penganut agama tertentu yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan. Secara umum, dana keagamaan terfokus pada proyek/kegiatan/program yang bersifat sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.



# BAB 4

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan Kota Mataram.

Perkembangan utama teraktual dalam identifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Mataram, regional, nasional maupun internasional adalah implikasi terjadinya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sejak awal tahun 2020 dan hingga saat ini belum dapat dipastikan sampai kapan pandemi dapat dikendalikan atau berakhir. Dampak pandemi ini berimbas langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya di Kota Mataram, namun juga pada tingkat regional daerah Provinsi NTB, Nasional bahkan Global. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan pembangunan sebagai dampak pandemi COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Mataram.

### 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah atau analisis isu strategis internal merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Bagian ini menyajikan hal-hal penting tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis internal Kota Mataram. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kota Mataram sebagaimana telah disajikan pada Bab 2, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan Kota Mataram akan dijabarkan secara sistematis ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan yakni bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, bidang perekonomian, bidang keamanan dan bidang tata kelola pemerintahan.

#### 4.1.1 FOKUS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perencanaan pembangunan manusia penting untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia baik dari segi pendapatan, kesehatan maupun pendidikan, agar mampu memberikan daya saing yang tinggi, ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada rentang waktu lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2016-2020, IPM Kota Mataram menunjukkan peningkatan kecuali di tahun

2020, menurun sebesar 0,19 poin dibanding dengan tahun sebelumnya (*lihat Grafik 2.12*). Meskipun demikian, capaian IPM dalam lima tahun terakhir termasuk dalam kategori tinggi bahkan diatas IPM Provinsi NTB maupun Nasional, akan tetapi pertumbuhannya cenderung melambat. Capaian pembangunan ini tentu saja telah menghantarkan masyarakat Kota Mataram ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Namun demikian, tingginya pencapaian pembangunan manusia tidaklah cukup. Salah satu tujuan pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan bagi seluruh penduduk. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil.

Analisis permasalahan pembangunan manusia menggunakan konsep disparitas untuk memastikan pembangunan manusia di Kota Mataram membuka kesempatan yang sama untuk semua individu dalam memperluas pilihan-pilihannya. Analisis ini digunakan untuk memastikan tidak ada kesenjangan yang dirasakan masyarakat. Pembangunan manusia yang merata pada bidang pendidikan, kesehatan, peluang untuk menjadi sejahtera. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini (*Indeks Pembangunan Manusia, 2018*).

Berdasarkan data-data eksisting terkait pembangunan manusia yang diuraikan pada Bab 2 dan dari analisis disparitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa meskipun pembangunan manusia di Kota Mataram dalam kategori tinggi namun masih terdapat permasalahan yang menjadi tantangan bagi pembangunan manusia ke depan. Rencana pembangunan manusia di Kota Mataram ke depan adalah untuk memastikan pencapaian IPM yang tinggi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil. Jika merujuk pada komponen pembentuknya, pembangunan manusia di Kota Mataram masih menyisakan permasalahan pemerataan pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk diselesaikan.

Berikut akan dijelaskan masing-masing permasalahan utama pada fokus pengembangan sumber daya manusia yang meliputi permasalahan **urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemuda dan Olahraga, dan Ketahanan Pangan**, yang menyebabkan pembangunan manusia di Kota Mataram menjadi tidak merata.

#### 1. Derajat Pendidikan tidak merata

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih menjadi indikator yang relevan untuk melihat kinerja pendidikan di suatu wilayah. Angka RLS dan HLS di Kota Mataram memiliki tren pertumbuhan positif, yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pencapaian RLS dan HLS tersebut ditopang oleh perkembangan positif dari indikator pembentuknya, seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kedua indikator ini menunjukkan tren perkembangan yang terus membaik dan rata-rata berada pada angka di atas 90 persen (*lihat Tabel 2.13 dan Tabel 2.14*). Angka APM dan APK di atas 90 persen mengartikan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik. Hampir seluruh penduduk usia sekolah telah bersekolah sesuai dengan kelompok usia dan jenjang pendidikannya, yaitu pada kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun.

Akan tetapi, angka tinggi pada APM dan APK belum menunjukkan angka kedalaman partisipasi sekolah, pada penyebaran atau pemerataan akses pendidikan di masing-masing kecamatan. Dari angka APM dan APK di setiap kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Selaparang memiliki APM dan APK paling tinggi dan Kecamatan Sekarbela memiliki APM dan APK yang paling rendah. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh konsentrasi sekolah dengan banyak peminat hanya terfokus di wilayah Kecamatan Selaparang yang berada di pusat kota. Ketimpangan penyebaran siswa pada sekolah-sekolah tertentu juga masih menjadi permasalahan bagi upaya pemerataan akses pendidikan dan pola minat masyarakat untuk memilih sekolah yang dianggap favorit, yang masih menjadi stigma dalam pendidikan.

Kemudian, salah satu indikator penting untuk mengukur hasil jangka panjang keseluruhan proses pendidikan adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan SD di Kota Mataram baru mencapai 90 persen (*lihat Grafik 2.16*), meskipun angka kelulusan SD telah mencapai 100 persen (*lihat Tabel 2.16*). Angka melanjutkan sangat peka terhadap kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan pendidikan, serta terkait erat dengan angka putus sekolah, dimana angka tidak melanjutkan menjadi penyumbang angka putus sekolah (APS). Adapun APS di Kota Mataram sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta jumlah dan fasilitas sekolah.

Selain masalah ketimpangan akses pendidikan, aspek mutu pendidikan juga perlu mendapat perhatian. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan selalu terkait erat dengan ketersediaan tenaga pendidik. Saat ini, capaian rasio guru dan murid pada jenjang SD di Kota Mataram adalah sebesar 20,13 dan jenjang SMP sebesar 15,67 (*lihat Grafik 2.17*). Angka rasio guru dan murid pada jenjang SD dan SMP tersebut telah tercapai dan melampaui standar rasio sesuai PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kekurangan tenaga pendidik tidak selalu disebabkan oleh permintaan tenaga pendidik yang lebih besar dari ketersediaan. Namun, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas atau yang memenuhi kriteria atau yang kompeten. Ketercapaian angka rasio guru dan murid berbanding terbalik dengan pemenuhan kualitas guru. Berdasarkan latar belakang pendidikan masih terdapat 8 persen guru SD dan 7 persen guru SMP yang belum memenuhi kriteria, serta masih terdapat 6 persen guru SD dan 2 persen guru SMP yang belum layak untuk mengajar (*lihat Grafik 2.18*).

## 2. Derajat Kesehatan Belum Optimal

Salah satu bentuk kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatannya. Permasalahan pada derajat kesehatan masyarakat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik disebabkan oleh kondisi sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan di wilayah tersebut. AHH juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja suatu negara maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik pada semua aspek kesehatan dan dapat memperpanjang usia harapan hidupnya. Data AHH Kota Mataram tahun 2020 mencapai 71,76 tahun (*lihat Tabel 2.11*). Jika dibandingkan dengan AHH kota-kota lain di Indonesia, AHH Kota Mataram masih lebih rendah. Sebagai contoh, Kota Yogyakarta memiliki AHH 74,58 tahun, dan Kota Denpasar 74,82. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Mataram masih belum optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator Mortalitas atau kematian, Morbiditas atau kesakitan, dan Status Gizi. Angka Mortalitas dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI di Kota Mataram pada tahun 2020 adalah 90 per 100.000 kelahiran hidup (*lihat Grafik 2.19*). Angka tersebut masih lebih tinggi dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kemudian, AKB di Kota Mataram pada tahun 2020 adalah 5 per 1.000 kelahiran (*lihat Tabel 2.17*). Angka ini mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 sebesar 2,84 per 1.000 kelahiran. Pada rentang tahun 2017-2019 berturut-turut sebesar 5,33; 7,50; dan 0,50. Nilai AKB ini sudah berada di bawah target SDGs. Angka AKI dan AKB ini resultan dari banyak faktor, belum terpenuhinya capaian layanan minimal kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dalam upaya akreditasi paripurna Puskesmas yang belum optimal; belum meratanya kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat; upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal; masih rendahnya usia kawin pertama perempuan; dan masih rendahnya jumlah peserta KB aktif.

Kemudian pada indikator status gizi, yang dinilai keberhasilan dalam SDGs adalah status gizi balita yaitu prevalensi stunting dan prevalensi gizi buruk. Stunting merupakan kondisi status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur, sedangkan gizi buruk merupakan keadaan sangat kurus dengan indeks antropometri  $<-3.0$  SD baku WHO. Capaian prevalensi balita stunting di Kota Mataram adalah sebesar 20,70 persen (*lihat Grafik 2.19*). Bila dibandingkan dengan proporsi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 37,85 persen, Kota Mataram sudah berada pada proporsi yang cukup baik. Namun dibandingkan dengan kondisi kota lain seperti Kota Denpasar dari tahun 2017 hingga 2019 yaitu sebesar 9,50 persen, 9,30 persen dan 5,30 persen, maka proporsi stunting di Kota Mataram termasuk cukup tinggi. Selanjutnya, prevalensi gizi buruk di Kota Mataram meskipun telah di bawah target SDGs, namun kasus gizi buruk masih ada terjadi dan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting dan prevalensi gizi buruk salah satunya adalah melalui ketahanan pangan. Ketahanan pangan memiliki tiga aspek, antara lain ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan sebab akibat langsung dan tidak langsung terhadap status gizi. Apabila ketiga aspek tersebut optimal maka dapat menurunkan prevalensi stunting dan kurang gizi, melalui keragaman konsumsi pangan, penurunan konsumsi beras, penurunan tingkat kecukupan energi, peningkatan tingkat kecukupan protein, konsumsi pangan hewani, sayur dan buah. Akan tetapi, tingkat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi penduduk yang diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Mataram masih belum optimal. IKP dan skor PPH Kota Mataram lebih tinggi dari Provinsi NTB maupun Nasional, namun masih dibawah angka IKP dan skor PPH kota-kota lain di Indonesia. IKP Kota Mataram pada tahun 2020 adalah 71,86 (*lihat Tabel 2.32*). Sebagai gambaran, IKP Kota Yogyakarta sebesar 76,82, sedangkan Kota Denpasar sebesar 92,81 dan merupakan nilai IKP tertinggi di Indonesia.

Permasalahan lain pada sektor kesehatan di Kota Mataram adalah terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya seperti apotek, toko obat, dan perdagangan farmasi terdapat hampir di seluruh wilayah di Kota Mataram. Dalam hal ini, Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang pertama di wilayah kerjanya masing-masing. Akan tetapi, belum semua puskesmas di Kota Mataram optimal dalam upaya akreditasi paripurna puskesmas. Puskesmas sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pusat pelayanan kesehatan dasar, berkewajiban mengupayakan, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan Nasional yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang.

RSUD Kota Mataram merupakan fasilitas kesehatan dalam territorial wilayah Kota Mataram dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas kesehatan rujukan tipe C di Kota Mataram, NTB. RSUD Kota Mataram menjadi salah satu rumah sakit rujukan penanganan dan perawatan pasien positif COVID-19. Mewabahnya Pandemi COVID-19 menambah beban penanganan dan perawatan pasien baik pasien rutin maupun pasien COVID-19 yang mana terdapat alih fungsi sebagian fasilitas RS untuk menjadi fasilitas khusus penanganan dan perawatan pasien positif COVID-19. Penanganan pasien COVID-19 memiliki standar prosedur yang berbeda dengan penanganan pasien rutin rumah sakit pada umumnya, sedangkan terdapat keterbatasan kapasitas rumah sakit terutama pada fasilitas dan tenaga medis secara keseluruhan. Apalagi Sistem berjenjang BPJS menyebabkan lonjakan pasien BPJS terutama untuk pasien Kelas III. Ditambah lagi masalah antrian panjang pasien yang akan melakukan tindakan operasi mengharuskan Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun gedung Rawat Inap dengan kapasitas 199 Tempat Tidur dan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dengan kapasitas 8 ruang OK

untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat Kota Mataram. Kondisi demikian membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan kurang optimal sehingga fasilitas sarpras serta inovasi pelayanan kesehatan RSUD Kota Mataram perlu mendapatkan peningkatan agar mutu pelayanan kesehatan rujukan Kota Mataram dapat terpenuhi.

### 3. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat belum Merata

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran dengan meningkatnya konsumsi sebagai dampak meningkatnya pendapatan, pendapatan meningkat karena peningkatan produksi yang selanjutnya membuka kesempatan kerja guna menciptakan pendapatan dan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila kesejahteraan sosial tidak dapat diwujudkan, maka hal ini menggambarkan kegagalan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan.

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi sejahtera secara sosial, yang merupakan tujuan dari kegiatan pembangunan. Penduduk, masyarakat atau istilahnya sumberdaya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan. Mengingat penduduk sebagai objek dan agen dari pembangunan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh sikap dan upaya penduduk selama proses pembangunan berlangsung. Setiap penduduk harus dapat dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Hal ini akan menjamin bahwa seluruh penduduk mempunyai capaian pembangunan yang sama, adil, dan merata. Pembangunan yang tidak adil dan merata akan menyebabkan kesenjangan pada aspek ekonomi maupun sosial.

Tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan tujuan pembangunan tersebut adalah populasi penduduk miskin di Kota Mataram yang cukup tinggi. Pada periode lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Mataram mengalami penurunan yang cukup progresif, namun tergolong masih tinggi (*lihat Grafik 2.8*). Capaian angka kemiskinan di Kota Mataram meskipun lebih rendah dari Provinsi NTB dan Nasional, namun masih diatas target SDGs dan lebih tinggi dari 57 provinsi/ kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya permasalahan terkait kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal individu atau keluarga miskin. Faktor internal seperti, kemampuan yang mereka miliki dan faktor eksternal seperti, ketiadaan kesempatan kerja yang disediakan pemerintah, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi, harmonisasi dan sinergitas antara beberapa sektor publik baik di tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten.

Berdasarkan data dan indikator yang berkaitan dengan kemiskinan pada periode tahun 2016-2020 (*lihat Grafik 2.8*), menunjukkan bahwa program-program cluster penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan program induksi kemiskinan belum efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 8,47 persen atau sebanyak 41,8 ribu orang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan serius. Di sisi lain, data Laju Penurunan Kemiskinan dalam lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang masih rendah, terakhir sebesar 0,45 persen pada tahun 2020. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah Kota Mataram untuk penanganannya, terlebih jika memperhitungkan faktor dampak pandemi COVID-19 yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap masalah kemiskinan.

Salah satu strategi penanganan kemiskinan sebelumnya adalah pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi program-program tersebut belum efektif dimana target belum tercapai, belum efektifnya program-program tersebut terkendala oleh beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti **Pertama**, pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. Hal ini berpengaruh terhadap kemiskinan, karena tingginya pertumbuhan penduduk seringkali tidak sebanding dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, produksi pertanian dan menurunnya kesenjangan pendapatan. **Kedua**, perlindungan sosial bagi kelompok rentan kurang optimal. Hal ini tercermin dengan rendahnya capaian indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri, yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir kurang dari 3 persen. Salah satu peran penting pemerintah dalam penanganan kemiskinan adalah membantu masyarakat yang termasuk dalam kelompok PMKS agar mendapat penghidupan yang layak. **Ketiga**, peningkatan kualitas pemuda dan perannya dalam pembangunan kurang optimal. Pemuda sebagai kelompok masyarakat dengan usia produktif merupakan bagian penting dalam penanganan kemiskinan, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai kelompok rentan yang dapat menambah jumlah penduduk miskin apabila tidak mendapat pekerjaan yang layak atau mengalami ketidaberdayaan. **Keempat**, peningkatan kualitas perempuan dan anak kurang optimal. Perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan intervensi dari pemerintah untuk memastikan bahwa kelompok perempuan dan anak mendapat pemberdayaan dan perlindungan yang optimal. Hal ini juga merupakan bagian penting dari upaya-upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian salah satu tujuan dalam *SDGs*, yaitu kesetaraan gender. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipetakan analisis permasalahan fokus sumber daya manusia di Kota Mataram sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Analisis Permasalahan Sumber Daya Manusia Kota Mataram**

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
1	Kesenjangan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Derajat Pendidikan tidak merata	Belumnya optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Masih adanya Penduduk Usia Sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan karena faktor kemampuan ekonomi dan sosial
			Masih kurangnya Angka Partisipasi Murni (APM)	Masih rendahnya motivasi dan keterbatasan pembiayaan orang tua dan siswa terhadap pendidikan
			Belum proporsionalnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	Belum terpenuhinya cakupan implementasi standar pelayanan pendidikan secara optimal

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
		Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal	Upaya kesehatan masyarakat belum optimal yang ditandai masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, dan balita stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya capaian layanan minimal kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dalam upaya akreditasi paripurna puskesmas belum optimal</li> <li>• Belum meratanya kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan masyarakat</li> <li>• Upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal</li> </ul>
		Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat belum merata	Kinerja urusan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan</li> <li>• Masih rendahnya jumlah peserta KB aktif</li> <li>• Masih adanya kawasan rawan pangan</li> <li>• Belum optimalnya penyediaan pangan segar yang memenuhi standar aman</li> </ul>
	Kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial</li> <li>• Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin</li> <li>• Penerima Layanan Sosial Dasar dan Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan bagi masyarakat miskin belum tepat sasaran</li> </ul>	
	Kinerja urusan kepemudaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses terhadap peran perempuan dalam pembangunan (politik dan ekonomi) belum optimal</li> <li>• Masih ada kasus KDRT</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam keorganisasian</li> <li>• Masih rendahnya peran serta organisasi pemuda dalam pembangunan</li> <li>• Masih kurangnya jumlah atlet berprestasi yang mewakili kota</li> </ul>

#### 4.1.2 FOKUS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai data dan informasi pada Bab II, dapat disampaikan bahwa permasalahan makro yang dihadapi oleh Kota Mataram pada lima tahun terakhir ditilik dari fokus pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan capaian Indeks Kualitas



Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 masih dalam kategori sedang yaitu dengan nilai sebesar 57,05 persen (*lihat Tabel 2.95*). Rendahnya nilai IKLH Kota Mataram tersebut disebabkan oleh masih tingginya tingkat pencemaran air permukaan dan masih rendahnya luasan tutupan lahan di Kota Mataram. Terkait dengan kualitas udara, secara umum kualitas udara di Kota Mataram sudah memenuhi standar, namun terdapat ancaman pencemaran di beberapa lokasi terutama pada kawasan perdagangan dan jasa sebagai akibat tingginya mobilitas kendaraan. Di samping itu, permasalahan kualitas lingkungan hidup di Kota Mataram juga dipengaruhi oleh pengelolaan persampahan yang belum optimal, dimana masih terdapat sekitar 8 persen volume sampah kota yang belum terkelola (*lihat Tabel 2.38*).

Permasalahan yang terkait dengan infrastruktur perkotaan adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur perkotaan yang meliputi infrastruktur ke-PU-an, infrastruktur perhubungan, dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang ditandai dengan masih rendahnya capaian Indeks Infrastruktur Wilayah di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 59,24.

Permasalahan pada fokus Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup meliputi permasalahan pada **urusan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Perhubungan**, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Mataram menghadapi ancaman perubahan kualitas tanah, udara dan air sebagai akibat dari pembuangan limbah rumah tangga, asap kendaraan dan industri. Pada periode tahun 2016-2018 nilai IKLH Kota Mataram terus mengalami peningkatan, namun angka tersebut masih dalam kategori sedang, sehingga membutuhkan upaya intensif agar dapat mencapai kategori baik. Beberapa faktor penyebab masih rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Mataram diuraikan sebagai berikut.

##### ***Adanya Ancaman Pencemaran Udara***

Meskipun kualitas udara Kota Mataram masih tergolong baik yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2020 sebesar 85,22 (*lihat Tabel 2.39*). Namun pada beberapa kawasan tertentu masih menunjukkan kandungan sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) yang cukup tinggi seperti pada kawasan perdagangan dan jasa. Disamping itu, masih terdapatnya masyarakat yang masih melakukan praktik pembakaran sampah sehingga mengakibatkan bertambahnya faktor pencemar udara kota dalam hal ini gas karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Selanjutnya, masih ada industri rumah tangga yang menggunakan metode konvensional sebagai sumber energi yang turut berkontribusi dalam mencemari udara perkotaan. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masih relatif rendah di berbagai sektor strategis seperti pembangkit listrik, industri, energi serta transportasi, dimana sebagian besar sumber energinya masih menggunakan bahan bakar fosil yang sangat menurunkan kualitas udara perkotaan. Kegiatan-kegiatan untuk penanganan dan pencegahan pencemaran udara harus lebih diintensifkan pelaksanaannya.

##### ***Adanya Ancaman Pencemaran Air***

Mengingat karakteristik Mataram sebagai kota dengan populasi yang cukup besar, akan berimplikasi pada produksi limbah domestik yang cukup besar. Namun pengelolaan limbah domestik belum dilakukan secara optimal, sehingga masih banyak limbah domestik masyarakat maupun limbah ternak dan limbah industri yang dibuang ke badan air baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, masih adanya masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya ke badan air, hal ini akan berakibat pada menurunnya kualitas air permukaan yang ditandai dengan rendahnya indeks kualitas air (IKA) Kota Mataram yang pada tahun 2020 berkisar di angka 43,33 (*lihat Tabel 2.39*).

Kota Mataram juga mengalami persoalan pencemaran sungai akibat adanya pembuangan limbah tinja. Masih minimnya usaha penyedotan tinja oleh pemerintah menyebabkan jangkauan pelayanannya juga masih terbatas. Usaha penyedotan tinja di Kota Mataram didominasi oleh pihak swasta yang dianggap masih membuang limbah atau hasil penyedotan di sungai atau badan sungai. Pencemaran tersebut menyebabkan kadar kualitas air sungai di Kota Mataram dihinggapai bakteri E. Coli.

Pencemaran air di Kota Mataram juga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan persampahan. Volume sampah yang dihasilkan Kota Mataram pada tahun 2020 mencapai 346,90 ton per hari (*lihat Tabel 2.38*) dengan persentase penanganan sampah sebesar 86,87 persen dan pengurangan sampah sebesar 5,32 persen yang artinya masih ada sekitar 7,81 persen volume sampah yang belum tertangani. Sisa sampah yang belum tertangani menumpuk di beberapa titik, dibakar dan sebagian besar dibuang ke badan air.

Penanganan sampah di Kota Mataram masih sangat bergantung pada pengangkutan, sementara itu upaya pengurangan sampah masih sangat jauh dari target. Penanganan sampah dengan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional sangat tidak efisien dari segi biaya dan waktu, selain itu kapasitas TPA regional yang sangat terbatas tidak akan mampu menampung timbulan sampah Kota Mataram secara maksimal. Timbulan sampah di Kota Mataram tidak hanya berasal dari penduduk dalam kota, namun juga berasal dari luar Kota Mataram. Seringkali terjadi kasus pembuangan sampah di wilayah perbatasan oleh masyarakat yang tinggal di batas kota antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Pengurangan sampah melalui 3R (*reduce, reuse, recycle*), Bank Sampah maupun *waste to energy* (sampah menjadi energi) masih belum optimal. Selain karena belum didukung dengan teknologi yang tepat juga karena masyarakat yang masih skeptis dalam kegiatan pemilahan sampah. Kondisi ini memerlukan perubahan perilaku dan edukasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan persampahan dari level hulu atau rumah tangga atau industri, membutuhkan profesional di bidang persampahan, meningkatkan fasilitas, serta teknologi pengolahan sampah yang tepat.

#### ***Kualitas Tutupan Lahan masih rendah***

Kualitas tutupan lahan di Kota Mataram masih rendah ditandai dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang sebesar 28,53. Hal ini disebabkan karena luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik kota masih minim dibandingkan dengan luas wilayah kota. Proporsi RTH publik berdasarkan perhitungan analisis pemetaan masih jauh dari RTH minimal yang ditetapkan sebesar 20 persen. Keberadaan RTH Publik masih dianggap belum prioritas dalam pengembangan suatu Kawasan. RTH Publik saat ini baru mencapai 2,48 persen (*lihat Tabel 2.40*), sehingga membutuhkan 17,52 persen atau sekitar 1.074,26 Ha ruang hijau untuk publik. Sedangkan, RTH Privat berdasarkan perhitungan analisis pemetaan sudah melebihi kapasitas minimum sebesar 10 persen yaitu mencapai 12,11 persen atau 742,22 Ha.

Arahan RTH sesuai ketentuan untuk wilayah Perkotaan meliputi RTH Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau, RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Ruang Pejalan Kaki, RTH di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu (pada sempadan rel kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH sumber air baku/ mata air, RTH Pemakaman). Berdasarkan data RTH publik yang disajikan pada Bab 2, jenis RTH di Kota Mataram antara lain RTH Hutan Kota, Jalur Hijau, Taman Kota, Pemakaman, sempadan jalan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Pengembangan RTH jenis lainnya untuk menambah luasan RTH publik sangat memungkinkan di Kota Mataram antara lain sabuk hijau di daerah perbatasan dan RTH pada jaringan listrik tegangan tinggi.

Pengembangan RTH Publik di Kota Mataram terkendala oleh ketersediaan lahan yang terbatas. Status tanah seringkali menyulitkan Pemerintah Kota Mataram menyediakan ruang terbuka yang sesuai dengan undang-undang. Keterbatasan dana dan SDM yang profesional, pemilihan jenis tanaman yang tidak sesuai persyaratan ekologis bagi masing-masing lokasi dan langkanya pembibitan tanaman penghijauan juga

menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian. Selain itu, penggunaan lahan di sepanjang sempadan sungai dan pantai untuk permukiman dapat mengancam keberadaan RTH dimana sangat memungkinkan untuk terjadi alih fungsi lahan dari sempadan menjadi kawasan terbangun.

Pengelolaan RTH yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan fungsi RTH baik fungsi ekologis, ekonomi, sosial budaya dan estetika. Target potensial lahan yang dapat dijadikan RTH adalah lahan pertanian milik masyarakat, lahan yang tidak diperuntukkan, lahan sempadan sungai dan lahan sempadan pantai. Sementara lahan yang sudah direncanakan memerlukan alih fungsi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan kota, maka semaksimal mungkin tetap tidak menghilangkan fungsi RTH dan menggabungkannya dalam konsep keterpaduan.

### ***Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penataan Ruang***

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kota Mataram belum optimal ditandai dengan capaian indeks kesesuaian pemanfaatan ruang berada pada tingkat kesesuaian sedang dengan nilai 2. Rendahnya kesesuaian lahan eksisting perkotaan dengan RTRW sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang oleh pemangku kepentingan. Peraturan turunan RTRW sebagai dasar pengaturan tata ruang yang efektif masih dalam proses penyusunan. Saat ini, RTRW digunakan sebagai pengendali pemanfaatan ruang masih bersifat arahan dan sangat umum sehingga memerlukan pertimbangan teknis yang matang dalam proses penerbitan izin pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah Kota Mataram.

Untuk menjadikan RTRW lebih efektif dan operasional perlu dimatangkan proses penyiapan RTRW menjadi proses yang berkualitas agar RTRW sebagai kebijakan publik yang mengikat dan memiliki mutu. Penyebarluasan informasi rencana tata ruang kota masih sangat minim, sehingga perlu suatu sistem informasi tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat. Di samping itu juga perlu dilakukan koordinasi lintas-sektoral dan lintas-wilayah secara intensif, yang tak kalah pentingnya dalam operasionalisasi tersebut perlu upaya penegakan hukum yang konsisten dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, agar tercipta konsistensi antara rencana, program dan pelaksanaannya serta menerapkan sanksi hukum atas pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ada.

## **2. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Perkotaan**

### **a. Infrastruktur ke-PU-an belum sesuai standar**

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur ke-PU-an meliputi rendahnya kualitas infrastruktur jalan dengan kelengkapan trotoar dan drainase yang memadai, belum tuntasnya akses untuk air minum dan sanitasi yang layak, serta ketergantungan terhadap daerah lain atas pemenuhan sumber air bersih.

#### ***Belum terpenuhinya fasilitas pendukung jalan***

Selama kurun waktu lima tahun terakhir belum ada peningkatan penyediaan fasilitas pendukung jalan seperti trotoar dan drainase, yang ditunjukkan dari panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada angka stagnan yaitu sepanjang 247.499 meter atau 66,92 persen (*lihat Tabel 2.21*). Hal ini disebabkan karena keterbatasan ruang milik jalan atau rumija yang akan dibangun trotoar maupun drainase.

#### ***Belum terpenuhinya layanan air minum yang aman***

Ketersediaan air bersih sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan air merupakan hak bagi setiap warga masyarakat sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa air bersih memiliki nilai

ekonomi yang penyediaannya memerlukan “ongkos produksi” karena cara mendapatkannya memerlukan teknologi pengolahan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi pada penyediaan akses air minum sesuai standar saat ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan air minum aman yang berasal dari jaringan perpipaan. Di samping itu, masyarakat Kota Mataram cenderung menggunakan akses air minum secara bersama atas dasar hubungan emosional antarsesama. Selain permasalahan tersebut, pengelolaan air minum juga menjadi masalah di Kota Mataram meliputi tingginya tingkat kebocoran air yang diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, biaya operasional/pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter kubiknya masih lebih tinggi atau sama dengan harga jual air setiap meter kubiknya, serta belum dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini diketahui dari capaian akses rumah tangga terhadap air minum yang layak sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 72 persen (*lihat Grafik 2.24*). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 28 persen penduduk Kota Mataram yang belum terlayani.

#### ***Belum terpenuhinya layanan air limbah yang layak***

Pengelolaan layanan air limbah domestik merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Mataram memiliki target untuk mewujudkan akses air limbah domestik yang aman 20 persen dan layak 80 persen tanpa adanya akses dasar. Namun sampai dengan tahun 2020 di Kota Mataram masih terdapat masyarakat yang menggunakan akses air limbah domestik dengan akses dasar yang ditunjukkan dengan cakupan air limbah tahun 2020 sebesar 99,57 persen (*lihat Grafik 2.26*).

Masalah layanan air limbah domestik di Kota Mataram bukan semata masalah ketersediaan infrastruktur seperti seperti tank yang septik, IPAL komunal maupun SPALD-T, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Persepsi sebagian masyarakat Kota Mataram untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar sembarangan atau BABS masih terjadi di delapan kelurahan di Kota Mataram.

Membangun instalasi pengolahan air limbah domestik dengan sistem jaringan perpipaan dan pembangunan *temporary storage* selain bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi di perkotaan yang aman dan layak juga untuk melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik yang berasal dari rumah tangga seperti air mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya serta dari pengusaha pengelola air limbah domestik swasta atau sedot tinja.

#### ***Masih rendahnya kualitas drainase perkotaan***

Pertumbuhan permukiman baru, perkembangan kawasan permukiman serta peningkatan pembangunan infrastruktur di beberapa sektor aktivitas sosial masyarakat Kota Mataram menuntut pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi satu sama lain. Sistem drainase terbagi menjadi empat sistem yakni sistem drainase primer, sistem drainase sekunder, sistem drainase tersier dan sistem drainase kuartier, masing-masing sistem memiliki peran dan fungsi berbeda sesuai dengan peruntukannya.

Kondisi drainase dalam kondisi baik di Kota Mataram pada tahun 2020 sudah mencapai 86,26 persen atau sekitar 213.500 km. Adapun jalan yang memiliki drainase selama empat tahun terakhir baru mencapai 66,92 persen atau 369.850 km (*lihat Tabel 2.27*). Sehingga, terdapat sekitar 156.350 km drainase dalam kondisi tidak baik. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu aliran air yang berlebih ke saluran yang telah disediakan, aliran air yang berlebih tersebut dapat menimbulkan masalah lain seperti terjadinya genangan atau banjir. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan sistem drainase di Kota Mataram yang kerap dihadapi, seperti:

1. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Mataram yang mencapai 2 persen dan urbanisasi yang cukup tinggi menimbulkan munculnya permukiman-permukiman baru;
2. Fungsi ganda dari drainase yang ada selain sebagai sarana mengalirkan air yang berasal dari buangan air hujan juga difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik (*grey water*) yang berasal dari aktivitas masyarakat seperti mandi, mencuci, masak;
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam memelihara drainase khususnya drainase lingkungan;
4. Peningkatan debit air yang memasuki badan drainase yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan rendahnya daya serap air di lingkungan karena tutupan lahan semakin berkurang;
5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan infrastruktur lain yang menimbulkan terganggunya kondisi eksisting drainase;
6. Pengelolaan drainase belum optimal baik pada pemeliharaan, peningkatan, pengaturan jaringan serta konektivitas antar drainase.

### ***Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi perkotaan***

Pengelolaan jaringan irigasi perkotaan ditujukan untuk memenuhi permintaan air irigasi bagi daerah layanan yang disesuaikan dengan ketersediaan air, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sehingga, pengelolaan jaringan irigasi dengan luas layanan kurang dari 1.000 Ha akan ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Indikator kinerja jaringan irigasi dalam kondisi yang baik adalah permintaan dari semua daerah layanan terpenuhi secara lestari. Luas daerah irigasi kewenangan Kota Mataram sudah seluruhnya terlayani oleh jaringan irigasi. Namun, masih terdapat beberapa jaringan irigasi yang kondisinya belum memadai dan sesuai standar sebesar 20 persen dari seluruh jaringan irigasi Kota Mataram (*lihat Tabel 2.22*).

Beberapa faktor yang harus diperhatikan agar pengelolaan jaringan irigasi optimal yaitu faktor non fisik melalui ketersediaan sumber daya manusia/pengelola dan ketersediaan biaya operasional yang memadai. Faktor fisik melalui ketersediaan sumber daya air dan keandalan prasarana jaringan irigasi serta adanya konsistensi penerapan peraturan dalam tata tanam.

### ***Belum terpenuhinya Standar Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemerintah***

Kota Mataram sebagai ibukota provinsi juga memerlukan peningkatan infrastruktur perkantoran dan pelayanan pemerintah. Pusat perkantoran pemerintahan eksisting sudah tidak memenuhi kelaik-fungsian gedung perkantoran akibat keterbatasan lahan sehingga kesulitan dalam penambahan fungsi baru untuk menjawab tuntutan kemajuan wilayah. Ditambah lagi pascabencana gempa bumi tahun 2018 yang menyebabkan beberapa kerentanan pada kualitas gedung. Secara fasilitas, pusat perkantoran walikota saat ini juga belum memenuhi inklusivitas bangunan yang dapat secara mudah diakses oleh penyandang disabilitas untuk mendapat pelayanan, serta belum memenuhi ketahanan terhadap bencana, dimana jalur evakuasi belum memadai. Meskipun lokasi eksisting Kantor Walikota di Jalan Pejanggalik berada di pusat Kota Mataram yang merupakan *central business district*, namun aktivitas di pusat kota dan volume kendaraan yang padat justru menyebabkan mobilitas pegawai dan pelayanan publik menjadi kurang efisien.

Standar Laik Fungsi (SLF) menjadi penting untuk diketahui oleh individu/perorangan selaku konsumen dan pengembang selaku penyedia konstruksi agar bangunan yang telah selesai dibangun memenuhi standar administratif, standar kelayakan teknis dan dapat beroperasi secara legal. Di tahun 2020, persentase bangunan gedung layak huni dan sesuai standar baru mencapai 0,92 persen terjadi peningkatan 0,40 poin dibandingkan tahun 2018 sehingga sosialisasi prosedur dan proses perlu diberikan kepada masyarakat

sebagai konsumen agar tidak mengalami kerugian dan mengetahui klasifikasi penggolongan bangunan gedung, masa berlaku dan perpanjangan dari sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang dimilikinya.

**b. Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman**

Pembangunan yang pesat di Kota Mataram juga menimbulkan beberapa persoalan terutama dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan penataan kawasan permukiman. Rumah, sebagai salah satu kebutuhan dasar selain sandang, pangan, layanan kesehatan dan pendidikan. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sekaligus sebagai sarana aktivitas sosial masyarakat.

***Masih tingginya angka backlog rumah dan masih adanya rumah yang belum memenuhi standar layak huni***

Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan melaksanakan pembangunan perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat di wilayah Kota Mataram masih belum optimal ditunjukkan dengan rasio kepemilikan rumah pada tahun 2020 baru mencapai 75,57 persen dengan angka *backlog* kepemilikan rumah lebih dari 32.000 rumah tangga (*lihat Tabel 2.24*). Asumsi yang digunakan adalah bahwa 1 rumah tangga atau keluarga menempati 1 rumah milik sendiri. Ketersediaan akses perumahan layak huni khususnya bagi masyarakat miskin sangat sulit karena keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di wilayah perkotaan, sehingga tidak memungkinkan pembangunan rumah subsidi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat di Kota Mataram. Selain akses kepemilikan rumah yang sulit, juga kondisi eksisting terhadap kualitas perumahan masyarakat khususnya MBR belum memenuhi kriteria layak huni baik menyangkut kualitas bangunan maupun luasan bangunan. Selain itu kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perumahan bertingkat (*vertical house*) seperti rusunawa, rumah khusus yang disediakan pemerintah masih belum optimal.

***Masih adanya kawasan kumuh perkotaan***

Selain persoalan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, Pemerintah Kota Mataram juga dihadapi oleh persoalan masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Kota Mataram. Berdasarkan hasil review Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (R2KPKP) Tahun 2020, Kota Mataram menetapkan 6 (enam) kawasan kumuh yang menjadi kerangka acuan dalam penanganan kumuh di Kota Mataram. Penanganan kumuh baik skala kawasan maupun skala lingkungan sudah dilaksanakan dari tahun 2015 sampai sekarang dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sampai dengan tahun 2020 luasan kumuh di Kota Mataram masih tersisa 112,60 Ha (*lihat Tabel 2.25*), dengan kawasan kumuh terbesar berada di Kecamatan Ampenan yaitu seluas 21,55 Ha. Kegiatan penanganan kumuh tanpa didukung peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan menjaga lingkungan yang sudah ditata akan dapat menimbulkan kumuh baru.

***Belum terpenuhinya PSU yang memadai di kawasan perumahan dan kawasan permukiman***

Penurunan kualitas infrastruktur pendukung perumahan maupun kawasan permukiman baik yang berada dalam deliniasi kumuh maupun yang tidak dalam deliniasi kumuh belum seluruhnya memadai terutama pada prasarana dan sarana utilitas (PSU). Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemeliharaan dan penyediaan secara swadaya terhadap PSU yang ada.



### c. **Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perhubungan**

Permasalahan global dan menjadi isu nasional dalam penyelenggaraan infrastruktur perhubungan di perkotaan adalah menciptakan pola transportasi makro berkelanjutan yang mampu mengimbangi perkembangan dan daya dukung perkotaan sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kinerja penyelenggaraan infrastruktur perhubungan Kota Mataram pada tahun 2020 dapat dilihat dari indikator *level of service* yang sebesar 0,36 persen atau masuk dalam kategori level B (*lihat Tabel 2.46*) dan rasio fatalitas kecelakaan sebesar 2 per 10.000 penduduk. Belum optimalnya kinerja dalam penyelenggaraan infrastruktur perhubungan di Kota Mataram disebabkan oleh:

#### ***Keterbatasan Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan***

Kinerja sistem pelayanan angkutan umum massal perkotaan di Kota Mataram, jika dinilai dari kualitas maupun kuantitas layanan masih cukup rendah. Cakupan layanan transportasi umum pada tahun 2020 sebesar 23 persen (*lihat Tabel 2.46*). Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kinerja dan kapasitas trayek angkutan perkotaan yang beroperasi sesuai standar pelayanan. Berdasarkan data perhubungan dalam angka tahun 2018, diketahui dari 13 trayek yang ditetapkan baik trayek utama, trayek cabang maupun trayek ranting, hanya 1 trayek yang aktif beroperasi yaitu Trayek Utama-Trayek A dengan rute Mandalika-Cakranegara-Mataram-Ampenan (PP) dan dari jumlah serta kondisi armada angkutan kota juga terus mengalami penurunan. Kemudian, untuk trayek angkutan perbatasan yang melintasi Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat, dari 10 trayek yang ada hanya 5 trayek yang beroperasi. Sedangkan, angkutan umum yang tidak dalam trayek seperti taksi, bus antardaerah, angkutan pariwisata dan lainnya masih cukup banyak beroperasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan moda transportasi alternatif yang lebih layak.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan angkutan massal untuk memenuhi permintaan masyarakat akan ketersediaan angkutan publik yang aman dan nyaman berupa BRT (*Bus Rapid Transit*) sebanyak 25 unit yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan RI, namun operasionalisasi moda tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan walaupun telah dilengkapi oleh rambu dan halte yang merupakan implikasi dari lemahnya koordinasi tentang penyelenggaraan angkutan massal perkotaan dan tidak adanya dukungan perluasan rute, penataan jalur dan jaminan keberlangsungan operasional. Selain permasalahan kapasitas trayek, belum optimalnya layanan sistem transportasi publik di Kota Mataram juga disebabkan oleh partisipasi pihak ketiga belum optimal.

#### ***Belum tercapainya konektivitas antar wilayah***

Kemudahan aksesibilitas dan keterhubungan antardaerah dalam suatu wilayah menjadi penting dalam setiap aktivitas dan pergerakan perjalanan. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya keterpaduan intra dan antar moda transportasi untuk membangun ekosistem transportasi yang handal. Diketahui rasio konektivitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 0,08 (*lihat Tabel 2.46*).

#### ***Masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi***

Keselamatan jalan menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dimana faktor manusia menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2020, capaian lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan yang tertangani sebesar 21 persen. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas diperlukan peningkatan disiplin pengendara melalui pengawasan dan pengendalian lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas melalui pemenuhan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di beberapa ruas jalan yang ditengarai rawan kecelakaan sebagai bentuk manajemen rekayasa lalu lintas. Persentase perlengkapan jalan terpasang di sepanjang Jalan Nasional, Jalan Provinsi di Kota Mataram tahun 2020 meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, *guardrail* dan patok pengaman jalan serta



fasilitas pendukung lainnya baik yang ada di jalan dan atau di luar badan jalan telah mencapai 63,3 persen. Peningkatan alat pemberi isyarat lalu lintas pada 7 (tujuh) lokasi yaitu di setiap persimpangan jalan yang terletak pada jalan nasional dan persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ter-meterisasi sebesar 49,85 persen. Pemeliharaan perlengkapan jalan Kota Mataram di tahun 2020 telah mencapai 100 persen, namun untuk efisiensi energi PJU perlu diupayakan dengan menggunakan lampu LED. Untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas lainnya, Pemerintah Kota Mataram juga telah membuat lajur sepeda pada ruas Jalan Udayana sepanjang 3,8 km. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir lonjakan dari emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta menciptakan kualitas udara ruang kota yang lebih sehat. Selain itu, dukungan terhadap peningkatan keselamatan di jalan raya dicapai dengan menyediakan layanan uji kendaraan bermotor secara berkala, dimana pada tahun 2020 persentase kendaraan yang melalui uji sebesar 73,63 persen.

### *Masih tingginya angka kepadatan lalu lintas*

Tingginya angka kepadatan lalu lintas di beberapa titik rawan kemacetan dan kecelakaan Kota Mataram sebagian besar disebabkan oleh tingginya mobilitas penduduk, arus yang melewati jalan melebihi kapasitas ruang jalan, banyaknya kendaraan parkir di badan jalan. Rasio waktu tempuh perjalanan di Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 1,75. Untuk itu diperlukan pengoptimalan pengaturan ruang parkir di ruang publik dan kawasan usaha karena masih minimnya capaian persentase pengajuan izin perparkiran pada tahun 2020 sebesar 18 persen.

Berdasar uraian di atas, dapat dipetakan analisis permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Mataram sebagai berikut.

Tabel 4.2.

### Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Mataram

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
1	Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah	Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal	Adanya ancaman pencemaran udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecenderungan meningkatnya gas rumah kaca baik dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran sampah maupun pembakaran dari industri rumah tangga.</li> <li>• Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan bahan bakar ramah lingkungan</li> </ul>
			Adanya ancaman pencemaran terhadap lingkungan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terkelolanya limbah domestik dan limbah industri rumah tangga</li> <li>• Pengelolaan Persampahan Belum Optimal</li> </ul>
			Kualitas tutupan lahan masih rendah	Masih rendahnya luasan RTH Publik
			Belum optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masih rendahnya kesesuaian lahan eksisting perkotaan dengan RTRW

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
2	Pembangunan Infrastruktur perkotaan belum optimal	Penyelenggaraan Infrastruktur perkotaan belum optimal	Infrastruktur ke-PU-an belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terpenuhinya fasilitas pendukung jalan yang sesuai standar di seluruh jalan perkotaan</li> <li>• Belum terpenuhinya layanan air minum yang aman</li> <li>• Belum terpenuhinya layanan air limbah yang layak</li> <li>• Masih rendahnya kualitas drainase perkotaan</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi perkotaan</li> <li>• Belum terpenuhinya SLF bangunan perkantoran dan pelayanan pemerintahan</li> </ul>
			Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tingginya angka backlog rumah</li> <li>• Masih adanya kawasan kumuh perkotaan</li> <li>• Masih adanya rumah yang belum memenuhi standar layak huni</li> <li>• Belum terpenuhinya PSU yang memadai di kawasan perumahan dan kawasan permukiman</li> </ul>
			Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perhubungan	Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### 4.1.3 FOKUS PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

Berdasarkan data dan informasi pada Bab 2, dapat disampaikan bahwa permasalahan makro yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah relatif kurangnya daya saing ekonomi dibandingkan wilayah sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan provinsi, apalagi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Fundamental ekonomi Kota Mataram juga terlihat rapuh (*unrobust*) ketika terjadi pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi Kota Mataram mengalami kontraksi cukup tajam yaitu sebesar minus 5,50 persen pada tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan produksi di seluruh kategori lapangan usaha, sementara kinerja ekonomi Provinsi NTB dan Nasional masih lebih baik meskipun juga sama-sama mengalami kontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar minus 0,64 persen dan minus 3,15 persen (*lihat Grafik 2.4*). Rapuhnya fundamental ekonomi Kota Mataram dikarenakan struktur pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor/kategori usaha tersier seperti kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami distorsi sebagai dampak pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat, barang dan jasa serta pembatasan operasional pusat-pusat perdagangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Hal ini berbeda dengan perekonomian dengan basis *engine of growth* pada sektor primer, sektor pertanian dan pertambangan, seperti Nasional dan Provinsi NTB tidak terlalu terdampak sebagai akibat pandemi COVID-19.

Data lain yang juga menunjukkan relatif rendahnya daya saing Kota Mataram adalah relatif tingginya Indeks Gini Kota Mataram yaitu sebesar 0,381 pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan Provinsi NTB yang capaiannya sedikit lebih baik yaitu sebesar 0,376 (*lihat Grafik 2.6*). Relatif tingginya Gini Rasio Kota Mataram merupakan dampak dari melambatnya kinerja sektor ekonomi unggulan Kota Mataram yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang. Indikasi lain dari relatif rendahnya daya saing Kota Mataram adalah sangat rendahnya angka inflasi kota Mataram, yaitu 0,58 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi NTB 0,60 persen dan Nasional 1,68 persen (*lihat Grafik 2.5*). Rendahnya angka inflasi Kota Mataram merupakan cerminan dari lemahnya daya beli masyarakat Kota Mataram.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan ekonomi daerah yang harus menjadi fokus dalam pembangunan Kota Mataram ke depan, di antaranya: 1) Sebagai wilayah kota yang menjadi pintu gerbang masuk dan keluar wilayah NTB, perekonomian Kota Mataram bertumpu pada kategori usaha tersier yakni kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Usaha Industri Pengolahan. Pada aspek ini, terlihat bahwa kinerja yang dicapai belum maksimal. Pertumbuhan kategori usaha yang dimaksud cukup tinggi, namun daya tahannya juga masih relatif rendah terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang merupakan kinerja terendah dalam lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2016-2020. Hal ini terlihat dari pertumbuhannya yang mengalami kontraksi sebesar minus 8,19 persen. 2) Pada sisi lain, sektor industri kreatif yang berkaitan dengan Urusan Perindustrian, Koperasi/UMKM, Pariwisata, Pertanian serta Perikanan yang memiliki potensi besar, namun belum berkembang secara baik. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi maupun pertumbuhan kategori usaha Industri Pengolahan, kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta kategori usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Permasalahan pada fokus Pengembangan Ekonomi Wilayah yang meliputi permasalahan **urusan Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UMKM, Pariwisata, Tenaga Kerja, Pertanian, dan Perikanan**, secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Melambatnya Kinerja Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan

Berdasarkan struktur pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 6 (enam) besar kategori lapangan usaha yang mendominasi di Kota Mataram di antaranya adalah: (1) kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (2) kategori usaha Konstruksi; (3) kategori usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; (4) kategori usaha Industri Pengolahan; (5) kategori usaha Jasa Pendidikan; serta (6) kategori usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dimana kinerjanya terus tumbuh tiap tahun. Adapun dari keenam kategori dimaksud ada 2 (dua) kategori usaha yang menjadi unggulan Kota Mataram, yaitu kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan kategori usaha Industri Pengolahan.

Secara keseluruhan aktivitas produksi dalam struktur pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram baik dari sisi kontribusi maupun laju pertumbuhan mengalami kontraksi pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 khususnya pada sektor unggulan. Dampak pandemi COVID-19 secara luas telah menimbulkan distorsi dalam keseluruhan aktivitas transaksi perdagangan di Kota Mataram. Pembatasan kerumunan dan operasional pusat-pusat perdagangan baik di pasar tradisional maupun pasar modern dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19 berimplikasi terhadap menyusutnya volume transaksi perdagangan.

Permasalahan kedua sebagai penyebab terjadinya kontraksi terhadap kinerja kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah fasilitas sarana distribusi perdagangan dalam hal ini kondisi pasar rakyat atau tradisional yang tidak representatif dan belum berstandar SNI. Pasar Kebon Roek tidak lagi mampu menampung jumlah pedagang yang beraktivitas.

Akibat dari permasalahan daya tampung tersebut adalah kesemrawutan di dalam bahkan meluap ke jalan sehingga memberi dampak bagi sekitarnya, khususnya terkait dengan dampak kemacetan yang menyebabkan terganggunya akses jalur destinasi wisata dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Kawasan Senggigi dan 3 (tiga) Gili. Demikian juga halnya dengan Pasar Cakranegara, selain dari sisi usia teknis bangunan ditambah lagi dari sisi dampak Gempa Lombok 2018 menjadi prioritas untuk direvitalisasi. Kondisi bangunan sangat memprihatinkan dan rawan terhadap keselamatan dan keamanan pedagang dan pengunjung pasar sebagai fasilitas publik yang selalu ramai dan melayani lebih dari 387 pedagang. Sarana perdagangan lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah sarana pergudangan, dimana sebagaimana fungsinya sebagai sarana penampungan, penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian maupun penyaluran barang-barang yang menjadi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam mendorong kinerja usaha pergudangan dalam pemenuhan tugasnya sebagai kontrol persediaan, penyalur dan penguatan produk dalam kegiatan produksi dan pendistribusian adalah keterkaitannya dengan potensi, kebermanfaatan dan legalitas usaha sarana pergudangan di Kota Mataram.

Permasalahan ketiga adalah belum optimalnya aspek pengamanan perdagangan yang tercermin dari pemenuhan parameter daerah tertib ukur (DTU) yang capaiannya baru mencapai 69 persen. Pengamanan perdagangan sangat krusial dalam upaya melindungi konsumen dari praktek ilegal metrologi. Lemahnya parameter DTU juga berdampak terhadap tidak akuratnya pencatatan aktivitas transaksi perdagangan dalam daerah. Selain itu, masih lemahnya tertib niaga dari pelaku usaha perdagangan juga berkontribusi terhadap belum optimalnya kinerja sektor perdagangan, mengingat pemenuhan aspek legalitas usaha menjadi titik sentral (*focal point*) dalam proses pencatatan transaksi aktivitas perdagangan.

Kondisi lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah keterkaitan dengan belum optimalnya kinerja kategori usaha Industri Pengolahan yang secara langsung berkontribusi besar terhadap kinerja sektor ekonomi unggulan Kota Mataram. Pengembangan sentra-sentra industri dengan basis keunggulan wilayah (*one village one product*) belum digarap secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari belum tersedianya dokumen rencana induk atau *roadmap* pengembangan industri daerah yang diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan serta program yang mengarah pada optimalisasi kinerja pengelolaan kategori usaha Industri Pengolahan dalam jangka panjang.

Selain itu, promosi investasi terhadap pengembangan produk-produk unggulan Kota Mataram juga belum dilakukan secara optimal karena lambatnya proses digitalisasi peta-peta potensi investasi terutama investasi-investasi yang mengarah pada pengembangan ekonomi unggulan yang memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas ekspor. Belum optimalnya promosi investasi ini tercermin dari net ekspor Kota Mataram yang terus mengalami defisit.

## **2. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**

Dominasi kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor baik disisi kontribusi maupun laju pertumbuhannya dalam struktur pembentuk PDRB tidak terlepas dari posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pusat pemerintahan di NTB sehingga secara keunggulan komparatif Kota Mataram lebih mapan dalam fasilitas-fasilitas publik yang mendukung tumbuhnya lapangan usaha tersebut dibandingkan daerah sekitarnya.

Di sisi lain, jika dilihat dari penetapan Kota Mataram sebagai salah satu daerah tujuan wisata dalam konsep Wisata Kota sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) menunjukkan kondisi yang kontradiktif dimana kinerja kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sangat memprihatinkan. Kategori usaha ini mengalami kontraksi yang sangat dalam terutama sejak pandemi COVID-19. Pengembangan pariwisata Kota Mataram sendiri belum memiliki konsep yang berkelanjutan serta penggalan potensi daya tarik wisata strategisnya belum optimal. Sektor

ekonomi kreatif yang dapat menghubungkan sektor pariwisata dengan sektor perdagangan, perindustrian dan UMKM juga belum terkelola dengan baik. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan solusi inovatif atas permasalahan yang dihadapi.

Belum optimalnya kinerja ekonomi kreatif juga tercermin dari masih lemahnya pengembangan sektor MICE (*Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition*) yang sebenarnya bisa digerakkan kapan saja, terutama dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan event-event kepariwisataan. Selain itu, belum terciptanya sinergitas lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif juga tercermin dari belum optimalnya upaya kolaboratif dalam mengembangkan digitalisasi pemasaran dan standarisasi produk-produk ekonomi kreatif melalui integrasi koperasi dan UMKM.

Pengembangan ekonomi kreatif juga belum didukung dengan peningkatan kapasitas angkatan kerja produktif yang akan terjun pada sektor ekonomi kreatif. Hal ini tidak terlepas dari belum tersedianya perencanaan tenaga kerja makro dan mikro yang dapat memberikan arahan dalam aspek perencanaan dan pendayagunaan sumber daya kreatif.

Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif di Kota Mataram belum didukung oleh pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang selama ini cenderung termarginalkan mengingat kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Mataram sangat kecil. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai tambah atau produktivitas sektor pertanian dan perikanan terutama untuk menyediakan bahan baku (*forward linkage*) bagi sektor pariwisata yang dimotori oleh ekonomi kreatif.

Berdasar uraian di atas, dapat dipetakan analisis permasalahan Perekonomian Kota Mataram sebagai berikut.

Tabel 4.3.

Analisis Permasalahan Perekonomian Kota Mataram

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
1	Relatif rendahnya daya saing ekonomi makro kota Mataram	Daya saing sektor unggulan relatif rendah dibandingkan sektor lainnya	<p>Belum optimalnya pertumbuhan sektor Perdagangan</p> <p>Arah investasi belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor unggulan</p> <p>Perencanaan dan pengembangan Perindustrian belum mendukung kebutuhan sektor unggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum representatifnya sarana distribusi perdagangan.</li> <li>• Masih kurang akuratnya pencatatan transaksi volume perdagangan</li> <li>• Masih belum terpetakannya produk-produk unggulan daerah untuk komoditas ekspor</li> <li>• Belum ter digitalisasinya peta potensi investasi daerah</li> <li>• Belum optimalnya pelaksanaan promosi investasi baik di dalam maupun di luar daerah</li> <li>• Belum terintegrasinya layanan pelaporan penanaman modal</li> <li>▪ Belum tersedia/ter-updatenya dokumen <i>roadmap</i> pengembangan industri</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis keunggulan wilayah (OVOP/ <i>one village one product</i>)</li> </ul>

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
		Daya Ungkit Sektor ekonomi kreatif untuk perekonomian belum cukup kuat	Belum optimalnya kinerja kelembagaan ekonomi lokal (Urusan Koperasi dan UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya SDM koperasi terutama dalam penggunaan teknologi informasi</li> <li>• Masih lemahnya pengelolaan bisnis koperasi</li> <li>• Masih belum terjalin integrasi dalam pengembangan koperasi dan UMKM untuk mewujudkan koperasi unggul dan UMKM yang berdaya saing</li> <li>• Masih lemahnya aspek pemasaran produk UMKM melalui platform digital</li> <li>• Masih lemahnya kualitas produk UMKM yang terstandarisasi (PIRT, BPOM, dan Halal) dalam upaya penetrasi pasar pada jaringan pemasaran ritel modern</li> <li>• Belum tersedianya ruang/ sarana pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM</li> <li>• Masih belum terjalinnya sinergitas dalam pengembangan UMKM dengan konsep triple helix ABG (<i>Academician, Business and Government</i>)</li> </ul>
			Sektor Pariwisata kurang mampu mengungkit pengembangan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi wisata</li> <li>▪ Belum optimalnya promosi wisata yang</li> <li>▪ Belum optimalnya pengembangan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>▪ Masih lemahnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual</li> <li>▪ Masih belum optimalnya pengembangan sektor MICE untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan event-event keolahragaan dan keagamaan.</li> <li>• Masih belum tersedianya ruang kreatif dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif</li> </ul>
			Sektor Pertanian belum mampu menjadi pendukung pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan sektor pertanian untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif</li> <li>▪ Belum Optimalnya pemberdayaan terhadap kelompok tani</li> <li>▪ Masih rendahnya peningkatan nilai tambah produksi daging guna mendukung industri kuliner</li> <li>• Masih adanya penyakit tanaman</li> </ul>

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
			Sektor Perikanan kurang mampu menjadi pendukung pengembangan industri kreatif	<p>yang mengancam produksi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya pengelolaan hasil perikanan</li> <li>• Masih Belum optimalnya pemasaran hasil perikanan</li> </ul>

#### 4.1.4 FOKUS KONDUSIFITAS WILAYAH

Kondusifitas suatu wilayah erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Kondusifitas wilayah Kota Mataram digambarkan dengan Indeks Keamanan Manusia (IKM), dimana IKM Kota Mataram berada pada nilai 3,7 dari skala maksimal 5, yang berarti kondusifitas wilayah Kota Mataram belum optimal. Hal ini dapat diuraikan menjadi dua faktor utama kondisi yang merujuk pada gambaran kondusifitas daerah yaitu derajat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengenai potensi dan ketahanan bencana. Permasalahan pada fokus Kondusifitas Wilayah yang meliputi permasalahan **urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kewilayahan**, secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum terkendali secara optimal

Kota Mataram sebagai ibukota provinsi memiliki karakteristik potensi gangguan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) yang sejenis dengan kota pada umumnya akibat pengaruh dari kepadatan penduduk, keragaman tingkat pendidikan, kesenjangan sosial dan persentase pendatang dibanding dengan wilayah di sekitarnya. Kota Mataram masih mengalami berbagai jenis gangguan keamanan yang tinggi. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk di Kota Mataram tercatat masih berada di angka 24 kejadian (*lihat Tabel 2.92*). Gangguan kamtibmas akibat penyakit masyarakat dan tindakan kriminal belum mampu dibendung oleh peran personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat lingkungan sebagai unit wilayah terkecil di Kota Mataram. Pelanggaran ketertiban umum akibat pelanggaran perda juga masih belum optimal ditangani dan diselesaikan oleh aparat penegak perda. Selain itu, risiko sebagai ibukota provinsi yang juga mengemban tugas sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat Kota Mataram harus siap dengan masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam proses politik dan demokrasi yang berjalan akibat kurangnya pendidikan politik di masyarakat. Kota Mataram juga masih mencatat ada konflik sosial horizontal di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat pecah akibat kurang maksimalnya pengelolaan potensi dan rehabilitasi konflik di masyarakat.

##### 2. Masih Rentannya Ketahanan Daerah atas Bencana

Risiko bencana di Kota Mataram masih tergolong sedang-tinggi (*lihat Tabel 2.26*). Seluruh wilayah Kota Mataram termasuk dalam kawasan rawan gempa bumi. Selain itu, Kota Mataram juga memiliki ancaman bencana tsunami dengan wilayah rawan di kawasan sepanjang wilayah pesisir kota antara lain Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru. Sementara itu, bencana banjir merupakan bencana alam musiman yang hampir pasti terjadi di Kota Mataram pada tiap musim hujan. Potensi bencana banjir disebabkan karena Kota Mataram merupakan salah satu daerah hilir dari 4 (empat) sungai besar dari sistem DAS Dodokan dan posisinya berada pada ketinggian yang relatif rendah



(0-75 meter dpl) dengan kemiringan relatif datar landai. Lokasi banjir di Kota Mataram di antaranya di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok dan Sungai Unus. Namun, pemenuhan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan antisipasi bahaya perubahan iklim di Kota Mataram belum optimal. Kondisi ini tercermin dari belum optimalnya kebijakan dan penanggulangan bencana, belum efektifnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, belum optimalnya pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, dan logistik, belum efektifnya penanganan tematik kawasan bencana, belum efektifnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana, belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan belum optimalnya upaya mitigasi perubahan iklim.

Berdasar uraian di atas, dapat dipetakan analisis permasalahan fokus kondusifitas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Analisis Permasalahan Fokus Kondusifitas Wilayah

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
1	Stabilitas kondusifitas wilayah belum terjaga optimal	Stabilitas trantibum linmas belum terkendali secara optimal	Gangguan keamanan masyarakat masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terdapatnya gangguan kamtibmas (penyakit masyarakat dan kriminalitas) yang belum tertangani</li> <li>▪ Pelanggaran PERDA masih tinggi</li> <li>▪ Masih terdapatnya daerah rawan konflik horizontal (sosial)</li> <li>• Pendidikan politik dan demokrasi masyarakat masih rendah</li> </ul>
		Masih rentannya ketahanan daerah atas bencana	Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dan non alam masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ belum optimalnya kebijakan dan penanggulangan bencana</li> <li>▪ belum efektifnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu</li> <li>▪ belum optimalnya pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, dan logistik</li> <li>▪ belum efektifnya penanganan tematik kawasan bencana</li> <li>▪ belum efektifnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana,</li> <li>▪ belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana,</li> <li>• belum optimalnya upaya mitigasi perubahan iklim</li> </ul>

#### 4.1.5 FOKUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Tata kelola pemerintah yang berkualitas berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasar data dan informasi yang telah disampaikan dalam Bab II dapat disampaikan bahwa permasalahan makro tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam lima tahun terakhir adalah capaian nilai Reformasi Birokrasi yang kurang optimal. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu upaya komprehensif untuk menangkap berbagai perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019 dan 2020 oleh KemenPAN-RB, Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mataram berturut-turut adalah 62,27 dan 64,00 atau masih dalam kategori "B" dari skala maksimal Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 100. Sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun tersebut adalah mendapatkan predikat BB atau dengan nilai minimal 70, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan Kota Mataram belum optimal dalam mencapai target yang diinginkan. Permasalahan pada fokus Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi permasalahan **Urusan Unsur Penunjang Perencanaan, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Kearsipan, Keuangan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, serta Penelitian dan Pengembangan**, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Berjalan Secara Optimal

Kinerja akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan direpresentasikan oleh pencapaian nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk menilai pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*) serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Pada evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram oleh KemenPAN-RB pada tahun 2020, Kota Mataram memperoleh nilai 65,76 atau berpredikat B dari skala 100. Hasil ini menunjukkan capaian penerapan SAKIP di Kota Mataram masih belum optimal, walaupun mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menggambarkan beberapa faktor penyebab yaitu:

##### *Kinerja perencanaan pembangunan masih lemah*

Aspek perencanaan merupakan komponen dengan bobot terbesar dalam penilaian implementasi SAKIP oleh KemenPAN-RB. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan beberapa pendekatan yaitu: teknokratis, politis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*. Kualitas Perencanaan pembangunan daerah akan tergambar saat terjadi sinergitas, harmonisasi, dalam sistem perencanaan pembangunan, keterkaitan antara RPJPN dan RPJMN yang diturunkan dalam RPJPD dapat dijadikan pedoman dalam menyusun RPJMD, selanjutnya RPJMD dapat dijabarkan dalam Bentuk RKPD yang kemudian terjamin direalisasikan dalam penganggaran. Aspek perencanaan pada evaluasi SAKIP masih rendah pada angka 20,79 (*lihat Tabel 2.73*) hal ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pembangunan masih lemah. Kurangnya sinkronisasi penerjemahan kebijakan Nasional di daerah dalam dokumen perencanaan Kota Mataram terutama dalam pemenuhan data dan informasi kebutuhan pembangunan yang akurat, mengingat ketergantungan Kota Mataram terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Selain itu, kurangnya konsistensi antardokumen perencanaan daerah mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan pembangunan tahunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen anggaran juga harus mendapat perhatian karena menunjukkan lemahnya sistem pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Selain itu dari pendekatan *bottom-up*, persentase usulan masyarakat yang terakomodir masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak usulan yang bersifat kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak berdasarkan isu yang dirasakan secara umum.

Salah satu faktor lain penyebab lemahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram yaitu masih lemahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik. Akan tetapi dalam implementasinya, fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan seringkali tumpang tindih dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang juga memiliki fungsi kelitbangan terhadap isu-isu pembangunan daerah, sehingga peran litbang dalam mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan menjadi lemah. Selain itu, kurangnya peneliti atau sumber daya manusia peneliti akan memengaruhi hasil riset yang dihasilkan, sehingga Balitbang di daerah belum tentu menghasilkan kajian-kajian yang bisa dijadikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan. Terlebih belum ada regulasi yang mengatur perumusan kebijakan harus dilakukan kajian-kajian kebijakan sebelum diterbitkan untuk memberikan kesadaran kepada formulator kebijakan agar menggunakan hasil-hasil riset yang dihasilkan dari Balitbang Daerah.

#### ***Kualitas pengawasan internal belum optimal***

Kualitas pengawasan internal Kota Mataram dapat dilihat dari pencapaian nilai level maturitas SPIP. Maturitas SPIP menggambarkan karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Mataram (lihat *Tabel 2.72*) berada pada level 3 dari skala 5 level atau pada tingkat "Terdefinisi" yang berarti Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi memadai dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Mataram belum optimal. Beberapa faktor menjadi penyebabnya yaitu belum optimalnya rencana tindak (*action plan*) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi, masih adanya temuan permasalahan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, masih adanya rekomendasi yang belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut dan belum ditindaklanjuti, lemahnya pengendalian internal OPD serta masih belum optimalnya peran APIP.

Kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintah Kota Mataram berada pada level 3 dari skala 6 level atau tingkatan *Integrated* yang artinya praktik aparatur APIP telah profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Akan tetapi, peran yang dijalankan hanya sebatas sebagai "watchdog" atau layanannya hanya terbatas pada audit ketaatan, belum mampu berperan sebagai konsultan yang profesional (*trusted advisor*) dan sebagai *strategic business partner* bagi manajemen pemerintah daerah Kota Mataram.

Tahun 2020, Kota Mataram melalui Inspektorat telah melakukan review internal terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

- a. Predikat A sebanyak 13 SKPD;
- b. Predikat BB sebanyak 16 SKPD;
- c. Predikat B sebanyak 10 SKPD;
- d. Predikat CC sebanyak 0 SKPD;
- e. Predikat C sebanyak 0 SKPD.

Dari review internal Inspektorat tersebut, nilai evaluasi SAKIP Kota Mataram periode tahun 2019 menjadi 73,11 atau pada predikat BB. Akan tetapi, hasil evaluasi internal oleh Inspektorat ini belum tergambarkan dalam evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mataram oleh KemenPAN-RB, karena evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan belum menjadi bahan perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal Perangkat Daerah.

### ***Tata Kelola kelembagaan organisasi perangkat daerah belum optimal***

Lemahnya implementasi SAKIP di tingkat perangkat daerah juga disebabkan oleh belum optimalnya kematangan organisasi perangkat daerah yang terbentuk. Posisi strategis OPD karena sebagai instrumen dan kerangka kerja sistem pemerintahan daerah dan wadah menjalankan urusan pemerintahan serta wadah mewujudkan visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah. Oleh karena itu keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh efektifitas OPD yang salah satunya ditentukan oleh tingkat kematangan OPD. Kematangan OPD dinilai dari tata laksana melalui proses bisnis, budaya organisasi, dan inovasi yang dilakukan. Capaian kematangan Organisasi di lingkup pemerintah Kota Mataram berada pada level sedang atau pada taraf rata-rata tiga dari lima tingkat kematangan dengan tingkat kematangan sangat tinggi untuk kematangan maksimal (*lihat Tabel 2.69*). Hal ini disebabkan oleh penataan organisasi yang terbentuk belum efektif. Pembentukan organisasi perangkat daerah belum berorientasi pada kebutuhan untuk pencapaian kinerja sasaran strategis daerah.

### ***Manajemen ASN belum optimal***

Permasalahan terbesar dalam manajemen ASN Kota Mataram adalah mengenai kualifikasi dan kompetensi untuk mencapai profesionalitas ASN. Capaian Indeks Profesionalitas Kota Mataram tahun 2020 berada pada angka 48,99 atau predikat "sangat rendah" dari skala 100 tertinggi (*lihat Tabel 2.87*). Hal ini merupakan rapor merah bagi manajemen pengelolaan ASN Kota Mataram. Dari dimensi Kualifikasi Indeks Profesionalitas ASN, PNS Kota Mataram dirata-ratakan memiliki pendidikan setingkat D-III. Lebih mengkhawatirkan lagi pada Dimensi Kompetensi Indeks Profesionalitas ASN, PNS Kota Mataram rata-rata hanya pernah satu kali mengikuti pengembangan kompetensi baik itu sebatas pada diklat kepemimpinan atau fungsional sesuai jabatan atau tupoksi sebagai syarat menduduki jabatan struktural/fungsional. Oleh karena itu, rendahnya jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis minimal 20 jam pelajaran maupun seminar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya menunjukkan kurangnya minat maupun kesempatan PNS Kota Mataram untuk mengembangkan kompetensi diri. Manajemen ASN di Kota Mataram belum optimal dikarenakan evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis *merit system*, lemahnya kompetensi pegawai, serta pendistribusian ASN masih belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan.

### ***Tata kelola kearsipan masih belum optimal***

Pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki dalam manajemen pengelolaan arsip di pemerintahan khususnya pada pemerintah Kota Mataram akibat belum atau kurangnya pemahaman akan pentingnya arsip, mengakibatkan berfungsinya arsip sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai sehingga tugas-tugas di bidang kearsipan dipandang rendah. Capaian OPD yang menerapkan arsip secara baku baru mencapai 49 persen (*lihat Tabel 2.58*). Pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan juga belum memadai, penempatan pegawai yang disertai tugas tanggungjawab mengelola arsip tidak didasarkan pada persyaratan kualifikasi yang diperlukan, bahkan banyak yang beranggapan cukup dipenuhi pegawai yang berpendidikan rendah. Pegawai kearsipan yang kurang cakap dan kurang terbimbing secara teratur mengakibatkan tidak dapat mengimbangi perkembangan dalam pengarsipan dokumen aset. Lebih jauh, bertambahnya volume arsip secara terus menerus mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia tidak dapat menampung arsip.

## **2. Akuntabilitas Keuangan Belum Optimal**

Meskipun Kota Mataram secara konsisten mendapat predikat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Namun, berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang meliputi permasalahan ketertiban pengelolaan persediaan, ketertiban pengelolaan Aset Tetap pada OPD, kesalahan

penganggaran, temuan pada belanja Bantuan Sosial Modal Usaha, masalah pengelolaan BOS, permasalahan kriteria penerimaan pendapatan lain-lain, serta permasalahan pada ketertiban pengelolaan retribusi perizinan.

Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Daerah, melalui sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tepat. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal baik melalui upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi potensi PAD. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini Transfer Dana Pusat, semakin kecil atau kondisi otonomi daerah semakin mantap. Pada tahun 2020, Kota Mataram hanya mampu meningkatkan kemandiriannya menjadi 23 persen dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 20 persen (*lihat Tabel 2.80*) bahkan persentase pada tahun 2020 masih lebih rendah dari capaian tahun 2017 hingga 2019. Kemandirian Kota Mataram saat ini masih dalam kategori rendah. Hal ini juga menggambarkan kurang optimalnya upaya pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi-potensi PAD yang ada.

### 3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) belum memadai

Penyelenggaraan *e-Government* pada hakikatnya adalah meningkatkan transparansi dimana dengan sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk terkait dengan anggaran publik. Kota Mataram telah menunjukkan keseriusan untuk menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sejak Walikota Mataram bersama 28 kepala daerah dari kabupaten/kota di Indonesia menandatangani kesepakatan dan perjanjian kerja sama implementasi "*smart city*" dan "*e-Government*" disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada 1 November 2017. Kesepakatan tersebut mendorong pemerintah kota untuk menerapkan ratusan aplikasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik antara lain perencanaan elektronik (*e-planning*), penganggaran elektronik (*e-budgeting*), sehingga anggaran pemerintah kota dapat dilihat dan dikontrol terbuka oleh publik. Selain itu, ada juga aplikasi penggajian elektronik (*e-remuneration*). Akan tetapi tidak semua aplikasi pelayanan tersebut dapat berjalan sesuai harapan, seperti pada penerapan *e-planning* belum disertai dengan integrasi dengan *e-budgeting* untuk memastikan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan. *E-remuneration* sendiri hingga saat ini belum diterapkan sama sekali.

Penyelenggaraan *e-Government* kemudian diukur dengan menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dievaluasi oleh KemenPAN-RB. Tahun 2019, capaian Indeks SPBE Kota Mataram berada pada angka 2,51 dari target rata-rata nasional 2,6 dengan skala maksimal 5 (*lihat Tabel 2.49*). Dengan demikian, capaian penyelenggaraan SPBE kota mataram masih di bawah target rata-rata nasional. Implementasi SPBE dan konsep *Smart City* di Kota Mataram telah dikaji dan dituangkan dalam regulasi daerah serta telah memiliki petunjuk teknis yang siap diaplikasikan. Akan tetapi hasil evaluasi SPBE dan *Smart City* Kota Mataram menunjukkan bahwa belum familiarnya konsep tata kelola ini di tataran birokrasi terlebih lagi di tataran masyarakat awam. Belum optimalnya keandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baik dari sisi perangkat keras maupun Sumber Daya Manusia sebagai modal awal pembangunan SPBE harus menjadi perhatian. Pemerintah Kota Mataram juga harus mengoptimalkan jenis layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang akan diintegrasikan dalam SPBE. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik juga harus didukung oleh upaya keamanan informasi. Indeks Kematangan Keamanan Informasi Kota Mataram masih berada pada tingkat reaktif (tingkat 1) dari maksimal tingkat optimal (tingkat 5), sehingga Kota Mataram perlu memperhatikan kinerja pada urusan persandian. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya juga harus dimodali dengan

pengelolaan data dan informasi sektoral yang memadai. Pemerintah Kota Mataram belum andal dalam membangun konsep satu data dan informasi sektoral yang dapat diakses dengan mudah dan yang lebih penting lagi dapat dipercaya keakuratannya.

#### 4. Kualitas pelayanan publik belum optimal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua kegiatan pemerintahan pada dasarnya merupakan kegiatan pelayanan publik dan harus melakukan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, belum semua perangkat daerah melakukan pengukuran kepuasan masyarakat.

Selama ini, pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tertentu di Kota Mataram dipengaruhi semata-mata atas permintaan yang dilakukan KemenPAN, Ombudsman atau instansi lain dalam rangka kebutuhan penilaian tahunan. Akibatnya, hanya pelayanan-pelayanan yang dinilai tersebut yang secara berkelanjutan melakukan perbaikan standar pelayanan dan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik yang dilakukan, pelayanan lain yang tidak dituntut untuk berinovasi akhirnya hanya beroperasi berprinsip pada *"business as usual"* tanpa memperhitungkan persepsi kepuasan masyarakat sebagai sebenar-benarnya konsumen yang kebutuhan dan harapannya harus dipenuhi oleh pelayanan yang diberikan pemerintah. Perangkat daerah belum melakukan program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan untuk menunjang tupoksinya. Pemerintah Kota Mataram perlu memperluas pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dijalankan di seluruh SKPD sehingga dapat menggambarkan kualitas pelayanan publik Kota Mataram secara keseluruhan untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Berdasar uraian di atas, dapat dipetakan analisis permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Kota Mataram sebagai berikut.

Tabel 4.5.

Analisis Permasalahan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
1	Kinerja tata kelola pemerintahan belum mencapai target yang diinginkan	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal	Kinerja perencanaan pembangunan masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan</li> <li>• Perencanaan bottom up masih lemah</li> <li>• Pemanfaatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan masih lemah</li> </ul>
			Kualitas pengawasan internal belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya rencana tindak (action plan) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi</li> <li>• Kompetensi SDM APIP belum maksimal</li> </ul>

NO	PERMASALAHAN	INTI MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
1	2	3	4	5
			Tata Kelola kelembagaan organisasi perangkat daerah belum optimal	Penataan organisasi belum efektif dan belum berorientasi pada kebutuhan untuk pencapaian kinerja sasaran strategis daerah
			Manajemen ASN belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualifikasi ASN Kota Mataram masih rendah</li> <li>• Kompetensi PNS Kota Mataram rata-rata sangat rendah</li> </ul>
			Tata kelola kearsipan masih belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kurang pemahaman pentingnya arsip yang baku</li> </ul>
		Akuntabilitas Keuangan belum optimal	Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelemahan Sistem Pengelolaan Aset</li> <li>• Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD</li> <li>• Kelemahan pengelolaan PAD yang berpengaruh pada kemandirian daerah</li> </ul>
		Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) belum memadai	Pemenuhan Aspek SPBE belum optimal termasuk dalam implementasi konsep "Smart City"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum optimal</li> <li>• Layanan Administrasi pemerintah yang berbasis elektronik belum optimal</li> <li>• Layanan publik pemerintah yang berbasis elektronik belum optimal</li> <li>• Upaya keamanan Informasi daerah belum optimal</li> <li>• Ketersediaan data dan informasi sektoral daerah belum handal</li> </ul>
		Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	Belum semua SKPD melakukan pengukuran kepuasan masyarakat	Pengukuran kepuasan layanan semata-mata atas permintaan yang dilakukan KemenPAN, Ombudsman atau instansi lain
			Inovasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah kurang optimal	Perangkat daerah belum melakukan program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan untuk menunjang tupoksinya.



## 4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Analisa dilakukan berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, yang harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah atau jangka panjang. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kota Mataram;
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling memengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Mataram lainnya;
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kota Mataram di berbagai bidang;
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota Mataram;
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Mataram; dan
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Mataram yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

### 4.2.1 ISU INTERNASIONAL/GLOBAL

Isu internasional (isu global) yang diulas merupakan isu global yang berpengaruh langsung pada kondisi dalam negeri, termasuk Kota Mataram diantaranya: 1) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 2) *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan 3) Pandemi COVID-19. Ketiga isu global di atas, dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kestabilan ekonomi dan sosial, pelestarian lingkungan, dan reformasi tata pemerintahan di Kota Mataram.

#### 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Diawali dari perjanjian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kuala Lumpur Malaysia, dimana pada konferensi ini mengerucut pada kesamaan visi antarnegara-negara ASEAN yang dirumuskan dalam wujud ASEAN *Vision 2021*. Tujuan dari visi ini adalah menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dengan pengembangan dan pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN. Cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN *Economic Ministers* (AEM) di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Agustus 2006 yang meliputi:

##### a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu: a) aliran bebas barang; b) aliran bebas jasa; c) aliran bebas investasi, d) aliran modal yang lebih bebas, serta e) aliran bebas tenaga kerja terampil. Di samping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Services* (PIS) dan kerjasama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

#### b. Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerjasama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

#### c. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata

MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN.

#### d. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang mengglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasok global (*global supply chain*), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA.

MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Hal ini terkait dengan terbukanya pasar bebas dalam satu basis produksi. Tantangan utama dari MEA adalah bagaimana menciptakan manusia yang bisa bersaing, produk yang bermutu dan berdaya saing serta mengembangkan industri yang berorientasi nilai tambah. Tantangan ini juga berlaku bagi perkembangan ekonomi daerah, dalam hal ini Kota Mataram. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Kota Mataram masih harus banyak mengejar pembangunan perekonomian daerah untuk menangkap peluang dari forum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Masalah utama dalam kualitas ketenagakerjaan daerah adalah dalam pemenuhan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Besarnya jumlah angkatan kerja belum diimbangi dengan keterampilan dan keahlian yang kompeten berdasarkan standarisasi global. Lebih jauh, kondisi belum *link and match* kebutuhan antara dunia pendidikan dengan pasar kerja dan dunia usaha terkini juga menjadi penghambat penyerapan tenaga kerja daerah dalam persaingan ekonomi global. Untuk itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat keterampilan dan keahliannya.

## 2. Sustainable Development Goals Tahun 2015

Pada Sidang Umum PBB yang selenggarakan pada bulan September 2015 dan diikuti oleh 159 kepala negara termasuk Indonesia, menyepakati TPB/SDGs menjadi agenda global 2030. Konsep TPB/SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi

pasca 2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

TPB/SDGs tersebut berisikan 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di dalamnya terkandung 17 TPB/SDGs Tahun 2016-2030 yang meliputi:

**Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)**

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana (*End poverty in all its forms everywhere*).

**Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)**

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan (*End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*).

**Tujuan 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)**

Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia (*Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*).

**Tujuan 4 – Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)**

Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua (*Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning*)

**Tujuan 5 – Kesenjangan Gender (*Gender Equality*)**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (*Achieve gender equality and empower all women and girls*).

**Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)**

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua (*Ensure access to water and sanitation for all*)

**Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)**

Menjamin akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua (*Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*)

**Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)**

Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua (*Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all*)

**Tujuan 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)**

Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi (*Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation*).

**Tujuan 10 – Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)**

Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara (*Reduce inequality within and among countries*)

**Tujuan 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)**

Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (*Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable*)

**Tujuan 12 – Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (*Responsible Consumption and Production*)**

Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (*Ensure sustainable consumption and production patterns*).

**Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)**

Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (*Take urgent action to combat climate change and its impacts*).

**Tujuan 14 – Ekosistem Lautan (*Life Below Water*)**

Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan (*Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources*)

**Tujuan 15 – Ekosistem Daratan (*Life on Land*)**

Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*Sustainably managed forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss*).

**Tujuan 16 – Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institution*)**

Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (*Promote just, peaceful and inclusive societies*)

**Tujuan 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)**

Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*Revitalize the global partnership for sustainable development*)

Keterkaitan tujuan dan target SDGs 2016-2030 yang dikaji dan disepakati melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang akan diuraikan pada sub bab Isu Pembangunan Wilayah Kota Mataram.

### 3. Pandemi COVID-19

Merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh dunia, termasuk Indonesia berdampak terhadap dimunculkannya berbagai kebijakan yang turut mempengaruhi dinamika perekonomian di seluruh wilayah Indonesia mulai dari *work from home*, *social distancing* dan *physical distancing*, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentu ini akan menimbulkan dampak bagi perekonomian di seluruh Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mempersiapkan diri terhadap apa yang terjadi bila kasus penyebaran virus ini semakin berlarut. Dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik di sektor riil, bursa saham. Dan yang paling dirasakan berat terhadap perekonomian secara global di Indonesia, dimana mengalami perlambatan pertumbuhan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 berkontraksi minus 2,07 persen. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama tiga kuartal beruntun pada tahun tersebut. Pada 2020, konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar minus 2,63 persen. Bahkan kontraksi tersebut berlanjut hingga ke kuartal I-2021 yang mencatatkan angka minus 2,23 persen. Padahal, komponen konsumsi rumah tangga menyumbang 56,9 persen dari total PDB. Konsumsi rumah tangga menurun berarti daya beli masyarakat melemah yang ditunjukkan dengan angka inflasi pada Desember 2020 mencapai 0,45 persen dengan angka inflasi sepanjang 2020 di angka 1,68 persen.

Melemahnya konsumsi rumah tangga secara eksplisit menggambarkan melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan. Semakin banyak yang menganggur dan jatuh miskin maka tingkat konsumsi rumah tangga akan semakin terpukul. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang (0,41 persen) dibandingkan posisi Maret 2020, juga meningkat 2,76 orang dibanding September 2019. Terkait ketenagakerjaan, sebanyak 2,56 juta menjadi pengangguran karena COVID-19. Lalu, 0,76 juta bukan angkatan kerja juga ikut kena dampak COVID-19, 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja atau *shorten hours* karena COVID-19, begitu pula dengan 1,77 juta orang yang dirumahkan atau tidak bekerja sementara. Dengan demikian, dari total 203,9 juta penduduk usia kerja, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mencapai 14,28 persen, sedangkan angkatan kerja yang terdampak COVID-19 mencapai 20,51 persen.

Mewabahnya virus corona juga berdampak pada anjloknya perdagangan saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah merosot tajam. Pada penutupan perdagangan di 2020, yaitu pada Rabu (30/12/2020), IHSG melemah 57,1 poin atau 0,95 persen ke posisi 5.979,07. Sementara, indeks saham LQ45 juga melemah 1,13 persen ke posisi 934,88. Dampak lain juga berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Secara rerata keseluruhan tahun 2020, nilai tukar Rupiah melemah 2,66 persen ke level Rp 14.525 per dolar AS, dari Rp 14.139 per dolar AS pada 2019. Sempat mengalami tekanan pada level terendah, yaitu Rp 16.575 per Dollar AS.

Walaupun pandemi merupakan guncangan di sektor kesehatan, namun dampak yang dirasakan bersifat *multiplier*. Tekanan terjadi pada sistem kesehatan dan dampak pandemik terasa di berbagai lini sosial perekonomian. Rumah tangga menghadapi risiko kehilangan pendapatan karena PHK akibat pembatasan kegiatan, risiko kenaikan harga kebutuhan pokok akibat distribusi terganggu, gangguan rantai pasok yang mengganggu neraca keuangan perusahaan yang berakibat pada kebangkrutan. Bagi pemerintah daerah hal ini berarti penurunan pendapatan daerah.

Tabel 4.6.

Peluang dan Ancaman dari Isu Global

Isu Global	Peluang	Ancaman
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 2) dan 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ membuka lapangan kerja lebih luas dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam</li> <li>▪ peningkatan pangsa pasar karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada</li> <li>▪ inovasi produk lokal sejalan dengan permintaan pasar global</li> <li>▪ keterbukaan informasi pasar</li> <li>▪ keterbukaan investasi melalui kemudahan masuknya <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i> atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ persaingan tenaga kerja terkait pemenuhan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja mengingat saat ini secara kualifikasi RLS penduduk usia diatas 25 tahun Kota Mataram masih setara dengan kelas 1 SMA</li> <li>▪ masuknya produk dari luar yang lebih murah dan berkualitas</li> <li>▪ persaingan produk lokal mengingat pengembangan komoditas unggulan Kota Mataram sebagai komoditas ekspor belum optimal</li> </ul>
<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ peningkatan kualitas hidup masyarakat</li> <li>▪ peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>▪ peningkatan kualitas lingkungan</li> </ul>	
Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka harapan hidup menurun</li> <li>▪ Aktivitas ekonomi menurun menyebabkan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan</li> <li>▪ pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana laboratorium</li> <li>▪ Transformasi aktivitas ekonomi</li> <li>▪ Transformasi tata Kelola pemerintahan</li> </ul>	<p>perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penurunan penerimaan pendapatan daerah</li> <li>▪ pengurangan jam kerja hingga PHK menyebabkan meningkatnya angka pengangguran</li> <li>▪ Meningkatnya jumlah penduduk miskin menyebabkan permasalahan sosial</li> <li>▪ Degradasi mentalitas pendidikan akibat belum siap dalam transformasi tata kelola pendidikan</li> </ul>
--	--	---

#### 4.2.2 ISU NASIONAL

Isu nasional diramu dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 dengan pelaksanaan pada tahun keempat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020–2024. Untuk RPJMN, analisis isu tetap memperhatikan RPJMN Tahun 2015–2019 mengingat kendali pemerintahan tetap dipegang oleh Presiden Joko Widodo, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa ada beberapa isu-isu pembangunan nasional yang masih diusung dalam pemerintahan beliau di Periode Kedua ini.

##### 1. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “**INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**” yang didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah;
3. Keberpihakan kepada rakyat; dan
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Isu utama yang diangkat dalam RPJP Nasional Tahun 2005–2025 (PJM IV) adalah:

- 1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, yang ditandai oleh:
  - a. Rendahnya kualitas SDM Indonesia yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional
  - b. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah
- 2) Ekonomi
  - a. Basis kekuatan ekonomi masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja murah
  - b. Kurangnya pemahaman, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dasar hak-hak dasar masyarakat miskin

- 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
  - a. Tingginya persaingan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan
- 4) Sarana dan Prasarana
  - a. Rendahnya aksesibilitas, kualitas ataupun cakupan layanan dalam mendukung ketahanan pangan, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana
- 5) Politik
- 6) Hukum dan Aparatur
  - a. Peningkatan kemandirian aparaturnya lembaga tinggi negara
  - b. Penyalahgunaan kewenangan
- 7) Sumber Daya Alam dan Lingkungan
  - a. SDA sebagai modal pembangunan versus penopang sistem kehidupan
  - b. Pencemaran air, udara dan tanah
  - c. Konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam

## 2. RPJMN 2020-2024

Dalam Buku RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara antara lain: (1) belum optimalnya pelayanan dasar, (2) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam; (3) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya antar pulau dan antar pulau di Kepulauan Nusa Tenggara; (4) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan; (5) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah; dan (6) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Adapun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024 yang akan memberi pengaruh langsung terhadap pembangunan Kota Mataram, sebagai berikut:

- 1) Industri 4.0 di lima Subsektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi, dengan latar belakang isu:
  - a. Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3 persen lebih rendah dari pertumbuhan nasional.
  - b. Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain
  - c. Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.



- d. Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten.

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Harmonisasi peraturan dan kebijakan
- b. Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan
- c. Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi
- d. Peningkatan investasi
- e. Pemberdayaan UMKM

2) Destinasi Pariwisata Prioritas: Lombok-Mandalika, dengan latar belakang isu:

- a. Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya.

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Perintisan Destinasi Pariwisata
- b. Penanganan Jalan Mendukung
- c. Pembangunan Pelabuhan dan Bandara
- d. Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes
- e. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata
- f. Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan

3) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, dengan latar belakang isu:

- a. Belum terbentuk business model korporasi petani dengan skala ekonomi yang menerapkan konsep *Society 5.0*
- b. Belum terintegrasinya 1.029 kluster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar.
- c. Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23 persen dan keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi dan pasar.
- d. Rantai pasok komoditas panjang dan biaya logistik mahal: harga beras di tingkat konsumen 2,1-2,7 kali dibandingkan harga petani (jeruk 4 kali lipat).
- e. Pengembangan 1.000 Toko Tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian.
- f. Jumlah koperasi nelayan yang aktif sekitar 1.907 unit dengan jumlah nelayan mencapai 2,6 juta jiwa (2016).

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Penerapan *Good Agricultural Practices* dan *Precision Farming/Agro Maritim 4.0*
- b. Penguatan kelembagaan petani
- c. Investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian dan perikanan
- d. Kemitraan KUKM dan wirausaha pertanian dan perikanan
- e. Fasilitas pemasaran

4) Pemulihan Pasca Bencana : Gempa Lombok tahun 2018, dengan latar belakang isu:

- a. Berbagai kementerian/lembaga memiliki akun kegiatan pasca bencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan per sektornya
- b. Masih minimnya manajemen penanganan pascabencana lintas sektor pembangunan

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi
  - b. Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan pascabencana
  - c. Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru
- 5) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting), dengan latar belakang isu:
- a. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015)
  - b. 27,7 persen balita di Indonesia stunting (tahun 2019)
- Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:
- a. Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, serta STBM (Kemenkes), pelayanan KB berkualitas di fasilitas kesehatan (BKKBN)
  - b. PAUD Holistik-Integratif & kelas pengasuhan (Kemendikbud)
  - c. Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (Kemen PUPR)
  - d. Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan)
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), dengan latar belakang isu:
- a. Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah
  - b. Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik.
  - c. Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Pendanaan Pengembangan Keahlian/*Skill Development Fund*
- Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:
- a. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survei ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisis pasar kerja).
  - b. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0  
Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, *upgrading* dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan *softskills*, karakter kerja dan bahasa asing
  - c. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik  
Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT vokasi non-politeknik
  - d. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/*Skill Development Fund*  
Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (*upskilling*), pelatihan keahlian baru (*reskilling*), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.
  - e. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja  
Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (*skilling*), pelatihan keahlian baru (*reskilling*), pelatihan keahlian tambahan (*upskilling*), dan sertifikasi.
- 7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh, dengan latar belakang isu:
- a. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam

- b. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima
- c. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan layanan infrastruktur dan layanan internet
- b. Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan
- c. Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi
- d. Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako
- e. Penyaluran LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran

8) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital, dengan latar belakang isu:

- a. Belum terintegrasinya data pemerintahan yang memiliki standar kehandalan dan keamanan yang ideal;
- b. Pemanfaatan infrastruktur untuk digitalisasi layanan masih terbatas pada 5 sektor strategis rencana pita lebar (e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Pengadaan, dan E-Logistik) serta e-Commerce sehingga digitalisasi belum dirasakan secara massif

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Perluasan jangkauan jaringan bergerak pita lebar (BTS/*Last Mile*)
- b. Peningkatan jangkauan jaringan tetap pita lebar hingga ke tingkat kecamatan
- c. Penyediaan Infrastruktur SPBE
- d. Penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital

9) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga), dengan latar belakang isu:

Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih mencapai 74,58 persen termasuk akses sanitasi aman hanya mencapai 7,42 persen. Selain itu, 9,36 persen rumah tangga masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Masih terdapat gap sebesar 7,58 persen untuk mencapai target akses sanitasi aman sebesar 15 persen pada tahun 2024. Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik.

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem *offsite*) skala regional, kota, dan permukiman
- b. Pembangunan SPALD-Setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja
- c. Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi di pusat dan daerah
- d. Implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja
- e. Peningkatan perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka

10) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), dengan latar belakang isu:

- a. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75 persen, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14 persen dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61 persen
- b. Defisit air baku 2018 mencapai 181,3 m<sup>3</sup>/detik
- c. Baru 59,6 persen PDAM yang memiliki kinerja sehat (2018).

- d. Kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga stunting

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m<sup>3</sup>/s
- b. Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m<sup>3</sup>/s
- c. Penurunan tingkat kebocoran hingga 25 persen
- d. Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang 2,89 juta SR
- e. Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.400 l/dtk
- f. Pembangunan SPAM regional 10.150 l/dtk
- g. Peningkatan kinerja operator air minum, 100 persen sehat

11) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, dengan latar belakang isu:

- a. Ancaman bencana semakin masif, kompleks, dan tidak dapat diprediksi seiring dengan perubahan lingkungan; terutama ancaman bencana hidrometeorologi (akibat perubahan iklim dan cuaca), bencana geologi (akibat aktivitas tektonik dan vulkanik); serta bencana lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan (khususnya air dan udara)
- b. Kelengkapan peralatan serta akurasi dan kecepatan dari sistem peringatan dini yang tersedia belum cukup memadai untuk mengantisipasi tingginya frekuensi dan banyaknya jenis ancaman bencana di Indonesia, selain itu belum terbentuk sistem peringatan dini yang terintegrasi dan efisien.

Proyek Prioritas Strategis ini dilaksanakan melalui:

- a. Penguatan *Early Warning System* untuk Bencana Lingkungan Hidup
- b. Sistem Peringatan Dini Bencana

### 3. RTRW Nasional

Telaahan terhadap arahan rencana tata ruang nasional yang ada di wilayah kota berangkat dari tujuan, kebijakan dan strategi yang dirumuskan secara nasional. Hal ini akan membatasi kerangka perencanaan di setiap wilayah. Tujuan penataan ruang nasional adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Secara hirarkis, rencana umum dan rencana rinci nasional tidak dapat dipisahkan, sehingga ulasan mengenai keduanya akan dilaborasi secara bersama-sama untuk melihat sinkronisasi matra perencanaan nasional.

Kebijakan penataan ruang wilayah nasional didorong pada upaya peningkatan struktur ruang serta pengelolaan dan pengembangan pola ruang, yaitu:

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- 3) Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
  - a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
  - a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya; dan
  - b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 5) Pengembangan kawasan strategi nasional.

Kedudukan Kota Mataram dalam konstelasi per wilayah nasional dilihat dari struktur pusat-pusat kegiatan yang memiliki skala pelayanan nasional, yaitu PKN. Dalam RTRW Nasional, PKN tidak hanya ditetapkan dalam wilayah administrasi Kota Mataram saja, melainkan juga meliputi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram yang disebut Kawasan Mataram Raya. Dalam sistem kegiatan nasional, Kota Mataram memiliki kontribusi penting pada sistem koleksi dan distribusi primer.

#### 4. Undang-Undang Omnibus Law

Undang-Undang Omnibus Law disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Undang-Undang Omnibus Law meliputi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini, yaitu:

- 1) Penyederhanaan Perizinan;
- 2) Persyaratan Investasi;
- 3) Ketenagakerjaan;
- 4) Kemudahan Berusaha;
- 5) Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM;
- 6) Dukungan Riset dan Inovasi;
- 7) Administrasi Pemerintahan;
- 8) Pengenaan Sanksi;
- 9) Pengadaan Lahan;
- 10) Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah; dan
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Selama ini, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lambat pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik. Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*), kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Tidak hanya itu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Tabel 4.7.

## Peluang dan Ancaman dari Isu Nasional

Isu Nasional	Peluang	Ancaman
RPJPN dan RPJMN: Ditetapkannya KEK Mandalika sebagai <i>Super Priority Program</i> dalam RPJMN	Masuknya berbagai aktivitas ekonomi menjadi peluang bagi kota Mataram untuk meningkatkan kekuatan sektor perdagangan	Munculnya pusat pertumbuhan baru yang akan menciptakan persaingan
RTRWN: Ditetapkannya Kota Mataram sebagai PKN dan Kawasan Mataram Raya	Pengembangan kota Mataram mendapatkan dukungan penuh dari kebijakan nasional	Keterbatasan wilayah sehingga dikhawatirkan akan memberikan ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup
UU Omnibus Law	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyederhanaan alur birokrasi perizinan</li> <li>▪ Kemudahan Investasi</li> </ul>	Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan pengusaha lokal

### 4.2.3 ISU PROVINSI

Telaah isu-isu di Provinsi NTB yang berkaitan dengan Kota Mataram dijabarkan dengan merujuk pada RPJPD Provinsi NTB, RPJMD Provinsi NTB, dan RTRW Provinsi NTB.

#### 1. RPJP Provinsi

Telaahan isu pembangunan daerah ditinjau dari RPJPD Provinsi pada PJM III (2019-2023) dan PJM IV (2024-2025) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025. Telaahan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2. PJM III (2019 – 2023)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-3, RPJM Daerah ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidangekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang semakin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembangunan infrastruktur pada tahap ini ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai terutama untuk infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air bersih, perumahan dan pemukiman, dan sarana telekomunikasi dan informasi. Rasio elektrifikasi sudah di atas 95 persen, sementara akses rumah tangga terhadap air bersih mencapai 95 persen, dan semua desa telah mendapatkan aliran energi listrik. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian seperti irigasi, dam, sumur bor, dan jalan usaha tani. Ketersediaan perumahan dan

permukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat semakin mendorong berkurangnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Selain itu, dengan permukiman yang layak insiden bencana kebakaran dapat diminimalisasi.

Pada tahap ini, pembangunan dalam bidang kesejahteraan masyarakat telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial. Selain itu, kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif.

Di bidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat telah meningkat sehingga Umur Harapan Hidup meningkat, Angka Kematian Bayi dan kematian maternal menurun, dan tingkat morbiditas juga menurun. Selain itu, kesetaraan gender meningkat yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), penanganan anak terlantar semakin sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan kesejahteraan dan perlindungan anak meningkat. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Selain itu, konflik antarkelompok masyarakat berhasil diminimalisasi karena peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nilai-nilai agama dan budaya telah tertanam dengan baik dan kelembagaan sosial masyarakat telah berfungsi dengan baik.

### 3. PJM IV (2024 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-4, RPJM Daerah ke-5 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kondisi beriman, maju dan sejahtera akan terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang handal, tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih dan energi listrik, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Hal ini bisa terwujud karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan penciptaan nilai tambah. Selain itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan telah diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pembangunan sosial, pembangunan dilakukan dengan berupaya mengoptimalkan mutu dan akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Pelayanan sosial dasar dilakukan dengan memperhatikan bahwa layanan sosial merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, pemberian subsidi pada pelayanan dasar harus diberikan oleh pemerintah sebagai pemegang amanah melaksanakan pembangunan. Pembangunan budaya dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai budaya yang positif mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan revitalisasi lembaga budaya masyarakat.



Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya serta kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah memasuki pasar global. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Revitalisasi kelembagaan pengelola sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Penghargaan terhadap kearifan lokal menjadi kata kunci dalam melestarikan sumber daya dan lingkungan hidup. Upaya konservasi harus terus dioptimalkan mengingat tantangan berupa pemanasan global dan perubahan iklim memberikan pengaruh yang besar terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Isu utama yang menjadi perhatian RPJPD Provinsi pada PJM III (2019-2023) dan PJM IV (2024-2025) terkait dengan masih sulitnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, tekanan penduduk semakin besar yang diikuti dengan fenomena pelayanan dasar kurang optimal dan kerusakan lingkungan dan laju pengurangan SDA meningkat, serta rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian daerah dikarenakan IPM yang rendah.

#### 4. RPJMD Provinsi

Dalam pelaksanaan RPJMD periode 2019-2023, di tahun pertama penjabaran RPJMD Provinsi NTB periode 2019-2023, disamping melaksanakan rekonstruksi dan pemulihan pasca gempa bumi sesuai target, beberapa target pembangunan dapat dicapai sesuai dengan rencana dan terdapat beberapa target yang tidak tercapai sesuai dengan harapan. Di samping itu, terdapat ancaman yang tidak diantisipasi dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, yaitu dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berimbas langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya di Provinsi NTB, nasional bahkan global.

Isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- 1) Daerah Rawan Bencana
  - a. Upaya mitigasi bencana belum maksimal.
  - b. Sumber daya untuk Keadaan Darurat Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana masih terbatas.
- 2) Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal
  - a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
  - b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai.
  - c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata.
  - d. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi belum merata
  - e. Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal.
  - f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata.
  - g. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi.
- 3) Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal
  - a. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil belum optimal.
  - b. Kemandirian keuangan daerah masih rendah.
  - c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal.

- d. Indeks kepuasan masyarakat masih relatif rendah.
  - e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik.
  - f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal.
  - g. Pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan belum optimal.
  - h. Proses fasilitasi pengurusan perizinan belum optimal.
- 4) Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah.
- a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah.
  - b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi.
  - c. Prevalensi kurang gizi dan stunting masih tinggi.
  - d. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar belum merata.
  - e. SDM kesehatan antar daerah belum merata.
  - f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal.
  - g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal.
  - h. Usia kawin pertama perempuan kurang dari 21 tahun masih relatif banyak
- 5) Mutu, daya saing proses dan hasil pendidikan belum optimal
- a. Rata-rata lama sekolah masih rendah.
  - b. Sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi masih cukup banyak.
  - c. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai.
  - d. Nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, dan mutu lulusan melalui nilai Ujian Nasional relatif rendah.
  - e. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah.
  - f. Angka buta huruf dewasa cukup tinggi.
  - g. Akses Pendidikan yang belum merata.
  - h. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
- 6) Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal.
- a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun.
  - b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal.
  - c. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut.
  - d. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumber daya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah
- 7) Pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi relatif lambat
- a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan.
  - b. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata.
  - c. Nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor masih defisit.
  - d. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah.
  - e. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang.
  - f. Akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan masih terbatas.
  - g. Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal.
  - h. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal.
  - i. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal.
- 8) Pembangunan pariwisata melambat karena dampak pandemi COVID-19
- a. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
  - b. Potensi pariwisata belum dikelola secara optimal terutama pada kawasan strategis dan desa.

- c. Adanya penurunan secara signifikan kontribusi sektor-sektor yang terkait kepariwisataan akibat gempa bumi dan pandemi COVID-19.
- 9) Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
- a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal.
  - b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal.
  - c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.
  - d. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang.
  - e. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal.
  - f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal.
- 10) Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai secara optimal
- a. Indeks Demokrasi masih rendah.
  - b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial.
  - c. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan.
  - d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi.

## 5. RTRW Provinsi (Revisi Tahun 2020)

Kedudukan Provinsi NTB dalam konstelasi perwilayah nasional dilihat dari struktur pusat-pusat kegiatan yang memiliki skala pelayanan nasional Pusat-pusat kegiatan nasional yang ada di provinsi terdiri dari PKN dan PKW yang merupakan sistem perkotaan nasional. Selain itu, dikembangkan pula PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan yang ada di dalam provinsi.

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Mataram (Mataram Raya) ditetapkan sebagai PKN. Sementara Praya (Kabupaten Lombok Tengah), Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa), dan Raba (Kabupaten Bima) ditetapkan sebagai PKW. Adapun Kawasan Ekonomi Bima serta Kawasan Rinjani dan sekitarnya ditetapkan sebagai PKSN. Dalam sistem kegiatan nasional, Provinsi NTB memiliki kontribusi penting pada sistem dan jaringan pelabuhan nasional dan simpul transportasi udara. Di samping itu, beberapa kawasan di Provinsi NTB didorong sebagai kawasan strategis nasional.

Isu strategis RTRW Provinsi NTB tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Konektivitas wilayah untuk pemerataan dan akselerasi pengembangan infrastruktur
- 2) Pengurangan risiko bencana
- 3) Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung
- 4) Pengembangan lahan terbangun secara selektif dan ramah lingkungan
- 5) Koordinasi dan kerjasama antarwilayah dalam hal pembagian peran
- 6) Pelibatan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam masyarakat
- 7) Akselerasi kawasan-kawasan strategis serta sektor unggulan dan prioritas

Berbagai isu dari provinsi memberikan peluang bagi Kota Mataram. Seluruh kebijakan Provinsi NTB, baik dalam RPJP, RPJMD maupun RTRW memberikan dukungan untuk pengembangan Kota Mataram yang semakin maju sekaligus menjaga lingkungan hidup.

Tabel 4.8.

Peluang dan Ancaman dari Isu Provinsi

Isu Wilayah Berbatasan	Peluang	Ancaman
RPJP Kab Lobar RPJMD Kab Lobar RTRW Kab Lobar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya konektivitas antarwilayah</li> <li>▪ Kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana struktur ruang dan pola ruang pada wilayah berbatasan tidak sinkron.</li> </ul>

Isu Wilayah Berbatasan	Peluang	Ancaman
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerjasama dalam menjaga kondusifitas wilayah perbatasan</li> <li>▪ Penetapan Kota Mataram dan Lobar sebagai Kawasan Mataram Raya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian</li> </ul>

#### 4.2.4 ISU WILAYAH PERBATASAN

Untuk menciptakan kondisi selaras dalam perencanaan pembangunan maka setiap kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan rencana pembangunan wilayah sekitar. Secara langsung maupun tidak langsung akan saling mempengaruhi kedua daerah, sehingga perlu dilakukan penelaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah lain yang berdekatan dengan wilayah Kota Mataram, dalam hal ini kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

##### 1. RPJP Kabupaten Lombok Barat

Pedoman pembangunan Kabupaten Lombok barat tertuang dalam visi dan misi yang di tuangkan dalam semboyan PATUT, PATUH, PATJU yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- PATUH : Baik, Terpuji, Layak, Wajar tidak berlebihan
- PATUT : Rukun, Damai, Toleransi, Saling harga menghargai
- PATJU : Rajin, giat tak mengenal putus asa

Filosofi dari semboyan tersebut merupakan totalitas nilai yang mengandung pesan agar setiap penduduk dan pemimpin haruslah bertindak menurut hukum, bijaksana, berbudi pekerti luhur, tidak berlebih-lebihan, rukun, saling menghargai, Kerjasama dalam hal yang baik-baik, serta giat tak kenal putus asa dalam menjalankan kewajiban, demi pembangunan daerah dan agama. Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut diambil kesepakatan bersama bahwa selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 menetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu "LOMBOK BARAT SEJAHTERA MANDIRI DAN RELIGIUS".

Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 meliputi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan, masyarakat mandiri dan berdaya saing, pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat bermoral dalam suasana kerukunan umat beragama dan kesadaran hukum.

##### 2. RPJMD Kabupaten Lombok Barat

Dalam Peraturan Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat 2019-2024 ditetapkan Visi Pembangunan yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dengan dilandasi Nilai Patut Patuh Patju"

Visi Kabupaten Lombok Barat diwujudkan melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi , akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas
- 2) Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan
- 3) Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat)

- 4) Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing
- 5) Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan).

Adapun isu strategis yang melatarbelakangi kebijakan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 meliputi:

- 1) NTB sebagai daerah rawan bencana
- 2) Mutu dan daya saing luaran pendidikan yang belum optimal
- 3) Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah
- 4) Tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
- 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
- 6) Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
- 7) Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan
- 8) Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
- 9) Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai secara optimal
- 10) Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal
- 11) Penataan ruang, konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal

Tabel 4.9.

Peluang dan Ancaman dari Isu Wilayah Berbatasan

Isu Wilayah Berbatasan	Peluang	Ancaman
RPJP Kab Lobar RPJMD Kab Lobar RTRW Kab Lobar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya konektivitas antarwilayah</li> <li>▪ Kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup.</li> <li>▪ Kerjasama dalam menjaga kondusifitas wilayah perbatasan</li> <li>▪ Penetapan Kota Mataram dan Lobar sebagai Kawasan Mataram Raya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana struktur ruang dan pola ruang pada wilayah berbatasan tidak sinkron.</li> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian</li> </ul>

#### 4.2.5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM

##### 1. Isu Pembangunan Jangka Panjang

Merujuk pada RPJPD Kota Mataram Tahun 2005=2025 yang memiliki Visi **"TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA PADA TAHUN 2025**, tahun IV (tahun 2020 – 2025) pada dasarnya berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan pembangunan lima tahun III. Pada tahun IV, pembangunan di Kota Mataram lebih menekankan pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing guna percepatan dan pementapan pembangunan di segala bidang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh.

Arah kebijakan pembangunan tahun IV (2020 – 2024) tersebut meliputi:

- 1) Mewujudkan budaya masyarakat Kota yang memiliki akhlakul karimah;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup dan nilai moral masyarakat kota;
- 3) Membangun budaya masyarakat kota;
- 4) Meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi produktif masyarakat;
- 5) Meningkatkan derajat kesehatan (pelayanan kesehatan dan KB) dan status gizi masyarakat

- 6) Pengarusutamaan gender pada pembangunan;
- 7) Penambahan tenaga pendidik untuk program inklusi disabilitas;
- 8) Menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat;
- 9) Meningkatkan pemerataan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- 10) Menumbuhkan rasa aman dan nyaman untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kondusif, inklusif dan berkelanjutan;
- 11) Mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam wilayah;
- 12) Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;
- 13) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- 14) Meningkatkan upaya penegakan regulasi;
- 15) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dasar secara terpadu;
- 16) Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;
- 17) Mempertahankan kawasan pertanian dan perikanan dalam Kota Mataram;
- 18) Pembentukan kota tangguh bencana;
- 19) Meningkatkan kualitas lingkungan;
- 20) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Arah kebijakan tersebut di atas, pada dasarnya bersumber dari pemetaan isu pembangunan jangka panjang yang ada di Kota Mataram sebagaimana yang berikut:

- 1) Perubahan pola perilaku masyarakat dan lemahnya pendidikan karakter dari tingkat keluarga sampai pendidikan formal
- 2) Rendahnya ketahanan sosial masyarakat kota
- 3) Peran kelembagaan sosial kemasyarakatan yang semakin melemah
- 4) Minimnya literasi
- 5) Menurunnya fungsi / peran Kota Mataram sebagai PKN
- 6) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat belum optimal
- 7) Minimnya literasi kesehatan terutama literasi gizi
- 8) Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas
- 9) Penuntasan wajib belajar (pendidikan dasar dan menengah)
- 10) Zonasi sarana pendidikan
- 11) Iklim usaha yang melambat
- 12) Kemandirian perekonomian belum terwujud
- 13) Belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya pendukung ekonomi rakyat
- 14) Masuknya tenaga kerja terlatih dan terampil mengikis peluang kerja bagi penduduk lokal dalam pasar kerja
- 15) Pelanggaran tata ruang masih tinggi
- 16) Pelanggaran regulasi pelayanan publik
- 17) Pelayanan infrastruktur dasar (limbah, sanitasi, air bersih/minum, drainase, sampah) belum optimal
- 18) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah
- 19) Tingginya investasi dalam Kota
- 20) Penetapan KP2B
- 21) Rendahnya kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana
- 22) Kurangnya perencanaan berbasis risiko bencana.

Tabel 4.10.

## Kelemahan dan Kekuatan dari Isu Pembangunan Jangka Panjang

ISU PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	KEKUATAN	KELEMAHAN
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketergantungan bahan baku produksi dari daerah lain</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDM berdaya saing</li> <li>▪ Masyarakat heterogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingginya potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>▪ Angka kemiskinan perkotaan cenderung stagnan penurunannya</li> </ul>
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi topografi relatif datar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pencemaran yang tinggi</li> <li>▪ Rawan bencana</li> <li>▪ Alih fungsi lahan</li> <li>▪ Perubahan Iklim</li> <li>▪ Penurunan kualitas permukiman</li> <li>▪ Titik Rawan Kemacetan</li> </ul>
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan</li> <li>▪ Akses internet total coverage</li> <li>▪ Partisipasi masyarakat tinggi</li> <li>▪ Kelembagaan masyarakat telah terbentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya budaya kerja</li> <li>▪ Pemanfaatan TI masih rendah</li> <li>▪ Zona integritas belum terbentuk</li> <li>▪ Pengelolaan pengaduan masyarakat belum optimal</li> </ul>

## 2. Isu Pengembangan Spasial Wilayah

Rumusan isu pengembangan spasial wilayah Kota Mataram bersumber dari hasil telaahan RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2021-2031.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam skala nasional, masuk dalam Koridor Ekonomi Nasional ke-3 (Koridor Bali-Nusa Tenggara) sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional, serta merupakan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka fungsi dan peran Kota Mataram adalah sebagai:

- 1) pusat pemerintahan Provinsi NTB sekaligus pusat pemerintahan Kota Mataram;
- 2) simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
- 3) pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
- 4) pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
- 5) daya tarik terhadap kota-kota daerah belakang secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
- 6) salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

Dalam skala nasional dan regional, tidak ada perubahan signifikan terkait dengan kedudukan Kota Mataram, sehingga tujuan penataan Kota Mataram, yaitu:

**“Mewujudkan Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan”.**

Kota Mataram dipandang sangat strategis pada sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi. Perumusan tujuan penataan ruang di wilayah Kota Mataram ini berimplikasi pada kebijakan yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan Kota, meliputi:



- a. pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi, PKN, dan salah satu KSP; dan
  - b. penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya.
- 2) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana utama, meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama Kota secara terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, Provinsi, dan nasional; dan
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi Kota secara optimal.
- 3) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya berupa pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana secara terpadu yang berbasis kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 4) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, terdiri atas:
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pengelolaan area-area dengan fungsi resapan;
  - c. pengelolaan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat;
  - d. penetapan kawasan RTH sesuai dengan tipologi dan skala wilayahnya;
  - e. pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
  - f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan ancaman bencana.
- 5) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya kota, meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukan budi daya yang terdiri atas kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan ruang evakuasi bencana; dan kawasan peruntukan lainnya;
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
- 6) Kebijakan penetapan kawasan strategis diwujudkan melalui:
- a. pengembangan keterpaduan pengelolaan KSP di wilayah Kota;
  - b. pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - c. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - d. pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan yang tertuang di dalam RTRW Kota Mataram pada dasarnya menjadi *guidelines* dalam perumusann rencana beserta indikasi program perwujudannya. Perwujudan rencana, baik rencana struktur ruang dan pola ruang diharapkan menjadi bagian yang integral dengan perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Mataram. Berdasarkan hasil telaah dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 terhadap RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031, terdapat 53 indikasi program (63 persen) dari total 84 indikasi program utama perwujudan Rencana Struktur Ruang PJM II (2017-2021) telah dioperasionalkan ke dalam program pembangunan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021. Sedangkan 31 indikasi program masih belum terwadahi dalam program pembangunan dimana 10 indikasi program merupakan kewenangan Kota Mataram dan 21 indikasi program merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi lainnya seperti PT PLN, PT Telkom dan BWS Nusa Tenggara.

Berkaitan dengan indikasi program utama perwujudan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Mataram, terdapat 65 indikasi program yang direncanakan pada PJM II (2017-2021). Sebanyak 33 indikasi program sudah terwadahi dalam program pembangunan RPJMD Kota Mataram, sedangkan 32 indikasi program belum terwadahi. Terhadap indikasi program utama yang belum dioperasikan dalam program pembangunan RPJMD, perlu menjadi perhatian dan dipertimbangkan untuk diintegrasikan dalam penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya, sehingga program pembangunan dapat sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah direncanakan. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram melalui OPD Teknis perlu memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di luar lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam rangka melaksanakan program-program utama yang telah direncanakan untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Kota Mataram.

Tabel 4.11.

**Kelemahan dan Kekuatan dari Isu Pengembangan Spasial Wilayah**

ISU PENGEMBANGAN SPASIAL WILAYAH	KEKUATAN	KELEMAHAN
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketergantungan bahan baku produksi dari daerah lain</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDM berdaya saing</li> <li>▪ Masyarakat heterogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingginya potensi konflik dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>▪ Angka kemiskinan perkotaan cenderung stagnan penurunannya</li> </ul>
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi topografi relatif datar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pencemaran yang tinggi</li> <li>▪ Rawan bencana</li> <li>▪ Alih fungsi lahan</li> <li>▪ Perubahan Iklim</li> <li>▪ Penurunan kualitas permukiman</li> <li>▪ Titik Rawan Kemacetan</li> </ul>
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat Pemerintahan</li> <li>▪ Akses internet total coverage</li> <li>▪ Partisipasi masyarakat tinggi</li> <li>▪ Kelembagaan masyarakat telah terbentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya budaya kerja</li> <li>▪ Pemanfaatan TI masih rendah</li> <li>▪ Zona integritas belum terbentuk</li> <li>▪ Pengelolaan pengaduan masyarakat belum optimal</li> </ul>

### 3. Isu Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD 2021-2026)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan lampirannya, penelaahan KLHS terhadap RPJMD dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan jangka menengah.

Isu lingkungan hidup strategis bersumber dari hasil analisis isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SGDs) yang dikaji oleh Tim Penyusun KLHS RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2025 dan tertuang di dalam dokumen KLHS. Isu strategis TPB di Kota Mataram dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.12.

## Isu Lingkungan Hidup Strategis / Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Mataram

NO	TEMA BESAR ISU	ISU STRATEGIS KLHS	ANALISIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM
<b>A. PILAR SOSIAL</b>			
1	Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Tingginya angka kemiskinan terutama dalam kondisi pasca bencana dan masa pandemi
		Indeks Pembangunan Manusia	Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia belum optimal yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan IPM
2	Pelayanan dasar sanitasi	Fasilitas tempat buang air besar sumber air bersih	Pelayanan Infrastruktur Dasar belum optimal yang ditandai salah satunya dengan belum tercapainya target nasional dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak
3	Permukiman kumuh	permukiman kumuh	Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan terjangkau belum optimal
4	Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas serta masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungannya.
5	Tingkat kesehatan	Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar belum optimal</li> <li>● Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan masih harus ditingkatkan</li> </ul>
		Angka Harapan Hidup Pandemi COVID-19	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal yang ditandai dengan melambatnya laju pertumbuhan AHH
		Penyakit yang dihadapi masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit belum optimal yang ditandai dengan beban ganda angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular</li> </ul>
6	Tingkat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fasilitas Pendidikan</li> <li>● Angka Partisipasi Murni</li> <li>● Angka Partisipasi Kasar</li> </ul>	Penyelenggaraan Pendidikan belum optimal yang ditandai dengan rata-rata lama sekolah penduduk tidak tuntas sampai 12 tahun
7	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang ditandai dengan masih tingginya angka ketergantungan dan laju pertumbuhan penduduk
8	Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indeks Pemberdayaan Gender</li> <li>● Pengembangan Diri Perempuan</li> </ul>	Kelayakan hidup masyarakat belum merata, diantaranya peningkatan kualitas perempuan dan anak kurang optimal
9	Keamanan dan Ketertiban	Kondusifitas Wilayah	Stabilitas Trantibum Linmas belum terkendali secara optimal yang ditandai dengan masih adanya gangguan kamtibmas, pelanggaran perda dan konflik horizontal
<b>B. PILAR EKONOMI</b>			
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</li> <li>● Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>	Kesempatan Kerja Masih Terbatas
2	Pengembangan potensi ekonomi dan daya saing kota	Pengoptimalan pariwisata	Kinerja Ekonomi Daerah Mengalami Perlambatan dengan melambatnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi termasuk menurunnya kunjungan wisatawan

NO	TEMA BESAR ISU	ISU STRATEGIS KLHS	ANALISIS PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM
<b>C. PILAR LINGKUNGAN</b>			
1.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pencemaran sungai</li> <li>● Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>	Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal yang salah satunya ditandai dengan Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
2.	Bencana (alam dan non alam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bencana Alam</li> <li>● Bencana non alam pandemi COVID-19</li> </ul>	Risiko bencana di Kota Mataram masih dalam kategori sedang-tinggi.
3.	Pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Volume sampah yang dihasilkan</li> <li>● Volume sampah yang tertangani</li> </ul>	Pengelolaan Persampahan belum optimal
4.	Tata Ruang Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan pertanian	Penyelenggaraan penataan ruang belum Optimal
<b>E. PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN</b>			
1.	Tata kelola pemerintah	Reformasi birokrasi SAKIP	<p>Kinerja tata kelola pemerintahan belum optimal yang ditandai dengan kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementasi SAKIP di Kota Mataram berjalan lambat, meskipun realisasinya terus meningkat. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan belum sepenuhnya terbangun budaya kinerja sampai level unit terkecil</li> <li>● Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset belum optimal</li> <li>● Ketergantungan Daerah terhadap APBN masih tinggi</li> <li>● Penerapan E-Govt belum menunjukkan perkembangan yang signifikan</li> <li>● Kualitas Pelayanan Publik belum optimal</li> </ul>

Sumber: KLHS RPJMD Kota Mataram, diolah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya Kota Mataram telah menunjukkan capaian pembangunan yang cukup baik. Pembangunan yang cukup baik itu ke depan tetap harus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar supaya harapan untuk mencapai masyarakat yang sehat, sejahtera dan mandiri dapat dicapai. Sebagaimana analisis permasalahan yang telah dilakukan secara komprehensif dapat dipetakan isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram dalam 5 peta berikut:

### 1. Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia yang diukur dari capaian IPM Kota Mataram telah mencapai angka yang cukup baik. Namun demikian capaian yang tinggi itu belum dinikmati oleh penduduk seluruh wilayah. Masih terdapat ketimpangan capaian pembangunan manusia antarwilayah. Ketimpangan capaian kinerja pendidikan juga kesehatan menjadi sumber permasalahan bagi pengembangan sumber daya manusia yang merata di wilayah Kota Mataram. Faktor berikutnya yang menjadi catatan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah capaian kesejahteraan masyarakat yang belum merata antarwilayah.

### 2. Fokus Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pada aspek lingkungan hidup, Kota Mataram menghadapi ancaman keberlanjutan lingkungan hidup yang ditunjukkan dari angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang masih dalam kategori sedang. Pencemaran air permukaan (yang bersumber dari sampah maupun limbah) dan rendahnya luasan tutupan lahan menjadi penyebab utama dari ancaman terhadap kualitas lingkungan itu.

Pada aspek pengembangan infrastruktur wilayah capaian kinerjanya masih perlu ditingkatkan, Indeks Infrastruktur Wilayah pada tahun 2020 masih berada pada angka 59,24. Kecepatan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi maupun sosial lainnya kurang mampu diikuti oleh kecepatan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan unsur pembentuk infrastruktur wilayah seperti ke-PU-an, infrastruktur perhubungan, dan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

### 3. Fokus Pengembangan Ekonomi

Permasalahan makro yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah relatif kurangnya daya saing ekonomi dibandingkan wilayah sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan provinsi, demikian juga dengan Gini Rasio Kota Mataram yang cenderung lebih tinggi, apalagi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Fundamental ekonomi Kota Mataram juga terlihat rapuh (*unrobust*) ketika terjadi pandemi COVID-19. Rapuhnya fundamental ekonomi Kota Mataram dikarenakan struktur pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh sektor/kategori usaha tersier seperti kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami distorsi sebagai dampak pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat, barang dan jasa serta pembatasan operasional pusat-pusat perdagangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Hal ini berbeda dengan perekonomian dengan *basis engine of growth* pada sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan) seperti Nasional dan Provinsi NTB tidak terlalu terdampak sebagai akibat COVID-19.

Terdapat dua permasalahan ekonomi daerah yang harus menjadi fokus dalam pembangunan Kota Mataram ke depan di antaranya: (1) Sebagai wilayah kota yang menjadi pintu gerbang masuk dan keluar wilayah NTB, perekonomian Kota Mataram bertumpu pada kategori usaha tersier yakni kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori Usaha Industri Pengolahan. Pada aspek ini, terlihat bahwa kinerja yang dicapai belum maksimal. (2) Pada sisi lain, sektor industri kreatif yang berkaitan dengan Urusan Perindustrian, Koperasi/UMKM, Pariwisata, Pertanian serta Perikanan yang memiliki potensi besar, namun belum berkembang secara baik. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi maupun pertumbuhan kategori usaha Industri Pengolahan, kategori usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta kategori usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

### 4. Fokus Kondusifitas Wilayah

Kondusifitas wilayah erat dengan kebutuhan masyarakat atas rasa aman. Kondusifitas Wilayah Kota Mataram digambarkan dengan Indeks Keamanan Manusia yang mana Kota Mataram berada pada nilai 3,7 dari skala maksimal 5. Artinya, kondusifitas wilayah Kota Mataram belum optimal. Hal ini dapat diuraikan menjadi dua faktor utama kondisi yang merujuk pada gambaran kondusifitas daerah yaitu derajat gangguan kamtibmas dan mengenai potensi dan ketahanan bencana.

### 5. Fokus Tata Kelola Pemerintah

Permasalahan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Kota Mataram dalam 5 tahun terakhir adalah capaian nilai Reformasi Birokrasi yang kurang optimal. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu upaya komprehensif untuk menangkap berbagai perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019 dan 2020 oleh KemenPAN-RB, Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mataram berturut-turut adalah 62,27 dan 64,00 atau masih dalam kategori "B" dari skala maksimal Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 100. Sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun tersebut adalah mendapatkan predikat BB atau dengan nilai minimal 70, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan Kota Mataram belum optimal dalam mencapai target yang diinginkan.

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 merupakan pembangunan lima tahun keempat atau tahap terakhir dari tahapan pembangunan RPJPD Kota Mataram 2005-2025. Visi dan Misi daerah merupakan pernyataan yang menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Visi dan Misi Kota Mataram diambil berdasarkan rumusan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan daerah dan kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran disertai indikator capaiannya. Penjabaran Visi Misi Kota Mataram menjadi tujuan dan sasaran pembangunan juga mempertimbangkan visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi NTB, serta visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah.

### 5.1. VISI

Mengacu pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada Pilkada serentak yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Mataram yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”**

Dalam Visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

1. **HARMONI.** Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
2. **AMAN.** Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.
3. **RAMAH.** Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.
4. **UNGGUL.** Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota.



5. **MANDIRI.** Meningkatkan kapasitas dan *skill* warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram.

Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu:

**"TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 2025".**

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pematapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasarana sebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 juga sejalan dan mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yakni **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** serta Visi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu **"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang"**.

## 5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang memengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Sehingga, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (LIMA) MISI PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026, yaitu:

### **MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER**

Untuk mencapai cita-cita kota yang **UNGGUL**, Kota Mataram mengupayakan perwujudan peningkatan kualitas dan karakter sumber daya manusia (SDM) menuju masyarakat yang sejahtera. Peningkatan kualitas SDM utamanya diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas pendidikan di pendidikan karakter yang baik diharapkan tergambarkan dari pemenuhan fasilitas dan pemerataan akses kualitas pendidikan yang berdampak pada derajat pendidikan masyarakat yang tinggi tanpa meninggalkan budaya dan karakter bangsa. Sementara derajat kesehatan masyarakat diharapkan tergambarkan dengan angka harapan hidup masyarakat Kota Mataram yang tinggi. Selain itu, masyarakat Kota Mataram juga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan sosial yang memadai yang ditandai dengan mengurangi kemiskinan dengan menjaga kebutuhan dasar minimal masyarakat, meningkatkan keberdayaan masyarakat secara inklusif tanpa bias usia, gender dan status sosial, serta memberi perlindungan bagi anak-anak penerus bangsa sekaligus menyediakan ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang.

## MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Misi ini menjadi tulang punggung bagi perwujudan seluruh cita-cita pembangunan Kota Mataram yang HARUM dengan penyediaan infrastruktur berkualitas yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat Kota Mataram secara inklusif dengan tetap menjaga kualitas kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.

## MISI 3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

Kota Mataram yang UNGGUL dan MANDIRI diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai, iklim usaha dan investasi yang sehat serta SDM yang terampil dan kreatif dalam menghadapi daya saing perekonomian global. Dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan, Kota Mataram bertujuan untuk menggenjot sektor-sektor unggulan sembari memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif, mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.

## MISI 4 MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH

Kota Mataram bercita-cita menjadi kota yang AMAN dan menyediakan kehidupan yang HARMONI bagi masyarakatnya. Dengan status ibukota provinsi dengan karakter pluralisme yang tinggi, Kota Mataram bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman dengan mengayomi semua masyarakat. Menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah dari gangguan penyakit masyarakat. Menjaga demokrasi dan memberi ruang bagi keragaman yang ada baik suku, agama, ras, dan golongan yang ada di masyarakat. Menjamin kebebasan menjalankan ibadah beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing warga. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan kerukunan di masyarakat. Kota Mataram juga mengupayakan penjaminan kesiapan daerah masyarakat dalam menghadapi kebencanaan dan hal-hal tidak terduga yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

## MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

Untuk menjadikan Kota Mataram yang berwajah RAMAH, Kota Mataram berkomitmen untuk melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Birokrasi yang profesional diwujudkan melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, kredibel, dan bebas korupsi. Profesionalisme penyelenggaraan pemerintah tidak hanya pada tata kelola organisasi dan lembaga, namun juga menekankan pada profesionalisme aparatur sipilnya sebagai pelaksana tata kelola yang bekerja dengan berorientasi hasil. Sedangkan birokrasi yang modern diwujudkan melalui transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengikuti perkembangan jaman untuk semakin dekat dalam menjangkau masyarakat. Reformasi dan transformasi birokrasi ini tidak lain juga untuk membuka ruang partisipasi publik dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sedangkan Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Keterkaitan dan keselarasan antara misi pembangunan Kota Mataram dengan Misi Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Keterkaitan dan Keselarasan Misi Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram

5 MISI RPJMD KOTA MATARAM 2021-2026	6 MISI RPJMD NTB 2019-2023	9 MISI RPJMN 2020-2024
MISI 1 MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTB SEHAT DAN CERDAS (MISI 3) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah</li> <li>• NTB AMAN DAN BERKAH (MISI 6) melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (MISI 1)</li> <li>• Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (MISI 5)</li> </ul>
MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTB TANGGUH DAN MANTAP (MISI 1) melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</li> <li>• NTB ASRI DAN LESTARI (MISI 4) Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan (MISI 3)</li> <li>• Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (MISI 4)</li> </ul>
MISI 3 MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI (MISI 5) melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing (MISI 2)</li> <li>• Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan (MISI 3)</li> </ul>
MISI 4 MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTB TANGGUH DAN MANTAP (MISI 1) melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah</li> <li>• NTB AMAN DAN BERKAH (MISI 6) melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</li> </ul>	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga (MISI 7)
MISI 5 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTB BERSIH DAN MELAYANI (MISI 2) melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi</li> <li>• NTB AMAN DAN BERKAH (MISI 6) melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya (MISI 6)</li> <li>• Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya (MISI 8)</li> <li>• Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan (MISI 9)</li> </ul>

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Seperti halnya dengan Misi

Pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mataram 2021-2026 juga mempertimbangkan keselarasan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi NTB yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ditetapkan melalui 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2020-2024 serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun penjabaran arahan utama Presiden Republik Indonesia meliputi:

1. **Pembangunan SDM:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan sasaran pembangunan nasional:
  - a. Penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian, dengan target tahun 2024 mencapai 100 persen
  - b. Penduduk mendapatkan perlindungan sosial, dengan target tahun 2024 mencapai 98 persen
  - c. Kelahiran hidup Angka Kematian Ibu dengan target tahun 2024 mencapai 183 per 100.000
  - d. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan target tahun 2024 mencapai 9,18 tahun
  - e. Rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif, dengan target tahun 2024 mencapai 40 persen
  - f. Indeks Perlindungan Anak, dengan target tahun 2024 mencapai 73,49
  - g. Indeks Pembangunan Pemuda, dengan target tahun 2024 mencapai 57,67
  - h. Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan target tahun 2024 mencapai 91,39
  - i. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan target tahun 2024 mencapai 74,18
  - j. Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, dengan target tahun 2024 mencapai 49,8 persen
  - k. Lulusan perguruan tinggi langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, dengan target tahun 2024 mencapai 66,7 persen
  - l. Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional, dengan target tahun 2024 mencapai 40 persen
  - m. Medali emas baik Olympic Games maupun Paralympic Games tahun 2024, dengan target tahun 2024 mencapai 3
  - n. Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, dengan target tahun 2024 mencapai 50 persen
  - o. Indeks Capaian Revolusi Mental, dengan target tahun 2024 mencapai 74,3
  - p. Indeks Pembangunan Kebudayaan, dengan target tahun 2024 mencapai 62,7
  - q. Indeks Pembangunan Masyarakat, dengan target tahun 2024 mencapai 0,65
  - r. Indeks Kerukunan Umat Beragama, dengan target tahun 2024 mencapai 75,8
  - s. Nilai Budaya Literasi, dengan target tahun 2024 mencapai 71,0
  - t. Indeks Pembangunan Keluarga, dengan target tahun 2024 mencapai 61,0
  - u. Median usia kawin pertama perempuan, dengan target tahun 2024 mencapai 22,1
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan sasaran pembangunan nasional:

**Infrastruktur Pelayanan Dasar:**

  - a. Rumah Tangga Menempati Hunian Layak, dengan target tahun 2024 mencapai 70 persen
  - b. Hunian dengan Akses Air Minum Layak » Termasuk Akses Aman 15 persen, dengan target tahun 2024 mencapai 100 persen

- c. Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15 persen, dengan target tahun 2024 mencapai 90 persen
- d. Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan, dengan target tahun 2024 mencapai 30 persen
- e. Jaringan Irigasi Baru, dengan target tahun 2024 mencapai 500 Ribu ha
- f. Tambahan Air Baku Industri & Domestik, dengan target tahun 2024 mencapai 50 m<sup>3</sup>/detik
- g. Bendungan Multiguna, dengan target tahun 2024 mencapai 63
- h. Produktivitas Air untuk Padi, dengan target tahun 2024 mencapai 3 m<sup>3</sup>/kg
- i. Provinsi berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana, dengan target tahun 2024 mencapai 20.

#### **Infrastruktur Ekonomi:**

- a. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa, dengan target tahun 2024 mencapai Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung
- b. Kereta Api, dengan target tahun 2024 mencapai Makassar - Parepare
- c. Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu, dengan target tahun 2024 mencapai Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- d. Jembatan Udara, dengan target tahun 2024 mencapai 43 Rute
- e. Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi, dengan target tahun 2024 mencapai 2.500 km
- f. Jalan Nasional Baru, dengan target tahun 2024 mencapai 3.000 km
- g. Kondisi Mantap Jalan Nasional, dengan target tahun 2024 mencapai 97 persen
- h. Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau, dengan target tahun 2024 mencapai 1,9 jam/100 km
- i. Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (*loop*), dengan target tahun 2024 mencapai 27 persen

#### **Infrastruktur Perkotaan:**

- a. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan, dengan target tahun 2024 mencapai 6.
- b. Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik, dengan target tahun 2024 mencapai 80 persen Penanganan dan 20 persen Pengurangan

#### **Energi dan Ketenagalistrikan:**

- a. Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional, dengan target tahun 2024 mencapai 1.400 kWh
- b. Rasio Elektrifikasi, dengan target tahun 2024 mencapai 100 persen
- c. Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota, dengan target tahun 2024 mencapai 4 Juta
- d. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 Grass Root Refinery/GRR dan 4 Refinery Development *Master Plan/RDMP*), dengan target tahun 2024 mencapai 6 Unit

#### **Transformasi Digital:**

- a. Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar, dengan target tahun 2024 mencapai 95 persen
- b. Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar, dengan target tahun 2024 mencapai 60 persen Kecamatan
- c. Populasi Terjangkau Siaran Digital, dengan target tahun 2024 mencapai 80 persen
- d. Unicorn Baru Start Up, dengan target tahun 2024 mencapai 3

3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan sasaran pembangunan nasional:
  - a. UU terkait Cipta Lapangan Kerja (termasuk regulasi terkait kemudahan dan perlindungan UMKM), dengan target tahun 2024 mencapai RUU Cipta Lapangan Kerja

- b. Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB), dengan target pada tahun 2024 mencapai 40
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan sasaran pembangunan nasional:
- a. Waktu memulai usaha (EoDB), dengan target tahun 2024 mencapai 4 hari
  - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target tahun 2024 mencapai  $\geq 2,6$  (predikat baik)
  - c. Waktu rata-rata pengeluaran barang (dwelling time), dengan target tahun 2024 mencapai 2,9-3,2 hari
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan sasaran pembangunan nasional:

**Industrialisasi:**

- a. Kontribusi PDB industri pengolahan, dengan target tahun 2024 mencapai 21,0 persen
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas, dengan target tahun 2024 mencapai 18,9 persen
- c. Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja, dengan target tahun 2024 mencapai 15,7 persen

**Pengembangan Destinasi Unggulan:**

- a. Devisa pariwisata, dengan target tahun 2024 mencapai USD 30 miliar

**Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital:**

- a. Nilai tambah ekonomi kreatif, dengan target tahun 2024 mencapai Rp 1.846 triliun
- b. Nilai transaksi *e-commerce*, dengan target tahun 2024 mencapai Rp 600 triliun

Sementara Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui:
    - 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
    - 2) Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
    - 3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
    - 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
  - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian, melalui:
    - 1) Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi.
    - 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
    - 3) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
    - 4) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. **Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**, dengan sasaran: Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing**, dengan sasaran:
  - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.

- b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
  - c. Terpenuhinya layanan dasar.
  - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
  - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
  - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. **Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan**, dengan sasaran:
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
  - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
  - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
  - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
  - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
5. **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
  - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
  - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
  - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.
  - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim**, dengan sasaran:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencakup: 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, yang mencakup: 1) Penanggulangan Bencana; 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
  - c. Pembangunan Rendah Karbon, yang mencakup: 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan; 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; 3) Pengelolaan Limbah; 4) Pengembangan Industri Hijau; 5) Rendah Karbon Pesisir dan Laut.
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**, dengan sasaran: Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik melalui: 1) Konsolidasi Demokrasi; 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; 3) Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Terkait dengan kewilayahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pembangunan nusa tenggara dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.” Dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan tersebut maka target



pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran wilayah pulau pada tahun 2024 pada wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 6,0 persen.
2. Kontribusi (*Share*) Ekonomi Regional tahun 2024 ditargetkan sebesar 1,5 persen per PDRB.
3. Kebutuhan Investasi sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.19,9 Triliun.
4. Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 12,1 persen.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,1 persen.

Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima (5) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

Pada tingkat Provinsi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB yang ditetapkan melalui RPJMD NTB Tahun 2019-2023 terdiri dari 10 (sepuluh) tujuan dan 26 (dua puluh enam) sasaran pembangunan dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 5.2  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB 2019-2023

TUJUAN PEMBANGUNAN NTB 2019-2023	SASARAN PEMBANGUNAN NTB 2019-2023	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN 2023
1. Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	115,83 point
	1. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,65 point
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	81,17 point
	2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Pemantapan jalan	86,60 point
		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	54,50 persen
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	89,14 persen	
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat BB
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status WTP
	5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	38,65 persen
	6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori A
	7. Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	0,72 point
	8. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,55 point
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Kesehatan	73,05 point
	9. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,48 tahun
		Persentase Balita Stunting	30,49 persen
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	63,10 point

TUJUAN PEMBANGUNAN NTB 2019-2023	SASARAN PEMBANGUNAN NTB 2019-2023	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN 2023
	10. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,79 tahun
		Rata rata Lama Sekolah	7,07 tahun
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,46 point
		Neraca pengelolaan sampah	100 persen
	11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	43,03 point
		Indeks Kualitas Udara	87,57 point
		Indeks Kualitas Air Laut	71,48 point
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,70 point
	12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	70 persen
		Persentase Pengurangan Sampah	30 persen
7. Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli	75,56 point
	13. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp 68.202 milyar
	14. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	23,88 persen
	15. Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100 persen
	16. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,20 point
	17. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	80,59 persen
		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	82,46 persen
		Rasio Elektrifikasi	99,99 persen
		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	68,95 persen
	18. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	3-4 persen
	19. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp. 11.944.000,-
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor Kepariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	4,5 persen
	20. Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. 137,24 milyar
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri	9,00 persen

TUJUAN PEMBANGUNAN NTB 2019-2023	SASARAN PEMBANGUNAN NTB 2019-2023	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN 2023
	21. Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. 179,91 milyar
	22. Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,17 persen
10. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)		Indeks Kriminalitas	13,25 point
		Partisipasi politik masyarakat	85,2 persen
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,4 point
	23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	0 persen
	24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	6,07 persen
	25. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	1,00 persen
	26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	20,47 persen
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	100 persen

Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 dengan Pembangunan Provinsi NTB dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dan Arahkan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.3

## Keterkaitan dan Keselarasan Tujuan Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram

KOTA MATARAM 2021-2026	PROVINSI NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024	
TUJUAN PEMBANGUNAN		ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN
MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>	Pembangunan SDM (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (3)</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)</li> </ul>
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</li> </ul>	Pembangunan Infrastruktur (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)</li> </ul>
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya aksesibilitas antarwilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan</li> </ul>	Pembangunan Infrastruktur (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)</li> </ul>
MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</li> <li>• Terwujudnya perindustrian yang unggul</li> <li>• Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi Ekonomi (5)</li> <li>• Penyederhanaan Regulasi (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (1)</li> <li>• Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (2)</li> </ul>
MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur (2)</li> <li>• Pembangunan SDM (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)</li> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)</li> </ul>
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>	Penyederhanaan Birokrasi (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)</li> </ul>

Berdasar permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab IV, memperhatikan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dengan memperhatikan berbagai sasaran pembangunan, baik nasional maupun propinsi, Kota Mataram menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai 5 tahun ke depan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4  
Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER</b>										
<b>I.1 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)</b>	Nilai	78,91	79,29	79,47	79,56	79,73	79,95	80,22	80,22
I.1.1 Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkatkan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,66	9,86	10,06	10,26	10,46	10,46
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,5	15,51	15,58	15,66	15,73	15,73
I.1.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatkan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	72,34	72,62	72,92	73,21	73,5	73,50
	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81	16,92	15,03	13,14	11,25	9,36	9,36
I.1.3. Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,12	7,79	7,47	7,16	6,87	6,87
	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,87	93,11	93,22	93,34	93,47	93,47
	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00
<b>MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>										
<b>II.1 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)</b>	persen	57,05	57,21	57,37	57,52	57,68	57,84	57,99	57,99
II. 1.1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37	57,52	57,68	57,84	57,99	57,99
<b>II.2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>	<b>INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>	persen	59,24	60,24	61,24	62,24	63,24	64,24	65,24	65,24
II.1.2 Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkatkan	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	61,24	62,24	63,24	64,24	65,24	65,24

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>										
III.1 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	persen	-5,5	-0,95	0,96	1,87	2,78	4,60	6,42	6,42
	GINI RATIO	Nilai	0,381	0,374	0,365	0,353	0,344	0,340	0,337	0,337
	INFLASI	persen	0,58	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
III.1.1 Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55	2,45	3,35	4,95	6,55	6,55
III.1.2. Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi kreatif	persen	9,85	9,90	9,95	10,00	10,05	10,10	10,15	10,15
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH</b>										
IV.1 MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	INDEKS KEAMANAN MANUSIA	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	4,50
IV. 1.1 Stabilitas Wilayah Terkendali	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	4,50
<b>MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>										
V.1 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	64,00	64,50	65,00	66,00	67,00	68,00	71,00	71,00
V.1.1 Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00
	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	3,56	3,57	3,58	3,59	3,60	3,60
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	B	B	B	B	B	B
	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IV.1.2 Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.944*	60	65	70	75	80	85	85

\*Metode Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan, sehingga terdapat penyesuaian target skor Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2021-2026. Adapun Skor dan kategori Indeks Inovasi Daerah yang digunakan sebagai berikut:

Kategori	Skor
Sangat Inovatif	60,00-100,00
Inovatif	30,00-59,99
Kurang Inovatif	0,01-29,99
Tidak Dapat Dinilai	0



# Bab 6

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

### 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk menjamin konsistensi dan implementasi visi, misi dan tujuan serta sasaran maka diperlukan strategi dan arah kebijakan sehingga dapat diidentifikasi tahapan dan berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan sehingga visi dan misi dapat diwujudkan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

## Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Mataram Tahun 2021-2026

## VISI: TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM: HARMONI AMAN RAMAH UNGGUL MANDIRI

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
<b>MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER</b>			
1.1. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	1.1.1. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat	1.1.1.1. Pemenuhan akses dan pemerataan kualitas pendidikan yang berkeadilan.	
		1.1.1.2. Pengarusutamaan budaya lokal.	
		1.1.1.3. Peningkatan literasi masyarakat.	
	1.1.2. Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat	1.1.2.1. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas.	
		1.1.2.2. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.	
		1.1.2.3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit.	
		1.1.2.4. Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga.	
	1.1.3. Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat	1.1.3.1. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	
		1.1.3.2. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.	
		1.1.3.3. Peningkatan perlindungan anak.	
		1.1.3.4. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.	
		1.1.3.5. Pemasarakatan dan pengembangan keolahragaan.	
	<b>MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.</b>		
	2.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.	2.1.1. Kualitas lingkungan hidup meningkat	2.1.1.1. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
			2.1.1.2. Peningkatan Pengelolaan RTH Publik.
2.1.1.3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan.			
2.1.1.4. Peningkatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.			
2.1.1.5. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang.			
2.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.	2.2.1. Kualitas infrastruktur perkotaan meningkat	2.2.1.1. Peningkatan layanan dan kualitas infrastruktur perkotaan.	
		2.2.1.2. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan didukung oleh PSU yang memadai.	
		2.2.1.3. Peningkatan pengelolaan administrasi pertanahan.	
		2.2.1.4. Peningkatan kualitas dan pengembangan sistem transportasi perkotaan.	
<b>MISI 3: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>			
3.1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Pengembangan Industri Kreatif	3.1.1. Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	3.1.1.1. Pemenuhan infrastruktur penunjang sektor ekonomi unggulan.	
		3.1.1.2. Peningkatan daya tumbuh investasi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi local.	
		3.1.1.3. Percepatan transformasi digital berbasis sektor ekonomi unggulan.	
		3.1.1.4. Penciptaan kesempatan kerja layak dan inklusif.	
		3.1.1.5. Percepatan transformasi badan usaha dan pelaku usaha sektor ekonomi unggulan.	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		3.1.1.6. Membangun gerakan cinta produk lokal melalui penguatan kelembagaan produksi dan konsumsi.
	3.1.2. Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat	3.1.2.1. Pemenuhan infrastruktur penunjang sektor ekonomi kreatif.
		3.1.2.2. Mengembangkan kerjasama triple helix antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
		3.1.2.3. Percepatan transformasi digital berbasis sektor ekonomi kreatif.
		3.1.2.4. Memperkuat brand image ekonomi kreatif Kota Mataram.
		3.1.2.5. Penciptaan kesempatan kerja layak dan inklusif.
		3.1.2.6. Percepatan transformasi badan usaha dan pelaku usaha sektor ekonomi kreatif.
<b>MISI 4: MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH</b>		
4.1. Mengendalikan kondusifitas Wilayah.	4.1.1. Stabilitas wilayah terkendali	4.1.1. 1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
		4.1.1. 2. Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
		4.1.1. 3. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dan non alam.
		4.1.1. 4. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
<b>MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>		
5.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Inovatif	5.1.1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat	5.1.1.1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan kinerja yang berbasis data kelitbangan.
		5.1.1.2. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal melalui peningkatan kematangan SPIP dan upaya pencegahan korupsi.
		5.1.1.3. Peningkatan kualitas implementasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui optimalisasi tata kelola kelembagaan perangkat daerah dan pengelolaan ASN.
		5.1.1.4. Peningkatan efektifitas pemerintahan melalui penerapan SPBE.
		5.1.1.5. Optimalisasi akuntabilitas keuangan daerah melalui peningkatan tata kelola keuangan, aset dan pendapatan daerah.
	5.1.2. Kualitas Kinerja Pelayanan Publik meningkat	5.1.2.1. Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah dan unit pelayanan public melalui penerapan pengukuran kepuasan layanan untuk mendorong inovasi.

## 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Selain strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan fokus tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan arah kebijakan tersebut kemudian dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu untuk pencapaian

arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Mataram tahun 2021-2026 dijabarkan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2  
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN-1 2022	TAHUN-2 2023	TAHUN-3 2024	TAHUN-4 2025	TAHUN-5 2026
Mendorong Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik	Percepatan Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Publik yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas SDM	Transformasi Ekonomi, Pengembangan Infrastruktur Publik yang Inklusif dan Pembangunan SDM yang Berkarakter	Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemantapan Infrastruktur Publik Inklusif dan Berwawasan Lingkungan, serta Pengembangan SDM yang Berdaya Saing	Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemenuhan Infrastruktur Publik yang Inklusif, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan, serta Pendayagunaan SDM yang Unggul

### 6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Mataram sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3

Tabel 6.3  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	MISI	SPM	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	<b>SPM Bidang Pendidikan (PermendikBud Nomor 32 Tahun 2018)</b>			
	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	1. Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		2. Pendidikan Dasar		
		3. Pendidikan Kesetaraan		
2	<b>SPM Bidang Kesehatan (Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)</b>			
	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
		3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		4. Pelayanan kesehatan balita		
		5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
		6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
		7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
		8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
		9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )		
3	<b>SPM Pekerjaan Umum (Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018)</b>			
	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	a. Jenis Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</li> </ul>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</li> </ul>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	<b>SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018)</b>			
	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	a. Jenis Pelayanan Dasar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>	Program Pengembangan Perumahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemda Kabupaten/Kota</li> </ul>		
5.a.	<b>SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Permendagri Nomor 121 Tahun 2018)</b>			
	MISI IV: MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH	a. Mutu Pelayanan Dasar		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Operasional Prosedur Satpol PP</li> </ul>	Program Peningkatan Ketentraman dan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan

NO	MISI	SPM	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Sarana Prasarana Satpol PP</li> <li>Standar Peningkatan Kapasitas Anggota SatPol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat</li> <li>Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada</li> </ul>	Ketertiban	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5.b	<b>SPM Sub Urusan Bencana (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)</b>			
	MISI IV: MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH	a. Jenis Pelayanan Dasar		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</li> </ul>	Program Penanggulangan Bencana	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> </ul>		
5.c	<b>SPM Sub Urusan Kebakaran (Permendagri Nomor 114 Tahun 2018)</b>			
	MISI IV: MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH	a. Jenis Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran</li> </ul>	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran</li> </ul>		
6	<b>SPM Bidang Sosial (Permensos Nomor 9 Tahun 2018)</b>			
	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial		
		c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial		
		d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial		
		e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Program Penanganan Bencana	

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas Kepala Daerah baik yang telah disampaikan pada proses

politik yang tertuang dalam 10 ASA maupun arahan langsung Kepala Daerah kepada OPD. Adapun program prioritas Kepala Daerah Kota Mataram diantaranya disajikan pada Tabel 6.4 dan Tabel 6.5.



Tabel 6.4  
Program Prioritas Kepala Daerah untuk mewujudkan 10 ASA

NO	10 ASA	AKSI NYATA UNTUK MEWUJUDKAN ASA	PERWUJUDAN MISI	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Menyediakan TPQ Gratis dan insentif marbot masjid	Pemberian insentif dan peningkatan kesejahteraan guru ngaji, marbot, dan pengurus tempat ibadah.	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
		Penyiapan sarana dan prasarana Pendidikan keagamaan.		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
2	Menguatkan Pendidikan Setara	Pemerataan kualitas Pendidikan dari sisi sarana, prasarana dan SDM.	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Peningkatan Kesejahteraan Guru khususnya tenaga honorer.		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Menghadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Dokling	Dokling: layanan Kesehatan keliling bagi masyarakat untuk mendekatkan layanan Kesehatan dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsultasi/layanan Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu;</li> <li>▪ Konsultasi/layanan Kesehatan gratis bagi masyarakat disabilitas;</li> <li>▪ Konsultasi/layanan Kesehatan gratis bagi lansia;</li> <li>▪ Konsultasi/layanan Kesehatan gratis bagi perempuan.</li> </ul>	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Kerjasama dengan universitas kedokteran dalam penyediaan tenaga Kesehatan untuk mengabdikan bagi masyarakat melalui program yang disiapkan pemerintah.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4	Pengolahan Sampah berbasis lingkungan	Membentuk dan memberdayakan kelompok masyarakat peduli sungai dan kebersihan di tiap lingkungan.	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Program Pemberdayaan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Penunjang

NO	10 ASA	AKSI NYATA UNTUK MEWUJUDKAN ASA	PERWUJUDAN MISI	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>Penyediaan fasilitas penunjang pengolahan sampah mandiri bagi lingkungan, contoh pembuatan briket, penyediaan mesin pengolah sampah plastik</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomis sampah bekerjasama dengan stakeholder swasta maupun pemerintah.</p>	YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	Desa dan Kelurahan	Kewilayahan
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan
				Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5	Menata Ruang Terbuka Hijau	<p>Penataan RTH dengan fokus ramah anak, tematik, dan menggambarkan kearifan local serta mendukung pariwisata kota.</p> <p>Pemanfaatan ruang public sebagai ruang ekspresi masyarakat – vibrant city.</p>	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	MISI V: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK	Program Informasi dan Komunikasi Publik	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
				Program Pendaftaran Penduduk	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	10 ASA	AKSI NYATA UNTUK MEWUJUDKAN ASA	PERWUJUDAN MISI	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Pelayanan Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Pelayanan masyarakat berbasis digital.		Program Aplikasi Informatika	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		Revitalisasi pelayanan pada level kelurahan dan layanan administrasi kependudukan dan perizinan.		Program Pendaftaran Penduduk	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan
		Peningkatan peran kepala lingkungan dan RT dalam pelayanan masyarakat melalui peningkatan insentif dan bantuan operasional.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan
		Meningkatkan sistem kewaspadaan dan penanganan kegawatdaruratan yang terpadu dan terdigitalisasi.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program Penanggulangan Bencana	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana

NO	10 ASA	AKSI NYATA UNTUK MEWUJUDKAN ASA	PERWUJUDAN MISI	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
7	Membangun Kemandirian Fiskal Daerah	Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Pembiayaan non-APBD dalam pembangunan proyek-proyek strategis kota (pembiayaan CSR, luar negeri dan sejenisnya).	MISI V: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah *Pelaksana: OPD Teknis
8	Membangun Rumah Kreatif	Pembentukan rumah kreatif untuk menyiapkan hard dan soft skill bagi pemuda yang menunjang ekonomi kreatif.  Bantuan pelatihan pemuda yang potensial dengan fokus Pendidikan informal, vokasi dan magang dalam meningkatkan skill kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Tujuan adalah mencetak wirausaha baru di Kota Mataram.	MISI III: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
9	Meningkatkan Kapasitas UMKM	Membantu permodalan dan pemasaran bagi UMKM dan Start Up Business (Permodalan berbasis umat, fasilitasi kemudahan kredit usaha, fasilitas ekspansi pasar).  Revitalisasi peran Pedagang Kaki Lima dalam perekonomian Kota.	MISI III: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING	Program Pemberdayaan UMKM Program Pengembangan UMKM Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Aplikasi e-commerce gratis bagi pelaku usaha kota mataram. Contoh membuat aplikasi "Mataram Mart" sebagai media pemasaran.		Program Pemberdayaan UMKM Program Pengembangan UMKM	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha

NO	10 ASA	AKSI NYATA UNTUK MEWUJUDKAN ASA	PERWUJUDAN MISI	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
					Kecil dan Menengah
10	Menyediakan Infrastruktur kota yang berkelanjutan	<p>Penyediaan akses transportasi guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan dan revitalisasi pedestrian</li> <li>▪ Pembangunan Jalur Sepeda.</li> <li>▪ Penyiapan angkutan publik dan angkutan sekolah.</li> <li>▪ Revitalisasi angkutan cidomo yang mendukung wajah kota dan kebersihan.</li> </ul> <p>Penyediaan akses perumahan berkualitas bagi warga kota dengan program pengurangan kumuh pada Kawasan perkotaan, bantaran sungai dan pinggir pantai.</p>	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program Kawasan Permukiman</p> <p>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.</p>	<p>OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</p> <p>OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat</p>

Tabel 6.5

## Program Prioritas Kepala Daerah dalam Arahan Kebijakan Teknis

NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Penataan Kawasan Wisata	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN  dan  MISI III: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Loang Baloq, Taman Udayana, dan Pantai Ampenan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Loang Baloq, Taman Udayana dan Pantai Ampenan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Mataram dalam rangka meningkatkan kunjungan serta pendapatan dari sector pariwisata. Rencana pengembangan destinasi wisata ini rencananya akan diupayakan sebagian besar pendanaannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pariwisata. Disamping itu juga ditunjang dengan pendanaan dari APBD Kota Mataram terkait dengan kegiatan-kegiatan penunjangnya.
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
				Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan	
		Pengembangan Ruang Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Pembanguna Ruang Kreatif ini direncanakan melalui program Coultrual Heritage Regenration (CHR) ATAU Regenerasi Warisan Budaya yang merupakan kerjasama antara Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Kota Mataram. Nantinya dalam bentuk hibah yang akan diberikan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dimana Pihak Pemerintah Kota Mataram akan menyediakan lahan/lokasi untuk pembangunan Ruang Kreatif. Pemerintah Kota Mataram juga mempersiapkan alternative pembiayaan dari APBD sendiri untuk Pembangunan Ruang	

NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						Kreatif.
2	Pembangunan Rusunawa Nelayan	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	Pembangunan Rusunawa Nelayan	Program Pengembangan Perumahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat	Pendanaan kebijakan ini direncanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendanaan dari APBD Kota Mataram
3	Relokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	Relokasi Pasar Ikan/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke Komplek Rusunawa Nelayan Bintaro	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	Relokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sangat perlu dilakukan mengingat TPI yang ada sekarang masih bersifat sementara dengan fasilitas yang terbatas. Dengan pembangunan ini diharapkan Kota Mataram akan memiliki TPI yang higienis dan sesuai standar. Pendanaan kebijakan ini direncanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendanaan dari APBD Kota Mataram
4	Relokasi dan Revitalisasi Pasar	MISI III: MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BEBERDAYA SAING	Relokasi Pasar Kebon Roek	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Relokasi Pasar Kebon Roek diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 84.000.000.000,-. Sumber pendanaan untuk pekerjaan relokasi tersebut bersumber dari APBN atau melalui alternatif investasi dengan skema BOT (Build Operate Transfer). Relokasi direncanakan bertahap dimulai pada tahun 2022.
			Revitalisasi Pasar Cakranegara	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Anggaran Revitalisasi Pasar Cakranegara diperkirakan sebesar Rp.15.000.000.000,-. Sumber utama pendanaan untuk pekerjaan revitalisasi bersumber dari APBN, dan telah diusulkan ke Kementerian PUPR RI pada tahun 2021. Revitalisasi Pasar Cakranegara dari sumber pendanaan APBN direncanakan pada tahun 2022. Alternatif pembiayaan kedua adalah



NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						bersumber dari APBD Kota Mataram. Revitalisasi direncanakan bertahap selama tiga tahun yang dimulai pada tahun 2023. Tahapan rencana pembiayaan revitalisasi Pasar Cakranegara yang bersumber dari APBD Kota Mataram yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap Pertama Tahun 2023 sebesar Rp.8.000.000.000,-</li> <li>• Tahap Kedua Tahun 2024 sebesar Rp.4.000.000.000,-</li> <li>• Tahap Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp.3.000.000.000,-</li> </ul>
5	Pengelolaan Sampah berbasis Teknologi ( <i>Waste to Energy</i> ).	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	Pengembangan <i>Waste to Energy</i> - Konversi sampah menjadi energi	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ( <i>Waste to Energi</i> ) sangat penting dilakukan. Hal ini disamping akan dapat mengurangi timbulan sampah yang ada akan dapat juga menghasilkan energy yang bernilai ekonomis. Kota Mataram akan melakukan Kerjasama dengan Pihak UCLG-ASPAC ( <i>United Cities Local Government Asia Pacific</i> ) melalui program CRIC ( <i>Climate Resilience and Inclusive Cites</i> . Dimana dari program tersebut, bahwa Kota Mataram memiliki isu strategis di bidang persampahan. Untuk itu, akan dibangun instalasi pengolahan sampah organic dengan teknologi Biodigester. Pengolahan sampah dengan teknologi tersebut akan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energy. Dari kerjasama ini Pemerintah Kota Mataram diminta untuk menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sedangkan pihak UCLG ASPAC akan membiayai biaya konstruksi, dan akan dihibahkan ke Pemerintah Kota Mataram. Pelaksanaan tahap persiapan, tahapan

NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						konstruksi hingga serah terima direncanakan selama 2,5 tahun sehingga diharapkan instalasi tersebut sudah dapat beroperasi pada tahun 2023.
5	Penataan Wajah Kota	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	Penataan Wajah Kota - Ornamen Kota	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pendanaan kebijakan ini direncanakan pendanaan dari APBD Kota Mataram, akan tetapi diharapkan juga agar pekerjaan-pekerjaan dapat membuka peluang keterlibatan dana korporasi melalui skema CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) dalam pembangunan daerah.
			Penataan Wajah Kota - Jalan dan trotoar	Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			Penataan Wajah Kota - Taman Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
			Penerapan PJU Pintar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (LLAJ)	OPD yang menangani urusan pemerintahan Bidang Perhubungan	
						Penerapan PJU Pintar adalah tersedianya perlengkapan jalan yang menggunakan lampu LED dengan perkiraan anggaran, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap I. Tahun 2022 sebesar Rp.43.240.054.868,-</li> <li>• Tahap Kedua Tahun 2023 sebesar Rp.53.637.554.868,-</li> <li>• Tahap Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp.57.375.054.868,-</li> <li>• Tahap Keempat Tahun 2025 sebesar Rp.57.553.179.868,-</li> <li>• Tahap Kelima Tahun 2026 sebesar Rp.57.892.554.868,-</li> </ul> Sumber pembiayaan penerapan PJU Pintar berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Mataram dan Swasta
6	Pembangunan Kantor Walikota	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS	Pembangunan Kantor Walikota Baru dan Graha Dewan	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan	Dokumen pendukung pelaksanaan pembangunan Kantor Walikota dan Graha DPRD Kota Mataram telah disusun di tahun-

NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN dan  MISI V: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK			Umum dan Penataan Ruang	tahun sebelumnya seperti Kajian FS, penyediaan lahan, dokumen DED, dokumen AMDAL serta dokumen ANDALALIN.  Adapun mekanisme pelaksanaan pembangunan Kantor Walikota dan Graha DPRD Kota Mataram dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif pembiayaan antara lain melalui pembangunan tahun jamak ( <i>multi years</i> ) ataupun pembangunan secara bertahap setiap tahun anggaran.
7	Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan	MISI I: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER	Peningkatan Sarpras RSUD Kota Mataram	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Sumber pendanaan untuk pengembangan RSUD Kota Mataram direncanakan dengan mekanisme Pinjaman Daerah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 125.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). Rencana pembiayaan untuk pekerjaan akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Total Pembiayaan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 147.020.937.500,- dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2021 (Pembayaran Bunga) sebesar Rp. 1.680.312.500,-</li> <li>• Tahun 2022 (Pembayaran Bunga) sebesar Rp. 7.075.000.000,-</li> <li>• Tahun 2023 (Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman) sebesar Rp. 27.466.145.833,-</li> <li>• Tahun 2024 (Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman) sebesar Rp.</li> </ul>

NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						46.088.541.667,- <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2025 (Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman) sebesar Rp. 43.730.208.333,-</li> <li>Tahun 2026 (Pembayaran Bunga dan Pokok Pinjaman) sebesar Rp. 20.980.729.167,-</li> </ul>
8	Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT)	MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	Implementasi SPALDT Skala Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPALDT Skala Kota telah di mulai dengan dilaksanakan Feasibility Study (FS) dari konsultan SSDP <i>World Bank</i> pada tahun 2017, Kajian <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)</i> pada tahun 2018. Sedangkan penyusunan Basic desain <i>Wastewater Treatment Plant (WWTP)</i> dan DED jaringan telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Beberapa kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalam pembangunan SPALDT Skala Kota antara lain penyiapan lahan seluas 3,5 Ha, Penyiapan lahan untuk (pompa, penyeberangan pipa), penyusunan Dokumen AMDAL dan Dokumen ANDALALIN. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan di mulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 untuk tahap 1. Pembangunan jaringan sambungan rumah (SR) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram dan pada tahap 1 Pemerintah Pusat mengalokasikan 4.000 SR sebagai pilot proyek. Sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab Kota Mataram dan sudah direncanakan dalam RPJMD pada tahun 2025 termasuk sebagai usulan pembiayaan DAK.

NO	PRIORITAS WALIKOTA	PERWUJUDAN MISI	ARAHAN KEBIJAKAN	PROGRAM DALAM RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						<p>Pemerintah Kota Mataram dalam mengantisipasi implementasi SPALDT Skala Kota telah mendapatkan pendampingan dalam penyusunan kelembagaan dengan menyusun Peraturan Walikota terkait UPTD sebagai pengelola SPALDT. Selain itu dalam pelaksanaan tahun 2026 kelembagaan akan didampingi dari Pemerintah Pusat sebelum penyerahan secara keseluruhan.</p>

Selain untuk melaksanakan penerapan SPM dan prioritas pembangunan kepala daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. KLHS RPJMD yang telah disusun menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam dokumen RPJMD. Program pembangunan daerah untuk mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan, ekonomi, sosial, hukum dan tata Kelola dirinci dalam T 6.6 berikut.

Tabel 6.6

Program Pembangunan Daerah sesuai Rekomendasi KLHS RPJMD

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	<b>PILAR SOSIAL</b>				
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur $\geq 15$ Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun.	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Proporsi Anak-Anak dan Remaja: (A) Pada Kelas 4, (B) Tingkat Akhir SD/Kelas 6, (C) Tingkat Akhir SMP/ Kelas 9 yang Mencapai Standar Kemampuan Minimum dalam: (1) Membaca, (2) Matematika.	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan.		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Paud	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan.		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/ Laki-Laki di (1) SD/MI/Paket A; (2) SMP/MTS/Paket B; (3) SMA/SMK/MA/	Program Pengelolaan Pendidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
7	Program Pendidik Dan	Pemerataan Kuantitas Dan		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Tenaga Kependidikan	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan.	Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/ Laki-Laki di (1) SD/MI/Paket A; (2) SMP/MTS/Paket B; (3) SMA/SMK/MA/ Sederajat; (4) Perguruan Tinggi.		Bidang Pendidikan
8	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan Dan Perlindungan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur $\geq 15$ Tahun.	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/ Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi HIV Pada Populasi Dewasa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kejadian Malaria Per 1000 Orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Di Puskesmas	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	<p>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan Ukm Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
11	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Koefisien Gini		
			Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur		
			Proporsi Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin Dan Penyandang Difabilitas		
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PIKB)			
		Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota			
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran			

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi</p> <p>Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PIKB)</p> <p>Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi</p>	<p>Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Atau Pasangannya Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern</p> <p>Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin</p>	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota			
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern		
		Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PIKB) Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota			
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun		
		Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/			

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		<p>Petugas Lapangan KB (PKB/PIKB) Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>			
		<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun		
		<p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PIKB)</p> <p>Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota</p>			
		<p>Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p>			
		<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)</p>	Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Metode Kontrasepsi		

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PIKB) Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Modern		
14	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/Asfr)  Total Fertility Rate (Tfr)	Program Pengendalian Penduduk	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Program Perlindungan Dan Jaminan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis	Semua Program Yg Menunjang Pencapaian Sasaran	Diampu Oleh Beberapa OPD.

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Sosial	Kabupaten/Kota	Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	RPJMD ( <i>Angka Kemiskinan</i> ). Program-Program Tersebut Diampu Oleh Beberapa OPD.	
			Presentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasar Dan Inklusifnya	Program Rehabilitasi Sosial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Proporsi Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin Dan Penyandang Difabilitas.	Semua Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran RPJMD ( <i>Angka Kemiskinan</i> ). Program-Program Tersebut Diampu Oleh Beberapa OPD.	Diampu Oleh Beberapa OPD.
16	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Semua Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran RPJMD ( <i>Angka Kemiskinan</i> ). Program-Program Tersebut Diampu Oleh Beberapa OPD.	Diampu Oleh Beberapa OPD.
			Presentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasar Dan Inklusifnya	Program Rehabilitasi Sosial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	Semua Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran RPJMD ( <i>Angka Kemiskinan</i> ). Program-Program Tersebut Diampu Oleh Beberapa OPD.	Diampu Oleh Beberapa OPD.
		Proporsi Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Dari Median	Semua Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran RPJMD ( <i>Angka Kemiskinan</i> ). Program-	Diampu Oleh Beberapa OPD.	



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin dan Penyandang Difabilitas.	Program Tersebut Diampu Oleh Beberapa OPD.	
17	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	Program Penanganan Bencana	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN</b>					
18	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PILAR EKONOMI</b>					
19	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan IUI Menengah	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Dan Per Kapita.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian
20	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial*)	Pengembangan Industri Pangan*) Pengembangan Industri Farnasi Dan Kosmetik, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong Dan Jasa		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Industri*) Pengembangan Industri Agro*) Pengembangan Industri Logam Dan Bahan Galian Bukan Logam*) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM*)			
21	Program Pengembangan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah*)	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah*)		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian
		Sosialisasi Tentang Kredit Usaha Rakyat*)			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah*)			
		Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi UMKM*)		Program Pengembangan UMKM	OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan*)			
		Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan*)			
		Penyelenggaraan Pembinaan Industri UMKM*)			
		Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal*)			
22	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian
23	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian
24	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial*)	Pengembangan Industri Pangan*)		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian
		Pengembangan Industri Farnasi Dan Kosmetik, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong Dan Jasa Industri*)			

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan Industri Agro*)			
		Pengembangan Industri Logam Dan Bahan Galian Bukan Logam*)			
25	Program Pengembangan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah*)	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah*)		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian
		Sosialisasi Tentang Kredit Usaha Rakyat*)			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah*)			
		Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi UMKM*)			
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan*)			
		Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan*)			
		Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM*)			
		Penyelenggaraan Pembinaan Industri UMKM*)			
		Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal*)			
26	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
27	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Dan Per Kapita.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Ivestasi Kabupaten/Kota			

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
28	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Program Pelayanan Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
29	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
30	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Program Pelayanan Penanaman Modal	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
31	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja*)	Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non- Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
33	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja*)	Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
34	Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Lembaga Ketenagakerjaan*)	Peningkatan Penerapan Pengupahan*)	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja	Program Hubungan Industrial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Penyusunan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) *)			
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	1) Program Perencanaan Tenaga Kerja; 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3) Program Hubungan Industrial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
36	Program Penempatan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Tenaga Kerja				
37	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Setengah Pengangguran.	1) Program Perencanaan Tenaga Kerja; 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3) Program Hubungan Industrial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
38	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur.	Program Penempatan Tenaga Kerja	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
40	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengupahan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Program Hubungan Industrial	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
41	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2) Program Pemasaran Pariwisata; 3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
42	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
43	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Ekonomi Kreatif	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
44	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
45	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
46	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
47	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	Program Pemasaran Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
48	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
49	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
50	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	1). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2). Program Pemasaran Pariwisata;	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Kabupaten/Kota		3). Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; 4). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
51	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
52	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
	<b>PILAR LINGKUNGAN</b>				
53	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Identifikasi Karakteristik Sumber-Sumber Pencemaran	Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan Dan Ijin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Penhijauan Di Sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)	Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
54	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
55	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kabupaten/Kota			
56	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani. 2. Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang.	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
57	Program Pengalolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta			
58	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri).	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
<b>PILAR SOSIAL DAN PILAR LINGKUNGAN</b>					
59	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan. 2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			3. Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
60	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan.	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha			
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas diBawah			



NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		10 (Sepuluh) Ha			
61	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak		
			3. Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Dan Berkelanjutan.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
63	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Wilayah Yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan Dan Komunal.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
64	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku.	-	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN</b>					
65	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kota	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir	-	Kewenangan Kepolisian
		Penegakan Perda Kota Dan Peraturan Walikota		-	Kewenangan Kepolisian
<b>PILAR SOSIAL</b>					
66	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, Dan Terkena Dampak Bencana Per	Program Penanggulangan Bencana	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			100.000 Orang		Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial		
			Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		
			Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan		
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	
			Indeks Risiko Bencana Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Berisiko Tinggi		
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		
			Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan		
			Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Daerah.		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	
			Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan		
			Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Daerah		
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN					

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
67	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	Jumlah Kebijakan Yang Diskriminatif Dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum Ham Internasional.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Dewan
68	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	Jumlah Kebijakan Yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum Ham Internasional.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
69	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
70	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	OPD yang menangani Urusan Penunjang Pengawasan
71	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD yang menangani Urusan Penunjang Pengawasan
72	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Kegiatan SPBE*)	Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
73	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Kota).		
74	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas PPID Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
75	Program Pengelolaan Keuangan	1. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Kegiatan Penunjang Urusan	Proporsi Sumber Daya Yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD yang menangani Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD yang menangani Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
76	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD yang menangani Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
77	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD yang menangani Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
78	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran Yang Disetujui.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD yang menangani Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
79	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	OPD yang menangani Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
80	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Uu Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang menangani Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah
81	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan	Persentase Penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan.	Program Perekonomian dan Pembangunan	OPD yang menangani Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah

NO	REKOMENDASI KLHS RPJMD			DOKUMEN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026	
	REKOMENDASI PROGRAM	REKOMENDASI KEGIATAN	INDIKATOR TPB	PROGRAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah			
	<b>PILAR EKONOMI</b>				
82	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
83	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	PDRB Per Kapita.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan

Selanjutnya, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk mewujudkan aksi nyata dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya adaptasi terhadap ancaman bencana pesisir yang diperparah oleh dampak perubahan iklim. Adapun beberapa rekomendasi berdasarkan kajian Pengelolaan Garis Pantai Kota Mataram sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pantai dan Kenaikan Muka Air Laut untuk dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 diuraikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7  
Program Pembangunan Daerah untuk Adaptasi Perubahan Iklim

NO	REKOMENDASI PENANGANAN	RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM RPJMD 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Penataan Garis Pantai	1.1. Pembangunan <i>Detached Breakwater</i>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1.2. Pembangunan Tanggul Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1.3. Patok Pengamatan Garis Pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Penataan Kawasan Permukiman	2.1. Relokasi Rumah Nelayan	Program Pengembangan Perumahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
		2.2. Pembangunan RUSUNAWA	Program Pengembangan Perumahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
		2.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
		2.4. Peningkatan Kapasitas Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan

NO	REKOMENDASI PENANGANAN	RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM RPJMD 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Masyarakat Pesisir		Bidang Perikanan
3	Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi di Pantai	3.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
		3.2. Pembuatan Kolam Labuh	-	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
		3.3. Peningkatan SDM Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
		3.4. Peningkatan Kapasitas Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
		3.5. Bimtek Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
		3.6. Bimtek/Pelatihan Keterampilan Nelayan Non Perikanan	Program Pemberdayaan UMKM	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		3.7. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
			Program Pemberdayaan UMKM	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Program Pengembangan UMKM	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.8. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Keamanan Laut (Pokmaswas Kamlut)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan		
3.9. Inisiasi Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial/ Edukasi dan Perlindungan Penyuluhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
3.10. Pembinaan Kelompok Pelestari Penyu	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
4	Infrastruktur Kawasan Pantai	4.1. Pembangunan Detached Breakwater kombinasi menerus dan terputus	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.2. Pembangunan Tanggul Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.3. DED IPAL skala kota	Program Pengelolaan dan	OPD yang menangani



NO	REKOMENDASI PENANGANAN	RENCANA AKSI	PROGRAM DALAM RPJMD 2021-2026	OPD PENANGGUNG JAWAB
		yang telah memperhitungkan potensi bencana pantai	Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.4. Penanaman Pohon/Tanaman yang dapat menahan erosi di sekitar IPAL skala kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		4.5. Peninggian Elevasi Muka Jalan 2-3 m	Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.6. Pembangunan Pemecah Gelombang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.7. Pembangunan Tanggul Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.8. Pemeliharaan Muara Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Regulasi Penataan Kawasan Pantai	5.1. Penerapan Pemanfaatan Perda Sempadan Pantai	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		5.2. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Sehubungan dengan pencapaian tujuan penataan ruang, indikasi program utama dalam RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 juga harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dioperasionalkan ke dalam program pembangunan daerah yang nantinya akan diturunkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra OPD. Hasil sinkronisasi indikasi program utama rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRW dengan program pembangunan daerah disajikan pada Tabel 6.8 berikut.

Tabel 6.8

#### Operasionalisasi Indikasi Program Utama RTRW ke dalam Program Pembangunan Daerah

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
<b>RENCANA STRUKTUR RUANG</b>			
A.	Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan Kota		
A1.	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Untuk Pelayanan Skala Kota, Provinsi, Nasional Dan Internasional		
1	Revitalisasi dan/atau Penataan Kawasan Pusat-Pusat Perdagangan dan Jasa serta Pariwisata	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB	
	2	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum (Pendidikan dan Kesehatan), Perkantoran dan Pelayanan Umum Lainnya	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penataan Bangunan Gedung	Umum Dan Penataan Ruang OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	3	Pembangunan dan Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
<b>A2. Pengembangan Sub Pusat</b>				
	1	Penyediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
	2	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan serta Pelayanan Umum Lainnya	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penataan Bangunan Gedung OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
<b>A3. Pengembangan Pusat Lingkungan</b>				
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
<b>B. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat</b>				
<b>B1. Peningkatan/Pemantapan/Pelebaran Jaringan Jalan</b>				
	1	Sosialisasi Peningkatan/ Pelebaran/Pemeliharaan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	2	Implementasi Peningkatan/ Pelebaran/Pemeliharaan Jalan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
<b>B2. Pembangunan Jaringan Jalan Baru</b>				
	1	Penyusunan DED Jaringan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	2	Sosialisasi Pembangunan Jalan, Pembebasan Lahan, Serta Implementasi Fisik Pembangunan dan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	3	Pemeliharaan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Umum Dan Penataan Ruang
<b>B3.</b>	<b>Pengembangan Terminal Penumpang</b>		
1	Peningkatan Terminal Tipe A Mandalika		Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB
2	Revitalisasi Terminal Tipe C	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
3	Pembangunan Terminal Tipe C - Sosialisasi dan Penyusunan DED, Pembebasan lahan/ relokasi, Implementasi Fisik Pembangunan Terminal Tipe C,	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
4	Penyediaan Tempat Pemberhentian (Shelter)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
<b>B4.</b>	<b>Pengembangan Moda Angkutan Massal Dalam Kota</b>		
1	Penyediaan Moda Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2	Kajian/Studi Kelayakan Pengembangan MRT/LRT/ Angkutan Bawah Tanah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
3	Pembukaan trayek/rute baru di dalam Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
4	Pengalihan Rute Angkutan Transportasi Cidomo	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
<b>C.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>		
1	Penyusunan DED dan Masterplan Pelabuhan Khusus Wisata	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2	Sosialisasi, Pembebasan dan Pematangan Lahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
3	Pembangunan Pelabuhan Beserta Prasarana dan Sarananya	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
<b>D.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Energi Dan Ketenagalistrikan</b>		
<b>D1.</b>	<b>Pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Beserta Sarana-Prasarananya</b>		
1	Peningkatan Pelayanan PLTD Ampenan		Kewenangan PT PLN
2	Pengembangan PLTGU		Kewenangan PT PLN
3	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan: a. Penyusunan Studi Kelayakan		Kewenangan PT PLN
4	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan: b. Sosialisasi dan Penyusunan DED dan/ atau Masterplan		Kewenangan Provinsi
5	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan: c. Pembebasan Lahan		Kewenangan Provinsi

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
6	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan: d. Pembangunan Pembangkit Listrik		Kewenangan PT PLN
<b>D2. Pengembangan Jaringan Transmisi Beserta Sarana-Prasarananya</b>			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan SUTT		Kewenangan PT PLN
2	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Gardu Induk Skala Kota		Kewenangan PT PLN
3	Pengembangan Sistem Jaringan Listrik Bawah Tanah		Kewenangan PT PLN
4	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Beserta Sarana-Prasarananya		Kewenangan PT PLN
<b>D3. Pengembangan Jaringan Distribusi Beserta Sarana-Prasarananya</b>			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan SUTM dan SUTR		Kewenangan PT PLN
2	Pengadaan SUTM dan SUTR pada Kawasan Pengembangan Baru		Kewenangan PT PLN
<b>D4. Pengembangan Jaringan Bahan Bakar, Minyak Dan Gas</b>			
1	Peningkatan Jangkauan Pelayanan Depo Bahan Bakar Minyak dan Gas		Kewenangan Pertamina
<b>E. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>			
<b>E1. Pengembangan Jaringan Tetap</b>			<b>Kewenangan Pt Telkom</b>
1	Pengembangan Sambungan Telepon Kabel pada Kawasan Pengembangan Baru		Kewenangan Pt Telkom
2	Pemasangan Jaringan Kabel Telepon Bawah Tanah		Kewenangan Pt Telkom
<b>E2. Pengembangan Jaringan Bergerak</b>			
1	Pengaturan sebaran menara telekomunikasi dan BTS terpadu secara kolektif: a. Pembatasan Jumlah Tower dengan Provider Tunggal	Program Informasi dan Komunikasi Publik	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2	Pengaturan sebaran menara telekomunikasi dan BTS terpadu secara kolektif: b. Pemasangan Tower Bersama dengan Model Single Pole		
3	Peningkatan Teknologi Telematika Berbasis Teknologi Modern (Internet, Cloud, dll)	Program Aplikasi Informatika	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
4	Pengembangan Jaringan Fiber Optik	Program Aplikasi Informatika	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
5	Pengembangan Area Hotspot pada Fasilitas-Fasilitas Umum	Program Aplikasi Informatika	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
<b>F. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>			

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
<b>F1.</b>	<b>Perlindungan, Pelestarian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air</b>		
1	Pengaturan Pengambilan Air Tanah		Kewenangan Pemerintah Provinsi
2	Pengembangan Jaringan Irigasi pada KP2B	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Ramah Lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Pengaturan Pemanfaatan Air Permukaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>F2.</b>	<b>Pengendalian Daya Rusak Air</b>		
1	Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan Sistem Prasarana Sumberdaya Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Pengaman Pantai (Pemecah Gelombang, Jetty, dll)		Kewenangan BWS
<b>G.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Pengelolaan Air Minum</b>		
1	Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Pengelolaan Air Minum	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
2	Penambahan Jaringan Prasarana Perpipa-an Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PT AMGM
3	Pemanfaatan Sumur Pompa dan Sumur Bor Secara Berdaya Guna		
4	Pemeliharaan dan Peningkatan Pelayanan Jaringan Distribusi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang PT AMGM
5	Kerjasama Dengan Instansi Pengelola Air Minum	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
6	Penyediaan Jaringan Distribusi Baru		Kewenangan PT AMGM
7	Penyebaran Hidran-Hidran Umum		Kewenangan PT AMGM
<b>H.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Pengolahan Limbah</b>		
<b>H1.</b>	<b>Pengelolaan Air Limbah Perpipa-an Terpusat</b>		
1	Pendayagunaan dan Pemeliharaan IPAL Meninting		-
2	Pengembangan IPAL untuk Kegiatan Industri	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Lingkungan Secara Komunal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Pemeliharaan Saluran	Program Pengelolaan Dan	OPD yang menangani Urusan

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Pembuangan Air Limbah	Pengembangan Sistem Air Limbah	Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Penanganan Limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>H2.</b>	<b>Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Secara Individual Dan Komunal</b>		
1	Pengelolaan IPAL Komunal Berbasis Masyarakat dan/atau CSR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Pengembangan Tangki Septik dan Saluran Limbah Kolektif	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Penyediaan Tangki Septik Secara Individu	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>I.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Pengolahan Sampah</b>		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Unit TPS	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3	Pembebasan Lahan dan Pembangunan Prasarana Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5	Pemantapan Kerjasama Pengelolaan Persampahan dengan Kabupaten Lombok Barat	Program Pengelolaan Persampahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>J.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Drainase</b>		
1	Pembuatan Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Pengembangan Sistem jaringan Drainase Primer	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Sekunder	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Pengembangan Sistem jaringan Drainase Tersier	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Lintas Wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Normalisasi Saluran Drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
7	Pengembangan Drainase Sistem Polder dalam Bentuk Kolam-Kolam Retensi dan Lubang Resapan Biopori	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>K. Perwujudan Sistem Jaringan Pejalan Kaki Dan/Atau Pesepeda</b>			
<b>K1. Penyediaan Dan Pemanfaatan Pejalan Kaki Dan/Atau Pesepeda Tepi Jalan</b>			
1	Peningkatan Jaringan Jalan/Trotoar	Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Pembangunan Jalur Pejalan Kaki dan/atau Pesepeda	Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
3	Penyediaan Sarana Pendukung Jalur Pejalan Kaki dan/atau Pesepeda	Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>K2. Penyediaan Dan Pemanfaatan Pejalan Kaki Dan/Atau Pesepeda Tepi Sungai</b>			
1	Penertiban Wilayah Sungai	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
2	Pembebasan Lahan	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
3	Pembangunan Jalan Inspeksi	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
4	Penyediaan Sarana Pendukung Pejalan Kaki	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
<b>K3. Penyediaan Dan Pemanfaatan Pejalan Kaki Dan/Atau Pesepeda Tepi Pantai</b>			
1	Penertiban Kawasan Pantai	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
2	Penyediaan Jalur Pedestrian Tepi Pantai	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
<b>RENCANA POLA RUANG</b>			
<b>A. Perwujudan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai</b>			
1	Pembatasan Pembangunan / Pengadaan Kegiatan Baru di Sepanjang Sungai	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Normalisasi Sungai		Kewenangan BWS
3	Penanaman Vegetasi Tanaman Keras di Sepanjang Tepi Sungai	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4	Pembangunan Talud/Tanggul Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
<b>B. Perwujudan Perlindungan Kawasan Sempadan Pantai</b>			
1	Pembatasan Pembangunan / Pengadaan Kegiatan Baru di Sempadan Pantai	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Penertiban dan/atau Penataan Sempadan Pantai sejauh 35 meter	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Penertiban dan/atau Penataan Sempadan Pantai sejauh 35 - 100 meter	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Pembangunan Jetty Penahan Abrasi		Kewenangan BWS
<b>C. Perwujudan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi (Sempadan Mata Air)</b>			
1	Pembangunan Pengaman Mata Air dan/atau Penanaman Vegetasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>D. Perwujudan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Rth)</b>			
<b>D1. Penyediaan Hutan Kota / Taman Kota/OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan</b>			
1	Penyusunan Masterplan dan/atau DED RTH (Hutan Kota/Taman Kota dan OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan)	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Pembebasan/Akuisisi Lahan Untuk RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3	Perancangan dan Penanaman Vegetasi Bernilai Estetis dan/ atau Bernilai Ekonomi	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4	Pemeliharaan Hutan Kota/Taman Kota dan OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>D2. Pengadaan Sabuk Hijau</b>			
1	Pengembangan Jalur Hijau berupa Taman Jalan	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Penanaman Vegetasi yang Bernilai Estetis dan Ekonomi	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>D3. Penyediaan RTH Privat</b>			
1	Sosialisasi Gerakan Program 1 rumah 1 pohon dan konsep green roof	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Penyediaan Vegetasi pada Kawasan Perumahan Baru, Perkantoran, dan Sarana Pelayanan Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat



INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
<b>D4. Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)</b>			
1	Penataan TPU Eksisting	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
2	Pembebasan Lahan Untuk Pengembangan TPU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
<b>E. Perwujudan Pemantapan Dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya</b>			
1	Penyusunan Dokumen RTBL	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Konservasi Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>F. Perwujudan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana</b>			
<b>F1. Pengendalian Kawasan Rawan Banjir Dan Genangan</b>			
1	Penyediaan LBR atau Ruang Resapan pada Kawasan Bencana	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Penanaman Vegetasi pada Kawasan Rawan Banjir	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>F2. Pengendalian Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Tsunami Dan/Atau Abrasi</b>			
1	Pembangunan Pengaman Wilayah Pesisir Pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Penanaman Vegetasi Pada Kawasan Sempadan Pantai	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>G. Perwujudan Pengembangan Kawasan Perumahan</b>			
<b>G1. Penataan Kawasan Perumahan Berkepadatan Tinggi</b>			
1	Penataan Kawasan Permukiman Padat Kumuh	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
2	Relokasi Perkampungan Nelayan	Program Pengembangan Perumahan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
<b>G2. Pengembangan Kawasan Perumahan Berkepadatan Sedang Dan Rendah</b>			
1	Penataan Kawasan Permukiman Berkepadatan Sedang dan Tinggi	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
2	Konsolidasi Lahan Pengembangan Kawasan Perumahan	Program Kawasan Permukiman	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
3	Pembangunan Fasilitas pada Kawasan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
<b>H. Perwujudan Pengembangan Kawasan Perdagangan Dan Jasa</b>			
<b>H1. Pengembangan Kawasan Pusat Perbelanjaan Dan Niaga Serta Pergudangan</b>			
1	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan Pola Superblock	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Sarana Distribusi	OPD yang menangani Urusan

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Perdagangan	Pemerintahan Bidang Perdagangan
2	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Serta Pergudangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3	Penataan Kawasan Pasar Induk OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
4	Penataan Kawasan Pasar Induk Kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
<b>H2.</b>	<b>Pembangunan Dan/Atau Relokasi Pasar</b>		
1	Pembangunan Pasar Induk Kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
<b>H3.</b>	<b>Penataan Dan/Atau Penyediaan Sarana Dan Prasarana Komersial</b>		
1	Penataan Pusat PKL	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
2	Penertiban Kegiatan Sektor Informal	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
<b>I.</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Perkantoran</b>		
<b>I1.</b>	<b>Peningkatan Fungsi Dan Pelayanan Kawasan Perkantoran</b>		
1	Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Penataan Kawasan Perkantoran OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Penataan Kawasan Perkantoran Kelurahan	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>J.</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri</b>		
<b>J1.</b>	<b>Pengembangan Industri Kecil Dan Rumah Tangga</b>		
1	Penyediaan IPAL Komunal Untuk IRT	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Penataan Jaringan Jalan di Dalam Kawasan Peruntukan Industri Kecil Rumah Tangga	Program Penyelenggaraan Jalan	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Penyediaan Prasarana Lingkungan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
4	Sosialisasi dan Peningkatan Keswadayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan UMKM	Diskoperin UMKM
<b>J2.</b>	<b>Pengembangan Industri Menengah</b>		
1	Penyediaan IPAL Komunal	Program Pengendalian Bahan Berbahaya	OPD yang menangani Urusan



INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Untuk Industri Menengah	dan Beracun (B3) dan limbah B3	Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Pembebasan dan/atau Penyediaan Lahan Untuk Area Penyangga Kawasan Peruntukan Industri	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
<b>K.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pariwisata</b>		
<b>K1.</b>	<b>Pengembangan Dan Penataan Pariwisata Alam</b>		
1	Penataan Kawasan Sempadan Pantai Untuk Pengembangan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2	Penataan Kawasan Sekitar Sungai-Sungai Besar Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Pengembangan Kawasan Kota Tepian Air: a. Penyusunan Masterplan, DED dan/atau RTBL Kawasan	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
4	Pengembangan Kawasan Kota Tepian Air: b. Sosialisasi Pengembnagan Kawasam	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
5	Pemantapan Lahan Pertanian Sebagai Urban-farm Land	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
<b>K2.</b>	<b>Pengembangan Pariwisata Budaya</b>		
1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kawasan Cagar Budaya	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>K3.</b>	<b>Pengembangan Kawasan Wisata Dengan Konsep MICE</b>		
1	Perumusan MoU Pemerintah Kota - PT. Angkasa Pura	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
2	Akuisisi Lahan dan Penyiapan Lahan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	Penyusunan RTBL/Masterplan Kawasan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
4	Sosialisasi dan Konsultasi Publik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
<b>K4.</b>	<b>Pengembangan Kawasan Wisata Buatan</b>		
1	Penataan Kawasan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
<b>K5.</b>	<b>Pengembangan Kepariwisataaan</b>		
1	Pengembangan Atraksi Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2	Pembuatan Rencana Induk dan/atau DED (Detail Engineering Design)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
<b>L.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana</b>		
1	Pemantapan/Penyediaan Ruang Terbuka Privat pada Sarana Pelayanan Umum dan Perkantoran	Program Penataan Bangunan Gedung	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>M.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pendidikan</b>		

INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM RTRW		PROGRAM DALAM RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Pendidikan Tinggi Baru		Kewenangan Pusat
<b>N.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Kesehatan</b>		
1	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Kesehatan Baru	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
<b>O.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pertanian</b>		
1	Pemberian Insentif dan Disinsentif Bagi Pemilik Lahan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
2	Pengembangan Sistem Pertanian-Perikanan (Mina Padi)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Arsitektur kinerja RPJMD berdasarkan sasaran pembangunan daerah dengan program operasional dapat terlihat dari Tabel 6.9 berikut:

Tabel 6.9

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah  
**VISI: TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI**

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER																		
	TUJUAN: Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Nilai	78.91	79.29	79.47		79.56		79.73		79.95		80.22		80.22		
	SASARAN: Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.46	9.51	9.66		9.86		10.06		10.26		10.46		10.46		
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15.28	15.36	15.5		15.51		15.58		15.66		15.73		15.73		
101 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketercapaian implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	%	85.94	85.94	86,00	107,879,809,384	86,25	113,215,269,457	86,45	120,350,475,538	86,66	127,970,902,227	86,75	136,083,531,584	86,75	605,499,988,190	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
101 - 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	%	100	100	100	419,993,820	100	461,993,202	100	508,192,522	100	559,011,774	100	614,912,951	100	2,564,104,269	
101 - 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	%	64.35	64.35	65,40	1,914,500,000	67,26	2,105,950,000	69,13	2,316,545,000	71,00	2,548,199,500	72,87	2,803,019,450	72,87	11,688,213,950	
101 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	%	100	100	100	207,707,710	100	228,478,480	100	251,326,328	100	276,458,960	100	304,104,856	100	1,268,076,334	
222 - 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek kemajuan budaya yang dikembangkan	%	4.76	4.76	7.14	1,413,224,308	9.52	1,714,416,360	11.9	1,885,857,996	14.29	2,167,863,795	16.67	2,384,650,175	16.67	9,566,012,634	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																			Kebudayaan
223 - 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	orang	12.739	6.319	7.000	1,457,588,259	8.000	1,603,347,085	10.000	1,763,681,793	12.000	1,940,049,973	13.000	2,134,054,970	50.000	8,898,722,080	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	
		nilai akreditasi perpustakaan kota	Nilai	60	65	67		68		70		80		90		90			
	<b>SASARAN: Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat</b>	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	72,34		72,62		72,92		73,21		73,5		73,5			
		Prevalensi Stunting	%	20,7	18,81	16,92		15,03		13,14		11,25		9,36		9,36			
102 - 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	46,46	60	65	53.580.806.000	70	53.937.446.000	75	50.636.870.000	80	62.881.236.400	85	63.727.539.440	85	284.763.897.840	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	%	63	63	72	1.140.000.000	81	1.254.000.000	90	1.379.400.000	100	1.517.340.000	100	1.669.074.000	100	6.959.814.000		
		Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	%	62,5	70	75	68.706.536.800	85	79.012.517.320	95	90.864.394.918	100	104.494.054.156	100	120.168.162.279	100	463.245.665.473		
		IKM Puskesmas	nilai	81	83	85	17.598.000.000	86	17.807.800.000	87	18.038.580.000	88	18.292.438.000	90	18.571.681.800	90	90.308.499.800		
102 - 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	%	100	80,00	81,01	430.000.000	88,07	473.000.000	91,14	520.300.000	92,40	573.330.000	92,40	629.563.000	92,40	2.626.193.000		
		Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	%	20,00	22,36	34,78	305.500.000	48,44	336.050.000	64,59	397.150.000	81,98	427.700.000	100	442.975.000	100	1.909.375.000		
102 - 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin	%	100	100	100	3.147.441.300	100	6.048.970.033	100	8.334.064.331	100	9.375.000.000	100	7.375.000.000	100	34.280.475.664		
102 - 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase capaian rumah tangga sehat	%	30	33	35	1.287.000.000	40	1.415.700.000	45	1.557.270.000	50	1.712.997.000	55	1.884.296.700	55	7.857.263.700		



KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
214 - 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	%	30	28	26	544,127,600	24	560,952,600	22	581,214,600	20	603,765,975	18	628,875,139	18	2,918,935,914	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
214 - 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)	%	78,31	78,31	78,40	1,415,015,000	78,50	1,658,975,000	78,60	1,663,995,000	78,70	1,673,775,000	78,80	1,673,775,000	78,80	8,085,535,000	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,16	10,16	9,60		9,30		9		9,70		9,40		9,40		
		Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	%	29,42	29,42	30		31		32		33		34		34		
214 - 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	15,51	26,48	15,00	930,967,000	14,34	930,967,000	13,82	930,967,000	13,27	930,967,000	12,74	930,967,000	12,74	4,654,835,000	
209 - 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan energi	KKL/ cap/ hari	3.500,28	3.605	3.713,15	1.281.751.377	3.830,15	1.361.193.487	3.945	1.446.499.766	4.063,35	1.544.906.674	4.185,25	1.637.650.921	4.185,25	7.272.002.225	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		Tingkat ketersediaan protein	Gram/ cap/ hari	83,35	85,85	88,42		93,57		101,37		111,98		125,63		125,63		
209 - 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	%	33,33	50,00	66,67	360.524.297	83,33	370.524.297	100	380.024.297	100	391.424.297	100	407.000.000	100	1.909.497.188	
209 - 05	PROGRAM PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	%	80,00	80,00	82,50	510.000.000	85	515.300.000	87,5	522.000.000	90	528.000.000	95	550.000.000	95	2.625.300.000	
	<b>SASARAN: Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Angka Kemiskinan	%	8,47	9	8,12		7,79		7,47		7,16		6,87		6,87		
		Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,87		93,11		93,22		93,34		93,47		93,47		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkat	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	65		66		67		68		69		69		
106 - 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	24,86	27,00	34,00	572,000,000	36,75	667,500,000	39,49	762,000,000	43,14	915,000,000	46,80	1,048,500,000	46,80	3,965,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
106 - 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	%	6,74	6,8	12,84	3,136,610,000	15,40	3,546,200,050	17,28	4,090,100,000	20,70	4,650,250,000	23,29	5,214,950,000	89,51	20,638,110,050	
106 - 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	60,12	60,50	61,01	2.463.206.631	61,92	2.688.000.000	62,83	3.018.000.000	63,73	3.413.000.000	64,64	3.839.000.000	64,64	15.421.206.631	
106 - 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	387,028,800	100	419,750,000	100	468,750,000	100	515,250,000	100	580,250,000	100	2,371,028,800	
208 - 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	%	56,00	56,00	55,90	481,639,523	60,00	665,000,000	65,00	705,000,000	70,00	705,000,000	70,00	705,000,000	70,00	3,261,639,523	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	163,000,000	100	227,000,000	100	229,000,000	100	232,000,000	100	235,000,000	100	1,086,000,000	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
208 - 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga	%	31,73	35,00	39,47	207,658,178	47,21	305,000,000	54,95	355,000,000	62,69	355,000,000	70,43	355,000,000	70,43	1,577,658,178	
208 - 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	100	100	100	178,043,634	100	265,000,000	100	265,000,000	100	290,000,000	100	290,000,000	100	1,288,043,634	
208 - 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	20,00	20,00	20,00	806,915,677	30,00	899,949,354	40,00	949,949,354	50,00	999,949,354	60,00	1,049,949,354	60,00	4,706,713,093	
208 - 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	69,396,838	100	248,000,000	100	258,000,000	100	270,000,000	100	281,000,000	100	1,126,396,838	
219 - 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	5,00	10,00	13,00	719,153,697	13,00	719,153,697	13,00	719,153,697	13,00	719,153,697	13,00	719,153,697	65,00	3,595,768,485	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
219 - 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	Jumlah Medali	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	2,652,832,450	15 (Emas: 6, Perak: 7, Perunggu: 2)	2,652,832,450	18 (Emas: 7, Perak: 8, Perunggu: 3)	2,652,832,450	21 (Emas: 8, Perak: 9, Perunggu: 4)	2,652,832,450	24 (Emas: 9, Perak: 10, Perunggu: 5)	2,652,832,450	114 (Emas: 45, Perak: 52, Perunggu: 17)	13,264,162,250	
219 - 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	%	1,00	2,00	3,00	75,612,500	3,00	75,612,500	3,00	75,612,500	3,00	75,612,500	3,00	75,612,500	15,00	378,062,500	
<b>MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>																		
	<b>TUJUAN:</b> Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37		57,52		57,68		57,84		57,99		57,99		
	<b>SASARAN:</b> Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen	57,05	57,21	57,37		57,52		57,68		57,84		57,99		57,99		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkat	(JKLH)																
211 - 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	%	100	100	100	900,000,000	100	900,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	300,000,000	100	2,900,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
211 - 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	%	0	0	9,69	1,461,423,512	19,39	1,661,565,863	29,08	1,876,522,450	38,77	1,907,974,695	42,47	1,979,672,165	42,47	8,887,158,685	
211 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH publik	%	2.48	4.18	5.88	257,050,000,000	7.58	257,550,000,000	9.28	256,150,000,000	10.98	255,400,000,000	12.05	255,850,000,000	12,05	1,282,000,000,000	
211 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	%	100	100	100	450,000,000	100	480,000,000	100	490,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,420,000,000	
211 - 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Persetujuan Lingkungan	%	52.00	100	100	153,671,000	100	169,038,210	100	185,942,000	100	204,536,000	100	224,989,800	100	938,177,010	
211 - 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	%	40.00	45.00	50.00	172,500,000	53.00	198,375,000	56.00	230,000,000	57.00	250,000,000	60.00	300,000,000	60.00	1,150,875,000	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100	100	100	1,126,422,849	100	1,156,422,849	100	1,161,422,849	100	1,166,422,849	100	1,206,422,849	100	5,817,114,245	
211 - 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	1,126,422,849	100	1,156,422,849	100	1,161,422,849	100	1,166,422,849	100	1,206,422,849	100	5,817,114,245	
211 - 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	%	86,67	88,00	88,00	27.217.962.654	85,00	28,841,261,242	80,00	27,136,256,414	75,00	28,160,156,372	70,00	26,627,668,330	70,00	137.983.305.012	
		Persentase pengurangan sampah	%	5,32	7,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
103 - 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	%	57,50	59,00	60,50	2.449.000.000	62,00	2.012.000.000	63,50	1.270.000.000	65,00	777.000.000	66,50	680.000.000	66,50	7.188.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	<b>TUJUAN:</b> Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	<b>INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>	<b>%</b>	<b>59,24</b>	<b>60,24</b>	<b>61,24</b>		<b>62,24</b>		<b>63,24</b>		<b>64,24</b>		<b>65,24</b>		<b>65,24</b>		
	<b>SASARAN:</b> Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat	<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>%</b>	<b>59,24</b>	<b>60,24</b>	<b>61,24</b>		<b>62,24</b>		<b>63,24</b>		<b>64,24</b>		<b>65,24</b>		<b>65,24</b>		
103 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	%	71,97	73,29	74,40	8,531,890,789	75,91	9,385,079,868	77,46	10,323,587,855	78,76	11,355,946,640	80,23	12,491,541,304	80,23	52,088,046,455	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar	%	80	80,15	80,24	7.990.000.000	80,33	8.789.000.000	80,38	9.667.900.000	80,47	10.634.690.000	80,53	11.698.159.000	80,53	48.779.749.000	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
103 - 03	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum	%	72,00	71,83	72,40	5,400,000,000	72,71	5,167,500,000	72,99	5,656,750,000	73,23	6,222,425,000	73,42	6,844,667,500	73,42	29,291,342,500	Umum Dan Penataan Ruang
103 - 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan air limbah domestik.	%	99,57	99,75	100	62,557,700,000	100	161,813,200,000	100	111,337,114,000	100	33,453,894,000	100	148,953,620,200	100	518,115,528,200	
103 - 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas areal genangan	m2	30.315	28.512	26.730	5,940,488,613	24.948	6,638,992,457	23.166	7,420,403,559	21.384	8,294,644,753	19.602	9,272,835,171	19.602	37,567,364,553	
103 - 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Publik yang Memenuhi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	%	0,92	1,07	1,25	51,930,000,000	1,51	212,850,000,000	1,88	3,300,000,000	2,26	3,920,000,000	2,63	6,970,000,000	2,63	278,970,000,000	
103 - 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata	%	n/a	25,00	42	6,700,000,000	50,00	7,170,000,000	67,00	7,370,000,000	75,00	7,750,000,000	83,00	7,750,000,000	83,00	36,740,000,000	
103 - 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	%	71,94	71,94	72,19	46.209.390.002	72,44	49,253,172,319	72,69	52,629,501,531	72,94	56,493,266,060	73,19	60,808,169,918	73,19	265,393,499,830	
103 - 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tenaga terampil bersertifikat	%	n/a	32,00	33,00	250,000,000	34,00	260,000,000	35,00	290,000,000	37,00	310,000,000	38,00	340,000,000	38,00	1,450,000,000	
104 - 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio kepemilikan rumah	Nilai	0,76	0,80	0,84	2.250.000.000	0,88	1.250.000.000	0,92	1.800.000.000	0,96	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	7.500.000.000	OPD yang menangani Urusan
104 - 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan luasan kumuh	%	85,98	88,32	90,65	12,536,650,000	92,99	12,536,650,000	95,33	12,536,650,000	97,66	12,536,650,000	100	12,536,650,000	100	62,683,250,000	Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
104 - 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,48	98,73	98,99	21,625,000,000	99,24	21,625,000,000	99,49	21,625,000,000	99,75	20,800,000,000	100	20,800,000,000	100	106,475,000,000	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
104 - 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	%	30,15	41,85	53,54	3,300,000,000	65,23	2,400,000,000	76,92	2,400,000,000	88,62	3,000,000,000	100	2,400,000,000	100	13,500,000,000	
210 - 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tingkat tertib administrasi pertanahan	%	84,52%	86,52%	88,53%	900,000,000	90,54	900,000,000	92,55	900,000,000	94,55	900,000,000	96,56	900,000,000	96,56	4,500,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
215- 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Kota	Nilai	0,08	0,08	0,15	43,240,054,868	0,15	53,637,554,868	0,23	57,375,054,868	0,31	57,553,179,868	0,38	57,892,554,868	0,38	269,698,399,340	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Rasio Waktu Tempuh	Nilai	1,75	1,75	1,75		1,6		1,5		1,5		1,3		1,3		
		Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	Nilai	2	2	2		1,7		1,5		1,5		1		1		
<b>MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING</b>																		
	TUJUAN: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Pengembangan Industri Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-5.5	-0.95	0,96		1,87		2,78		4,60		6,42		6,42		
		Gini Ratio	nilai	0.381	0,374	0,365		0,353		0,344		0,340		0,337		0,337		
		Inflasi	persen	0.58	3 ± 1	3 ± 1		3 ± 1		3 ± 1		3 ± 1		3 ± 1		3 ± 1		
	SASARAN: 1). Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4.85	-0.60	1,55		2,45		3,35		4,95		6,55		6,55		
330 - 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	%	n/a	25	40	330.000.000	50	363.000,000	60	399.300,000	80	439.230,000	100	483.153,000	100	2.014.683.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	%	5.5	10	30	25,506,887,853	50	16,046,887,853	75	21,640,887,853	80	37,294,287,853	100	33,013,027,853	100	133,501,979,265	
330 - 04	PROGRAM STABILISASI HARGA	Persentase Rata Rata Peningkatan Harga	%	2.56	2.5	2.3	635.656.000	2.00	672.656.000	1.7	770,156,000	1.5	917,156,000	1.25	758,156,000	1.25	3.753.780.000	



KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Barang pokok dan Barang Penting																	
330 - 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	%	100	100	100	260,000,000	100	260,000,000	100	260,000,000	100	260,000,000	100	260,000,000	100	1,300,000,000		
330 - 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur	%	69.00	71.00	74.00	561.700.000	77.00	607.000.000	80.00	655.000.000	83.00	725.000.000	85.00	735.000.000	95.00	3.283.700.000		
330 - 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	%	n/a	n/a	20.00	650,000,000	40.00	650,000,000	60.00	650,000,000	80.00	650,000,000	100.00	650,000,000	100,00	3,250,000,000		
331 - 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	%	4.30	4.65	5.00	566,570,228	5.35	619,927,250	5.70	619,927,250	6.05	649,927,250	6.40	649,927,250	6.40	3,106,279,228	OPD yang menangani Urusan Pilihan Perindustrian	
218 - 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	%	70.00	75.00	77.00	72,000,000	82.00	81,000,000	86.00	92,000,000	88.00	105,000,000	90.00	120,000,000	90.00	470,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
218 - 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	%	41.00	41.00	43	200,000,000	47.00	214,000,000	50.00	228,980,000	55.00	245,008,600	60.00	262,150,000	60.00	1,150,138,600		
218 - 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	%	84,71	85,13	85,81	1.281.843.395	86,50	1.402.757.235	87,19	1.535.247.008	87,89	1.680.447.909	88,59	1.839.582.280	88,59	7.739.877.827		
218 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan	%	8.00	10.00	20.00	211,500,000	30.00	226,305,000	40.00	242,150,000	50.00	259,100,500	60.00	277,225,000	60.00	1,216,280,500		
218 - 06	PROGRAM	Tingkat validitas data	%	93.00	95.00	96.00	211,500,000	97.00	226,305,000	98.00	242,150,000	99.00	259,100,500	100	277,225,000	100	1,216,280,500		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	dan informasi penanaman modal																	
	<b>SASARAN: 2). Kinerja Sektor Ekonomi Kreatif Meningkat</b>	Laju pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	persen	9.85	9.90	9.95		10,00		10,05		10,10		10,15		10,15			
326 - 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	2	1,5	3	58,300,000,000	3	27,550,000,000	3	32,800,000,000	3	38,150,000,000	3	38,550,000,000	3	195,350,000,000		OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
326 - 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	%	-72.66	-27.30	0.67	1,850,000,000	1.34	2,760,000,000	2.01	4,775,000,000	2.68	5,295,000,000	3.35	6,300,000,000	3.35	20,980,000,000		
326 - 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	%	10.75	11.25	15.6	1,650,000,000	20	1,850,000,000	25.5	1,900,000,000	30.75	2,000,000,000	45.5	2,150,000,000	45.5	9,550,000,000		
326 - 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	%	-67.25	-32.5	0.75	1,650,000,000	1.5	1,850,000,000	2.35	1,900,000,000	3.10	2,000,000,000	3.85	2,150,000,000	3.85	9,550,000,000		
217 - 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Cukup Sehat	%	n/a	56.00	65.00	75,000,000	75.00	84,000,000	85.00	94,080,000	90.00	105,369,600	94.00	118,013,952	94.00	476,463,552		
217 - 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	%	10	15.00	20.00	494,569,429	30.00	553,917,760	35.00	620,387,891	40.00	694,834,438	45.00	778,214,571	45.00	3,141,924,089		
217 - 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Persentase Usaha mikro yang naik kelas	%	n/a	n/a	5.00	315,000,000	10.00	364,500,000	15.00	405,950,000	20.00	439,545,000	25.00	475,999,500	25.00	2,000,994,500		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	USAHA MIKRO (UMKM)																	
217 - 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	%	n/a	n/a	2.40	425,000,000	4.80	425,000,000	9.60	425,000,000	12.00	425,000,000	14.00	425,000,000	14.00	2,125,000,000	
207 - 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Satu Data Ketenagakerjaan	%	48,06	48,12	48,18	75,000,000	48,24	85,000,000	48,30	100,000,000	48,36	115,000,000	48,42	130,000,000	48,42	505,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
207 - 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi	%	6,85	7,50	8,30	506,000,000	9,10	556,000,000	10,00	611,000,000	11,00	672,000,000	12,10	739,000,000	12,10	3,084,000,000	
207 - 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang dilatih	%	n/a	n/a	5,00	150,000,000	10,00	200,000,000	15,00	250,000,000	20,00	300,000,000	25,00	350,000,000	25,00	1,250,000,000	
207 - 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan	%	80,00	85,00	90,00	300,000,000	95,00	350,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	2,000,000,000	
327 - 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	%	100	100	100	1.380.000.000	100	1.435.000.000	100	1.500.000.000	100	1.580.000.000	100	1.580.000.000	100	7.475.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
327 - 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	%	80,00	85,00	90,00	1.185.000.000	100	1.555.000.000	100	1.575.000.000	100	1.905.000.000	100	1.905.000.000	100	8.125.000.000	
327 - 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	%	2,02	2,57	3,12	160.000.000	3,67	165.000.000	4,22	185.000.000	4,71	215.000.000	5	215.000.000	5	940.000.000	
327 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman	Rp.	82.324.285.714	84.094.257.857	85.902.284.401	70.000.000	87.749.183.516	70.000.000	89.635.790.961	80.000.000	91.562.960.467	85.000.000	93.531.564.117	85.000.000	93.531.564.117	390.000.000	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Perkebunan		3,7	3,9	4,2	1.075.000.000	4,5	375.000.000	4,8	405.000.000	5,1	1.310.000.000	5,4	410.000.000	5,4	3.575.000.000	
327 - 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Mandiri	%	3,7	3,9	4,2	1.075.000.000	4,5	375.000.000	4,8	405.000.000	5,1	1.310.000.000	5,4	410.000.000	5,4	3.575.000.000	
325 - 03	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	%	15	17,5	25	1.670.000.000	35	2.100.000.000	45	1.652.000.000	55	1.797.200.000	55	1.956.920.000	55	9.176.120.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
325 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	12,5	13,00	13,5	1.110.000.000	14,00	1.110.000.000	14,5	1.110.000.000	15,00	1.110.000.000	20,00	1.110.000.000	20	5.550.000.000	
325 - 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	%	18	18,5	19,00	1.409.906.432	19,5	1.479.149.675	20,00	1.552.229.873	23,00	1.629.376.351	25,00	1.710.833.653	25	7.781.495.984	
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH</b>																		
	<b>TUJUAN: Mengendalikan Kondusifitas Wilayah</b>	<b>INDEKS KEAMANAN MANUSIA</b>	Nilai	3,7	3,70	3,70		3,90		4,10		4,30		4,50		4,50		
	<b>SASARAN: Stabilitas Wilayah Terkendali</b>	<b>Indeks Keamanan Manusia</b>	Nilai	3,7	3,70	3,70		3,90		4,10		4,30		4,50		4,50		
105 - 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani	%	70,00	75,00	80,00	3.630.000.000	85,00	2.820.000.000	90,00	3.430.000.000	95,00	2.600.000.000	100	3.520.000.000	100	16.000.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
105 - 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	0	3	7	4.831.800.000	10	4.464.300.000	10	4.514.050.000	10	4.516.275.000	10	3.936.222.500	50	22.262.647.500	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																			Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
105 - 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time Kebakaran	Menit	19	17	16	2,370,000,000	15	1,930,000,000	14	2,085,000,000	13	2,615,000,000	12	3,060,000,000	12	12,060,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	
801 - 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah	%	n/a	100	100	204.900.000	100	210.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	2.514.900.000	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
801 - 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	%	100	100	100	186,000,000	100	186,000,000	100	304,000,000	100	157,750,000	100	157,750,000	100	991,500,000		
		Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.	%	n/a	n/a	80.00	70,000,000	83.00	210,000,000	86.00	350,000,000	89.00	105,000,000	92.00	105,000,000	92.00	840,000,000		
801 - 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Ormas yang aktif dan taat	%	n/a	n/a	32.47	165,000,000	43.29	238,200,000	54.11	270,000,000	64.94	270,000,000	77.92	270,000,000	77.92	1,213,200,000		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	pada peraturan perundang-undangan																
801 - 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	%	100	100	100	553,449,450	100	553,449,450	100	558,449,450	100	558,449,450	100	558,449,450	100	2,782,247,250	
801 - 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	2,346,200,000	100	2,430,160,000	100	2,509,535,000	100	2,578,911,750	100	2,589,760,000	100	12,454,566,750	
<b>MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>																		
	<b>TUJUAN:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Inovatif	<b>SKOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	Nilai	64	64,5	65		66		67		68		71		71		
	<b>SASARAN:</b> Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66	67		68		69		70		71		71		
		Indeks SPBE	Nilai	2,51	3,00	3,2		3,4		3,5		3,6		3,7		3,7		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	B	B	B		B		B		B		B		B		
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
501 - 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	87	90	100	3.518.353.333	100	4.009.928.129	100	4.143.188.830	100	3.939.518.553	100	4.119.151.485	100	19.730.140.330	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
		Persentase Ketepatan waktu perencanaan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Unsur Perencanaan
		Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah	%	77	80	80		85		90		95		100		100		
501 - 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)	%	N/A	100	100	7.743.094.502	100	8.328.999.227	100	8.704.199.188	100	9.098.159.148	100	9.511.817.105	100	43.386.269.171	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
		Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Urusan Pemerintahan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	86	90	100		100		100		100		100		100		
505 - 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan	%	93,00	93,00	100	1.888.400,000	100	1.888,400,000	100	1.893,400,000	100	1.893,400,000	100	1.893,400,000	100	9,457,000,000	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan
601 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik	%	74,36	74,50	75,00	1.383.418.577	76,00	1.452.589.506	77,00	1.525.218.981	78,00	1.601.479.930	81,00	1.681.553.927	81,00	7.644.260.921	OPD yang menangani Unsur



KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan	%	76,00	78,60	79,00	2.404.000.000	80,00	2.645.000.000	81,00	2.909.000.000	82,00	3.200.000.000	83,00	3.519.000.000	83,00	14.677.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan	%	91,00	92,00	93,00	345.000.000	93,50	380.000.000	94,00	418.000.000	94,50	460.000.000	95,00	506.000.000	95,00	2.109.000.000	
601 - 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit Pemenuhan)	%	50,00	60,00	70,00	452.477.170	80,00	475.101.029	90,00	498.856.080	100	523.798.884	100	549.988.828	100	2.500.221.991	OPD yang menangani Unsur
		Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment	%	100	100	100	51.000.000	100	56.000.000	100	62.000.000	100	68.000.000	100	75.000.000	100	312.000.000	
		Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	%	3	n/a (tidak dilakukan penilaian karena ada perubahan metode penilaian)	25,64	58.000.000	38,46	64.000.000	51,28	70.000.000	76,92	77.000.000	92,31	85.000.000	92,31	354.000.000	
		Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK	%	100	100	100	71.000.000	100	79.000.000	100	87.000.000	100	95.000.000	100	105.000.000	100	437.000.000	
		Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator stranas-PK	%	33	33	67	45.000.000	67	50.000.000	67	55.000.000	100	60.000.000	100	67.000.000	100	277.000.000	
401 - 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Nilai LPPD	nilai	3.3	3.3	3.4	1,186,062,317	3.6	1,277,668,548	3.8	1,386,435,403	4.00	1,483,078,943	4.2	1,588,386,838	4.2	6,921,632,049	OPD yang menangani Unsur
		Persentase rata-rata	%	n/a	65,00	60,00		70,00		80,00		90,00	100		100			

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	RAKYAT	Capaian SPM																	
401 - 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat	%	100	100	100	680,380,627	100	748,418,688	100	823,260,558	100	905,586,613	100	996,145,275	100	4,153,791,761	Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	
		Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	%	57	86	100	1,543,724,421	100	1,698,096,863	100	1,867,906,549	100	2,054,697,203	100	2,260,166,923	100	9,424,591,959		
		Level kematangan UKPBJ	kategori	Level 3	Level 3	Level 3	2,152,043,421	level 4	2,367,247,762	Level 4	2,603,972,538	Level 5	2,864,369,792	Level 5	3,150,806,771	9 Variabel Mencapai Level 5	13,138,440,284		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%	%	100	100	100	1,037,081,109	100	1,140,789,219	100	1,254,868,140	100	1,380,354,954	100	1,518,390,449	100	6,331,483,871		
224 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompotensi	%	42	43	44	1,033,196,000	45	4,040,180,900	46	1,162,238,990	47	1,294,247,889	48	1,437,202,678	48	8,967,066,457	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
224 - 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	%	75.66	78.62	80.59	86,300,000	82.57	94,930,000	84.54	104,423,000	86.51	114,865,300	88.48	126,351,830	88.48	526,870,130		
503 - 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kualifikasi ASN	nilai	12,04	12,7	13,03	1.474.391.973	13,36	1.524.644.786	13,69	1.523.331.720	14,04	1.528.331.720	14,39	1.528.331.720	14,39	7.579.031.919	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian	
		Nilai Kompetensi ASN	nilai	7,12	7,12	7,73	2.701.398.429	8,05	3.459.291.429	8,38	3.387.173.295	8,71	3.382.173.295	9,07	3.382.173.295	9,07	16.312.209.743		
		Nilai Kinerja ASN	nilai	24,47	24,47	25,71	350.415.592	26,35	250.415.592	27,01	329.670.641	27,68	250.415.592	28,39	250.415.592	28,39	1.431.333.009		
		Nilai Disiplin ASN	nilai	5	5	5	493.356.360	5	524.328.380	5	524.328.380	5	524.328.380	5	524.328.380	5	2.590.669.880		
		persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat	%	90.00	95.00	100	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.750.000.000		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		waktu																
220 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral terpenuhi	%	100	100	100	1,000,000,000	100	1,250,000,000	100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	2,000,000,000	100	7,500,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
221 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	Sistem Elektronik	NA	0	2	2,850,000,000	4	3,160,000,000	6	3,550,000,000	8	3,800,000,000	10	4,150,000,000	10	17,510,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
502 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase kesesuaian APBD dengan RKP	%	100	100	100	2,155,528,646	100	3,623,020,049	100	3,985,322,500	100	4,383,854,750	100	4,822,240,500	100	18,969,966,445	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
		Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	386,695,520	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	850,795,520	
		persentase penyerapan APBD	%	99.53	99.53	94.68	386,695,520	94.81	386,695,520	94.94	425,365,000	95.07	467,901,500	95.20	514,691,500	95.20	2,181,349,040	
		Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	%	100	100	100	1,080,795,883	100	1,080,795,883	100	1,188,875,000	100	1,307,762,500	100	1,438,538,500	100	6,096,767,766	
502 - 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	nilai solvabilitas jangka panjang	nilai	5.476.662	5.476.662	6.351.731	2,486,479,706	6.020.883	3,137,610,876	6.494.280	3,451,371,500	6.831.079	3,796,508,650	7.129.765	4,176,159,000	7.129.765	17,048,129,732	
502 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	%	26,01	26,01	26,00	9,561,674,388	26,00	9,561,674,388	26,00	10,517,842,000	26,00	11,569,626,200	26,00	12,726,589,000	26,00	53,937,405,976	
216 - 03	PROGRAM INFORMASI DAN	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	94	95	96	5.300.000.000	97	5.830.000.000	98	6.413.000.000	99	7.054.300.000	100	7.759.730.000	100	32.357.030.000	OPD yang menangani

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	KOMUNIKASI PUBLIK																		
216 - 04	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1 Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Nilai	n/a	3,9	3,91	5.815.000.000	3,92	6.396.500.000	3,93	7.036.150.000	3,94	7.739.765.000	3,95	8.521.312.000	3,95	35.508.727.000		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		2.2 Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,55		-	
		2.3 Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	n/a	3,5	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,55			
		2.4 Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,55			
		2.5 Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	Nilai	n/a	3	3,01		3,02		3,03		3,04		3,05		3,05			
		2.6 Nilai Aspek Audit TIK	Nilai	n/a	3	3,01		3,02		3,03		3,04		3,05		3,05			
		2.7 Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	3,2	3,21		3,22		3,23		3,24		3,25		3,25			
		2.8 Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	4,33	4,34		4,35		4,36		4,37		4,38		4,38			
	<b>SASARAN: Kualitas Kinerja Pelayanan Publik meningkat</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan</b>	<b>Nilai</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>70</b>		<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>		<b>90</b>		<b>90</b>			
		<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>1.944</b>	<b>60</b>	<b>65</b>		<b>70</b>		<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>		<b>85</b>			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	%	25.00	25.00	100	1.037.081.109	100	1.140.789.219	100	1.254.868.140	100	1.380.354.954	100	1.518.390.449	100	6.331.483.871		OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
402 - 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase program kerja DPRD terfasilitasi	%	100	100	100	30,672,500,000	100	32,206,125,000	100	35,261,431,250	100	35,507,252,813	100	37,282,615,453	100	170,929,924,516	OPD yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Dewan
505 - 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	jumlah inovasi daerah yang berkualitas	unit	N/A	27	25	370.000.000	25	370.000.000	25	390.000.000	25	400.000.000	25	400.000.000	125	1.930.000.000	OPD yang menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan
212 - 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP	persen	84	85	86	670,000,000	87	735,000,000	89	780,000,000	91	840,000,000	93	950,000,000	93	3,975,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak memiliki KIA	persen	84	85	86		87		90		92		95		95		
		Persentase keluarga memiliki KK	persen	84	85	86		87		90		92		95		95		
212 - 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan	persen	83	84	86	510,000,000	88	550,000,000	90	575,000,000	95	650,000,000	98	720,000,000	98	3,005,000,000	
212 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan	Nilai	79.30	80.50	82	85,000,000	84	90,000,000	85	95,000,000	86	98,000,000	87	100,000,000	87	468,000,000	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	45	45	75	838.593.737	76	908.947.424	77,5	983.871.195	78,5	1.065.521.795	80	1.153.009.228	80	4.949.943.379	OPD yang menangani Urusan Penunjang Kewilayahan
		IKM Kecamatan	Nilai	78	78	80	510.099.249	82	542.958.161	85	581.557.295	87	639.567.007	90	672.255.139	90	2.946.436.851	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		IKM Kelurahan	Nilai	n/a	n/a	70	541.507.689	75	496.958.073	78	523.326.127	80	582.700.476	82	613.178.453	82	2.757.670.818	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	45	45	75	162.113.737	76	170.219.424	77,5	178.730.395	78,5	187.666.915	80	197.050.260	80	895.780.731,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan – Kecamatan Ampenan
		IKM Kecamatan	Nilai	0	NA	66,02	24.508.249	67,02	25.733.661	68,02	27.020.345	69,02	28.371.362	70,02	29.789.930	70,02	135.423.547,00	
		IKM Kelurahan	Nilai	NA	NA	66,02	25.007.689	67,02	26.258.073	68,02	27.570.977	69,02	28.949.526	70,02	30.397.002	70,02	138.183.267,00	
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan berpredikat swasembada	%	0	20	30	10.536.053.416	40	10.648.689.879	50	10.762.816.504	60	10.878.466.381	70	10.995.673.843	70	53.821.700.022	
		persentase Kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	40	50	18.748.480	60	18.935.965	80	19.125.324	90	19.316.577	100	19.509.743	100	95.636.089	
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	NA	NA	100	157.509.219	100	165.384.680	100	173.653.914	100	182.336.610	100	191.453.440	85,00	870.337.863	
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	NA	NA	100	185.885.895	100	195.180.190	100	204.939.200	100	215.186.160	100	225.945.468	85,00	1.027.136.913	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	57,00	75,00	116.200.000	76,00	173.177.574	76,00	100.320.000	78,50	190.495.331	80,00	209.544.864	100	789.737.769	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan – Kecamatan Mataram
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	67	80	90.245.000	82	99.269.500	85	109.196.450	87	120.116.095	90	132.127.705	90	550.954.749,50	
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	NA	NA	65	85.500.000	70	94.050.000	75	103.455.000	80	113.800.500	85	125.180.550	85	521.986.050	
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan berpredikat swasembada	%	0	NA	11,11	9.732.888.359	11,11	10.706.117.195	22,22	11.776.794.914	22,22	12.954.474.406	33,33	14.249.921.847	33,33	59.420.256.721	
		persentase Kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	NA	11,11	284.500.000	22,22	312.950.000	33,33	344.245.000	44,44	378.669.500	55,56	416.536.450	55,56	1.736.900.950	
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI	persentase penyelesaian	%	NA	100	100	96.000.000	100	96.000.000	100	105.600.000	100	116.160.000	100	127.776.000	80,00	541.536.000	

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	permasalahan tantribulinmas di kecamatan																	
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	NA	100	100	155.500.000	100	105.600.000	100	116.160.000	100	127.776.000	100	140.553.600	100	645.589.600		
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan IKM Kecamatan	nilai	0	N/A	62,50	140.000.000	66,00	148.600.000	70	156.000.000	73,50	163.800.000	77,50	170.500.000	77,50	778.900.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Wilayah – Kecamatan Sandubaya	
		IKM Kecamatan	nilai	NA	78	80	201.296.000	82	205.100.000	85	210.450.000	87	216.000.000	90	222.000.000	90	1.054.846.000,00		
		IKM Kelurahan	nilai	NA	0	70	175.000.000	75	108.500.000	78	112.000.000	80	115.500.000	82	119.000.000	82	630.000.000,00		
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	14,29	14,29	8.406.122.000	28,57	8.556.178.000	42,86	8.728.905.000	57,14	8.883.712.000	71,43	9.041.935.000	71,43	43.616.852.000		
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	14,29	14,29	1.292.620.000	28,57	1.302.420.000	28,57	1.332.684.000	42,86	1.341.166.000	42,86	1.351.248.000	42,86	6.620.138.000,00		
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tratribulinmas di kecamatan	%	100	100	100	38.500.000	100	40.750.000	100	42.500.000	100	45.600.000	100	47.800.000	100	215.150.000,00		
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	100	282.632.000	100	288.500.000	100	294.960.000	100	299.850.000	100	304.500.000	100	1.470.442.000,00		
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan IKM Kecamatan	nilai	N/A	45,00	72,5	183.354.212	74,5	190.605.778	77,5	198.336.211	79,5	206.580.777	81	215.277.379	81	994.254.357	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Wilayah – Kecamatan Cakranegara	
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	N/A	78	83	75.000.000	85	80.625.000	86,5	86.250.000	88	91.875.000	90	97.500.000	90	431.250.000		
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	N/A	N/A	70	150.000.000	71	161.250.000	76	173.343.750	81	186.344.531	88	200.320.371	88	871.258.652		
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan	%	N/A	10	20	10.562.700.032	30	11.249.912.909	40	11.987.616.856	50	12.779.588.204	60	13.629.886.404	60	60.209.704.406		



KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
						CAPAIAN	CAPAIAN	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	berpredikat swasembada																	
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	40	50	74.758.929	60	74.833.688	70	74.908.522	80%	74.983.430	90	75.058.414	90	374.542.983,00		
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	100	100	100	144.101.100	100	154.908.683	100	166.526.834	100	179.016.346	100	192.442.572	100	836.995.535		
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	100	162.000.000	100	174.150.000	100	187.211.250	100	201.252.094	100	216.346.001	100	940.959.345		
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	NA	60,00	147.000.000	80,00	154.300.000	82,50	162.067.500	85,00	170.170.875	87,50	178.679.419	87,50	812.267.794	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Wilayah – Kecamatan Selaparang	
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	NA	66,02	151.000.000	67,02	158.550.000	68,02	166.477.500	69,02	174.801.375	70,02	183.541.444	70,02	834.370.319		
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	NA	NA	75	53.000.000	80	55.650.000	85	58.432.500	89	61.354.125	91	64.421.831	91	292.858.456		
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	NA	11,11	7.858.596.826	11,11	8.251.526.667	22,22	8.664.103.001	22,22	9.097.308.151	33,33	9.552.173.558	33,33	12.210.123.475		
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	NA	11,11		22,22		33,33		44,44		55,56		55,56			
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	100	100	100,00	230.000.000	90,00	230.000.000	95,00	230.000.000	95,00	230.000.000	100	230.000.000	100	1.150.000.000		
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	90,00	178.000.000	95,00	199.500.000	100	222.000.000	100	260.000.000	100	305.000.000	100	1.164.500.000		

KODE	MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / IMPACT / OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 0 (2020)	TAHUN TRANSISI (PROYEKSI 2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				CAPAIAN	CAPAIAN	2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	UMUM																	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	75,00	76,00	237.500.000	77,50	240.000.000	78,50	245.000.000	80	245.000.000	82,50	245.000.000	82,50	2.543.000.000	OPD yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan – Kecamatan Sekarbela
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	NA	82	58.000.000	85	70.000.000	87	80.000.000	90	80.000.000	95	80.000.000	95	368.000.000	
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	NA	NA	70	95.000.000	75	97.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	90	492.000.000	
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan berpredikat swasembada	%	0	NA	20	5.909.699.719	20	6.019.599.623	40	6.036.284.423	40	6.157.224.275	60	6.157.224.275	60	30.280.032.315	
		persentase Kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	NA	20		40		60		60		80		80		
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	100	100	100	133.922.703	100	133.922.703	100	147.314.973	100	147.314.973	100	147.314.973	100	709.790.325	
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	100	261.090.835	100	296.317.680	100	325.949.448	100	354.365.419	100	385.414.038	100	1.623.137.419	

# **Bab 7**

## **KERANGKA**

# **PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Harmonisasi dan sinergi antara prioritas pembangunan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Mataram Tahun 2021-2026 dilakukan menyesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Uraian tentang hubungan antara urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjawab kinerja pembangunan yang ditargetkan menjadi jabaran pada bagian ini. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Setelah program prioritas diketahui, kemudian ditentukan alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan perkiraan harga oleh Perangkat Daerah.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Mataram berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang nomenklaturnya sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah yang pembahasannya akan dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, memperhatikan hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD dan saran-saran dari pemangku kepentingan pembangunan di Kota Mataram pada setiap tahapan penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026.

Tabel. 7.1  
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Mataram Tahun 2021-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.233.930.637.851		1.210.805.184.077		1.172.843.554.376		1.179.022.658.262		1.358.948.437.517		6.155.550.472.082	
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						392.307.447.745		413.400.826.996		437.172.077.717		462.356.115.398		489.012.196.639		2.194.248.664.495	
101.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keuasan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram	%	N/A	N/A	70	281.885.436.831	75	297.389.135.857	80	313.745.538.329	85	331.001.542.937	90	349.206.627.798	90	1.573.228.281.752	
101 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan	%	85,94	85,94	86,00	107.879.809.384	86,25	113.215.269.457	86,45	120.350.475.538	86,66	127.970.902.227	86,75	136.083.531.584	86,75	605.499.988.190	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
101 - 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	%	100	100	100	419.993.820	100	461.993.202	100	508.192.522	100	559.011.774	100	614.912.951	100	2.564.104.269	
101 - 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	%	64,35	64,35	65,40	1.914.500.000	67,26	2.105.950.000	69,13	2.316.545.000	71,00	2.548.199.500	72,87	2.803.019.450	72,87	11.688.213.950	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
101 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	%	100	100	100	207.707.710	100	228.478.480	100	251.326.328	100	276.458.960	100	304.104.856	100	1.268.076.334	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						374.291.402.007		397.951.887.745		424.216.085.882		466.848.995.304		497.409.811.453		2.160.718.182.391	
102-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keuasan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Mataram	%	N/A	N/A	70,00	47.164.740.096	75	49.758.800.801	80	52.495.534.845	85	55.382.789.262	90	58.428.842.671	90	263.230.707.675	
		Indeks Keuasan Pelayanan RSUD Kota Mataram	%	70	70	70	215.931.377.811	75	237.907.603.591	80	259.992.521.788	85	282.192.110.486	90	304.512.676.563	90	1.300.536.290.239	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102 - 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	46,46	60	65	53.580.806.000	70	53.937.446.000	75	50.636.870.000	80	62.881.236.400	85	63.727.539.440	85	284.763.897.840	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	%	63	63	72	1.140.000.000	81	1.254.000.000	90	1.379.400.000	100	1.517.340.000	100	1.669.074.000	100	6.959.814.000	
		Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	%	62,5	70	75	68.706.536.800	85	79.012.517.320	95	90.864.394.918	100	104.494.054.156	100	120.168.162.279	100	463.245.665.473	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sub Bidang Kesehatan Rujukan
		IKM Puskesmas	nilai	81	83	85	17.598.000.000	86	17.807.800.000	87	18.038.580.000	88	18.292.438.000	90	18.571.681.800	90	90.308.499.800	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
102 - 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	%	100	80,00	81,01	430.000.000	88,07	473.000.000	91,14	520.300.000	92,40	573.330.000	92,40	629.563.000	92,40	2.626.193.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	%	20,00	22,36	34,78	305.500.000	48,44	336.050.000	64,59	397.150.000	81,98	427.700.000	100	442.975.000	100	1.909.375.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Sub Bidang Kesehatan Rujukan
102 - 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin	%	100	100	100	3.147.441.300	100	6.048.970.033	100	8.334.064.331	100	9.375.000.000	100	7.375.000.000	100	34.280.475.664	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
102 - 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian rumah tangga sehat	%	30	33	35	1.287.000.000	40	1.415.700.000	45	1.557.270.000	50	1.712.997.000	55	1.884.296.700	55	7.857.263.700	
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						215.255.124.705		476.198.564.438		222.710.668.520		159.378.673.989		280.042.550.931		1.353.585.582.582	
103 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PUPR	Nilai	100	100	100	17.296.655.301	100	12.859.619.794	100	13.445.411.575	100	20.166.807.536	100	14.233.557.838	100	78.002.052.044	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
103 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	%	71,97	73,29	74,40	8.531.890,789	75,91	9.385.079,868	77,46	10.323.587,855	78,76	11.355.946,640	80,23	12.491.541,304	80,23	52.088.046,455	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persenase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar	%	80	80,15	80,24	7.990.000,000	80,33	8.789.000,000	80,38	9.667.900,000	80,47	10.634.690,000	80,53	11.698.159,000	80,53	48.779.749,000	
103 - 03	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum	%	72,00	71,83	72,40	5.400.000,000	72,71	5.167.500,000	72,99	5.656.750,000	73,23	6.222.425,000	73,42	6.844.667,500	73,42	29.291.342,500	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan air limbah domestik.	%	99,57	99,75	100	62.557.700,000	100	161.813.200,000	100	111.337.114,000	100	33.453.894,000	100	148.953.620,200	100	518.115.528,200	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas areal genangan	m2	30.315	28.512	26.730	5.940.488.613	24.948	6.638.992.457	23.166	7.420.403.559	21.384	8.294.644.753	19.602	9.272.835.171	19.602	37.567.364.553	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Publik yang Memenuhi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	%	0,92	1,07	1,25	51.930.000,000	1,51	212.850,000,000	1,88	3.300,000,000	2,26	3.920,000,000	2,63	6.970,000,000	2,63	278.970,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata	%	n/a	25,00	42	6.700,000,000	50,00	7.170,000,000	67,00	7.370,000,000	75,00	7.750,000,000	83,00	7.750,000,000	83,00	36.740,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kualitas Jalan (I)	%	71,94	71,94	72,19	46.209.390,002	72,44	49,253,172,319	72,69	52,629,501,531	72,94	56,493,266,060	73,19	60,808,169,918	73,19	265,393,499,830	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tenaga terampil bersertifikat	%	n/a	32,00	33,00	250,000,000	34,00	260,000,000	35,00	290,000,000	37,00	310,000,000	38,00	340,000,000	38,00	1,450,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103 - 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	%	57,50	59,00	60,50	2.449.000,000	62,00	2.012.000,000	63,50	1.270.000,000	65,00	777.000,000	66,50	680.000,000	66,50	7.188.000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						47.664.294.238		46.383.157.077		47.275.815.785		47.242.232.363		47.622.790.599		236.188.290.062	
104 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PKP	Nilai	95	95	95	7.952.644.238	95	8.571.507.077	95	8.914.165.785	95	9.805.582.363	95	10.786.140.599	95	46.030.040.062	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
104 - 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio kepemilikan rumah	Nilai	0,76	0,80	0,84	2.250.000.000	0,88	1.250.000.000	0,92	1.800.000.000	0,96	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	7.500.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
104 - 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan luasan kumuh	%	85,98	88,32	90,65	12.536.650.000	92,99	12.536.650.000	95,33	12.536.650.000	97,66	12.536.650.000	100	12.536.650.000	100	62.683.250.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
104 - 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	98,48	98,73	98,99	21.625.000.000	99,24	21.625.000.000	99,49	21.625.000.000	99,75	20.800.000.000	100	20.800.000.000	100	106.475.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
104 - 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	%	30,15	41,85	53,54	3.300.000.000	65,23	2.400.000.000	76,92	2.400.000.000	88,62	3.000.000.000	100	2.400.000.000	100	13.500.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
105	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						36.939.980.991		35.606.999.151		36.830.492.336		36.873.048.586		38.127.801.398		184.378.322.462	
105 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Satpol PP	Nilai	95	95	95	12.881.557.336	95	12.907.557.336	95	12.925.557.336	95	12.937.557.336	95	12.950.557.336	95	64.602.786.680	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban
105 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai	100	100	100	7.610.110.000	100	7.820.310.000	100	8.185.435.000	100	8.487.916.250	100	8.896.521.562	100	41.000.292.812	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan BPBD	Nilai	100	100	100	5.616.513.655	100	5.664.831.815	100	5.690.450.000	100	5.716.300.000	100	5.764.500.000	100	28.452.595.470	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
105 - 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani	%	70,00	75,00	80,00	3.630.000.000	85,00	2.820.000.000	90,00	3.430.000.000	95,00	2.600.000.000	100	3.520.000.000	100	16.000.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketertarikan dan Ketertiban
105 - 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	0	3	7	4.831.800.000	10	4.464.300.000	10	4.514.050.000	10	4.516.275.000	10	3.936.222.500	50	22.262.647.500	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
105 - 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time Kebakaran	Menit	19	17	16	2.370.000.000	15	1.930.000.000	14	2.085.000.000	13	2.615.000.000	12	3.060.000.000	12	12.060.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran
<b>106</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>10.738.545.131</b>		<b>11.731.033.550</b>		<b>12.990.960.593</b>		<b>14.401.476.675</b>		<b>15.860.615.392</b>		<b>65.722.631.341</b>	
106-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram	%	N/A	N/A	70	4.179.700.000	75	4.409.583.500	80	4.652.110.593	85	4.907.976.675	90	5.177.915.392		23.327.286.160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
106 - 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	24,86	27,00	34,00	572.000.000	36,75	667.500.000	39,49	762.000.000	43,14	915.000.000	46,80	1.048.500.000	46,80	3.965.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
106 - 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	%	6,74	6,8	12,84	3.136.610.000	15,40	3.546.200.050	17,28	4.090.100.000	20,70	4.650.250.000	23,29	5.214.950.000	89,51	20.638.110.050	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106 - 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	60,12	60,50	61,01	2.463.206.631	61,92	2.688.000.000	62,83	3.018.000.000	63,73	3.413.000.000	64,64	3.839.000.000	64,64	15.421.206.631	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
106 - 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	387.028.800	100	419.750.000	100	468.750.000	100	515.250.000	100	580.250.000	100	2.371.028.800	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>453.243.967.582</b>		<b>477.998.733.024</b>		<b>481.571.530.957</b>		<b>491.326.882.276</b>		<b>500.497.716.400</b>		<b>2.404.638.830.239</b>	
<b>207</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>3.869.359.755</b>		<b>4.185.469.541</b>		<b>4.520.165.366</b>		<b>4.869.919.461</b>		<b>5.235.230.032</b>		<b>22.680.144.156</b>	
207-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	%	N/A	N/A	70	2.838.359.755	75	2.994.469.541	80	3.159.165.366	85	3.332.919.461	90	3.516.230.032	90	15.841.144.156	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
207 - 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan Satu Data Ketenagakerjaan	%	48,06	48,12	48,18	75.000.000	48,24	85.000.000	48,30	100.000.000	48,36	115.000.000	48,42	130.000.000	48,42	505.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
207 - 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi	%	6,85	7,5	8,30	506.000.000	9,10	556.000.000	10,00	611.000.000	11,00	672.000.000	12,10	739.000.000	12,10	3.084.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
207 - 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang dilatih	%	n/a	n/a	5,00	150.000.000	10,00	200.000.000	15,00	250.000.000	20,00	300.000.000	25,00	350.000.000	25,00	1.250.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
207 - 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan	%	80,00	85,00	90,00	300.000.000	95,00	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
<b>208</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN</b>						<b>5.166.772.815</b>		<b>6.049.374.862</b>		<b>6.390.543.265</b>		<b>6.680.115.930</b>		<b>6.954.665.092</b>		<b>31.241.471.964</b>	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
208-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keuasan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	N/A	N/A	70	3,260,118,965	75	3,439,425,508	80	3,628,593,911	85	3,828,166,576	90	4,038,715,738	90	18,195,020,698	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	%	56,00	56,00	55,90	481.639.523	60,00	665.000.000	65,00	705.000.000	70,00	705.000.000	70,00	705.000.000	70,00	3.261.639.523	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	163.000.000	100	227.000.000	100	229.000.000	100	232.000.000	100	235.000.000	100	1.086.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga	%	31,73	35,00	39,47	207.658.178	47,21	305.000.000	54,95	355.000.000	62,69	355.000.000	70,43	355.000.000	70,43	1.577.658.178	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	100	100	100	178.043.634	100	265.000.000	100	265.000.000	100	290.000.000	100	290.000.000	100	1.288.043.634	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	20,00	20,00	20,00	806.915.677	30,00	899.949.354	40,00	949.949.354	50,00	999.949.354	60,00	1.049.949.354	60,00	4.706.713.093	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208 - 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PHA)	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	69.396.838	100	248.000.000	100	258.000.000	100	270.000.000	100	281.000.000	100	1.126.396.838	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>209</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>5.584.712.774</b>		<b>5.599.206.884</b>		<b>5.746.213.163</b>		<b>5.898.770.071</b>		<b>6.097.958.021</b>		<b>28.926.860.913</b>	
209 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keuasan Pelayanan Dinas	Nilai	95	95	95	3.432.579.000	95	3.571.329.000	95	3.601.329.000	95	3.701.329.000	95	4.571.329.000	95	18.877.895.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Ketahanan Pangan																	
209 - 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan energi	KKL/ cap/ hari	3.500,28	3.605	3.713,15	1.281.751.377	3.830,15	1.361.193.487	3.945	1.446.499.766	4.063,35	1.544.906.674	4.185,25	1.637.650.921	4.185,25	7.272.002.225	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
		Tingkat ketersediaan protein	Gram/ cap/ hari	83,35	85,85	88,42		93,57		101,37		111,98		125,63		125,63			
209 - 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	%	33,33	50,00	66,67	360.524.297	83,33	370.524.297	100	380.024.297	100	391.424.297	100	407.000.000	100	1.909.497.188	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
209 - 05	PROGRAM PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	%	80,00	80,00	82,50	510.000.000	85	515.300.000	87,5	522.000.000	90	528.000.000	95	550.000.000	95	2.625.300.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
<b>210</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>900.000.000</b>		<b>4.500.000.000</b>		
210 - 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tingkat tertib administrasi pertanahan	%	84,52%	86,52%	88,53%	900.000.000	90,54	900.000.000	92,55	900.000.000	94,55	900.000.000	96,56	900.000.000	96,56	4.500.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
<b>211</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>301.796.435.121</b>		<b>306.686.725.355</b>		<b>305.573.808.327</b>		<b>308.471.063.101</b>		<b>310.380.730.750</b>		<b>1.532.908.762.654</b>		
211 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	100	100	100	14.175.630.102	100	15.980.062.191	100	18.193.664.614	100	20.731.973.185	100	23.641.977.606	100	92.723.307.697	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
211 - 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	%	100	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	300.000.000	100	2.900.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
211 - 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	%	0	0	9,69	1.461.423.512	19,39	1.661.565.863	29,08	1.876.522.450	38,77	1.907.974.695	42,47	1.979.672.165	42,47	8.887.158.685	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
211 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH publik	%	2,48	4,18	5,88	257.050.000.000	7,58	257.550.000.000	9,28	256.150.000.000	10,98	255.400.000.000	12,05	255.850.000.000	12,05	1.282.000.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	%	100	100	100	450,000,000	100	480,000,000	100	490,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,420,000,000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
211 - 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Peretujuan Lingkungan	%	52,00	100	100	153.671.000	100	169.038.210	100	185.942.000	100	204.536.000	100	224.989.800	100	938.177.010	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
211 - 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	%	40,00	45,00	50,00	172.500.000	53,00	198.375.000	56,00	230.000.000	57,00	250.000.000	60,00	300.000.000	60,00	1.150.875.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
211 - 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	1.126.422.849	100	1.156.422.849	100	1.161.422.849	100	1.166.422.849	100	1.206.422.849	100	5.817.114.245	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
211 - 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	%	86,67	88,00	88,00	27.217.962.654	85,00	28.841,261,242	80,00	27,136,256,414	75,00	28,160,156,372	70,00	26,627,668,330	70,00	137.983.305.012	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah	%	5,32	7,00	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		
212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7,840,908,908		8,312,583,898		8,769,151,012		9,309,704,318		9,916,398,055		44,148,746,190	
212-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Disdukcapil Kota Mataram	%	N/A	N/A	70	6,575,908,908	75	6,937,583,898	80	7,319,151,012	85	7,721,704,318	90	8,146,398,055	90	36,700,746,190	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
212 - 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP	persen	84,00	85,00	86,00	670.000.000	87,00	735.000.000	89,00	780.000.000	91,00	840.000.000	93,00	950.000.000	93,00	3.975.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	%	29,42	29,42	30,00		31,00		32,00		33,00		34,00		34,00		
214 - 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	15,51	26,48	15,00	930.967.000	14,34	930.967.000	13,82	930.967.000	13,27	930.967.000	12,74	930.967.000	12,74	4.654.835.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>215</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>69.006.054.868</b>		<b>78.058.554.868</b>		<b>79.646.054.868</b>		<b>80.074.179.868</b>		<b>80.413.554.868</b>		<b>387.198.399.340</b>	
215 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan	Nilai	100	100	100	25.766.000.000	100	24.421.000.000	100	22.271.000.000	100	22.521.000.000	100	22.521.000.000	100	117.500.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
215 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Kota	Nilai	0,08	0,08	0,15	43.240.054.868	0,15	53.637.554.868	0,23	57.375.054.868	0,31	57.553.179.868	0,38	57.892.554.868	0,38	269.698.399.340	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Rasio Waktu Tempuh	Nilai	1,75	1,75	1,75		1,6		1,5		1,5		1,3		1,3		
		Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	Nilai	2	2	2		1,7		1,5		1,5		1		1		
<b>216</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>15.691.851.532</b>		<b>17.242.691.125</b>		<b>18.962.960.238</b>		<b>20.856.306.261</b>		<b>22.946.007.387</b>		<b>95.699.816.543</b>	
216 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo	Nilai	100	100	100	4.576.851.532	100	5.016.191.125	100	5.514.310.238	100	6.062.241.261	100	6.664.965.387	100	27.819.063.579	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
216 - 03	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	94	95	96	5.300.000.000	97	5.830.000.000	98	6.413.000.000	99	7.054.300.000	100	7.759.730.000	100	32.357.030.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
216 - 04	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.1 Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Nilai	n/a	3,9	3,91	5.815.000.000	3,92	6.396.500.000	3,93	7.036.150.000	3,94	7.739.765.000	3,95	8.521.312.000	3,95	35.508.727.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
		2.2 Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,55		
		2.3 Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	n/a	3,5	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,55		





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.4 Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,55		
		2.5 Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	Nilai	n/a	3	3,01		3,02		3,03		3,04		3,05		3,05		
		2.6 Nilai Aspek Audit TIK	Nilai	n/a	3	3,01		3,02		3,03		3,04		3,05		3,05		
		2.7 Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	3,2	3,21		3,22		3,23		3,24		3,25		3,25		
		2.8 Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	4,33	4,34		4,35		4,36		4,37		4,38		4,38		
217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4,914,860,085		5,230,999,402		5,558,196,523		5,898,230,495		6,263,550,960		27,865,837,463	
217-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan SKPD	%	N/A	N/A	70	636,227,763	75	671,220,290	80	708,137,406	85	747,084,963	90	788,174,636	90	3,550,845,057	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
217 - 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Cukup Sehat	%	n/a	56,00	65,00	75.000.000	75,00	84.000.000	85,00	94.080.000	90,00	105.369.600	94,00	118.013.952	94,00	476.463.552	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
217 - 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	%	10	15,00	20,00	494.569.429	30,00	553.917.760	35,00	620.387.891	40,00	694.834.438	45,00	778.214.571	45,00	3.141.924.089	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
217 - 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase Usaha mikro yang naik kelas	%	n/a	n/a	5,00	315.000.000	10,00	364.500.000	15,00	405.950.000	20,00	439.545.000	25,00	475.999.500	25,00	2.000.994.500	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
217 - 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	%	n/a	n/a	2,40	425.000.000	4,80	425.000.000	9,60	425.000.000	12,00	425.000.000	14,00	425.000.000	14,00	2.125.000.000	
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						9,214,137,298		9,785,712,303		10,395,816,054		11,046,987,453		11,741,920,371		52,184,573,479	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
218-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan DPMP TSP Kota Mataram	%	N/A	N/A	70	7,237,293,903	75	7,635,345,068	80	8,055,289,046	85	8,498,329,944	90	8,965,738,091	90	40,391,996,052	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
218-02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	%	70	75	77	72.000.000	82	81.000.000	86	92.000.000	88	105.000.000	90	120.000.000	90	470.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
218-03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	%	41	41	43	200.000.000	47	214.000.000	50	228.980.000	55	245.008.600	60	262.150.000	60	1.150.138.600	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
218-04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	%	84,71	85,13	85,81	1.281.843.395	86,50	1.402.757.235	87,19	1.535.247.008	87,89	1.680.447.909	88,59	1.839.582.280	88,59	7.739.877.827	
218-05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan	%	8	10	20	211.500.000	30	226.305.000	40	242.150.000	50	259.100.500	60	277.225.000	60	1.216.280.500	
218-06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	%	93	95	96	211.500.000	97	226.305.000	98	242.150.000	99	259.100.500	100	277.225.000	100	1.216.280.500	
<b>219</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						<b>7,562,094,392</b>		<b>7,788,391,658</b>		<b>8,027,135,274</b>		<b>8,279,009,788</b>		<b>8,544,737,401</b>		<b>40,201,368,512</b>	
219-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kepemudaan & Olahraga	%	N/A	N/A	70	4,114,495,745	75	4,340,793,011	80	4,579,536,627	85	4,831,411,141	90	5,097,138,754	90	22,963,375,277	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
219-02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	5,00	10,00	13,00	719.153.697	13,00	719.153.697	13,00	719.153.697	13,00	719.153.697	13,00	719.153.697	65,00	3.595.768.485	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
219-03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	Jumlah Medali	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	2,652,832,450	15 (Emas: 6, Perak: 7, Perunggu: 2)	2,652,832,450	18 (Emas: 7, Perak: 8, Perunggu: 3)	2,652,832,450	21 (Emas: 8, Perak: 9, Perunggu: 4)	2,652,832,450	24 (Emas: 9, Perak: 10, Perunggu: 5)	2,652,832,450	114 (Emas: 45, Perak: 52, Perunggu: 17)	13,264,162,250	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219 - 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	%	1,00	2,00	3,00	75.612.500	3,00	75.612.500	3,00	75.612.500	3,00	75.612.500	3,00	75.612.500	15,00	378.062.500	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		7.500.000.000	
220 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral terpenuhi	%	100	100	100	1.000.000.000	100	1.250.000.000	100	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	2.000.000.000	100	7.500.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						2.850.000.000		3.160.000.000		3.550.000.000		3.800.000.000		4.150.000.000		17.510.000.000	
221 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	Sistem Elektronik	NA	0	2	2.850.000.000	4	3.160.000.000	6	3.550.000.000	8	3.800.000.000	10	4.150.000.000	10	17.510.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						7.165.988.325		7.783.582.398		8.288.828.166		8.922.997.324		9.511.316.048		41.672.712.262	
222 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Mataram	%	N/A	N/A	70	5.752.764.017	75	6.069.166.038	80	6.402.970.170	85	6.755.133.529	90	7.126.665.873	90	32.106.699.628	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
222 - 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek kemajuan budaya yang dikembangkan	%	4,76	4,76	7,14	1.413.224.308	9,52	1.714.416.360	11,9	1.885.857.996	14,29	2.167.863.795	16,67	2.384.650.175	16,67	9.566.012.634	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3.122,017,403		3.359,319,832		3,616,233,041		3,894,491,540		4,195,990,823		18,188,052,638	
223 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perustakaan	%	N/A	N/A	70	1,664,429,144	75	1,755,972,747	80	1,852,551,248	85	1,954,441,567	90	2,061,935,853		9,289,330,558	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perustakaan
223 - 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Kunjungan Perustakaan per Tahun	orang	12.739	6.319	7.000	1.457.588.259	8.000	1.603.347.085	10.000	1.763.681.793	12.000	1.940.049.973	13.000	2.134.054.970	50.000	8.898.722.080	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perustakaan
		nilai akreditasi perustakaan kota	Nilai	60	65	67		68		70		80		90		90		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						5,003,164,003		8,232,380,643		5,589,281,569		5,969,476,844		6,374,738,164		31,169,041,223	
224 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	N/A	N/A	70	3,883,668,003	75	4,097,269,743	80	4,322,619,579	85	4,560,363,655	90	4,811,183,656		21,675,104,636	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
224 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompentensi	%	42	43	44	1.033.196.000	45	4.040.180.900	46	1.162.238.990	47	1.294.247.889	48	1.437.202.678	48	8.967.066.457	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
224 - 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	%	75,66	78,62	80,59	86.300.000	82,57	94.930.000	84,54	104.423.000	86,51	114.865.300	88,48	126.351.830	88,48	526.870.130	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						124.571.280.802		89.088.058.171		103.334.166.920		127.575.083.683		128.113.829.391		572.682.418.967	
325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.606.298.367		8.134.019.440		7.756.099.638		7.981.446.116		8.222.623.418		39.700.486.979	
325 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perikanan	Nilai	100	100	100	3.416.391.935	100	3.444.869.765	100	3.441.869.765	100	3.444.869.765	100	3.444.869.765	100	17.192.870.995	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
325 - 03	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	%	15	17,5	25	1.670.000.000	35	2.100.000.000	45	1.652.000.000	55	1.797.200.000	55	1.956.920.000	55	9.176.120.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
325 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	12,5	13,00	13,5	1.110.000.000	14,00	1.110.000.000	14,5	1.110.000.000	15,00	1.110.000.000	20,00	1.110.000.000	20	5.550.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
325 - 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	%	18	18,5	19,00	1.409.906.432	19,5	1.479.149.675	20,00	1.552.229.873	23,00	1.629.376.351	25,00	1.710.833.653	25	7.781.495.984	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						66.503.849.621		38.022.955.633		45.637.410.681		52.092.644.764		54.224.478.469		256.481.339.168	
326 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pariwisata	Nilai	100	100	100	3.053.849.621	100	4.012.955.633	100	4.262.410.681	100	4.647.644.764	100	5.074.478.469	100	21.051.339.168	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
326 - 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	2	1,5	3	58.300.000.000	3	27.550.000.000	3	32.800.000.000	3	38.150.000.000	3	38.550.000.000	3	195.350.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
326 - 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	persen	-72,66	-27,30	0,67	1.850.000.000	1,34	2.760.000.000	2,01	4.775.000.000	2,68	5.295.000.000	3,35	6.300.000.000	3,35	20.980.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
326 - 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	%	10,75	11,25	15,6	1.650.000.000	20	1.850.000.000	25,5	1.900.000.000	30,75	2.000.000.000	45,5	2.150.000.000	45,5	9.550.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
326 - 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	-67,25	-32,5	0,75	1.650.000.000	1,5	1.850.000.000	2,35	1.900.000.000	3,10	2.000.000.000	3,85	2.150.000.000	3,85	9.550.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
<b>327</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>16.783.500.000</b>		<b>17.291.500.000</b>		<b>18.479.500.000</b>		<b>21.573.962.858</b>		<b>20.673.962.858</b>		<b>94.802.425.716</b>	
327 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pertanian	Nilai	100	100	100	12.913.500.000	100	13.691.500.000	100	14.734.500.000	100	16.478.962.858	100	16.478.962.858		74.297.425.716	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
327 - 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	%	100	100	100	1.380.000.000	100	1.435.000.000	100	1.500.000.000	100	1.580.000.000	100	1.580.000.000	100	7.475.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
327 - 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	%	80,00	85,00	90,00	1.185.000.000	100	1.555.000.000	100	1.575.000.000	100	1.905.000.000	100	1.905.000.000	100	8.125.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
327 - 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	%	2,02	2,57	3,12	160.000.000	3,67	165.000.000	4,22	185.000.000	4,71	215.000.000	5	215.000.000	5	940.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
327 - 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Rp.	82.324.285.714	84.094.257.857	85.902.284.401	70.000.000	87.749.188.516	70.000.000	89.635.790.961	80.000.000	91.562.960.467	85.000.000	93.531.564.117	85.000.000	93.531.564.117	390.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
327 - 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Mandiri	%	3,7	3,9	4,2	1.075.000.000	4,5	375.000.000	4,8	405.000.000	5,1	1.310.000.000	5,4	410.000.000	5,4	3.575.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
<b>330</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>34.448.363.789</b>		<b>25.461.390.385</b>		<b>31.614.591.945</b>		<b>47.913.080.590</b>		<b>43.956.800.960</b>		<b>183.404.227.669</b>	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
330 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Mataram	%	N/A	N/A	70	6,504,119,936	75	6,861,846,532	80	7,239,248,092	85	7,637,406,737	90	8,057,464,107	90	36,300,085,404	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	%	n/a	25	40	330.000.000	50	363.000.000	60	399.300.000	80	439.230.000	100	483.153.000	100	2.014.683.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	%	5,5	10	30	25.506.887.853	50	16.046.887.853	75	21.640.887.853	80	37.294.287.853	100	33.013.027.853	100	133.501.979.265	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Rata Rata Peningkatan Harga Barang pokok dan Barang Penting	%	2,56	2,5	2,3	635.656.000	2,00	672.656.000	1,7	770.156.000	1,5	917.156.000	1,25	758.156.000	1,25	3.753.780.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	%	100	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	1.300.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Pemenuhan Parameter Daerah Tertib Ukur	%	69,00	71,00	74,00	561.700.000	77,00	607.000.000	80,00	655.000.000	83,00	725.000.000	85,00	735.000.000	95,00	3.283.700.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
330 - 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	%	n/a	n/a	20,00	650.000.000	40,00	650.000.000	60,00	650.000.000	80,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100	3.250.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
<b>331</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						1,202,797,991		1,291,147,540		1,328,064,656		1,397,012,213		1,438,101,886		6,657,124,285	
331 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas PerinkopUKM	%	N/A	N/A	70	636,227,763	75	671,220,290	80	708,137,406	85	747,084,963	90	788,174,636	90	3,550,845,057	
331 - 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	%	4,30	4,65	5,00	566.570.228	5,35	619.927.250	5,70	619.927.250	6,05	649.927.250	6,40	649.927.250	6,40	3.106.279.228	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						38.308.873.004		40.579.135.299		44.452.742.578		45.575.695.272		48.314.902.158		217.231.348.311	



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
401	SEKRETARIAT DAERAH						6.599.291.895		7.232.221.080		7.936.443.188		8.688.087.505		9.513.896.256		46.301.423.795	
401 - 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	nilai	3,3	3,3	3,4	1.186.062.317	3,6	1.277.668.548	3,8	1.386.435.403	4	1.483.078.943	4,2	1.588.386.838	4,2	6.921.632.049	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase rata-rata Capaian SPM	%	n/a	65,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100		100		
401 - 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat	%	100	100	100	680.380.627	100	748.418.688	100	823.260.558	100	905.586.613	100	996.145.275	100	4.153.791.761	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Tinggi	%	57	86	100	1.543.724.421	100	1.698.096.863	100	1.867.906.549	100	2.054.697.203	100	2.260.166.923	100	9.424.591.959	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Level kematangan UKPBJ	kategori	Level 3	Level 3	Level 3	2.152.043.421	level 4	2.367.247.762	Level 4	2.603.972.538	Level 5	2.864.369.792	Level 5	3.150.806.771	9 Variabel Mencapai Level 5	13.138.440.284	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%	%	100	100	100	1.037.081.109	100	1.140.789.219	100	1.254.868.140	100	1.380.354.954	100	1.518.390.449	100	6.331.483.871	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	%	25,00	25,00	100	1.037.081.109	100	1.140.789.219	100	1.254.868.140	100	1.380.354.954	100	1.518.390.449	100	6.331.483.871	
402	SEKRETARIAT DPRD						66.608.520.000		69.861.280.000		73.752.836.250		73.698.657.813		75.768.957.953		359.690.252.016	
402 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Pertanian	Nilai	100	100	100	35.936.020.000	100	37.655.155.000	100	38.491.405.000	100	38.191.405.000	100	38.486.342.500	100	188.760.327.500	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
402 - 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	persentase program kerja DPRD terfasilitasi	%	100	100	100	30.672.500.000	100	32.206.125.000	100	35.261.431.250	100	35.507.252.813	100	37.282.615.453	100	170.929.924.516	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						121.045.213.542		129.871.280.364		137.987.776.142		147.007.519.450		156.803.930.947		692.529.720.445	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
501	PERENCANAAN						17.252.239.835		19.071.356.356		19.720.420.019		20.567.060.700		21.805.149.591		98.416.226.501		
501 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Keuasan Pelayanan Bappeda	%	N/A	75	80	5.990.792.000	80	6.732.429.000	85	6.873.032.000	90	7.529.383.000	100	8.174.181.000	100	35.299.817.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
501 - 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	87	90	100	3.518.353.333	100	4.009.928.129	100	4.143.188.830	100	3.939.518.553	100	4.119.151.485	100	19.730.140.330	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
		Persentase Ketepatan waktu perencanaan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
		Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah	%	77	80	80		85		90		95		100		100		100	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
501 - 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)	%	N/A	100	100	7.743.094.502	100	8.328.999.227	100	8.704.199.188	100	9.098.159.148	100	9.511.817.105	100	43.386.269.171	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
		Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	
		Persentase Urusan Pemerintahan	%	86	90	100		100		100		100		100		100		100	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik																
<b>502</b>	<b>KEUANGAN</b>						<b>77,609,999,562</b>		<b>82,827,293,759</b>		<b>88,187,835,381</b>		<b>93,923,711,247</b>		<b>100,063,614,317</b>		<b>442,612,454,266</b>	
502 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)	%	N/A	N/A	82	61,552,129,899	83	64,937,497,043	84	68,509,059,381	86	72,277,057,647	88,5	76,252,295,817		343,528,039,787	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
502 - 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	%	100	100	100	2.155.528.646	100	3.623.020.049	100	3.985.322.500	100	4.383.854.750	100	4.822.240.500	100	18.969.966.445	
		Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	386.695.520	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	850.795.520	
		persentase penyerapan APBD	%	99,53	99,53	94,68	386.695.520	94,81	386.695.520	94,94	425.365.000	95,07	467.901.500	95,20	514.691.500	95,20	2.181.349.040	
		Persentase penyelesaian laporan pertanggungjaban waban keuangan daerah	%	100	100	100	1.080.795.883	100	1.080.795.883	100	1.188.875.000	100	1.307.762.500	100	1.438.538.500	100	6.096.767.766	
502 - 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	nilai solvabilitas jangka panjang	nilai	5.476.662	5.476.662	6.351.731	2.486.479.706	6.020.883	3.137.610.876	6.494.280	3.451.371.500	6.831.079	3.796.508.650	7.129.765	4.176.159.000	7.129.765	17.048.129.732	
502 - 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian Keuangan Daerah	%	26,01	26,01	26,00	9.561.674.388	26,00	9.561.674.388	26,00	10.517.842.000	26,00	11.569.626.200	26,00	12.726.589.000	26,00	53.937.405.976	
<b>503</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>73.264.812.354</b>		<b>75.100.805.187</b>		<b>76.028.291.536</b>		<b>75.194.865.237</b>		<b>75.165.276.862</b>		<b>374.754.051.176</b>	
503 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan BKPSDM Kota Mataram	%	0	0	70	67.695.250.000	75	68.792.125.000	80	69.713.787.500	85	68.959.616.250	90	68.930.027.875	90	344.090.806.625	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
503 - 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kualifikasi ASN	nilai	12,04	12,7	13,03	1.474.391.973	13,36	1.524.644.786	13,69	1.523.331.720	14,04	1.528.331.720	14,39	1.528.331.720	14,39	7.579.031.919	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Nilai Kompetensi ASN	nilai	7,12	7,12	7,73	2.701.398.429	8,05	3.459.291.429	8,38	3.387.173.295	8,71	3.382.173.295	9,07	3.382.173.295	9,07	16.312.209.743	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
		Nilai Kinerja ASN	nilai	24,47	24,47	25,71	350.415.592	26,35	250.415.592	27,01	329.670.641	27,68	250.415.592	28,39	250.415.592	28,39	1.431.333.009	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
		Nilai Disiplin ASN	nilai	5	5	5	493.356.360	5	524.328.380	5	524.328.380	5	524.328.380	5	524.328.380	5	2.590.669.880	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
		persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ad ministrasi kepegawaian tepat waktu	%	90,00	95,00	100	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.750.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
<b>505</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>5.707.965.053</b>		<b>5.723.999.680</b>		<b>5.820.999.680</b>		<b>5.834.699.680</b>		<b>5.855.300.000</b>		<b>28.942.964.093</b>	
505 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Balitbang	Nilai	100	100	100	3.449.565.053	100	3.465.599.680	100	3.537.599.680	100	3.541.299.680	100	3.561.900.000	100	17.555.964.093	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
505 - 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan	%	93,00	93,00	100	1.888.400.000	100	1.888.400.000	100	1.893.400.000	100	1.893.400.000	100	1.893.400.000	100	9.457.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		jumlah inovasi daerah yang berkualitas	unit	N/A	27	25	370.000.000	25	370.000.000	25	390.000.000	25	400.000.000	25	400.000.000	125	1.930.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
<b>6</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>1.835.895.747</b>		<b>1.927.690.535</b>		<b>2.024.075.061</b>		<b>2.125.278.814</b>		<b>2.231.542.755</b>		<b>10.144.482.912</b>	
<b>601</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>10.888.213.039</b>		<b>12.194.536.284</b>		<b>11.691.371.610</b>		<b>9.948.575.363</b>		<b>9.854.839.304</b>		<b>54.577.535.600</b>	
601 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Inspektorat	Nilai	100	100	100	9.052.317.292	100	10.266.845.749	100	9.667.296.549	100	7.823.296.549	100	7.623.296.549	100	44.433.052.688	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
601 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik	%	74,36	74,50	75,00	1.383.418.577	76,00	1.452.589.506	77,00	1.525.218.981	78,00	1.601.479.930	81,00	1.681.553.927	81,00	7.644.260.921	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
		Persentase rekomendasi temuan internal	%	76,00	78,60	79,00	2.404.000.000	80,00	2.645.000.000	81,00	2.909.000.000	82,00	3.200.000.000	83,00	3.519.000.000	83,00	14.677.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		yang terselesaikan																
		Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan	%	91,00	92,00	93,00	345.000.000	93,50	380.000.000	94,00	418.000.000	94,50	460.000.000	95,00	506.000.000	95,00	2.109.000.000	
601 - 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit Pemenuhan)	%	50,00	60,00	70,00	452.477.170	80,00	475.101.029	90,00	498.856.080	100	523.798.884	100	549.988.828	100	2.500.221.991	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan
		Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment	%	100	100	100	51.000.000	100	56.000.000	100	62.000.000	100	68.000.000	100	75.000.000	100	312.000.000	
		Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	%	3	n/a (tidak dilakukan penilaian karena ada perubahan metode penilaian)	25,64	58.000.000	38,46	64.000.000	51,28	70.000.000	76,92	77.000.000	92,31	85.000.000	92,31	354.000.000	
		Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK	%	100	100	100	71.000.000	100	79.000.000	100	87.000.000	100	95.000.000	100	105.000.000	100	437.000.000	
		Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator stranas-PK	%	33	33	67	45.000.000	67	50.000.000	67	55.000.000	100	60.000.000	100	67.000.000	100	277.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						111.708.551.620		117.430.555.217		123.528.573.427		130.267.258.304		137.269.198.651		620.204.137.219	
701	KECAMATAN AMPENAN						22.506.714.042,25		23.217.883.530,98		23.960.469.831,18		24.736.002.375,15		25.546.086.635,11		119.967.156.414,66	
701 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan	%	N/A	N/A	70	11.415.635.838	75	11.986.417.623	80	12.585.738.497	85	13.215.025.423	90	13.875.775.692		63.078.594.074	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Kecamatan Ampenan																	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	45	45	75	162.113.737	76	170.219.424	77,5	178.730.395	78,5	187.666.915	80	197.050.260	80	895.780.731,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
		IKM Kecamatan	Nilai	0	NA	66,02	24.508.249	67,02	25.733.661	68,02	27.020.345	69,02	28.371.362	70,02	29.789.930	70,02	135.423.547,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
		IKM Kelurahan	Nilai	NA	NA	66,02	25.007.689	67,02	26.258.073	68,02	27.570.977	69,02	28.949.526	70,02	30.397.002	70,02	138.183.267,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	20	30	10.536.053.416	40	10.648.689.879	50	10.762.816.504	60	10.878.466.381	70	10.995.673.843	70	53.821.700.022	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	40	50	18.748.480	60	18.935.965	80	19.125.324	90	19.316.577	100	19.509.743	100	95.636.089	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	NA	NA	100	157.509.219	100	165.384.680	100	173.653.914	100	182.336.610	100	191.453.440	85,00	870.337.863	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	NA	NA	100	185.885.895	100	195.180.190	100	204.939.200	100	215.186.160	100	225.945.468	85,00	1.027.136.913	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
<b>701</b>	<b>KECAMATAN MATARAM</b>						<b>18.185.837.231</b>		<b>19.618.800.854</b>		<b>21.115.001.911</b>		<b>22.910.489.034</b>		<b>24.783.592.937</b>		<b>106.613.721.967</b>		
701 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Mataram	%	N/A	N/A	70	7.909.503.872	75	8.344.526.585	80	8.803.475.547	85	9.287.666.702	90	9.798.488.371	90	44.143.661.077	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	57,00	75,00	116.200.000	76,00	173.177.574	76,00	100.320.000	78,50	190.495.331	80,00	209.544.864	100	789.737.769	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	67	80	90.245.000	82	99.269.500	85	109.196.450	87	120.116.095	90	132.127.705	90	550.954.749,50	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	NA	NA	65	85.500.000	70	94.050.000	75	103.455.000	80	113.800.500	85	125.180.550	85	521.986.050	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	NA	11,11	9.732.888.359	11,11	10.706.117.195	22,22	11.776.794.914	22,22	12.954.474.406	33,33	14.249.921.847	33,33	59.420.256.721	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	NA	11,11	284.500.000	22,22	312.950.000	33,33	344.245.000	44,44	378.669.500	55,56	416.536.450	55,56	1.736.900.950	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	NA	100	100	96.000.000	100	96.000.000	100	105.600.000	100	116.160.000	100	127.776.000	80,00	541.536.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	NA	100	100	155.500.000	100	105.600.000	100	116.160.000	100	127.776.000	100	140.553.600	100	645.589.600	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
<b>701</b>	<b>KECAMATAN SANDUBAYA</b>						<b>18.838.517.922</b>		<b>19.681.171.355</b>		<b>20.736.641.332</b>		<b>21.852.649.607</b>		<b>23.060.430.008</b>		<b>104.163.410.225</b>	
701 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sandubaya	%	N/A	N/A	70	9.594.967.922	75	10.333.543.355	80	11.191.826.332	85	12.128.187.607	90	13.154.695.008	90	56.403.220.225	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	N/A	62,50	140.000.000	66,00	148.600.000	70	156.000.000	73,50	163.800.000	77,50	170.500.000	77,50	778.900.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kecamatan	nilai	NA	78	80	201.296.000	82	205.100.000	85	210.450.000	87	216.000.000	90	222.000.000	90	1.054.846.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kelurahan	nilai	NA	0	70	175.000.000	75	108.500.000	78	112.000.000	80	115.500.000	82	119.000.000	82	630.000.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	14,29	14,29	8.406.122.000	28,57	8.556.178.000	42,86	8.728.905.000	57,14	8.883.712.000	71,43	9.041.935.000	71,43	43.616.852.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	14,29	14,29	1.292.620.000	28,57	1.302.420.000	28,57	1.332.684.000	42,86	1.341.166.000	42,86	1.351.248.000	42,86	6.620.138.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan	%	100	100	100	38.500.000	100	40.750.000	100	42.500.000	100	45.600.000	100	47.800.000	100	215.150.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		tratribunlinmas di kecamatan																
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	100	282.632.000	100	288.500.000	100	294.960.000	100	299.850.000	100	304.500.000	100	1.470.442.000,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
<b>701</b>	<b>KECAMATAN CAKRANEGARA</b>						<b>22.272.556.642</b>		<b>23.611.600.739</b>		<b>25.037441.431</b>		<b>26.555.912.092</b>		<b>28.173.246.898</b>		<b>125.650.757.802</b>	
701 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cakranegara	%	N/A	N/A	70	10.995.401.298	75	11.600.148.369	80	12.238.156.530	85	12.911.255.139	90	13.621.374.171	90	61.366.335.507	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	N/A	45,00	72,5	183.354.212	74,5	190.605.778	77,5	198.336.211	79,5	206.580.777	81	215.277.379	81	994.254.357	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	N/A	78	83	75.000.000	85	80.625.000	86,5	86.250.000	88	91.875.000	90	97.500.000	90	431.250.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	N/A	N/A	70	150.000.000	71	161.250.000	76	173.343.750	81	186.344.531	88	200.320.371	88	871.258.652	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	N/A	10	20	10.562.700.032	30	11.249.912.909	40	11.987.616.856	50	12.779.588.204	60	13.629.886.404	60	60.209.704.406	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	40	50	74.758.929	60	74.833.688	70	74.908.522	80%	74.983.430	90	75.058.414	90	374.542.983,00	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	100	100	100	144.101.100	100	154.908.683	100	166.526.834	100	179.016.346	100	192.442.572	100	836.995.535	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	100	162.000.000	100	174.150.000	100	187.211.250	100	201.252.094	100	216.346.001	100	940.959.345	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
701	KECAMATAN SELAPARANG						18.076.258.786		19.028.465.035		20.030.807.729		21.100.386.752		22.231.439.850		100.467.358.152	
701 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Selaparang	%	N/A	N/A	70	9458.661.960	75	9.978.888.368	80	10.527.727.228	85	11.106.752.226	90	11.717.623.598	90	52.789.653.375	
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	NA	60,00	147.000.000	80,00	154.300.000	82,50	162.067.500	85,00	170.170.875	87,50	178.679.419	87,50	812.267.794	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	NA	66,02	151.000.000	67,02	158.550.000	68,02	166.477.500	69,02	174.801.375	70,02	183.541.444	70,02	834.370.319	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	NA	NA	75	53.000.000	80	55.650.000	85	58.432.500	89	61.354.125	91	64.421.831	91	292.858.456	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	NA	11,11	7.858.596.826	11,11	8.251.526.667	22,22	8.664.103.001	22,22	9.097.308.151	33,33	9.552.173.558	33,33	12.210.123.475	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	NA	11,11		22,22		33,33		44,44		55,56		55,56		OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	100	100	100,00	230.000.000	90,00	230.000.000	95,00	230.000.000	95,00	230.000.000	100	230.000.000	100	1.150.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	90,00	178.000.000	95,00	199.500.000	100	222.000.000	100	260.000.000	100	305.000.000	100	1.164.500.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701	KECAMATAN SEKARELA						11.828.666.997		12.272.633.702		12.648.211.193		13.111.818.445		13.474.402.322		63.335.732.658	
701 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sekarbela	%	N/A	N/A	70	5.133.453.740	75	5.415.793.696	80	5.713.662.349	85	6.027.913.778	90	6.359.449.036	90	28.650.272.599	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	0	75,00	76,00	237.500.000	77,50	240.000.000	78,50	245.000.000	80	245.000.000	82,50	245.000.000	82,50	2.543.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		IKM Kecamatan	Nilai IKM	0	NA	82	58.000.000	85	70.000.000	87	80.000.000	90	80.000.000	95	80.000.000	95	368.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		IKM Kelurahan	Nilai IKM	NA	NA	70	95.000.000	75	97.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	90	492.000.000	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	%	0	NA	20	5.909.699.719	20	6.019.599.623	40	6.036.284.423	40	6.157.224.275	60	6.157.224.275	60	30.280.032.315	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
		persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	%	NA	NA	20		40		60		60		80		80		OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	%	100	100	100	133.922.703	100	133.922.703	100	147.314.973	100	147.314.973	100	147.314.973	100	709.790.325	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
701 - 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	%	100	100	100	261.090.835	100	296.317.680	100	325.949.448	100	354.365.419	100	385.414.038	100	1.623.137.419	OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kewilayahan
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>6.884.601.088</b>		<b>7.248.548.003</b>		<b>8.153.097.553</b>		<b>7.829.196.345</b>		<b>7.846.869.838</b>		<b>37.962.312.827</b>	
<b>801</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>6.884.601.088</b>		<b>7.248.548.003</b>		<b>8.153.097.553</b>		<b>7.829.196.345</b>		<b>7.846.869.838</b>		<b>37.962.312.827</b>	
801 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Bakesbangpol	Nilai	100	100	100	3.359.051.638	100	3.420.738.553	100	3.461.113.103	100	3.459.085.145	100	3.465.910.388	100	17.165.898.827	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
801 - 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah	%	n/a	100	100	204.900.000	100	210.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	2.514.900.000	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
801 - 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	%	100	100	100	186.000.000	100	186.000.000	100	304.000.000	100	157.750.000	100	157.750.000	100	991.500.000	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.	%	n/a	n/a	80,00	70.000.000	83,00	210.000.000	86,00	350.000.000	89,00	105.000.000	92,00	105.000.000	92,00	840.000.000	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun Transisi (Proyeksi 2021)	Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian	Capaian	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801 - 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif dan taat pada peraturan perundang-undangan	%	n/a	n/a	32,47	165.000.000	43,29	238.200.000	54,11	270.000.000	64,94	270.000.000	77,92	270.000.000	77,92	1.213.200.000	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
801 - 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	%	100	100	100	553.449.450	100	553.449.450	100	558.449.450	100	558.449.450	100	558.449.450	100	2.782.247.250	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
801 - 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	2.346.200.000	100	2.430.160.000	100	2.509.535.000	100	2.578.911.750	100	2.589.760.000	100	12.454.566.750	OPD yang menangani Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

## Bab 8

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diambil dari indikator sasaran strategis RPJMD.

Perumusan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Rancangan Awal dilakukan berdasarkan penjabaran Misi dan perumusan tujuan sasaran serta arah kebijakan yang ditunjang dengan kebutuhan program sementara yang nantinya disempurnakan berdasarkan penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD ini akan dilakukan melalui pembahasan dengan DPRD dan Provinsi menjadi Rancangan RPJMD, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, memperhatikan hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD menjadi Rancangan Akhir dan saran-saran dari pemangku kepentingan pembangunan di Kota Mataram pada setiap tahapan penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 termasuk pembahasan Ranperda RPJMD dengan DPRD dan Provinsi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana Tabel 8.1. berikut:

Tabel 8.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Mataram

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	78,91	79,29	79,47	79,56	79,73	79,95	80,22
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,51	9,66	9,86	10,06	10,26	10,46
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,28	15,36	15,5	15,51	15,58	15,66	15,73
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	71,76	72,34	72,62	72,92	73,21	73,5
5	Prevalensi Stunting	persen	20,7	18,81	16,92	15,03	13,14	11,25	9,36

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	PROYEKSI 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
6	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,12	7,79	7,47	7,16	6,87
7	Indeks Pembangunan Gender	nilai	92,77	92,80	92,87	93,11	93,22	93,34	93,47
8	Indeks Pembangunan Kepemudaan	nilai	64,46	64,75	65	66	67	68	69
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37	57,52	57,68	57,84	57,99
10	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	61,24	62,24	63,24	64,24	65,24
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-5,5	-0,95	0,96	1,87	2,78	4,60	6,42
12	Gini Ratio	nilai	0,381	0,374	0,365	0,353	0,344	0,34	0,337
13	Inflasi	persen	0,58	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
14	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55	2,45	3,35	4,95	6,55
15	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	persen	9,85	9,90	9,95	10,00	10,05	10,10	10,15
16	Indeks Keamanan Manusia	Nilai	3,7	3,7	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64	64,5	65	66	67	68	71
18	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	65,76	66	67	68	69	70	71
19	Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	3,56	3,57	3,58	3,59	3,60
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	B	B	B	B	B
21	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	n/a	n/a	70	75	80	85	90
23	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	1.944	60	65	70	75	80	85

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Mataram sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada Kota Mataram yang disajikan ke dalam aspek dan bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8.2 berikut:

Tabel 8.2  
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
 di Kota Mataram Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
<b>I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	persen	-5,5	-0,95	0,96	1,87	2,78	4,60	6,42	6,42
2	Indeks Gini	nilai	0,381	0,374	0,365	0,353	0,344	0,34	0,337	0,337
3	Laju Inflasi (%)	persen	0,58	3,12	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1
4	Angka Kemiskinan	persen	8,47	9,00	8,12	7,79	7,47	7,16	6,87	6,87
5	Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	persen	-4,85	-0,60	1,55	2,45	3,35	4,95	6,55	6,55
6	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kreatif	persen	9,85	9,90	9,95	10,00	10,05	10,10	10,15	10,15
7	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	78,91	79,29	79,47	79,56	79,73	79,95	80,22	80,22
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,79	92,8	92,87	93,11	93,22	93,34	93,47	93,47
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	64,46	64,75	65	66	67	68	69	69
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,28	15,36	15,5	15,51	15,58	15,66	15,73	15,8
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,46	9,51	9,66	9,86	10,06	10,26	10,46	10,48
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	70,43	72,05	72,34	72,62	72,92	73,21	73,5	73,5
13	Prevelensi Balita Stunting	persen	20,7	18,81	16,92	15,03	13,14	11,25	9,36	9,36
14	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	64	64,5	65	66	67	68	71	71
15	Nilai SAKIP	nilai	65,76	66	67	68	69	70	71	71
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	predikat	n/a	B	B	B	B	B	B	B
17	Indeks Kepuasan Pelayanan	persen	n/a	n/a	70	75	80	85	90	90
18	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>II. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										
<b>Pendidikan</b>										
19	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	persen	85,94	85,94	86	86,25	86,45	86,66	86,75	86,75
20	Persentase sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal dalam kurikulum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
21	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	64,35	64,35	65,40	67,26	69,13	71	72,87	72,87
22	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Kesehatan</b>										
23	Persentase ketercapaian implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	persen	46,46	60	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
24	Persentase Fasyankes dengan akreditasi Utama	persen	92,6	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Pemenuhan Kualifikasi Akreditasi Rumah Sakit	%	62,5	70	75	85	95	100	100	100
26	IKM Puskesmas	nilai	81	83	85	86	87	88	90	90
27	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	persen	100	80,00	81,01	88,07	91,14	92,40	92,40	92,40
28	Persentase tenaga kesehatan RSUD yang memenuhi standar	persen	20,00	22,36	34,78	48,44	64,59	81,98	100	100
29	Persentase sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes yang memiliki ijin	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Persentase capaian rumah tangga sehat	persen	30	33	35	40	45	50	55	55
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
31	Persentase bangunan pengendali banjir dalam kondisi baik	persen	71,97	73,29	74,4	75,91	77,46	78,76	80,23	80,23
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sesuai standar	persen	80	80,15	80,24	80,33	80,38	80,47	80,53	80,53
33	Cakupan layanan air minum	persen	72	71,83	72,4	72,71	72,99	73,23	73,42	73,42
34	Cakupan layanan air limbah domestik	persen	99,57	99,75	100	100	100	100	100	100
35	Luas areal genangan	m2	30.315	28.512	26.730	24.948	23.166	21.384	19.602	19.602
36	Persentase Bangunan yang Memenuhi SLF	persen	0,92	1,07	1,25	1,51	1,88	2,26	2,63	2,63
37	Persentase Bangunan dan lingkungan yang tertata	persen	n/a	25	42	50	67	75	83	83

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
38	Indeks Kualitas Jalan (IJ)	persen	71,94	71,94	72,19	72,44	72,69	72,94	73,19	73,19	
39	Persentase tenaga terampil bersertifikat	persen	n/a	32	33	34	35	37	38	38	
40	Persentase luas peruntukan lahan eksisting yang sesuai dengan RTRW	persen	57,50	59	60,50	62	63,50	65	66,50	66,50	
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>											
41	Rasio kepemilikan rumah	Nilai	0,76	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1	1	
42	Persentase penanganan luasan kumuh	persen	85,98	88,32	90,65	92,99	95,33	97,66	100	100	
43	Persentase Rumah Layak Huni	persen	98,48	98,73	98,99	99,24	99,49	99,75	100	100	
44	Persentase lingkungan yang didukung dengan PSU yang memadai	persen	30,15	41,85	53,54	65,23	76,92	88,62	100	100	
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>											
45	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota yang tertangani	persen	70	75	80	85	90	95	100	100	
46	Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	0	3	7	10	10	10	10	50	
47	Respon Time Kebakaran	Menit	19	17	16	15	14	13	12	12	
<b>Sosial</b>											
48	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	24,86	27	34	36,75	39,49	43,14	46,80	46,80	
49	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti sosial	persen	6,74	6,80	12,84	15,40	17,28	20,70	23,29	89,52	
51	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	persen	60,12	60,50	61,01	61,92	62,83	63,73	64,64	64,64	
52	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>											
<b>Tenaga Kerja</b>											
53	Persentase pemenuhan satu data ketenagakerjaan	%	48,06	48,12	48,18	48,24	48,30	48,36	48,42	48,42	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
54	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	%	6,85	7,5	8,30	9,10	10,00	11,00	12,10	12,10	
55	Persentase penempatan tenaga kerja yang dilatih	%	n/a	n/a	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
56	Persentase hak pekerja sesuai peraturan perundangan yang dipenuhi oleh perusahaan	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	100	100	
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
57	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kota Mataram	persen	56	56	55,90	60	65	70	70	70	
58	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
59	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terlatih ketahanan keluarga	persen	31,73	35	39,47	47,21	54,95	62,69	70,43	70,43	
60	Persentase ketersediaan data gender dan anak	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
61	Persentase Kelurahan Layak Anak	persen	20	20	20	30	40	50	60	60	
62	Persentase penyelesaian kasus pengaduan kekerasan terhadap anak	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Pangan</b>											
63	Tingkat ketersediaan energi	KKL/cap/hari	3.500,28	3.605	3.713,15	3.830,15	3.945	4.063,35	4.185,25	4.185,25	
64	Tingkat ketersediaan protein	Gram/cap/hari	83,35	85,85	88,42	93,57	101,37	111,98	125,63	125,63	
65	Persentase kawasan rawan pangan yang tertangani	persen	33,33	33,33	50	66,67	83,33	100	100	100	
66	Persentase pangan segar yang memenuhi standar aman	persen	80	80	82,50	85	87,50	90	95	95	
<b>Pertanian</b>											
67	Tingkat tertib administrasi pertanahan	persen	84,52%	86,52%	88,53%	90,54	92,55	94,55	96,56	96,56	
<b>Lingkungan Hidup</b>											
68	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berwawasan lingkungan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
69	Persentase pengurangan luas kawasan tercemar	persen	0	0	9,69	19,39	29,08	38,77	42,47	42,47	
70	Persentase luas RTH publik	persen	2,48	4,18	5,88	7,58	9,28	10,98	12,05	12,05	
71	Persentase Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang disimpan sementara	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
72	Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap dokumen Persetujuan Lingkungan	persen	52	100	100	100	100	100	100	100	
73	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif	persen	40	45	50	53	56	57	60	60	
74	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
75	Persentase penanganan sampah	persen	86,67	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	
76	Persentase pengurangan sampah	persen	5,32	7,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
77	Persentase penduduk yang memiliki KTP	persen'	84	85	86	87	89	91	93	93	
78	Persentase anak memiliki KIA	persen'	84	85	86	87	90	92	95	95	
79	Persentase keluarga memiliki KK	persen'	84	85	86	87	90	92	95	95	
80	Persentase penduduk yang memiliki buku nikah dan akte perkawinan	persen'	83	84,00	86,00	88,00	90,00	95,00	98,00	98,00	
81	Nilai kepuasan layanan pemanfaatan data kependudukan	nilai	79	80,50	82	84	85	86	87	87	
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>											
82	Age Spesifik Fertility Rate (ASFR)	persen	30	28	26	24	22	20	18	18	
83	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contracepsi Prevalence Rate/m. CPR)	persen	78,31	78,31	78,40	78,50	78,60	78,70	78,80	78,80	
84	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	10,16	10,16	9,60	9,30	9,00	9,70	9,40	9,40	
85	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	persen	29,42	29,42	30	31	32	33	34	34	
86	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	persen	15,51	26,48	15,00	14,34	13,82	13,27	12,74	12,74	
<b>Perhubungan</b>											
87	Rasio Konektivitas Kota	Nilai	0,08	0,08	0,15	0,15	0,23	0,31	0,38	0,38	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
88	Rasio Waktu Tempuh	Nilai	1,75	1,75	1,75	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	
89	Rasio fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan	Nilai	2	2	2	1,7	1,5	1,5	1	1	
<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
90	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	94	95	96	97	98	99	100	100	
91	Nilai Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Nilai	n/a	3,9	3,91	3,92	3,93	3,94	3,95	3,95	
92	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,55	
93	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	n/a	3,5	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,55	
94	Nilai Aspek Penyelenggara SPBE	Nilai	n/a	3,5	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,55	
95	Nilai Aspek Penerapan Manajemen SPBE	Nilai	n/a	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,05	
96	Nilai Aspek Audit TIK	Nilai	n/a	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,05	
97	Nilai Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25	3,25	
98	Nilai Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai	n/a	4,33	4,34	4,35	4,36	4,37	4,38	4,38	
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>											
99	Persentase koperasi cukup sehat	persen	n/a	56	65	75	85	90	94	94	
100	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi	persen	10	15	20	30	35	40	45	45	
101	Persentase usaha mikro yang naik kelas	persen	n/a	n/a	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
102	Persentase pertumbuhan omzet per UMKM	persen	n/a	n/a	2,40	4,80	9,60	12,00	14,00	14,00	
<b>Penanaman Modal</b>											
103	Persentase investor yang merealisasikan investasinya di Kota Mataram	persen	70	75	77	82	86	88	90	90	
104	Persentase investor yang berinvestasi di sektor-sektor ekonomi unggulan	persen	41	41	43	47	50	55	60	60	
105	Indeks Kemudahan Ijin Berusaha	persen	84,71	85,13	85,81	86,50	87,19	87,89	88,59	88,59	
106	Persentase realisasi investasi pada sektor ekonomi unggulan	persen	8	10	20	30	40	50	60	60	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
107	Tingkat validitas data dan informasi penanaman modal	persen	93	95	96	97	98	99	100	100	
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>										
108	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	persen	5	10	13	13	13	13	13	65	
109	Perolehan Prestasi Olahraga (tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional)	medali	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	12 (Emas: 5, Perak: 6, Perunggu: 1)	15 (Emas: 6, Perak: 7, Perunggu: 2)	18 (Emas: 7, Perak: 8, Perunggu: 3)	21 (Emas: 8, Perak: 9, Perunggu: 4)	24 (Emas: 9, Perak: 10, Perunggu: 5)	114 (Emas: 45, Perak: 52, Perunggu: 17)	
110	Persentase siswa/siswi yang mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional	persen	1	2	3	3	3	3	3	15	
	<b>Statistik</b>										
111	Persentase data sektoral terpenuhi	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100	
	<b>Persandian</b>										
112	Jumlah Sistem Elektronik yang tersertifikasi verifikasi BSSN berdasarkan Indeks KAMI	Sistem Elektronik	NA	0	2	4	6	8	10	10	
	<b>Kebudayaan</b>										
113	Persentase obyek pemajuan budaya yang dikembangkan	persen	4,76	4,76	7,14	9,52	11,90	14,29	16,67	16,67	
	<b>Perpustakaan</b>										
114	Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	orang	12.739	6.319	7.000	8.000	10.000	12.000	13.000	50.000	
115	Nilai akreditasi perpustakaan kota	Nilai	60	65	67	68	70	80	90	90	
	<b>Kearsipan</b>										
116	Persentase OPD yang memiliki SDM arsiparis berkompentensi	persen	42	43	44	45	46	47	48	48	
117	Persentase arsip dalam kondisi terawat dengan baik	persen	75,66	78	80,59	82,57	84,54	86,51	88,48	88,48	
	<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>										
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
118	Pertumbuhan nilai tambah perikanan tangkap	persen	15	17,5	25	35	45	55	55	55	
119	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya	persen	12,5	13,00	13,5	14,00	14,5	15,00	20,00	20,00	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
120	Pertumbuhan Nilai tambah hasil perikanan yang diolah / dipasarkan	persen	18	18,5	19,00	19,5	20,00	23,00	25,00	25,00
	<b>Pariwisata</b>									
121	Rata-Rata Lama Tinggal	hari	2	1,5	3	3	3	3	3	3
122	Pertumbuhan Angka Kunjungan Wisatawan	persen	-72,66	-27,30	0,67	1,34	2,01	2,68	3,35	3,35
123	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	persen	10,75	11,25	15,6	20	25,5	30,75	45,5	45,5
124	Pertumbuhan omzet pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	persen	-67,25	-32,5	0,75	1,5	2,35	3,10	3,85	3,85
	<b>Pertanian</b>									
125	Indeks Penyediaan Sarana Pertanian	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
126	Indeks Penyediaan Prasarana Pertanian	persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	100	100
127	Pertumbuhan produksi peternakan yang ASUH	persen	2,02	2,57	3,12	3,67	4,22	4,77	5,00	5,00
128	Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Rp.	82.324.285.714	84.094.257.857	85.902.284.401	87.749.183.516	89.635.790.961	91.562.960.467	93.531.564.117	93.531.564.117
129	Persentase Kelompok Tani Mandiri	%	3,7	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,4
	<b>Perdagangan</b>									
130	Tingkat Ketersediaan Data Sektor Perdagangan	persen	n/a	25	40	50	60	80	100	100
131	Indeks Sarana Distribusi Perdagangan	persen	5,5	10	30	50	75	80	100	100
132	Persentase rata-rata peningkatan harga Barang Pokok dan Barang Penting	persen	2,56	2,5	2,3	2,00	1,7	1,5	1,25	1,25
133	Persentase produk unggulan daerah yang menjadi komoditas ekspor	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
134	Tingkat pemenuhan parameter daerah Tertib Ukur	persen	69	71	74	77	80	83	85	85
135	Tingkat Ketermanfaatan Produk Lokal	persen	n/a	n/a	20	40	60	80	100	100
	<b>Perindustrian</b>									
136	Persentase rata-rata peningkatan omzet usaha industri	persen	4,30	4,65	5,00	5,35	5,70	6,05	6,40	6,40
	<b>PENDUKUNG URUSAN</b>									
	<b>Sekretariat Daerah</b>									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
137	Nilai LPPD	nilai	3,3	3,3	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
138	Persentase Rata-rata Capaian SPM	persen	n/a	65	60	70	80	90	100	100
139	Persentase BUMD dan BLUD dengan Kategori sehat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
140	Persentase Program Pembangunan yang Capaian Kinerja Berkategori Kinerja Tinggi	persen	57	86	100	100	100	100	100	100
141	Level Kematangan UKPBJ	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	level 4	Level 4	Level 5	Level 5	9 Variabel Mencapai Level 5
142	Persentase OPD yang memiliki capaian IKU diatas 80%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
143	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kepuasan Pelayanan berpredikat baik	persen	25	25	100	100	100	100	100	100
	<b>Sekretariat DPRD</b>									
144	Persentase program kerja DPRD terfasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>									
	<b>Perencanaan</b>									
145	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	87	90	100	100	100	100	100	100
146	Persentase Ketepatan waktu perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
147	Persentase Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
148	Persentase ketercapaian target tujuan dan sasaran daerah	%	77	80	80	85	90	95	100	100
149	Persentase kesesuaian kaidah penyusunan dokumen perencanaan tingkat OPD (Renstra dan Renja)	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
150	Persentase konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tingkat OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
151	Persentase Urusan Pemerintahan yang capaian kerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	86	90	100	100	100	100	100	100
	<b>Keuangan</b>									
152	Persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
153	Persentase kesesuaian pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan ketentuan yang berlaku	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
154	Persentase penyerapan APBD	persen	99,53	99,53	94,68	94,81	94,94	95,07	95,20	95,20
155	Persentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
156	Nilai solvabilitas layanan	nilai	5.476.662	5.476.662	6.351.731	6.020.883	6.494.280	6.831.079	7.129.765	7.129.765
157	Kemandirian Keuangan Daerah	persen	26,01	26,01	26	26	26	26	26	26
<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>										
158	Nilai Kualifikasi ASN	nilai	12,04	12,7	13,03	13,36	13,69	14,04	14,39	14,39
159	Nilai Kompetensi ASN	nilai	7,12	7,12	7,73	8,05	8,38	8,71	9,07	9,07
160	Nilai Kinerja ASN	nilai	24,47	24,47	25,71	26,35	27,01	27,68	28,39	28,39
161	Nilai Disiplin ASN	nilai	5	5	5	5	5	5	5	5
162	Persentase penyelesaian pengajuan data kepegawaian/ administrasi kepegawaian tepat waktu	persen	90	95	100	100	100	100	100	100
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
163	Persentase Hasil Kelitbangan yang digunakan	persen	93	93	100	100	100	100	100	100
164	Jumlah inovasi daerah yang berkualitas	unit	N/A	27	25	25	25	25	25	125
<b>Pengawasan</b>										
165	Persentase OPD dengan Katagori SAKIP Sangat Baik	persen	74,36	74,50	75	76	77	78	81	81
166	Persentase rekomendasi temuan internal yang terselesaikan	persen	76,00	78,60	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
167	Persentase rekomendasi temuan eksternal yang terselesaikan	persen	91,00	92,00	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00
168	Persentase OPD dengan Nilai RB Unit Baik (Hanya Nilai Pengungkit)	persen	50	60	70	80	90	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	
169	Persentase Elemen Kapabilitas APIP yang memenuhi level 3 berdasarkan self assesment	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
170	Persentase OPD yang sudah penilaian mandiri dan di QA oleh APIP	persen	26	26	26	30	34	38	42	42
171	Persentase capaian OPD yang memenuhi dokumen indikator MCP KPK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
172	Persentase OPD yang capaian rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan kategori baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Kewilayahan</b>										
173	Skor Komponen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	nilai	NA	NA	70,17	75,00	77,00	79,17	81,42	81,42
174	IKM Kecamatan	nilai	NA	NA	76,17	78,01	79,92	81,67	84,17	84,17
175	IKM Kelurahan	nilai	NA	NA	69,34	73,00	77,00	80,67	84,34	84,34
176	Persentase kelurahan berpredikat swasembada	persen	NA	NA	17,75	23,47	36,22	41,93	54,68	54,68
177	Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang	persen	NA	NA	26,09	38,84	50,87	47,09	70,66	70,66
178	Persentase penyelesaian permasalahan tantribumlinmas di kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
179	Persentase penyelesaian konflik sosial di kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Pemerintahan Umum</b>										
180	Persentase potensi kasus pelanggaran ideologi Pancasila yang dapat dicegah	persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
181	Persentase potensi konflik politik yang dapat dicegah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
182	Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam proses demokrasi.	persen	n/a	n/a	80,00	83	86	89	92	92
	Persentase Ormas yang aktif dan taat pada peraturan	persen	n/a	n/a	32,47	43,29	54,11	64,94	77,92	77,92



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Proyeksi	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
183	perundang-undangan										
184	Persentase potensi konflik antar umat beragama yang dapat dicegah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
185	Persentase konflik sosial yang tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>											
186	Indeks Keamanan Manusia	nilai	3,7	3,7	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5
187	Indeks Inovasi Daerah	nilai	1.944	60	65	70	75	80	85	85	85
188	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	57,05	57,21	57,37	57,52	57,68	57,84	57,99	57,99	57,99
189	Indeks Infrastruktur Wilayah	persen	59,24	60,24	61,24	62,24	63,24	64,24	65,24	65,24	65,24
190	Nilai Indeks SPBE	Nilai	n/a	3,56	3,56	3,57	3,58	3,59	3,60	3,60	3,60
191	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## Bab 9

# PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota Mataram, disusun melalui pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Mataram; *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses Pendampingan dengan Para Pakar, Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD)/Diskusi Tematik, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau yang dikenal dengan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM); serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun sebagai wujud komitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Kota Mataram, pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 menjadi tanggungjawab bersama di antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan dengan berikhtiar secara **Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri**.

Dengan dukungan dan peran serta pemangku kepentingan pembangunan di Kota Mataram, keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas yang akumulasinya adalah Mewujudkan **MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI**.

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH